PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4697);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;

22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Juni 2018

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 31

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... BAB I - 1

1.1.1 Proses Penyusunan ..... BAB I - 2

1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan ..... BAB I - 6

1.2 Landasan Hukum..... BAB I - 8

1.3 Hubungan Antar Dokumen..... BAB I - 9

1.3.1 RPJM Nasional..... BAB I - 10

1.3.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019..... BAB I - 11

1.3.3 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah ..... BAB I - 11

1.3.4 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031..... BAB I - 19

1.3.5 RPJMD Kota Magelang.....BAB I - 19

1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral..... BAB I - 21

1.3.7 Renja – OPD..... BAB I - 21

1.4 Maksud dan Tujuan..... BAB I - 22

1.4.1 Maksud..... BAB I - 22

1.4.2 Tujuan..... BAB I - 22

1.5 Sistematika RKPD..... BAB I - 22

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah..... BAB II - 1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... BAB II - 1

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah..... BAB II - 1

2.1.1.2 Topografi..... BAB II - 3

2.1.1.3 Geologi..... BAB II - 4

2.1.1.4 Hidrologi..... BAB II - 5

2.1.1.5 Klimatologi..... BAB II - 5

2.1.1.6 Penggunaan Lahan..... BAB II - 6

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah.....BAB II - 8

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana..... BAB II - 13

2.1.1.9 Aspek Demografi……..BAB II - 14
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat……BAB II - 20
2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)……BAB II - 20
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial……BAB II - 29
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Agama…… BAB II - 35
2.1.3 Aspek Layanan Umum…… BAB II - 41
2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib……BAB II - 41
2.1.3.2 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan…… BAB II - 121
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah…… BAB II - 132
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah…… BAB II - 133
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastuktur…… BAB II - 142
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi…… BAB II - 156
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia…… BAB II - 159
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan - Realisasi RPJMD…… BAB II - 161
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah……BAB II - 186
2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar…….. BAB II - 186
2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar…… BAB II - 189
2.4 Isu Strategis ……..BAB II - 201

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

3.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018……BAB III - 1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional …… BAB III - 1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah …… BAB III - 3
3.1.3 Deskripsi Umum Prediksi Perekonomian Kota Magelang …… BAB III - 3
3.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2019……..BAB III - 6
3.2.1 Tantangan Perekonomian Kota Magelang 2018…… BAB III - 6
3.2.2 Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2019…… BAB III - 7
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah……..BAB III - 7
3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan…… BAB III - 10
3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah……..BAB III - 11

3.3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah..... BAB III - 24
3.3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... BAB III - 29

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah BAB IV - 1
4.1.1 Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021..... BAB IV - 1
4.1.2 Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021..... BAB IV - 2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021..... BAB IV - 5
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019..... BAB IV - 27
4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2019..... BAB IV - 27
4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019..... BAB IV - 29
4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang..... BAB IV - 144
4.3.1 Sustainable Development Goals (SDGs)..... BAB IV - 144
4.3.2 Pendekatan Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs)..... BAB IV - 144
4.4 Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang..... BAB IV - 147
4.4.1 Arah Pengembangan Eksternal Wilayah..... BAB IV - 147
4.4.2 Arah Pengembangan Internal Wilayah..... BAB IV - 148
4.4.2.1 Bagian Wilayah Kota I (BWK I)..... BAB IV - 150
4.4.2.2 Bagian Wilayah Kota II (BWK II)..... BAB IV - 152
4.4.2.3 Bagian Wilayah Kota III (BWK III)..... BAB IV - 154
4.4.2.4 Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV)..... BAB IV - 155
4.4.2.5 Bagian Wilayah Kota V (BWK V)..... BAB IV - 157
4.5 Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... BAB IV - 158
4.6 Inovasi Pembangunan..... BAB IV - 159

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kategorisasi Rencana Program Prioritas..... BAB V - 1
5.1.1 Program Prioritas I..... BAB V - 1
5.1.1.1 Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2019..... BAB V - 1
5.1.1.2 Akomodasi Hasil Musrenbang..... BAB V - 4

5.1.1.3 Prioritas Program Hasil FGD……..BAB V - 10
5.1.1.4 Prioritas Program Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD……BAB V - 30
5.1.2 Program Prioritas II……BAB V - 77
5.1.3 Program Prioritas III……BAB V - 77

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH……BAB VI-1

BAB VII PENUTUP

6.1 Penutup……BAB VII - 1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah secara proses dan hasil seharusnya mampu memberikan dampak pada sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien, hasil pelaksanaan pembangunan ini sudah semestinya tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah antara lain adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui untuk mendapatkan dampak yang signifikan secara publik yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Merujuk pada regulasi teknis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka Menengah daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD menjadi pijakan formal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mengacu seluruh regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009, yang dijabatkan dalam pentahapan dokumen perencanan pembangunan daerah Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005, RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015, RPJMD Kota Magelang Tahap III Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang No 1 Tahun 2016 .

1.1.1 Proses Penyusunan

RKPD Kota Magelang Tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga perencanaan tahap III RPJMD 2016-2021. Proses penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui tahapan yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tahapan penyusunan dilaksanakan secara runtut dalam 6 (enam) tahapan yaitu : persiapan penyusunan RKPD;penyusunan rancangan awal RKPD; penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019, Tim penyusun terdiri dari personil lintas OPD di jajaran OPD yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019. Hal ini merupakan terobosan teknokratis yang cukup memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim.

Penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif maupun politis, termasuk mengakomodir proses telaahan Pokok pokok pikiran DPRD.

Untuk menjamin perbaikan berkesinambungan (continues improvement) baik aspek kualitas dan rentang cakup agar substansi RKPD Kota Magelang semakin efektif, maka berbagai terobosan dan inovasi baik inovasi

proses perencanaan maupun inovasi pada tataran kebijakan telah dilakukan dengan melibatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/top down maupun politis.

Tahapan selanjutnya adalah Merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Untuk menjaga harmoni dan konektsitas perencanaan perlu melakukan evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Dengan memperhatikan relevansinya kebijakan, maka sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Sementara itu kebijakan lainnya juag dipertimbangkan memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2019, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

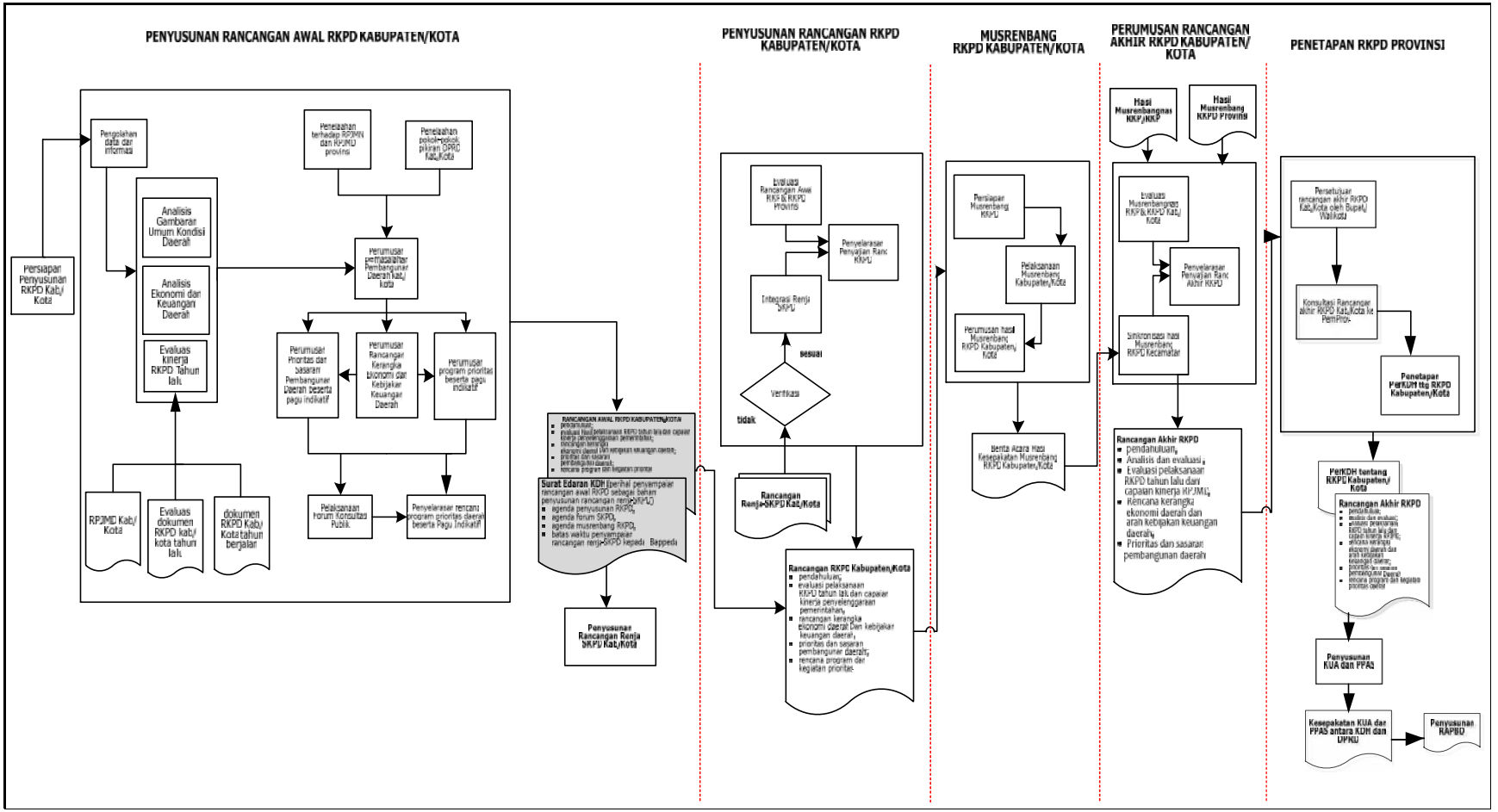
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada substansi. Salah satu pendekatan yang berorientasi pada proses adalah pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan,

dan tingkat Kota, dengan hasil-hasilnya yang kemudian diselaraskan melalui tahapan forum konsultasi publik, FGD, dan forum OPD.

Tahapan pelaksanaan Forum OPD dilaksankaan dengan mengkombinasikan hasil Musrenbang Kecamatan sekaligus mengkonfirmasi hasil FGD yang diakomodir oleh OPD terkait sesuai Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan Berita Acara Hasil FGD menjadi langkah selanjutnya yang ditempuh. Setelah itu dilakukan Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap OPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja OPD pada OPD terkait.

Dokumen rancangan RKPD ini dijadikan sebagai bahan dalam Musrenbang tingkat Kota Magelang yang merupakan forum konfirmasi atas keseluruhan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil rancangan Renja OPD yang telah terverifikasi.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kemudian dilakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD dengan memperhatikan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional dan hasil konsultasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penyelarasan Akhir ini kemudian dilakukan konsultasi kepada TAPD sebelum ditetapkan melalui Peraturan Walikota. Proses perumusan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:



Gambar 1-1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Proses penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2019 dilaksanakan sesuai regulasi dan disusun dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun mengimplementasikan, dan mempertanggungjawabkannya.

Dalam rentang kendali untuk memastikan bahwa output hasil penyusunan yang berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2019 berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut :

Tabel 1-1

Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

PRINSIP	INDIKATOR
KETERKAITAN	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang 2019 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD
	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
KONSISTENSI	Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dengan isu strategis
	Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan pagu anggaran OPD
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan program/kegiatan OPD
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN	Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2019
	Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah Tahun 2019
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi
KETERUKURAN	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2019 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) – berdasarkan matrik
	Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya
INOVASI KEBIJAKAN	Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik- tematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup Kota Magelang

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada substansi. Detil konfigurasi orientasi pendekatan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1-2

Pendekatan Berorientasi pada Proses Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

KRITERIA	PARAMETER
DARI BAWAH (BOTTOM-UP)	1. Usulan dari Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019
	2. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 melalui forum konsultasi publik dan FGD
DARI ATAS (TOP-DOWN)	3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2019
	4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019
TEKNOKRATIK	5. dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
	6. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019
	7. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kota Magelang Tahun 2019
PARTISIPATIF	8. dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
POLITIK	9. dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
	10. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kota Magelang dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019
	11. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

Sedangkan dalam pendekatan substansi, RKPD Kota Magelang Tahun 2019 memperhatikan hal sebagai berikut :

Tabel 1-3

Pendekatan Susbstansi RKPD Kota Magelang Tahun 2019

PENDEKATAN	PARAMETER
HOLISTIK-TEMATIK	dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
INTEGRATIF	menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
SPASIAL	dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas

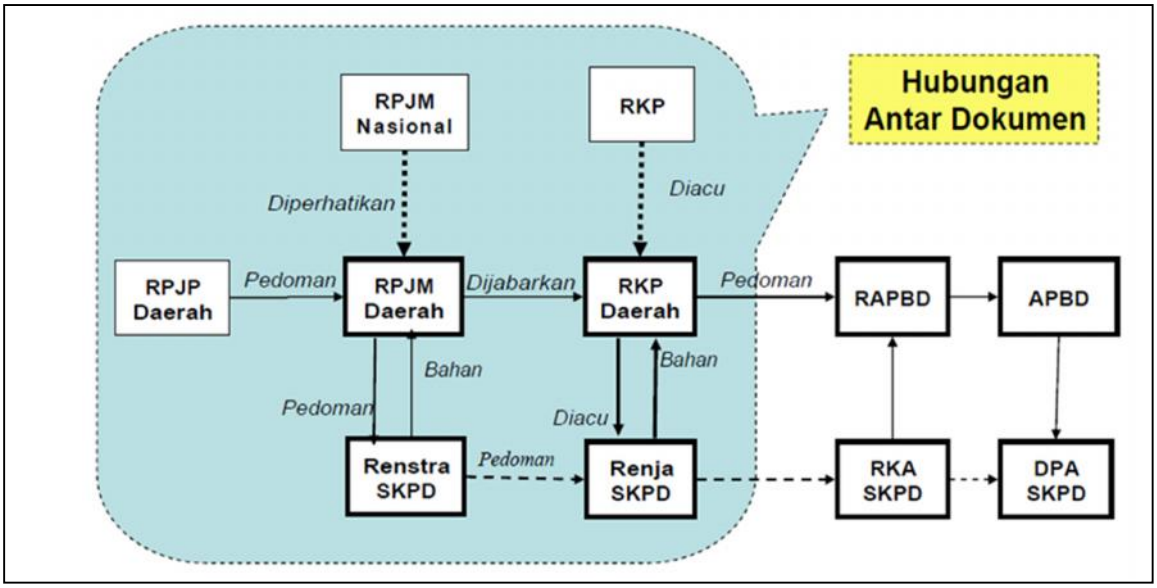
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/019604 Tanggal 27 Desember 2017 perihal Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2019

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam melaksanakan core businessnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kota yang berpedoman pada RPJMD Kota tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kota Magelang tahun 2019 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, mengacu pada RPJMD Provinsi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2019, serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

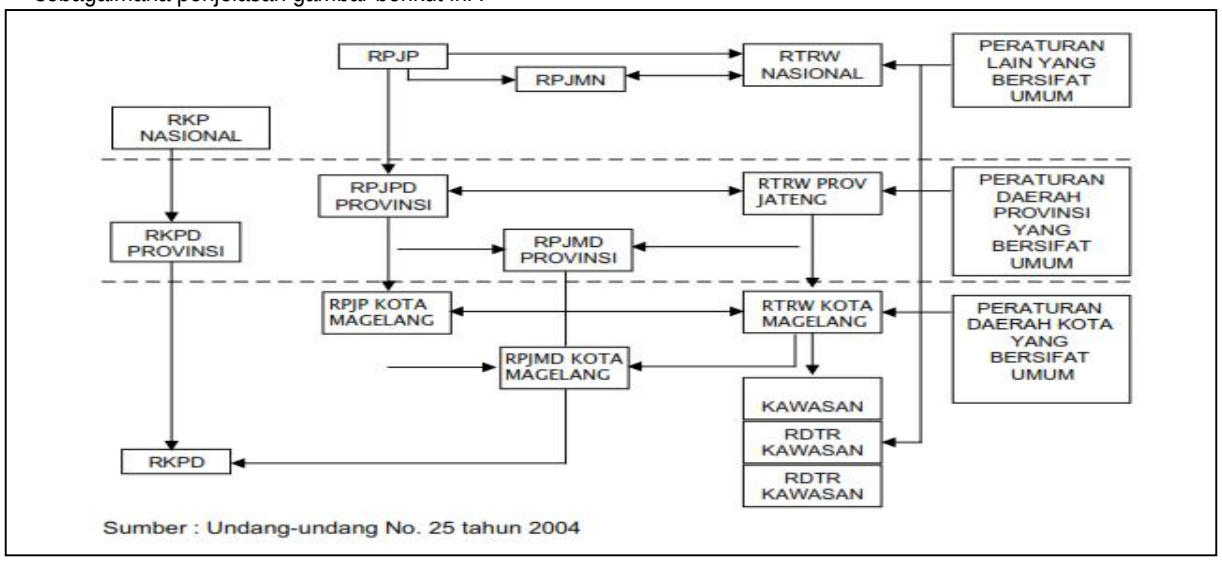
Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2019 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang), yaitu sebagai berikut:



Sumber : UU No 25 Tahun 2004

Gambar 1-2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya

Selain itu penyusunan RPKD Kota Magelang tidak terlepas dari dokumen tata ruang wilayah sebagaimana penjelasan gambar berikut ini :



Gambar 1-3 Kedudukan Dokumen RKPD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial

Secara lengkap penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1.3.1 RPJM Nasional

Rujukan penting lainnya adalah RPJM Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: (i) Buku I dengan judul: ”Agenda

Pembangunan Nasional", (ii) Buku II dengan judul: "Agenda Pembangunan Bidang", dan (iii) Buku III dengan judul: "Agenda Pembangunan Wilayah".

Sebagai penjabaran normatif perencanaan tahun ke tiga RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, dan dengan demikian mengacu pada agenda agenda prioritas nasional, agenda prioritas bidang serta agenda pembangunan kewilayahan, diharapkan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 akan dapat ikut mewarnai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

1.3.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

RKPD Kota Magelang Tahun 2019 juga merujuk pada RKP Tahun 2019. Hal ini merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan sinergitas kebijakan dan dukungan pembangunan daerah Kota Magelang dengan kebijakan nasional. Pemerintah Kota Magelang berupaya semaksimal mungkin agar target target pembangunan nasional dapat tercapai dengan kontribusi yang diberikan dari pembangunan di Kota Magelang Tahun 2019.

1.3.3 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dokumen rujukan lain adalah RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/019604 Tanggal 27 Desember 2017 perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019, diharapkan setiap daerah agar Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.3.1 Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2018, guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/ kota, maka untuk penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada arah kebijakan pembangunan provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi serta memperhatikan capaian dan kendala pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

4. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur.
5. Meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja/ money follow programme priority yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
6. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis yang meliputi kemiskinan, pengangguran, kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, daya saing perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, infrastruktur, kesenjangan wilayah dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
7. Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program/kegiatan dengan mendasarkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai upaya terobosan dalam penanganan isu strategis pembangunan daerah.
8. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah.
9. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber Non Pemerintah (diantaranya kerjasama/ kemitraan/ keperantaraan dengan pihak swasta, masyarakat, Perguruan Tinggi atau lembaga pendanaan lainnya) untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
11. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh stakeholder termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota agar meneruskan dan mensosialisasikan Surat Edaran Gubernur ini pada unsur Pemerintahan di bawahnya (Kecamatan, Desa dan Kelurahan).

1.3.3.2 Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah

1.3.3.2.1 Isu Strategis Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Tengah, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

   Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019, mengingat sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 persentase kemiskinan Jawa Tengah masih cukup tinggi sebesar 13,01% dan masih di atas rata-rata nasional sebesar 10,64%, akan tetapi tren penurunan kemiskinan Jawa Tengah lebih baik (0,39%/tahun dalam periode 2013-2017) dibanding tren penurunan tingkat kemiskinan Nasional (0,26%/tahun dalam periode 2013-2017).

   Apabila dilihat dari posisi relatif tingkat kemiskinan, terdapat 15 kab dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi dan Nasional yang didominasi masyarakat miskin di wilayah perdesaan dengan pekerjaan utama di sektor pertanian. Perlu langkah-langkah percepatan dan strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kompetensi dan ketrampilan petani, penciptaan nilai tambah hasil pertanian dengan hilirisasi/industrialisasi sektor pertanian dari on farm oriented menuju off farm oriented berbasis teknologi tepat

guna dan potensi keunggulan lokal desa (local wisdom), mendorong terciptanya corporate farming dan mix farming, menciptakan berbagai inovasi di sektor pertanian dan pendampingan petani secara berkelanjutan.

2. Daya saing ekonomi

   Perekonomian Jawa Tengah tahun 2016 tumbuh sebesar 5,28 % dan sampai dengan triwulan III tahun 2017 perekonomian Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 5,13%. Industri yang tumbuh masih didominasi oleh industri padat karya dengan tingkat serapan buruh berpendidikan dan ketrampilan rendah, serta mengolah bahan baku impor dan barang modal impor; Investasi yang mendasarkan ketersediaan buruh dengan upah kerja yang murah masih mendominasi, investasi pada sektor jasa, pariwisata dan pengolahan atas sumber daya alam serta berteknologi tinggi masih rendah, sektor produksi masih didominasi pada skala UMKM dengan kondisi kurang efisien, lemah pada akses permodalan dan daya saing produk UMKM di pasar; kesenjangan wilayah dan antar kelompok yang masih belum baik.

3. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

   IPM Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar 69,98 Angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 70,18. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang terbesar adalah lulusan SD. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.

   Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangannya selain terkait dengan kualitas SDM juga terkait isu radikalisme, terorisme, dan ancaman NAPZA ancaman terbesarnya adalah penduduk usia produktif. Sehingga perlu upaya antisipasi melalui perkuatan mental dan spiritual masyarakat

4. Kedaulatan Pangan dan Energi

   Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tantangannya tidak hanya terkait dengan ketersediaan dan ketercukupan pangan utama, tetapi juga bagaimana meningkatan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, agar tercukupi kebutuhan gizi masyarakat. Tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan.

   Penyediaan energi untuk industri, perlu penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi dan perlunya pemerataan ketersediaan listrik utamanya untuk Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah

5. Kesenjangan Wilayah

   Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 di tahun 2016. Daerah Kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah dan Kabupaten yang berada di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur dan Jawa Barat relatif kurang maju dibanding wilayah Pantura dan Pusat Pemerintahan di Semarang dan Pusat pertumbuhan Surakarta. Untuk itu membuka akses antar

wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai. Selain itu tantangan lain adalah penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik.

6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

   Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang cukup penting. Karena isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini sudah menjadi isu global dan nasional, terutama terkait dengan isu perubahan iklim. Selain itu, kerusakan ekosistem pesisir dan laut perlu menjadi perhatian, untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan. Isu yang saat ini mencuat antara lain pencemaran lingkungan, pertambangan illegal dan dampaknya, kerusakan hutan dan lahan, konflik pengelolaan hutan, krisis air, sekaligus bencana kekeringan, dan lainnya.

7. Tata kelola Pemerintahan

   Tuntutan peningkatan kualitas profesionalisme dan pengembangan kompetensi SDM aparatur, sistem informasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang terintegrasi dan paperless, peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam rangka good governance dan clean goverment, peningkatan ketahanan ideologi Pancasila, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorism, hate speech dan hoax news dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah

1.3.3.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 ditujukan untuk "Pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah berlandaskan pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan", dengan prioritas meliputi :

1. Penanggulan kemiskinan, dengan fokus pada :
   a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan : akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.
   b. Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
   c. Perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.

2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada :
   a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (corporate farming),

b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan.
c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM.
e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui : perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.
f. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.

3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, dengan fokus pada :
   a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi.
   b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan).
   c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui : penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada :
    a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui : pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan Minerba dengan reklamasi lahan bekas pertambangan, perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
    b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi penganggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
5. Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada :
    a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui: peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajeman dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu pangan yang berkualitas serta memenuhi standar, sertifikat aman dan layak pasar; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.
    b. Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; Pengembangan Listrik Murah dan Hemat; Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya.
6. Kesenjangan Wilayah, dengan fokus pada :
    a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan yang menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
    b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
    c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam RTRWP dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula PKL menjadi PKWp.

d. Mengoptimalkan potensi kelautan dengan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

7. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada :
   a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
   b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
   c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya clean and clear government dan menerapkan "keperantaraan dan enterpreuneur" dalam tata kelola pemerintahan.
   d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

1.3.3.2.3 Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Skenario sasaran makro pembangunan Jawa Tengah tahun 2019 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi diharapkan mencapai angka 5,4% dengan rentang nilai antara 5,2 – 5,6%. Kebijakan ekonomi di Jawa Tengah difokuskan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan dapat memberikan pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan membangun dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumberdaya lokal di daerah melalui : Peningkatan infrastruktur pendukung sektor pertanian, kelautan dan perikanan; Optimalisasi pengelolaan Sub Terminal Agribisnis (STA); Pengembangan dan revitalisasi pasar desa dan kab./kota; Pengembangan berbagai kawasan industri yang didukung realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja; Pengembangan destinasi pariwisata potensial kab./kota. Hal tersebut juga perlu didukung dengan fasilitasi jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui kerjasama antar daerah kab/kota di provinsi dan antar daerah provinsi di Indonesia. Di samping itu juga dioptimalkan pendorongan ekspor pada produk unggulan daerah yang berdaya saing, penumbuhan sektor ekonomi riil dan menjaga tingkat pendapatan masyarakat.
2. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 12,01%, yang akan diupayakan melalui sinergitas dan keperantaraan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat dengan prioritas dan fokus penanganan pada wilayah kabupaten dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dengan didukung Basis Data Terpadu dan Data Sektoral yang komprehensif.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi sebesar 4,52%, dengan tantangan yang perlu diperhatikan adalah bonus demografi yang harus diimbangi dengan kualitas SDM utamanya usia produktif dan belum optimalnya serapan tenaga kerja. Kontribusi dari masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.
4. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai sebesar 71,60 melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

1.3.3.2.4 Pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah serta sebagai upaya pemerataan pembangunan, maka OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan program pembangunan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya pengurangan kemiskinan mendasarkan basis data terpadu utamanya di 15 Kabupaten (Blora, Grobogan, Purworejo, Demak, Cilacap, Sragen, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen dan Wonosobo).
2) Pembangunan kewilayahan berpedoman pada potensi serta rencana tata ruang dan wilayah, antara lain :
   a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi :
      - Pengembangan kawasan agropolitan : Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Brebes, Banyumas; Girisuka (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar); Semar Boyong (Semarang, Boyolali, Magelang); Sobo Banjar (Wonosobo, Banjarnegara).
      - Kawasan Industri terpadu : Rembang, Demak – Semarang - Kendal, Brebes, Cilacap, Kebumen.
      - Pengembangan industri kerajinan berbasis potensi lokal.
   b. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya: Kawasan Keraton Surakarta, Masjid Agung Demak, Candi Gedong Songo, Candi Dieng dan Candi Sukuh - Cetho.
   c. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup : Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, Dataran Tinggi Dieng, Rawa Pening, Sindoro - Sumbing, Gunung Lawu dan Gunung Slamet.
   d. Peruntukan Pertambangan : Kawasan Majengan, Serayu - Pantai Selatan, Gunung Slamet, Sumbing - Sindoro - Sumbing, Merapi - Merbabu - Ungaran, Gunung Muria – Pantai Utara, Kawasan Rembang, Kendeng, Lawu, Pegunungan Selatan dan Serayu - Pantai Utara.
   e. Kawasan Peruntukan Wisata : Destinasi Pariwisata Nusakambangan - Baturraden dan sekitarnya, Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya, Solo -Sangiran dan sekitarnya, Borobudur - Dieng dan sekitarnya, Tegal -Pekalongan dan sekitarnya, Rembang - Blora dan sekitarnya.
   f. Pengembangan infrastruktur diarahkan guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas wilayah Utara – Selatan sesuai potensi wilayah.
3) Keterpaduan dan dukungan penanganan terhadap proyek strategis nasional di Jawa Tengah.
4) Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diprioritaskan diantaranya pada :
   a. Diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perkonomian dan mempercepat pencapaian program strategis Provinsi/Nasional serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.
   b. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan.
   c. Peningkatan ruas jalan perbatasan, ruas jalan yang mempunyai akses langsung atau merupakan jalur alternatif jalan nasional/provinsi, peningkatan aksesibilitas daerah terisolir dan kemiskinan tinggi, ruas jalan pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian, serta Pengembangan sistem transportasi massal pada daerah perkotaan.
   d. Pemenuhan peningkatan kualitas, kapasitas dan jangkauan pelayanan kesehatan berupa pembangunan/rehabilitasi puskesmas, rumah sakit dan sarpras kesehatan lainnya.

e. Peningkatan daya tarik/amenitas di obyek pariwisata unggulan dan pembangunan sarpras ekonomi kerakyatan berupa pasar tradisional.
f. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

5) Sinergitas kabupaten/kota dalam pencapaian skenario sasaran makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, khususnya untuk Kota Magelang diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,71%, angka kemiskinan pada posisi 8,55% serta Tingkat pengangguran terbuka dalam kisaran 4,7%

1.3.4 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi, salah satunya melalui pendekatan spasial. Oleh karena itu penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 secara konsisten diupayakan untuk memperhatikan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif, berwawasan lingkungan dengan ketaatan terhadap tata dan pola ruang. Dengan demikian pengendalian terhadap pelanggaran dan penggunaan lahan tertap terjaga. Pada akhirnya tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan tetap berwawasan lingkungan dan mampu mengurangi kesejangan antar wilayah di Kota Magelang.

1.3.5 RPJMD Kota Magelang

Tema Tahun perencanaan 2018 yang merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Magelang adalah Produktif Bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2018-2019 diasumsikan bahwa :

a. sudah terbentuk sistem basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana aksi daerah dan pengukuran kinerja terintegrasi.
b. sudah terbentuk kesediaan kerjasama kemitraan: dengan dunia usaha, media, forum warga masyarakat.

Sedangkan fokus prioritas tahap ini:

1) Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan:
   a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi,
   b. pendidikan,
   c. kesehatan
2) Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga.
3) Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.
4) Pelembagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.

5) Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
6) Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejarpencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
7) Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya.
2) Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
3) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencananaan dan penganggaran daerah.
4) Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat.
5) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.
6) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi.
7) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi.
8) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
9) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola asset.
10) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota.
11) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah.
12) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
13) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan.
14) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan.
15) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
16) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.
17) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
18) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender.
19) Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.
20) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipai resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.

Perbedaan arah kebijakan perencanaan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah pada tahapan aksi pencapaian kinerja sasaran. Tahun 2019 sudah mulai dilakukan eksekusi program kegiatan yang merupakan implementasi rencana aksi yang dihasilkan pada tahun 2018.

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2018 untuk diimplementasikan tahun 2019 adalah:

a. Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
b. Urusan pendidikan;
c. Urusan kesehatan
d. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. Urusan sosial;
g. Urusan penanaman modal;
h. Urusan komunikasi dan informatika;
i. Urusan perdagangan;
j. Urusan perindustrian;
k. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
l. Urusan kebudayaan;
m. Urusan pariwisata;

Sedangkan Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2018 untuk dilaksanakan tahun 2019 adalah:

a. Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
b. Program peningkatan daya saing daerah;
c. Program kota cerdas;
d. Program pemerintahan responsif dan partisipasif;
e. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
f. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
g. Program penguatan pertumbuhan ekonomi;
h. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
i. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 juga memperhatikan beberapa dokumen pembangunan sektoral baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Magelang. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di maksud antara lain : Masterplan Kota Sejuta Bunga, Blueprint Universal Design, Pencapaian SDGS, Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana dan Pedoman PUG di Jawa Tengah.

1.3.7 Renja – OPD

Di level OPD, dokumen Renja OPD di susun dalam basis tahunan. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2019 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk:

a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.
b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2019.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2017, prediksi 2018 dan proyeksi tahun 2019, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017 dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2018.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Magelang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Magelang merupakan Kota terkecil di wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah Kota Magelang 1.812 Ha (18,12 km2) dan secara administratif terbagi atas 3 kecamatan (Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan) dan 17 kelurahan yang rata-ratanya luas wilayah per kelurahan tidak lebih dari 2 km². Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kota Magelang mendapatan luasan wilayah terkait dengan perluasan batas wilayah Kota Magelang seluas 0.03 km2. Total luasan wilayah Kota Magelang saat ini 1.854 Ha (18,54 km2). Kedudukan Kota Magelang di Propinsi Jawa Tengah di gambarkan pada peta berikut :



Sumber : Dokumen Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Magelang, 2013

Gambar 2 - 1 Peta Kedudukan Kota Magelang terhadap Jawa Tengah

Secara geografis Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang dengan batas wilayah administrastif sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan desa Jambewangi, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang; sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

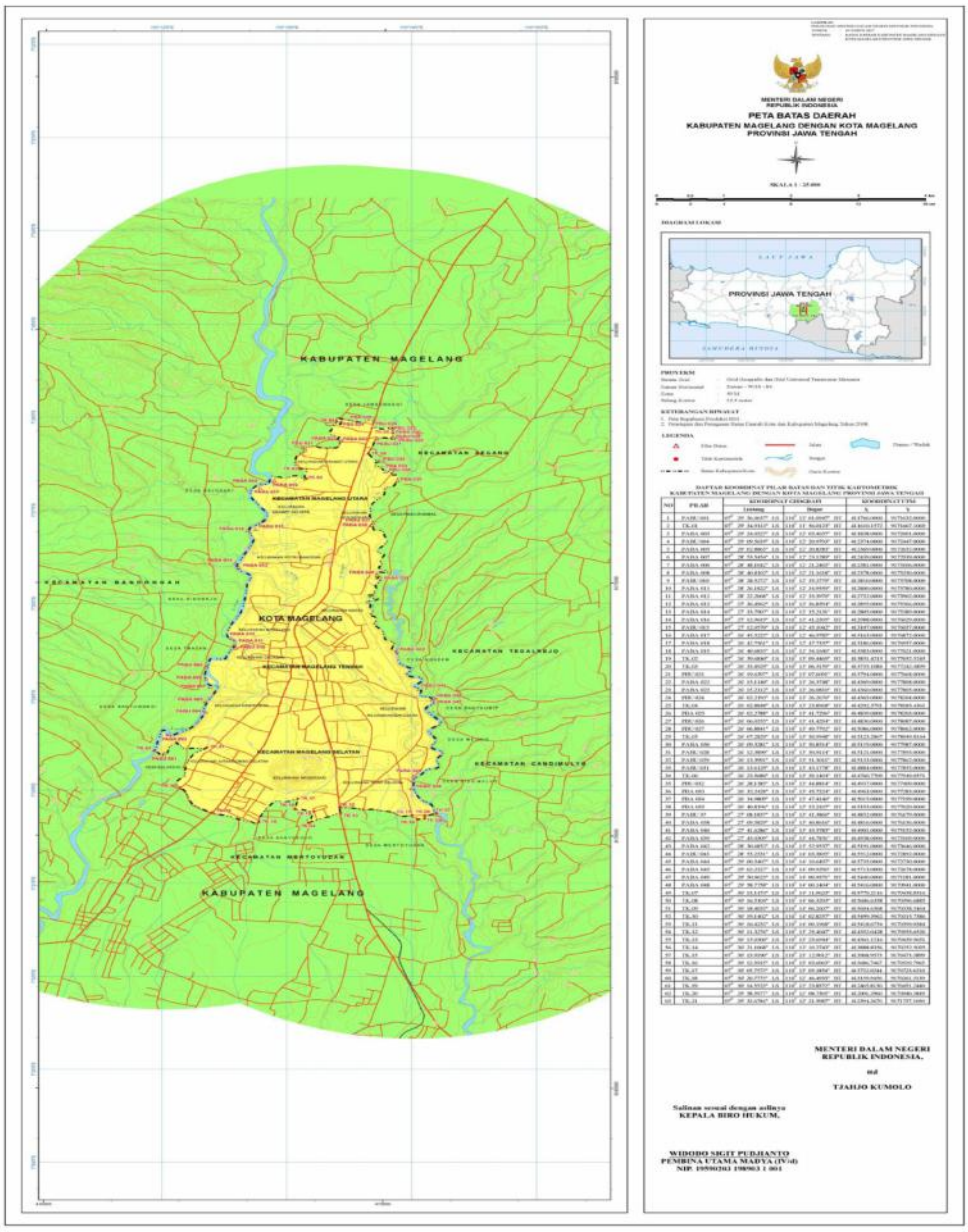
Posisi Kota Magelang yang strategis di jalur persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung dan pada persimpangan jalur wisata lokal dan regional antara Yogyakarta–Borobudur–Kopeng-Ketep Pass- dataran tinggi Dieng menjadikannya sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam katagori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Purwo-manggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi. Gambaran secara rinci luas tiap kecamatan/ kelurahan di Kota Magelang Tahun 2015, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2 - 1

Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (Km2)	Persentase (%)
01.	KEC. MAGELANG SELATAN	6,89	38,01
	1. Kel. Jurangombo Utara	0,58	3,17
	2. Kel. Jurangombo Selatan	2,26	12,49
	3. Kel. Magersari	1,38	7,60
	4. Kel. Tidar Utara	0,97	5,35
	5. Kel. Tidar Selatan	1,27	7,00
	6. Kel. Rejowinangun Selatan	0,43	2,39
02.	KEC. MAGELANG TENGAH	5,10	28,17
	1. Kel. Magelang	1,25	6,88
	2. Kel. Kemirirejo	0,88	4,86
	3. Kel. Cacaban	0,83	4,56
	4. Kel. Rejowinangun Utara	0,99	5,48
	5. Kel. Panjang	0,35	1,90
	6. Kel. Gelangan	0,81	4,49
03.	KEC. MAGELANG UTARA	6,13	33,82
	1. Kel. Wates	1,17	6,47
	2. Kel. Potrobangsan	1,30	7,17
	3. Kel. Kedungsari	1,33	7,36
	4. Kel. Kramat Utara	0,86	4,77
	5. Kel. Kramat Selatan	1,46	8,05
	JUMLAH	18,12	100,00

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.



Sumber: Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

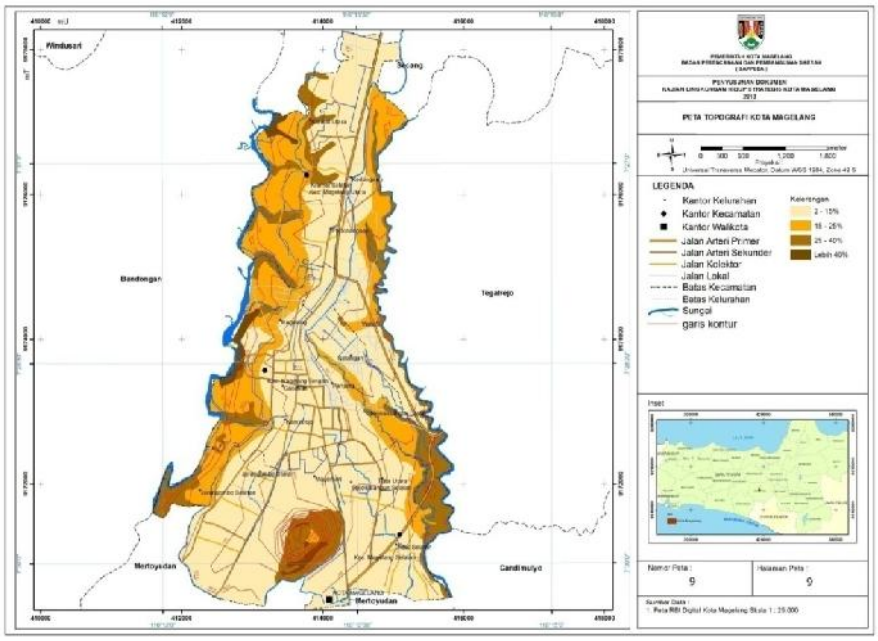
Gambar 2 - 2 Batas Wilayah Kota Magelang sesuai dengan Permendari 64 Tahun 2017

2.1.1.2 Topografi

Secara topografi dan fisiografis, Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang di kelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing, Pegunungan Gianti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Kemiringan topografi yang terjal berada di bagian barat (sepanjang Sungai Progo) dan di sebelah timur (di sekitar Sungai Elo) sampai dengan kemiringan 15-30%. Di sekitar daerah timur kompleks AKMIL ke Utara hingga daerah di sekitar RSJ Magelang, dengan kemiringan 2–5%.

Morfologi pendataran antar gunung api, medannya landai, berelief sedang-halus. Dilihat dari ketinggiannya, Kota Magelang berada di ketinggian antara 375–500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl. Keberadaan Gunung Tidar selain sebagai kawasan lindung dengan kemiringan hingga 30–40% ini berada di sebelah timur kompleks AKMIL, berfungsi sebagai paru-paru kota yang menjadikan iklim Kota Magelang selalu berhawa sejuk .

Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar.



Sumber : Dokumen Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Magelang, 2013

Gambar 2 - 3 Gambar Peta Topografi Kota Magelang

2.1.1.3 Geologi

Kondisi geologi Kota Magelang tidak bisa dilepaskan dari keberadaannya di tengah wilayah Kabupaten Magelang, dimana secara umum wilayah tersebut tersusun dari 4 formasi batuan, yaitu batuan sedimen, batuan gunung api ,batuan beku trobosan serta batuan endapan alluvial. Dalam klasifikasi tersebut, formasi batuan di Kota Magelang termasuk batuan gunung api, sehingga litologi yang menempati Kota Magelang sebagian besar batu pasir tufaan (lepas) dan breksi.

Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kwarter yang mempunyai sifat sangat poreous (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati nol (0). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5kg/ cm2 – 19 kg/ cm2. Ditinjau dari satuan morfologi, pendataran alluvium tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Tersusun oleh batuan hasil rombakan batuan yang lebih tua, yang bersifat lepas.

Umumnya berada pada ketinggian antara 250 – 350 m, berelief halus dengan kemiringan sebesar 3-8 %. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola Sum Meander.

Kewaspadaan pada resiko bencana terutama pada pembangunan yang dilakukan di daerah bantaran sungai dengan kelerengan curam adalah tanah longsor mengingat sebagian besar tanah berupa batuan pasir dan breksi/ konglomerat yang memiliki kelulusan air yang tinggi serta tingkat kelerengan alam yang cukup curam. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait pengaturan pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan mengingat porositas tanah yang cukup tinggi

2.1.1.4 Hidrologi

Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan dari air pemukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan air limbah dan air hujan. Potensi air hujan perlu dilestarikan dengan membuat sumur resapan. Sedangkan potensi air tanahnya juga tergantung pada pelestarian pemanfaatan air permukaan yaitu air hujan. Air tanah di Kota Magelang kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan aquifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dikembangkan (dipompa).

Untuk kebutuhan air bersih Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada sumber-sumber air yang ada di luar wilayah Kota Magelang yaitu dari mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan satu-satunya mata air yang berada di Kawasan Kota Magelang adalah Mata Air Tuk Pecah. Di kawasan Kota Magelang juga terdapat 2 (dua) saluran air yaitu: (i) Kali Bening (Kali Kota), dan (ii) Kali Progo Manggis. Berdasarkan data pemakaian air minum pada tahun 2016 sebesar 7.606.319 m3 . Apabila di bandingkan dengan data tahun 2015 sebesar 7.434.942 m3 maka terjadi kenaikan kebutuhan dari penggunaan air PDAM di Kota Magelang. Sementara data tahun 2017 penggunaan air PDAM sebanyak 7.434.942 liter/ tahun Apabila perkiraan kebutuhan air bersih perorangan adalah sebesar 60 liter/hari maka jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2017 kapasitas mata air yang tersedia masih mampu untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Magelang walaupun masih mengandalkan sumber air yang berasal dari kabupaten Magelang.

2.1.1.5 Klimatologi

Kota Magelang termasuk wilayah beriklim sejuk. Data klimatologi pada tahun 2016 menurut Badan Pengelolaan Sumber Daya Air, dalam kurun waktu Tahun 2016 total curah hujan sepanjang tahun sebanyak 257.85 mm, Jumlah ini relatif lebih tinggi apabila di bandingkan dengan data pada tahun 2015 sebanyak 181.99 mm. Berdasarkan data iklim rata-rata curah hujan bulanan di kawasan Kota Magelang dalam jangka waktu lima tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 2

Rata-Rata Curah Hujan Per Hari Kota Magelang (mm) Tahun 2012-semester 1 Tahun 2017

Bulan	2012	2013	2014	2015	2016	Semester 1 2017
01. Januari	22.58	19.04	16.61	16.92	6.86	29.21
02. Februari	23.44	18.63	22.05	27.76	20.09	19.57
03. Maret	24.69	22.00	19.21	22.09	16.66	26.00

Bulan	2012	2013	2014	2015	2016	Semester 1 2017
04. April	20.28	15.74	23.47	22.50	19.05	25.71
05. Mei	11.89	17.94	17.77	6.63	15.86	28.10
06. Juni	20.40	10.44	8.25	44.67	39.27	12.70
07. Juli	10.00	17.00	13.57	0.00	19.09	na
08. Agustus	0.00	0.00	5.40	0.00	25	na
09. September	0.00	2.00	2.33	0.00	28.89	na
10. Oktober	16.80	20.44	16.91	0.00	25.25	na
11. November	20.42	13.00	12.56	12.87	24.2	na
12. Desember	17.70	14.25	23.12	28.55	17.63	na
Jumlah	188.20	170.48	170.59	181.99	257.85	141.29
Rata-rata	15.68	14.21	14.22	15.17	21.49	23.55

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

Curah hujan dalam semester pertama tahun 2017, memiliki kecendurangan lebih tinggi apabila di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Rata – rata curah hujan dalam enam bulan pertama di tahun 2017 sebesar 23.55 mm/hari. Rata – rata ini lebih tinggi apabila di bangikan dengan tahun 2016, di mana rata – rata curah hujan per tahunnya sebesar 21.49 mm/hari. Curah hujan pada tahun 2016 lebih tinggi di bandingkan dengan tahun sebelumnya dan merupakan rata-rata curah hujan tertinggi dalam lima tahun terakhir ini. Curah hujan tertinggi pada semester pertama 2017 biasanya terjadi pada bulan – bulan tertentu seperti bulan Januari, Pebruari, Maret dan April, di mana hari hujannya sekitar 20an hari hujan.Hari hujan tertinggi terjadi di bulan Januari dan Pebruari sebanyak 24 hari hujan dan 23 hari hujan. Tingginya curah hujan pada bulan – bulan tertentu di sepanjang tahun 2016 membawa akibat seperti banjir di beberapa ruas jalan yang disebabkan karena resapan yang kurang, serta bencana yang di sebabkan karena adanya pohon yang tumbang tumbang dan bencana longsor.

Kondisi Topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi Kota Magelang serta posisi Kota Magelang yang dikelilingi oleh sungai dengan kontur wilayah yang curam dan memiliki kemiringan relatif tinggi sehingga Ke depan hal ini menjadi perhatian serta menjadi kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin timbul karena cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan seperti bencana longsor, banjir atau bencana lain seperti wabah penyakit yang perlu di antisipasi sejak dini terutama pada daerah - daerah dengan kelerengan curam serta sifat tanah yang memiliki kelulusan air yang tinggi.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan di Kota Magelang sesuai dengan karakteristik perkotaan banyak di dominasi oleh pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman. Tingginya kebutuhan akan lahan untuk rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang maupun untuk kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan berpengaruh pada tingginya alih fungsi lahan pertanian. Salah satu sisi lain yang perlu diperhatikan terkait menurunnya tingkat dan fungsi tanah menjadi lahan kritis, menurunnya daya dukung lingkungan dan ketidaktercapaian target 30% dari Ruang Terbuka Hijau di Kota

Magelang serta keterbatasan kebutuhan penyediaan air bersih dan fasilitas umum seiring dengan pertumbuhan bangunan di kota Magelang.

Gambaran penggunaan lahan di Kota Magelang dari tahun 2011 hingga tahun 2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 - 3

Luas Tanah (Ha) Menurut Penggunaannya Tahun 2011-2017

No	Jenis Sawah	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	TANAH SAWAH	**201.42**	**199.96**	**197.64**	**194.20**	**191.76**	**185.23**	**183.67**
	Pengairan Teknis	201.42	199.96	197.64	194.20	191.76	185.23	183.67
	Pengairan ½ Teknis	-	-	-	-	-	-	-
	Tadah Hujan	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.	TANAH KERING	**1,610.58**	**1,612.03**	**1,614.35**	**1,617.79**	**1,620.23**	**1,626.76**	**1,628.33**
	Pekarangan/lahan Untuk Bangunan dan Halaman	1.339.31	1.341.48	1.344.45	1.348.13	1.351.14	1.358,85	1.360.75
	Tegal/kebun/Ladang/ Huma	10.11	9.25	8.60	8.36	7.79	6.39	6.05
	Tambak	-	-	-	-	-	-	-
	Kolam/Tebat/Empang	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68
	Perkebunan/Hutan Rakyat	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	99.78	99.78
	Industri	51.97	51.97	51.97	51.97	51.97	51.97	51.97
	Lainnya (Makam dll)	102.95	103.09	103.09	103.09	103.09	103.09	103.09
	JUMLAH	**1,812.00**	**1,812.00**	**1,812.00**	**1,812.00**	**1,812.00**	**1,812.00**	**1,812.00**

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

Dari luas lahan secara keseluruhan di Kota Magelang pada tahun 2017, terdiri dari lahan untuk penggunaan Tanah Sawah sekitar 183.67 Ha dan Tanah Bukan Sawah (Tanah Kering) sekitar 1.628,33 Ha. Apabila di bandingkan dengan data – data tahun sebelumnya maka alih fungsi lahan pada tahun 2016 relatif lebih kecil. Data dari kantor BPN Magelang mencatat adanya perubahan alih fungsi lahan di tahun 2016 seluas 1.8430 Ha sementara tahun sebelumnya sebesar 7.9331 Ha. Adapun alih fungsi lahan pada tahun 2016 dengan rincian alih fungsi lahan sawah seluas 1.559 Ha dan tegal/ kebun seluas 0.34 Ha. Kebutuhan terbesar alih fungsi lahan pertanian di dominasi oleh alih fungsi lahan menjadi perumahan/halaman/ bangunan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan permukiman dan fasilitas umum di Kota Magelang. Data dari BPN Kota Magelang mencatat bahwa tanah yang beralih fungsi menjadi perumahan/ halaman/ bangunan seluas 1.897 Ha Ha. Tingginya Alih fungsi lahan pertanian tersebut bisa dilihat dari beberapa tahun terakhir ini. Data Luas lahan pengairan teknis pada tahun 2011 seluas 201.42 Ha menjadi 183.67 Ha pada tahun 2017 atau mengalami penyusutan setiap tahunnya rata–rata seluas ±2.54 Ha. sementara untuk alih fungsi lahan

tegal/kebun/lading/huma berkurang dari 10.11 Ha pada tahun 2011 menjadi 4.06 Ha di tahun 2016 atau mengalami penyusutan sebesar rata–rata seluas ±0.58 Ha setiap tahunnya

Ke depan Pemerintah Kota Magelan harus berupaya lebih keras dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian selain upaya – upaya yang telah dilakukan selama ini misalnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan – kawasan permukiman yang padat penduduk. selain itu perlu pula lebih cermat terkait dengan perijinan pembangunan yang harus sesuai dengan peruntukkan penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Magelang, sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031 akan lebih diarahkan untuk menjadi kota jasa. Faktor pendukung sebagai kota jasa, adalah posisi strategis kota yang berada pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional yang dipadukan dengan penataan fisik wajah kota, akan menjadi potensi yang dominan dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa.

Kedudukan Kota Magelang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kota Magelang menjadi PKW untuk Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG.

Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :

a) Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
b) Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
c) Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
d) Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
e) Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
f) Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
g) Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem perkotaan terdiri dari beberapa sistem, yakni pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan, sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya. Sistem pusat-pusat pelayanan terdapat dalam tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mana masing-masing mempunyai fungsi tertentu.

Potensi Pengembangan Kota Magelang sebagaimana terdapat dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Lindung

Arahan pengunaan lahan kawasan lindung Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah:

- Kawasan Perlindungan Setempat meliputi : sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (hutan kota). Kota Magelang memiliki kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kota, yaitu kawasan konservasi Gunung Tidar.
- Kawasan Rawan Bencana Longsor merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsoran. Daerah-daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kota Magelang meliputi daerah yang terdapat di sekitar DAS Progo dan Elo.

b. Kawasan Budidaya

Arahan pengunaan lahan kawasan budidaya Kota Magelang berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah :

- Kawasan Permukiman

  Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan ± 701,36 ha. Secara eksisting perumahan di Kota Magelang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, sehingga pengembangannya dimasa mendatang diarahkan secara vertikal. Kawasan yang masih memungkinkan adanya pengembangan permukiman, BWK III dan V.

- Kawasan Perdagangan/Jasa

  Pengembangan kawasan perdagangan/jasa diarahkan di sekitar jalan arteri primer di BWK IV khusus untuk perdagangan/jasa skala regional, jalan arteri sekunder di BWK I, BWK II, BWK IV dan BWK V dan jalan lokal primer/sekunder di BWK I dengan luas keseluruhan ± 120,86 ha.

- Kawasan Perkantoran

  Fasilitas perkantoran utama yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi perkantoran pusat pemerintahan, kantor dinas/instansi pemerintahan Kota Magelang, kantor instansi vertikal di Kota Magelang, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas/ kegiatan lain yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/olah raga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan ± 48,76 ha.

- Kawasan Pendidikan

  Pengembangan fasilitas pendidikan diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang agar sistem pelayanan kepada masyarakat merata. Luas keseluruhannya ± 107,92 ha.

- Kawasan Kesehatan

  Rencana pengembangan fasilitas kesehatan diarahkan tersebar pada seluruh wilayah perkotaan guna memeratakan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kawasan kesehatan diarahkan di BWK I, BWK II, BWK III dan BWK V danluas keseluruhan ± 42,46 ha.

- Kawasan Peribadatan

  Ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Magelang jika dilihat pada kondisi eksisting yang ada saat ini sudah sangat mencukupi. Sehingga dalam pengembangannya hanya berorientasi pada perbaikan atau peningkatan

kondisi dari fasilitas peribadatan yang ada. Pengembangan kawasan peribadatan penting diarahkan di seluruh unit BWK dengan luas keseluruhan ± 2,80 ha.

- Kawasan Rekreasi / Olah Raga

  Rencana pengembangan kawasan rekreasi di Kota Magelang diarahkan dalam dua bentuk, yaitu rekreasi terbuka dan rekreasi tertutup. Untuk rekreasi terbuka direncanakan dengan memanfaatkan arena olahraga, lapangan dan taman-taman kota yang direncanakan ada di setiap pusat kawasan. Untuk rekreasi yang tertutup direncanakan berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena permainan dan sebagainya. Fasilitas rekreasi tersebut berada pada kawasan pusat kota dan sub pusat kota, serta kawasan perdagangan terutama yang berupa pasar swalayan.

  Fasilitas dan/atau kegiatan lain yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan rekreasi / olahraga antara lain fasilitas rekreasi / olah raga skala lokal, kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, gedung pertemuan, gedung kesenian / pertunjukan, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan rekreasi olah raga diarahkan di BWK II, BWK III dan BWK V dengan luas keseluruhan ± 89,39 ha.

- Kawasan Industri / Perdagangan

  Dalam penataan ruang untuk industri, diprioritaskan untuk industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang rata-rata berkembang dikawasan permukiman, sehingga perlu diatur dengan dukungan penyediaan prasarana sarana seperti pengelolaan limbah dan showroom sekaligus outlet sebagai sarana promosi dan pemasaran. Pengembangan kawasan industri/ perdagangan diarahkan di BWK IV dengan luas keseluruhan ± 68,03 ha.

- Kawasan Militer

  Sebagaimana kondisi yang ada saat ini, di luar kawasan-kawasan milik TNI yang pemanfaatannya untuk fungsi non kemiliteran lain (seperti lapangan golf, gedung pertemuan A. Yani, dan lainnya) berada di BWK II, BWK III dan BWK V . Luas keseluruhan ± 151,05 ha.

- Kawasan Pertanian

  Pengembangan kawasan pertanian diarahkan di BWK II, BWK III, BWK IV dan BWK V dengan luas keseiuruhan ± 185,56 ha.

- Kawasan Terbuka Non Hijau

  Adapun RTNH yang ada di Kota Magelang, meliputi : plasa, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, pembatas (median jalan), dan koridor rumah. Pengembangan RTNH merupakan salah satu alternatif untuk penganti RTH yang bisa di terapkan pada kawasan-kawasan padat Kota.

- Kawasan Transportasi (Terminal)

  Sarana (fasilitas) terminal yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan terminal antara lain meliputi terminal regional, terminal angkutan kota dan terminal barang. Fasilitas dan/atau kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikembangkan di kawasan terminal antara lain fasilitas perdagangan skala lokal (kios), kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan terminal diarahkan di BWK I, BWK II dan BWK IV dengan luas keseluruhan ± 4,85 ha.

- Kawasan Pemakaman

  Kawasan pemakaman merupakan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi utama dan satu-satunya sebagai tempat pemakaman umum ataupun taman makam pahlawan. Pengembangan kawasan pemakaman diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada dengan luas keseluruhan ± 35,65 ha.

- Kawasan Khusus Sektor Informal

  Pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL secara umum dapat dikembangkan di daerah-daerah yang merupakan simpul-simpul perdagangan, memiliki tingkat aksesibilitas untuk dijangkau dengan berjalan kaki, ruang terbuka aktif, daerah-daerah yang memiliki tingkat keramaian dan merupakan area bebas yang cukup luas dan memiliki potensi untuk dikunjungi penduduk sebagai lokasi untuk bersantai dan melepas lelah. Arahan pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL dapat dikembangkan dan ditata di kawasan Jalan Jenggolo dengan melakukan penutupan akses di malam hari di Jalan Pajajaran dan Jalan Pajang. Kawasan khusus ini diperuntukkan bagi pedagang kuliner khas Kota Magelang dan sekitar (yang berupa makanan unggulan). Pengembangan PKL di sebelah utara Kota Magelang akan diakomodasi di Kawasan Armada Estate dengan membuka waktu jualan di siang dan malam hari di sekitar tanah kosong milik Armada Estate.

Rencana Tata Ruang Kota Magelang secara umum membagi Kota Magelang menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam pentaan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota:

a. Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
b. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
c. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
d. Kawasan strategis sosial budaya.

Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional. Potensi pengembangannya pada masa-masa mendatang sebagai berikut, yaitu :

a. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, pada kawasan ini direncanakan untuk mewadahi pendirian perguruan tinggi negeri;
b. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan jasa, pada kawasan ini sudah disiapkan sebidang lahan untuk pembangunan pasar induk yang dipadukan dengan pergudangan;
c. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan;
d. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdaga-ngan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang mewadahi kegiatan rekreasi masyarakat;

e. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Stadion Madya Moch. Soebroto, dengan kapasitas 15.000 penonton. Selain itu nanti juga akan dibangun kolam renang dengan standar internasional;
f. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan;
g. Kawasan Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekrasi dan olahraga, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kawasan, maka pada lokasi sekitar Taman Kyai Langgeng telah dibangun Showroom Mudalrejo yang mewadahi pemasaran hasil-hasil UMKM Kota Magelang.

Rencana sistem perkotaan terdiri dari sistem pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Struktur atau sistem pusat pelayanan merupakan kegiatan-kegiatan fungsional yang mendukung pengembangan Kota Magelang. Kegiatan fungsional sebagai elemen pengisi ruang kawasan diarahkan pengembangannya agar mampu mendukung fungsi-fungsi pengembangan kawasan. Bagian ini akan menjelaskan sistem pusat pelayanan yang ada dalam struktur ruang Kota Magelang. Sistem pusat-pusat pelayanan Kota Magelang memiliki cakupan sebagai berikut:

a) Pusat Pelayanan Kota Magelang, mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Kota Magelang dan Regional yaitu Kawasan PURWOMANGGUNG sebagai hinterland. Mempunyai makna sebagai fungsi pelayanan eksternal. Pusat pelayanan Kota ditetapkan di BWK I yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, dan sebagian Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, yaitu Kawasan Alun-alun Kota Magelang, delineasi kawasan ada dalam peta pembagian BWK Kota Magelang.
b) Subpusat Pelayanan Kota Magelang, direncanakan mempunyai cakupan pelayanan subwilayah kota dan terutama mempunyai skala pelayanan kota atau sebagai pengungkapan fungsi kawasan dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kawasan atau masing-masing bagian wilayah kota (fungsi pelayanan internal) adapun pembagian sub pusat pelayanan Kota Magelang meliputi :
    1) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK II yaitu Kawasan Kebonpolo terdapat di Kelurahan Wates dan Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara.
    2) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK III yaitu Kawasan Taman Kyai Langgeng terdapat di Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dan Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
    3) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK IV yaitu Kawasan Sukarno-Hatta, terdapat di Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
    4) Sub Pusat pelayanan kota di BWK V terdapat di Kelurahan Kramata Utara, Kecamatan Magelang Utara yaitu Kawasan Sidotopo.
c) Pusat Lingkungan mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah di Kota Magelang. Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan skala lingkungan di Bagian Wilayah Kota, meliputi:
    1) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK I
        - kesatu yaitu Kawasan Karesidenan yang terdapat Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah dan
        - kedua yaitu Kawasan Rejowinangun terdapat di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.
    2) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK II:

- kesatu yaitu Kawasan Tuguran yang terdapat di Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara.
- kedua yaitu Kawasan Urip Sumohardjo terdapat di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara.

3) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK III:
   - kesatu yaitu Kawasan Taman Parkir yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
   - kedua yaitu Kawasan Karet terdapat di Kelurahan Jurangombo Selatan.
4) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK IV:
   - kesatu yaitu Kawasan Soka yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
   - kedua yaitu Kawasan Canguk terdapat di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah.
5) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK V:
   - kesatu yaitu Kawasan Menowo yang terdapat di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara.
   - kedua yaitu Kawasan Sambung yang terdapat di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang, perlu kewaspadaan terhadap bencana seperti longsor atau bencana lain khususnya pada daerah dengan kelerengan curam. Bentuk-bentuk bencana yang sering terjadi di Kota Magelang pada umumnya adalah bencana tanah longsor. Kondisi tersebut terutama disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang termasuk dalam wilayah dengan tingkat kelerengan yang cukup tinggi dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat wilayah khusus rawan bencana longsor karena sifat kelerengan tanah dan persungaian, yaitu:

a. Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban;
b. Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.

Hal yang perlu diwaspadai terkait dengan bencana banjir perkotaan adalah banjir yang diakibatkan banjir limpasan atau limpahan air drainase karena hujan dan drainage tersumbat. Alih fungsi lahan menjadi bangunan rumah tinggal, ruko dan fasilitas umum berkontribusi terhadap meluapnya air hujan ketika curah hujan tinggi. Hal ini disebabkan karena berkurangnya daya tampung dan daya serap tanah tanah yang sudah tidak maksimal menyerap air hujan karena tertutup oleh bangunan. Penyebab kedua adalah banjir bandang atau banjir kiriman melanda wilayah tepi sungai Progo dan Elo. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi rawan bencana banjir karena faktor air melimpah antara lain adalah: Potrobangsan, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.

Selain Bencana longsor dan banjir, perlu juga di waspadai terkait dengan bahaya kebakaran terutama pada pemukiman yang padat penduduk dengan jalan sempit menyulitkan evakuasi dan pemadaman bencana kebakaran. Kelurahan yang memiliki potensi (rawan) bencana kebakaran karena faktor kepadatan penduduk dan jaringan jalan yang sempit (3-6 meter) yaitu: Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsan, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan. Bencana Kebakaran yang terjadi di sepanjang tahun 2015 sebanyak 6 kejadian dengan kerugian

materiil sebanyak 1 rumah dan 5 bangunan lainnya dengan total kerugian sebesar Rp. 291.300.000, 00. Jumlah lokasi bencana yang terjadi di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 sebanyak 22 lokasi. Dengan kerugian sebesar Rp. 355.000.000,00

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan limbah industri atau jasa yang meresap dalam air bawah tanah serta air permukaan (selokan, kolam dan pemukiman), pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga dan sampah yang tidak tertangani dengan baik.

Bencana lain yang perlu mendapat perhatian dan identik dengan wilayah perkotaan adalah bencana sosial seperti pertikaian antar warga di wilayah Kota Magelang, pertikaian pelajar dan tindak kriminalitas. Indikator penentu prioritas pencegahan dan penanganan bencana sosial perlu dilakukan pada wilayah yang memiliki: pusat perdagangan dan tujuan pergerakan atau transportasi; wilayah dengan tingkat sosial ekonomi yang berada di level pra-sejahtera; wilayah dengan kondisi pemukiman belum tertata atau kumuh, perkembangan kawasan yang kurang sehat dengan tingkat kepadatan tinggi.

2.1.1.9 Aspek Demografi

Salah satu permasalahan terkait dengan kependudukan adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk karena distribusi penduduk yang tidak merata akan menyebabkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk pada suatu wilayah karena tiap parsial kewilayahan mengalami jumlah penduduk yang tidak merata dan berimbang jumlahnya. Wilayah dengan jumlah penduduk yang padat akan memiliki permasalahan yang cukup komplek seperti masalah pengangguran, kemiskinan, permasalah akan kebutuhan lahan, kebutuhan akan fasilitas umum dan kebutuhan dasar masyarakat yang memadai seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan masalah – masalah sosial lainnya.

Terkait dengan Kota Magelang yang dengan wilayah relatif sangat kecil, masalah distribusi penduduk tidak membawa masalah sosial yang relatif besar namun tetap saja hal ini perlu mendapatkan perhatikan terkait dengan pemerataan pembangunan di Kota Magelang. Jumlah penduduk pada tahun 2017 berdasarkan data proyeksi BPS sebanyak 121.673 jiwa dengan wilayah Kota Magelang seluas 18,12 km2, kepadatan penduduk pada tahun 2017 sebanyak 6.715 jiwa/km2. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah ini lebih tinggi sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Magelang (menunjukkan tren meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk). Kepadatan penduduk tahun 2016 sebanyak 6.694 jiwa/ km2. . Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup serta menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman seperti drainase, sanitasi, air bersih yang layak dan terpenuhi merata bagi penduduk di atas lahan yang terbatas .

.

Tabel 2 - 4

Kepadatan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2011- 2017

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km^2)
2011	119.210	6.579
2012	119.647	6.603
2013	120.158	6.631
2014	120.615	6.656
2015	120.952	6.675
2016	121.293	6.694
2017	121.673	6.715

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

Kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintah terkait dengan penataan ruang dan kota serta pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat. Keterbatasan lahan untuk permukiman merupakan masalah yang khas bagi wilayah perkotaan terutama bagi Kota Magelang yang merupakan kota kecil dengan wilayah yang terbatas. Dengan wilayah yang hanya 18.12 km2 dan jumlah penduduk yang menunjukkan trend yang meningkat setiap tahun. Hal ini sangagt umum terjadi di semua wilayah di Jawa Tengah. Bertambahnya jumlah penduduk dapat di sebabkan karena kelahiran atau juga urbanisasi. Kepadatan penduduk di Kota Magelang yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah Kota dan Kabupaten lain di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki potensi dan daya tarik yang cukup tinggi.

Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah di minta untuk lebih tanggap dalam membuat kebijakan terkait pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar bagi masyarakat, pemenuhan sarana prasarana umum, serta kebijakan terkait tata ruang lahan kota yang terbatas. Selain itu Pemerintah juga harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat timbul akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk seperti bencana sosial yang biasa terjadi pada wilayah perkotaan.

Data kepadatan penduduk Kota Magelang berdasarkan DispendukCapil Kota Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.662 jiwa, kepadatan penduduk Kota Magelang pada tahun tersebut sebesar 7.321 jiwa/km2. Sementara pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.261 jiwa, kepadatan penduduk Kota Magelang sebesar 7.299 jiwa/km2. Data kepadatan penduduk secara lebih rinci per kelurahan akan ditampilkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2 - 5

Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang Tahun 2013 - 2017

Kecamatn / Kelurahn	2013		2014		2015		2016		2017	
	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km^2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km^2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km^2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km^2)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km^2)
MAGELANG SELATAN										
Jurangombo Utara	3.848	6.691	4.302	7.482	4.337	7.478	7.198	3.185	4.333	7.471
Jurangombo Selatan	7.821	3.468	6.951	3.070	7.056	3.122	8.582	8.847	7.246	3.206
Magersari	7.834	5.689	8.780	6.376	8.816	6.388	4.328	7.462	8.873	6.430
Tidar Utara	7.672	7.909	8.493	8.756	8.540	8.804	5.837	4.596	8.624	8.891
Tidar Selatan	5.569	4.388	5.748	4.530	5.787	4.567	8.860	6.420	5.868	4.620
Rejowinangun Selatan	7.767	17.938	8.986	20.753	8.965	20.849	8.873	20.635	8.844	20.567
MAGELANG TENGAH										
Magelang	6.963	5.588	7.913	6.351	7.913	6.330	7.992	6.394	8.039	6.431
Kemirirejo	4.993	5.674	6.026	12.606	6.190	7.034	12.563	12.690	6.119	6.953
Cacaban	7.768	9.404	8.214	9.944	8.231	9.917	6.182	7.025	8.253	9.943
Rejowinangun Utara	10.566	10.640	12.518	12.606	12.514	12.640	8.214	9.896	12.545	12.672
Panjang	5.722	16.596	6.766	19.612	6.809	19.454	6.834	19.526	8.818	19..480
Gelangan	7.344	9.022	8.250	10.135	8.298	10.244	8.335	10.290	8.337	10.293
MAGELANG UTARA										
Wates	7.921	6.753	9.188	7.833	9.202	7.865	9.242	7.899	9.237	7.895
Potrobangsan	7.988	6.149	8.992	6.922	8.966	6.897	8.887	6.836	8.920	6.862
Kedungsari	7.191	5.391	7.475	1.334	7.533	5.664	7.605	5.718	7.640	5.744
Kramat Utara	5.730	6.632	4.860	5.625	4.955	5.763	4.966	5.774	4.998	5.812
Kramat Selatan	7.480	5.130	8.061	5.529	8.148	5.581	8.164	5.592	8.217	5.628

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

Sex ratio adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di atas, maka sex ratio Kota Magelang Tahun 2017 sebesar (59.864/ 61.809 x100) = 96.85, artinya setiap 100 perempuan dalam suatu kawasan di Kota Magelang, akan terdapat pula sebanyak 97 pria di dalamnya. Rasio perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kota Magelang bisa di katakan cukup seimbang.

Tabel 2 - 6

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2010-2017 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laki-Laki	58.445	58.686	58.905	59.160	59.384	59.591	59.662	59.864
Perempuan	60.268	60.524	60.742	60.998	61.231	61.361	61.631	61.809
Jumlah Total	118.713	119.210	119.647	120.158	120.615	120.952	121.293	121.673
Sex Ratio	96,98	96,96	96,98	96,99	96,98	97,12	96.81	96.85
Laju Pertumbuhan (%)		0.42	0.37	0.43	0.38	0.28	0.28	0.31

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

Tabel 2 - 7

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang 2010-Semester 1 Tahun 2017 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Semester 1 2017
Laki-Laki	63.185	63.898	64.569	64.462	64.865	65.185	65.375	65.513
Perempuan	65.012	65.658	66.386	66.374	66.838	67.076	67.287	67.398
Jumlah Total	128.197	129.556	130.955	130.836	131.703	132.261	132.662	132.911
Laju Pertum-buhan (%)	-1.91	1.06	1.08	-0.09	0.66	0.42	0.30	0.19

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

Tabel 2 - 8

Banyak Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Magelang (Tahun 2010-2016)

Tahun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota RT
2010	128.197	38.490	3
2011	129.556	39.672	3
2012	130.955	40.623	3
2013	130.836	41.246	3

Tahun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota RT
2014	131.703	41.853	3
2015	132.261	42.433	3
2016	132.662	43.026	3
Semester 1 2017	132.911	43.328	3

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

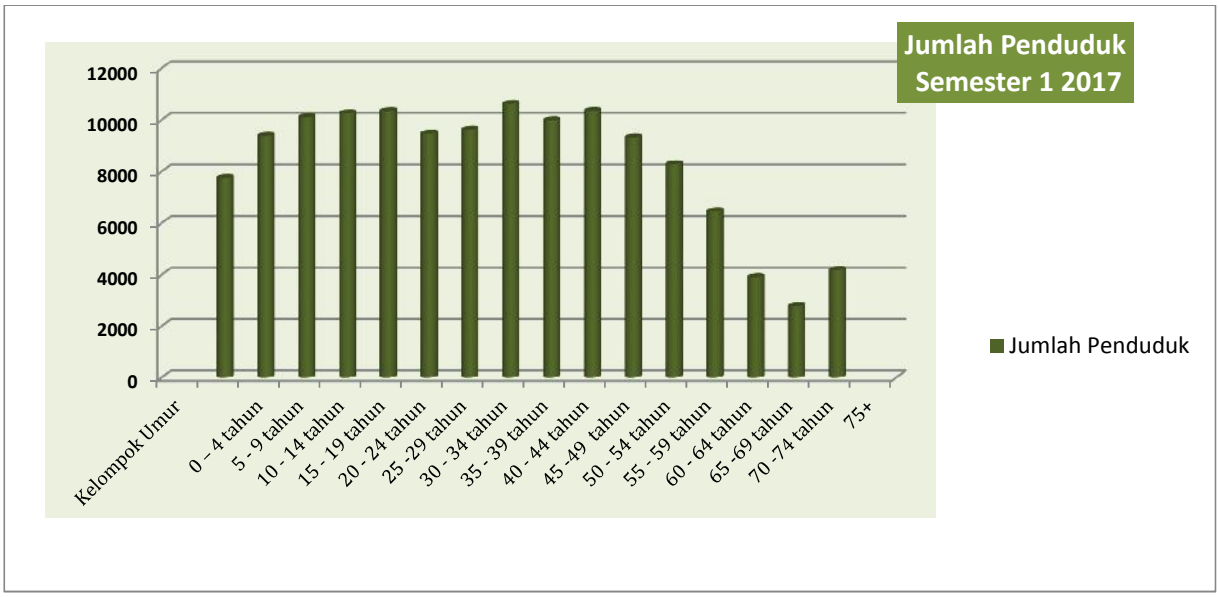
Data penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Magelang memperlihatkan bahwa komposisi terbesar penduduk pada usia produktif 15 tahun sampai dengan 64 tahun adalah pada kelompok umur antara usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun. Hal ini merupakan modal Sumber Daya bagi Kota Magelang apabila Pemerintah dapat memanfaat sumber daya yang ada dengan berbagai kebijakan dan program kegiatan yang dapat mengoptimalkan sumber daya manusianya menjadi sumber daya yang berkualitas dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2 - 9

Banyak Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2011-2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0 – 4 tahun	8.690	8.732	8.246	8.154	7.968	7.893	7.760
5 - 9 tahun	9.173	9.213	9.601	9.528	9.529	9.395	9.385
10 - 14 tahun	9.524	9.564	10.101	10.234	10.061	10.062	10.111
15 - 19 tahun	10.573	10.621	10.263	10.221	10.365	10.305	10.262
20 - 24 tahun	9.079	9.128	9.954	10.076	10.170	10.333	10.348
25 -29 tahun	9.522	8.566	9.532	9.322	9.338	9.388	9.475
30 - 34 tahun	9.092	9.134	10.962	10.806	10.390	9.866	9.625
35 - 39 tahun	9.103	9.141	10.364	10.410	10.429	10.521	10.627
40 - 44 tahun	9.252	9.288	10.485	10.274	10.180	10.052	9.993
45 -49 tahun	8.724	8.763	9.833	10.158	10.115	10.251	10.357
50 - 54 tahun	7.769	7.803	9.127	9.082	9.241	9.377	9.324
55 - 59 tahun	5.949	3.974	7.431	7.746	7.978	8.133	8.288
60 - 64 tahun	3.710	3.724	5.150	5.618	6.000	6.302	6.463
65 -69 tahun	3.240	3.252	3.207	3.381	3.523	3.758	3.916
70 -74 tahun	2.527	2.533	2.983	2.897	2.880	2.911	2.787
75+	2.878	2.892	3.597	3.796	4.094	4.115	4.190

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.



Gambar 2.4 Penduduk menurut Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2017

Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam ,seperti halnya fenomena yang banyak terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani relatif kecil. Penduduk Kota Magelang pada umumnya sebagaimana mata pencaharian penduduk di perkotaan, sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan usaha.

Tabel 2 - 4

Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Magelang Tahun 2011-2017

Mata Pencaharian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Semester 1 tahun 2017		
							Jumlah	%	+ / -
Pertanian	206	215	215	217	215	195	194	0.18	(1)
Buruh Tani	54	60	60	61	66	73	71	0.07	(3)
Pengusaha	12.762	12.680	12.476	12.349	12.209	12.275	12.267	11.84	(8)
Buruh Industri	23.074	23.599	23.682	24.248	24.835	25.541	25.917	25.02	376
Buruh Bangunan	8.932	9.058	9.006	9.096	9.138	9.226	9.219	8.90	(7)
Pedagang	3.022	3.040	3.002	2.978	2.935	2.136	2.121	2.05	(15)
Angkutan	220	227	233	240	251	252	245	0.24	(7)
PNS/TNI/Polri	5.909	5.925	5.825	5.810	5.772	5.696	5.648	5.45	(48)
Guru/ Dosen	1.442	1.436	1.447	1.452	1.473	1.473	1.451	1.40	(22)
Pensiunan	3.813	3.772	3.667	3.608	3.601	3.570	3.535	3.41	(35)
Lain Lainnya	53.961	52.890	53.376	53.962	53.947	54.244	42.931	41.44	(11.313)
JUMLAH	113.922	112.902	112.989	114.021	114.442	119.156	103.599	100	

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

Mata pencaharian terbesar ada di beberapa sektor seperti sektor industri, perdagangan dan perkantoran. Mata pencaharian tertinggi adalah sebagai buruh industri yaitu sebanyak 25.917 jiwa (25.02%), Pengusaha 12.267 jiwa (11.84%), Sedangkan mata pencaharian paling kecil adalah sebagai petani yaitu sebanyak 194 (0,18%) dan buruh tani 71 (0,07%).

Kondisi Kota Magelang relatif kondusif yang tergambarkan oleh konflik antar umat beragama di Kota Magelang nyaris tidak pernah terjadi. Masyarakat hidup berdampingan secara damai dalam keaneka ragaman agama yang mereka peluk. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing – masing yang di akui Pemerintah menjadi prioritas Pemerintah dalam menjamin hak asasi masyarakat dalam berkeyakinan. Hal ini menjadi Modal dasar bagi Pemerintah Kota Magelang dalam mencanangkan Kota Religius dalam periode lima tahun ke depan. Statistik penduduk Kota Magelang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluk di sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 5

Penduduk Berdasarkan Agama dan Keyakinan yang Dipeluk Tahun 2011-2017 di Kota Magelang

Agama /Keyakinan	Jumlah Pemeluk Agama dan Keyakinan						
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Islam	107.627	109.678	109.841	110.856	111.610	112.135	112.442
Kristen	12.904	12.923	12.770	12.711	12.616	12.566	12.519
Katholik	7.525	7.517	7.397	7.232	7.241	7.165	7.162
Hindu	149	146	145	149	150	143	141
Budha	658	664	658	639	620	628	623
Konghuchu	9	8	8	8	7	8	8
Lainnya	23	19	17	17	17	17	24

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

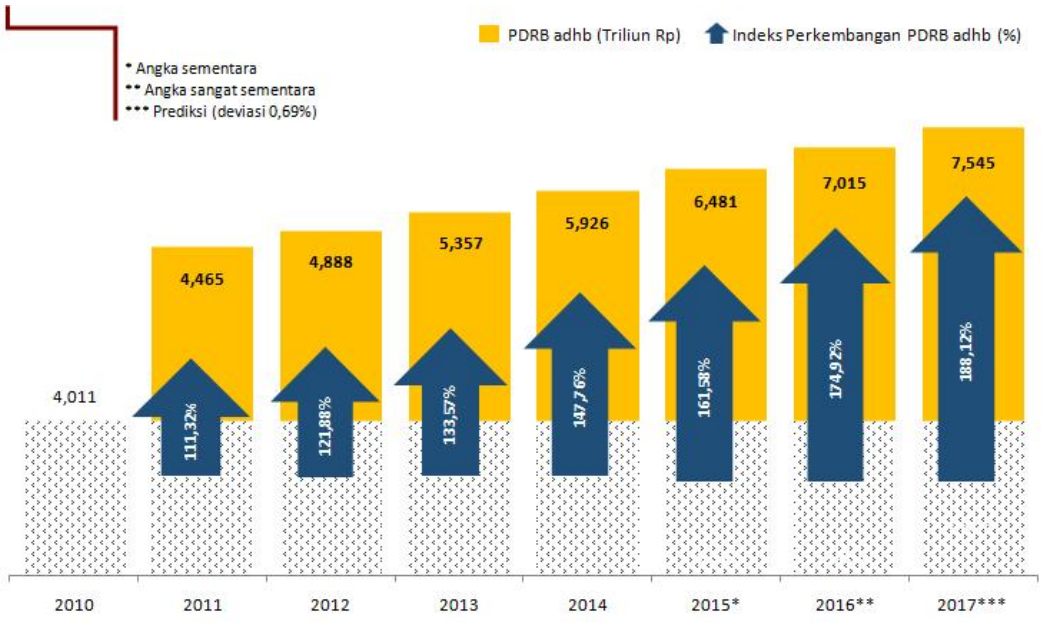
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.2.1.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Perekonomian makro Kota Magelang di tahun 2016 tumbuh 8,25% (atas dasar harga berlaku), sedikit melambat dari tahun 2015 yang berada pada angka 9,35%. Besarnya nominal nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh di tahun 2016 mencapai 7,015 triliun Rupiah, berkembang hampir 1,75 kali lipat dibandingkan kondisi ekonomi di tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan (13,32%), Jasa Keuangan dan Asuransi (13,2%) dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,42%). Meski merupakan sektor andalan di Kota Magelang, namun lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi masih memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum di tahun 2016. Khusus untuk Transportasi dan Pergudangan,

lapangan usaha ini memiliki prospek yang sangat baik untuk dapat terus dioptimalkan perannya dalam tahun-tahun mendatang, mengingat lapangan usaha ini merupakan sektor ekonomi penunjang utama bagi pariwisata dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.5. PDRB dan Indeks Perkembangan PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2017
Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Kinerja perekonomian makro skala kota untuk tahun 2017 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian diprediksi kondisi ekonomi makro Kota Magelang di tahun 2017 akan terus mengalami pertumbuhan positif dengan perolehan PDRB mencapai 7,545 triliun rupiah (deviasi 0,69%). Di tahun 2017 diprediksi tidak ada pergeseran peran lapangan usaha yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kota Magelang. Hampir seluruh lapangan usaha diprediksi tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya dan Jasa Pendidikan diprediksi akan memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan lapangan usaha lain di tahun 2017.

Tabel 2-12.
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Lapangan Usaha	2016*	2017**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135.991,13	142.454,49
Industri Pengolahan	1.128.331,29	1.239.730,46
Pengadaan Listrik dan Gas	20.361,13	21.160,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	9.601,96
Konstruksi	1.163.178,22	1.262.362,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.288,45	1.060.825,03
Transportasi dan Pergudangan	471.954,33	504.756,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	422.789,76	442.114,98
Informasi dan Komunikasi	334.082,07	367.432,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	366.184,95	380.534,04

Lapangan Usaha	2016*	2017**
Real Estate	224.952,98	236.820,26
Jasa Perusahaan	24.810,72	27.892,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842.640,29	873.126,67
Jasa Pendidikan	529.008,56	604.377,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.466,24	215.370,07
Jasa lainnya	140.360,73	156.238,91
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (deviasi 0,69%)
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (diolah)
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Dari sisi konsumsi, PDRB Kota Magelang di tahun 2016 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,017 triliun Rupiah. Tren perlambatan sebagaimana lapangan usaha juga terjadi dalam penggunaan PDRB. Pada kelompok konsumsi, pertumbuhan konsumsi tertinggi tetap berasal dari konsumsi pemerintah sebesar 7,58%, melambat dari tahun 2015 yang mampu mencapai 14,56%. Konsumsi rumah tangga tumbuh 6,8% sedikit lebih cepat dibandingkan lembaga NPRT yang hanya tumbuh 6,07%. Secara proporsi, peran komponen penggunaan terhadap PDRB di tahun 2017 diprediksi tidak berubah secara signifikan.

Tabel 2-13.
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Pengeluaran
Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

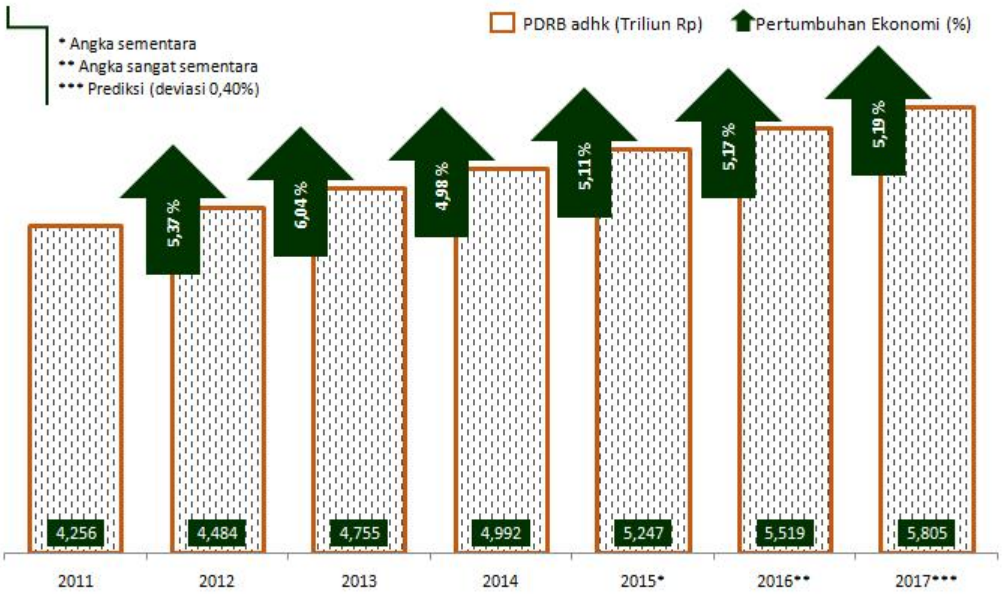
Pengeluaran	2016*	2017**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,017,143.51	4,290,309.27
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	89,900.37	95,357.32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,431,080.68	1,539,556.60
Pengeluaran PMTB	3,459,854.74	3,683,361.36
Pengeluaran Perubahan Inventori	153,174.70	167,302.24
Pengeluaran Ekspor	3,562,619.90	3,758,600.12
Pengeluaran Impor	5,698,393.82	5,989,687.21
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (deviasi 0,69%)
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (diolah)
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Diteropong dari sisi riil, PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,17% setelah di tahun sebelumnya hanya mencapai 5,11%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%), namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi pada skala provinsi Jawa Tengah yang pada tahun tersebut mencapai 5,28%. Berdasar tahun dasar 2010, secara riil PDRB Kota Magelang tahun 2016 mencapai 5,517 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi level sektoral dialami oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (9,46%), Jasa Perusahaan (8,82%) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,75%). Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Magelang untuk mendongkrak

pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan dan sektor andalan karena dari data historis sektor-sektor ini masih tumbuh relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota secara umum.



Gambar 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2011-2017
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (diolah)
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Stabilnya perkembangan harga, akselerasi laju produktivitas di berbagai sektor ekonomi dan kondusifnya iklim investasi sepanjang tahun 2017 memberikan hasil prediksi yang cukup optimis bagi perekonomian Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2017, diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mampu mencapai target RPJMD (4,79%-5,29%) dan berada pada angka 5,19% (deviasi 0,40%).

2.1.2.1.3 Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB

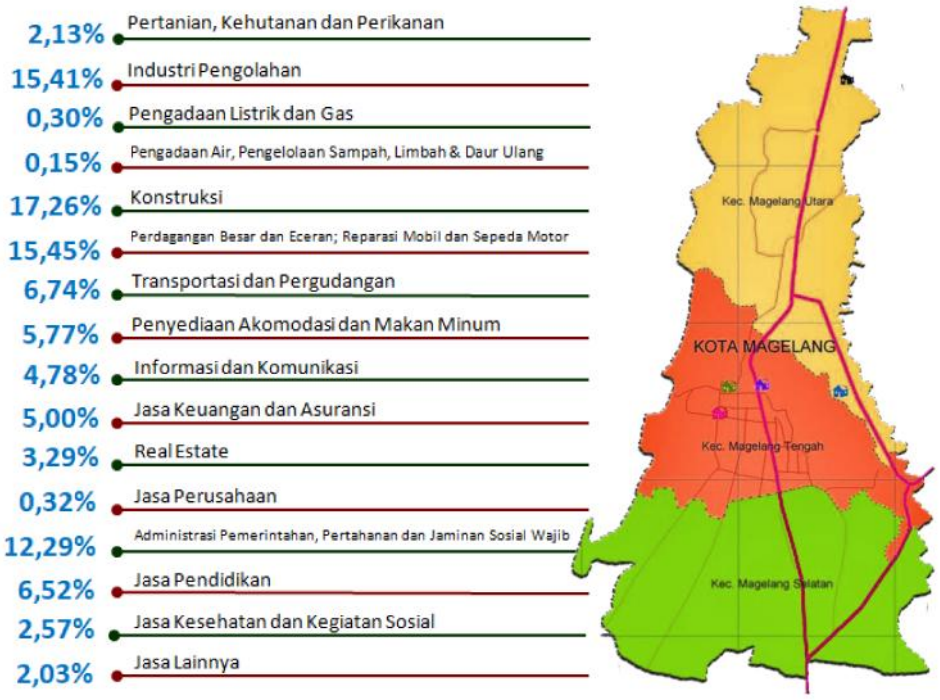
Beberapa pergeseran peran lapangan usaha ditilik dari kontribusinya terhadap perekonomian makro Kota Magelang terjadi dalam lima tahun terakhir. Transformasi struktur perekonomian terjadi sejak tahun 2014 dimana lapangan usaha Industri Pengolahan mampu memiliki kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Kota Magelang, menggeser peran lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di tahun 2016 transformasi kembali terjadi setelah melorotnya peran Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Magelang dalam menyumbang nilai tambah produksi barang/jasa dan tergantikan oleh lapangan usaha Jasa Lainnya. Sementara itu, komposisi sektor andalan dan unggulan cenderung konstan dari tahun ke tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian Kota Magelang, 2010-2016

Andalan	Unggulan
1. Industri Pengolahan	1. Informasi dan Komunikasi
2. Transportasi dan Pergudangan	2. Jasa Pendidikan

Andalan	Unggulan
3. Informasi dan Komunikasi	3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4. Jasa Pendidikan	

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

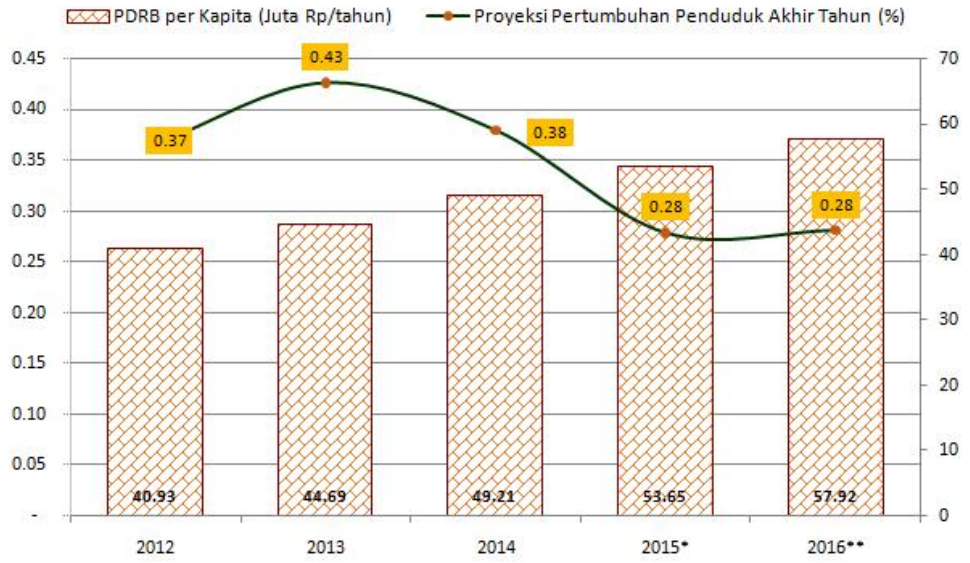


Gambar 2.7. Rata-rata Distribusi Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang (adhb), 2010-2016
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (diolah)

Ketergantungan aktivitas ekonomi Industri pengolahan khususnya dalam pasokan sumber daya input yang masih dicukupi dari hasil impor dari daerah sekitar merupakan salah satu penyebab mengapa lapangan usaha ini meskipun berkontribusi cukup signifikan dalam pembentukan PDRB Kota Magelang, namun belum cukup kompetitif dalam skala yang lebih luas yaitu provinsi, sehingga belum mampu menjadi sektor andalan. Di tahun 2017 struktur perekonomian Kota Magelang diprediksi memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2016 dengan peningkatan persentase peran di setiap lapangan usaha.

2.1.2.1.4 **PDRB Per Kapita**

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur salah satunya dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.112 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 4,827 juta/bulan atau 57,92 juta/tahun (atas dasar harga berlaku). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Di tahun 2017, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada level 5,19% dan prediksi total penduduk tengah tahun sebesar 121.474 jiwa, maka PDRB per kapita Kota Magelang (atas dasar harga berlaku)diprediksi mampu terus tumbuh mencapai 58,92 juta/tahun (4,91 juta/bulan).



Gambar 2.8. PDRB per Kapita (adhb) dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Akhir Tahun Kota Magelang, 2012-2016
* Angka sementara ** Angka sangat sementara
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (diolah)

Tabel 2.15. PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Uraian	2016	2017
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	7.015.380,09*	7.478.570,29 **
PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	5.518.684,55*	5.804.917,24 **
Proyeksi penduduk tengah tahun (jiwa)	121.112,00	121.474,00
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp/kapita/tahun)	57,92*	58,92**

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (derivatif)
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (diolah)
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Mengingat indikator kesejahteraan ini memiliki beberapa kelemahan, maka dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan ekonomi (khususnya dalam bidang pemerataan pendapatan) yang lebih komprehensif, Kota Magelang juga memperhitungkan statistik kesejahteraan yang lain, diantaranya adalah indeks gini.

2.1.2.1.5 **Inflasi**

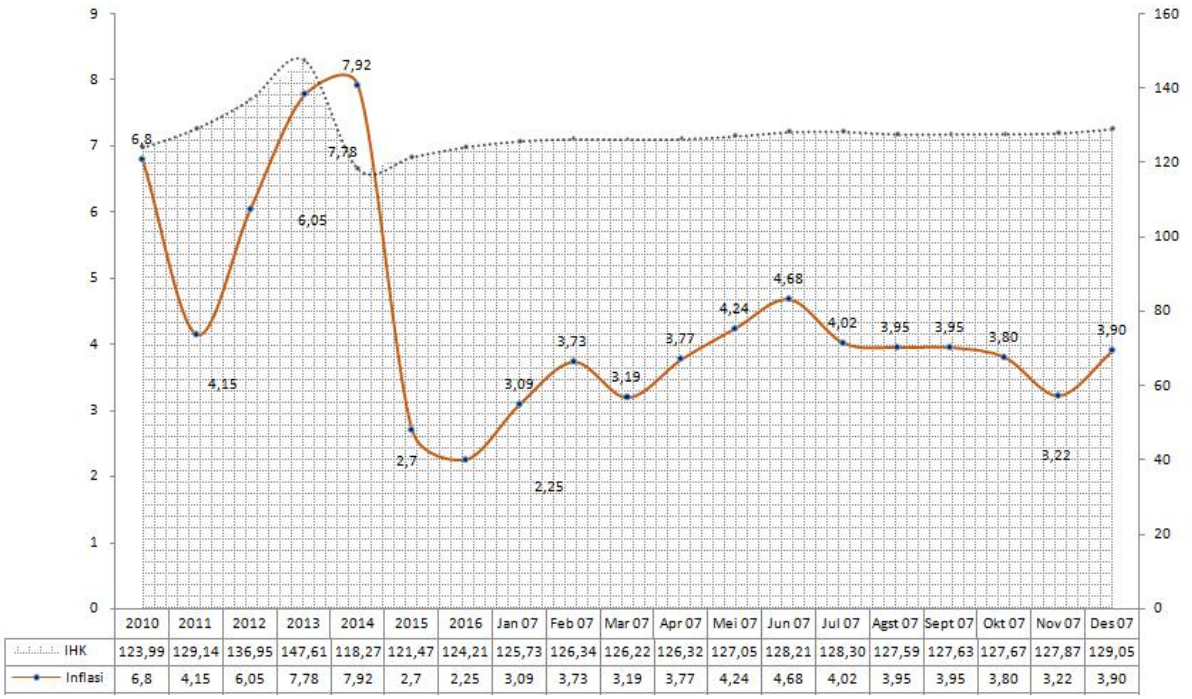
Kota Magelang memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin menerapkan protokol pengendalian harga dengan baik, sehingga sepanjang tahun 2017 tidak ditemukan gejolak harga yang berarti pada seluruh komoditas pengeluaran. Beberapa program dan kegiatan TPID Kota Magelang di tahun 2017 antara lain adalah:

a. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.
b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
c. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
d. Program pengembangan budidaya perikanan
e. Program peningkatan produksi hasil peternakan
f. Pemanfaatan Toko Tani Indonesia (TTI)

Sampai dengan saat ini di Kota Magelang terdapat delapan TTI. TTI menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan/atau Bulog.

g. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
h. Pengembangan sistem informasi pasar dengan melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di tiga pasar tradisional (Kebonpolo, Cacaban dan Rejowinangun), toko/warung yang menyediakan bahan pangan di 17 kelurahan dan sembilan pedagang grosir pangan di luar pasar.
i. Publikasi perkembangan harga melalui aplikasi Sihati (Sistem Informasi Harga dan Komoditi Jawa Tengah), Magelang FM dan DataGO
j. Melaksanakan kegiatan panel harga pangan
k. Program peningkatan efisiensi perdagangan melalui kegiatan peningkatan sistem kerja, jaringan informasi perdagangan, pengembangan pasar dan distribusi produk sehingga tersedia informasi perusahaan yang akurat dan meningkatnya pangsa pasar produk-produk UMKM
l. Penguatan kelembagaan TPID

Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2017 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir November 2017 inflasi yang terjadi sebesar 0,16% (3,22% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 3,19%) dan nasional (yoy 3,30%). Akhir Desember 2017 terdapat kenaikan IHK mencapai 129,05 menyebabkan inflasi 0,93% (3,9% year on year). Laju inflasi yang terjadi pada posisi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (3,71%) dan Nasional (3,61%). Hal tersebut merupakan rentetan dampak dari kenaikan harga beras di akhir tahun yang mengakibatkan kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 3,96%. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi yaitu : beras, telur ayam ras, cabe merah, daging ayam ras, papaya, cabe hijau, wortel, tomat sayur, kacang panjang, gula pasir. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah : bawang merah, bayam, anggur, salak, pir, minyak goreng, nangka muda, tauge/kecambah, jeruk, alpukat (BPS, 2018).



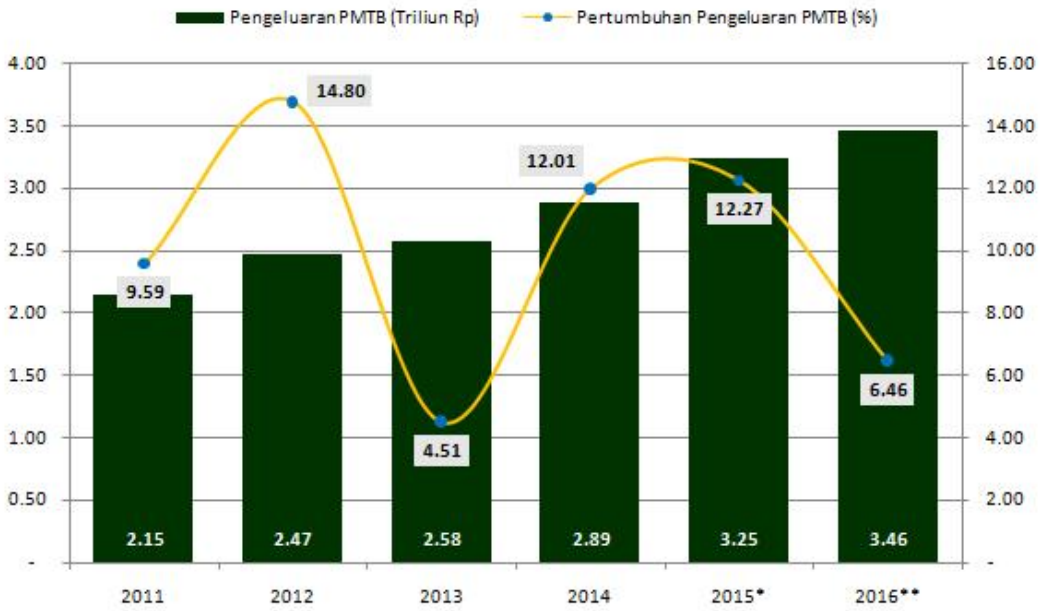
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jan 07	Feb 07	Mar 07	Apr 07	Mei 07	Jun 07	Jul 07	Agst 07	Sept 07	Okt 07	Nov 07	Des 07
IHK	123,99	129,14	136,95	147,61	118,27	121,47	124,21	125,73	126,34	126,22	126,32	127,05	128,21	128,30	127,59	127,63	127,67	127,87	129,05
Inflasi	6,8	4,15	6,05	7,78	7,92	2,7	2,25	3,09	3,73	3,19	3,77	4,24	4,68	4,02	3,95	3,95	3,80	3,22	3,90

Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Year on Year Kota Magelang, 2010-2017
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

2.1.2.1.6 **Investasi**

Investasi dalam dokumen ini diukur dengan pendekatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan salah satu komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Menurut BPS, PMTB adalah "pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas". BPS menjelaskan lebih lanjut bahwa penambahan barang modal yang meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Pada tahun 2016 pengeluaran PMTB di Kota Magelang mencapai 3,460 triliun (adhb). Nilai ini tumbuh sedikit melambat, yaitu hanya sebesar 6,46% setelah di tahun sebelumnya mampu tumbuh 12,27%. Dominasi PMTB di tahun 2016 berasal dari pengeluaran PMTB untuk bangunan yang memiliki distribusi sebesar 87,62%. Kecepatan pertumbuhan PMTB non bangunan sempat tercatat sangat signifikan sepanjang tahun 2011-2012 dan masih lebih cepat dibandingkan dengan PMTB bangunan sampai dengan tahun 2013. Namun kemudian pengeluaran PMTB bangunan mampu mengejar laju PMTB non bangunan dengan rata-rata growth 10,86% per tahun sepanjang tahun 2014-2016. Sementara itu PMTB non bangunan terus melambat dengan rata-rata pertumbuhan hanya 6,28% per tahun selama periode 2014-2016 dan hanya tumbuh 4,30% di tahun 2016.



Gambar 2.10. Pengeluaran PMTB dan Pertumbuhan Pengeluaran PMTB Kota Magelang, 2011-2017
* Angka sementara ** Angka sangat sementara
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (diolah)

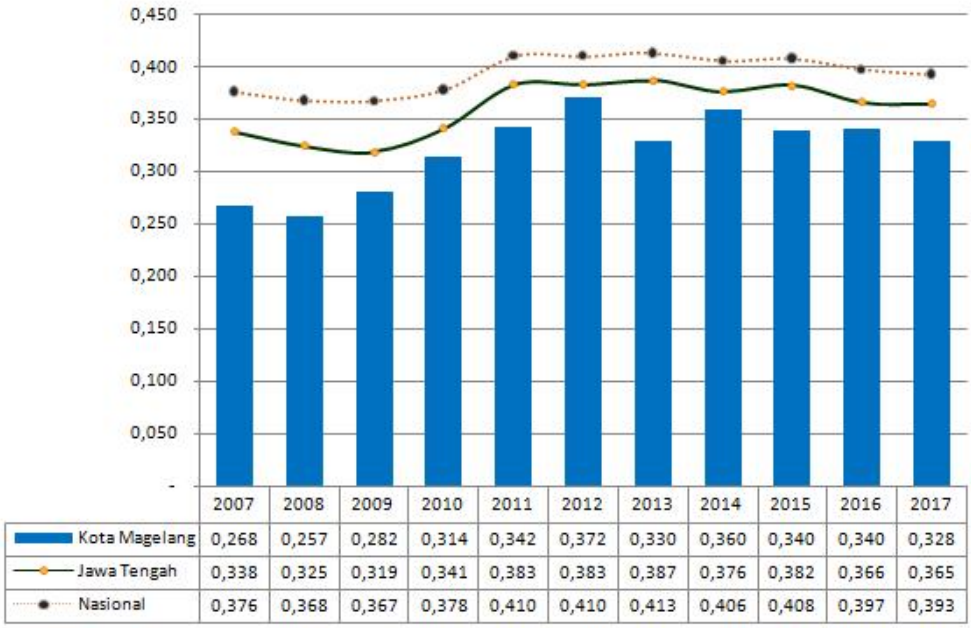
Perkembangan nilai PMTB dan total PDRB selama kurun waktu 2010-2016 menghasilkan ICOR di Kota Magelang yang relatif kecil (5,09). Hal tersebut mengindikasikan bahwa investasi di kota sejuta bunga ini cukup efektif. Untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, rata-rata nominal investasi yang dibutuhkan sebesar1,583 triliun rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2017 diprediksi pengeluaran PMTB Kota Magelang akan tumbuh positif mencapai 3,683 triliun rupiah.

2.1.2.1.7 **Ekspor Impor**

Progres yang menggembirakan terjadi pada pertumbuhan ekspor di tahun 2016 yang mencapai 9,91%, jauh lebih cepat dibandingkan pengeluaran impor (5,41%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahan baku produksi dan produk akhir dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat Kota mampu bersaing dan diterima dengan baik di pasar yang berada di luar wilayah. Penurunan tingkat ketergantungan terhadap bahan baku produksi, peningkatan kualitas produk setengah jadi dan produk akhir konsumsi dari seluruh lapangan usaha di Kota Magelang harus terus diupayakan untuk menghindari melebarnya celah dalam neraca perdagangan negatif yang selama ini dialami. Sampai dengan akhir tahun 2017 diprediksi pertumbuhan ekspor akan bertahan dan lebih cepat dibandingkan impor, dengan nominal ekspor mencapai 3,759 triliun Rupiah (deviasi 0,48%) dan impor sebesar 5,990 triliun Rupiah (deviasi 0,37%).

2.1.2.1.8 **Index GINI**

Keterbatasan sampel dalam Susenas yang dilaksanakan di tahun 2016-2017 menyebabkan perhitungan indeks gini tidak mampu dilakukan pada level Kabupaten/Kota. Data riil diperoleh di tahun 2015 dimana hasil pembangunan di Kota Magelang menunjukkan pola distribusi yang lebih merata, tercatat dari indeks gini yang turun 0,02 poin indeks menjadi 0,340 dari angka di tahun sebelumnya yang mencapai 0,360. Kondisi yang baik ini diprediksi bertahan dengan kecenderungan makin baik di tahun-tahun berikutnya pada interval 0,328-0,340 (deviasi ±0,015).



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Magelang	0,268	0,257	0,282	0,314	0,342	0,372	0,330	0,360	0,340	0,340	0,328
Jawa Tengah	0,338	0,325	0,319	0,341	0,383	0,383	0,387	0,376	0,382	0,366	0,365
Nasional	0,376	0,368	0,367	0,378	0,410	0,410	0,413	0,406	0,408	0,397	0,393

Gambar 2.11. Indeks Gini Nasional, Jawa Tengah dan Kota Magelang, 2007-2017
Indeks Gini Kota Magelang Tahun 2016-2017 adalah Data Prediksi
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (diolah)
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Hakikat pembangunan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga tingkat kesejahteraan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Pada tahun 1990, UNDP telah merancang bagaimana cara mengukur keberhasilan pembangunan Manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia yang disempurnakan metodenya pada tahun 2010.

Untuk itu dalam bahasan ini akan dideskripsikan bagaimana ukuran hasil pembangunan tersebut di Kota Magelang, bagaimana posisinya di wilayah hinterland, regional maupun nasional dan ditinjau dari pembangunan serta pemberdayaan gender-nya. Selanjutnya perlu ditinjau juga kondisi riil di daerah seperti dependency ratio, kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan. Dengan demikian kita akan mampu menarik sebuah catatan penting untuk pembangunan yang lebih baik.

2.1.2.2.1 **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Perkembangan IPM di Kota Magelang pada tahun 2016 cukup cepat sebesar 1,01% dengan capaian indeks sebesar 77,16 menempati posisi ke-4 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Surakarta. Nilai ini masuk status pembangunan manusia pada kategori tinggi. Kualitas pembangunan manusia Kota Magelang di tahun 2016 mampu mencapai angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan IPM Jawa Tengah (69,98) dan nasional (70,18).

Pertumbuhan tertinggi komponen pembentuk IPM Kota Magelang pada tahun 2016 berasal dari indikator Harapan lama Sekolah/HLS (penduduk usia lebih dari tujuh tahun) yang tumbuh 3,45% namun masih pada kisaran 13 tahun (setara dengan jenjang pertama pada perguruan tinggi). Paritas daya beli tumbuh 2,75% di tahun 2016 mencapai

11,09 juta rupiah per tahun. Sementara itu pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (penduduk usia lebih dari 25 tahun) cukup lambat di bawah 1%. Meskipun demikian AHH di Kota Magelang terhitung tinggi mencapai rata-rata 76 tahun dengan AHH untuk kaum perempuan yang lebih tinggi (78,5 tahun) dibandingkan dengan kaum laki-laki (74,52 tahun). Hal tersebut mengindikasikan kinerja pelayanan dasar kesehatan yang baik.

Lambatnya pertumbuhan RLS yang hanya berkisar 0,7% per tahun perlu mendapat perhatian khusus terlebih dalam hal penurunan angka putus sekolah dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kota Magelang.sejak tahun 2010 RLS penduduk usia lebih dari 25 tahun di Kota Magelang stagnan pada angka 10 tahun atau setara jenjang pendidikan tingkat satu sekolah menengah atas. Dari sisi gender, pada tahun 2016 RLS di Kota Magelang masihsedikit diungguli oleh kaum laki-laki yang rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun, sementara kamu perempuan di Kota Magelang rata-rata memiliki lama studi sebesar 10 tahun. Di tahun 2017 diprediksi nilai IPM Kota Magelang mengalami laju yang cukup tinggi mencapai 77,8 melampaui target RPJMD pada tahun berkenaan yang ditetapkan sebesar 76,9.

Tabel 2.6

Komponen Pembentuk IPM Kota Magelang Tahun 2010-2016 dan Prediksi Tahun 2017

Tahun	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (Rp .000,-)	IPM
2010	76,39	12,22	10,08	9.681	73,99
2011	76,44	12,33	10,14	9.922	74,47
2012	76,49	12,49	10,20	10.169	75,00
2013	76,54	12,65	10,22	10.258	75,29
2014	76,57	12,98	10,27	10.344	75,79
2015	76,58	13,10	10,28	10.793	76,39
2016	76,62	13,55	10,29	11.090	77,16
2017*	76,67	13,88	10,30	11.384	77,80

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Implikasi dari tidak dilaksanakannya kegiatan Sakernas sampel besar untuk prediksi tingkat kabupaten kota adalah tidak dapat dilakukan penghitungan angka IDG yang salah satu indikatornya adalah adanya data tentang jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk perempuan. Maka angka untuk Indeks tersebut hanya tersedia di terakhir di tahun 2015. Sedangkan untuk angka IPG tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan karena akan ada perbaikan metodologi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Data terakhir di tahun 2015 tercatat bahwa pembangunan berbasis gender di Kota Magelang terus mengalami perbaikan kualitas terlihat dari peningkatan IPG dari 95,45 di tahun 2015 menjadi 95,81. Secara umum peran laki-laki dalam pembangunan manusia di Kota Magelang jauh lebih baik dibandingkan kaum perempuan kecuali dari kualitas kesehatan yang tercermin melalui indikator AHH.

Tabel 2.17 Komponen Pembentuk IPM Berdasar Gender di Kota Magelang Tahun 2014-2015

Tahun	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran (Rp .000,-)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2014	74,52	78,49	13,26	12,88	10,89	9,91	11.868	10.265
2015	74,54	78,51	13,27	12,89	10,90	9,92	12.005	10.651

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

Pemberdayaan gender di tahun 2015 justru mengalami penurunan kualitas. Hal tersebut terlihat dari penurunan IDG ke angka 75,83 setelah di tahun 2014 mampu mencapai 78,82. Hal tersebut disebabkan karena penurunan yang cukup besar pada persentase keterlibatan perempuan di parlemen.

Tabel 2.18. Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2014-2015

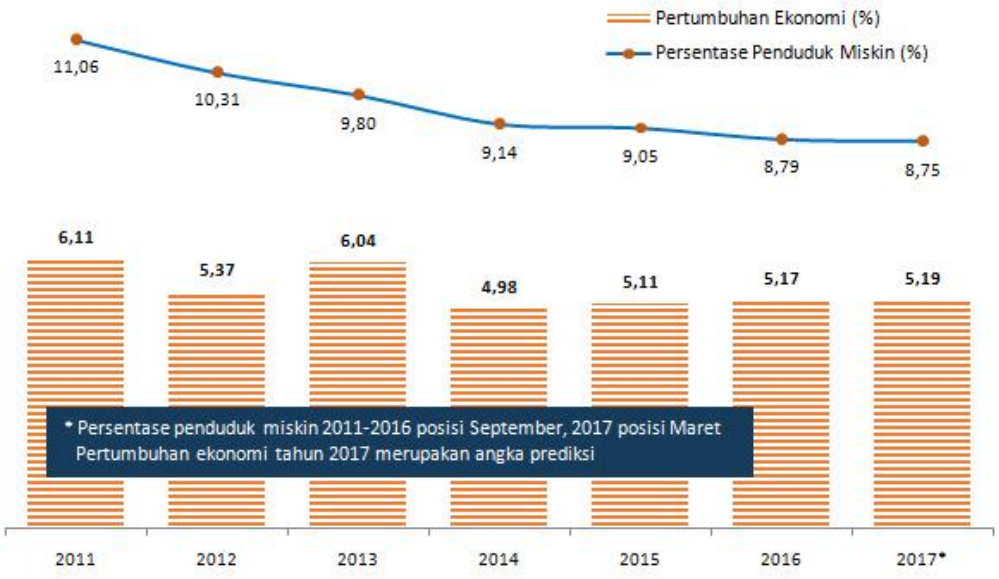
Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Prempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
2014	24,00	45,02	41,11
2015	20,00	45,74	41,81

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.

2.1.2.2.3 **Kemiskinan**

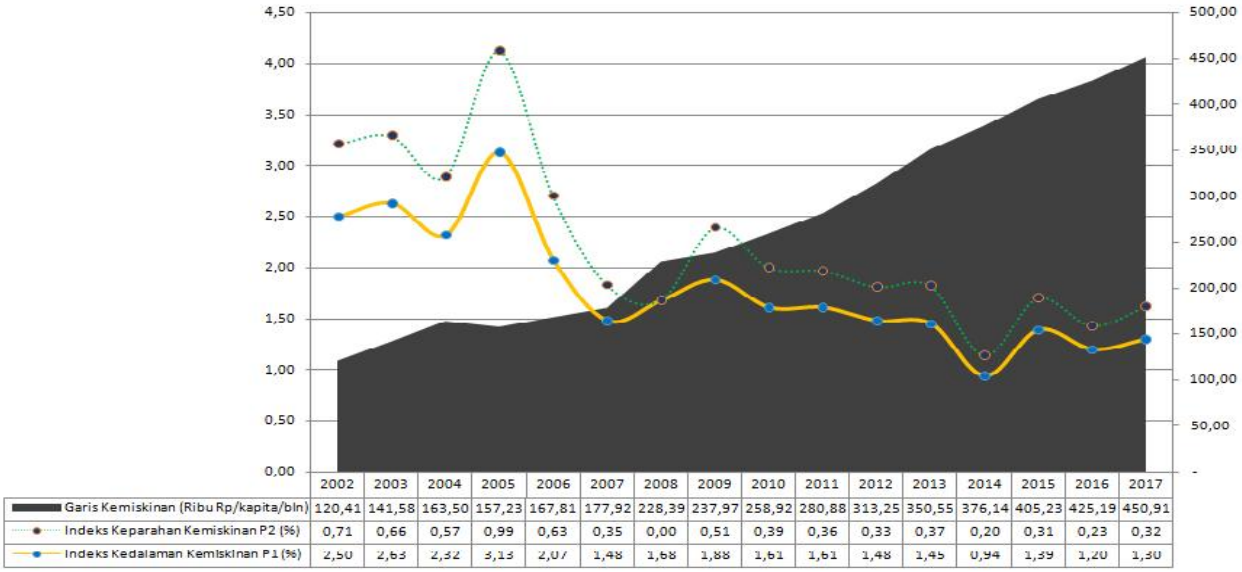
Sampai dengan Maret 2017 persentase penduduk miskin di Kota Magelang berangsur turun mencapai 8,75% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 450.908, yang merupakan garis kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Penurunan ini terbilang sangat kecil dibandingkan posisi September 2016. Pada periode September 2016 sampai dengan maret 2017 pengentasan penduduk miskin di Kota Magelang tercatat hanya sebesar 100 jiwa penduduk. Garis kemiskinan di Kota Magelang terus bergerak naik sedangkan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan meskipun masih lambat. Hal ini menjelaskan meskipun biaya pemenuhan kebutuhan hidup terus meningkat namun penduduk Kota Magelang dapat mengatasinya sehingga jumah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin menurun.

Sementara itu tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Magelang dalam kurun waktu 5 tahun masih fluktuatif dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding 2016 yaitu dari semula 1,20 menjadi 1,30 yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, sehingga angka indeks di tahun 2017 ini adalah lebih baik dibanding 2016.



Gambar 2.12. Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2011-2017
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

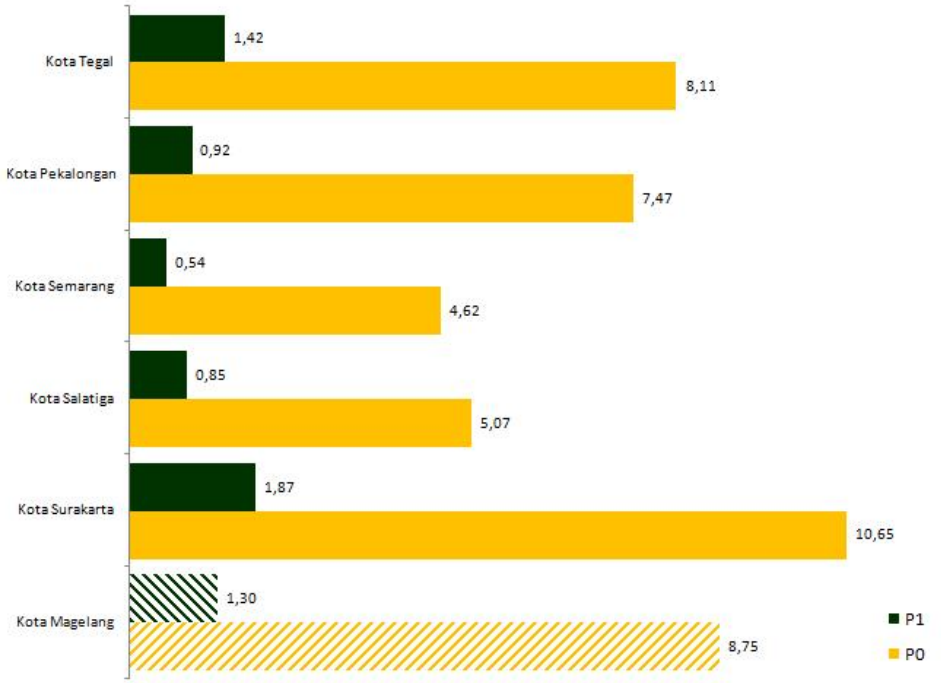
Tingkat keparahan kemiskinan (P2) juga masih terlihat fluktuatif dan perkembangan dari tahun 2016 ke 2017 semula 0,23 menjadi 0,32. P2 ini dapat dianalisa dengan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, dan di tahun 2017 terlihat bahwa indeks semakin naik yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin bertambah. Peningkatan pendapatan dan konsumsi penduduk miskin harus diupayakan agar setidaknya sama cepat dengan pertumbuhan garis kemiskinan serta merata di seluruh kantorng kemiskinan sehingga ketimpangan di antara penduduk miskin tidak semakin melebar.



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (Ribu Rp/kapita/bln)	120,41	141,58	163,50	157,23	167,81	177,92	228,39	237,97	258,92	280,88	313,25	350,55	376,14	405,23	425,19	450,91
Indeks Keparahan Kemiskinan P2 (%)	0,71	0,66	0,57	0,99	0,63	0,35	0,00	0,51	0,39	0,36	0,33	0,37	0,20	0,31	0,23	0,32
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 (%)	2,50	2,63	2,32	3,13	2,07	1,48	1,68	1,88	1,61	1,61	1,48	1,45	0,94	1,39	1,20	1,30

Gambar 2.13. Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Kota Magelang, 2002-2017
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.
Catatan: data tahun 2017 posisi Maret

Di antara enam wilayah kota yang ada di Jawa Tengah, Kota Magelang merupakan daerah perkotaan dengan garis kemiskinan tertinggi. Bahkan dibandingkan dengan seluruh Kabupaten di Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin Kota Magelang di tahun 2017 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Salatiga, pekalongan , Semarang dan Tegal. Demikian juga dengan indeks kedalaman dan keparahan. Kualitas kemiskinan di Kota Magelang masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Salatiga, Pekalongan dan Semarang.



Gambar 2.14. Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah, 2017
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.
Catatan: data tahun 2017 posisi Maret

2.1.2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Keterbatasan sampel Sakernas menjadikan indikator ketenagakerjaan tahun 2016 tidak dapat dibreakdown sampai dengan level Kabupaten/Kota. TPT Kota Magelang pada tahun 2017 naik dari tahun 2015 mencapai 6,68%. Pada periode tersebut (2015-2017) terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja (AK) sebanyak 2,81% (1.715 jiwa) dengan total AK sebanyak 62.775 jiwa. Kenaikan TPT ini disebabkan bertambah jumlah penduduk yang mencari pekerjaan dari 4,14 % di tahun 2015 menjadi 4,36 % di tahun 2017. Meskipun secara persentase tidak terlalu banyak tetapi secara absolut jumlah tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Untuk menurunkan angka pengangguran, perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk mencari informasi tentang spesifikasi para pencari kerja sehingga pasar kerja bisa disesuaikan dengan spesifikasi ini. Kenaikan TPT salah satunya juga ditengarahi karena pertumbuhan pengangguran terbuka (6,77%) yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja dengan status bekerja (2,54%), meski di satu sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam periode tersebut mengalami kenaikan dari 64,35% di tahun 2015 menjadi 65,32% di tahun 2017. Pasar kerja di wilayah Kota Magelang sangat dibutuhkan agar angka TPT bisa terus berkurang. Untuk itu diharapkan bisa untuk mengarahkan potensi tenaga kerja ini ke dalam wilayah, atau dibuat situasi yang kondusif untuk investasi/industri, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.

Tabel 2.19. Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2010-2017

Tahun	Angkatan Kerja (ribu orang)		Angkatan Kerja	TPT	TPAK
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	(ribu orang)	(%)	(%)
2010	53,719	8,226	61,945	13,28	68,46
2011	58,395	7,596	65,991	11,51	71,83
2012	58,542	5,782	64,324	8,99	69,45
2013	59,567	4,313	63,880	6,75	68,37
2014	59,628	4,754	64,382	7,38	68,49

Tahun	Angkatan Kerja (ribu orang)		Angkatan Kerja	TPT	TPAK
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	(ribu orang)	(%)	(%)
2015	57,133	3,927	61,060	6,43	64,35
2016*	na	na	na	na	na
2017	58,582	4,193	62,775	6,68	65,32

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.
* Tidak ada publikasi

2.1.2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. TPAK pada tahun 2010 sebesar 68.46% dan pada tahun 2017 sebesar 65.32%, Dalam beberapa tahun ini kisaran angka TPAK masih sebesar 60-an%. Rata-rataTingkat Partisipasi Angkatan Kerja per tahun pada tahun 2010-2014 sebesar 69%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang usia kerja, yang termasuk Angkatan Kerja kurang lebih 69 orang dan tahun 2015 menurun di sekitar 65 orang. Kondisi ini diindikasikan banyaknya penduduk usia kerja di Kota Magelang yang mencari kerja di luar Kota Magelang untuk bekerja di daerah yang mempunyai kesempatan kerja lebih mapan. Dari data penduduk yang mencari kerja di Kota Magelang juga mengalami peningkatan dari 3.927 di tahun 2015 menjadi 4.193 di tahun 2017. Dibandingkan 2015 jumlah penduduk usia kerja mengalami kenaikan, begitu juga dengan angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Akan tetapi pencari kerja juga mengalami kenaikan sehingga berakibat pada angka TPT yang naik. Hal yang mengembirakan adalah menurunnya jumlah angkatan kerja yang merupakan salah satu indikasi bahwa sudah ada pergeseran bagi penduduk bukan angkatan kerja (yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga) untu memberdayakan dirinya dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Ada keinginan untuk kelompok ini dalam membantu meningkatan perekonomian rumah tangganya.

2.1.2.2.6 Angka Beban Tanggungan Penduduk (*Dependency Ratio* – DR)

Pada tahun 2017 diproyeksi penduduk Kota Magelang mencapai 121.673 jiwa tumbuh 0,31% dengan laju pertumbuhan penduduk usia produktif mencapai 0,37%. Berdasarkan proyeksi kependudukan yang dipublikasi oleh BPS Kota Magelang, dapat diketahui bahwa bonus demografi telah dinikmati oleh Kota Magelang sejak tahun 2010, dimana rasio penduduk usia produktif rata-rata mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk kelompok usia non produktif. Pengendalian jumlah penduduk di Kota Magelang cukup baik dengan laju pertumbuhan penduduk di bawah 0,5% di setiap tahunnya. Angka ketergantungan juga menunjukkan rasio yang semakin rendah dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif di Kota Magelang semakin turun.

Tabel 2.20
Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2010-2017

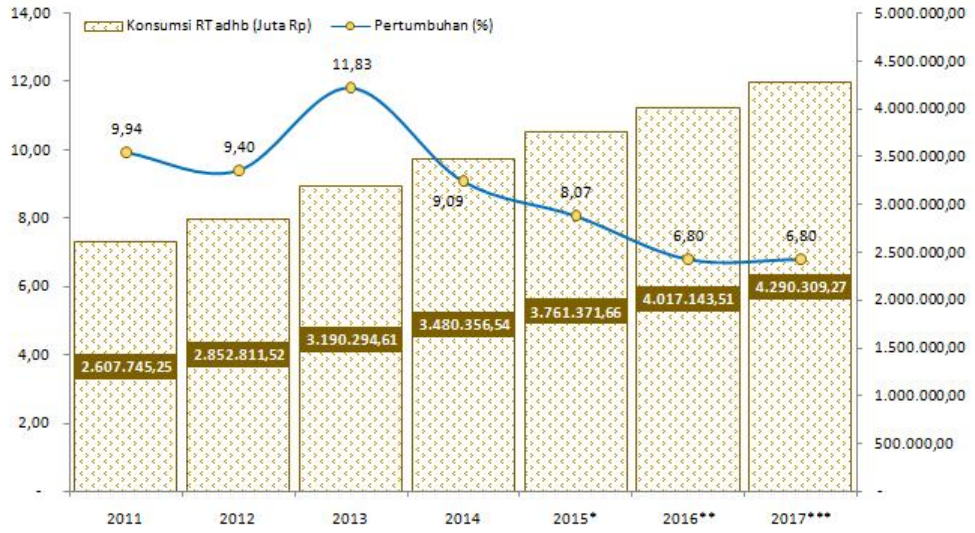
Keterangan	2015	2016	2017
Proyeksi Penduduk Usia 0-14 tahun (jiwa)	26.107	25.897	25.650
Proyeksi Pendudukk Usia 15-64 tahun (jiwa)	85.260	85.534	85.851
Proyeksi Penduduk usia 65 ke atas (jiwa)	9.585	9.862	10.171

Keterangan	2015	2016	2017
Proyeksi Penduduk Akhir Tahun (jiwa)	120.952	121.293	121.673
Proyeksi Angka Ketergantungan (%)	41,86	41,81	41,72

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (diolah)

2.1.2.2.7 Konsumsi Rumah Tangga

Pola konsumsi rumah tangga di Kota Magelang memiliki pertumbuhan positif meski dengan tren menurun sejak tahun 2014. Pada tahun 2016 konsumsi rumah tangga di Kota Magelang mencapai 4,017 triliun Rupiah atau sebesar 58,04% dari total PDRB. Mayoritas konsumsi berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Rokok (31,9%), kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya (28,53%) dan kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelanggaraan Rumah Tangga (19,53%). Di tahun 2017 diprediksi angka konsumsi ini tumbuh eksponensial sebesar 6,8% dengan nominal 4,290 triliun Rupiah.



Gambar 2-15. Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Pertumbuhannya, 2011-2017
Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.
* Angka sementara ** Angka sangat sementara *** Angka Prediksi
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Agama

2.1.2.3.1 **Seni Budaya**

Dari data tentang seni budaya yang tersedia, jumlah organisasi kesenian tahun 2017 di Kota Magelang sebanyak 222 kelompok seni budaya, yang terbagi menurut seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa, seni drama, dan seni lainnya. Kelompok-kelompok seni budaya tersebut terdiri dari antara lain: jathilan, calung, keroncong, campursari, rebana, samroh, dangdut, pop, kuda lumping, topeng ireng, kesenian reog, grasak, dayakan, barongsai, kuntulan,

kubrosiswo, tarian klasik/modern, paduan suara, geguritan, seni rupa, seni lukis, kethoprak, teater, dagelan, perfilman, dan wayang kulit.

Kelompok seni budaya tersebut tersebar di kelurahan (186 kelompok), binaan sekolah (24 kelompok), dan binaan institusi / lainnya (12 kelompok). Jumlah ini masih belum akurat, karena dimungkinkan masih terdapat kelompok kesenian yang belum terdata, seperti kelompok marching band di sekolah-sekolah. Pengelompokan jumlah seniman juga masih terkendala oleh belum jelasnya definisi dan kriteria seseorang dapat disebut sebagai seniman, selain itu, seorang seniman bisa saja menekuni beberapa bidang seni.

Selain kelompok seni budaya, di Kota Magelang, juga terdapat benda dan/atau bangunan cagar budaya, yang terdiri dari bangunan-bangunan kuno, arsitektur kuno, petilasan, tempat-tempat ziarah, dan sebagainya, yang berjumlah 31 buah.

2.1.2.3.2 **Olah Raga**

Mulai tahun 2008, Kota Magelang membangun sebuah stadion, yaitu Stadion Madya yang berlokasi di Kelurahan Kramat Selatan. Pada tahun 2015, nama Stadion Madya berganti menjadi Stadion Moch Soebroto. Nama tersebut dipilih dengan maksud untuk mengenang dr. H. Moch Soebroto, mantan Walikota Magelang, yang menjabat tahun 1971-1981. Saat ini, stadion sudah bisa digunakan untuk berlatih dan bertanding cabang oleh raga sepak bola dan atletik.

Didukung dengan ketersediaan fasilitas yang dari tahun ke tahun semakin bertambah dan lengkap, maka perkembangan olah raga di Kota Magelang sangat baik yang tergambarkan dengan banyaknya cabang olah raga dengan klubnya masing-masing. Fasilitas yang tersedia pun, tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Magelang tetapi dimanfaatkan pula oleh masyarakat luar Kota Magelang, bahkan klub olah raga bergengsi pun memilih Kota Magelang sebagai base camp untuk berlatih dan bertanding.

Beberapa klub olah raga yang hidup dan berkembang di Kota Magelang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2 - 21

Cabang Olahraga dan Jumlah Klub di Kota Magelang

No.	Cabang Olahraga	Jml Klub	No.	Cabang Olahraga	Jml Klub
01.	Sepak Bola	5	19.	Sepak Takraw	2
02.	Bulu Tangkis	20	20.	Tenis Lapangan	11
03.	Panahan	1	21.	Gulat	2
04.	Panjat Tebing	4	22.	Golf	3
05.	Basket	16	23.	Judo	1
06.	Angkat Besi Binaraga	2	24.	Catur	2
07.	Tarung Derajat	1	25.	Kempo	3
08.	Tenis Meja	2	26.	Karate	5
09.	Tinju	2	27.	Menembak	1
10.	Wushu	1	28.	Billyard	1

No.	Cabang Olahraga	Jml Klub	No.	Cabang Olahraga	Jml Klub
11.	Bridge	2	29.	Pencak Silat	5
12.	Dansa	5	30.	Balap Sepeda	2
13.	Tae Kwon Do	10	31.	Renang	4
14.	Atletik	2	32.	Bola Volly	3
15.	Arung Jeram	1	33.	Senam	32
16.	Judo	1	34.	Selam	1
17.	Futsal	20	35.	Paralayang	1
18.	Sepatu Roda	1	Jumlah		175

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (detail data: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang)

2.1.2.3.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi salah satu keunggulan kompetitif di Kota Magelang, dari sisi Sumber Daya Manusia. Beberapa warga Kota Magelang telah mengharumkan nama Kota Magelang baik di tingkat Provinsi, Nasional, bahkan Internasional melalui berbagai prestasi yang berhasil diraih, antara lain:

- Andrew S dan Liwiryon Sudarso, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, memenangkan kontes Imagine Ristek 2011 kategori Rule of Robo Cup tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta, dan mewakili Indonesia ke kontes robot internasional di Istanbul Turki.
- SMP Negeri 1 Kota Magelang Menduduki peringkat pertama nasional dalam perolehan nilai hasil ujian nasional (UN) 2012/2013, dengan nilai rata-rata hasil UN 9,14.
- Jingga Mutiara, siswa SMP 1 Kota Magelang meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional (OSN) mata pelajaran IPS di Padang akhir Mei 2014. Keberhasilan itu mengulangi prestasi kakak kelasnya, Gabriella Krista Anindit, yang juga meraih medali perak OSN mata pelajaran IPS di Batam tahun 2013.
- Fun Nagede Adinsyah (medali perunggu cabang ekonomi), Kurniawati Yuli Ashari (medali perak, cabang ekonomi), dan Husen Wahyu Adi (medali emas, cabang astronomi). Ketiganya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Magelang, mengikuti Olimpiade Sains SMA 2013, yang diselenggarakan oleh ITB.
- Immanuel William Suryowidagdo, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 16 dunia di World Robotic Olimpiade (WRO) Sochi, Rusia (2014).
- Achmad Haulian Yoga, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih juara matematika Sains dan Bahasa Inggris (MSI) tingkat nasional (2014).
- Pada tahun 2015, 2 siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang meraih peringkat 1 pada Olimpiade Sains Nasional, yaitu Nebiba Abdul (bidang Kimia) dan Muhammad Fadlil Ismail (bidang Astronomi).
- Siti Mukaromah, siswa SMK Negeri 2 Kota Magelang, meraih juara 3 Olimpiade Sains Terapan Nasional Siswa SMK bidang lomba Matematika non Teknologi (2015).
- Jingga Mutiara Windyarahma, siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 1 Olipiade Sains Nasional Tingkat SMA Bidang Kebumian (2016).
- Annida Naufal Irvania, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 2 Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (2016).

- Reynaldo Vergiawan Ridho, siswa SLB-B YPPALB, meraih peringkat 1 Lomba Keterampilan Siswa SMALB tingkat Provinsi, Mata Lomba Informasi dan Teknologi (2016).
- Shada Sukma Syahidah, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 1 Lomba Karya Inovasi Pelajar (LKIP) IV SMP tingkat Provinsi dengan Judul Makalah "Sosialisasi Teknik Penjernihan Minyak Jelantah pada Penjual Gorengan di Lingkungan Sekolah".

Selain prestasi yang diraih siswa-siswinya, ada pula prestasi yang diraih warga dari aneka kegiatan terkait IPTEK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang melalui kegiatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA). Sejak tahun 2005 hingga 2013 (kecuali tahun 2012), temuan KRENOVA Kota Magelang selalu mendapatkan penghargaan 20 besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 perwakilan Kota Magelang berhasil meraih peringkat 15 dan juara 3 favorit pengunjung laman web Krenova Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai upaya Pemerintah memfasilitasi dan menggali kemampuan sumber daya manusia di lembaga penelitian dan pengembangan baik pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi dan mendorong peran aktif mereka dalam rangka mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan dalam jangka pendek dan menengah, maka mulai tahun 2010 Pemerintah Kota Magelang melaksanakan kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD). Selain itu, RUD dilaksanakan dalam rangka membangun jaringan keterpaduan kerjasama antara peneliti dalam bidang yang sama dan menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan kemajuan teknologi, dan memanfaatkan berbagai sumberdaya riset yang tersedia di daerah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan daerah. Aplikasi RUD yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 22

Daftar Hasil Riset Unggulan Daerah

Tahun	Judul
2010	1. Pembangkit Listrik Terbarui Hybrid Convertible Tenaga Angin dan Matahari untuk Lampu Penerangan yang Tidak Terganggu Kondisi Listrik Byar Pet dari PLN; 2. Peningkatan Pendapatan Petani Bercocok Tanam Tumpang Sari; 3. Pengembangan Model Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan Dasar di Kota Magelang.
2011	Perakitan dan pembuatan kendaraan Spyder, bekerjasama antara BPPT-Putra Agung Setia dan Pemerintah Kota Magelang.
2012	1. Optimalisasi / pemanfaatan LPG kemasan tabung 12 kg untuk bahan bakar kendaraan sebagai solusi penghematan energi sektor transportasi; 2. Tabulampot pada Berbagai Ukuran Pot dan Dosis Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Strawberry guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Magelang; 3. Pembangkit Tenaga Mikrohidro Model Drum.

Tahun	Judul
2013	1. Kajian Program Magelang Kota Sejuta Bunga sebagai Dasar Perancangan Model Pemberdayaan Masyarakat “Multi Directional Cycle”. 2. Pemanfaatan Tong “Takashimura” untuk Pembuatan Kompos dalam Skala Rumah Tangga bagi Warga Tidar Baru RT 01/XI Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. 3. Menggali Potensi Aliran Sungai sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan. Studi Kasus: Aliran Kali Manggis dan Kalibening Kota Magelang.
2014	1. Persepsi Masyarakat terhadap City Branding Magelang Kota Sejuta Bunga dan Model Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal. Studi kasus: Peserta didik dan pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah Umum Kota Magelang. 2. Kajian Daya Guna Mesin Pencacah Sampah Organik. 3. Videotron dalam Percepatan Pembangunan. Studi kasus: Peran Videotron dalam Percepatan Pembangunan Kota Magelang.
2015	1. Efektifitas Pelatihan Kerja dalam Pengurangan Pengangguran Kota Magelang. 2. Pengembangan Residu Sampah Plastik Kota Magelang menuju Ketahanan Energi Kota Magelang. 3. Pengaruh Penataan Kuliner Kota Magelang terhadap Pendapatan Masyarakat.
2016	1. Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Parkir Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Gunung Tidar sebagai Destinasi Wisata.

Sumber: Kantor Litbang dan Statistik, 2017

Prestasi lainnya yang diraih Pemerintah Kota Magelang dalam bidang IPTEK dan penerapannya adalah:

1) Anugerah prestasi tertinggi di tingkat nasional di bidang IPTEK, yaitu penghargaan Anugerah RISTEK dari Pemerintah Pusat selama 3 tahun berturut-turut (2009-2011). Penghargaan ini diberikan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam membangun IPTEK, sebagai dasar penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah guna mendorong daya saing daerah. Pada tahun 2012 penghargaan yang sebelumnya diberikan kepada Kabupaten/kota dialihkan pada Provinsi, sehingga pemerintah Kota Magelang tidak memiliki peluang mendapatkan Anugerah RISTEK. Pada tahun 2016, penghargaan ini kembali dilaksanakan, dan Kota Magelang berhasil menjadi nominator / finalis (3 besar) peraih penghargaan Budhipraja, serta meraih penghargaan Widigdapura.

   Budhipraja adalah apresiasi pemerintah melalui Kemenristekdikti terhadap kabupaten / kota dalam mengimplementasikan teknologi untuk peningkatan daerah yang diukur dalam 6 aspek, yaitu perencanaan dan inisiasi, SDM, infrastruktur, jaringan, dan hasil inovasi.

   Widigdapura adalah anugerah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten / kota atas dasar pembinaannya terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten / kota dalam mengembangkan komoditas unggulan daerahnya sehingga meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, terpilih nominasi daerah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna terbaik di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang,

Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Wonogiri dan Kota Magelang sebagai Daerah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2016.

2) Penghargaan 102 Inovasi se Indonesia (tahun 2010 yaitu penghargaan yang diterima oleh Oesman Raliby, ST., M.Eng; Dra. Retno Rudjiati, M.Kes. dengan inovasi pengeringan kerupuk dengan Panas Gas Tungku. Pengeringan merupakan metode pengawetan bahan pangan paling awal. Secara tradisional, pengeringan tergantung oleh sinar matahari, membutuhkan areal yang luas serta waktu yang cukup lama dan tidak higenis. Pengusaha skala kecil yang membutuhkan proses pengeringan butuh solusi yang efisien dan ekonomis. Desain sebuah peralatan pengering yang berukuran sedang memanfaatkan panas dari gas buangan tungku pembakaran mencoba menjawab kebutuhan tersebut. Lebih spesifiknya desain tungku ini dibuat untuk pengeringan kerupuk, sehingga tidak tergantung pada kondisi cuaca, lebih higenis dan mampu memproses sampai dengan 90 kg kerupuk kering dalam waktu 4 jam.
3) Penghargaan 103 Inovasi se Indonesia (tahun 2011), yaitu penghargaan yang diterima oleh Drs. Fence Hendrikus Ohoilulin dengan inovasi Bio-Qita Alternatif Pupuk Organik Lokal yang Murah, Mudah, dan Efisien
   Teknologi Bio-QIta berbasis mikroba lokal dikembangkan untuk membantu petani mengolah dan memproduksi pupuk organik secara mandiri. Teknik ini telah teruji dan mampu meminimalkan penggunaan senyawa kimia sintetik. Penggunaan Bio-Qita akan meningkatkan produksi pertanian, menurunkan toksisitas limbah, dan meningkatkan kesehatan tanaman.
4) Best Practice APEKSI, 2012

Dari sisi pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Magelang juga telah melengkapi diri dengan beragam teknologi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, beberapa di antaranya adalah:

- Web resmi Pemerintah Kota Magelang, untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat secara cepat.
- Web resmi Perangkat Daerah, dimana di dalam website tersebut terdapat aplikasi dan informasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- Penggunaan Sistem Informasi untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan layanan, seperti e-KTP (KTP Elektronik), SIMPUS (SIM PUSKESMAS), Perijinan, SIM Keuangan, DataGO, dan lain-lain.
- Free-access WiFI & Internet di beberapa tempat umum, seperti Alun-alun.
- Traffic Management Center, yang memantau kondisi lalu lintas di beberapa titik dengan menggunakan CCTV.
- Media sosial Facebook dan Twitter untuk berkomunikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

2.1.2.3.4 **Agama**

Hidup beragama merupakan hal krusial pengamalan Sila Pertama dari Pancasila. Agama mengandung ajaran hubungan manusia secara vertical ketuhanan dan horizontal antar sesama. Agama mengajarkan perilaku kehidupan yang baik dan bermanfaat, sehingga kehidupannya terus dijaga dan dikembangkan.

Sebagian besar penduduk Kota Magelang beragama Islam (84,53%), sedangkan lainnya terdiri dari agama Kristen Protestan 9,47%, Kristen Katolik 5,40%, Hindu 0,11%, Budha 0,47%, Konghucu 0,01% dan Penghayat Kepercayaan lainnya 0,01%. Data terakhirtahun 2016, jumlah tempat ibadah terdiri dari : masjid sebanyak 153 buah, musholla 217 buah, gereja katolik 2 buah, gereja protestan 26 Buah, vihara 2 buah, kelenteng 2 buah dan rumah ibadah sebanyak 4 buah.

Jumlah jamaah haji menjadi salah satu tolok ukur hubungan vertical penduduk beragama Islam.Tahun 2016 berjumlah 160 orang yang terdiri dari 69 pria dan 91 wanita, dengan rentang usia antara 29-82 tahun. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 147 orang.

Hal terpenting agama dalam kehidupan bermasyarakat adalah kerukunan antar umat beragama. Kondisi Kota Magelang relatif kondusif. Konflik antar umat beragama di Kota Magelang tidak pernah terjadi. Masyarakat hidup berdampingan secara damai bahkan saling berinteraksi positif bahu membahu dalam pembangunan. Kegiatan bersama antar umat beragama ini dilaksanakan seperti dalam kegiatan bakti sosial, peringatan hari besar agama, penyuluhan, dll. Hal ini selaras dengan upaya pencapaian visi Kota Magelang sebagai Kota Religius. Kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar agama dapat dilakukan dengan baik terutama melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh pimpinan dari seluruh agama yang ada.

2.1.3 ASPEK LAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pada hakikatnya pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Magelang melaksanakan urusan pendidikan melalui berbagai program dan kegiatan yang termasuk dalam Misi 2 RPJM Kota Magelang Tahun 2016-2021 yaitu: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan. Kinerja urusan Pendidikan diukur melalui 10 program 46 indikator yang terdistribusi dalam 8 sasaran, dengan capaian sampai dengan Semester II Tahun 2017 terlihat pada tabel di sebagaiberikut :

Tabel 2 - 23

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	69%	65%	89.69%	137,98%	●
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	56%	51%	51%	100%	●
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	APM SD/SDLB/MI/Paket A	100%	98.61%	82.48%	84%	►
		APK SD/SDLB/MI/Paket A	120%	112%	126.70%	113.12%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
	Sembilan Tahun	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	84%	76.00%	74.96%	99%	►
		APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	100%	85.00%	94.19%	111%	●
		Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	0,13%	1:136	1 : 151	108%	●
		Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah12-15	0,24%	1:290	1 : 268	94%	►
		Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	1:16	1:16	100%	●
		Rasio guru SMPterhadap murid SMP	1:14	1:14	1 : 14	100%	●
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,01	0.01	0.01%		●
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,04	0.13	0.09%		●
		Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,001	0,002	0.0005		●
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	0,001	150%	149.67%	99.78%	►
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	150%	155%	144.31%	93%	►
		Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	60%	100%	167%	●
		Penurunan jumlah kenakalan pelajar	24pelajar	46 pelajar	44 pelajar		●
		Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	1	0	0	0	●
		Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	100%	80%	100%	125%	●
		Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	95%	85%	100%	118%	●
		Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	60%	20%	50%	250%	●
3	Program Pendidikan Non Formal	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	97,95%	96.67%	98.57%	102%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraanPaket A	100%	100%	100%	100%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraanPaket B	100%	100%	100%	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
		Angka lulus pendidikan kesetaraanPaket C	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	30%	10.00%	29.5%	295%	●
		Jumlah Juara FASI	-	-	1	100%	●
		Jumlah Juara MTQ	2	1	0	0%	▼
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36,25%	35.75%	72.61%	206%	●
		Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,53%	14.23%	45.21%	326%	●
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88%	86%	84.27%	97.98%	►
		Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	55,15%	54.15%	47.52%	89%	►
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,40%	95.20%	94.65%	99.42%	►
		Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	68,67%	67.97%	61.62%	92%	►
		Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	80%	60%	100%	167%	●
		Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	60%	100%	167%	●
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	2,000	913	46%	▼
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	100%	80%	72%	90%	►
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Propinsi dan Nasional	52	44			
		- Provinsi	34	30 pelajar	14	47%	▼
		- Nasional	18	14 pelajar	6	42.85%	▼
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	97%	88%	98.70%	112%	●
		Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	100%	96%	95.45%	99%	►
		Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	90%	30%	100%	333%	●
		Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	85%	20%	100%	500%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
7	Program Pendidikan Berkelanjutan	Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	100%	66.34%	65%	98%	►
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	60%	40%	75%	188%	●

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari total 46 indikator urusan pendidikan, 30 indikator di antaranya mampu memenuhi atau bahkan melebihi targetcapaian kinerja.

Sedangkan12 indikator capaian kinerja belum tercapai tetapi optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal-hal sebagai berikut:

1) APM SD/SDLB/MI/Paket A

   APM SD/SDLB/MI/Paket A (Target 98,61%, Realisasi 82,48%), target tidak tercapai di akhir tahun 2017 disebabkan menggunakan definisi operasional jumlah siswa usia 7-12 tahun kota magelang dibagi jumlah penduduk kota magelang usia 7-12 tahun. Sedangkan pada jenjang Sekolah Dasar banyak siswa yang berusia 6 tahun. Untuk jumlah penduduk menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B

   APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (Target 84%, Realisasi 74,96%), target tidak tercapai di akhir tahun 2017 disebabkan pengukurannya sudah memnuhi penggunaan definisi operasional jumlah siswa usia 12-15 tahun kota magelang dibagi jumlah penduduk kota magelang usia 12-15 tahun. Untuk jumlah penduduk menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

3) Rasio Sekolah SMP terhadap Penduduk usia sekolah 12 – 15

   Rasio Sekolah SMP terhadap Penduduk usia sekolah 12 -15 (Target 1:290, Realisasi 1:268), target tidak tercapai disebabkan oleh tidak adanya program penambahan pembangunan Unit Sekolah Baru SMP. Dari 23 Sekolah SMP di kota magelang melayani 6.175 siswa. Sedangkan jumlah penduduk usia 12-15 tahun di Kota Magelang semakin berkurang, dan pada sebagian usia 12 tahun masih menjadi siswa pada jenjang Sekolah Dasar.

4) Angka Melanjutkan SD ke SMP

Angka Melanjutkan SD ke SMP (Target 150%, Realisasi 149,67%), target tidak tercapai hanya kurang 0,33% disebabkan oleh berkurangnya jumlah lulusan SD yang masuk ke jenjang SMP, namun demikian dapat dipastikan bahwa seluruh lulusan SD semuanya dapat tertampung di jenjang SMP.

5) Angka Melanjutkan SMP ke SMA

Angka Melanjutkan SMP ke SMA (Target 155%, Realisasi 144,31%), target tidak tercapai masih kurang 10,69% disebabkan karena lulusan SMP melanjutkan sekolah ke Sekolah Kejuruan/SMK. Namun demikian karena adanya sistem Zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian siswa lulusan SMP yang berdomisili dari luar Kota tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMA di Kota Magelang.

6) Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Target 86%, Realisasi 84,27%), target tidak tercapai masih kurang 1,73%. Dari data Guru SD yang berjumlah 909 sudah 766 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, dan masih 143 Guru SD yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Hal ini disebabkan Guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang usianya menjelang pensiun enggan untuk melanjutkan studi S1/D-IV.

7) Persentase Guru SD bersertifikat Pendidik

Persentase Guru SD bersertifikat Pendidik (Target 53%, Realisasi 47,52%), target tidak tercapai masih kurang 5,48%. Dari data Guru SD yang berjumlah 909 baru 432 Guru yang bersertifikat pendidik. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah Guru SD yang bersertifikat pendidik banyak yang pensiun dan adanya perubahan mekanisme yang semakin ketat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud bagi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.

8) Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Target 95%, Realisasi 94,65%), target tidak tercapai masih kurang 0,35%. Dari data Guru SMP yang berjumlah 766 sudah 725 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, dan masih 41 Guru SMP yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Hal ini disebabkan Guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang usianya menjelang pensiun enggan untuk melanjutkan studi S1/D-IV.

9) Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik

Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (Target 67%, Realisasi 61,62%), target tidak tercapai masih kurang 5,38%. Dari data Guru SMP yang berjumlah 766 baru 472 Guru yang bersertifikat pendidik. Hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme yang semakin ketat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud bagi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.

10) Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar

Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar (Target 80 %, Realisasi 72 %) belum dapat mencapai target capaian kinerja karena :

a. Ukuran Ruang Perpustakaan belum memenuhi standar (1,5 Ruang Kelas)
b. Jumlah koleksi buku masih kurang
c. Belum tersedianya ruang baca yang memadai
d. Belum adanya fasilitas pendukung perpustakaan yang memadai
e. Kurangnya tenaga Pustakawan menyebabkan pengelolaan perpustakaan belum profesional

f. Kurang optimalnya peran Asosiasi Tenaga Perpustakaan Indonesia (ATPUSI)
g. Standar Pembangunan Ruang Perpustakaan pada saat pembangunan yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) berbeda dengan standar yang ditetapkan sekarang pada Standar Sarana Prasarana oleh BSNP Kemendikbud

11) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B dari target 96% Realisasi 95,45% atau Capaian kinerjanya kurang 0,55% hal ini disebabkan karena adanya salah satu Sekolah SMP Swasta yang nilai akreditasinya kurang atau sekolah tersebut sudah tidak layak untuk beroperasional.

12) Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar

Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar (Target 66,34%, Realisasi 65%), target tidak tercapai disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan kursus mahir dasar pada tahun 2017. Adapun kursus mahir dasar pramuka bagi pembinaan pramuka diselenggarakan di beberapa sekolah melalui fasilitasi anggaran Bosda.

Disisi lain terdapat 4 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi. Kinerja keempat indikator ini belum memuaskan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Jumlah Juara MTQ

MTQ Tingkat Provinsi belum bisa memenuhi ekspektasi meraih predikat meskipun sudah dilaksanakan pembinaan baik dari Pemerintah Kota Magelang maupun Pembinaan yang telah dilaksanakan BAZNAS Kota Magelang

2) Jumlah Kunjungan ke Desa Buku

Jumlah kunjungan ke Desa Buku (Target 2.000 orang, Realisasi 913 orang), yang baru tercapai 45,65% target tidak tercapai disebabkan oleh :

a. Pengelolaan desa buku belum optimal.
b. Aset desa buku tercatat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang, sedangkan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan
c. Untuk bisa mengakses Desa Buku, Pengunjung harus melalui pintu masuk Taman Kyai Langgeng, sehingga harus membeli tiket terlebih dahulu.
d. Masyarakat lebih memilih bacaan berbasis online
e. Kekurangan sumber daya manusia, terutama yang laki-laki.

3) Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Provinsi dan Nasional

Jumlah Pelajar yang berpertasi pada ajang Provinsi dan Nasional dari Target 30 di jenjang Provinsi baru tercapai 14 dan di jenjang Nasional dari target 14 baru tercapai 6 hal tersebut disebabkan oleh :

a. Target ditentukan masih mengikutkansertakan capaian prestasi pada sekolah SMA/SMK, sedangkan pada tahun 2017 Kewenangan pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi.
b. Kurangnya pembimbingan dari tenaga Ahli/Profesional dari kalangan akademisi Perguruan Tinggi untuk Lomba Olimpiade Sains Nasional untuk Cabang Matematika, IPA dan IPS

c. Kompetisi perseorangan yang sangat ketat untuk Lomba di Tingkat Provinsi dan Nasional. Namun demikian selain lomba perseorangan untuk Lomba-lomba yang kelembagaan untuk prestasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional/USBN SD Tahun 2017 peringkat 1 (satu) Provinsi Jawa Tengah , SD Tarakanita menjadi Sekolah Adi Wiyata Tingkat Nasiona dan SMP Negeri 1 Kota Magelang untuk Ujian Nasional/UN meraih peringkat 1 (satu) Provinsi Jawa Tengah.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras.

2.1.3.1.2 **Kesehatan**

Indikator kinerja urusan kesehatan melibatkan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 24

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	1. Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	●
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%	100%	100%	100%	●
		2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	<20%	30,53%		▼
		3. Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	<45%	8,04%		●
		4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15%	<15,4%	4,28%		●
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Cakupan pengawasan obat dan makanan	75%	68%	70%	102,9%	●
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	98%	97%	95,96%	98,92%	▶
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
		2. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	●
		3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0,31%	<0,31%	0,19%		●
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	86,1%	84%	53,92%	64,19%	▼
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100%	100%	100%	100%	●
		Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100%	100%	100%	100%	●
		Angka Kesakitan DBD	<50	<50	54,65		▶
		Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<101	<105	156		▼
		Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90	90	47%	52,22%	▼
		Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,5%	<0,5%	0,03%		●
		Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	100%	100%	100%	●
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	100%	75%	100%	133,3%	●
		Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	92.5%	40%	100%	250%	●
		Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	100%	75%	100%	133%	●
		Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	80%	100%	100%	100%	●
		Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	100%	60%	100%	166,66%	●
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90%	65%	100%	153,84%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%	15%	4,80%	32%	▼
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	50%	10%	39,68%	396,8%	●
11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	76,47%	52,94%	52,94%	100%	●
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%	85%	100%	117,6%	●
		Cakupan Kunjungan Bayi	96%	96%	100%	104,16%	●
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	90%	91%	101,11%	●
		Cakupan Puskesmas Ramah Anak	35,29%	12%	100%	833,33%	●
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%	75%	70,1%	93,46%	▶
		Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	35,29%	12%	100%	833,3%	●
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	90%	86%	86%	100%	●
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%	95%	93,60%	98,52%	▶
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	95%	92%	100%	108,69%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%	100%	99,90%	99,93%	▶
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA	A	A	100%	●

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari ke-41 indikator kinerja urusan kesehatan, terdapat 31 indikator yang telah mencapai target yaitu indikator Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas, Persentase alat laboraturium terkalibrasi, Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun, Cakupan pengawasan obat dan makanan, Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Kelurahan UCI (Universal Child Immunization), Penemuan dan Penanganan Penderita DBD, Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun, Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS, Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar, Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi, Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin, Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan, Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi, Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar, Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan, Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin, Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design, Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita, Cakupan Puskesmas Ramah Anak, Cakupan Puskesmas Ramah Lansia, Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan, Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani, Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN), Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan. Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 % atau lebih.

Sedangkan 5 indikator akan tercapai, yaitu indikator Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat dengan kinerja capaian baru mencapai 98,92%. Hal ini disebabkan Karena masih ditemukannya anggota rumah tangga yang merokok di rumah. Cakupan Pelayanan Nifas dengan kinerja capaian baru mencapai 99,93% hal ini disebabkan adanya kasus kematian ibu sebanyak 3 orang. Indikator Angka Kesakitan DBD dengan kinerja capaian baru 91,49% (masih terdapat 66 penderita DBD). Indicator Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya dengan kinerja capaian baru 93,46% . Indikator Cakupan

Kunjungan Ibu Hamil K-4 dengan kinerja capaian baru 98,52% hal ini disebabkan adanya ibu-ibu yang hamil di pertengahan tahun sehingga belum mencapai kunjungan keempat sampai dengan akhir tahun. Namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021.

Disisi lain terdapat 5 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi yaitu indikator Persentase rumah sehat, Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan, Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB, Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB dan Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin. Kinerja kelima indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

1) Indikator Persentase rumah sehat dengan kinerja capaian baru 64,19%. Capaian ini turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 101,7% hal ini disebabkan perubahan cara penilaian rumah sehat di Tahun 2017 yaitu mensyaratkan jamban sehat. Dalam hal ini dari sejumlah rumah yang diambil sampelnya, beberapa rumah ditemukan tidak.memiliki jamban sehat.
2) Indikator Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan kinerja capaian 30,53%, masih lebih tinggi dari target Tahun 2017 yaitu <20%. Hal ini disebabkan karena perilaku hidup masyarakat yang kurang sehat, seperti kurang melakukan aktifitas fisik dan pola konsumsi makanan yang kurang seimbang.
3) Indikator Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB dengan kinerja capaian 156, masih lebih tnggi dari target yaitu <105. Hal ini menunjukkan masih cukup tingginya penemuan kasus TB di masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya TB yang sangat mudah menular dan tidak segera berobat meskipun sudah ada gejala TB.
4) Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB dengan capaian 47% turun dari pencapaian Tahun 2016 sebesar 63,80%. Hal ini disebabkan karena penghitungan pada Tahun 2017 sudah memilah antara penderita TB dari dalam Kota dan luar Kota Magelang. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat TB yang masih rendah dan adanya masyarakat yang berobat ke dokter mandiri, sehingga tidak ada laporan adanya kasus TB juga mempengaruhi indicator ini.
5) Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin dengan kinerja capaian 4,80%. Hal ini disebabkan Karena penanganan terhadap pasien masyarakat miskin sudah diselesaikan pada sarana kesehatan strata 1 atau puskesmas, sehingga tidak perlu dirujuk lagi ke sarana kesehatan strata 2 dan 3 atau rumah sakit.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras antara lain dengan upaya sebagai berikut :

1) Sosialisasi dan Pemicuan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) yaitu upaya dalam rangka percepatan peningkatan akses terhadap sanitasi dasar di Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 adalah tersedianya universal access atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan juga sanitasi dengan cara melakukan pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

2) Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yaitu dengan melaksanakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. GERMAS dapat dilakukan dengan cara: Melakukan aktifitas fisik, Mengonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak mengonsumsi alkohol, Memeriksa kesehatan secara rutin, Membersihkan lingkungan, dan Menggunakan jamban. Pada tahap awal, GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur; dan 3) Memeriksakan kesehatan secara rutin.
3) Memberdayakan masyarakat melalui program "Ketuk Pintu" yaitu dengan memanfaatkan kader kesehatan masyarakat yang terdapat di tiap-tiap kelurahan untuk bisa mendeteksi apabila ada warga masyarakat yang suspect TB dan menghimbau agar berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudian melaporkannya ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas diwilayahnya.
4) Sosialisasi kepada petugas rumah sakit, puskesmas dan dokter praktek swasta agar melaporkan kepada Dinas Kesehatan apabila ditemukan kasus TB.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi penanganan sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Penataan Ruang. Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan per sub Urusan antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - 25

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	2.242 meter	942 meter	1.192 meter	126%	●
		2. Persentse panjang trotoar dalam kondisi baik	71,9%	64,39%	65,12%	101%	●
2.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	89%	85%	85%	100%	●
		2. Jumlah shipon yang dibangun	10 bh	6 bh	7 bh	116%	●
3.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun	80%	72%	75%	104%	●

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
		perpanjangan					
4.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	100%	81%%	81%	100%	●
5.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Persentase kawasan strategis yang terbangun	4 kawasan	2 kawasan	3 kawasan	150%	●
6.	Program pengembangan wilayah perbatasan	1. Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	0%	0%	0%	0%	●
7.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1. Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	100%	92,85%	90%	96,93%	●
8.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	96%	86,49%	93%	107,52%	●
		2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	86%	90%	104,65%	●
9.	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	1. Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%	100%	75%	75%	▲
		2. Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	60%	40%	40%	100%	●
10.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	1. Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%	25%	12,5%	85,71%	●

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2016 ≥100% target 2016 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▲ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2016 >80% target 2016 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2016 ≤ 80% target 2016 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 15 indikator urusan pekerjaan umum, 13 indikator dapat tercapai bahkan melampaui, sedangkan realisasi 2 indikator belum tercapai tetapi target akhir RPJMD optimis akan tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Panjang Jalan Penghubung baru yang dibangun dengan target 942 meter capaian kinerjanya melebihi target dengan total panjang jalan baru yang dibangun 1.192 meter, pada tahun ini jalan penghubung baru yang dibangun yaitu jalan penghubung Jalan Tentara Genie Pelajar dengan Perumahan Ngembik dan Jalan Penghubung Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Sarwo Edhie Wibowo.

Indikator prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik dengan target 64,39%, capaian kinerjanya 65,12% atau 101% melebihi target. Berarti dengan total panjang trotoar kota Magelang sepanjang 237.830 meter, yang kondisinya baik sepanjang 154.875 meter, Hal ini dapat diraih dikarenakan pada Tahun 2017 Kota Magelang mendapat dana Bantuan Keuangan Provinsi dan DAK untuk membangun jalan berikut sarpras pendukung jalan dan drainase.

Indikator prosentase panjang drainase dalam kondisi baik dengan target 85% capaian kinerjanya juga 85% atau tercapai 100% hal ini berarti dengan total panjang drainase 237.830 meter, yang kondisinya baik sepanjang 202.156 meter, untuk mencapai target 100% kegiatan yang dilaksanakan selain dari dana bantuan keuangan provinsi dan DAK, juga dianggarkan dengan dana APBD Kota Magelang diantaranya adalah pembuatan afur dan bak kontrol Jalan Ikhlas, pembangunan saluran Jl. Singosari, Jalan Tidar Salakan, sedangkan yang dibangun dengan dana bantuan keuangan provinsi adalah pningkatan saluran drainase jalan Beringin IV.

Indikator jumlah shipon yang dibangun dengan target 0 buah capaian kinerjanya 1 buah, hal ini artinya dari jumlah existing shipon 6 buah dibangun di 2017 menjadi 7 buah, shipon yang dibangun adalah shipon Kelurahan Magelang.

Indikator saluran irigasi dalam kondisi baik dengan target 81% mencapai target 81% atau 100%, hal ini berarti dari panjang saluran irigasi Kalikota yang menjadi kewenangan Kota Magelang sepanjang 5.000 meter, yang dalam kondisi kurang baik yaitu 950 meter, yang menjadi kendala dalam pemeliharaan irigasi adalah masih adanya rumah-rumah liar dan bangunan fasum diatas saluran di sepanjang kali kota serta penyempitan saluran disisi selatan.

Indikator persentase kawasan strategis yang terbangun dengan target 2 kawasan yang dibangun, capaian kinerjanya membangun 3 kawasan strategis atau 150% dari target, 3 (tiga) kawasan strategis yang dibangun adalah:

1. kawasan Gunung Tidar membangun monumen wisata Budaya Gunung Tidar berikut tamannya dan lapangan voli.
2. Kawasan Mantyasih, membangun gapura keluar mantyasih dan melebarkan jembatan menuju mantyasih.
3. Kawasan sport center sanden, yaitu merehab GOR dan menambah tiang lampu stadion Moh. Subroto.

Untuk indikator Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 0% karena pada tahun anggaran 2017 target kinerjanya 0% di RPJMD sehingga tidak dilaksanakan kegiatan.

Indikator prosentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dari target 92,85% capaian kinerjanya hanya mencapai 90% atau 96,93% hal ini dikarenakan dari kondisi 17 unit alat berat yang berfungsi sebanyak 15 unit.

Indikator prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik dengan target 86,49% capaian kinerjanya mencapai 93% atau 107,52% dengan artian dari total jumlah 74 buah jembatan yang konndisinya baik sejumlah 69 buah. Untuk tahun 2017 jembatan yang dibangun yaitu jembatan rumkit dr. Soedjono, jembatan jalan Tentara Genie Pelajar, Jembatan Kalimas dan Jembatan Kel. Kedungsari.

Indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik dari target 86% capaian kinerjanya sebesar 90% atau melebihi target 104,65% berarti dengan total panjang jalan sepanjang 118.915 meter, jalan dengan kondisi baik

panjangnya 107.023 meter, capaian kinerja melebihi target dikarenakan pada perubahan anggaran 2017 Pemerintah Kota menganggarkan dana 10 milyar untuk memelihara jalan-jalan kota Magelang.

Iindikator prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi dari target 100% pada 2017 hanya mencapai target 75% atau total 75% dari target, hal ini dari 4 (empat) kegiatan pembangunan gedung fasilitas kota hanya 1 bangunan yang belum laik difungsikan yaitu pembangunan kolam renang yang direncanakan secara multiyears, dan direncanakan di Tahun 2018 dapat difungsikan.

Indikator prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas dengan target 40% capaian kinerjanya sebesar 40%, tolok ukur dari kinerja ini dari kondisi trotoar kota Magelang yang memenuhi standar aksesibilitas yaitu dari panjang 237.830 meter, hanya 95.132 meter yang memenuhi syarat standar, hal ini dikarenakan dari sempitnya beberapa trotoar, tengah trotoar ditumbuhi pepohonan dan kondisi trotoar yang rusak dibeberapa ruas jalan.

Indikator prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien dari target kinerja sebesar 25% capaian kinerjanya sebesar 85,71%, hal ini diraih dengan adanya 28 proyek fisik konstruksi yang sesuai syarat sebesar 24 proyek.

Sedang Kinerja pembangunan sub urusan Penataan Ruang antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 -26

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2016	Kinerja RKPD Th.2016	Status Capaian
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%	50%	8%	16%	▼
		Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	●
		Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	15%	15%	▼
2	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	27 %	24%	23.33	97%	●
		Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	10%	1%	0%	0%	▼
		Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	38%	30%	31%	100%	●
		Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua		20%	20%	100%	●

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 7 (tujuh) indikator program yang dilaksanakan oleh Sub Urusan Penataan Ruang di Tahun 2017, hingga triwulan IV ada 4 (empat) indikator ang sesuai target, dan ada 3 (tiga) indikator yang perlu upaya keras. Untuk penjelasan kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) sampai triwulan IV tahun 2017 baru memiliki 1 dokumen RTRW Kota Magelang atau sekitar 8 % dari total 13 dokumen, sedang target di tahun 2017 sebanyak 6 dokumen yaitu 1 Perda RTRW dan 5 perda RDTRK atau sebesar 50%. Tahun 2017 dokumen RTRW yang ditetapkan melalui Perda nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031diajukan untuk diajukan revisi, didasari usia Perda RTRW sudah 5 (lima) tahun dan dari hasil Peninjauan Kembali pada Tahun 2016 terdapat penyimpangan terhadap rencana sebesar 20 %, sehingga direkomendasikan dilakukan revisi. Hingga Triwulan IV Reperda Revisi RTRW sudah dilakukan pembahasan di Pansus DPRD.

Indiktor Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) masih jauh dari raget yang ditetapkan, disisi lain keberadaan dokumen RDTRK dan RTBL yang merupakan dokumen operasional dalam penataan ruang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kota Magelang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Dokumen RDTRK dan RTBL diantaranya sebagai berikut:

1. Panjangnya proses yang harus dipenuhi dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RDTRK, mulai dari penyusunan materi teknis, konsultasi publik, persetujuan DPRD, rekomendasi peta dari BIG, rekomendasi teknis dari BKPRD Provinsi, Persetujuan Subtsansi dari Kementrian Agararia dan Tata Ruang, serta penetapan DPRD Kota Magelang. Dari 5 (lima) Raperda RDTR yang diajukan persetujuan subtansi ke provinsi sejak tahun 2014 hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan subtsansi.
2. Banyaknya alih fungsi lahan sehingga perlu dilakukan Revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang sebagai dasar penetapan Raperda RDTRK.
3. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang harus diakomodir dalam dokumen Tata Ruang yang belum jelas arahannya didaerah yaitu rencana reaktivasi kembali jalur kereta api dan kewajiban pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Harmonisasi rencana pola ruang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai lampiran pengajuan Persetujuan Subtansi.

Upaya yang harus dilakukan agar target Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) dapat terus tercapai yaitu

1. Tetap konsisten sesuai jadwal dalam memenuhi proses penetapan Dokumen RTRW, RDTRK dan RTBL. Dimana untuk Tahun 2018 ini Raperda revisi Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW harus bisa ditetapkan sehingga 5 (lima) Raperda RDTRK sebagai turunan dari Perda RTRW bisa ditetapkan di Tahun 2019.
2. Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik dengan BKPRD Provinsi yang memberikan rekomendasi teknis serta Kementrian ATR yang memberikan Persetujuan Subtansi.
3. Segera mengajukan pembahasan ke Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan rekomendasi.
4. KLHS yang menjadi salah satu persyaratan untuk segera dilakukan validasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
5. Koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya harmonisasi pola ruang dan batas wilayah administrasi.

Capaian realisasi indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara OPD teknis yang menangani Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perizinan. Walaupun indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan ini selalu tercapai 100%, ada beberapa kendala dalam pelaksanan perijinan, diantaranya sebagian besar masyarakat melakukan ijin setelah ada aktivitas pembangunan, sehingga berdampak kesulitan dalam memberikan arahan kesesuaian peruntukan ruangnya. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW serta meningkatkan pengendalian dan pelayanan informasi penataan ruang.

Indikator tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital baru tercapai 15 % dari target yang ditetapkan di Tahun 2017 sebesar 100%. Dari 6 dokumen peta yang direncanakan yang terdiri 1 dokumen peta RTRW (1:25.000) dan 5 peta rencana rinci atau RDTRK baru (1 : 5.000) hingga triwulan IV Tahun 2017 baru 1 dokumen peta RTRW yang sudah jadi dan terinformasikan ke masyarakat.

Kendala yang dihadapi ini yaitu belum ditetapkannya Raperda tentang RDTRK yang menunggu hasil revisi Perda RTRW Kota Magelang Tahun 2018 ini.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, dengan mengimformasikan mengenai peta RTRW Kota Magelang ke Kelurahan dan masyarakat, selain itu informasi mengenai RTRW Kota Magelang juga dipasang di beberapa tempat publik seperti di sekitaran Alon-alon Kota Magelang, Taman badaan, dan Kawasan Pemerintah Kota. Hal ini dapat memberikan informasi atau sosialisasi secara baik kepada masyarakat umum tentang rencana tata ruang Kota Magelang dalam 20 tahun mendatang. Tentunya sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat ikut mendukung rencana tersebut karena hal ini demi keberlanjutan tata ruang Kota Magelang 20 tahun mendatang. Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) perlu dilakukan terus menerus dan lebih luas supaya masyarakat akan lebih memahami Rencana Tata Ruang.

Indikator Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan ditargetkan 24% di triwulan IV Tahun 2017 realisasi sebesar 23,9 % atau 8.479 unit bangunan ber IMB dari 35.455 unit bangunan diseluruh Kota Magelang.

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.
- Pelestarian/pemugaran.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan diantaranya yaitu:

1. Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan sesuai arahan tata ruang masih rendah.
2. Belum optimalnya partisispasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan target Rasio bangunan ber IMB persatuan Bangunan diantaranya:

1. meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.
2. sosialisasi terkait Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung ditiap kecamatan serta memanfaatkan papan informasi yang tersedia.
3. Pemberian keringanan berupa kegiatan Pemutihan IMB kepada masyarakat.

Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1% realisasi hingga triwulan IV Tahun 2017 masih 0%, hal tersebut dikarenakan belum adanya Peraturan yang mengatur mengenai ijin mendirikan reklame serta aturan teknis yang mendasarinya. Hingga saat ini semua reklame yang ada di Kota Magelang belum ada IMB, hanya ditarik restribusinya melalui Perda restribusi pelayanan tertentu. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri, yaitu dengan penyusunan Raperda tentang Reklame, serta diharapkan dapat segera dilakukan pembahasan di DPRD.

Indikator rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB hingga triwulan IV Tahun 2017 tercapai 28 % dari target 30 %. Kendala yang dihadapi diantaranya, surat teguran yang dilaksanakan masih terbatas pada bangunan yang sedang dalam proses pembangunan yang belum mengajukan ijin serta pada bangunan yang melanggar peruntukan pola ruangnya. Untuk bangunan yang sudah terbangun tapi belum ber IMB masih belum dijangkau.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target di Tahun 2017 sebesar 30% yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.

Adapun target indikator Urusan Perumahan dan Realisasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 - 27

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM-D (2015)	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
					Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program	1. Rasio infrastruktur	93%	100%	96%	96.28%	100.29%	●

No.	Program Prioritas		Kinerja Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM-D (2015)	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
						Target 2017	Capaian 2017		
	Pembangunan Infrastruktur		lingkungan permukiman dengan kondisi baik						
2.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	2.	Luas kawasan kumuh (ha)	5.62	0 Ha	2 Ha	1.04 Ha	4.58 Ha	
						64.41%	81.49%	127%	●
3.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	3.	Luas kawasan kumuh (ha)	3.41	0 Ha	1 Ha	7.13 Ha	(-3.72Ha)	
						70.67%	(-109)%	(-154)%	▼
4.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	4.	Luas kawasan kumuh (ha)	2.95	0 Ha	1 Ha	1.40 Ha	1.55 ha	
						66.10%	53%	79%	▼
5.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	5.	Luas kawasan kumuh (ha)	4.24	0 Ha	1.5 Ha	n/a - Ha (T2016=3 Ha)	1.10 Ha	
						65%	(T2016=25,94%)	40.14%	▼
6.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	6.	Luas kawasan kumuh (ha)	6.37	0 Ha	2 Ha	7.90 Ha		
						69%	-24%	-35%	▼
7.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	7.	Luas kawasan kumuh (ha)	3.81	- Ha (T2016=7Ha)	3.5 Ha	1.85 Ha	1.96 Ha	
					(T2016)8.14%	51%	632%	632%	●
8.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	8.	Luas kawasan kumuh (ha)	9.26	0 Ha	n/a- Ha (T2016=7,26)	7.71 Ha	1.55 Ha	
						21.60%	16.74%	77.49%	▼
9.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	9.	Luas kawasan kumuh (ha)	6.59	0 Ha	2	0.19 Ha		
						69.65%	97%	139%	●
10.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	10.	Luas kawasan kumuh (ha)	3.84	0 Ha	1.5 Ha	4.09 Ha		
						60.94%	-6.56%	-10.77%	▼

No.	Program Prioritas		Kinerja Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM-D (2015)	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
						Target 2017	Capaian 2017		
11.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	11.	Luas kawasan kumuh (ha)	7.55	0 Ha	2.5	5.28 Ha		
						66.89%	30.07%	44.95%	▼
12.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	12.	Luas kawasan kumuh (ha)	3.88	0 Ha	3.88	3.77 Ha		
						-n/a	2.84%	102.84%	●
13.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan	13.	Luas kawasan kumuh (ha)	16.2	0 Ha	5	4.11 Ha		
						69.14%	74.63%	108%	●
14.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	14.	Luas kawasan kumuh (ha)	6.71	0 Ha	2 Ha	2.81 Ha		
						70.19%	58.12%	83%	▶
15.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	15.	Luas kawasan kumuh (ha)	13.62	0 Ha	5 Ha	10.90 Ha		
						63.29%	20.01%	31.61%	▼
16.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	16.	Luas kawasan kumuh (ha)	11.98	0 Ha	4 Ha	0.40 Ha		
17.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	17.	Luas kawasan kumuh (ha)	8.46	0 Ha	3 Ha	4.46 Ha		
						64.54%	47.26%	73.22%	▼
18.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	18.	Luas kawasan kumuh (ha)	6.6	0 Ha	2 Ha	4.37 Ha		
						33.79%	33.79%	48.48%	▼
19	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	19.	Persentase penduduk berakses air minum		100%	92.30%	87.88%	95%	▶
		20.	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai		90%	88%	65.19%	74%	▼
		21.	Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan		12%	8%	19.13%	239%	●

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM-D (2015)	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
					Target 2017	Capaian 2017		
20.	Program Pengembangan Perumahan	22. Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni		5 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
				100%	40%	40 %	100%	●

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Luasan kawasan Kumuh di Kota Magelang, berdasarkan data terbaru yakni seluas 67,41 Ha (Sumber: Dokumen RP2KPKP Kotaku, 2017). Data tersebut dapat diasumsikan bahwa Pada Tahun 2017, infrastruktur permukiman Kota Magelang sebagian besar berada dalam kondisi yang baik yaitu mencakup seluas 1744.59 Ha yang sudah terlayani, atau sebesar 96.28% dari total luas wilayah yang mencapai 1812 Ha. Dapat dikatakan luas wilayah kumuh hanya sebesar 3.72% dari total wilayah, dan tersebar di 17 Kelurahan. Untuk itu, Target capaian di Tahun 2017 untuk proporsi infrastruktur sebesar 96 % sudah terlampaui (≥100).

Data dasar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang tertanggal: 19 November 2015 , Nomor: 050/280/112-310 Tahun 2015 tentang "Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Magelang", dikeluarkan berdasarkan kajian dari sisi top down yaitu pengidentifikasian, analisa, dan penetapan dilaksanakan oleh OPD, dikarenakan urgensi mendesak/atas dasar ketentuan Pemerintah Pusat. Perubahan data tersebut dari seluas 121,09 Ha. menjadi hanya seluas. 67.405 Ha pada Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang merupakan studi lanjutan yang lebih komprehensif dari pendekatan teknokratis dan partisipatif, dimana hasil dokumen tersebut dalam kerangka mencapai target nasional 100-0-100/program kota tanpa kumuh (KOTAKU), maka mulai tahun 2018 target capain pengurangan luasan perumahan dan kawasan permukiman Kumuh Kota Magelang secara umum berkurang secara signifikan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan data dasar.

Ketidakseragaman perhitungan luasan diakibatkan oleh rumusan dan variabel yang masih berubah. Tahun 2015, belum disusun rumusan yang tepat mengenai perhitungan dalam monitoring dan evaluasi dalam program pengentasan kawasan kumuh yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sedangkan tahun 2017, kriteria tingkat kekumuhan sendiri alat ukurnya mengalami perubahan indikator, berdasarkan Peraturan Menteri PU PR nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, maka variabel perhitungan kawasan kumuh menggunakan 7 aspek dengan 19 kriteria, sebagai berikut :

NO	ASPEK	KRITERIA
1	Bangunan gedung	a Ketidak teraturan bangunan

NO	ASPEK		KRITERIA
		b	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata rua
		c	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2	Jalan lingkungan	a	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman;
		b	Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3	Penyediaan air minum	a	Ketidaktersediaan akses aman air minum
		b	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
4	Drainase lingkungan	a	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
		b	Ketidaktersediaan drainase
		c	Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
		d	Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya;
		e	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
5	Pengelolaan air limbah	a	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
		b	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6	Pengelolaan persampahan	a	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
		b	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		c	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase
7	Proteksi kebakaran	a	Prasarana proteksi kebakaran
		b	Sarana proteksi kebakaran.

Penanganan kawasan kumuh tidak dapat selesai dilaksanakan satu perangkat daerah, tetapi merupakan komposit yang saling melengkapi OPD terkait.

Permasalahan lainnya adalah adanya kawasan-kawasan kumuh (slum) yang berada di kawasan permukiman ilegal (squatter), penghunian ini diantaranya berada di bantaran sungai/irigasi, dan sepanjang jalur ex-rel kereta api, dimana kawasan-kawasan atau bangunan-bangunan liar tersebut bukan berada dalam aset atau tanah kewenangan pemerintah daerah, sehingga penangannnya dari segi fisik agak terhambat, penanganan dan pencegahan yang bisa dilakukan adalah dari segi pendekatan non-fisik.

Secara umum, permasalahan tidak terletak pada substansi penanganan kawasan kumuh, akan tetapi hanya dari sisi administrasi saja, sehingga ada beberapa yang tidak tercapai, adapun masalah substansi penanganan

kawasan kumuh terbentur pada kewenangan yang dimiliki daerah pada kawasan-kawasan ilegal yang ada pada aset yang merupakan kewenangan instansi/lembaga lain.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah pencapaian target indikator Persentase penduduk berakses air minum mencapai kinerja 95% atau akan tercapai, dimana 38.930 Kepala Keluarga (KK) sudah terlayani air minum, pelayanan ketersediaan air minum ini merupakan pelayanan melalui perpipaan yang disediakan oleh PDAM Kota Magelang, sedangkan capaian sebenarnya lebih tinggi lagi, karena tidak mencover data masyarakat yang menggunakan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) dan menggunakan air permukaan (Mata Air), alasan kenapa tidak dimasukkan dalam data karena air minum mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi termasuk syarat kesehatan.

Indikator kedua yaitu capaian ketersediaan sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 74% (target 88%, tercapai 65,19%, atau capaian total penduduk terakses ke jamban dan septicktank pribadi sampai dengan Tahun 2017 sebesar 28.880 KK. Hal ini perlu capaian yang lebih keras dari OPD untuk pemenuhan akses ketersediaan jamban dan tanki septic, upaya yang telah dilakukan adalah melalaui cara sosialisasi agar tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui program Sanitasi Total Berbasia Masyarakat yang dalam data Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Kota Magelang Tahun 2017. Masih terdapat sekitar 1.653 KK yang belum mempunyai tangki septic, walaupun terkadang sudah mempunyai jamban, akan tetapi air limbah domestik masih dibuang ke air permukaan seperti sungai dan saluran irigasi.

Capaian ketersediaan Sistem Air Limbah Skala Kawasan, digunakan pendekatan KK yang terlayani oleh IPAL Komunal, MCk plus-plus, dan Sanitasi Langsung Berbasis Masyarakat (SLBM), adapun capaian sampai dengan Tahun 2017 ini sudah melebihi target sebesar 19.13% (dari target 8%), dengan tingkat pelayanan akses sebesar 8.474 KK di Kota Magelang, dengan demikian capaian kinerja pada Tahun 2017 untuk indikator tersebut sebesar 239%. Pada kenyataannya seharusnya indikator ini mempunyai definisi operasional yaitu berupa SPALD-T (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat) yang melayanai 1400 KK, di Kota Magelang belum mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dimaksud, sehingga indikator ini digunakan untuk menghitung capaian pelayanan IPAL Komunal Setempat yang sebenarnya masuk dalam kategori SPALD-S (setempat).

Permasalahan yang dihadapi pada penyediaan air minum dan air limbah menurut fakta lapangan bukan kekurangpedulian masyarakat, akan tetapi lebih kepada wiliingness to pay terhadap prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.Program Hibah Air Minum misalnya, Pada Tahun 2017 ada sejumlah 1003 KK yang mendapat Sambungan Rumah, dengan dipasangkan saluran pipa air minum dan meteran gratis ternyata ada sebagain masyarakat yang enggan untuk menggunakan, masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah mendapatkan hibah ternyata tetap memilih menggunakan sumber mata air yang ada di sekitarnya, karena ketidaksanggupan untuk membayar rekening. Pada Bantuan SLBM dan IPAL Komunal pada tahap prakonstruksi terbentur pada ketersediaan lahan yang akan dibangun fasilitas/sarana penempatan tangki septic, sedangkan kondisi pasca penyambungan, jumlah penerima manfaat tidak berkembang/bertambah, karena terkendala biaya beban penyambungan dari jamban ke IPAL Komunal yang harus ditanggung pribadi.

Program Pengembangan Perumahan Daerah ditempuh dengan dua cara yaitu pembangunan Rumah Susun Sewa dan Rumah Susun Milik. Pada Tahun 207 dengan target sejumlah 2 (dua) buah sudah terpenuhi 100% dengan adanya pembangunan rumah susun sewa (vertikal) 1 twin blok dan rumah khusus (horisontal) rumah tipe 28 dengan

jumlah 30-50 unit di Kelurahan Wates. Pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan didahului dengan kegiatan pematangan lahan. Sampai denan Tahun 2017 Pemda sudah memiliki UPTD Rusunawa yang mengelola 2 (dua) unit Rusunawa, yaitu Rusunawa Potrobangsan dan Rusunawa Tidar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perumahan ini adalah mencari luasan lahan sesuai dengan syarat minimal yaitu hamparan seluas 3500 m^2 dan menjadi aset pemerintah daerah, lahan tersebut sebagai readiness criteria yang wajib disiapkan oleh Pemda untuk mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat.

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 28

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman,

Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10	8	8	100%	●
		Terpublikasikannya dialog antar agama	12	5	6	120%	●
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	4	1	1	100%	●
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%	100%	●
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	3	100%	●
2	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	100%	18,75%	18,75%	100%	●
		Persentase ormas yang difasilitasi	9,84%	7,87%	7,82%	99,36%	►
3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	80%	72,84%	91,05%	►
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai-nilai luhur Pancasila	0%	0%	0%	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		Perda pelarangan peredaran narkoba	0	0	0		
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	6	2	2	100%	●
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1,13%	1,40%	123,89%	●
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15%	3%	2,44%	81,33%	►
		Rasio jumlah siskamling aktif	100%	0,78%	0,69%	88,46%	►
4	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	47.5%	37,5%	37.09%	98,90%	►
		Cakupan tim relawan siaga bencana	14,71%	2.94%	30 org		▼
		Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	100%	25%	0%	0%	▼
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	25%	16%	64%	▼
		Cakupan penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana:	35,29%	6%	6%	100%	●
		- Pratama	0	1	1	100%	●
		- Madya	0	0			
		- Utama	0	0			
		Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada	ada	1 Perwal	100%	●
5	Program pendidikan politik masyarakat	Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	1	1	100%	●
		Tingkat partisipasi politik	-	-	-		
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	80%	69,60%	72.73%	104,49	●
		Database ormas yang akurat	77%	69,00%	69,55%	100,80%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	57,39%	27,79%	7.41%	26.66%	▼
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/ hari	3 kali/ hari	3 kali/ hari	100%	●
		Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	100%	90%	100%	111,11%	●
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7,89	6,52	4,91	75,3%	▼
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	16,67	10%	18%	180%	●
		Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	98%	94,5%	100%	105,8%	●
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	77,27	70,47	55%	78,04%	▼
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	23,97%	11,27%	17%	107%	●
		Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	21	9	9	100%	●
8	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penanganan penyakit masyarakat	95%	90%	100%	111,11%	●
		Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	0	0	1		
		Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	0	-	-		
9	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	75%	25%	34.48%	137,92%	●
		Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur	5%	5%	684.48%	13689,6%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	66,67%	53,33%	53,33%	100%	●
		Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	5	5	5	100%	●
		Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	20%	5%	-		▼
		Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	-	-	-		
		Cakupan ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap PD		10%	34,78%	347,8%	●
		Prosentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah		83%			▼
		Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	30%	-	-		
		Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat	-	-	-		
10	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	-	-	-		

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)

► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 51 indikator kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 41 indikator ditargetkan pencapaiannya di tahun 2017. Dari 41 indikator tersebut terdapat 28 indikator yang telah mencapai target, 5 indikator beradadiantara 80% s.d. 100%, dan 8 indikator masih dibawah 80%.Beberapa kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Penanggulangan bencana.

Tim relawan siaga bencana disiapkan melalui kegiatan pembentukan Kelurahan Rintisan Tangguh Bencana, dimana pada tahun 2017 baru dibentuk 1 kelurahan dengan jumlah personel 30 orang. Definisi Operasional dari indikator adalah membandingkan antara jumlah relawan tangguh bencana dengan jumlah relawan. Oleh karena belum adanya data relawan, maka indikator ini belum dapat dihitung.

Dokumen rencana kontijensi penanggulangan bencana identik dengan SPP dan SOP. Dokumen ini belum disusun untuk semua jenis bencana yang akan ditangani.

Sarana prasarana yang ada untuk penanggulangan bencana dirasakan masih kurang, untuk mengetahui kebutuhannya, perlu dilakukan nventarisasi sarana-prasarana apa saja yang harus tersedia (jenis, volume berikut spesifikasinya) dihadapkan pada kondisi riil yang ada.

2. Surat Keterangan Terdftar (SKT) Organisasi

   Masih banyak ormas yang enggan melakukan pendaftaran maupun memperbaharui datanya (registrasi ulang). Keengganan tersebut muncul karena beberapa faktor antara lain :

   a. Kurangnya kesadaran akan kewajiban melakukan pendaftaran;
   b. Eksistensi dari ormas juga bervariasi, ada yang terorganisir dengan baik, ada yang bersifat temporer dan insidental berdasarkan minat-minat tertentu, sehingga kadang aktif kadang pasif;
   c. Merasa tidak memperoleh manfaat dari keberadaan SKT.

3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja

   Memperhatikan Permendagri Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, maka standar jumlah personel Satpol PP Kota Magelang berjumlah 150 orang PNS, sedangkan saat ini hanya berjumlah 80 orang. Jumlah itupun termasuk pegawai honorer (non PNS).

4. Cakupan Linmas

   Idealnya jumlah linmas setidaknya sama dengan jumlah RT. Untuk mengatasi kekurangan personel, maka perekrutan anggota linmas akan dilaksanakan secara bertahap.

5. Tempat ibadah

   Belum ada pengkajian terhadap standar tempat ibadah sebagaimana ditetapkan oleh Kemenag, dihadapkan dengan kebutuhan umat. Sehingga pengukuran/penilaian pun belum dapat dilakukan.

   Kebijakan/regulasi dan kajian/perencanaan operasional terkait tempat ibadah, pembiasaan ibadah dan lain-lain yang berhubungan dengan upaya pencapaian visi Religius belum ada.

Upaya yang perlu dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah :

1. Meningkatkan jumlah tim relawan siaga bencana, membentuk Kelurahan Rintisan Tangguh Bencana, inventarisasi data relawan, menyusun rencana kontijensi (SPP-SOP) untuk semua jenis bencana, inventarisasi dan pengadaan sarana-prasarana penanggulangan bencana.
2. Monitoring, evaluasi dan sosialisasi SKT bagi ormas.
3. Rekruitmen PNS untuk Satpol PP.
4. Perekrutan anggota linmas.
5. Pengkajian, perencanaan dan pengembangan Kota Religius.

2.1.3.1.6 **Sosial**

Target dan realisasi indikator urusan sosial tahun 2017 sesuai dengan indikator RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 adalah tampak pada tabel berikut :

Tabel 2 - 29

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	100%	98,30%	98,30%	▶
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40,00%	20%	11,40%	57%	▼
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	16,74%	10%	15,31%	153,1%	●
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	100%	100%	100%	●
		Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	7	3	8	266,66%	●
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	20%	0%	0%	▼
4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	90%	70%	94,25%	134,64%	●
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	83%	50%	61,53%	123,06%	●
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	40%	15%	19,53%	130,2%	●

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari ke-10(sepuluh) indikator kinerja urusan sosial, terdapat 7 (tujuh) indikator sudah memenuhi target yaitu indicator Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian, Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya, Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif, Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan social, Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA, Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia, Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial. Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 % atau lebih.

Sedangkan 1 (satu) indikator akan tercapai yaitu Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos dengan kinerja capaian baru mencapai 98,90%.

Sementara itu 2 (dua) indikator lainnya masih perlu usaha keras untuk dapat mencapai target yaitu indicator Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dan Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi sasaran utama kegiatan urusan sosial. Data PMKS Tahun 2016 digunakan sebagai database kegiatan Tahun 2017.Validasi data dilaksanakan pada akhir tahun 2016.

Adapun secara detail capaian masing masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos

   Pada Tahun 2017 total proposal yang masuk sejumlah: 2.953. Sampai dengan akhir Bulan Desember yang telah diverifikasi dan atau terdistribusi sekitar 2.903 proposal. Ada proposal yang kembali atau terselip sehingga tidak tercapai 100 %

   Peran Bagian Kesra dalam hal ini adalah memverifikasi kelengkapan proposal dan mendistribusiakannya ke OPD pemberi rekomendasi. Diharapkan ada sistem aplikasi Hibah Bansos, serta ada link ke OPD dan kelurahan.

2) Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian

   Total jumlah permohonan 483 orang. Disetujui 473 namun yang mengajukan pencairan 470. Adapun 3 di antaranya; 2 pemohon bekerja di luar kota dan 1 sakit sehingga opname. Empat (4) pemohon di tolah karena tidak sesuai kriteria. Ada 6 permohonan tidak ditindaklanjuti, di antaranya; 3 pemohon meninggal, 1 istri PNS, 1 pindah domisili, dan 1 pengajuan duplikasi.

3) Persentase lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

   Di Tahun 2017 sebanyak 70 orang lanjut usia terlantar telah menerima jaminan sosial berupa uang sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya yang berasal dari dana Provinsi dan diberikan selama 10 bulan setiap tahunnya. Sementara itu ada 614 lanjut usia terlantar di Kota Magelang sehingga baru sebesar 11,40 persen lanjut usia terlantar yang mendapatkan jaminan sosial. Indikator ini masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 20 persen

di tahun 2017 dan meningkat menjadi 30 persen di tahun 2018. Perlu menjadi perhatian bahwa program ini telah berakhir pada Tahun 2017 dan akan diintegrasikan ke Program Keluarga Harapan (PKH). Diharapkan indikator ini bisa dipenuhi melalui PKH untuk lanjut usia. Oleh karena itu sangat perlu dan mendesak bagi pemerintah Kota Magelang untuk mengintervensi pencapaian target indikator ini melalui penganggaran APBD Kota.

4) Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

   Di Tahun 2017 PMKS berjumlah 750 orang dari 4.898 orang fakir miskin telah menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE yang terfasilitasi dalam 75 KUBE. Dana ini berasal dari pusat sebagai salah satu fungsi pemerintah pusat dalam redistribusi pendapatan.Indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi target Akan tetapi perlu diantisipasi dimulai tahun ini agar pencapaian target tidak menurun di tahun tahun mendatang. Pencanangan e-warung oleh pemerintah pusat diharapkan bisa membantu pencapaian target indikator di masa mendatang disamping antisipasi anggaran dari pemerintah kota sangat diharapkan untuk menstimulasi pencapaian target ini.

5) Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif

   Indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Di Kota Magelang terdapat 12 lembaga kesejahteraan sosial yang aktif diantaranya Panti Sosial Asuhan Anak sebanyak 8 buah, Panti Sosial Tresna Wirda 1 buah, Panti Sosial Bina Grahita 2 buah, dan Panti Sosial Bina Laras 1 buah. Keseluruhan lembaga kesejahteraan ini secara aktif membantu instansi sosial dalam penyelenggaran sarana prasaran kesejahteraan sosial.

6) Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial

   Pada tahun 2017 Bagian Kesra memfasilitasi dan mengkoordinasikan dana CSR dari berbagai badan usaha. Selama kurun waktu 2017 terdapat 6 lembaga yang telah bekeja sama dengan Pemkot dalam penggunaan dana CSR, yaitu:
   - Bank Jateng, - Bank Jateng Syariah, - Bank Magelang, - BPR BKK Kota Magelang, - PDAM Kota Magelang, - PDOW Taman Kyai Langgeng. Selain itu terdapat dana CSR yang masuk melalui Dinas Sosial yaitu dari Bank Magelang, BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah), OHANA yang memberikan bantuan berupa 1 alat bantu dengar dan 4 kursi roda anak.

7) Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

   Realisasi indikator Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Pembentukan WKBSM di Kota Magelang sudah dilaksanakan di Kelurahan Rejowinangun Selatan dan di Kelurahan Tidar Selatan, tetapi dari keduanya masih belum dapat menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi agar WKBSM yang telah terbentuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Direncanakan pada Tahun 2018 ini Dinas Sosial Kota magelang akan mulai mengaktifkan kembali WKBSM.

8) Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan napza

   Di tahun 2017, target indikator kinerja ini sudah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, Namun demikian perlu antisipasi di tahun-tahun mendatang agar target yang ditetapkan tetap mampu untuk dicapai. Dari 261 gelandangan, pengemis, pemulung, WTS dan korban penyalahgunaan napza di Kota Magelang baru 246 orang yang ditangani.

9) Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia

Bagian Kesra memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan lembaga / yayasan panti asuhan/panti jompo pada tahun 2017 dengan target sebanyak 8 panti asuhan/panti jompo. Panti Asuhan yaitu : - Panti Asuhan/Anak Yatim Muhammadiyah, - Ihsanul Fikri, - Ar Rahman, - Jami'atul Quro'

Ponpes: - Tahfidzul Qur'an, - Tahfidz Al Falah, - Sirojul Huda, - Al Ichsan Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Ramadhan 1438 H.

10) Persentase penyandang cacat mental dan fisik tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial

Dari 343 orang penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial, baru 67 orang yang mendapatkan bantuan sosial sosial. Meskipun indicator ini telah memenuhi target Tahun 2017, kondisi ini harus menjadi agenda utama urusan sosial dalam pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat tidak potensial yang ada di Kota Magelang. Validasi kebutuhan mereka harus segera dilaksanakan untuk menunjang keberlangsungan hidup pada penyandang cacat tidak potensial. Disinilah peran pemerintah sangat penting dan mendesak.

2.1.3.1.7 **Ketenagakerjaan**

Upaya pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dengan dana tersebut diatas menghasilkan capaian kinerja pada Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2 - 30

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase Wirausaha Baru	10%	5 %	15%	300%	●
		2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	80%	70 %	86.8%	124 %	●
		3. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	80%	70 %	70.18%	100.3%	●
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	7.5%	2 %	2.4%	120%	●
		5. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	80%	65%	69.2%	106.5%	●
		6. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	7.5%	0%	25%	900%	●
3	Program Perlindungan Pengembangan	7. Coverage asuransi tenaga kerja	75%	69%	71.86%	104%	●

No.	Program Prioritas		Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
					Target 2017	Capaian 2017		
	Lembaga Ketenagakerjaan	8.	Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB	50%	50%	83.33%	166.7%	●

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ◗ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari kedelapan indikator kinerja urusan tenaga kerja, semuanya telah mencapai target tahun 2017 dengan hasil melebihi target yang ditetapkan. Upaya penanganan urusan ketenagakerjaan dilakukan dalam 3 (tiga) fungsi yaitu (1) pelatihan kepada pencari kerja dan pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas (2) fasilitasi penempatan tenaga kerja dan (3) fasilitasi dan pembinaan terhadap tenaga kerja.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Wirausaha Baru

Dari hasil pelatihan kerja berbasis kewirausahaan telah muncul 10 (sepuluh) orang wirausahawan baru yang sampai sekarang masih difasilitasi untuk promosinya. Untuk kelanjutannya, para wirausahawan baru ini akan diserahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk diberi pelatihan tingkat lanjut baik teknis maupun manajemen. Adapun para wirausahaan baru tersebut adalah :

Tabel 2-31
Wirausahawan Baru sampai dengan akhir Desember 2017

No	Nama	Alamat	Jenis wirausaha
1.	Budi Bintoro	Jl. Sunan Ampel II RT. 02/02 Kel. Jurangombo Selatan	Sablon
2.	Budi Cahyadi	Jl. Sunan Ampel II RT. 02/02 Kel. Jurangombo Selatan	Sablon
3.	Ahmad Padli	Karanggading Rt. 01/03 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan	Sablon
4.	Salmah	Meteseh Rt. 01/013 Kel. Magelang	Sablon

5.	Dedy Haryanto	Gg. Kantil II No. 8 Rt. 03/08 Kel, Kemirirejo Magelang Tengah	Sablon
6.	Atik Astutik	Jl. Anggrek I/240 Rt. 02/04, Kel. Kemirirejo	Jumputan
7.	F. Sigid Sunarko	Menowo Rt. 001/003 Kel. Kedungssari	Jumputan
8.	Dasinah	Jaranan Rt. 01/06 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah	Jumputan
9.	Dessy Rizawati	Jl. Sunan Ampel II No. 21 Rt. 002/002 Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan	Jumputan
10.	Wibiyanti	Tidar Sari Rt. 01/011 Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan	Jumputan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2017

2. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Capaian persentase pencari kerja ditempatkan dalam Tahun 2017 ini telah melampaui target yang ditetapkan dimana dari 100 orang ada 86 orang berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Jumlah pencari kerja di Tahun 2017 sebanyak 576 orang sementara jumlah lowongan yang tersedia sebanyak 3.422 jabatan dan yang telah bekerja sebanyak 500 orang pencari kerja terdiri dari 473 orang bekerja di wilayah Propinsi Jawa Tengah sementara 9 orang bekerja di luar wilayah Propinsi Jawa Tengah dan 18 orang bekerja di Luar Negeri (Pekerja Migran Indonesia). Adapun secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2-32.

Pencari kerja terdaftar, ditempatkan dan lowongan kerja Tahun 2017

Uraian	L	P	Total
Pencari kerja terdaftar	292	284	576
Pencari kerja ditempatkan	251	249	500
Lowongan terdaftar	1.611	1.811	3.422

Sumber: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (Detail data: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2017)

Pada Tahun 2017 ini telah dilaksanakan JOB FAIR yang merupakan kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, jumlah yang berhasil ditempatkan sebanyak 451 orang pencari kerja, dari Kota Magelang sebanyak 99 orang atau 21,95 persen.

3. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi dan kewirausahaan

Secara rinci pelatihan ketenagakerjaan dibagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan PERMENAKERTRANS NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan. Capaian untuk pelatihan berbasis kompetensi sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 69.2 persen dari target yang telah ditetapkan (65%) sementara capaian indikator pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 70.18 persen, telah mencapai target yang telah ditetapkan (70%).

Adapun jenis pelatihan yang telah diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Kota Magelang di Tahun 2017 beserta jumlah pesertanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2-33

Jenis Pelatihan dan Jumlah peserta Pelatihan Tahun 2017

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta		Jumlah Peminat	
A	Diklat Berbasis Kompetensi	207	orang	299	orang
1.	Diklat menjahit bagi pencari kerja	20	orang	24	orang
2.	Diklat bordir bagi pencari kerja	20	orang	28	orang
3.	Diklat bahasa asing bagi pencari kerja	45	orang	57	orang
4.	Diklat komputer	11	orang	15	Orang
5.	Diklat tata boga bagi pencari kerja	20	orang	43	orang
6.	Diklat tata rias bagi pencari kerja	20	orang	35	orang
7.	Diklat Teknisi HP bagi pencari kerja	11	orang	22	orang
8.	Diklat Montir Sepeda Motor bagi pencari kerja	20	orang	25	orang
9.	Diklat Las bagi pencari kerja	20	orang	30	orang
10.	Diklat Perkayuan bagi pencari kerja	20	orang	20	orang
B	Pelatihan Kewirausahaan	40	orang	57	orang
1.	Pelatihan batik jumputan bagi pencari kerja	20	orang	23	orang
2.	Pelatihan sablon	20	orang	34	orang
	JUMLAH	247	orang	356	orang

4. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi

Sampai akhir Tahun 2017 jumlah peserta pelatihan yang tersertifikasi BNSP sebanyak 5 orang dari 207 orang peserta pelatihan berbasis kompetensi. Dari 10 (sepuluh) jenis pelatihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kota Magelang, baru 1 (satu) jenis pelatihan yang telah diikutkan sertifikasi kompetensi yaitu Pendidikan dan Pelatihan Perkayuan. Adapun jenis kompetensinya adalah finishing kayu dengan tingkatan kompetensi (1) menyiapkan pekerjaan finishing, (2) Menyiapkan permukaaan benda kerja untuk finishing, (3) menyesuaikan warna finishing dan (4) mengerjakan finishing dengan teknik semprot. Dari 20 orang peserta pelatihan perkayuan hanya 5 orang peserta yang memenuhi 4 kriteria kompetensi dimaksud.

5. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP

Meskipun indikator tenaga kerja tersertifikasi BNSP di Tahun 2017 belum ditargetkan akan tetapi pada akhir tahun 2017 telah tercapai sebesar 25 persen yaitu 5 orang dari 20 orang yang mengikuti sertifikasi BNSP.

6. Coverage asuransi tenaga kerja

Hal lain yang perlu diapresiasi adalah capaian pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek yang mencapai 71.86 persen, melebihi dari target yang ditetapkan (69 persen). Capaian kedua indikator ini menunjukkan bahwa sebagian pengusaha telah mulai menerapkan peraturan ketenagakerjaan khususnya norma perlindungan tenaga kerja, namun sebagian yang lain belum sehingga perlu fasilitasi pemerintah dalam pencapaian kinerja ini. Norma perlindungan tenaga kerja meliputi hak-hak pekerja diantaranya mengenai upah, jaminan sosial tenaga kerja, lembur, waktu kerja dsb.

7. Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB

Pada Tahun 2017 ini, kondisi ketenagakerjaan di Kota Magelang cukup kondusif dimana diindikasikan oleh rendahnya jumlah perselisihan pengusaha dengan pekerja. Sampai dengan akhir tahun ada sebanyak 6 (enam) kasus, yang bisa diselesaikan dengan perjanjian bersama antara pengusaha dan pekerja sebanyak 5 (lima) kasus sementara 1 (satu) kasus perselisihan melalui anjuran.

2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 - 34

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan					
	1 Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Ada	Ada	100%	●
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					
	1 Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	55,79%	44.74%	67.34%	150.51%	●

3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						
	1	Rasio KDRT	0,04%	0.055%	0.035%	136.36%	●
	2	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	15	23	12	147.83%	●
	3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	●
	4	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
	5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	100%	100%	100%	100%	●

	di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS					
6	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
7	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
8	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidika	100%	100%	100%	100%	●

		n sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak					
	9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	●
	10	Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	8%	3%	2.14%	71.33%	▼
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan						
	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	17%	6.37%	37.47%	▼
	2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	35%	20%	14.05%	70.25%	▼
	3	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	80,00%	78.00%	59.18%	75.87%	▼

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 15 indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017, terdapat 11 indikator yang telah mencapai target, sedangkan 4 indikator lainnya masih dibawah 80%. Kinerja indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

a. Penguatan kapasitas bagi perempuan rentan terkendala keterbatasan anggaran;
b. Partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta tidak dapat diintervensi langsung melalui program/kegiatan.

   Dari sisi partisipasi perempuan dalam bekerja maka hal ini dapat tergantung dari ketersediaan lapangan kerja.Ditambah lagi dengan faktor kultur budaya yang berbunyi “laki-laki sebagai pencari nafkah” dan “perempuan sebagai pengelola rumah tangga” menjadi penyebab kurangnya perempuan dalam dunia kerja utama. Perempuan (istri) bekerja cenderung sebagai pekerjaan sampingan untuk menunjang penghasilan laki-laki (suami).

   Dari sisi kesetaraan, maka indikator kinerja yang ditetapkan seharusnya dapat membandingkan antara proporsi laki-laki dan perempuan dalam bekerja. Hal ini akan tergantung pada kebijakan lembaga/lapangan kerja yang ada. Pada umumnya kebijakan lembaga/lapangan kerja akan mengutamakan kompetensi/kesesuaian pekerjaan yang tersedia daripada masalah gender. Artinya berbagai kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut :

   - Kompetensi perempuan pada lapangan pekerjaan yang ada masih kalah dibandingkan laki-laki;
   - Sebagian besar lapangan pekerjaan yang ada cenderung lebih tepat untuk laki-laki.

Indikator kesetaraan gender secara makro adalah IPG dan IDG. Angka IPG dan IDG diukur oleh BPS yang sampai saat ini baru dipublikasi angka tahun 2015, yakni IPG 95,81 dan IDG 75,83.

Upaya yang perlu dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah :

a. Mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik, utamanya dalam hal :
   - Sosialisasi, pembinaan/penyuluhan, koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan perempuan dan anak guna mewujudkan ketahanan keluarga;
   - Menjaga, mencegah, mengantisipasi hingga menangani terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak perdagangan orang dan eksploitasi anak;
   - Secara intensif melakukan pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut kebijakan guna mewujudkan pemberdayaan perempuan yang lebih baik;
   - Mempertahankan Anugerah Parahita, Kota Layak Anak dan penghargaan/status lainnya sebagai bagian dari citra (visi) Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dilandasi masyarakat yang Sejahtera dan Religius.
b. Mengintensifkan koordinasi/kerjasama/kemitraan antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
c. Meningkatkan/memutakhirkan sarana prasarana, fasilitas, sistem/prosedur dan database pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

d. Meningkatkan pemberian pelatihan ketrampilan baik teknis maupun manajerial kepada perempuan dalam rangka meningkatkan kapasitas/kompetensinya.

2.1.3.1.9 **Ketahanan Pangan**

Indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan melibatkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 35

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	2	1	1	100%	●
		Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%	92%	83%	90%	●
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,20%	85%	50%	83%	●
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%	80%	50%	80%	●

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari ke 4 (empat) indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan kesemuanya indikator tercapai yaitu Jumlah regulasi ketahanan pangan, Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%), Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%).

Meskipun indikator kinerja urusan ketahanan pangan telah tercapai 100%, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa permasalahan, sebagai berikut:

- Pola hidup masyarakat dalam mengkonsumsi makanan belum diperhatikan
- Kwalitas kandungan makanan terutama pada kwalitas gizi
- Kadang masyarakat tidak memperhatikan kandungan gizi makanan yang disajikan.

2.1.3.1.10 **Pertanahan**

Indikator kinerja urusan Pertanahan melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 36

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	100%	30%	30%	100%	●
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	100%	30%	30%	100%	●

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2017

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)

▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Indikator kinerja urusan Pertanahan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan tersedianya sistem informasi geografis pertanahan, dapat tercapai 100%.Dari 2 (dua) indikator kinerja urusan Pertanahan terdapat 2 (dua) indikator yang tercapai yaitu tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan tersedianya sistem informasi geografis pertanahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta maka Sistem Informasi Geografis (SIG) pertanahan harus memakai peta yang sudah terkoreksi dan terverifikasi terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGT). Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017, maka terjadi perubahan luas wilayah di Kota Magelang menjadi 18,54 km² sehingga SIG pertanahan perlu menyesuaikan. Hal ini bisa diatasi dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BPN terkait kewilayahan.

2.1.3.1.11 **Lingkungan Hidup**

Indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup melibatkan 6 (enam) indikattor kinerja daerah dan tujuh (tujuh) indikator program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 37

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2016		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1.		IKLH (Indeks Kualitas)Lingkungan Hidup)	68,5	62	62,54	100%	●
2	Program Pengendalian	IPA (Indeks Pencemaran	76,84	75,65	46,47	61,4%	▾

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2016		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
	pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;	Air)					
		Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	100%	20 %	20 %	100%	●
3	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	IPU (Indeks Pencemaran Uda	79,1	61,8	85,67	138,6%	●
		Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100 %	100 %	100 %	100%	●
4	Program Konservasi Sumber Daya Alam	ITH (Indek Tutupan Vegetasi)	49,56	48,55	57,24	118%	●
		Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	●
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	●
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	136,7	158,7	249,66	63,6%	▼
		Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	14%	3 %	3,2%	100.06%	●
		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	100 %	87 %	86,2%	99,08%	▶
6	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau					
		a. Privat	10	10	19,1	191 %	●
		b. Publik	18,50	18,37	19,6	107 %	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2017

Keterangan

- ● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥ 100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari ke 12 (dua belas) indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup terdapat 9 (sembilan) indikator yang tercapai yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), IPU (Indeks Pencemaran Udara), ITH (Indek Tutupan Vegetasi), Luas RTH Kota, Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati, Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi, Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya, Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia, Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin

Disisi lain terdapat dua indikator yang perlu upaya keras adalah indikator IPA (Indeks Pencemaran Air) dengan capaian baru 61.4% dan indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA tercapai sekitar 63,6 % atau justru sangat jauh dari target yang telah ditentukan.

Kinerja indikator indikator IPA (Indeks Pencemaran Air) belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas air sungai sangat fluktuatif tergantung dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari adanya aktifitas manusia di bidang industri, pertanian, peternakan dan sebagainya yang membuang limbah langsung ke perairan umum tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu sehingga mempengaruhi kualitas air sungai,
   a. Limbah domestik, terutama dihasilkan oleh masyarakat yaitu dari tempat tinggal mereka, terdiri dari :
      - Buangan manusia (tinja dan urin), limbah cair ini disebut sebagai “black water”
      - Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti mencuci, mandi, memasak, membersihkan dan sejenisnya dimasukkan ke dalam kelompok “gray water”
      - Limbah cair yang dihasilkan dari perkantoran, hotel, kawasan komersial dan sumber pencemar lainnya yang bukan kelompok industri.
   b. Limbah cair industri – efluen yang dikeluarkan dari berbagai industri dan industri pengolahan yang berada di sepanjang Sungai Progo. Sungai sebagai pemasok air juga berfungsi sebagai penampung limbah cair. Peningkatan rencana tata guna lahan dan peningkatan peruntukan kawasan dimaksudkan untuk mendorong industri-industri besar untuk ditempatkan sejauh mungkin dari sumber air. Limbah cair dari industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran sungai di bagian hilir.
   c. Pencemaran dari limbah pertanian sangat signifikan pada musim hujan dimana larian membawa sejumlah besar lapisan permukaan tanah, unsur hara dan bahan organik dari lahan padi dan lahan lainnya di sekitar sungai. Bersamaan dengan itu aliran sungai sangat cepat, sebagai konsekuensinya oksigen terlarut DO (Dissolved Oxygen) rendah dan pemulihan kondisi air tinggi sehingga menurunkan kualitas air. Pada musim kemarau pencemaran air dari lahan pertanian masih terjadi di sungai melalui aliran balik dari saluran dan drainase irigasi, tetapi pada saat puncak musim kemarau hal ini hampir tidak terjadi. Tidak seluruh saluran irigasi menggunakan saluran yang diperkeras (pasangan) menyebabkan erosi tanah turut memperburuk buangan ke badan sungai. Penggunaan pupuk yang tidak terkontrol juga akan menyebabkan terjadinya beban berlebihan nutrien di badan sungai.

      Aktivitas pertanian memberikan kontribusi ke polusi air melalui :
      - Adanya limpasan tanah dan sedimen
      - Nutrien-nutrien
      - Material tanaman dan organik
      - Limbah dari peternakan
   d. Buangan limbah dari rumah pemotongan hewan, yang pembuangannya disalurkan langsung ke badan air menyebabkan tingginya beban BOD. Di wilayah Kota Magelang terdapat rumah pemotongan hewan yang belum memiliki pengolahan limbah yang berfungsi dengan maksimal, menyumbang minyak, lemak serta bakteri-bakteri patogen di badan air sehingga beban BOD sungai di penggalan sungai ini cukup tinggi.
   e. Limbah cair lainnya meliputi limbah yang berasal dari rumah sakit, hotel, sekolah, supermarket dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan masyarakat dan sektor industri serta perkembangan fasilitas Kota secara cepat telah mencemari Sungai Progo di bagian hilir.

      Kegiatan masyarakat yang menghasilkan limbah cair telah menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Progo, hal ini terjadi karena tidak adanya sistem pengolahan air limbah secara terpadu di Wilayah Sungai Progo dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan. Pembuangan dari limbah padat juga

menyumbang material-material yang menambah cemaran air di bagian hilir. Tempat pembuangan akhir yang dekat dengan badan sungai juga diprediksi akan mencemari badan air dari air lindi / leachate-nya. Pembuangan-pembuangan ilegal lain juga turut menyumbang pencemaran air, walaupun memang sulit dikuantifikasi.

2. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah adanya perubahan iklim, curah hujan, bencana alam dsb yang juga berpengaruh terhadap kualitas air sungai.
3. Tahun 2017 adalah tahun dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Tingginya curah hujan sangat mempengaruhi laju infiltrasi air tsb kedalam tanah. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran air sungai dengan semakin cepat dan semakin banyaknya bakteri coli mengikuti limpasan air hujan menuju sungai. Disamping itu perilaku masyarakat yang masih membuang tinja baik manusia ataupun hewan ke sungai mengakibatkan timbul dan terindikasinya bakteri coli di sungai.
4. Obyek data yang dijadikan sebagai sumber IPA (Indeks Pencemaran Air) adalah 4 sungai yang melewati Kota Magelang yaitu Sungai Progo, sungai Elo, Kali Bening dan Kali Manggis. Pengelolaan Sungai Progo dan Sungai Elo yang berhulu di kabupaten Temanggung berada pada kewenangan pemerintah pusat sedangkan pengelolaan kali Bening dan Kali Manggis yang berhulu di Kabupaten Magelang kewenangannya berada pada Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melewati batas administratif wilayah yang berbeda maka kualitas air sungai akan terpengaruh oleh daerah lain di sekitarnya meskipun obyek pemantauan dalam hal ini sungai yang melewati wilayah kota Magelang telah melakukan upaya pengendalian lingkungan. Dengan adanya pengaruh kewilayahan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan dengan batasan administratif wilayah tapi harus dengan batasan ekologis. Artinya apabila pencemaran di daerah hulu tidak tertangani dengan baik pasti akan mengakibatkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran akan menjadi tidak optimal.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras yang akan dilakukan pada tahun 2018) antara lain dengan upaya :

1. Industri yang membuang limbahnya ke sungai perlu memperbaiki kualitas limbah cairnya dengan mengupayakan semaksimal mungkin dalam pengolahan limbah cairnya (IPAL) sebelum dibuang ke badan air (sungai) sekitar.
2. IPAL dari industri-industri sekitar kawasan sungai baik Sungai Progo dan Sungai Elo maupun anak-anak sungainya yang sudah ada harus dioperasikan secara periodik dengan menjamin kualitas limbahnya sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sehingga tidak merusak ekosistem sungai, dan kualitas air sungai itu sendiri.
3. Program analisa air sungai tersebut sebagai salah satu instrument dari Program Kali Bersih (PROKASIH) perlu dilakukan setiap tahun sehingga bisa mengetahui kondisi pencemaran air sungai di Kota Magelang.
4. Pembuatan kebijakan dan program prioritas pengelolaan lingkungan hidup harus selalu berprinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Semakin kritisnya ketersediaan air untuk keperluan manusia memerlukan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air terpadu (one management for one watershed) dengan Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya air, disamping upaya

penghematan air secara sungguh-sungguh, serta memulihkan kondisi dan kualitas Air Sungai Progo dan Sungai Elo yang dirasa sudah semakin menurun kualitasnya maka dapat dilakukan upaya pemulihan, antara lain (1) melalui pembuatan IPAL domestik bagi permukiman-permukiman (IPAL Komunal), (2) Konservasi air sungai (3) pencegahan pencemaran lingkungan dengan pemantauan kualitas industri-industri di sekitar wilayah Kota Magelang , (4) penegakan hukum lingkungan melalui kerja sama antar pemangku kepentingan di semua tingkatan.

6. Mengendalikan pencemaran air yang efektif sesuai dengan baku mutu air dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran air serta mengendalikan secara terpadu daya rusak air.
7. Menerapkan prinsip-prinsip pencemar dan atau perusak lingkungan hidup yang bertanggung jawab, serta mekanisme insentif dan disentif dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, pentaatan dan penegakan hukum termasuk instrument alternatif serta upaya rehabilitasi lingkungan hidup.
9. Meningkatkan peran antar individu, kelompok-kelompok masyarakat, dan jejaring dalam pengendalian dampak lingkungan.
10. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam melakukan inisiatif dan inovasi di bidang pelestarian lingkungan, antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan lingkungan sejak dini serta peningkatan kegiatan riset dan pengembangan.
11. Mengembangkan dan menguatkan kelembagaan lingkungan hidup, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, di semua tingkatan untuk pelestarian fungsi lingkungan.
12. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara lain melalui penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility) dan tanggung gugat korporasi (Corporate Accountability).
13. Meningkatkan keikutsertaan dan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup global tanpa mengabaikan kepentingan pengelolaan lingkungan hidup lokal dan nasional.
14. Meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar DAS Progo tentang sungai dan air tanah, baik dari segi kualitas dan kuantitas sungai dan air tanah dan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan etika berbudaya ramah lingkungan termasuk didalamnya budaya tidak membuang sampah di sungai.
15. Daerah hulu Sungai Progo dan Sungai Elo diusahakan dipertahankan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Daerah tengah direkomendasikan dengan mempertahankan tanaman bambu dan penanaman tanaman keras, menambah daerah resapan serta vegetasi untuk menahan erosi dan tebing sungai serta meningkatkan suplai air tanah dan mengurangi tingkat pencemaran.
16. Meningkatkan kearifan terhadap lingkungan (khususnya sungai) kepada masyarakat sejak dini dan mengembangkan budaya bersih sungai sehingga kualitas, kebersihan dan keindahan sungai selalu terjaga selama lamanya.
17. Mengembangkan perencanaan perlindungan badan air (khususnya sungai) secara komprehensif dan terarah dari hulu sampai hilir sebagai satu kesatuan ekologis.
18. Dibentuk sekretariat bersama untuk menangani masalah lingkungan di DAS Progo dan DAS Elo.

19. Identifikasi PointSos dalam penentuan daerah area beresiko pencemar aliran sungai Progo maupun Sungai Elo dipertajam .

Sedangkan indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA tidak tercapai dikarenakan :

1. Besarnya beban volume sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Baru sekitar 2,4 % atau sekitar 8,57 m3/hari sampah yang terkurangi dari sumbernya yang didaur ulang atau dibuat kompos. Sementara itu, sisanya sekitar 86% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Dan, 12% ada pengurangan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi. Besarnya volume sampah di TPA juga mempengaruhi biaya pengelolaan sampah menjadi semakin tinggi.
2. Pemilahan sampah mestinya sudah harus dilakukan sejak berada di sumber sampah. Sampah yang sudah terpilah mestinya dapat dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih memiliki nilai eknomi tentunya dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber pendapatan, sedangkan material organik dapat dilakukan fermentasi menjadi kompos bahkan biogas, sedangkan yang dipandang sebagai residu dapat diangkut oleh petugas kebersihan. Sehingga jumlah sampah yang dibawa ke TPA menjadi semakin sedikit. Namun demikian karena masih kurang sadarnya masyarakat, pemilahan sampah belum banyak dilakukan. Ada pula sebagian keciil masyarakat yang sudah memilah sampahnya, namun oleh petugas kebersihan, sampah tersebut dijadikan satu kembali, sehingga apa yang sudah dilakukan sebagian masyarakat tadi menjadi sia-sia.
3. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat sudah banyak dilakukan. Sudah banyak trigger untuk masyarakat seperti program Bank Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup, program TPS 3-R dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pengembanan Kampung Organik oleh Pemerintah Kota Magelang, namun hingga saat ini program pengurangan dan penananan sampah baik berbasis masyarakat maupun komunitas belum membawa hasil yang signifikan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan volume sampah dari sumbernya masih sangat minim. Masyarakat belum begitu paham akan kondisi “darurat sampah” yang tengah menyelimuti permasalahan sampah di Kota Magelang.
4. Di samping itu untuk pengelolaan sampah TPST 3R yang berada di Kota Magelang juga belum dilaksanakan secara optimal, seharusnya dengan adanya keberadaan 3 TPST 3R bisa dimaksimalkan untuk mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke TPSA.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus benar-benar bekerja keras dalam melakukan berbagai macam terobosan untuk menangani permasalahan sampah ini.

Masyarakat harus diajak secara paksa untuk mengetahui kondisi riil permasalahan sampah di Kota Magelang yang sudah memasuki masa “darurat sampah”. Masyarakat harus diajak secara nyata untuk ikut berkontribusi dalam penanganan sampah. Harus sudah saatnya masyarakat berawal dari masing-maing sumbernya melakukan penanganan dan pengelolaan sampah. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara nyata di maing-masing masyarakat, baik perorangan, kelompok, swasta ataupun pemerintah. Sehingga diharapkan nantinya permasalahan sampah di Kota Magelang bisa tertangani.

Sedangkan indikator Prosentase sampah perkotaan yang ditangani baru tercapai sekitar 99, 08 %, dan akan tercapai pada tahun 2018 . Hal ini di sebabkan pada tahun 2017 ini banyak armada pengangkut sampah yang rusak dan masuk

bengkel. Namun pada tahun 2018 yakin akan tercapai sesuai dengan target yang ditentukan setelah servis armada pengangkut sampah selesai dan adanya tambahan armada pengangkut sampah pada tahun 2018.

2.1.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan yang hasilnya digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, informasi administrasi kependudukan memiliki nilai yang sangat strategis bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna mewujudkan penyelenggaraanpelayanan Administrasi Kependudukan yang baik,perlu adanya peningkatan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Intervensi program maupun kegiatan yang harus dilakukan sangat diperlukan guna mendongkrak capaian kinerja yang belum memenuhi target. Dan sebaliknya, capaian kinerja yang telah memenuhi target perlu untuk dipertahankan. Capaian target kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2 - 7

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%	100%	93.51%	100%	●
		Cakupan penduduk memilikiKIA	100%	-	57.84%	100%	●
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%	85%	85.0%	85.0%	●
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	925	935	937.1	937.1	●
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase kepemilikan Akte kematian	75%	60%	79.82%	79.82%	●
		Terbangunnya system pelayanan administrasi terintegrasi	100%	40%	50%	50%	●

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2017

Keterangan:

● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun2017 ≥100%target 2017 atau ≥100%target RPJMD)

▸ : Akan tercapai(Realisasi tahun 2017>80%target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 7 (tujuh) indikator yang ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016 – 2021 dapat dikatakan bahwa semua indikator kinerja telah mencapai target. Namun masih perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan guna lebih mengoptimalkan capaian kinerja di tahun mendatang. Sebagai contoh, pada saat dilakukan evaluasi internal dari 3500 sampel penduduk yang belum memiliki KTP-el dan berstatus sebagai penduduk kota Magelang ternyata ditemukan sejumlah 849 penduduk yang telah terbukti memiliki KTP-el luar kota Magelang (memiliki KTP-el ganda). Mensikapi hal tersebut, perlu intervensi kegiatan terkait penyusunan daftar Penduduk Wajib KTP yang belum memliki KTP, verifikasi ulang terkait status domisili penduduk Kota Magelang, penduduk yang sudah meninggal tetapi belum dilaporkan oleh pihak keluarga, Sudah Pindah tapi belum lapor, atau kondisi jompo/difabel sehingga belum memiliki KTP.

Optimalisasi manfaat KIA juga masih perlu ditingkatkan karena sampai saat ini, fungsi dan manfaatnya belum begitu dirasakan oleh warga Kota Magelang terkait dengan kebutuhan Rekreasi, kebutuhan peralatan sekolah, kebutuhan buku maupun layanan kesehatan.

2.1.3.1.13 **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup dengan 6 (enam) program prioritas dengan 12 indikator kinerja, dengan target dan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - 39

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja		Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian	Keterangan
1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						
	1	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	53%	29%	35%	121%	●
	2	Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4	4	4	100%	●
2	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa						
	1	Persentase PL KB yang mendapat pembinaan			100%		
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan						
	1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	15	10	10	100%	●
	2	LPM berprestasi					
		Tingkat kota	65%	41%	93%	226%	●
		Tingkat provinsi	peringkat 1	peringkat 1	Peringkat 2		▶
		Tingkat nasional	peringkat 1	peringkat 1	-		▼
	3	Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	71%	24%	24%	102%	●
	4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143	143	143	100%	●

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian	Keterangan
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
	1 Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100,00%	87.50%	22.82%	26%	▼
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					
	1 Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	82%	54%	100%	185%	●
6	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan					
	1 Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	●

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)

▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 12 indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat 9 indikator yang telah mencapai target, sedangkan yang belum tercapai ada 3 indikator. Ketiga indikator tersebut adalah :

a. Prestasi LPM di tingkat provinsi

   Pada tahun 2017 Kelurahan Jurangombo Selatan mewakili Kota Magelang meraih Juara II dalam lomba BBGRM tingkat Provinsi. Pada tahun sebelumnya (2016) Kota Magelang meraih Juara I pada lomba yang sama. Sebagai sebuah ajang lomba, maka persaingan ketat atas perebutan kejuaraan merupakan hal yang wajar.

b. Prestasi LPM di tingkat nasional

   Pada tahun 2017 tidak ada lomba yang diselenggarakan di tingkat nasional.

c. Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan partisipasi pembangunan desa

   Jumlah kader LPM sampai dengan tahun 2017 sebanyak 425 orang, yang sudah mengikuti pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat kelurahan (P3MK) baru 97 orang (23%). Target kinerja dalam dokumen RPJMD adalah 87,50%, Dihadapkan dengan keterbatasan anggaran maka angka target tersebut terlalu tinggi, sehingga sesuai dengan DPA yang ada, target pelatihan kader ditargetkan sebesar 18% (realisasi tercapai).

Teknologi tepat guna (TTG) adalah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin lancar, termasuk pula bisa meningkatkan nilai ekonomi. Teknologi tersebut tidak hanya asal dibuat namun dibuat dengan tepat sesuai dengan kebutuhan manusia. Pada dasarnya masyarakat sebagian sudah memanfaatkan TTG secara mandiri, namun program pengembangan TTG oleh pemerintah masih terkendala dengan proses yang belum sinergis. Koordinasi antar instansi seperti Badan Litbang, Dinas Perindustrian, akademisi dan Lembaga yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat perlu lebih intensif. Demikian pula dengan hasil-hasil Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) yang dikembangkan oleh Balitbang, perlu diterapkan di masyarakat.

LPM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dituntut untuk dapat berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pelatihan LPM dalam perencanaan partisipasi pembangunan desa dimaksudkan agar LPM dapat memiliki kapasitas sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan.

Program UP2K-PKK dilaksanakan dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi anggota masyarakat (ibu-ibu PKK) dengan harapan ibu-ibu tersebut dapat mengembangkannya sehingga dapat menjadi tambahan penghasilan. Pada kenyataannya pelatihan-pelatihan tersebut hanya menjadi ketrampilan yang dipakai sendiri dan jarang sekali berkembang menjadi suatu usaha.

17 LKK yang tersebar di setiap kelurahan dan berdiri sejak tahun 2007 seharusnya dapat berkembang dan membantu mengatasi masalah permodalan bagi masyarakat usaha mikro/kecil di masyarakat. Pada kenyataannya LKK yang sehat diukur pada triwulan III ini hanya 35% (meskipun melampaui target). Dengan banyaknya LKK yang "Tidak Sehat", maka diperlukan langkah-langkah penanganan khusus agar dana yang ada dalam LKK dapat diberdayagunakan sebaik-baiknya.

Upaya yang perlu dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah dengan :

a. Pelatihan P3MK bagi LPM
b. Pembentukan lembaga yang mengelola sosial budaya di tingkat kelurahan
c. Pembinaan/pelatihan bagi LKK dan fasilitasi untuk berbadan hukum
d. Menjalin kemitraan LPM dengan berbagai pihak dalam pengenalan dan penerapan TTG
e. Penguatan ekonomi rumah tangga melalui UP2K-PKK

2.1.3.1.14 **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mencakup 7 (tujuh) program dengan 28 indikator sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 - 40

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
1	Program Keluarga Berencana					
	1 Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	100%	●
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					
	1 Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	1%	2%	2.03%	98,50%	▸
3	Program pelayanan kontrasepsi					
	1 Cakupan peserta KB aktif	81,00%	77.50%	78.63%	101%	●
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri					
	1 Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	81%	64%	64.38%	101%	●
5	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR					
	1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	2%	3%	2.98%	112,35%	●

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja		Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
6	Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS						
	1	Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15%	3%	15%	494%	●
7	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga						
	1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi	3%	5%	5.00%	100%	●
	2	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	81%	77%	77.43%	101%	●
	3	Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	88%	88%	88.28%	100%	●
	4	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan	100%	100%	167.00%	167%	●
	5	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100%	100%	●
	6	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	30%	100%	333%	●
	7	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	30%	100%	100%	100%	●
	8	Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	13%	10%	10.03%	100%	●
	9	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	67%	57%	57.09%	100%	●
	10	Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	8%	13%	9.08%	130,15%	●
	11	Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	2%	3%	2.03%	132,33%	●
	12	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	95%	88%	89.22%	101%	●
	13	Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	100%	95%	96.83%	102%	●
	14	Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	100%	100%	100%	●
	15	Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%	100%	100%	100%	●
	16	Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	2%	3%	2.97%	101%	●
	17	Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%	2%	2%	100%	●
	18	Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%	100%	100%	100%	●
	19	Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	100%	100%	100%	●
	20	Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%	100%	100%	100%	●

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
21	Persentase jumlah keluarga sejahtera	93%	87%	87.50%	101%	●
22	Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	75%	20%	33%	165%	●

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)

▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 28 indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 27 indikator telah mencapai target sedang satu indikator akan tercapai karena capaian kinerja hanya sedikit di bawah target, yaitu 98,5%. Meskipun demikian, perlu upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah dengan menjaga dan mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya agar target akhir tahun tetap dapat tercapai. Hal yang harus selalu mendapat perhatian adalah :

a. Adanya pernikahan dini (dibawah usia 20 tahun) dan jarak kehamilan yang kurang dari 3 tahun ;
   Sebagian besar terjadi karena married by accident (hamil sebelum menikah), biasanya disebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas, konten pornografi dan kurangnya perhatian dari orang tua.
   Diperlukan adanya kerjasama terkait pendidikan sex, pengoptimalan fungsi Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa,
b. Kepesertaan dalam KB, UPPKS, BKB dan BKR ;
   Ketika kesejahteraan suatu keluarga meningkat, apalagi jika 2 anak yang dimiliki memiliki jenis kelamin yang sama, maka terkadang muncul keinginan untuk menambah anak dengan harapan mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang berbeda dari anak sebelumnya.
c. Fenomena Bonus Demografi harus disikapi dengan upaya penciptaan keluarga sejahtera dengan kecukupan lapangan kerja bagi penduduk.

2.1.3.1.15 **Perhubungan**

Indikator kinerja urusan Perhubungan melibatkan 6 (enam) program prioritas dan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 8

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah pelayanan umum	1	1	5	500%	●

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
	Perhubungan						
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	100%	40%	20%	50%	
		Jumlah Sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata	3	1	1	100%	
		Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	100%	55%	55,70%	101,2%	
		Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	100%	86%	87%	101,1%	
		Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	22	17	17	106%	
3	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	9,25%	7,78%	8,40%	107,9%	
		Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	100%	45%	38,88%	86,4%	
4	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	8.136	7.936	8.216	103,5%	
		Rasio Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak melakukan pengujian	4%	4%	4%	100%	
5	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	2.900.000	3.039.336	104,8%	
		Rasio ketersediaan angkutana umum terhadap jumlah penduduk	5%	5%	4,76%	95,2%	
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	7	7	100%	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja urusan Perhubungan terdapat 10 (sepuluh) indikator yang tercapai yaitu jumlah pelayanan umum, jumlah sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata, rasio prasarana parkir dengan kondisi baik, tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum, jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum (halte), tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum, jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan, rasio kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang tidak melakukan pengujian, jumlah arus penumpang angkutan umum dan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara.

Sedangkan indikator yang akan tercapai ada 2 (dua) yaitu persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi dan rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk. Kedua indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021.

Disisi lain terdapat 1 (satu) indikator yang perlu upaya keras yaitu prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik. Kinerja indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

Terminal angkutan barang bertujuan untuk mengelola arus distribusi keluar masuk barang baik dalam kota, antar kota/kabupaten, maupun yang berskala regional dan nasional. Selain itu, pengoperasian terminal angkutan barang diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang yang efektif dan efisien sehingga mengurangi beban lalu lintas di Kota Magelang. Terminal angkutan barang merupakan kontrol penyelenggaraan angkutan barang yang melintas kota dan dan juga digunakan sebagai tempat bongkar muat kendaraan barang yang tidak memiliki gudang. Kondisi terminal angkutan barang di Kota Magelang dapat dilihat dengan terpenuhinya 7 (tujuh) komponen yang harus ada, yaitu lahan, aktifitas, gudang, rambu-rambu, fasilitas umum, pos pengawasan dan manajemen pengelolaan. Kendala pencapaian kinerja RKPD tahun 2017 untuk indikator kinerja prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik yaitu :

a. Kendala tata guna lahan.

   Lahan terminal angkutan barang Kota Magelang yang ada di Canguk, Kota Magelang saat ini peruntukannya tidak hanya difungsikan untuk terminal angkutan barang, namun juga dimanfaatkan untuk Samsat Cepat Kota Magelang dan Kantor Unit Patwal Polres Magelang Kota.

b. Kendala aktifitas.

   Aktifitas di terminal angkutan barang di Canguk, Kota Magelang masih belum maksimal. Terminal angkutan barang di Canguk Kota Magelang tidak digunakan sebagamana fungsinya , namun digunakan sebagai tempat parkir dan tempat istirahat pengemudi angkutan barang serta masih ditemukan di lapangan, kendaraan besar pengangkut barang yang memasuki kawasan Kota Magelang pada pukul 06.00 -18.00 WIB

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan perhubungan terutama pada tahun 2019 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras yang akan dilakukan pada tahun 2019, antara lain dengan upaya

optimalisasi fungsi terminal angkutan barang di Canguk, Kota Magelang sesuai peruntukannya. Sistem transportasi perkotaan yang dapat berfungsi dengan baik merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan wilayah perkotaan yang efisien. Perkembangan perkotaan yang sangat pesat diiringi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat pula tentu akan menyebabkan berbagai masalah dalam bidang transportasi yang harus segera diatasi dan juga dapat menimbulkan tuntutan untuk menambah kualitas dan kuantitas sistem transportasi. Terminal barang bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari sistem transportasi, tetapi juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan mungkin terjadi.

2.1.3.1.16 **Komunikasi dan Informatika**

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Magelang pada tahun 2017, dilaksanakan melalui 5 program prioritas yang diukur dengan 13 indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut terbagi dalam indikator kinerja sasaran, kinerja program unggulan dan kinerja daerah. Indikator kinerja sasaran terdiri atas 2 indikator, indikator program unggulan sebanyak 7 indikator, indikator kinerja daerah berjumlah 2 buah, sedangkan indikator urusan komunikasi dan informatika sebanyak 12.

Satu indikator bisa menjadi tolok ukur bagi satu kinerja tetapi juga dapat menjadi tolok ukur dalam beberapa kinerja, baik sasaran, program unggulan maupun kinerja daerah. Persentase PD yang menerapkan e-Government merupakan indikator kinerja dalam urusan komunikasi dan informatika yang sekaligus menjadi indikator bagi sasaran, program unggulan dan kinerja daerah. Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi merupakan indikator bagi sasaran dan kinerja daerah. Program unggulan dalam urusan komunikasi dan informatika adalah program sarana dan prasarana bidang teknologi dan informatika serta program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi yang seluruh indikatornya sudah tertuang dalam indikator urusan komunikasi dan informatika

Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 42

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	90%	70%	0%	0%	▼
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media:					
		- Radio	60 kali siar / 5 agama & keperca-yaan (100%)	60 kali siar / 5 agama & keperca-yaan (100%)	365 kali siar/ 3 agama		▼

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
		- Media Cetak	12 kali / 5 agama & keperca-yaan (100%)	12 kali / 5 agama & keperca-yaan (100%)	4 cetak majalah / 2 agama		▼
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	6	200%	●
		Cakupan KIM (Jumlah KIM)	100% (17)	100% (17)	100% (21)	100%	●
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	7	6	6	100%	●
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-	-	6		
3	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1	1	1	100%	●
4	Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika	Interoperabilitas antar system informasi	4	0	2		
		Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	100%	30%	41,25%	137,5%	●
		Cakupan data yang terpusat dan terkendali	100%	60%	50%	83,33%	▸
		Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	100%	100%	100%	●
5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	●

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dalam urusan komunikasi dan informatika, terdapat dua indikator yang belum memenuhi target, yaitu:

1) Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan yang belum terealisasi. Saat ini sudah dimulai penjajakan dengan Ketua DPRD Kota Magelang terkait rencana publikasi hasil kegiatan dewan agar terjadi kesepahaman terkait pokok materi yang akan dipublikasikan. Publikasi kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menunjukkan kinerja dewan selama masa pengabdiannya.
2) Publikasi materi keagamaan melalui media cetak yang ditargetkan terbit setiap bulan untuk 5 agama, hanya terealisasi pencetakan majalah Dinamika yang terbit setiap triwulan untuk agama Islam, Katolik, Nasrani dan Hindhu . Sedangkan publikasi yang melalui radio, meskipun sudah dilakukan setiap hari namun baru untuk 2 agama (Islam dan

katolik). Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini terkait materi yang akan disampaikan. Narasumber yang diharapkan dapat memberi materi belum memberikan respon yang positif.

Indikator cakupan data yang terpusat dan terkendali, pada tahun 2017 juga belum mencapai target (akan tercapai). Wujud kongkret dari indikator kinerja cakupan data yang terpusat dan terkendali adalah terbangun dan beroperasinya command center dengan baik. Upaya untuk mengejar kinerja indikator direncanakan melalui penyusunan DED Command Center dan pengadaan modul dashboard di tahun 2018 serta pembangunan fisik dan launching akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Sembilan indikator lainnya dalam urusan komunikasi dan informatika sudah mencapai target. Realisasi indikator jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin tercapai 6 dari target 3 yang ditetapkan. Kerjasama yang sudah terjalin adalah dengan beberapa badan dan lembaga pada beberapa urusan yaitu pendidikan dengan TK Pertiwi, keagamaan dengan Kemenag, pariwisata dengan PD. Kyai Langgeng, perbankan dengan PD. Bank Magelang, Pengadilan Negeri, dan kesehatan dengan RST dr Soedjono Magelang.

Realisasi cakupan KIM di tahun 2017 juga sudah mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Pada tujuh belas kelurahan di Kota Magelang sudah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), bahkan apabila dilihat dari kuantitas, Kota Magelang sudah memiliki 21 KIM yang artinya terdapat lebih dari satu KIM pada beberapa kelurahan.

Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang sudah memenuhi target di tahun 2017. Ruang media informasi yang ada adalah Kelompok Informasi Masyarakat, FK Metra, Website, Radio (Magelang FM), Majalah (Dinamika) dan PPID. Sedangkan indikator jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa pada tahun 2017 tidak memiliki target, tetapi pada tahun 2018 memiliki target 1 kebijakan. Pada tahun 2017 sudah ada kebijakan terkait LPPL, Website, Medsos, PPID, Data Go, dan Majalah sebagai bentuk kontrol terhadap arus informasi media massa di kota Magelang. Interoperabilitas antar system informasi juga merupakan indikator yang belum ditarget di tahun 2017 tetapi sudah mulai dilaksanakan. Realisasinya pada tahun 2017 mencapai 2 sistem yang sudah di interoperabilitas, yaitu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) dan sistem perijinan.

Penelitian yang dilakukan di tahun 2017 yang memenuhi target indikator jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi adalah kajian microcell sebagai rekomendasi penempatan menara telekomunikasi. Kuantitas kajian yang dikeluarkan dalam hal penyelenggaraan menara telekomunikasi pada tahun 2017 mencapai 4 buah kajian.

Cakupan WAN (Wide Area Network) Kota Magelang pada tahun 2017 mencapai 41,25% dari target 30%. Jumlah titik yang sudah masuk cakupan WAN meliputi 66 titik dari 160 titik yang direncanakan. Meskipun sudah mencapai target, perlu dirumuskan strategi agar upaya pencapaian target tidak menelan dana yang besar. Hal ini karena sisa titik yang ditargetkan berada di lokasi yang sulit dibandingkan titik yang lain, sehingga akan menelan biaya yang lebih besar dalam pembangunannya.

2.1.3.1.17 **Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Target dan capaian indikator kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga akhir Tahun 2017 yang secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 43

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM	7%	3%	23.51%	783.76%	●
		1. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi Halal dan Merk	10%	10%	10.43%	104.30%	●
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (UMKM)	100	75	79	105.33%	●
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	7%	3%	3%	100%	●
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	94%	93,25%	93,15%	99,89%	▸
		Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	40%	25%	26.45%	105.80%	●
		Jumlah koperasi	235	225	219	97,33%	▸
		Jumlah koperasi syariah	24	16	14	87,50%	▸

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari delapan indikator kinerja urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , terdapat 5 indikator yang telah mencapai target yaitu indikator Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM, Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi Halal dan Merk, Jumlah wirausaha baru (UMKM), Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan, Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100% bahkan lebih dari target capaian diatas 100%.

Dari kelima indicator tersebut diatas dapat tercapai tidak lepas dari peran aktif para pelaku KUM sendiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka, dan juga semakin mudahnya para pelaku KUM mengakses permodalan dari perbankan disamping juga adanya kerjasama antar OPD dalam melakukan upaya – upaya yang bertujuan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. OPD yang ikut aktif mendukukung peningkatan kesejahteraan KUM yaitu Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang melalui fasilitasi pengelolaan data SIKP, Fedep yang ikut berperan aktif mendukung Disperindag melalui kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan KUM, memfasilitasi pameran produk unggulan daerah, sosialisasi akses permodalan dengan perbankan serta fasilitasi pelatihan – pelatihan management pemasaran, Disnaker melalui BLK dalam upaya mencetak wirausaha baru dan peningkatan skil para pelaku KUM. Dan OPD lain yang secara tidak langsung membantu capaian indicator yang dibebankan pada Disperindag Kota Magelang.

Sedangkan yang akan tercapai adalah indikator indikator persentase Koperasi aktif dengan kinerja capaian mencapai 99.89%, jumlah koperasi dengan kinerja capaian mencapai 97.33% dan jumlah koperasi syariah dengan kinerja capaian baru mencapai 87,50%. Namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

- SDM pengelola koperasi yang kurang memahami management berkoperasi secara baik dan benar
- Penelolaan Koperasi sebagian besar dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri dengan kata lain pengadministrasian koperasi menjadi kegiatan tampahan para pelaku usaha yg menjadi anggota koperasi tersebut sehingga pengelolaan koperasi belum dapat secara professional dijalankan.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terutama pada tahun 2019 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama untuk indikator Prosentase koperasi aktif, Jumlah koperasi, Jumlah koperasi syariah perlu upaya keras pada tahun 2019 antara lain :

1. Pembinaan secara berkesinambungan kepada Koperasi – koperasi yang aktif untuk lebih ditingkatkan dalam pengelolaan management administrasi maupun management usaha kopersasi
2. Menggiatkan sosialisasi kepada kelompok – kelompok usaha bersama (KUB) untuk dapat membentuk koperasi
3. Menyelenggarakan pelatihan / bimbingan teknis perkoperasian guna meningkatkan pemahaman prinsip – prinsip berkoperasi baik koperasi konfensional maupun koperasi syariah sehingga diharapkan pada akhir periode RPJM target tersebut dapat terpenuhi 100%.

2.1.3.1.18 **Penanaman Modal**

Indikator kinerja urusan Penanaman Modal melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 9

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	4	2	2	100%	●

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
	Investasi.						
2.	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Pertumbuhan nilai investasi PMA	15%	5%	0.19%	3.80%	▼
		Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	16.85%	112.3%	●
		Jumlah investor baru	200	164	1.510	920.7%	●

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 2 (dua) program utama dengan 4 (empat) indikator, diketahui bahwa 3 (tiga) indikator kinerja dapat tercapai sedangkan 1 (satu) indikator perlu upaya yang keras untuk dapat mencapai karena capaian masih jauh di bawah target. Indikator kinerja Pertumbuhan nilai investasi PMA dan Indikator kinerja Pertumbuhan nilai investasi PMDN merupakan indikator prioritas daerah dengan sasaran meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indikator ini sewajarnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah manakala indikator tersebut tidak dapat tercapai.

Dari table diatas jelas terlihat ada masalah serius pada indikator Pertumbuhan nilai investasi PMA yang ditargetkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 5% hanya tercapai 0.19% atau dapat dikatakan kinerja capaian hanya 3.80%. hal tersebut disebabkan karena perusahaan yang ada di Kota Magelang belum / tidak melaporkan kegiatan penanaman modal asing DPMPTSP. Terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melaporkan kegiatan tersebut langsung ke BKPM Pusat, dan DPMPTSP hanya sebagai tembusan, maka berdampak pada pertumbuhan Penanaman modal asing yang sebenarnya optimis sesuai target yang diharapkan tidak dapat kita ketahui. Permasalahannya yaitu ketersediaan laporan dari masing-masing perusahaan PMA yang ada di Kota Magelang yang langsung disampaikan ke BKPM Pusat. Untuk melengkapi data realisasi, PPMPTSP perlu melakukan tindakan proaktif yaitu menghubungi BKPM pusat untuk mendapatkan data yang akurat sehingga gambaran riil investasi PMA dapat dilihat pencapainnya.

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

- kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor.
- Ketika investor tertarik melakukan investasi di kota magelang justru yang terjadi adalah Ketidaksiapan daerah dalam menyajikan data akurat lokasi investasi dan juga regulasi yang mendasari investor untuk dapat melakukan investasi pada lokasi – lokasi yang dilawarkan oleh DPMPTSP.

- Kewenangan dalam memperoleh informasi secara langsung dari perusahaan – perusahaan asing/investor asing yang melakukan kegiatan investasi di daerah masih terpusat pada provinsi atau bahkan kementrian yang menangani masalah investasi.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan Penanaman Modal i terutama pada tahun 2019 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi PMA perlu upaya keras pada tahun 2019 antara lain :

1. Membangun koordinasi yang lebih intensif ke BKPM Provinsi maupun pusat untuk memperoleh data dan informasi
2. Menyusun dokumen studi kelayakan investasi pada 8 wilayah strategis yang telah rencanakan dalam perda RTRW Kota guna mendukung terealisasinya investasi oleh investor di kota magelang.

2.1.3.1.19 **Kepemudaan dan Olah Raga**

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 10

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					
1	Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	7	6	6	100.00%	●
2	Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional					
	- Peringkat di POPDA SD	3	7	5	128.57%	●
	- Peringkat di POPDA SMP	9	17	19	88.24%	▸
	- Peringkat di POPDA SMA	16	22	19	113.64%	●
	- Peringkat di Dulongmas	NA	NA	0		
	- Peringkat di PORPROV	NA	NA	0		
3	Jumlah klub olah raga	183	183	183	100.00%	●
4	Jumlah organisasi olah raga	36	35	35	100.00%	●
2	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda					
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91%	79.41%	85,71%	107,93%	●
2	Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional					
	a. Propinsi	8	6	1	16.67%	▾
	b. Nasional	1	0	0		
3	Program peningkatan peran serta kepemudaan					
1	Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	98,00%	94.00%	68,57%	72,95%	▾
2	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	1	0	0.00%	▾
3	Persentase pengangguran pemuda	5,37%	6.65%	6,27%	105,71%	●
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja		Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
	1	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	5	4	3	75.00%	▼
	2	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	89%	65%	1	100.00%	●
5	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda						
	1	Persentase kelompok wirausaha pemuda	75	50	70,58	141,16%	●
6	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba						
	1	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1.13%	1,19%	104,93%	●

Sumber : Disporapar Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 16 indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga, terdapat 10 indikator yang telah mencapai target, sedangkan yang akan tercapai ada 1 indikator dan yang capaian masih dibawah 80% ada 4 indikator.

Keempat indikator tersebut terjadi karena adanya kendala sebagai berikut :

a. Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional

   Prestasi pemuda diraih oleh 5 orang dalam ajang lomba TUB-BB se eks Kedu, sedangkan pada tingkat provinsi hanya diperoleh 1 orang yang berprestasi. Pada tingkat nasional masih nihil.

b. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi

   Jumlah OKP yang terdaftar sebanyak 45 OKP, yang nampak masih aktif sebanyak 30 OKP, pasif 5 OKP dan sudah tidak operasional lagi sebanyak 10 OKP. Dari jumlah tersebut yang mengikuti pembinaan hanya sebanyak 24 OKP. Hal ini dikarenakan adanya agenda kegiatan yang waktunya bersamaan, sehingga OKP yang bersangkutan tidak ikut dalam kegiatan pembinaan.

c. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi

   Pemuda pelopor yang berhasil dijaring untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi sebanyak 7 orang, namun kesemuanya masih kalah dalam persaingan ketat/berat dengan daerah lain.

d. Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi

   Revitalisasi lapangan olahraga untuk masyarakat terkendala simpang siur kewenangan OPD yang ditunjuk untuk melaksanakan revitalisasi. Semula telah dianggarkan di OPD Disporapar, namun karena lapangan olahraga yang akan direvitalisasi tersebut merupakan aset dari OPD lainnya (Kecamatan/Kelurahan), maka terjadi pembatalan pelaksanaan.

Upaya yang perlu dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah :

1. Pembinaan, pelatihan, pengembangan, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka menciptakan generasi muda yang berkualitas, berkarakter dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Menghadapi ekses dari fenomena bonus demografi, maka dituntut secara bersama-sama menciptakan lapangan kerja secara kreatif dan inovatif.

2. Revitalisasi peran KNPI.

   Organisasi kepemudaan (OKP) memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi Pemuda. Organisasi Kepemudaan baik yang resmi tercatat maupun tidak tercatat seperti komunitas, geng, paguyuban dll, yang tumbuh secara inisiatif dari sekelompok anak muda dalam kepentingan maupun hobby tertentu, perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan berbagai pihak. Peran KNPI sebagai induk organisasi pemuda perlu dioptimalkan sebagaimana mestinya untuk dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, mewadahi aspirasi pemuda dan sebagai komunikator berbagai program dan permasalahan kepemudaan.
3. Memusatkan perhatian untuk penyiapan pemuda pelopor, membangun sistem dan jaringan pengembangan, melakukan pembinaan dan pendampingan pra kompetisi.
4. Menjalin kerjasama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ikut berperan dalam pembinaan Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) ataupun kegiatan kepemudaan lainnya.
5. Inventarisasi, identifikasi dan revitalisasi lapangan olahraga yang tersebar diberbagai kelompok masyarakat. Dalam hal memutuskan OPD yang akan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan revitalisasi, perlu adanya kebijakan tertulis semacam Surat Keputusan ataupun Surat Perintah dari Walikota utamanya dengan mempertimbangkan kualitas hasil akhir yang diinginkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3.1.20 **Statistik**

Kinerja Urusan Statistik terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 -46

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase pemenuhan data statistik	95%	90%	90,99%	101,10%	●

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan yang baik harus didasarkan data yang akurat. Kesalahan data yang digunakan mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak akan berguna. Dalam istilah sistem informasi dikenal istilah GIGO (garbage in garbage out) yang bermakna apabila input datanya sampah maka yang dihasilkan adalah sampah pula. Demikianlah data memegang peran yang sangat penting dalam sebuah formulasi perencanaan.

Kinerja urusan statistik tahun 2017 di Kota Magelang sudah memenuhi target yang ditetapkan. Saat ini telah tersedia 441 variabel data dari 484 variabel yang diperlukan. Dalam penyediaan data statistik, pemerintah Kota Magelang

bekerjasama dengan BPS yang secara tupoksi berwenang dalam penyediaan data statistik melalui dokumen - dokumen seperti Daerah Dalam Angka, Analisis PDRB dan lain sebagainya.

2.1.3.1.21 **Persandian**

Kinerja Urusan Persandian terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 -47

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ketersediaan SOP persandian	100%	50%	100%	200%	●
		Tingkat kapasitas SDM persandian	100%	100%	75%	75%	▼
		Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	100%	60%	0%	0%	▼

Sumber : Diskominsta Kota Magelang, 2017

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)

▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Indikator kinerja urusan persandian melalui program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa baru tercapai satu indikator. Ketersediaan SOP persandian sudah disusun pada tahun 2017, akan tetapi baru direncanakan disosialisasikan pada tahun 2019 sehingga untuk indikator persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian belum dapat dicapai. Tingkat kapasitas SDM persandian juga masih belum memenuhi target di tahun 2017. Tenaga khusus / ahli di bidang persandian saat ini berjumlah 2 orang dengan kapasitas SDM satu orang 100% dan satu orang 50% sehingga tingkat kapasitasnya baru mencapai 75%. Tenaga ahli di bidang persandian tersebut pada tahun 2018 pensiun 1 orang sehingga perlu strategi pemenuhan baik kuantitas maupun kapasitas SDM sandi agar memenuhi target di akhir RPJMD.

2.1.3.1.22 **Kebudayaan**

Kinerja Urusan Kebudayaan terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 48

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisa-si 2017	Capaian	Ketera-ngan
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					
1	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100%	100%	100%	●
2	Jumlah pengunjung museum	5.600	5,150	6503	126%	●
3	Jumlah koleksi museum	15	11	60	545%	●

2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						
	1	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	16,67	14.86%	18.47%	124%	●
	2	Jumlah festival seni dan budaya.	14	11	10	91%	▸
	3	Cakupan gelar seni 75%	100%	100%	100%	100%	●
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya						
	1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	230	223	222	100%	●
	2	Misi kesenian 100%	50%	38%	100%	263%	●
4	Program Pengembangan Nilai Budaya						
	1	Jumlah gedung kesenian	2	1	0	0%	●
	2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	15	11	11	100%	●
	3	Cakupan kajian seni 50%	80	75%	73.33%	98%	▸
	4	Cakupan fasilitas seni 30%	45	35%	71.43%	204%	●
	5	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	80	77%	75.00%	97%	▸
	6	Cakupan tempat 100%	100	100%	100%	100%	●
	7	Cakupan organisasi 34%	100	100%	100%	100%	●

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)

▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 15 indikator kinerja urusan Kebudayaan, terdapat 12 indikator yang telah mencapai target, sedangkan yang akan tercapai ada 3 indikator.

2.1.3.1.23 **Perpustakaan**

Indikator kinerja urusan melibatkan 6 (enam indikator) dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -49

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan judul buku	15,99%	2,57%	11,15%	>100%	●
		Persentase peningkatan jumlah buku	9,89	2,64%	14,43%	>100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	66,35	47,39	47,73%	>100%	●
		Presentase perpustakaan aktif	28,44	18,96%	18,96%	100%	●
		Cakupan pelayanan melalui e-Library	5%	0	0,00%	100%	●
		Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	25,00%	8,33%	71,62%	>100%	●

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 7atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 6 (enam) indikator pada urusan perpustakaan, seluruhnya telah mencapai target, bahkan beberapa diantaranya melampau target tahun 2017 seperti persentase peningkatan jumlah buku, persentase peningkatan judul buku, persentase SDM pengelolaan perpustakaan yang kompeten serta peningkatan layanan promosi perpustakaan.

Tahun 2017 perpustakaan Pemerintah Kota Magelang telah menambah media baca melalui ebook. Melalui eksistensi ebook ini menyasar para pembaca yang memiliki literasi bacaan secara soft. Hal ini mempengaruhi realisasi dan tingkat capaian dua indikator pertama dari tabel di atas.

Sementara fokus pada kemampuan SDM pengelola juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat, disamping melalui prop=mosi yang gencar untuk meningkatkan budaya gemar membaca dan dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat.

Meski telah tercapai target 2017, namun demikian bukan berarti tantangan pencapaian target ke depan semakin ringan. Hal ini mengharuskan fokus ekstra bagi eksekusi program kegiatan di urusan ini, terutama paling berat adalah untuk mencapai indikator e-library.

2.1.3.1.24 **Kearsipan**

Indikator kinerja urusan melibatkan 8 (delapan) indikator dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -50

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD 2017	Status Capaian
1	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarpras arsip yang terpelihara	89%	40%	40,00%	100%	●
2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Cakupan pelayanan acces arsip	82%	67%	104.29%	155,65%	●
		Tingkat Komptensi SDM Pengelola Kearsipan	67%	39%	39%	100%	●
3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku	100%	34%	34,48%	101,4%	●
		Persentase arsip dan risalah	85%	82%	82%	100%	●
		Persentase Penyelamatan Arsip	73%	47%	47,00%	100%	
4	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Presentase implementasi e-arsip	100%	17%	8,93%	52,53%	▼
		Persentase ketersediaan sarpras arsip	60%	10%	16,67%	166,67%	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Belum seluruh indikator dalam urusan kearsipan telah mencapai target, meski beberapa diantaranya melampaui target tahun 2017. Terdapat satu kegiatan yang tidak mampu mencapai target yaitu terkait implementasi e-arsip. Sama halnya dengan urusan perpustakaan tantangan pencapaian target ke depan tidak semakin ringan, terlebih implementasi arsip yang masih belum optimal pelayanannya. Hal ini mengharuskan fokus ekstra bagi eksekusi program kegiatan di urusan ini, terutama paling berat adalah untuk mencapai implementasi e-arsip.

2.1.3.1.25 **Kelautan dan Perikanan**

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan indikator kinerja urusan yang melibatkan 5 (lima indikator) dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -51

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status capaian
				Target 2017	Capaian 2017 sd TW IV		
1	2	6		7	8		9
1	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan						
		1. Prosentase unit pengolahan ikan yang telah tersertifikasi SKP	0	0	6%	>100%	●
		2. Jumlah pengolah ikan yang telah melaksanakan prinsip dasar pengolahan yang benar	6	2	2	100%	●
2	Program pengembangan budidaya perikanan						
		3. Produksi hasil perikanan :Produksi ikan	167.01	160.65	153.,01	95,24%	▶
		4. Persentase unit pembenihan ikan bersertifikasi CBIB	70%	30%	30%	100%	●
3							
	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	5. Luas lahan perikanan organic	0.6	0.2	0,1	50%	▼

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)

► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Tabel di atas menunjukkan capaian indikator kinerja urusan Kelautan dan Perikanan dan diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator, baru terdapat 3 (tiga) indikator yang tercapai, yaitu Prosentase unit pengolahan ikan yang telah tersertifikasi SKP, Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar, Persentase unit Pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB.

Adapun indikator yang belum tercapai adalah indikator Produksi hasil perikanan :Produksi ikan, dan luas lahan perikanan organik. Tidak ada target kinerja sampai dengan akhir RPJM tahun 2021, sehingga tahun 2017 juga tidak terdapat target capaian untuk unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP. Kinerja untuk indikator luas lahan perikanan organik perlu kerja keras untuk dapat mencapai target kinerja di tahun 2021 sebesar 100%, sedangkan indikator produksi hasil perikanan : produksi ikan optimis tercapai pada akhir RPJMD 20116-2021.

Permasalahan / Kendala yang muncul, untuk menuju sertifikasi adalah tempat pengolahan ikan harus terpisah antara tempat pengolahan dengan rumah tinggal. Tetapi kebanyakan tempat pengolahan ikan masih menjadi satu dengan rumah tinggal, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi.

2.1.3.1.26 **Pariwisata**

Kinerja Urusan Pariwisata terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 -52

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja		Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						
	1	Destinasi Wisata Unggulan	7	3	3	100.00%	0
	2	Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	88,89%	44.44%	44.44%	100.00%	0
2	Program Pengembangan Kemitraan						
	1	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	13	9	9	100.00%	0
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
	1	Lama Kunjungan Wisatawan	2-4 HARI	2-3	2-3	100.00%	0
	2	Persentase TIC yang representatif	100%	0	0		
	3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.143.954	1,136,435	1,269,949	111.75%	1
	4	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5.219	5,185	6,341	122.30%	2

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)

► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 7 indikator kinerja urusan Pariwisata secara keseluruhan telah mencapai target. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

a. Destinasi wisata yang diunggulkan saat ini adalah Gunung Tidar, Mantyasih dan Desa Wisata Tidar Campur. Ketiganya masih terdapat banyak hal yang perlu dibenahi untuk semakin layak sebagai unggulan.
   Perlunya keterlibatan CSR dalam mewujudkan Desa Wisata, Kampung Pelangi, dll.
b. Tourist Information Center (TIC) secara fisik maupun non fisik jauh dari ideal. Website informasi pariwisata saat ini juga pasif (tidak up to date), kurang menarik dan kurang informative/promotif.
   TIC belum menyediakan tour guide untuk wisatawan, sehingga wisatawan berkunjung tanpa pengarahan resmi dan hanya mengandalkan biro jasa yang bisa jadi informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak akurat bahkan bisa keliru.

2.1.3.1.27 **Pertanian**

Indikator kinerja urusan Pertanian melibatkan 13 (tiga belas indikator) kinerja daerah dan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 53

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status capaian
				Target 2017	Capaian 2017 sd TW IV		
	Urusan Pilihan Urusan Pilihan						
1	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
		1. Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	4,24%	1.82%	36,5	100%	●
2	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						
		2. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	52,94	5,88%	5,88%	100%	●
		3. Rasio petani terlatih	90%	85%	85,88%	100%	●
3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak						
		4. Persentase hewan sehat	87	83%	86%	100%	●
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status capaian
				Target 2017	Capaian 2017 sd TW IV		
		5.Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	8	4	4	100%	●
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						
		6. Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	10%	1%	1%	100%	●
		7. Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	10	7	7	100%	●
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan						
		8. Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	4,24	1,82%	1,82%	100%	●
7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan						
		9. Luas lahan pertanian organik	1,14	0,94	1	100%	●
		10. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	72%	45%	45,18%	100%	●
8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan						
		. Jumlah pelaku usaha peternakan organik:					
		11 . Peternak ayam buras/ ayam broiler	5	1	1	100%	●
		12. Peternak kelinci	5	1	1	100%	●
		13. Peternak kambing/domba	5	1	1	100%	●
		14. Rasio peternak Terlatih	90	85%	85%	100%	●
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan						

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status capaian
				Target 2017	Capaian 2017 sd TW IV		
		15.Daging Ruminansia	1.401.690	1.177.418	1.209.046	100%	●
		16. Daging Unggas	5.660.315	5.122.583	7,00.713	100%	●
		17.Telur	500.000	420.000	71.918		▼
		18. Susu	209000	193.000	214.105	100%	●
10	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan						
		19. Padi	3.380.000	3.201.000	3.069.44	89.5%	►
		20. Jagung		11	12,6	100%	●
		21. Ubi kayu	15	13,5	13,5	100%	●

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Berdasarkan Capaian kinerja sebagaimana matrik diatas Bidang pertanian dan pangan dapat diketahui bahwa ada 10 program kerja/kegiatan dan 21 indikator target sampai dengan triwulan IV Tahun 2017 yang sudah tercapai antara lain :

Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV, Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian, Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal, Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian, daging ruminansia, daging unggas, susu dan jagung. Ada 2 (dua)

Terdapat 2 indikator yang belum memenuhi / tercapai target triwulan IV (empat) yaitu:

1. Program peningkatan produksi hasil peternakan /telur antara target dengan realissi capaian masih terlalu jauh dikarenakan adanya kesalahan ketik dalam pencapaian indikator telur terlalu tinggi jadi antara target dan realisasi hasilnya terlalu jauh.
2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan / padi target dengan realisasi dalam pencapaian belum maksimal dikarenakan adanya cuaca ekstrim yang mengakibatkan padi roboh.dalam hal ini pencapaian indicator sudah hamper tercapai dan pada saat realisasi kinerja akhir akan tercapai.

- Rasio petani dalam pencapaiaan target sudah tercapai akan tetapi belum maksimal dikarenakan petani hanya sebagai penggarap sawah dan dalam mengerjakan masih dengan cara tradisional, masih banyak petani yang belum mengenal

peralatan moderen seperti traktor dan penggiling padi yang sudah dengan teknologi cukup canggih. Kebanyakan petani masih menerjakan dengan pola lama sehingga kurang efektif dan hasil yang diperoleh lebih sedikit.

- Petani yang melaksanakan Good Agricultural practices (GAP) adalah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang, Prosentase Petani yang melaksanakan GHP, masih belum maksimal

Good Agricultural practices (GAP) pada teknologi yang direkomendasikan menurut SK Mentri No.48 Tahun 2010 yang mencakup beberapa hal seperti : Lahan bebas dari cemaran limbah bahan berbahaya dan beracun, adalah termasuk salah satu syarat untuk melaksanakan Good Agricultural practices (GAP)

Dengan menerapkan (GAP) ,Good Handling Practice (GHP) yang memiliki standard operational procedure (SOP) tertentu diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat baik terhadap produk yang dihasilkan, pekerja dan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan disekitar. Apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban.

Dengan meningkatnya harga jual tanah, dan tingginya desakan untuk perumahan, maka lahan pertanian produktif tersebut rawan dialih fungsikan menjadi perumahan. Tingginya angka konversi lahan pertanian menjadi non pertanian setiap tahun tentunya memberi tantangan bagi jaminan ketahanan pangan masyarakat Kota Magelang.

Berkurangnya lahan pertanian di Kota Magelang berimbas pada fluktuasi luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas beberapa komoditas tanaman pangan (tabel 2.7). Sebagai contoh, luas tanam padi pada tahun 2012 menurun sebesar 1,64% menjadi 541 ha, namun pada tahun 2013 meningkat 0,55% (544 ha), kemudian pada tahun 2014 terus meningkat hingga 1,47% menjadi 552 ha, pada tahun 2015 kembali menurun sebesar 0,18% (551 ha) Begitu pula produktivitas padi, pada tahun 2012 meningkat sebesar 4,79% (59,71 kw/ha), namun pada tahun 2013 menurun 2,03% (58,50 kw/ha), dan pada tahun 2014 menurun lagi sebesar 0,55% (58,18 kw/ha), tetapi pada tahun 2015 meningkat 1,58% menjadi 59,1 kw/ha, dan pada tahun 2016 meningkat.

Selain itu, kondisi petani Kota Magelang yang sebagian besar merupakan petani penggarap, menyebabkan rendahnya produksi komoditas tanaman pangan. Karena, keputusan penggunaan lahan ditentukan oleh pemilik lahan, sementara petani hanya mengerjakan apa yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan.

Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap produksi komoditas pertanian dan peternakan asal Kota Magelang, tetapi juga menyebabkan menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Secara berturut-turut kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Namun demikian, sektor pertanian merupakan penyangga ketahanan pangan, oleh karena itu kegiatan budidayanya tetap harus dipertahankan di Kota Magelang. Pengembangan Urban farming dan adanya pengembangan Pertanian Organik di Kota Magelang dan juga adanya budidaya pertanian, peternakan, maupun perikanan.

Beberapa tehnik budidaya di lahan sempit yang menunjang di Kota Magelang, misalnya: vertikultur, hidroponik, dan aquaponik. Serta Penerapan vertikultur dapat dilakukan pada budidaya sayur-mayur dan buah-buahan yang tumbuh secara merambat, maupun tanaman hias dan bunga. Tentunya dengan mengacu pada sistem budidaya yang ramah lingkungan.

Dalam rangka mempercepat akselerasi terwujudnya MKSB, maka sejak tahun 2014 telah dilakukan pengembangan kultur jaringan, serta pelatihan budidaya tanaman hias dan bunga bagi masyarakat Kota Magelang.

Harapannya melalui kegiatan tersebut mampu mendorong terwujudnya agribisnis tanaman hias dan bunga sebagai salah satu penggerak ekonomi Kota Magelang.

Berdasarkan data dari Dinas, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, saat ini sudah terbentuk 7 (tujuh) kelompok pembudidaya hias dan bunga, yang berada di Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kemirirejo, dan Kelurahan Potrobangsan., wates, sanggrahan, Bogeman. Berikut ini adalah data kelompok tani tanaman hias dan bunga yang terdapat di Kota Magelang:, jumlah seluruh kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga yang terdapat di Kota Magelang.

Produksi komoditas daging ruminansia mencakup: sapi, kerbau, kambing, dan domba Daging sapi banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama pada saat perayaan hari raya Idul Adha. Namun pada saat perayaan hari raya tersebut, ketersediaan daging sapi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, sehingga memacu terjadinya impor daging sapi. Oleh sebab itu, untuk memenuhi ketersediaan daging sapi lokal, maka populasi dan produktivitas sapi potong perlu terus ditingkatkan.

Kondisi peternakan saat ini menunjukkan bahwa, peternak Kota Magelang lebih menyukai budidaya ternak sapi potong ketimbang ternak sapi perah. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan air bersih dalam budidaya ternak sapi perah. Disamping itu menurut sebagian besar peternak, beternak sapi perah perawatannya lebih sulit dibanding dengan sapi potong.

2.1.3.1.28 **Energi dan Sumber Daya Mineral**

Indikator kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral melibatkan 1 (satu) indikator kinerja daerah dan 1 (satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 54

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum (PJU)	71,89%	62%	62,11%	100,1%	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Satu satunya indikator kinerja dari urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, yaitu rasio ketercukupan penerangan jalan umum yang dilaksanakan pada tahun 2017 tercapai 62,11% dari target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 71,89%. Secara detail pelaksanaan program tahun 2017 yang direncanakan sebesar 62% dari target akhir RPJMD 2021 sebesar 71,89% dapat tercapai 100% sesuai yang ditargetkan.

Memperhatikan target kinerja RPJMD, maka untuk mencapai target akhir ketercukupan penerangan jalan umum sebesar 71,89%, urusan Energi dan Sumberdaya Mineral masih menghadapi tantangan capaian sebesar 9,89 %

yang secara bertahap akan dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

2.1.3.1.29 **Perdagangan**

Indikator kinerja urusan Perdagangan melibatkan 6 (enam) indikator kinerja dengan tagrget dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 55

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan PKL yang dibina	16 %	8 %	37.04 %	463 %	●
		Jumlah shelter PKL yang dikelola	17	13	19	146 %	●
2	Program Pengelolaan Pasar	Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	54 %	7 %	83.33%	1190 %	●
		Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10 %	10 %	50.79 %	507 %	●
		Cakupan pedagang pasar yang dibina	16 %	8 %	10.14 %	126 %	●
		Persentase pasar tradisional yang dikelola	80 %	75 %	75 %	100 %	●
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor produk ke LN	US$1.250.000	US$ 950.000	US$ 1.950.541	2053 %	●
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	7 %	3 %	11.22 %	374 %	●
6	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera	3.100	2.700	3.712	137 %	●
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design	60 %	20 %	20 %	100%	●

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)

► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja urusan Pilihan perdagangan Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100% bahkan 9 (Sembilan) indikator melebihi dari target capaian diatas 100%.

Indikator Cakupan PKL yang dibina yang ditargetkan 8% dari total PKL yang ada berjumlah 1350 orang hasil pendataan tahun 2016 pada akhir tahun ini mampu dibina sebanyak 500 orang yang berarti 37,04% dari jumlah PKL sudah mendapatkan pembinaan dari Dinas Perdagangan, hal ini juga terkait langsung dengan indikator Jumlah shelter PKL yang dikelola yg itargetkan 13 tempat sudah tercapai 19 tempat selter, sehingga PKL memang telah secara intensif mendapatkan pembinaan, dilain sisi dengan pertumbuhan selter yang sudah melampaui target bahkan target akhir RPJMD Kota magelang pun sudah terlampaui, ini kemudian seharusnya menjadikan perhatian pemerintah bahwa dengan terus tumbuhnya selter PKL dapat menimbulkan masalah yang lain yaitu berkurangnya fungi fasilitas public khususnya trotoar jalan yang dijadikan selter PKL, kedepan perlu dirancang secara serius bahwa pertumbuhan shelter dan pembinaan PKL dapat berjalan harmonis dengan kepentingan – kepentingan umum lainnya.

Indilkator Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi oleh pasar – pasar tradisional mengalami capaian target yang sangat menggembirakan, hal ini didukung dengan adanya inovasi pengelolaan sampah yang terdapat di pasar – pasar tradisional, hal ini perlu dipertahankan dan apabila perlu tidak hanya sekedar mengejar target kinerja yang telah ditetapkan melainkan semakin meningkatkan upaya – upaya pemanfaatan sampah sehingga disamping dapat mengurangi volume sampah yg harus dibuang di TPA, dapat memanfaatkan hasil olahan sampah agar bermanfaat secara berkelanjutan.

Indikator – indikator capaian kinerja urusan pilihan perdagangan ini sangat memuaskan, namun demikian perlu menjadi perhatian bahwa kinerja pelauanan umum ini perlu dijaga dan dipertahankan sekuat tenaga jangan sampai mengalami penurunan pelayanan yang sudah sangat baik ini.

Upaya lainnya yaitu Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri. Dalam rangka ketahanan ekonomi di daerah, pemerintah harus menjaga dan memberikan ruang yang leluasa untuk pertumbuhan perekonomiannya, baik secara kelembagaan maupun legalitasinya. Perekonomian rakyat yang sudah terbukti tangguh, berdaya, produktif dan mandiri, merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional, termasuk dalam memantapkan demokrasi. Upaya ini dilakukan dengan berbasiskan semangat kerakyatan dan kekeluargaan (Peningkatan koperasi, usaha mikro, perdagangan dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat). Untuk itu secara terkendali pemerintah perlu membuka akses bagi tumbuh kembangnya ekonomi modern dengan tidak menutup kesempatan atau“mematikan” sektor ekonomi tradisional. Pemerintah juga perlu membuka akses sinergi antara sektor ekonomi modern dengan sektor ekonomi tradisional, akses ini sebagai jembatan bisnis yang mampu memajukan dan menumbuhkan sektor tradisional sebagai roh dari ekonomi kerakyatan itu sendiri. Selain itu juga harus dipertahankan adanya keterpenuhan dan kesediaan bahan pangan melalui upaya peningkatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya kebijakan diantaranya penjaminan rantai distribusi pangan Kota Magelang yang disuplai oleh daerah daerah sekitar dan juga upaya optimalisasi lahan yang ada di Kota magelang berbasiskan pertanian modern.

2.1.3.1.30 **Perindustrian**

Realisasi yang telah dicapai pada penyelenggaraan urusan perindustrian secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 56

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan daya saing IKM Formal	3,3 %	3,1 %	5.78 %	186 %	●
2	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	15	11	11	100 %	●
3	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll)	4,30%	4,10%	4,52%	110 %	●
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,29%	5.04%	5.16%	102 %	●

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
► : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Capaian dari indikator-indikator di urusan perdagangan pada tahun 2017 kesemuanya sudah bisa memenuhi yang di targetkan. Keempat indikator tersebut antara lain indikator peningkatan daya saing IKM Formal, indikator jumlah sentra industri, indikator persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll). indikator persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna sudah secara sempurna memenuhi dari target yang ditetapkan pada tahun 2017.

Dunia perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu primadona penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terutama di Kota Magelang yang mulai mengandalkan sektor jasa. Dua hal yang sangat strategis dibahas dalam setiap perencanaan baik perencanaan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Beberapa aspek yang terkait yang mempengaruhi dunia perindustrian dan perdagangan Kota Magelang terutama di era MEA antara lain: infrastruktur, investasi, sumber daya baik alam maupun SDM, daya saing produk, daya saing tenaga kerja, penggunaan teknologi, keterbukaan informasi, peran pemerintah dan perlindungan konsumen.

Luas Kota Magelang yang hanya sekitar 18,12 km2 memudahkan pemerintah daerah untuk menata dan mengelola penyediaan infrastruktur, termasuk kemudahan aksesibilitas bagi pertumbuhan industri dan perdagangan. Oleh karenanya infrastruktur yang sudah baik dan tertata perlu dipelihara dan ditingkatkan pemanfaatannya dari waktu ke waktu. Di era MEA, infrastruktur yang layak dan memadai serta kemudahan aksesabilitas usaha sangat mendukung dan merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Investasi sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah, terutama investasi yang produktif, yaitu investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Agar investasi yang masuk ke Kota Magelang mampu menyerap tenaga kerja lokal maka harus ada link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keterbatasan luasan juga berarti sangat terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki Kota Magelang. Sumber daya alam yang terbatas ini perlu dikelola dengan benar sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Keadaan ini membuat masyarakat Kota Magelang menjadi kreatif dan tidak pantang menyerah. Sektor jasa merupakan salah satu sektor yang dikembangkan secara maksimal dan semakin memberikan nilai tambah bagi setiap produk yang dihasilkan Koperasi dan UMKM Kota Magelang. Koperasi dan UMKM Kota Magelang didampingi instansi terkait dan para stake holder, berupaya semakin meningkatkan kualitas dan jenis produk untuk meningkatkan daya saing. Hingga saat ini masih banyak produk Koperasi dan UMKM yang belum memenuhi persyaratan agar mampu menembus pasaran dunia. Era MEA menuntut produk daerah yang memenuhi standar mutu produk, sehingga upaya sertifikasi dan HKI bagi produk Koperasi dan UMKM menjadi sangat penting. Daya saing yang dimaksud selain memenuhi standar mutu produk, juga harus mampu menjaga kualitas produk dan menjaga konsistensi pasokan produk. Dalam hal itu maka tak lepas dari kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi dan informatika. Koperasi dan UMKM yang ‘melek’ teknologi dan ‘informasi akan mampu bersaing di era globalisasi. Teknologi sangat membantu dalam proses produksi karena dengan teknologi maka pekerjaan menjadi lebih mudah dan jumlah produksi meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain melek teknologi, Koperasi dan UMKM juga perlu berpikir kreatif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Teknologi informasi mengandung dua fungsi: informasi dan komunikasi, yang bila mampu mengolah dapat digunakan sebagai sarana promosi dan sebagai sarana Koperasi dan UMKM berhubungan dengan dunia luar. Hal demikian akan semakin memperluas jangkauan perdagangan.

Perkembangan Industri dan perdagangan dewasa ini berdampak luar biasa pada beredarnya berbagai macam produk di pasaran. Hal tersebut berdampak pada perlunya perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna produk. Pengusaha semestinya menghargai konsumen dengan memberikan produk yang sesuai standar mutu, di sisi lain pemerintah pun wajib melindungi konsumen melalui peraturan perundang-undangan.

Secara umum peran pemerintah untuk mendorong industri dan perdagangan di Kota Magelang terlebih dalam era MEA sangatlah penting. Bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, membuat regulasi yang mampu membuka kran investasi lebar-lebar sehingga Kota Magelang mampu menarik investasi besar yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, mengelola sumber daya yang sangat terbatas yang mampu dimanfaatkan untuk menumbuhkan laju perekonomian semaksimal mungkin, meningkatkan daya saing produk melalui berbagai upaya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, hingga yang terakhir pemerintah juga harus melindungi konsumen dari produk-produk yang merugikan dan dari perlakuan tidak adil produsen. Pemerintah pun harus mampu

menciptakan strategi yang melindungi produk lokal dari perdagangan bebas dan melindungi tenaga kerja dari persaingan internasional, sehingga mampu bersaing dan dapat menembus pasaran internasional.

Pada tahun 2017 dalam mendorong industry dan perdagangan pemerintah perlu meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak , kerjasama dengan perusahaan perusahan yang ada di kota magelang yang memiliki program CSR dapat pula sebagai salah daya dorong yang baik dan cepat. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu di tingkatkan dalam mendorong industry dan perdagangan salah satunya mendorong KUM untuk melakukan strategi pemasaran dengan memanfaatkan internet dan menawarkan produk yang dihasilkannya didalam marketplace yang dibentuk baik secara perorangan lembaga maupun dikelola oleh pemerintah Kota Magelang.

2.1.3.1.31 **Transmigrasi**

Penyelenggaraan transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, tujuan lain dari transmigrasi sesuai dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor informal, dan mengembangkan potensi sumber daya alam di daerah. Upaya penanganan urusan ketransmigrasian di daerah asal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu (1) pengarahan calon transmigran (2) sosialisasi potensi lokal daerah transmigran (3) fasilitasi penempatan transmigrans. Dana yang digunakan sebagai upaya untuk melaksanakan urusan ketransmigrasian di Tahun 2017 adalah Dana APBD Kota Magelang. Total dana yang sebesar Rp 239.477.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp 203.491.648,- atau 84,97 persen.

Dengan melaksanakan ketiga tahapan tersebut capaian realisasi indikator urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2-57

Target Indikator Realisasi Pencapaian Urusan Ketransmigrasian Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1. Persentase calon transmigrasi yang tertempatkan	100%	100 %	75%	75%	▼
2	Program Transmigrasi Regional	2. Persentase masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%	100 %	100%	100%	●

Keterangan

● : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥ 100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)

: Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

: Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari hasil capaian indikator diatas terlihat bahwa sampai dengan akhir Tahun 2017 dari 2 (dua) target indikator kinerja, 1 (satu) indikator kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan dari 4 (empat) KK yang sudah siap untuk berangkat, 1 (satu) KK mengundurkan diri di saat pemberangkatan. Sementara untuk kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada Bulan Agustus 2017 dengan jumlah peserta 300 orang dari 17 kelurahan di Kota Magelang.

2.1.3.2 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.2.1 **Fungsi Lain-lain**

Fungsi penunjang lain lain melibatkan 27 indikator dan 9 program. Capaian indikator Fungsi ini sebagaimana tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 2 - 58

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penunjang Fungsi lain Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	78%	56%	64%	>100%	●
2	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	100%	0	20%	>100%	●
		Implementasi pemanfaatan SPIPISE	100%	70%	100%	>100%	●
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100%	100	100	100%	●
4	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah review PERDA/PERWAL	0	0	1	>100%	●
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	3	0	0	100%	●
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0	0	0	100%	●
5	Program pengelolaan	Aset tanah yang bersertifikat	80%	60%	72,44%	>100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
	barang milik daerah	atas nama Pemerintah kota Magelang					
		Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	●
		Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	50%	50%	100%	●
		Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	50%	<100%	▸
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	100%	100%	●
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan kebijakan penataan daerah	100%	20%	20%	100%	●
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	100%	50%	50%	100%	●
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	88,71%	88,33, %	<100%	▸
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	55%	30%	30%	100%	●
		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	100%	80%	80%	100%	●
		Persentase zona integritas yang terbentuk	50%	10%	5%	<100%	▸
		Nilai hasil LKJip SKPD	B	CC	CC	100%	●
		Persentase SKPD yang direview LKJiP	75%	35%	58,62%	>100%	●
		Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	95%	90%	88,73%	<100%	▸
		Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	5%	60%	114,29%	>100%	▸
		Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	90%	83,45%	<100%	▸
		Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	100%	90%	100%	>100%	●
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	85%	65%	84%	>100%	●
		persentase SPM yang mencapai target nasional	85%	65%	65%	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		Tingkat pemahaman tentang SAKIP	100%	100%	100%	100%	●

2.1.3.2.2 **Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berbasis Akrual dimulai tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Pada tahun 2011 - 2014 Pemerintah Kota Magelang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, oleh karena itu perbaikan laporan terutama masalah aset terus diprioritaskan.

Perjuangan dan upaya perbaikan tersebut akhirnya membuahkan hasil yang sangat membanggakan bagi Pemerintah Kota Magelang ketika berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016. Ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, utamanya kepatuhan kepada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung peningkatan PAD dilakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah, up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, peningkatan manajemen aset daerah dengan penerapan Sistem Informasi Barang Milik Daerah. Selain itu perlu dilakukan optimalisasi pendapatan terkait Pajak Bumi dan Bangunan.

Target dan realisasi indikator urusan Keuangan hingga triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 -59

Target dan Realisasi Indikator Urusan Keuangan Tahun 2017

No	Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
					Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	80%	60%	72,44,%		

		2	Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%	●
		3	Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	50%	100%	●
		4	Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%	●
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase pertumbuhan PAD	10,21%	18,44%	5,6%	▼
		2	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	90%	81%	100%	●
3	Program Peningkatan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah	1	Rasio pajak daerah terhadap PAD	12%	13,48%	13,37%	●
		2	Rasio retribusi daerah terhadap PAD	2,91%	4,20%	2,63%	●
4	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusda	1	Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD	2,59%	3%	3,3%	●

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari sembilan indikator kinerja urusan keuangan, terdapat 7 indikator yang telah mencapai target yaitu indikator barang milik daerah yang didayagunakan, pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu, pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu, persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.

Pada akhir tahun 2017, indikator aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang belum melampaui target dengan kinerja capaian 72,44%. Namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021. Sampai dengan akhir tahun 2017 ini sudah 105 bidang tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang.

Barang milik daerah yang didayagunakan merupakan aset-aset yang disewakan dan tidak mendukung tupoksi. Indikator barang milik daerah yang didayagunakan ini telah mencapai target tahun 2017 dan target RPJMD.

Realisasi persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP tahun 2017 telah melampaui target tahun 2017 dan target RPJMD, hal ini dikarenakan dari 7 (tujuh) laporan keuangan semua sudah sesuai dengan SAP. Realisasi rasio pajak daerah terhadap PAD tahun 2017 juga telah melampaui target tahun 2017 dan target RPJMD.

Realisasi indikator pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu dan realisasi indikator pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu bisa terlaksana secara tepat waktu dari 29 OPD karena pada tahun 2017 ini terdapat terobosan regulasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yaitu dalam pengajuan GU dari tiap OPD wajib melampirkan laporan mutasi barang bulanan. Dengan demikian laporan barang dari OPD yang tadinya dikumpulkan tiap semester kini menjadi setiap bulan.

2.1.3.2.3 **Perencanaan Pembangunan**

Indikator kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan 12 (dua belas) indikator kinerja dan 7 (tujuh) program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 50

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100%	●
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90	70	70	100%	●
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85	72	74	100%	●
		Persentase Partsisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55	35	36	116%	●
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	76%	76%	101%	●
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100	100	100	100%	●
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang esosial budayai	100	100	100	100%	●
4	Program Perencanaan	Cakupan ketersediaan dokumen	100	100	100	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
	Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana					
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti	4	1	2	>100%	●
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	95	70	75	>100%	●
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100	100	100	100%	●

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari ke 11 target yang diemban oleh penunjang perencanaan keseluruhan target mampu dilalui dengan baik bahkan terdapat beberapa indikator yang melampaui target. Hal yang harus terus dilakukan adalah kreatifitas dan inovasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sambil mengeliminir berbagai permasalahan yang dihadapi.

2.1.3.2.4 **Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Indikator kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan melibatkan 16 (enam belas) indikator kinerja dan 6 (enam) program utama dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 51

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:					

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		Pendidikan S1	49%	46%	45,11%	<100%	▸
		Pendidikan S2	10%	9%	8,70%	<100%	▸
		Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100	100	100,00%	100%	●
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46	41%	45,45%	110,86%	●
		Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	0%	71,43%	100%	●
		Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	5%	100%	>100%	●
		Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,01%	0,10%	0,20%	>100%	●
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran ASN	100	97%	97,78%	>100%	●
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,18%	0,21%	0,26%	85%	▸
3	Program Pendidikan kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	98%	94%	142,66%	>100%	●
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%	80%	100%	>100%	●
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemda	Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%	100%	0%	0%	▾
		Persentase ASN yang	90%	80%	78,95%	<100%	▸

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		mengikuti diklat fungsional					
		Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	97%	80%	175%	>100%	●
5	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan finger print	100%	60%	100%	>100%	●
6	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	92%	85%	78,14%	<100%	▸

Sumber: Badan kepegawaian, Pendiidkan dan Pelatihan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 16 indikator urusan ini masih terdapat beberap indikator yang belum mencapai target, sementara sebagian besar indikator tercapai bahkan sebagian banyak telah melampaui target. Pengampu urusan ini harus terus meningkatkan kinerja pada target target yang belum tercapai.

2.1.3.2.5 **Penelitian dan Pengembangan**

Fungsi Penelitian dan Pengembangan menjadi salah satu posisi kunci dalam siklus perencanaan. Hal ini dikarenakan, sebuah program kegiatan sebaiknya diawali dari sebuah perencanaan yang berbasis penelitian, sehingga kegiatan tersebut memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OPD pengampu fungsi ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sesuai peraturan tersebut, hasil kelitbangan menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi bahan rekomendasi bagi para OPD.

Target dan realisasi indikator urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 - 52

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Persentase Krenova masyarakat yang berkualitas	23%	11%	3846%	>100%	●
		Presentase Krenova OPD yang berkualitas	12%	4%	25,58%	>100%	●
2	Program Penelitian dan Pengkajian	Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti	50%	30%	33,33%	>100%	●
3	Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK	Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	20%	10%	80%	>100%	●
4	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	Cakupan Monev dan / atau Pengendalian Riset dan / atau Kebijakan	20%	10%	37,6%	>100%	●
5	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	80%	50%	50%	100%	●
6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	15%	0%	0%	100%	●
7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	15%	7%	13,04%	>100%	●
8	Program Penguatan Inovasi Daerah	Cakupan Penguatan SIDa	75%	40%	45%	>100%	●
9	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	75%	40%	46,93%	>100%	●

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▸ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▾ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 9 program dan 10 indikator kinerja urusan kelitbangan, semuanya telah mencapai target, bahkan beberapa indikator telah melampaui target 2017. Melihat kondisi ini, maka besar harapan bahwa di akhir masa periode RPJMD, indikator-indikator kinerjanya dapat tercapai.

Penjaringan Krenova di tingkat masyakarat setiap tahun selalu dilakukan, terutama hasil-hasil temuan yang memilki nilai dan dampak ekonomi bagi penemu dan masyarakat sekitar. Hasil dari penjaringan ini kemudian diikutsertakan dalam ajang serupa di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan apabila lolos, juga diikutsertakan dalam ajang serupa ke tingkat Pusat. Pada beberapa kesempatan pameran yang diikuti Pemerintah Kota Magelang, beberapa produk temuannya juga diikutsertakan untuk meningkatkan peluang bertemu dengan calon investor, atau calon pembeli. Bagi temuan-temuan yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual, juga difasilitasi untuk registrasinya.

Selain hasil-hasil kreasi dan inovasi dari masyarakat, pemerintah juga menerima hasil-hasil riset yang dilakukan masyarakat, dengan tema-tema strategis yang telah ditentukan, dan seleksi pada proposal riset yang masuk. Pemerintah menyediakan subsidi biaya riset bagi proposal terpilih. Hasil riset ini kemudian dijadikan bahan penyusunan kebijakan / perencanaan lebih lanjut. Untuk lebih mengaplikatifkan hasil-hasil riset yang sudah dilaksanakan, juga dilakukan beberapa kegiatan yang mengevaluasi hasil-hasil penelitian, supaya bisa lebih terasa manfaatnya baik pemerintah maupun masyarakat Kota Magelang.

Untuk lebih memperkenalkan budaya IPTEK di masyarakat, juga rutin dilaksanakan aneka kegiatan lomba terkait IPTEK, seperti lomba Robot dan Roket Air, untuk tingkat SLTP / SLTA. Diharap dengan aneka kegiatan ini, masyarakat sudah mengenal IPTEK sejak dini dan dapat tumbuh menjadi orang-orang yang sadar IPTEK.

Dalam hal kerjasama, telah dijalin kerjasama kelitbangan dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Magelang, dunia usaha, BPPT, dan unsur-unsur masyarakat. Mereka diikutsertakan dalam beberapa kegiatan seperti riset, lomba, seminar, diseminasi, dan FGD.

2.1.3.2.6 Pengawasan

Target dan realisasi indikator urusan Pengawasan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 - 53

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	87%	55%	50,00%	90,90%	▼
		Persentase Aparat SPIP aktif	80%	55%	32,60%	59,27%	▼
		Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	90%	70%	66,67%	95,24%	▲
	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 3	Level 2	Level 2 dengan catatan perbaikan	100%	●
		Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	80%	55%	46,15%	83,90%	▲

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	85%	60%	100,00%	166%	●
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	B	CC	CC	100%	●
		Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	80%	55%	55%	100%	●
		Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar	100%	55%	55%	100%	●
		Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	90%	30%	30%	100%	●
		Penurunan kasus temuan LKPD	0	3	4	75%	▼
		Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu	100%	80%	80%	100%	●
		Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	80%	55%	55%	100%	●
		Nilai survey kepuasan penggunan layanan PD	95	85	85%	100%	●
	Program Sinergisitas Penerapan SPI pada SKPD (Program Baru)	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP	55%	85%	73,46%	86,42	▼
		Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIP	5%	70%	62,35%	89%	▼

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		Persentase implementasi SPIP	100%	66%	50,00%	75,75%	▼

Keterangan:

- ● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 ≥100% target 2017 atau ≥ 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 ≤ 80% target 2017 atau ≤ 80 % target RPJMD)

Dari 17 indikator yang ada, terdapat 6 indikator yang perlu upaya keras, 9 indikator dapat tercapai dan 2 indikator dapat tercapai bahkan melampaui target tahun 2017. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan pencapaian target yang harus difokuskan adalah kesiapan sumber daya manusia serta manajemen internal serta koordinasi yang baik dengan sleuruh pihak yang terkait.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu hal yang mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah yang memiliki daya saing yang tinggi, akan menarik banyak investor untuk masuk ke dalam daerah. Bergairahnya kondisi perekonomian daerah di harapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Kondisi daya saing daerah akan berpengaruh terhadap daya tarik investasi daerah. Daya saing yang relatif rendah tentunya akan menyebabkan daya tarik investor yang akan melakukan investasi di daerah menjadi relatif kecil begitu pula sebaliknya. Kinerja pemerintahan memegang peranan penting dalam penentuan daya saing daerah.

Kemampuan suatu daerah dalam mengenali dan menggali potensi daerah, mengidentifikasi dan menganalis faktor – faktor pembentuk dan penentu daya saing kemudian menuangkannya ke dalam strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing suatu daerah. Selain hal yang mampu meningkatkan daya saing, Pemerintah juga harus jeli dalam memperhatikan hal – hal yang dapat menghambat peningkatan daya saing diantaranya korupsi, birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai bagi pengembangan investasi di daerah, ketidakstabilan politik, keamanan dan ketertiban di daerah, tenaga kerja yang tidak terdidik, etika kerja yang buruk, inflasi, peraturan pajak , buruknya pelayanan birokrasi di daerah dan lain sebagainya. “Reformasi struktural harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah mengingat kinerja pemerintahan memegang peranan penting dalam penentuan daya saing daerah seperti mempermudah proses perizinan dan kejelasan RTRW agar investor dengan mudah menanamkan investasi ke suatu daerah.

Survey Daya saing yang di lakukan pada tahun 2016 mengukuhkan Kota Magelang sebagai Kota dengan peringkat tertinggi dalam daya saing daerah di antara Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dengan indeks 64.75. Survey Daya saing daerah ini menilai daya saing Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dengan tujuh katagori yang mempengaruhi daya saing dan daya tarik investasi daerah sebagai berikut : Kinerja pemerintahan; Lingkungan usaha;, Infrastruktur;

Sumber Daya Manusia ; Kesehatan; Pendidikan; Pasar Keuangan. Keberhasilan Kota Magelang meraih peringkat pertama tersebut karena didongkrak oleh tiga kategori dari tujuh kategori di atas yakni persepsi iklim usaha, kinerja pemerintah dan infrastruktur. Hal yang menjadi faktor utama Kota Magelang menempati peringkat pertama adalah aspek kelembagaan, lingkungan usaha, basis di pasar tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, pasar keuangan, dan teknologi.Penghargaan ini juga sekaligus mengukuhkan Magelang sebagai salah satu kota yang dinyatakan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Terkait daya saing Kota Magelang ada hal yang perlu mendapat perhatian ke depan yaitu aspek makro ekonomi dan infrastruktur karena berdasarkan indikator pengukuran indeks tersebut, Kota Magelang masih belum unggul dalam pilar makro ekonomi. Upaya peningkatan realisasi investasi di Magelang harus dipertahankan karena investasi dapat berkembang lebih besar dengan adanya daya saing. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan positif antara pertumbuhan ekonomi dan skor daya saing untuk indikator perekonomian daerah

Gap negatif mengindikasikan masih terdapat sektor ekonomi yang belum tereksplor secara optimal. Beberapa strategi pemantapan perekonomian dalam mendukung daya saing dapat ditempuh melalui inovasi, penetrasi teknologi, eksplorasi ekonomi kreatif, mendongkrak investasi, optimasi sektor andalan dan kompetensi SDM. Tidak kalah penting adalah komitmen untuk menghindari eksternalitas negatif menuju penciptaan kelembagaan yang berkualitas dan akuntabel dalam mewujudkan Kota Magelang yang berdaya saing dan sejahtera secara berkesinambungan meski Magelang tidak memiliki sumber daya alam, Magelang dapat menawarkan jasa terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan suasana kota yang kondusif.

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu Indikator Kinerja Daerah, dimana aspek ini mempunyai empat fokus yaitu:

a) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah;
b) Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur;
c) Iklim Berinvestasi
d) Sumber Daya Manusia

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukur aspek kemampuan ekonomi daerah sekaligus sebagai indikator pengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita dan tingkat pemerataan pendapatan karena dua hal ini mencerminkan kemampuan daerah untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Kota Magelang. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat apabila di imbangi dengan adanya pemerataan pendapatan. Tabel di bawah ini merupakan tabel PDRB per kapita penduduk Kota Magelang dengan jumlah penduduk tengah tahun berdasarkan perhitungan BPS dengan menggunakan tahun dasar 2010 sebagai berikut :

Tabel 2 - 54

PDRB Per Kapita Kota Magelang Tahun 2010-2016, prediksi 2017 (menggunakan tahun dasar 2010)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017**
Jumlah Penduduk	118.424	119.003	119.416	120.879	120.438	120.792	121.112	121.474

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017**
pada tengah tahun (jiwa)								
PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)	33.926.459,42	37.641.932,95	41.086.815,37	44.732.069,37	49.023.243,20	53.538.074,04	58.353.897,63	63.408.678,87
Pertumbuhan adhb (%)		10.95	9.15	8.87	9.59	8.55	8.99	8.66

Sumber : Dinas KOminfo dan statistik Kota Magelang Tahun 2017

** Angka sementar*

*** Angka prediksi*

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat perkembangan PDBR per kapita penduduk penduduk . PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.112 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 58.353.897,63 / tahun (atas dasar harga berlaku). Upaya untuk meningkatkan ukuran dari indikator ini di antaranya melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk aerta peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial

Tingkat pemerataan pendapatan di Kota Magelang dalam beberapa tahun ini yang direpresentasikan melalui indeks gini. Nilai Indek Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 maka tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 di katakana bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Indeks gini di Kota Magelang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2012 meningkat kemudian sebaliknya pada tahun 2013 mengalami penurunan. Kondisi ini berulang hingga tahun 2016, dengan kisaran perubahan yang tidak terlalu ketimpangan antar kelompok pendapatan yang cenderung tidak melebar atau dengan kata lain gap antar kelompok pendapatan semakin kecil atau semakin merata. Data Indeks gini dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang semakin meningkat. Indeks Gini dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berada di kisaran 0.3. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan masyarakat di Kota Magelang mendekati merata namun masih menyisakan permasalahan yang berupa distribusi pendapatan yang belum merata.

Tabel 2 - 55

Perbandingan Indeks GIni, Kota Magelang Tahun 2010- 2015

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gini Rasio Kota Magelang	0.3138	0.3418	0.3715	0.330	0.360	0.34

***Sumber**: SIPD Kota Magelang Tahun 2018 (diolah)*

Selain indeks Gini, indikator lain yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan mayarakat adalah tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan kriteria Bank Dunia, di mana 40% penduduk berpendapatan

rendah. Tingkat ketimpangan masyarakat ini di gambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan terhadap seluruh panduduk yang di golongkan menjadi : a). <12%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi; b). 12%-17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang; dan c). > 17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Tabel 2 - 56

Distribusi Pembagian Pengeluaran Per Kapita 2011-2015

Tahun	40% rendah	40% Menengah	20% Tinggi
2011	19.40	38.24	42.36
2012	16.10	35.74	48.17
2013	19.24	39.24	41.52
2014	17.15	38.75	44.10
2015	17.20	37.09	45.71

***Sumber**: SIPD Kota Magelang Tahun 2018.*

Berdasarkan tabel di atas distribusi pengeluaran pada kelas 40% penduduk berpengeluaran rendah selama rentang tahun 2011 sampai dengan 2015 relatif berflutuatif. Pada tahun 2011 ketimpangan relatif rendah pada kisaran 19.40% kemudian meningkat pada tahun 2012 manjadi 16.10%. Kondisi di tahun 2013 membaik dengan ketimpangan yang rendah, namun pada tahun 2014 – 2015 , tingkat ketimpangan distribusi pedapatan berkisar pada angka 17%. Angka ini masuk di dalam kriteria ketimpangan tingkat rendah. Kondisi ini masih lebih baik apabila di bandingkan dengan kondisi pada tahun 2012. dimana tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kota magelang masuk di dalam kriteria sedang. Meskipun berapada pada kategori kektimpangan rendah, kelompok penduduk bepngeluaran tinggi mengalami fluktuasi persentase pendapatan, dari 42.36% pada tahin 2011 naik menjadi 48.17% di tahun 2012, menurun di tahun 2013 kemudian naik di tahun 2014 dan tahun 2015.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat di lihat dari prosentase pengeluaran non makanan. Semakin tinggai tingkat pendapatan masyakat maka pola konsumsi masyarakat akan bergeser ke konsumsi non makanan dengan artian bahwa semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran konsumsi non makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya di gunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan

Tabel 2 - 57

Tabel Perbandingan % Konsumsi Makanan, % Konsumsi Non Makanan dan Rata- rata Pengeluaran Per Kapita Kota Magelang Tahun 2011 – 2016

Tahun	% Konsumsi Non Makanan	% Konsumsi Makanan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita sebulan (Rp)
2011	53.83	46.17	653.780

Tahun	% Konsumsi Non Makanan	% Konsumsi Makanan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita sebulan (Rp)
2012	57.53	42.47	822.561
2013	54.87	45.13	757.919
2014	55.64	44.36	787.022
2015	54.38	45.62	880.508
2016	58.22	41.78	1.125.811

***Sumber**: SIPD Kota Magelang Tahun 2018*

Dari tabel di atas, maka apabila didasarkan dengan teori kesejahteraan dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangannya ≥ 50%, menunjukkan kondisi rumah tangga yang baik sedangkan apabila tingkat konsumsi non pangannya menunjukkan nilai 20-49% menunjukkan kondisi sedang dan ≥ menunjukkan kondisi yang buruk. Tingkat konsumsi non pangan masyakarat Kota Magelang sejak tahun 2011 menunjukkan trend yang meningkat di atas 50% sehingga apabila di dasarkan dari teori di atas , dapat di golongkan ke dalam kondisi rumahtangga yang baik. Proporsi pengeluaran non makanan lebih dari 50% dengan fluktuatif yang mendekati 60%. Tahun 2016 merupakan nilai terkecil untuk persentase pengeluaran makanan atau nilai tertinggi untuk persentase pengeluaran non makanan dalam rentang enam periode. Sementara untuk rata – rata pengeluaran per kapita per bulan selama rentang enam tahun dapat di lihat bahwa rata – rata pengeluaran per kapita sebupan penduduk meningkat dari Rp. 653.780,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 1.125.811,- di tahun 2016

Kemampuan Ekonomi Daerah juga dapat direpresentasikan melalui produktivitas total daerah yang tercermin pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sembilan sektor atau lapangan usaha:

Tabel 2 - 58
PDRB Menurut Lapangan Usaha adhk dan adhb Tahun 2010-2012
dan Prediksi Tahun 2013-2016 (2010=100 dalam Juta Rupiah)

Tahun	PDRB adhb	PDRB adhk
2011	4.464.559,10	4.255.662.20
2012	4.887.646,47	4.484.268,07
2013	5.356.307,45	4.755.269,18
2014	5.915.830,84	4.987.376,46

Tahun	PDRB adhb	PDRB adhk
2015	6.466.971,04	5.241.660,00
2016*	7.015.380, 09	5.518.684,55
2017**	7.544.799, 70	5.804.917,24

***Sumber**: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (Detail data : Dinas KOminfo dan statistik Kota Magelang Tahun 2017)*

** Angka sementara*

*** Angka sangat sederhana*

Indikator selanjutnya dari aspek Kemampuan Keuangan Daerah adalah Jumlah bank dan lembaga keuangan non bank yang ada di Kota Magelang. Keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank tersebut diharapkan akan mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Magelang serta meningkatkan kesejateraan masyarakat. Dengan luas wilayah 18.12 km2, pada tahun 2017 Kota Magelang mempunyai 49 lembaga keuangan perbankan (cabang dan unit lembaga perbankan) yang terdiri dari 4 lembaga bank milik pemerintah , 2 lembaga perbankan milik daerah , serta 22 bank swasta yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Magelang. Berdasarkan jenis, bank yang ada di Magelang meliputi : a). 36 Bank Umum (commercial Bank), terdiri 34 bank konvesional dan 2 bank syariah , b). 13 Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank), yang merupakan jenis konvensional; dan 3). 3 Bank Syariah (Islamic Bank). Selain Lembaga Keuangan perbankan, jasa keuangan Non Bank yang terdapat di Kota Magelang pada tahun 2017 ,terdiri dari 17 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tersebar di 17 Kelurahan dan 15 Perusahaan Asuransi yang terdiri dari 14 perusahaan asuransi jiwa dan 1 perusahaan asuransi kerugian. (sumber, Bagian Perekonomian, SIPD Kota Magelang 2017)

Terkait dengan lembaga keuangan Koperasi yang ada di Kota Magelang pada tahun semester 1 2017 terdapat 217 koperasi yang terdiri dari :a). 160 koperasi konsumen dengan jumlah anggota 22.803 orang; b). 9 koperasi produsen, dengan jumlah anggota sebanyak 824 orang; c). 39 koperasi simpan pinjam dengan jumlah anggota sebanyak 31.128 orang; d). 3 koperasi sekunder dan, e). 6 koperasi jasa dengan jumlah 530 orang. Total masyarakat yang menjadi anggota koperasi sebanyak 55.285 orang. Total modal usaha Koperasi – koperasi yang ada di Kota Magelang pada semester 1 tahun 2017 sebesar Rp.443.726.617.000,-, sementara volume usahanya sebesar Rp. 299.689.708.000,-. Sisa Hasil usaha dari kegiatan koperasi tersebut sebesar Rp. 79.668.663.000,-. Apabila di bandingkan dengan tahun 2016, capaian pada semester 1 tahun 2017 relatif lebih kecil. Modal usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp.445.341.150.000,- dengan volume usahanya sebesar Rp.302.729.304.000,-

Fasilitas perdagangan di Kota Magelang cukup mendukung dan berkontribusi di dalam menambah sektor jasa perdagangan. Pada tahun 2017 di Kota Magelang terdapat 5 pasar tradisional, 20 minimarket, 7 supermarket dan 17 grosir. Keberadaan fasilitas – fasilitas perdagangan di Kota Magelang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Magelang bahkan beberapa fasilitas jasa perdagangan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di sekitar Kota Magelang dan mampu menjadi daya tarik di sektor jasa perdagangan.

Capaian membanggakan di raih Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2017, dengan di raihnya pengharaan Anugerah Pancawara 2017 dari Kementrian Perdagarangan. Penghargaan ini di raih oleh pasar Rejowinangun Magelang. Hasil penilaian tim juri menyatakan, Pasar Rejowinangun layak menjadi pemenang untuk Kategori Pasar Rakyat Pemerintah Daerah Tipe I dan II diraih Pasar Rejowinangun (Magelang) dengan inovasi 'Pengembangan Pasar Rakyat sebagai Ruang Sosial Budaya'. Anugerah Pancawara 2017 merupakan penghargaan yang pertama kalinya diselenggarakan Yayasan Danamon Peduli bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI untuk mengapresiasi pasar tradisional di Indonesia yang dinilai sukses membuat inovasi bagi kemajuan pasar yang dikelolanya. Pemerintah Kota Magelang senantiasa berusaha untuk terus melakukan revitalisasi beberapa sarana jasa perdagangan di Kota Magelang khususnya Pasar – pasar tradisional yang ada di Kota Magelang dengan harapan pasar tradisional ini mempunyai daya saing tersendiri dengan memperhatikan kearifan lokal apabila di bandingkan dengan pasar modern mengingat pasar tradisional mampu menyerap ribuan masyarakat yang bergerak di sektor tersebut. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang pada semester 1 tahun 2017 terdapat 2.953 pedagang yang berjualan di pasar – pasar tradisional yang ada di Kota Magelang. Jumlah ini belum termasuk para penyedia jasa yang bergerak pada sektor perdagangan yang ada di pasar – pasar tradisional.

Indikator lain yang merepresentasikan Aspek Kemampuan Keuangan daerah adalah jumlah penginapan/ hotel yang ada di Kota Magelang beserta sarana pendukung pariwisata di Kota Magelang. Pengembangan wisata di Kota Magelang dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek produk wisata yang meliputi obyek wisata, daya tarik wisata,serta aksebilitas. Sementara aspek yang kedua adalah pasar wisatawan baik lokal, regional maupun mancanegara. Objek dan daya tarik wisata di Kota Magelang terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata religius/ziarah, wisata alam dan wisata buatan. Adapun fasilitas wisata terutama di dukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata berupa hotel, rumah makan dan fasilitas lainnya menarik wisatwan untuk berkunjung di Kota Magelang dengan data sebagai berikut:

Tabel 2 - 59

Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Magelang Tahun 2010- Semester 1 2017

Jml Kunjungan Wisata	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Semester 1 Tahun 2017
Jumlah wisatawan	**796.246**	**716.850**	**971.163**	**918.232**	**994.187**	**1.139.454**	**1.020.040**	**540.764**
Wisatawan Dalam Negri	795.729	716.206	970.554	913.768	988.622	1.133.373	1.013.138	539.590
Wisatawan Luar Negeri	517	644	609	4.464	5.565	6.081	6.902	1.174

***Sumber**: SIPD Kota Magelang Tahun 2018. (Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang , SIPPD 2016 Bappeda Kota Magelang, Data Go, Data Strategis Pemerintah Kota Magelang, 2017)*

Secara umum potensi dan peluang pengembangan wisata di Kota Magelang sangat besar guna mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bawah ini disajikan tabel kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Magelang, dari sumber pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan.

Tabel 2 - 60

Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2012-2016

Sumber Pendapatan Daerah	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Pajak Hotel	730.319.921,-	1.372.069.102,-	2.027.782.556,-	2.441.943.652,-	2.879.263.958,-
Pajak Restoran	872.997.547,-	1.364.657.315,-	1.797.050.823,-	2.104.103.322,-	2.431.241.151,-
Pajak Hiburan	1.019.667.207,-	1.399.359.651,-	1.329.451.348,-	1.459.002.821,-	1.634.690.181,-
Total pajak hotel, restoran, hiburan	2.622.984.675,-	4.136.086.068,-	5.154.284.727,-	6.005.049.795,-	6.945.195.290,-
Total PAD	90.986.601.697,-	107.739.838.961,-	164.927.631.230,-	186.677.410.081,-	220.193.738.774,-
Kontribusi terhadap PAD	2.88%	3.84%	3.13%	3.22%	3.15%

Sumber : Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2011- 2016, BPKAD Kota Magelang

Potensi pariwisata di Kota Magelang saat ini belum di imbangi dengan pengembangan dan pemanfaatan yang optimal potensi – potensi pariwisata di Kota Magelang. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kecilnya kontribusi pariwisata terhadap PAD Kota Magelang. Inventarisasi dan penggalian bebagai potensi, keunikan dan destinasi pariwisata, meningkatkan promosi, informasi dan pemasaran pariwisata, menyelenggarakan berbagai event yang dapat menarik wisatawan hadir ke Kota Magelang serta mengembangkan berbagai fasilitas pendukung kepariwisataan diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Magelang dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang antara lain melalui peningkatan jumlah kunjungan wisata di Kota Magelang.

Data realisasi kontibusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan hiburan terhadap PAD pada triwulan 1 tahun 2017 sebagai berkut :

Tabel 2 - 61

Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kota Magelang tahun 2017

Sumber Pendapatan Daerah	Tahun 2017 (Rp)
Pajak Hotel	3.304.979.480,-
Pajak Restoran	3.388.469.448,-
Pajak Hiburan	1.884.212.564,-
Pendapatan dari pajak hotel, restoran, hiburan	8.577.661.492,-
Total PAD	232.925.982.708,-
Kontribusi terhadap PAD	3.68%

Sumber : Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Magelang semester 1 Tahun 2017, BPKAD Kota Magelang

Pada Tahun 2015 fasilitas hotel di Kota Magelang bertambah 2 yaitu Cityhub Hotel dan Hotel Safira sehingga Tahun 2017 Kota Magelang memiliki fasilitas Hotel sebanyak 17 hotel, terdiri dari 10 hotel kelas melati, 3 hotel bintang 2 yaitu Hotel Trio, Hotel Borobudur Indah dan Hotel Cityhub, 3 hotel kelas Bintang 3 yaitu Hotel Sriti, Hotel Oxalis dan

Hotel Safira, 1 buah hotel bintang 4 yaitu Hotel Atria yang terletak di Jalan Jendera Sudirman, serta 1 buah hotel bintang 5 yaitu Hotel Puri Asri yang terletak di tepi sungai Progo dan bersebelahan dengan Taman Kyai Langgeng. Layanan Hotel yang ada di Kota Magelang di rasa cukup untuk menampung wisatawan dan tamu yang berkunjung di Kota Magelang bahkan pada saat event- event terterntu baik yang berskala regional maupun nasional yang di selenggarakan di Kota Magelang. Jumlah kunjungan wisatanan dalam negeri yang menginap di Kota Magelang pada semester 1 Tahun 2017 sebanyak 102.248 pengunjung, sedangkan jumlah pengunjung luar negeri yang menginap di Kota Magelang sebanyak 965 pengunjung.

Fasilitas lain selain hotel yang mendukung jasa pariwisata di Kota Magelang yaitu keberadaan Rumah makan yang tersebar cukup banyak di Kota Magelang yaitu sebanyak 84 buah. Beberapa tahun ini Pemerintah Kota Magelang juga mengembangkan Pusat-pusat Kuliner yang memfasilitasi banyak PKL yang ada di sana. Selain bertujuan pada penataan PKL di Kota Magelang juga bermaksud untuk menciptakan suasana Kota yang tertib, bersih dan rapi dalam mendukung peningkatan pendapatan dari sektor Pariwisata. Data Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 terdapat 19 Pusat Kuliner yang tersebar di seluruh penjuru Kota Magelang. Pusat – pusat Kuliner tersebut mampu menampung 898 PKL Kuliner di Kota Magelang (sumber Data Strategis Kota Magelang 2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang)

Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas pariwisata di Kota Magelang. Hotel merupakan fasilitas penunjang pariwisata atau Amenitas yang utama selain rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Semakin meningkatnya potensi dan daya tarik Kota diindikasikan dengan semakin bertambahnya jumlah hotel di Kota Magelang.

Tabel 2 -62
Hotel Bintang di Kota Magelang

Nama & Alamat	Klasifikasi	Jumlah Kamar
PURI ASRI Jl. Cempaka 9	B - 5	178
ATRIA HOTEL & CONFERENCE Jl. Jend. Sudirman	B - 4	144
SRITI Jl. Daha 23 Telp. (0293) 363347, 363348	B - 3	31
TRIO Jl. Jend. Sudirman 68 Telp. (0293) 365095, 365096	B - 2	73
BOROBUDUR INDAH Jl. A. Yani 246 Telp. (0293) 364502, 312500	B - 2	39
OXALIS Jl. Cempaka 17 Telp. (0293) 5503151, 310371	B - 3	53

Nama & Alamat	Klasifikasi	Jumlah Kamar
CITY HUB Jl. Gatot Subroto No. 260, Telp. (0293) 311758	B - 2	34
SAFIRA Jl. Gatot SoebrotoNo. 56A, Telp. (0293) 360033	B - 3	54

Sumber: Profil Pariwisata Kota Magelang, 2016

Fasilitas penunjang lainnya adalah jumlah agen perjalanan wisata, yang sampai dengan tahun 2017 tercatat berjumlah 19 agen perjalanan wisata. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan potensi daerah dan memajukan sektor jasa Pariwisata dapat dilihat dengan beberapa kebijakan yang dilaksanakan antara lain penataan dan pengembangan kawasan lembah tidar untuk mendukung wisata religi Gunung Tidar, pengembangan kawasan budaya Mantyasih, serta pengembangan kawasan kuliner di beberapa titik di Kota Magelang.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemantapan kekuatan fiskal daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat strategis, dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif.

Tabel 2 - 63

Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2010 – 2017

TAHUN	POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	Prosentase (%) Potensi terhadap realisasi	Prosentase (%) Target terhadap realisasi
2010	62.751.575.900, 00	45.804.070.000,-	59.546.717.600, 00	94.89 %	130%
2011	69.552.144.480, 00	62.100.129.000,-	63.557.701.976, 00	91.38 %	102.35%
2012	91.619.320.000, 00	82.457.388.000,-	90.986.601.697, 00	99.31 %	111.56%
2013	120. 378.596.250, 00	96.302.877.000,-	107.739.838.961, 00	89.50 %	111.88%
2014	172.114.484.610, 00	124.432.498.000,-	164.906.266.142, 00	95.81%	132.53%
2015	207.682.651.625,00	152.806.995.000,-	186.677.410.081, 00	89.89%	122.17%
2016	269.616.256.588,00	197.465.478.000,-	220.217.864.000, 00	81.68%	111.52%
2017	297.261.794.010,00	218.085.185.000,-	232.925.982.708,00	78.36%	106.86%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2010-2017

Berdasarkan tabel di atas, potensi pendapatan daerah menunjukkan trend yang positif dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sementara prosentase realisasi PAD terhadap Potensi PAD cukup berfluktuatif. Realisasi pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, dimana serapannya sebesar 91.38%. Prosentase ini meningkat pada tahun 2012 mendekati 100% yaitu sebesar 99.31% kemudian sempat menurun pada tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 sedikit mengalami penurunan. Meski demkian secara efektifitas pencapaian target persentase realisasi selalu di atas 100 % dari tahun 2010-2016. Peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan terus menggali potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan di daerah. Kenaikan potensi PAD Kota Magelang pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 - 64

Tabel Kenaikan/ Penurunan PAD Tahun 2010-2017

No	URAIAN	REALISASI PAD (Rp)	% Kenaikan / Penurunan PAD
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2010	59.546.717.600,-	24.8%
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2011	63.557.701.976,-	6.74 %
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2012	90.986.601.697,-	43.16 %
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013	107.739.838.961,-	17.99 %
5	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014	164.906.266.142,-	53.06 %
6	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2015	186.667.410.081, -	13.20 %
7	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016	204.220.414.045, -	9.40 %
8	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2017	232.925.982.708, -	14.06 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA. 2010- 2017 (data diolah)

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastuktur

Fokus Kedua dari Aspek daya Saing Daerah adalah Fokus Fasilitas Wilayah atau ketersediaan Insfrastruktur yang memadai di daerah. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau investor dengan penyediaan sarana dan prasarana. Fasilitas Wilayah yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kota Magelang meliputi sarana perkotaan yaitu sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga.

Prasarana perkotaan meliputi prasarana permukiman; prasarana perhubungan; prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi, serta jaringan utilitas lainnya; serta prasarana persampahan.

Salah satu sarana prasana wilayah yang di sediakan pemerintah dan swadaya masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan Kota Religius adalah ketersediaan tempat - tempat ibadah. Kecukupan sarana prasarana peribadatan di bandingkan dengan jumlah penduduk ini menjadi modal bagi Pemerintah daerah dalam menjamin dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di akui oleh Pemerintah.. Data dari Departemen Agama Kota Magelang yang tersaji di dalam Data Go Kota Magelang menyajikan data ketersediaan tempat ibadah di Kota Magelang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 65

Sarana Peribadatan di Kota Magelang Tahun 2013 – 2017

Tempat Ibadah	2013	2014	2015	2016	2017
Masjid	153	153	153	153	153
Langgar / Mushola	224	210	217	217	217
Gereja Kristen	16	23	26	26	26
Gereja Katholik/Kapel	2	2	2	2	2
Wihara	2	2	2	2	2
Klenteng	2	2	2	2	2
Lainnya	-	-	4	4	4

Sumber : Kemenag Kota Magelang, Data Go, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur diantaranya adalah Ketaatan terhadap RTRW, Prasarana Jalan, Kondisi Permukiman dan Infrastruktur, Sumber daya Air, Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih.

2.1.4.2.1 Ketaatan Terhadap Perda RTRW

Perda RTRW Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011–2031 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. RTRW memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, selain itu juga berisi rencana struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis, memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi :

a) penyelarasan dan sinkronisasi program-program pembangunan Daerah dengan rencana tata ruang;
b) peningkatan kejelasan dan perincian dari program-program utama yang telah ditetapkan kedalam implementasi rencana tindak yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Daerah;
c) penyempurnaan pedoman pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Daerah;

d) penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan kegiatan dan program pembangunan Daerah secara menerus dan berlanjut berkaitan dengan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang terdapat dalam rencana tata ruang;
e) penyempurnaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang;
f) pengoptimalan sistem koordinasi antar instansi terkait dalam penataan ruang.

Rencana Tata Ruang Kota Magelang secara Umum membagi Kota Magelang menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam pentaan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempuyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Magelang terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota meliputi:

a) Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
b) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
c) Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
d) Kawasan strategis sosial budaya.

Salah satu wujud ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW maka Pemerintah Kota Magelang senantiasa berupaya untuk memenuhi target pencapaian ruang terbuka hijau sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan oleh - oleh Undang – undang. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan utama perkotaan yang berkaitan langsung dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berfugsi sebagai daerah resapan air. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka mutu lingkungan hidup di perkotaan dapat meningkat, sehingga lingkungan terasa nyaman, segar, indah, bersih dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota Magelang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Target indikator ini adalah 20 % dari luas wilayah Kota Magelang. Penyediaan RTH publik bukan merupakan hal yang mudah untuk suatu kabupaten/kota.

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan pada tahun 2015 baru terealisir sebesar 18,57%. Kekurangan luasan RTH sebesar 1,43%atau seluas 25,9 hektar sangat sulit dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan di Kota Magelang. Program dan kegiatan pada bidang RTH harus difokuskan pada upaya peningkatan jumlah (kuantitas) luasan, tidak hanya pada peningkatan kualitas aspek visual (estetika) dari RTH khususnya taman kota. Peningkatan kuantitas lahan RTH dilakukan dengan pembebasan lahan pada sepadan Jalan dan Sungai, pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10% bagi pengembang serta pembebasan melalui pembelian tanah masyarakat untuk RTH.

Tabel 2 - 66

Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang, Tahun 2017 Semester 1

Rinican	Jumlah	Satuan	Luas (Ha)
Taman Kota	60	Buah	8.94
Jalur Hijau	20	titik	263.39

Hutan Kota	1	titik	67.12
TPU	1	Buah	16
Jumlah	**84**		**355.45**

Secara perhitungan ideal luasan RTH di Kota Magelang memiliki kekurangan sebanyak 22,41 Ha. Luas ruang terbuka hijau pada tahun 2017 sebesar 355.45 HA Pengembangan RTH terus diupayakan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kota Magelang, dengan melibatkan masyarakat dan instansi-instansi seperti sekolah, perusahaan, pihak swasta dan lain sebagainya.

Belum tercapainya Ruang Terbuka Hijau khususnya publik perlu adanya upaya tersendiri untuk mengotimalkan lahan terbuka yang sudah ada seperti makam dan sempadan sungai seperti memanfaatkan lahan – lahan sempit, lahan marginal dan lahan – lahan yang terabaikan untuk dijadikan RTH publik, melakukan penertiban ternadap bangunan – bangunan liar yang tidak berizin di sempadan sungai, serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan RTH untuk memberdayakan masyakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencapaian amanat Undang – Undang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang

Sarana informasi tata ruang wilayah Kota Magelang kurang memenuhi target pada tahun perencanaan. Informasi tata ruang kepada masyarakat masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tata ruang. Sarana informasi bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata ruang, Hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga tata ruang dan ikut menegakkan tata ruang di Kota Magelang.

Salah satu indikator yang merepresentasikan terhadap keataan terhadap Peraturan Tata Ruang di Kota Magelang di antaranya indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bappeda (selaku sekretaris BKPRD), KPPT (instansi pemberi ijin tertentu), dan kantor pertanahan (terkait izin IPPT) yang mensyaratkan setiap proses sertifikasi dan alih fungsi lahan.

Beberapa permasalahan terkait dengan penataan ruang daerah selain hal tersebut di atas di antaranya adalah masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum ada rencana rinci Tata Ruang Kota Magelang yang disebabkan karena proses legalisasi Raperda RDTR masih sangat panjang. Selain itu juga masih banyak ditemui bangunan – bangunan yang belum mempunyai ijin serta bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Masalah yang lain yang juga masih menjadi PR bagi Pemerintah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan ruang sesuai dengan aturan yang ada ditambah dengan belum optimalnya pengembangan sistem informasi kepada masyarakat di bidang tata ruang.

Ketaatan terhadap peraturan perundangan terkait penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan mengingat saat ini degradasi daya lingkungan semakin besar mengingat kebutuhan masyarakat terhadap lahan semakin besar. Kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi terganggu akibat kurang terkendalinya para pelaku pembangunan dalam pemanfaatannya serta kurangnya kepedulian terhadap kaidah – kaidah kelestarian lingkungan alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

2.1.4.2.2 Prasarana Jalan

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khusunya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasn ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street..

Struktur dan kondisi fisik jaringan jalan Kota Magelang secara umum hampir 100% dalam kondisi baik dan terawat baik jalan kota maupun jalan lingkungan. Struktur jalan di Kota Magelang sebagian besar berupa jalan aspal dengan perkerasan hotmix terutama untuk jalan utama kota dan lingkungan serta sebagian dengan perkerasan rigid pavement atau betonisasi untuk jalan-jalan lingkungan. Secara fisik ruas jalan dan jembatan di Kota Magelang sudah dalam keadaan yang baik oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala

Capaian kinerja terkait dengan Kondisi jalan terkait panjang trotoar dalam kondisi baik dengan dari panjang trotoar yang jumlah total panjangnya 81.653 meter terdapat 56.391 meter trotoar yang kondisinya baik. Pada tahun 2016 trotoar yang dibangun adalah trotoar Jl. A. Yani, Trotoar Jl. Abimanyu, Trotoar Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Trotoar Jl. Sudirman. Indikator Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 88,5% dari target 88,5%, artinya dari total panjang jalan kota 122,94 Km terdapat 108,8 Km dalam kondisi baik. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki tambahan ruas jalan perkotaan akibat penurunan status jalan provinsi, yaitu Jl. Tidar, Jl. Kyai Mojo, Jl. Mayjend. Sutoyo, Jl. Aloon – aloon Selatan dan Jl. Gatot Subroto, kelima ruas jalan tersebut kondisinya rusak sedang.

Tabel 2 - 67

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, fungsi dan Status Jalan Di Kota Magelang Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Semester 1 Tahun 2017
Jenis Permukaan Jalan					
a. Aspal	84.306	84.306	116.352	118.92	118.92
b. Kerikil			-	-	-
c. tanah			-	-	-
Tidak di rinci	8.763	9.633	-	-	-
Panjang jalan berdasarkan kondisi					
a. Jalan baik					
b. Jalan sedang	33.81	38.35	59.64	70.08	70.08
c. Jalan rusak	29.71	29.17	33.37	38.98	38.98
d. Jalan rusak berat	26.54	23.45	21.56	9.15	9.15
	3.00	2.97	1.78	0.7	0.7

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Semester 1 Tahun 2017
Panjang jalan berdasarkan fungsi					
a. Jalan arteri					
d. Jalan kolektor	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574
	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
Status Jalan					
a. Kabupaten/Kota	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964
b. Nasional	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512
b. Provinsi	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
Kelas Jalan					
a. Kelas I	-	-	-	-	-
b. Kelas II	-	-	-	-	-
c. Kelas III	-	-	-	-	-
d. Kelas IIIA	-	-	-	-	-
e. Kelas IIIB	-	-	-	-	-
f. Kelas IIIC	84.306	84.306	116.35	118.92	118.92
c. Tidak Dirinci	8.763	9.633	-	-	-

***Sumber**: SIPD Kota Magelang Tahun 2018, DPU Kota Magelang, Profil Daerah Kota Magelang dan DDA Kota Mgl Tahun 2013-2017*
Dasar : Keputusan Walikota Magelang nomor 621/120/112/2015 tentang Penetapan Status Ruas – ruas jalan Kota dan Jembatan Kota Magelang

Transportasi merupakan salah satu elemen perkotaan yang tidak dapat dipisahkan, dan menjadi struktur utama pembentuk kawasan perkotaan. Transporatsi menjadi tumpuan aktivitas masyarakat dalam beraktivitas serta pengembangan ekonomi dan sosial wilayah perkotaan sehingga pengembangan transportasi menjadi prioritas penangananya. Pemerintah Kota Magelang mempunyai komitmen dalam peningkatan kualitas jalan.

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khusunya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasn ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street.

Keberadaan angkutan umum juga sangat mendukung system pergerakan wilayah, Salah satu jenis angkutan umum yang beroperasi di Kota Magelang adalah angkutan perkotaan yang melayani 12 rute yang berkapasitas 12 penumpang, saat ini jumlah angkutan umum yang tercatat masih beroperasi adalah sebanyak 335.

Selain angkutan kota, dikota Magelang juga dilalui angkutan perbatasan sejumlah 173 angkutan perbatasan dengan rincian jumlah armada pada masing-masing trayeknya adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2 - 68

Trayek dan Jumlah Armada Angkutan Perbatasan di Kota Magelang

No	Trayek	Jumlah Armada
1	Magelang-Payaman-Secang	21
2	Magelang-Tanjung-Kalinegoro	12
3	Magelang-Blondo-Borobudur	6
4	Magelang-Blabak-Muntilan	29
5	Magelang-Sorobayan-Tegalrejo	23
6	Magelang-Secang-Grabag	15
7	Magelang-Secang-Pirikan-Grabag	23
8	Magelang-Panca Arga-Salaman	12
9	Magelang-Canguk-Candimulyo-Petung-Krakal-Pogalan	7
10	Magelang-Muntilan-Salam	22
11	Magelang-Tegalrejo-Ngablak	3

***Sumber**: Dinas Perhubungan Kota Magelang.*

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Tipe A yaitu Terminal Tidar mulai Tahun 2016 pengelolaannya diserahkan Provinsi. Sedang untuk Kota Magelang hanya mengelola Terminal Tipe C. Keberadaan Terminal Type C sekarang ini belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan, kedepan perlu ada pembangunan terminal Type C sesuai standar. Pengembangan Terminal Tipe C yaitu Terminal Kawasan Kebonpolo, Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo, Terminal Kawasan Canguk, Terminal Kawasan Sambung, Terminal Kawasan Iklas, dan Terminal Kawasan Jalan Kalimas. Sedangkan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, yaitu Terminal Angkutan Barang berada di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara, belum bergfungsi sebagai terminal barang. Kedepan perlu ada pengembangan Terminal Barang yang melayani bongkar muat dan pergudangan.

2.1.4.2.3 **Drainase**

Jaringan drainase seringkali disebut jaringan air hujan, jaringan pematusan, jaringan pelimpasan, jaringan riol, dan sebagainya. Saluran drainase berfungsi mengalirkan luapan/ limpasan air hujan (run off), yang umumnya berupa saluran terbuka (selokan/got/kanal/sungai) dengan “rute” dari area tangkapan hujan (catcment area) berupa lahan tertutup/ terbangun seperti jalan, halaman, dan lain lain ke muara (out-fall) yang juga bisa berupa sungai, waduk, polder, dan lain lain.

Kondisi jaringan drainase di Kota Magelang mencakup seluruh system jaringan tersebut, diatas dengan pengecualian tidak terdapat waduk penampungan. Dalam hal ini, fungsi waduk penampungan sebagai muara (out fall)

seluruh saluran tersebut, digantikan oleh S. Progo dan S. Elo yang sekaligus merupakan saluran primer. Bahkan karakteristik khusus wilayah Kota Magelang yang masih mempertahankan sekitar 12 % luas wilayahnya sebagai area persawahan, dalam kondisi tertentu lahan persawahan tersebut juga dapat berfungsi sebagai penampungan limpasan air hujan.

Di dalam lingkungan permukiman, jaringan drainase dikembangkan di kanan kiri jalan dimanfaatkan sebagian besar untuk pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan air hujan. Sistem jaringan drainase umumnya mencakup seluruh saluran yang ada, mulai dari selokan di halaman bangunan, saluran tersier yang umumnya berupa selokan di tepi jalan, saluran sekunder yang umumnya berupa kanal yang lebih lebar dan menuju saluran primer, hingga saluran primer yang umumnya berupa aliran sungai besar, serta waduk penampungan.

Sistem jaringan drainase di Kota Magelang terdiri dari sistem jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Sistem jaringan drainase tersier merupakan jaringan drainase yang rumah per rumah, jaringan sekunder yang menghubungkan antara jaringan tersier dan primer.

Drainase di Kota Magelang banyak menggunakan drainase tertutup utamanya pada kawasan pusat perdagangan dan jasa. Sistem pengelolaan drainase lingkungan di Kota Magelang pada dasarnya telah diatur sebagaimana pola permukiman yang ada, namun seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk meningkat dan secara fisik mengalami perkembangan terutama adalah target pemenuhan kualitas lingkungan hidup, penurunan permukaan tanah, peningkatan debit air, kerusakan – kerusakan ekologi lingkungan. Secara umum, setiap kawasan permukiman telah memiliki saluran drainase sekunder dan tersier sampai ke tiap – tiap rumah dan terintegrasi ke dalam saluran drainase primer namun genangan pada musim penghujan akibat dari naiknya debit air pada saluran drainase primer dan adanya penurunan sudut elevasi pada saluran drainase sekunder sehingga air yang seharusnya mengalir dari saluran drainase tersier menuju saluran drainase sekunder kemudian berakhir di saluran drainase berbalik arah. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah untuk memperbaiki sarana drainase di Kota Magelang.

Permasalahan yang muncul dalam sistem drainase di Kota Magelang adalah sudut elevasi saluran yang tidak seimbang sehingga permukaan dasar saluran sekunder lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan dasar saluran tersier hal ini dipengaruhi oleh kontur lahan yang cukup bervariasi. Permasalahan lainnya adalah bahwa jaringan drainase perkotaan juga menjadi saluran pembuangan limbah rumah tangga. Jaringan drainase primer di Kota Magelang terdiri dari sungai Manggis dan Sungai Bening yang menampung limpahan air hujan dari seluruh jaringan drainase kota.

Permasalahan lain terkait dengan system drainase di Kota Magelang diantaranya: a).belum optimalnya fungsi dan peran sarana dan prasarana drainase untuk pengendalian banjir dan genangan pada musim hujan, b). jaringan teknis irigasi masih menjadi tumpuan pembuangan air hujan dan air limbah dari permukiman dan perumahan, c). adanya konversi lahan persawahan ke permukiman/ perumahan baru pada setiap tahunnya, akan mempengaruhi penyediaan saluran irigasi serta d).belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.

Implementasi pengembangan jaringan drainase di Kota Magelang dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi jaringan sungai dan jaringan drainase utama yang ada, berperan sebagai main drain (drainase induk). Pola jaringan drainase yang dikembangkan mengikuti pola jaringan jalan yang dikembangkan. Untuk beberapa kawasan yang cepat mengalami sedimentasi maka perlu adanya normalisasi irigasi (tanggul, saluran) secara bertahap. Upaya

untuk perbaikan jaringan draianase perkotaan diupayakan untuk meminimalisir merusak atau mengganggu keberadaan jalur hijau jalan mengingat kita masih mempunyai kewajiban untuk mencapai batas minimal 30% ruang hijau di Kota Magelang.

2.1.4.2.4 **Kondisi Permukiman dan Infrastruktur**

Pemerintah Kota Magelang mempunyai tantangan di dalam aspek penyediaan sarana pemukiman bagi penduduk di atas lahan yang terbatas sehingga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang permukiman. Pemerintah Kota Magelang berusaha mengoptimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama di kawasan - kawasan yang padat penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Magelang juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas prasarana pelayanan dasar permukiman perkotaan prasarana pemukiman yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dari Pemerintah daerah terkait dengan Key Performance Indicators – akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh 0% dan akses sanitasi layak 100%. Kondisi yang ada di Kota Magelang pada saat ini adalah masih adanya lingkungan permukiman kumuh dam rumah tidak layak huni di Kota Magelang, belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, belum optimalnya upaya pemeliharaan sarana permukinan yang ada guna mendukung perpanjangan usia pakai sarana tersebut serta masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan yang meliputi prasarana lingkungan, prasarana drainase lingkungan , prasarana air bersih lingkungan serta prasarana sanitasi lingkungan.

Rumah layak huni secara nasional SPMnya dari Kementerian Perumahan Rakyat 100% dengan kurun waktu tahun 2009-2025, untuk mempercepat terwujudnya indikator kinerja tersebut perlu dukungan kesepakatan kriteria Rumah Tidak layak Huni (RTLH) antara PD terkait, dengan maksud agar dilakukan survey data RTLH akan memudahkan untuk melaksanakan program rumah layak huni. Permasalahannya yaitu sebagian besar penanganan RTLH terkendala dengan masalah kepemilika aset yang belum jelas. Indikator ini memerlukan data jumlah rumah layak huni dan jumlah rumah keseluruhan rumah di suatu wilayah. Untuk mengetahui jumlah rumah layak huni terlebih dahulu ditetapkan kriteria rumah layak huni, setelah itu baru dilakukan survey yang melibatkan PD terkait, seperti DKPTK, DPU, Bappeda, Kantor Statistik, Kantor Litbang dan Statistik, BPMPKB.

Data Stategis Kota Magelang semester 1 tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 2.157 unit rumah sedangkan rumah layak huni di lokasi perkotaan sebanyak 29.240 unit rumah. Sementara luas kawasan kumuh di Kota Magelang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/280/112-310 Tahun 2015 tentang Luasan Kumuh yang diterbitkan pada tahun 2015 seluas 121.17 Ha . Hasil verifikasi di sesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Permukiman dan Perumahan Kumuh, terdapat luasan kumus seluas 125.34 Ha di Kota Magelang. Satu hal yang juga masih menjadi pemikiran bagi Pemerintah yaitu terkait dengan keberadaan penduduk di permukiman kumuh. Data 2017 menyebutkan bahwa upaya

Pemeritah Kota Magelang dalam menyurangi kawasan kumuh telah berhasil mengurangi luasan kumuh 57.935 Ha sehingga saat ini terdapat 2.188 jiwa atau 547 KK yang tinggal di perumahan kumuh seluas 67.405 Ha.

Pertambahan jumlah penduduk di kawasan perkotaan meningkatkan hunian padat yang jika tidak terkendali akan menyebabkan kekumuhan, kegiatan untuk mengurangi kawan kumuh permukiman baru menyentuh infrastruktur jalan lingkungan, saluran permukiman dan air bersih, sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sanitasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala aturan dan juknis, sehingga penanganannya belum maksimal . Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah sehingga berkurangnya luasan kumuh di Kota Magelang dapat terpacai sesuai denggan target perencanaan yang telah ditetapkan

Beberapa program pengurangan rumah tidak layak huni yang sudah terlaksana di Kota Magelang melalui pembiayaan APBD Kota, APBD Provinsi, PNPM, dan BSPS. Dalam mensikapi Keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah di wilayah perkotaan menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan di arahkan pada pembangunan rumah susun.Hingga tahun 2015 Pemerintah Kota Magelang sudah memiliki 2 (dua) unit Twin Block Rusunawa yang berada di Kelurahan Porobangsan dan KelurahanTidar Utara

Terkait dengan sanitasi rumah tinggal, pada tahun 2016 rumah dengan fasilitas air bersih sebanyak 29.055 unit, rumah yang memiliki pembuangan tinja 28.320 unit sedangkan rumah dengan memiliki tempat pembuangan sampah sebanyak 21.237 unit Tersedianya system air limbah yang memadai, dimana rumah tinggal yang bersanitasi berarti harus memiliki system pengelolaan limbah yang memadai. . Khusus untuk kawasan padat hunian dan bangunan, penyediaan rumah tinggal bersanitasi akan menghadapi masalah ketersediaan tanah. Peran pemerintah sangat strategis untuk untuk penyelesaian masalah ini melalui penyediaan septic tankcomumnal dalam dokumen SSK yang telah disusun.

Partisipasi masyarakat sangat menentukan untuk menyukseskan program-program untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi, karena masih terdapat kawasan rawan sanitasi di Kota Magelang, yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat masih rendah mengenai BAB. Perlu upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti pola hidup sehat serta untuk bersama – sama Pemerintah menyukseskan program – program sanitasi di Kota Magelang.

2.1.4.2.5 **Sumber Daya Air**

Sumber daya air di Kota Magelang terdiri dari dua jenis yaitu Sungai dan Sumber Mata Air. Sumber daya air berupa sungai adalah dua sungai yang cukup besar yang juga menjadi batas wilayah Kota Magelang, yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah Barat. Sungai Elo di sebelah timur yang masuk dalam Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. wilayah Sungai Progo-Opak-Serang memiliki luas total 4.993,85 km2 yang terdiri dari DAS Progo, Opak, Serang, Tangsi, Elo, Oyo. Menurut hasil penelitian geologi yang dilakukan PDAM Kota Magelang terhadap Sungai Progo, diketahui bahwa aquifer terdapat di kedalaman 10 – 30 m dan 90 – 120 m, dengan total panjang 138 Km dan luas DAS seluas 2.380 Km2. Selain itu, didalam kota juga dilalui oleh 2 saluran Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening dengan luas 3.663 Ha.

Sumber air bersih yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan masayarakat Kota Magelang berasal dari 7 sumber dan hanya satu yang berlokasi di wilayah Kota Magelang, yaitu sumber air Tuk Pecah. Sumber air lainnya

berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu mata air Kalimas I, mata air Kalimas II, mata air Wulung, mata air Kalegen, mata air Kanoman I, dan mata air Kanoman II. Sumber air di Kota Magelang juga dimanfaatkan untuk sistem irigasi yang berasal dari aliran Kalli Bening dan Kali Manggis yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan Prasarana irigasi di Kota Magelang terdiri dari 5.000 m saluran irigasi Kali Kota, 9.700 m saluran irigasi Kali Manggis, dan 7.850 m saluran irigasi Kali Bening.

Prasarana air bersih di Kota Magelang telah manjangkau ke 17 Kelurahan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian besar penduduk mendapatkan layanan air bersih dari Perusahaan Air minum Kota Magelang. Sampai dengan saat ini kondisi mata air di Kota Magelang cukup banyak, namun yang harus mulai dipikirkan oleh Pemerintah adalah tidak seluruhnya mata air dimanfaatkan dengan baik ketika kebutuhan permukiman meningkat, bahkan terdapat mata air yang ditutup untuk bangunan. Kondisi ini cukup memprihatinkan di mana tingkat kebutuhan air bersih cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu perlunya peningkatan kualitas dari saluran – saluran air agar tidak terjadi kebocoran sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tidak terganggu.

2.1.4.2.6 Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih

Sumber air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Magelang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber air bersih dari air tanah (sumur) dan air bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang. Sebagian besar kebutuhan air bersih penduduk sudah dapat dilayani melalui jaringan perpipaan yang telah menjangkau hampir di seluruh wilayah Kota Magelang.

Sistem jaringan air bersih di Kota Magelang terbagi menjadi sistem perpipaan dan sumur air dalam. Sistem perpipaan dikelola oleh PDAM dengan jumlah pelanggan pada tahun semester 1 2017 sebanyak 25.162. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tingkat penggunaan air bersih pada tahun 2017 sebesar 7.434.942 liter/ tahun. Data Strategis Kota Magelang 2017 menyebutkan bahwa pada tahun 2016, jumlah rumah tangga yang menggunakan leding /perpipaan sebanyak 25.103 rumah tangga dengan tingkat penggunaan air bersih 7.606.319 liter/ tahun, sedangkan rumah tangga yang masih menggunakan sumur lindung sebanyak 310 rumah tangga. Total jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum sebanyak 102.228 penduduk. Berdasarakan data strategis Kota Magelang pada semester 1 Tahun 2017 Pemakaian terbanyak oleh golongan II yaitu sebanyak 22.966 pelanggan dengan total pemakaian 3.741.482 m3. Jumlah ini sedikit meningkat apabila di bandingkan dengan tahun 2016 di mana jumlah pelanggan kelas 2 sebanyak 22.899 pelanggan, total pemakaian sebanyak 7.606.319 m3.

Tabel 2 - 69

Jumlah Pelanggan Air Minum, Total Pemakaian Air Minum, Jumlah Rumah Tangga dan Prosentase RT yang Menggunakan Air Bersih di Kota Magelang Tahun 2011 - 2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelanggan Air Minum	23.280	23.396	23.785	24.289	24.652	25.103	25.162
Total Pemakaian Air (m^3)	7.652.245	7.202.615	7.507.332	7.405.096	7.434.942	7.606.319	7.434.942
Jumlah Rumah tangga	39.672	40.623	41.246	41.853	42.433	43.026	43.328
Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (Pelanggan PDAM Kota Magelang)	58.61%	57.59%	57.67%	58.03%	58.10%	58.34%	58.07%

Sumber: Sumber : PDAM Kota Magelang, Data Go, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang , jumlah penduduk data Dispenduk Capil Kota Magelang, data diolah

Selain penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan, di Kota Magelang juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air bersih melalui sumur air tanah sementara prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih/Pelanggan PDAM sebesar 58.34%, sedangkan sisanya mendapatkan air bersih dari beberapa hidran umum air bersih yang disediakan Pemerintah Kota Magelang. Sebagian lainnya dengan memanfaatkan mata air baik yang diambil dari sumur maupun dari sumber-sumber mata air lainnya. Beberapa upaya pengembangan sistem jaringan air bersih antara lain adalah sebagai berikut: Pengoptimalan sumber mata air yang sudah ada, Revitalisasi jaringan air bersih perpipaan dan Penyediaan sumber pengaliran air bersih komunal seperti hydrant pada pusat pusat kegiatan dan permukiman.

Dengan semakin banyaknya kebutuhan akan air bersih, maka diperlukan perhatian serius untuk menambah volume atau debit air guna antisipasi tahun-tahun mendatang. Sistem penyediaan/ pelayanan air bersih pada umumnya terdiri dari bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi air baku, instalasi produksi, jaringan transmisi, bak penampung (reservoir) dan jaringan distribusi. Demikian halnya sistem penyediaan air bersih di Kota Magelang, prasarana pendukung yang ada meliputi :

1. Bangunan pengambil air baku, berada di lokasi sumber air, yaitu masing-masing adalah Mata Air (MA) Kalimas I & II,MA Kanoman I & II, MA Wulung, MA Kalegen, dan MA Citrosono dengan kapasitas total sumber air sebesar ± 705,5 liter/detik.
2. Instalasi produksi merupakan bangunan penampungan, khusus untuk air bersih dari MA Kalegen dan MA Wulung, yaitu BPT Kaputran, BPT Keringan, BPT Tonoboyo dan BPT Bandongan, sementara air bersih dari mata air lainnya langsung didistribusikan. Total kapasitas produksi terpasang air bersih maksimal sebesar ± 425 liter / detik.
3. Reservoir merupakan bangunan penampungan terakhir sebelum air bersih didistribusikan yaitu Reservoir Bandongan (1.400 m3), Reservoir (menara) Alun-alun (1.750 m3), Reservoir Tidar (1.000 m3) dan Reservoir Akmil (500 m3). Total kapasitas seluruh reservoir tersebut adalah ± 4.650 m3.
4. Jaringan perpipaan, meliputi jaringan transmisi air baku atau jaringan transmisi primer (Ø 9''. 12'') jaringan transmisi sekunder (Ø 4''. 8''), jaringan distribusi primer (Ø 1''. 3''), jaringan distribusi sekunder hingga sambungan rumah (<Ø 1'').

2.1.4.2.7 **Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik**

Pemenuhan kebutuhan listrik penduduk Kota Magelang dipenuhi melalui layanan listrik dari Perusahan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan yang menggunakan jasa layanan listrik negara di Kota Magelang terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik dari tahun per tahun maka PLN terus berupaya untuk memperluas jaringan listrik di wilayah Kota Magelang.

Pada tahun 2017 jumlah pelanggan listrik di Kota Magelang sebanyak 32.346 dengan jumlah daya listrik yang terpasang 29.495.814 GWH dan jumlah pemakaian listrik pada tahun 2017 sebesar 27.499.522 Gwh. Pemakaian listrik oleh rumah tangga terbanyak menggunakan 900 watt sebanyak 13.914 KK, Rumah tangga yang menggunakan daya 450 watt sebayak 12.236 KK, yang menggunakan daya 1300 watt sebanyak 3.944 KK, sementara sisanya 2.252 KK

menggunakan daya listrik 2200 watt dan > 2200 watt. Hampir 90% pelanggan listrik di Kota Magelang merupakan rumah tangga sementara sisanya merupakan pelanggan dari kelompok usaha, kelompok industri dan umum.

Pada tahun 2015 jumlah pelanggan listrik di Kota Magelang sebanyak 36.180 dengan jumlah penggunaan Kwh listrik yang meningkat seiring bertambahnya jumlah pelanggan 10.296.592 Kwh. Sementara pada tahun 2014 jumlah pelanggan sebanyak 34.773, dengan jumlah pemakaian Kwh listrik sebanyak 9.089.329 Kwh Hampir 90% pelanggan listrik di Kota Magelang merupakan rumah tangga sementara sisanya merupakan pelanggan dari kelompok usaha, kelompok industri dan umum.

2.1.4.2.8 **Kondisi Pengelolaan Sampah**

Sistem jaringan persampahan di Kota Magelang dikelola oleh Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup (DPLH). Sistem pengangkutan sampah dilakukan melalui 2 tahap yaitu dari rumah tangga dan kegiatan lain ke transfer Depo/ TPS dan dari TPS ke TPA. Pengangkutan sendiri dibagi menjadi dalam beberapa jenis angkutan antara lain adalah Becak Sampah, Dump Truck dan Mini Truck. Tempat Pembuangan Sampah Akhir . Selain dilihat dari aktivitas yang menghasilkan sampah, bentuk produksi sampah di Kota Magelang dapat diidentifikasi berdasarkan persentase jenisnya. Jumlah persentase sampah terbesar berupa sampah organik 72.6%. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik, karena sampah organik merupakan sampah yang mudah untuk terurai. Sementara untuk bahan non organik yang paling banyak menjadi sampah adalah sampah plastik dengan persentase 9,65%.

Sistem pengangkutan yang dilakukan dikelola oleh beberapa pihak antar lain adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mencakup pengelolaan pasar-pasar di Kota Magelang. Sistem pengangkutan yang dilakukan diawali dengan pengelolaan sampah oleh rumah tangga atau kegiatan lain secara swadaya untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah dengan gerobak/ truk sampah. Kawasan merupakan kawasan yang seluruhnya dilalui oleh sistem pengangkutan gerobak sampah, sehingga sistem pembuangan sampah di wilayah ini dapat dikatakan cukup baik. Sampah yang diangkut dengan gerobak sampah kemudian diangkut ke TPS atau Transfer Depo, dan dilanjutkan dibawa ke TPA.

Tabel 2 - 70

Prosentase Sampah Terangkut Tahun 2010 - 2017

Tahun	Volume	Terangkut	Prosentase
2010	207.18	170.06	82.08
2011	193.94	164.78	84.96
2012	208.85	172.45	82.57
2013	217.92	186.72	85.68
2014	139.39	118.54	85.04
2015	160.58	136.75	85.16
2016	280.19	240.4	85.80
Semester 1 2017	279.04	240.16	86.07

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2010-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Meningkatnya volume sampah dan keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah industri menyebabkan masalah pengelolaan sampah di Kota Magelang menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Magelang. Hal ini ditambah dengan telah habisnya umur pakai TPSA Banyu urip sehingga saat ini Kota Magelang dalam keadaan darurat sampah dan harus mencari alternatif lain

yang akan di jadikan sebagai lokasi TPSA. Terkait permasalahan di bidang pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Magelang sudah melakukan beberapa terobosan dan inovasi seperti pembentukan Kampung Organik serta membudayakan 3R untuk memaksimalkan usia TPA. Jumlah bank sampah dan kampong organik yang terbentuk saat ini ada 124 unit dengan rincian 58 kampung organik dan 66 bank sampah yang tersebar di beberapa RT, RW, sekolah dan instansi di Kota Magelang

Upaya dari Pemerintah ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat utamanya dalam meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah domestik. Perlunya mengoptimalkan kembali kegiatan kegiatan yang sudah ada seperti kampong organic, 3R, pengomposan skala rumah tangga dan bank sampah serta sosialisasi dan penyuluhan mengenai reduksi volume sampah rumah tangga.

Jumlah TPS di Kota Magelang ada 13 buah, sementara jumlah transfer depo ada 12 buah. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sementara transfer depo adalah tempat yan digunakan untuk mentransfer sampah dari gerobak sampah ke truk sampah, sehingga seharusnya di transfer depo tidak terdapat sampah. Jumlah prasarana TPS dan Transfer depo Kota Magelang sebagaimana table berikut:

Tabel 2 - 71

Lokasi TPS dan Transfer Depo

No.	TPS	Transfer depo
1	Maluku (Kebonpolo)	Pasar Cacaban
2	Depok	Kyai Langgeng
3	Getuk Marem	Jl. Tarumanegara
4	Jurangombo	Telagawarna
5	Perum Korpri	Pasar Gotong Royong
6	Dalangan	Jl. Sunan Giri
7	Karet	Tidar Baru
8	Cacaban	Lapangan Rindam
9	Sanden	Sekertariat Pemkot
10	Kuncen	Lapangan Parkir MT
11	Magersari	Meteseh
12	Sidotopo	Pajang
13		Shopping/BCA
	12 Lokasi	13 Lokasi

Sumber: DLH Kota Magelang, 2017

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kajian daya tarik berinvestai tersebut didasarkan pada persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, nasional maupun multinasional dan menyimpulkan bahwa daya tarik investasi daerah (KPPOD, 2006) dipengaruhi oleh:

a) Kelembagaan yang meliputi kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan lokal;
b) Keamanan, politik dan sosial budaya;
c) Ekonomi daerah yang meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi;
d) Tenaga kerja yaitu ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja.
e) Infrastruktur fisik baik ketersediaan/ kualitas infrastruktur

Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Iklim Berinvestasi di antaranya adalah Angka Kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, Perda yang mendukung iklim usaha, dengan data sebagaimana tabel tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -72

Kondisi Keamanan Ketertiban Masyarakat Kota Magelang Tahun 2012 – 2017

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Demo/Unjuk Rasa	7	6	5	14	16	10
	a. Unjuk rasa bidang politik	0	0	0	0	0	3
	b. Unjuk rasa bidang ekonomi	7	1	3	2	4	2
	c. Unjuk rasa bidang lainnya	-	5	2	12	12	5
2	Kasus pertikaian antar warga	2	0	0	4	7	3
	a. Antar etnis	-	-	-	-	-	-
	b. Antar wilayah desa	1	-	-	1	1	1
	c. Antar agama	-	-	-	-	-	-
	d. Antar simpatisan partai	-	-	-	-	-	-
	e. Antar pelajar	1	-	-	-	2	2
	f. Rusuh masal/pengeroyokan	-	-	-	3	4	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-	-
4	Kasus sengketa pengusaha dan pekerja	-	1	-	-	-	5
5	Sarana prasarana keamanan						
	a. Jumlah aparat keamanan (polisi)	550	546	583	597	588	578
	b. Jumlah pos keamanan (polisi)	10	10	13	13	13	10
	c. Jumlah mobil kebakaran	5	5	5	5	5	5
	d. Aparat Pamong Praja	65	56	59	60	60	58

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	e. Jumlh patroli petugas satpol PP Pemantauan dan Penyele-saian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	154	262	262	262	262	360
	f. Jumlh petugas perlindungan masy	740	782	782	832	832	832
	g. Jumlah pos Siskampling	262	262	262	262	262	262
6	Angka Kriminalitas	15.38	10.99	12.35	14.14	14.02	13.31
7	Jumlah Tindak Kriminal						
	a. Jumlah Kasus Narkoba	6	14	25	26	20	30
	b. Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	0	1	0	0
	c. Jumlah kasus Seksual	3	3	0	1	0	1
	d. Jumlah Kasus Penganiayaan	13	5	3	15	18	12
	e. Jumlah Kasus Pencurian	80	19	20	23	56	69
	f. Jumlah Kasus Penipuan	7	9	1	15	20	10
	g. Jumlah Kasus Pemalsuan uang	0	1	0	0	0	0
	h. Jumlah Kasus lain – lain (pembakaran,senpi, perjudian, pengeroyokan, bawa sajam, KDRT, perlindungan anak dll)	na	na	na	na	na	18
	i. penggelapan	na	na	na	na	na	13
	j. perjudian	na	na	na	na	na	9

Sumber : SIPD Kota Magelang 2017, Bappeda Kota Magelang (Sumber data Badan Kesbangpolinmas dan Polres Magelang Kota)

Terkait dengan Angka kriminalitas di Kota Magelang pada dalam beberapa tahun terkahir ini relatif berfluktuatif. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan KesbangPolinmas Kota Magelang sampai dengan tahun 2017 sebanyak 162 kasus. Gambaran angka kriminalitas di Kota Magelang disajikan tabel berikut.

Tabel 2 - 73

Angka Kriminalitas di Kota Magelang Tahun 2011 – 2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
JUMLAH KEJAHATAN YANG TERJADI DI KOTA MAGELANG	242	184	132	149	171	170	162
JUMLAH PENDUDUK (*data Dispendukcapil*)	129.556	130.955	130.836	131.703	132.261	132.662	132.911
JUMLAH PENDUDUK (*dataBPS*)	119.210	119.647	120.158	120.615	120.952	121.293	121.673
ANGKA	18.68	14.05/ 15.38	10.09 /	11.31 /	12.93 /	12.81 /	12.19/

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KRIMINALITAS	/20.30		10.99	12.35	14.14	14.02	13.31

Sumber : 1. Bappeda Kota Magelang, Sistem Informasi Profil Daerah Kota Magelang 2015, data diolah
2. Data Strategis Kota Magelang 2011-2017. Dinas Kominfo*, data diolah*
3. Proyeksi Penduduk Kota Magelang 2010 – 2020, BPS Kota magelang

Data di bawah ini menunjukkan Statistik jumlah kriminalitas selama 2011-2017 sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 2 -74
Data Kriminalitas yang Tertangani di Kota Magelang Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Kriminalitas		Rasio (%)	Angka Kriminalitas yang Tertangani
	Lapor	Selesai		
2011	242	164	67,77	13.75
2012	184	134	72,83	11.20
2013	132	90	68.18	7.49
2014	149	108	72.48	8.95
2015	171	134	78,36	11.08
2016	170	120	70.59	9.89
2017	162	118	72.84	8.88

Sumber : Polres Magelang Kota, 2011-2016

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa berdasarkan kejadian tindak kriminalitas yang dari tahun ke tahun makin menurun, menunjukkan tingkat kondusivitas yang makin baik. Kondisi ini sangat penting bagi iklim usaha yang kondusif dan prasyarat utama menuju daya saing daerah.

Terkait dengan jumlah kriminalitas di Kota Magelang pada dalam beberapa terkahir ini relatif berfluktuatif. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan KesbangPolinmas Kota Magelang dan Polres Magelang Kota sampai dengan tahun 2017 sebanyak 162 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 118 kasus sehingga rasio jumlah kriminalitas yang terselesaikan sebesar 72.84%

Tabel 2 - 75
Jumlah Demo/Unjuk Rasa di Kota Magelang 2010 – 2017

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Demo/ Unjuk Rasa	25	9	7	6	5	14	16	11
a	Unjuk rasa bidang		2	0	0	0	0	0	3

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	politik								
b	Unjuk rasa bidang ekonomi		7	7	1	3	2	4	2
c	Unjuk rasa bidang lainnya		-	-	5	2	12	12	5

Sumber : Bappeda Kota Magelang, SIPD 2017, data KesbangLinmas dan Polres Magelang Kota data tahun 2010-2017

Demo atau unjuk rasa yang terjadi di Kota Magelang masih dalam batas wajar sebagai penyampaian aspirasi beberapa elemen masyarakat namun demo atau unjuk rasa dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prosedur hingga tidak mengganggu ketertiban dan tidak menimbulkan keresahan massa/merusak fasilitas umum.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Indikator lain yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Sumber Daya manusia adalah Indikator rasio ketergantungan penduduk. Indikator tersebut merupakan indikator yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Angka beban tanggungan penduduk atau yang sering disebut dengan Dependency Ratio (DR) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja dengan penduduk di luar usia kerja. Apabila Dependency Ratio menunjukkan angka yang semakin tinggi maka beban tanggungan penduduk semakin besar karena ini berarti bahwa tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin besar. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kota Magelang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 - 76

Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2010 - 2017

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan	Naik/Turun
	0-14 th	15-64 th	≥ 65 th		
2010	27.283	82.926	8.504	43.16	
2011	27.072	83.435	8.702	42.88	0.28
2012	26.855	83.897	8.896	42.61	0.26
2013	26.604	84.448	9.105	42.29	0.33
2014	26.376	84.903	9.334	42.06	0.23
2015	26.107	85.260	9.585	41.86	0.20
2016	25.897	85.534	9.862	41.81	0.06
2017	25.650	85.852	10.171	41.72	0.09

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Magelang, BPS Kota Magelang, 2016, data diolah

Pada tabel di atas diperlihatkan bahwa Angka Beban Tanggungan penduduk di Kota Magelang relatif stabil walaupun berfluktuatif rendah dan masih pada kisaran angka 41-43. Hal ini juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk berupaya menyediakan lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang produktif dan professional sehingga mempunyai daya saing serta berupaya untuk menekan angka pengangguran. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat di lihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka bebant ketergantungan karena dengan semakin kecilnya angka ketergantungan maka akan memberikan kesempatan yang semaki besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri. Angka Beban Kerja di Kota Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang membaik dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2010 besar angka Beban Tanggungan sebesar 43.16 kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 41.72. Angka ini mempunyai arti bahwa untuk setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 42 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas).

Menurut data BPS pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, rasio ketergantungan yang cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja namun di satu sisi mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka ini yang di katakana usia produktif namu tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja. Data di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah penduduk usia produktif, skitar 70an persen. Hal ini menunjukkan potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan. Potensi yang besar harus di imbangi dengan ekonomi yang cukup dan akhlaq yang baik serta fasilitas yang mendukung seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga nantinya akan menghasilkan penduduk yang berkualitas dan membawa manfaat bagi pembangunan.

2.1.4.4.2 **Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Kualitas sumber daya manusia dapat di lihat dari keahlian dan ketrampilan yang di miliki serta ilmu pengentahuan yang di miliki. Adapun hal ini bisa di asumsikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka di harapkan dia akan mempunyak kemampuan/ketrampilan dan keahlian yang tinggi serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga harapannya dia akan lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang di tamatkan juga dapat dipergunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun (wajar 9 tahun)

Tabel 2 - 77

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Lulusan S1/S2/S3	Rasio
1.	2011	129.556	12.315	930
2.	2012	130.955	12.257	936
3.	2013	130.836	12.045	921

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Lulusan S1/S2/S3	Rasio
4.	2014	131.703	12.053	915
5.	2015	132.261	12.105	915
6.	2016	132.662	12.162	917
7.	2017	132.911	12.288	925

Data Strategis Kota Magelang 2010-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, data diolah

Penduduk di Kota Magelang berdasarkan data DispendukCapil pada tahun 2016 pada Data Strategis Kota Magelang menyebutkan bahwa pada umumnya minimal sudah mengenyam pendidikan setingkat SMA yaitu sebanyak 35.526 jiwa (41.88%) dan sudah banyak pula penduduk di Kota Magelang yang menempuh pendidikan di universitas/akademi atau sederajat sebanyak 16.604 jiwa (19.57%). Data pada semester 1 tahun 2017, menunjukkan hal yang sama kondisinya pada tahun 2017, dimana penduduk yang mengenyam pendidikan SMA sebanyak 35.889 jiwa (42.15%). Sementara untuk penduduk yang menempuh pendidikan universitas/akademi sebanyak 16.773 jiwa (19.70%). data dari 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan pendidikan yang di tamatkan di atas pendidikan SMA cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun cukup berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kondisi demikian harus di pertahankan dan terus ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas sember daya manusia yang di miliki Kota Magelang. Tingginya penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja di Kota Magelang sebagai salah satu langkah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sehingga tenaga kerja yang ada di Kota Magelang memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi

Tabel 2 - 78

Jumlah Penduduk 5 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Magelang Tahun 2015-2017

Tahun	Tidak/belum Lulus SD	SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	S1/S2/S3
2015	1.937	17.212	13.950	34.733	424	10.334	11.967
2016	1.870	16.886	13.937	35.526	429	4.013	12.162
Semester 1 2017	1.848	16.715	13.926	35.889	426	4.059	12.288

Data Strategis Kota Magelang 2010-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, data diolah

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Evaluasi Hasil Pencapaian Sasaran RPJMD sampai dengan Tahun 2017

Hasil Evaluasi pencapaian sasaran RPJMD sampai tahun berjalan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 - 79

Capaian Indikator KInerja Sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 pada Akhir Tahun 2017

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
MISI SATU													
1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1	Persentase pegawai berkinerja baik	97%	78,17%	80,59%	78,17%	80,59%	82,63%	85,19%	82,63%	85,19%	BPKPP
		2	Capaian SPM Kota Magelang	60%	65,00%	108,33%	65,00%	108,33%	65,00%	108,33%	86,09%	143,48%	Tapem
		3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	48%	13,06%	27,21%	41,59%	86,65%	45,97%	95,78%	47,00%	97,92%	Disperpusip
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	50,00%	WTP	100,00%	WTP	100,00%	WTP	100,00%	BPKAD
		2	Indeks EKPPD	3	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3,215	107,17%	Tapem
		3	Hasil implementasi SAKIP	CC (54,00)	55,78	103,30%	55,78	103,30%	55,78	103,30%	55,78	103,30%	Organisasi
		4	Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	45%	34,00%	75,56%	34,83%	77,41%	38,33%	85,19%	65,08%	144,61%	Kecamatan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
		5	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	35,00%	35,00%	50,00%	50,00%	75%	75,00%	100%	100,00%	Hukum
1	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive	1	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	48,48%	48,28%	99,58%	48,28%	99,58%	48,28%	99,58%	48,28%	99,58%	Setda
2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1	Persentase PD menerapkan e-Gov	80%	100,00%	125,00%	100,00%	125,00%	100,00%	125,00%	100,00%	125,00%	Diskominsta
		2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	60%	100,00%	166,67%	100,00%	166,67%	100,00%	166,67%	100,00%	166,67%	Diskominsta
3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	90%	45,00%	50,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%		0,00%	Bappeda
		2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	87,89%	146,48%	89,09%	148,48%	90,55%	150,92%	90,99%	151,65%	Diskominsta

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
4	Terwujudnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informasi	1	Cakupan penduduk memiliki KTP el	100%	98,50%	98,50%	98,10%	98,10%	98,84%	98,84%	101,64%	101,64%	Capil
		2	cakupan penduduk memiliki KIA	100%	42,80%	42,80%	48,20%	48,20%	53,21%	53,21%	104,67%	104,67%	Capil
		3	Presentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80%		0,00%	79,14%	98,93%	80,00%	100,00%	85%	106,25%	Capil
		4	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	930	911,4	98,00%	918,6	98,77%	925,7	99,54%	937,1	100,76%	Capil
		5	Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	Capil
		6	Persentase kepemilikan akta kematian	45%	50,58%	112,40%	54,62%	121,38%	54,62%	121,38%	79,82%	177,38%	Capil
		7	Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	15%		0,00%	50,00%	333,33%	50,00%	333,33%	50,00%	333,33%	Capil
1	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1	Derajat Otonomi Fiskal	22,52%	7,56%	33,57%	28,77%	127,75%	25,68%	114,03%	34,80%	154,53%	BKPAD
		2	Rasio ketergantungan	73,66%	22,27%	30,23%	30,12%	40,89%	60,42%	82,03%	61,18%	83,06%	BKPAD

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
			keuangan daerah terhadap dana pusat										
1	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60%	58,00%	96,67%	60,00%	100,00%	60,00%	100,00%		0,00%	Bappeda
		2	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	58,62%	55,17%	94,12%	55,17%	94,12%	55,17%	94,12%		0,00%	Bappeda
		3	Persentase perkembangan kerjasama daerah	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	33,33%	8,82%	288,24%	Tapem
1	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	46%	6,00%	13,04%	6,00%	13,04%	6,00%	13,04%	87,24%	189,65%	BP4KB
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional:										

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
			a. Regional	4	6	150,00%	6	150,00%	6	150,00%	6	150,00%	Disporapar
			b. Nasional	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Disporapar
			c. International	0	0		0		0				Disporapar
		2	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional										
			a. Regional	10	43	430,00%	79	790,00%	120	1200,00%	125	1250,00%	Disporapar
			b. Nasional	5	3	60,00%	10	200,00%	15	300,00%	19	380,00%	Disporapar
			c. International	2	1	50,00%	1	50,00%	1	50,00%	19	950,00%	Disporapar
	MISI 2												
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1	Rata-rata lama sekolah	10,41	9,14	87,80%	9,14	87,80%	9,14	87,80%	9,14	87,80%	Dikbud
		2	Persentase sekolah berstandar nasional										
			a. SD	40,66%	41,33%	101,66%	41,33%	101,66%	41,33%	101,65%	41,33%	101,65%	Dikbud
			b. SMP	70%	72,73%	103,90%	72,73%	103,90%	72,73%	103,90%	72,73%	103,90%	Dikbud
		3	Angka Melek Huruf	97,67%	96,67%	98,98%	96,67%	98,98%	96,67%	98,98%	98,57%	100,92%	Dikbud

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
		4	Persentase kunjungan perpustakaan	72,52%	20,18%	27,83%	35,86%	49,45%	51,77%	71,39%	81,10%	111,83%	Disperpusip
		5	Jumlah kunjungan perpustakaan	96.200	26.689	27,74%	47.434	49,31%	68.474	71,18%	107.260	111,50%	Disperpusip
2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	53,85%	46,15%	85,46%	46,15%	85,46%	53,85%	100,00%	97,00%	180,14%	DKK
		2	Angka Harapan Hidup	76,71	76	99,07%	76	99,07%	76,00	99,07%	76	99,07%	DKK
		3	AKI/ 1.000 KH	126	63	200,00%	63	200,00%	96,90	130,03%	192,43	152,72%	DKK
		4	AKB/ 1.000 KH	14,5	14,29	101,47%	9,19	157,78%	7,75	187,05%	12,18	119,05%	DKK
		5	AKABA	15,5	17,14	90,43%	10,49	147,76%	9,69	159,96%	1,92	805,48%	DKK
		6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,21	147,62%	0,21	147,62%	0,22	138,70%	0,21	147,62%	DKK
		7	Angka Kesakitan DBD	50	23,14	216,08%	37,75	132,45%	46,05	108,58%	54,65	91,49%	DKK
		8	Angka Prevalensi Kasus TB	105	83,54	125,69%	83,54	125,69%	83,54	125,69%	83,54	125,69%	DKK
		9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,05%	0,0085%	588,24%	0,0130%	384,62%	0,0130%	384,62%	0,03%	166,67%	DKK

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
		10	Persentase Rumah Tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	97%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%		0,00%	DKK
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	16,15%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	Perindag
4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	1	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)	20%	20,00%	100,00%	50,00%	250,00%	50%	250,00%	50%	250,00%	Dikbud
		2	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	10%	42,86%	428,60%	42,86%	428,60%	42,86%	428,60%		0,00%	DKK
		3	Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	20%	20,00%	100,00%	20,00%	100,00%	20%	100,00%		0,00%	Perindag
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Pencemaran Air	75,65	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	46,47	61,43%	DLH

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
		2	Indeks Pencemaran Udara	61,8	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	85,67	138,62%	DLH
		3	Indeks Tutupan Vegetasi	48,55	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	57,24	117,90%	DLH
		4	Volume sampah yang dibuang ke TPSA (m3)	158,7	240,15	66,08%	240,89	65,88%	246,35	64,42%	249,66	157,32%	DLH
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	1	Persentase Ruang Terbuka Hijau										
			a. Privat	10%		0,00%	19,11%	191,10%	19,11%	191,10%	19,11%	191,10%	DLH
			b. Publik	18,37%		0,00%	19,25%	104,79%	19,25%	104,79%	19,60%	106,70%	DLH
3	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	6,68%	2,83%	42,40%	4,72%	70,67%	4,85%	72,61%	4,92%	73,70%	Satpol
		2	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	5,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	101,42%	Satpol
4	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	24%	23,03%	95,96%	23,10%	96,25%	23,20%	96,67%	23,33%	97,20%	DPUPR
MISI TIGA													

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
1	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1	Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	82%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,62%	100,76%	DPUPR
2	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1	Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12%	12,80%	106,67%	12,80%	106,67%	12,80%	106,67%		0,00%	Perkim
		2	Tercapainya 100 - 0 - 100										
			a. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	92,30%	85,24%	92,35%	87,00%	94,26%	87,88%	95,21%	87,88%	95,21%	Perkim
			b. Luas kawasan kumuh (Ha)	39,65	96,87	40,93%	96,87	40,93%	96,87	40,93%	67,4	58,83%	Perkim
			c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	3%	7%	42,86%	7,00%	42,86%	7,00%	42,86%	3,73%	80,40%	Perkim
		3	Prosentase RTLH	2,90%	4,20%	144,83%	4,20%	144,83%	4,20%	144,83%	65,76%	2267,60%	Perkim

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8,25%	8,22%	99,64%	8,22%	99,64%	8,33%	100,97%	8,40%	101,82%	Dishub
1	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1	Pertumbuhan investasi										
			a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	3,80%	DPMPTSP
			b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	8,50%	56,67%	10,40%	69,33%	13,60%	90,67%	16,85%	112,33%	DPMPTSP
2	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	75%	70%	93,33%	70%	93,33%	80%	106,67%	75%	100,00%	Perindag

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
		2	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	28%	18%	64,29%	16%	56,61%	49,18%	175,66%	30,84%	110,14%	Litbang
3	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.831	13.501	105,22%	13.501	105,22%	13.501	105,22%	13.637	106,28%	Pertanian
1	Meningkatnya lapangan kerja	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	65%		0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	65%	100,00%	Disnaker
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1	Persentase Penurunan PMKS	15%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61%	64,04%	Dinsos
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	DP4KB
1	Menurunnya kesenjangan gender	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%	0,05%	0,29%	0,05%	0,29%	0,05%	0,29%	6,37%	37,48%	DP4KB
		2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%	0,06%	0,30%	0,06%	0,30%	0,06%	0,30%	14,06%	70,30%	DP4KB
		3	Rasio KDRT	0,060%	0,011%	545,45%	0,017%	352,94%	0,017%	352,94%	0,035%	169,04%	DP4KB
	MISI EMPAT												

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14%	13,51%	96,53%	13,51%	96,53%	14,86%	106,14%	15,00%	107,14%	Dikbud
		2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	5	35	700,00%	35	700,00%	35	700,00%	35	700,00%	Dikbud
1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1	Jumlah Wisatawan										
			a. Nusantara (orang)	1.136.435	1.043.435	91,82%	1.524.769	134,17%	2.279.199	200,56%	3.447.841	303,39%	Disporapar
			b. Mancanegara (orang)	5.185	6.625	127,77%	8.525	164,42%	10.963	211,44%	17.162	330,99%	Disporapar
	MISI LIMA												
1	Terbentuknya karakter religius dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%	75,27%	2508,83%	62,19%	2073,03%	42,40%	1413,43%	27,21%	906,95%	Satpol
2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1	Angka kriminalitas	13%	3,78%	28,77%	7,31%	55,67%	10,85%	82,56%	13,31%	101,33%	Kesbang
		2	Prosentase	3%	0,00%	0,00%	1,50%	50,00%	6,00%	200,00%	6,00%	200,00%	Kesbang

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
					I		II		III		IV		
					K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
			penurunan kasus narkoba										
		3	Angka kriminalitas yang tertangani	11,50%	2,88%	25,01%	5,42%	47,17%	7,97%	69,32%	9,70%	84,33%	Kesbang
		4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kesbang
1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3,22%	125,78%	3,22%	125,78%	3,22%	125,78%	3,22%	125,78%	Kesra
		2	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	0									Kesbang

2.2.2 Evaluasi Hasil pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada periode tahun 2017

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi RPJMD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Kota Magelang 2005-2025.

Pada prinsipnya secara berjenjang pencapaian indikator kinerja dimulai dari eksekusi indikator output kegiatan, indikator kinerja outcome program, indikator kinerja intermediate outcome sasaran hingga indikator kinerja ultimate outcome. Evaluasi pencapaian sasaran pada RPJMD untuk periode tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 - 80

Capaian Indikator KInerja Daerah pada Akhir Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	5,04% ± 0,25%	5,19%	5,05% ± 0,25%	5,11% ± 0,25%	5,21% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%
2	PDRB per Kapita (tahun dasar 2010, Rp/kapita/tahun)	53.543.836,59*	63.394.588,17	58,920,000.00	68.656.817,64	74.314.414,01	80.296.686,81	86.475.098,49	86.475.098,49
3	Laju Inflasi	2,7%	3,36% - 4,94%	3,9 %	3,15% - 4,73%	2,93% - 4,51%	2,72% - 4,30%	2,51% - 4,09%	2,51% - 4,09%
4	Indeks Gini	0,3438 - 0,3762	0,343 - 0,3569	0,328	0,3421 - 0,3523	0,341 - 0,3489	0,3397 - 0,3461	0,338 - 0,3438	0,338 - 0,3438
5	Indeks Williamson	0,0806	0,0804	0,0798	0,0725	0,0653	0,0588	0,0530	0,0530
2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan	9,05%	7,41% – 8,09%	8,75%	6,98% – 7,38%	6,65% - 6,90%	6,42% - 6,61%	6,12% - 6,40%	6,12% - 6,40%
2	Indeks Pembangunan Manusia	76,39	76,9		77,26	77,61	78	78,37	78,37
	a. Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,41 Tahun	10 tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
	b. Harapan Lama Sekolah	13,08 Tahun	13,45 Tahun	13,88 tahun	13,63 Tahun	13,82 Tahun	14 Tahun	14,19 Tahun	14,19 Tahun
	c. Angka Harapan Hidup	76,58 Tahun	76,71 Tahun	77 Tahun	76,76 Tahun	76,8 Tahun	76,85 Tahun	76,9 Tahun	76,9 Tahun
	d. Pengeluaran per Kapita (Rp.)	10.793.000	11.083.570	11,384,000	11.281.140	11.478.710	11.676.290	11.873.860	11.873.860
3	Indeks Pembangunan Gender	95,66	95,9	96,45	95,99	96,08	96,16	96,23	96,23
4	Indeks Pemberdayaan Gender	78,83	79,2	79,3	79,35	86,3	86,95	87,15	87,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6% - 5%	6,68 %	5,8% - 5%	5,5% - 5%	5,2% - 5%	5% – 4,5%	5% – 4,5%
6	Angka Pertumbuhan Penduduk	0,337%	0,244%	-1,36%	0,384%	0,199%	0,137%	0,133%	0,133%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar								
a	Pendidikan								
	1 Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,41 Tahun		10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
	2 Persentase sekolah berstandar nasional								
	- SD	30,66%	40,66%	98,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
	- SMP	60%	70%	72,73%	75%	80%	85%	90%	90%
	3 APM SD	96,51%	97,31%	82,84%	97,71%	98,11%	98,51%	98,91%	98,91%
	4 APK SD	108,15%	112%	126,70%	114%	116%	118%	120%	120%
	5 APM SMP	74,62%	76%	74,96%	78%	80%	82%	84%	84%
	6 APK SMP	81,92%	85%	94,19%	88%	90%	96%	100%	100%
	7 Angka Melek Huruf	97%	97,67%	98,57%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
	8 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	50%	30%	40%	50%	60%	60%
b	Kesehatan								
	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	0	5 buah (15%)	100%	7 buah (54%)	10 buah (77%)	13 buah (100%)	13 buah (100%)	13 buah (100%)
	2 Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH	187,5	126	192,43	120	110	95	70	70
	3 Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	15,63	14,5	12,18	14	13,5	13	12,5	12,5
	4 Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	0,63	0,155	0,1920	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
	5 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,19	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	7 Angka Kesakitan DBD	130.93	<50	54,65	<50	<50	<50	<50	<50
	8 Angka Prevalensi TB	128.33	<105	156	<104	<103	<102	<101	<101
	9 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,5%	0,03%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
	10 Persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	97%	95,96%	97%	98%	98%	98%	98%
	11 Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	10%	39,68%	20%	30%	40%	50%	50%
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau								
	- Privat	10%	10%	19,10%	10%	10%	10%	10%	10%
	- Publik	18,37%	18,37%	19,60%	18,42%	18,44%	18,46%	18,50%	18,50%
	2. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	24%	24%	25%	26%	27%	33%	33%

NO		INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	1	Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12%	100%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%
	2	Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	82,30%	92,30%	87,88%	97,30%	100%	100%	100%	100%
	3	Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	39,65 Ha	59,21%	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	4	Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	3%	3,73%	2%	0%	0%	0%	0%
	5	Prosentase RTLH	4,40%	2,90%	2,49%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%
e	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
	1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	6,68%	6,71%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
	2	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	5,80%	6,00%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
	3	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	4	Angka kriminalitas	14,14%	13,14%	11,21%	12,64%	12,14%	11,64%	11,14%	11,14%
	5	Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	72,84%	12%	12%	12,50%	12,50%	12,50%
	6	Prosentase penurunan kasus narkoba	-13.04%	3%	6%	3%	3%	3%	3%	3%
f	Sosial									
	1	Persentase Penurunan PMKS	14%	15%	9,61%	16%	17%	18%	19%	19%
	2	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3%	3,22%	3%	3%	3%	3%	3%
	3	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1	2
2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar									
a	Tenaga Kerja									
	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	65%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
b	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	1	Rasio KDRT	0,07%	0,060%	0,04%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%
	2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	17%	6,37%	20%	23%	26%	30%	30%
	3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	20%	14,05%	23%	26%	30%	35%	35%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
c	Pangan								
	1 Ketersediaan pangan utama beras	12.729 Ton	12.831 Ton	13.637 ton	12.882 Ton	12.933 Ton	12.985 Ton	13.037 Ton	13.037 Ton
d	Lingkungan Hidup								
	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,12	62	62,54	65	67,51	68	68,5	68,5
	2 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,65	46,47	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84
	3 Indeks Pencemaran Udara	45,3	61,8	85,67	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1
	4 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,55	57,24	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56
	5 Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	158,7	249,66	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7
e	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	1 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	58,62%	58,62%	65,52%	75,86%	82,76%	89,66%	89,66%
	2 Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	46%	87,24%	47%	48%	49%	50%	50%
f	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak
g	Perhubungan								
	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8,25	8,40	8,5	8,75	9	9,25	9,25
h	Komunikasi dan Informatika								
	1 Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	80%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	60%	100%	70%	80%	90%	100%	100%
i	Penanaman Modal								
	1 Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	0,19%	5%	10%	10%	15%	15%
	2 Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	16,85%	15%	15%	15%	15%	15%
j	Kepemudaan dan Olahraga								
	1 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5 buah	6 buah	6	7 buah	7 buah	8 buah	8 buah	8 buah
	- Regional	4 buah	4 buah	4	5 buah	5 buah	6 buah	6 buah	6 buah

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
	- Nasional	1 buah	2 buah	2	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah
	- international	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14 buah	17 buah	163	17 buah	17 buah	17 buah	20 buah	20 buah
	- Regional	8 buah	10 buah	125	10 buah	10 buah	10 buah	11 buah	11 buah
	- Nasional	4 buah	5 buah	19	5 buah	5 buah	5 buah	6 buah	6 buah
	- international	2 buah	2 buah	19	2 buah	2 buah	2 buah	3 buah	3 buah
k	Statistik								
	1 Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	91%	70%	80%	90%	100%	100%
l	Kebudayaan								
	1 Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	13%	14%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
	2 Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	14%	15%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
	3 Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	5	35	10	15	20	25	25
m	Perpustakaan								
	1 Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	72,52%	81,10%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%
	2 Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	96.200	107,261	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305
n	Kearsipan								
	1 Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	48%	47%	52%	65%	68%	72%	72%
3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan								
a	Pariwisata								
	1 Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	3,20%	3,60%	7,93%	3,80%	4,00%	4,20%	4,40%	4,40%
	2 Jumlah Wisatawan								
	- Nusantara (orang)	1.133.373	1.136.435	1.269.949	1.138.140	1.139.961	1.141.899	1.143.954	1.143.954

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
	- Mancanegara (orang)	5.171	5.185	6.341	5.193	5.201	5.210	5.219	5.219
b	Perdagangan								
	1 Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	16,15%	20,75%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
	2 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%
	3 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a	Perencanaan								
	1 Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	90%	93,18%	93%	95%	98%	100%	100%
	2 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	60%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
b	Keuangan								
	1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,40%	26,34%	34,81%	30,33%	32,55%	34,21%	36,35%	36,35%
	2 Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	25,86%	25,82%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
	3 Rasio ketergantungan Keuangan Daerah terhadap dana pusat	83,60%	73,66%	61,18%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
	4 Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
c	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
	1 Persentase pegawai berkinerja baik	96%	97%	82,63%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%
d	Penelitian dan Pengembangan								
	1 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	28%	30,84%	29%	30%	31%	32%	32%
e	Fungsi Lain								

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
	1 Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	60%	86,09%	70%	80%	100%	100%	100%
	2 Indeks EKPPD	2,92	3	3,215	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14
	3 Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (54,00)	B(60,05)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
	4 Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	45%	65,08%	55%	65%	75%	85%	85%
	5 Persentase perkembangan kerjasama daerah	1,05%	3,06%	8,82%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
	6 Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	48,48%	48,28%	60,60%	72,72%	84,84%	100%	100%
	7 Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	APEK DAYA SAING DAERAH								
	1 Indeks Reformasi Birorasi	50,26	57,00	68,22	57,51	58,00	58,51	59,00	59,00
	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71 (B)	75 (B)	78,19 (B)	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	80 (B)
	3 Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	79%	82%	82,62%	83%	84%	85%	86%	86%
	4 Tingkat Kematangan Kota Cerdas	Scattered (48,89)	Scattered (51,6 – 54,5)	Integrated (63,7)	Scattered (54,6 – 57,5)	Scattered (57,6 – 59,9)	Integrative (60 – 62,5)	Integrative (62,6 – 65)	Integrative (62,6 – 65)
	5 Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas permasalahan yang akan disolusikan ditentukan oleh aspek urgensi dan konektivitas dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari mandat kebijakan nasional/provinsi yang bersifat harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan.

Mekanisme identifikasi permasalahan pembangunan daerah tersebut dilakukan agar permasalahan paling prioritas atau isu strategis daerah, sudah mengakomodasi informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dinamika lingkungan eksternal dan isu-isu regional, nasional maupun global.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berbagai urusan pemerintahan hingga tahun 2017 masih menyisakan permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi antara lain sebagai berikut:

2.3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.3.1.1 Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu:

1. Rendahnya insentif bagi pendidik PAUD.
2. Belum meratanya kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4, dan sebagian pendidik belum bersertifikat pendidik
3. Kurangnya tenaga guru kelas di jenjang sekolah dasar karena memasuki masa pensiun
4. Kurangnya sumber daya, kompetensi dan kualifikasi pustakawan dan laboran.
5. Kurang memadainya sarana prasarana dan tenaga pendidikan pada pendidikan non formal.
6. Belum efektifnya pendidikan karakter di sekolah diindikasikan dengan masih adanya vandalisme, kurangnya ketertiban dan kedisiplinan siswa.

2.3.1.2 Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu:

1. Angka kematian Ibu (AKI) di Kota Magelang masih tinggi bila dihitung per 100.000 kelahiran Hidup, pada Tahun 2017 ada 3 kasus kematian ibu sedangkan jumlah kelahiran hidup ada 1.559, sehingga apabila dihitung AKI nya diperoleh angka 192,43. Angka ini lebih dari target tahun 2017 sebesar 126.
2. Angka Kematian bayi (AKB) juga masih tinggi apabila dihitung per 1.000 Kelahiran Hidup. Pada Tahun 2017 terdapat 19 kasus kematian bayi, maka apabila dihitung AKB nya diperoleh angka 12,18. Meskipun angka ini masih dibawah target tahun 2017 sebesar 14,5 akan tetapi dengan adanya 19 kasus kematian bayi tersebut tetap menjadi perhatian.

3. Angka balita pendek dan sangat pendek di Kota Magelang masih cukup tinggi berdasarkan hasil survei Pemantauan Status Gizi (PSG) di Kota Magelang yang mencakup 326 responden yang diambil secara acak, didapatkan balita sangat pendek (TB/U<-3SD) = 3,99% dan balita pendek (TB/U =-2SD) = 13,8%
4. Banyak TUPM yang tidak memiliki sertifikat Laik Sehat
5. Masih banyak warga yang belum akses ke jamban Sehat (berseptic tank)
6. Dari hasil survei PHBS, hasil penilaian indicator ke-2 yaitu tidak merokok dalam rumah masih rendah (49%)
7. Kelurahan Siaga Aktif dengan Strategis mandiri, baru di 7 kelurahan
8. Angka prevalensi kasus TB yang tinggi serta angka penemuan kasus TB yang rendah dikarenakan gaya hidup masyarakat yang kurang sehat serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan
9. Data penyakit jiwa dan penyakit tidak menular belum tertangani khususnya penyakit tidak menular di rumah sakit, puskesmas dan dokter praktek swasta karena belum terbangunnya integrasi data antar fasilitas pelayanan kesehatan

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang:

1. Perlu percepatan penyusunan Perda RDTRK dengan melakukan peninjauan kembali Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang.
2. Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum ada rencana rinci Tata Ruang Kota Magelang sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum. Proses menuju legalisasi raperda RDTR sangat panjang.
3. Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan ruang sesuai arahan tata ruang masih rendah.
4. Belum optimalnya partisispasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
5. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.
6. Sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pengendalian tata ruang masih kurang.
7. Konflik pemanfaatan ruang daerah perbatasan
8. Masih perlunya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan saluran drainase yang sudah ada.
9. Secara fisik ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala, khususnya yang di bawah pengelolaan pemerintah Kota Magelang.
10. Masih perlunya penambahan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan baru, terutama pada wilayah perbatasan di sisi Barat dan Timur wilayah Kota Magelang.
11. Kondisi drainase kota yang sudah cukup baik tetapi masih tercampur dengan air limbah rumah tangga.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan permukiman yaitu:

1. Masih adanya rumah tinggal yang belum terlayani air minum dan belum bersanitasi layak serta kawasan kumuh, yang menjadi tuntutan untuk mencapai akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%, di akhir RPJMN 2015-2019.
2. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.
3. Masih adanya lingkungan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang.
4. Belum optimalnya upaya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut.
5. Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu:

1. Masih adanya potensi ancaman terorisme, konflik SARA dan gerakan laten/ radikalisme
2. Masih adanya kasus penyakit masyarakat seperti tawuran pelajar, vandalisme, prostitusi dan kriminalitas lainnya.
3. Masih adanya peredaran/ penyalahgunaan miras dan narkoba.
4. Belum terbentuknya beberapa regulasi penting terkait penanggulangan bencana, kontrol tempat hiburan, pelaksanaan ibadah dan sebagainya.
5. Berkurangnya jiwa kebangsaan, kepedulian sosial, solidaritas dan gotong royong di masyarakat.
6. Masih perlu peningkatan pendidikan politik untuk meningkatkan kedewasaan politik masyarakat.

Selain permasalahan umum tersebut, terdapat beberapa permasalahan teknis dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

1. Keterbatasan personil Satpol PP dan Linmas
2. Masih perlunya peningkatan kapasitas bagi personil SATPOL PP dan LINMAS.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sistem penanggulangan bencana, mengingat kondisi geologis Kota Magelang banyak terdapat tanah lereng yang memungkinkan terjadinya bencana longsor.

2.3.1.6 Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial yaitu:

1. Belum optimalnya dukungan anggaran untuk penambahan jumlah lanjut usia terlantar tidak potensial yang mendapatkan jaminan sosial.
2. Belum adanya anggaran pemberdayaan sosial bagi PMKS

3. Belum adanya anggaran yang mendukung pelaksanaan WKBSM sehingga tersedia sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

4. Kurangnya anggaran yang mendukung bantuan sosial dan jaminan soial bagi penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial

2.3.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan adalah:

1. Masih rendahnya minat pencari kerja untuk berwirausaha/menjadi wirausahawan

2. Belum adanya jenis pelatihan unggulan berbasis kompetensi yang menjadi rujukan daerah sekitar.

3. Belum optimalnya utilisasi Balai Latihan Kerja

4. Belum tersertifikasinya para lulusan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja sesuai standar BNSP

5. Belum tersertifikasinya para pekerja sesuai dengan standar BNSP

6. Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan tentang kewajiban mengikutsertakan tenaga kerjanya di BPJS ketenagakerjaan.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Masih adanya perbedaan persepsi atas peran/kedudukan, partisipasi, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Masih adanya perbedaan persepsi atas Definisi/kriteria kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Masih rendahnya porsi/peran/partisipasi perempuan dalam kebijakan pembangunan.
4. Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam hal pembiayaan dan proses penyelesaian visum maupun pengecekan DNA bagi korban pemerkosaan dan visum atas korban KDRT.

2.3.2.3 Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan yaitu:

1. Rendahnya produksi komoditas pangan (tanaman, ternak, dan ikan) asal Kota Magelang, sebagai akibat dari konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.

2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan yang tidak terpakai di rumah tangga untuk budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan;
3. Adanya potensi kerawanan pangan dan gizi, akibat masih tingginya jumlah penduduk miskin;
4. Tingginya fluktuasi harga beberapa komoditas pangan, seperti: daging sapi, daging unggas, telur, cabe, dan bawang merah;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Magelang mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
6. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai pangan utama, sehingga skor PPH Kota Magelang masih berada di angka 95%. Sementara, target PPH Nasional pada tahun 2020 adalah sebesar 100%.
7. Masih beredarnya pangan yang mengandung zat aditif (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat, dan anti gumpal) dan berbahaya di pasaran, termasuk lingkungan sekolah .
8. Adanya pencemaran bahan kimia (pestisida) pada beberapa komoditas pangan segar seperti: sayur, dan buah-buahan.

2.3.2.4 Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yaitu:

1. Belum optimalnya data asset tanah milik Pemerintah Kota Magelang
2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia pemerintah dalam proses pengadaan lahan
3. Keterbatasan lahan di Kota Magelang sehingga perlu mengelola pemanfaatan lahan secara efektif dan tepat guna agar diperoleh hasil dan manfaat yang optimal
4. Aset tanah pemerintah Kota Magelang belum semuanya bersertifikat
5. Belum adanya penjelasan atau aturan kewenangan OPD yang melaksanakan pengadaan tanah

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yaitu:

1. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industry, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha.
2. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan
3. Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL.

4. Keterbatasan lahan untuk membangun IPAL terpadu industri kecil.
5. Belum adanya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Adanya regulasi bantuan hibah yang sulit untuk diterapkan di masyarakat.
7. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
8. Belum adanya komisi amdal daerah karena kurangnya persyaratan personil yang memiliki kompetensi penilai amdal
9. Minimnya persentase pengurangan sampah dari sumbernya disebabkan peran serta masyarakat masih kurang karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah domestik
10. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, diindikasikan dengan belum terpenuhinya RTH publik sehingga perlu optimalisasi lahan terbuka yang sudah ada seperti makam dan sempadan sungai,
11. Ketersediaan RTH publik di Kota Magelang belum memenuhi amanah Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
12. Secara teknis TPA Banyuurip sudah tidak bisa menampung sampah lagi.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu:

1. Perlunya peningkatan peran aktif publik untuk memberikan saran, masukan, bahkan komplain atas pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada.
2. Perlunya peningkatan Sumber daya manusia baik dari unsur teknis maupun manajerial.
3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi.
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Teknologi Informasi maupun Manajemen Informatika.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Belum optimalnya peran lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta dalam meningkatkan kemandirian masyarakat (swadaya, swakarsa dan swakelola) yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan teknis, kesadaran hingga permasalahan-permasalahan personal (psikologis).
2. Belum sinerginya kinerja antar lembaga masyarakat (LPM, LKM, LKK, PNPM dan lain sebagainya).
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah setempat.
4. Belum akuratnya Data Profil Kelurahan dalam mencerminkan potensi yang ada berikut langkah pengembangannya.
5. Kurangnya perhatian (fasilitasi/insentif) terhadap Kader Pemberdayaan Masyarakat.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu:

1. Rendahnya kepesertaan KB pria adanya persepsi yang kontra produktif terhadap pemahaman KB pada kaum pria.
2. Kurangnya tenaga penyuluh KB, idealnya 1 orang per kelurahan sedangkan saat ini baru terdapat 15 orang PLKB dari 17 yang dibutuhkan.
3. Masih adanya remaja perempuan (ibu Muda) berusia 15-19 tahun yang hamil.
4. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan KB-KS.
5. Meningkatnya angka pernikahan dini

2.3.2.9 Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan yaitu:

1. Terminal angkutan barang yang ada belum memadai (kurangnya lahan, kurang fasilitas dan bercampur dengan fungsi lain
2. Belum tersedianya terminal type C di wilayah perbatasan.
3. Sarana tempat pemberhentian angkutan umum di Kota Magelang masih belum memadai
4. Tingginya volume pergerakan/mobilitas terutama pada jam-jam sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk terjadinya kemacetan dan potensi peningkatan kecelakaan lalu lintas.
5. Load faktor angkutan penumpang umum semakin menurun
6. Usia kendaraan angkutan umum yang lebih dari umur ekonomis
7. Belum tersedianya terminal barang di Kota Magelang.
8. Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku.
9. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih belum optimal.
10. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena parkir.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika yaitu:

1. Masih terdapat perbedaan persepsi dengan DPRD terkait indikator publikasi hasil kegiatan dewan. Fokus materi publikasi diharapkan hanya pada hasil kegiatan tidak pada proses pelaksanaan kegiatan. Upaya komunikasi sudah dilakukan dengan Ketua DPRD Kota Magelang agar kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator ini dapat diwujudkan pada tahun mendatang.
2. Diskominsta selaku OPD pelaksana pencapaian indikator persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah baik melalui radio maupun media cetak kesulitan dalam pengadaan materi publikasi. Upaya kerjasama dengan narasumber tokoh agama sudah dilaksanakan melalui Kantor Kemenag dan Forum Komunikasi Umat Beragama akan tetapi masih belum membuahkan hasil positif untuk materi agama Budha, Hindhu, Konghuchu dan kepercayaan. Pelaksanaaan publikasi melalui media cetak sebanyak 12 kali untuk 5 agama juga terkendala oleh jangka waktu terbit Majalah Dinamika setiap triwulan (4 kali dalam setahun) sebagai media cetak milik Pemerintah Kota Magelang.
3. Titik yang belum terealisir cakupan WAN sebagian besar berlokasi di pinggir yang secara lokasi maupun spesifikasi membutuhkan teknik khusus sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan kebutuhan dana dalam upaya pencapaian target cakupan WAN kota.
4. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan komunikasi dan informatika tidak mencakup pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi, padahal secara aturan (PERDA) kajian izin penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Magelang masih melekat di Diskominsta. Secara kewenangan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Rekomendasi Izin Menara lebih dekat dengan penyelenggaraan penataan ruang prasarana, sarana, dan utilitas. Hal ini memerlukan kajian agar pelaksanaan penyellenggaraan menara telekomunikasi ke depan dapat dilakukan dengan tepat.
5. Operasional LPPL saat ini masih melekat dalam APBD dan belum ada pemasukan iklan, sehingga sepenuhnya masih bergantung pada anggaran daerah. Hingga saat ini belumada kajian mengenai kelembagaan yang tepat terkait operasional LPPL.
6. Hingga saat ini belum ada dasar hukum integrasi aplikasi dan sistem informasi yang menjadi tupoksi Diskominsta sehingga hingga saat ini pengembangan aplikasi dan sistem informasi masih dilakukan secara mandiri oleh OPD.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

1. Modal yang terbatas yang menyebabkan volume usaha terbatas dan kurang bisa memelihara asetnya,
2. SDM pengelola yang kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan dan solidaritas antar anggota yang kurang terjalin,

Sedangkan permasalahan yang dihadapi UKM antara lain:

1. Rendahnya daya saing,
2. terbatasnya modal dan masih terbatasnya akses perbankan bagi UKM,

3. kurangnya wilayah pemasaran, sarana promosi produk, kemampuan akses usaha, kemampuan manajerial sumberdaya manusia pengelolanya,
4. kemampuan inovasi dan kreativitas, dan kemampuan penguasaan tekhnologi yang masih terbatas

2.3.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

1. Kurangnya informasi dan promosi terhadap potensi investasi yang ada di Kota Magelang;
2. kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor,
3. ketentuan hukum yang kurang konsisten (masih terdapat overlap antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain),
4. pelayanan pengurusan perijinan yang masih membutuhkan waktu lebih dari satu hari, serta terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menangani pelayanan pengurusan perijinan dan investasi di Kota Magelang.
5. masih rendahnya rasio penyerapan tenaga kerja

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga yaitu:

1. Ketatnya persaingan dengan daerah lain.
2. Kurangnya kompetisi olahraga yang berjenjang dan agenda kompetisi tidak menentu.
3. Lemahnya pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga.
4. Kurangnya penghargaan dan perlindungan terhadap atlet berprestasi berakibat terjadinya mutasi olahragawan berprestasi dari Kota Magelang ke daerah lain.
5. Fasilitas olahraga belum memadai dan memenuhi standar.
6. Rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan olahraga.
7. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah disebabkan rendahnya pengetahuan, ketrampilan, daya tangkal, kepedulian, keterbatasan akses dan kemitraan, serta lemahnya lembaga kepemudaan.
8. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda.
9. Lemahnya sistem informasi dan database pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
10. Kurangnya sarana prasarana bagi pemuda seperti gedung pemuda, pusat eksplorasi potensi, sekretariat pemuda, jejaring informasi dan komunikasi.

2.3.2.14 Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik yaitu:

1. Masih perlunya peningkatan ketersediaan data dasar dan data makro yang akurat dan up to date.
2. Masih adanya inkonsistensi dan validitas data dari Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya kerjasama antar Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan penyediaan data;
4. Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap unit kerja.
5. Masih terdapat data-data penting yang sulit didapatkan/dihitung secara akurat dan tepat waktu.
6. Belum efektifnya manajemen pengumpulan data dan sistem informasi data.
7. Masih terjadinya perbedaan data antar sumber-sumber data.

2.3.2.15 Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian yaitu:

1. Keterbatasan SDM persandian dalam hal kualitas maupun kuantitas
2. Infrastruktur jaringan belum cukup memadai
3. Fungsi persandian belum dipahami secara menyeluruh oleh birokrasi sebagai suatu fungsi teknis pemerintahan yang memberikan proteksi terhadap nilai kerahasiaan informasi pemerintahan
4. Masih ada beberapa tenaga persandian yang belum didiklat, kaderisasi SDM persandian perlu dilakukan.
5. Kurangnya pemahaman SDM di OPD tentang persandian.

2.3.2.16 Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan yaitu:

1. Cagar budaya belum terdokumentasikan dengan baik karena belum ada Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikasi dan mengakibatkan belum berjalannya Sistem Register Cagar Budaya
2. Belum adanya kesepahaman antara pemilik bangunan, pemerintah baik pusat maupun daerah, dan komunitas pemerhati dalam pengelolaan dan pengembangan cagar budaya.
3. Masih kurangnya perhatian terhadap kondisi dan pengembangan museum dan pusat informasi sejarah.
4. Masih kurangnya pengembangan dan promosi karya kreatif seniman lokal agar memiliki manfaat dan nilai ekonomi tinggi.
5. Belum adanya gedung kesenian yang dilengkapi sarana prasarana yang memadai untuk pentas seni.
6. Sangat terbatasnya dokumentasi sejarah dan legenda lokal, seiring makin berkurangnya narasumber sejarah.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Magelang tentang sejarah dan legenda kota Magelang.

8. Masih kurangnya jalinan komunikasi interaktif antara Kelompok Penghayat Kepercayaan dengan pemerintah. Kota Magelang.
9. Masih kurangnya pembinaan seni dan budaya bagi kaum muda
10. Budaya belum dipandang sebagai sarana pendidikan budi pekerti dan pembentukan karakter bangsa

2.3.2.17 Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan yaitu:

1. Perlunya optimalisasi untuk lebih meningkatkan minat baca di dalam masyarakat
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah).
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
4. Perpustakaan digital belum menjadi fokus program

2.3.2.18 Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan yaitu:

1. Belum optimalnya sistem kearsipan yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan;
2. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi kearsipan yang memadai.
3. Digitalisasi arsip belum menjadi fokus kebijakan

2.3.3 URUSAN PILIHAN

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan yaitu:

1. Rendahnya produksi perikanan Kota Magelang, sebagai akibat dari alih fungsi lahan perikanan menjadi perumahan, industri, dan fasilitas umum lainnya.
2. Belum adanya kelompok masyarakat perikanan yang bersertifikasi CBIB, CPIB dan Kelayakan Pengolahan.
3. Belum berkembangnya perikanan yang ramah lingkungan di Kota Magelang, sehingga merusak kelestarian dan mengganggu keamanan ekosistem air tawar.
4. Belum berkembangnya budidaya perikanan di lahan sempit (tidak terpakai) di Kota Magelang.

5. Belum optimalnya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pelaku utama perikanan (pembudidaya, pemasar dan pengolah)

2.3.3.2 Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata yaitu:

1. Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal, disebabkan belum optimalnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata promosi yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan masih relatif kecil.
2. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan oleh masíh rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, masíh rendahnya kualitas SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana kepariwisataan dan sumber daya manusia pengelola pariwisata.
4. Kurangnya kreativitas, kreasi, atraksi dan berbagai fasilitas pendukung destinasi pariwisata
5. Belum optimalnya penyelenggaraan even pariwisata yang dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang menarik dan atraktif serta berskala luas yang mampu menarik wisatawan berkunjung.
6. Masih lemahnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat masíh belum terjalin dengan baik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata serta rendahnya partisipasi masyarakat.
7. TIC belum representatif.
8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Magelang sebagai Kota Jasa termasuk kecil.
9. Promosi dan informasi pariwisata belum cukup efektif.
10. Lemahnya daya dukung terwujudnya Desa Wisata dan obyek wisata yang memiliki daya tarik.
11. Kurangnya informasi terkait obyek wisata (sejarah/rincian obyek, rute/peta, fasilitas, keterkaitan antar obyek, dsb).
12. Kurangnya produk spesifik cenderamata.

2.3.3.3 Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah:

1. Pelaksanaan Agricultural Practices (GAP) yang masih sulit untuk diterapkan pada petani Kota Magelang karena petani kota Magelang sebagai penjual jasa atau penggarap sawah.

2. Kurangnya pendampingan dan monitoring evaluasi pasca pelatihan sehingga berdampak pada tidak dimanfaatkannya hasil pelatihan untuk meningkatkan taraf hidupnya, tetapi yang ada justru kecenderungan masyarakat untuk selalu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan tanpa sekalipun memanfaatkannya.
3. Banyaknya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang menyebakan berkurangnya lahan pertanian diperkotaan
4. Dalam penerapaan teknologi belum dilaksanakan secara maksimal, petani penggarap sawah sebagian masih menggunakan alat manual / tradisional dan masih terbatasnya alat sehingga tidak maksimal dalam pengerjaannya.
5. Dengan tidak tercapainya produksi padi disini dikarenakan faktor iklim/cuaca yang tidak mendukung seperti adanya cuaca ekstrim, angin kencang yang menjadikan padi pada roboh sebelum dipanen walau tidak menutup kemungkinan produksi padi akan naik dan tetap akan tercapai pada pencapaian target yang akan datang.
6. Belum adanya sarana pemasaran pasar bunga di Kota Magelang sehingga belum optimal dalam pengembangan agribisnis tanaman hias di masyarakat Kota Magelang.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Urban Farming, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan urban farming dan belum berkembangnya pertanian perkotaan (Urban farming) dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan untuk usaha pertanian , peternakan dan perikanan.
8. Pola pikir petani yang praktis dalam budidaya tanaman dan menggunakan bahan kimia tanpa memikirkan efek terhadap lingkungan. Dalam hal ini pertanian, peternakakan dan perikanan di Kota Magelang masih bersifat konversional, sehingga berdampak negative bagi lingkungan yang berupa kerusakan linkungan air ,udara maupun mahluk hidup
9. Biaya produksi pertanian lebih tinggi dari nilai jual hasil produksi

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral yaitu:

1. Belum optimalnya upaya penghematan energi
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan

2.3.3.5 Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yaitu:

1. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
2. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
3. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah

2.3.3.6 Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu:

1. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
2. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
3. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
4. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.
5. Semakin menurunnya daya serap tenaga kerja pada sektor industri menengah.

2.3.3.7 Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah:

1. Penentuan jumlah transmigran yang dikirim dan lokasi penempatan masih menjadi kewenangan pusat yang tidak dapat ditawar oleh pemerintah daerah baik propinisi maupun kab/kota
2. Rendahnya minat penduduk Kota Magelang untuk bertransmigrasi
3. Belum adanya terobosan dari Kota Magelang untuk mengikuti program transmigrasi swakarsa, dimana pemerintah daerah pengirim bertanggung jawab dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar hidup kepada calon transmigrans.
4. Pelatihan bagi calon transmigrans masih dilakukan secara klasikal belum mengarah pada minat dan bakat serta skill/kemampuan. Perlu adanya koordinasi dengan bidang pelatihan dan produktivitas untuk pelatihan teknis dan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam pemberian wawasan berwirausaha

2.3.4 FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

2.3.4.1 Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan adalah:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik. Sebagai contoh untuk Pokok pokok pikiran DPRD sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, diamanatkan untuk disampaikan kepada Eksekutif dalam hal ini Bappeda sejak Rancangan Awal RKPD Tahun rencana (Januari), namun demikian selama ini hal tersebut belum bisa terwujud. Sehingga capaian indikator Tingkat Ketersediaan Pokok Pikiran Dewan tepat waktu baru dapat tercapai 50%
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.

4. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global .

2.3.4.2 Fungsi Penunjang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan adalah:

1. Belum optimalnya sistem pajak online
2. Law enforcement belum sepenuhnya dijalankan, yaitu denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya
3. Belum optimalnya penilaian kembali atas tanah dan bangunan
4. Belum adanya peta zona nilai tanah tahun terbaru sebagai perhitungan nilai pasar
5. Belum optimalnya penggunaan instrumen Analisis Standar Biaya (ASB) perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran
6. Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis accrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
7. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah yang menangani pendapatan.

2.3.4.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan diklat sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum semuanya memuaskan
2. Pengisian jabatan ASN belum seluruhnya berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja
3. Layanan kepegawaian belum sepenuhnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
4. Belum optimalnya evaluasi layanan kepegawaian
5. Belum terpenuhinya sarana prasarana penunjang layanan kepegawaian
6. Penegakan disiplin pegawai belum didukung dengan penerapan sistem reward dan punishment yang terintegrasi

2.3.4.4 Fungsi Penunjang Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pengawasan yaitu:

1. Managemen pengawasan lemah disebabkan pemeriksaan belum berbasis resiko, pengendalian internal dan quality assurance
2. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan
3. SPIP tidak efektif disebabkan belum optimalnya pembinaan dan peran Satgas SPIP
4. Pencegahan KKN lemah disebabkan rendahnya komitmen aparatur pemerintah daerah

2.3.4.5 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Masih minimnya jumlah MoU antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kementrian/LNDP/pembina terkait penelitian & pengembangan
2. Belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk hasil kreativitas dan inovasi masyarakat
3. Rendahnya proporsi SDM pengelola Kelitbangan
4. Kurang kuatnya dalam menjalani fungsi koordinasi
5. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di Kota Magelang
6. Belum terimplementasikannya online jurnal system di Kota Magelang
7. Belum adanya payung hukum yang mengatur Penguatan Sistem Inovasi Daerah
8. Belum optimalnya fungsi Forum Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Jarlitbangrap IPTEK)

2.4 ISU STRATEGIS

Dari hasil kajian terhadap kondisi Kota Magelang dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi maupun global, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Magelang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat

Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan..

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyandingkan:

1) Sasaran pokok pembangunan daerah dalam UU No 23 tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatanmasyarakat; kesempatankerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah;
2) RPJPD Kota Magelang 2005-2025, yaitu terwujudnya Kota Magelang: (i) sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai; (ii) masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; (iii) daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptekdan sumber daya manusia yang berkualitas; (iv) perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (v) good governance dan clean governmentdengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran;
3) RTRW Kota Magelang 2011-2031: arah kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang kota;
4) Dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 yaitu (i) Kemananan dan Ketertiban; (ii) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; (iii) Pemerataan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah; (iv) Kepastian dan penegakan hukum, (v) Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan; (vi) Pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (vii) Revolusi Mental; (viii) Politik dan Demokrasi;
5) RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dengan isu: Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran, Pembangunan Infrastruktur, Kedaulatan PanganKedaulatan Energi, Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah;
6) Hasil evaluasi RPJMD Kota Magelang 2010-2015, ditemukan hal-hal yang masih harus dikejar dari penyelenggaraan urusan pemerintahan;
7) Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kota Magelang Tahun 2016-2021, yang mengusung isu: peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan perlunya peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama.

Kriteria yang digunakan untuk penentuan isu strategis yaitu: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan tugas dan tanggungjawan Pemerintah Daerah; (iii) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; (iv) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap

pembangunan daerah; (v) Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan (vi) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.Setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat isu strategis sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja
2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial
3. Penguatan reformasi birokrasi
4. Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah
5. Pengelolaan persampahan
6. Peningkatan koperasi, usaha mikro dan perdagangan
7. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah
8. Peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama
9. Penerapan prinsip prinsip kota cerdas
10. Penguatan kemitraan dalam pembangunan daerah
11. Peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata
12. Penguatan implementasi Branding Magelang Kota Sejuta Bunga
13. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah
14. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
15. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
16. Peningkatan ketahanan pangan
17. Keadilan gender dan perlindungan anak
18. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
19. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Dari isu-isu strategis tersebut, dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok payung besar isu strategis Kota Magelang yaitu:

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
c. Penguatan reformasi birokrasi;
d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2019

Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 tidak dapat terlepas dari rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2019 sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Di sisi lain kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2019. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi tahun 2019 akan mempu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kota Magelang.

3.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2017 sangat baik dengan progress capaian indikator makro yang terbilang signifikan. Hampir seluruh indikator makro menunjukkan posisi yang baik. Inflasi mengalami sedikit peningkatan di akhir tahun namun masih dalam batas wajar dan masuk dalam target yang ditetapkan.

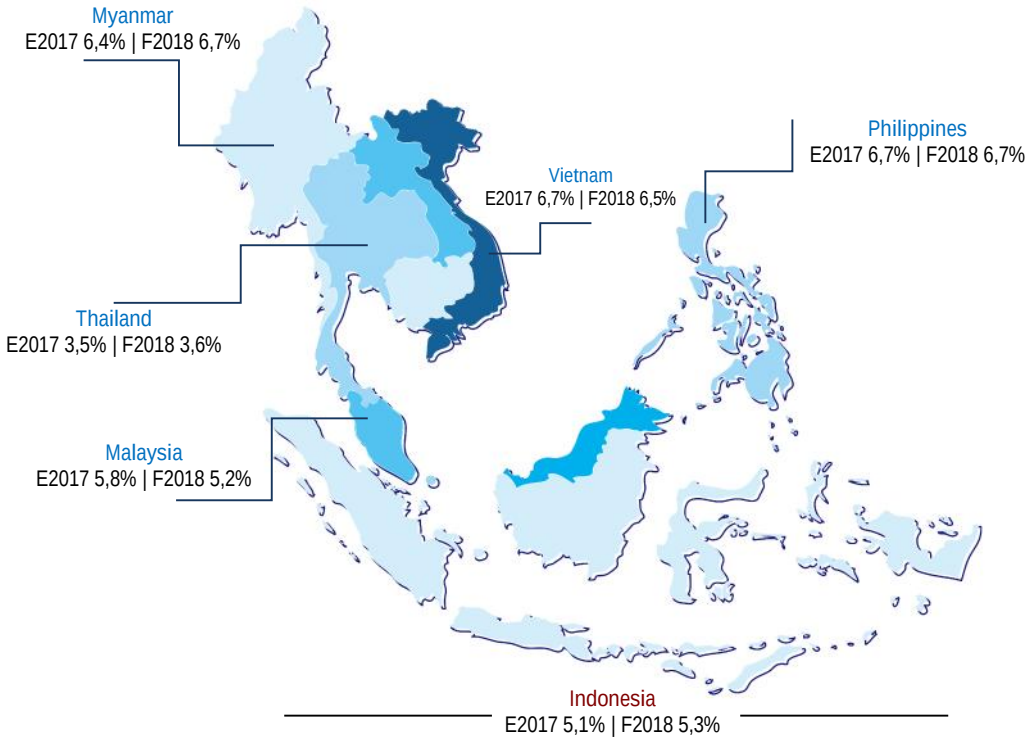
Tabel 3-1
Realisasi Ekonomi Makro Nasional 2016 & Asumsi RAPBN 2017-2018

Indikator	2015	2016	2017*	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,88	5,02	5,06	2017 data Triwulan III (y-o-y)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,18	5,61	5,50	
IPM (%)	69,55	70,18	na	Data belum dipublikasi
Inflasi (%)	3,35	3,02	3,61	
Indeks Gini (Maret)	0,408	0,397	0,393	
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,13	10,70	10,12	Data September

Sumber: SIPD Tahun 2018

Fokus pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok tanah air terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memicu kenaikan investasi skala nasional. World Bank mengemukakan bahwa pertumbuhan investasi di Indonesia di tahun 2017 mencapai nilai tertinggi dalam empat tahun terakhir. Demikian pula dengan jumlah arus masuk investasi asing langsung yang mencapai nilai terbesar dalam tujuh tahun terakhir. Gebrakan yang baik dalam reformasi birokrasi juga menuai hasil yang signifikan dengan meningkatnya peringkat ease of doing business dari posisi 120 ke posisi 72 di tahun 2017. Kabar gembira juga muncul dari naiknya peringkat utang jangka panjang dalam mata uang asing

dan lokal menjadi BBB dengan outlook stabil. Stabilitas makro ekonomi dari sisi moneter juga terjaga dengan baik sepanjang tahun 2017. Nilai tukar terjaga dengan volatilitas kurs pada kisaran 3%.



Gambar 3-1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%),
Tahun 2010- 2016

Kemiskinan tercatat memiliki tren menurun. Sampai dengan September 2017 persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 10,12% atau 26,58 juta jiwa. Angka ini menurun dari posisi Maret 2017 dengan pengentasan kemiskinan sebesar hamper 1,19 jiwa penduduk. Pendapatan juga mengalami distribusi yang lebih merata dengan tren menurun sejak tahun 2014. Capaian indeks gini Indonesia pada September 2017 sebesar 0,391, turun 0,002 poin dari Maret 2017. Kondisi ekonomi yang terkendali juga berimbas pada menguatnya Rupiah di awal tahun 2018. Kondisi ekonomi nasional yang terkendali melahirkan rumusan asumsi dasar makro 2018 yang cukup optimis sebagai berikut:

Tabel 3-2
Outlook 2017 dan Asumsi Dasar makro Ekonomi Indonesia Tahun 2018

Indikator Makro	Outlook 2017	APBN 2018	Asumsi Makro 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,4	5,4-5,8
Inflasi (%)	3,6	3,5	2,5-4,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	13.384	13.400	13.500-13.900
Harga Minyak (US$/barrel)	48	48	45-60
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	815	800	722-850
Lifting gas (ribu barrel/hari)	1.150	1.200	1.210-1.300

Sumber: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2018

3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Sampai dengan Triwulan III 2017 BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,13% dengan tingkat inflasi sampai dengan akhir tahun cukup rendah di angka 3,71%. Pemerataan pendapatan membaik meski dengan penurunan indeks gini yang cukup lambat. Scenario sasaran ekonomi makro di tahun 2019 diprediksi mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4% dengan rentang nilai 5,2%-5,6%.

Jumlah penduduk miskin pada September 2017 mencapai 4,197 juta jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 337.657. Secara porsi, besarnya persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2017 (12,23%) masih lebih tinggi dari persentase pada skala nasional dan menduduki peringkat ke-13 tertinggi se-Indonesia setelah DI Yogyakarta (12,36%). Pada skala Kabupaten/Kota posisi Maret 2017 persentase penduduk miskin terbesar berada di Kabupaten Wonosobo, Kebumen dan Brebes. Mayoritas penduduk miskin di kantong kemiskinan terbesar di Jawa Tengah adalah berasal dari pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Arah dan prioritas pembangunan Jawa Tengah di tahun 2019 untuk penanggulangan kemiskinan memfokuskan pada penyediaan basic life access, penguatan sutainable livelihood, penguatan basis data, spasial, komunitas, pendampingan dan keterlibatan swasta serta pihak lain dalam pengentasan kemiskinan.

Tabel 3-3
Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017*	Keterangan	Target 2019**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	5,28	5,13	2017 data Triwulan III (y-o-y)	5,2-5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,99	4,63	4,57		4,52
IPM (%)	69,49	69,98	na		-
Inflasi (%)	2,73	2,36	3,71		-
Indeks Gini (Maret)	0,382	0,366	0,365		-
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,58	13,27	12,23	Data September	12,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
** SE Gubernur Jawa Tengah No. 050/019604 Tanggal 27 Desember 2017

TPT di Jawa Tengah mampu turun di tahun 2017. Dengan total angkatan kerja sebanyak 18,016 juta jiwa, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih ditemui sebesar 823.938 jiwa atau mencapai 4,57% dari total angkatan kerja. TPT tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 8,19% sedangkan wilayah dengan TPT terkecil adalah Kabupaten Semarang yang hanya mencapai 1,78%.

3.1.3 Deskripsi Umum Prediksi Perekonomian Kota Magelang

Berdasarkan uraian kinerja makro ekonomi dan sosial dari hasil pembangunan yang telah dicapai Pemerintah Kota Magelang di tahun 2017 sebagaimana diuraikan dalam Bab II pada dokumen ini, maka sub bab ini akan memibahas outlook kondisi ekonomi Kota Magelang sampai dengan akhir tahun 2018 dari beberapa indikator makro pada tabel berikut :

Tabel 3-4
Realisasi dan Prediksi Capaian Indikator Makro Kota Magelang, 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	5,11	5,17	5,19	5,39	2017-2018 prediksi (deviasi ±0,40%)
TPT (%)	6,43	na	6,68	5,77	2018 prediksi
IPM (%)*	76,39	77,16	77,80	78,56	2017-2018 prediksi
Inflasi (%)*	2,70	2,25	3,90	3,26-4,23	2018 prediksi
Indeks Gini*	0,340	0,325-0,340	0,314-0,340	0,312-0,340	2016-2018 prediksi
Persentase Penduduk Miskin (%)*	9,05	8,79	8,75	8,32	2011-2016 data September, 2017 data Maret 2018 prediksi (deviasi ±0,71)

Sumber: SIPD Tahun 2018
Prediksi Indikator Bertanda Bintang oleh DInas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018
Prediksi TPT oleh Pusdatin Naker, 2017

3.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto

3.1.3.1.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Besarnya PDRB Kota Magelang atas dasar harga berlaku di tahun 2018 diprediksi tumbuh positif 7,49%. Dengan komposisi peran lapangan usaha yang cenderung sama dari tahun ke tahun diprediksi beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum antara lain adalah: Industri Pengolahan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Perekonomian masih ditopang kokoh oleh sektor-sektor andalan yaitu Industri Pengolahan (16,65%), Konstruksi (16,75%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,81%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11,41%).

Tabel 3-5
Prediksi PDRB Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2018

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146.733,01
Industri Pengolahan	1.350.081,12
Pengadaan Listrik dan Gas	22.293,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.307,93
Konstruksi	1.358.571,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.120.227,80
Transportasi dan Pergudangan	539.086,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	473.799,62
Informasi dan Komunikasi	401.070,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	407.474,95
Real Estate	251.447,95
Jasa Perusahaan	31.390,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	924.920,40

Jasa Pendidikan	664.042,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	235.068,85
Jasa lainnya	173.084,68
PDRB	8.109.601,36

Sumber: Prediksi oleh DInas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

3.1.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2018 dengan asumsi perolehan PDRB adhb sebesar 8,110 triliun Rupiah, perekonomian riil Kota Magelang diprediksi mencapai 5,39% (deviasi 0,40%). Prediksi ini cukup optimis sejalan dengan target RPJMD pada tahun berkenaan yang ditetapkan pada range 4,79%-5,29%. Secara riil PDRB diprediksi mencapai 6,118 triliun Rupiah. Dari sisi lapangan usaha beberapa sektor diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti Jasa Pendidikan (11,33%), Informasi dan Komunikasi (9,28%), Jasa Perusahaan (8,11%) dan Transportasi dan Pergudangan (7,16%). Dengan asumsi prediksi tersebut tercapai, maka jika disandingkan dengan data proyeksi penduduk tengah tahun Kota Magelang di tahun 2018 sebesar 121.872, besarnya PDRB per kapita Kota Magelang diprediksi tumbuh 1,7% (adhb) mencapai 59,92 juta/tahun.

3.1.3.2 Pemeratanaan Pendapatan

Keterbatasan data resmi yang dipublikasi BPS menjadikan indikator pemerataan pendapatan yang diproksi melalui indeks gini tidak tersedia dengan historis yang mencukupi. Data terakhir di tahun 2015 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Magelang masuk dalam klasifikasi ketimpangan sedang dengan indeks sebesar 0,340. Pada tahun-tahun ke depan pemerataan tersebut diprediksi makin baik dengan indeks di tahun 2018 pada interval 0,312-0,340 dengan kecenderungan menurun.

3.1.3.3 Perkembangan Harga

Seiring dengan outlook yang cukup optimis pada indikator makro ekonomi, laju perkembangan inflasi di Kota Magelang pada tahun 2018 juga diprediksi stabil pada kisaran angka 3,26-4,23. Prediksi ini masuk dalam rentang target RPJMD di tahun tersebut yang ditetapkan sebesar 3,15% - 4,73%.

3.1.3.4 Ekspor dan Investasi

Neraca perdagangan negatif memang tidak dapat dihindari di Kota Magelang mengingat keterbatasan sumber daya dan luas wilayah. Namun demikian diprediksi ekspor (perdagangan ke luar wilayah) Kota Magelang di tahun 2018 mampu tumbuh mengimbangi bahkan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan impor. Celah yang tercipta dalam pos ekspor netto terhadap PDRB diprediksi makin mengecil dengan perolehan nilai ekspor diprediksi 3,968 triliun rupiah (deviasi 0,48%) di tahun 2018 dengan outlook meningkat stabil. Sementara itu Investasi dari pendekatan PMTB di tahun 2018 diprediksi tumbuh 6,46% dengan nominal mencapai 3,921 triliun rupiah.

3.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2019

3.2.1 Tantangan Perekonomian Kota Magelang 2018

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2019 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan serta meningkatkan daya saing lokal dalam rangka mendukung pembangunan kawasan strategis agropolitan Semar Boyong (Semarang-Boyolali-Magelang) yang merupakan salah satu prioritas pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Tengah.
b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah Kota Magelang dengan perbaikan peraturan perundang-undangan daerah, perbaikan kualitas pelayanan, efektifitas pajak dan penyederhanaan birokrasi.
c. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas dengan konsep universal design. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
d. Meningkatkan daya saing dan produksi ekspor daerah. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja serta mempersempit celah neraca perdagangan yang selama ini bernilai negatif.
e. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan variasi infrastruktur yang berkualitas.
f. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Magelang.
g. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Magelang sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
h. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
i. Mengelola inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.
j. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjaringan riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing Kota Magelang dalam menarik atensi investor untuk memperbesar peluang percepatan pertumbuhan ekonomi.

3.2.2 Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2019

Berdasar kondisi eksisting perekonomian Kota Magelang tahun 2016 dan prediksi tahun 2017-2018, maka pada tahun 2019 perekonomian Kota Magelang memiliki prospek antara lain:

a. Dengan menyesuaikan data historis PDRB penyesuaian tahun dasar 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi tumbuh 5,42% pada rentang 5,02%-5,82% dengan kecenderungan naik. Rentang prediksi ini masih sinergi dengan skenario sasaran makro perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan pertumbuhan ekonomi untuk Kota Magelang sebesar 5,71% di tahun 2019.
b. Inflasi diprediksi pada kisaran angka 2,93%-4,51% dengan kecenderungan menurun.
c. Laju pertambahan penduduk diproyeksi mencapai 0,21% (berdasarkan proyeksi kependudukan Kota Magelang tahun 2010-2020 oleh BPS).
d. PDRB atas dasar harga berlaku diprediksi mencapai 8,688 triliun rupiah (deviasi 0,69%), tumbuh 7,13%.
e. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diprediksi sebesar 60,92 juta rupiah per tahun.
f. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksi mencapai 5,54% (berdasarkan prediksi pada dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kota Magelang 2017-2021).

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi cateris paribus tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menitikberatkan pada efektivitas pemerintahan melalui klasifikasi urusan pemerintahan. Sebagaimana tercantum pada pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari: 1) Urusan pemerintahan absolute yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, 2) Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, 3) Urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Terkait dengan otonomi daerah, menyebabkan daerah memiliki kesempatan yang besar untuk melaksanakan tujuan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dan harapan baru mengenai otonomi yang lebih luas, khususnya daerah tingkat kabupaten/kota. Disisi lain, otonomi menimbulkan suatu kebutuhan dana yang besar dan daerah tidak bisa lagi menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat, oleh karena itu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai pelimpahan keuangan. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
c. Meningkatkan sosial budaya masyarakat.
d. Untuk demokratisasi.

Seiring dengan otonomi daerah, maka semangat desentralisasi, demokrasi, trnsparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah, Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan, sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memeprhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian. Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran-besaran belanja dalam APBD.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal dari pusat ke daerah, maka pemerintah pusat melakukan Kebijakan Desentralisasi Fiskal ke Daerah dengan maksud untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakatserta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Pelaksanaan Kebijakan Fiskal juga merupakan salah satu upaya Pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan dana-dana untuk

membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah untuk kemudian dibelanjakan/diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas
b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (OPD)
d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ada dua hal penting yang perlu terus dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal seyogyanya menjadikan salah atau pemacu pemerintah Kota Magelang dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2019 di Kota Magelang diarahkan untuk:

1. Melanjutkan konsolidasi fiskal untuk mewujudkan sustainable fiskal daerah.
2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi.
3. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yg tidak terkait dg pelayanan dasar) yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan per-UU.
4. Pendanaan program dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat utk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah inklusif, dan kesejehteraan masyakarat.
5. Mengoptimalikan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.

Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRD yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan–laporan pelaksanaan APBD.

3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam sebagai berikut:

Tabel 3-6
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2016 - 2020
(dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017	TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	220,315,848,525	218,085,185,000	217,823,794,000	221,502,804,000	221,502,804,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	25,974,837,133	29,821,800,000	30,096,800,000	30,684,300,000	30,684,300,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,663,308,913	5,422,657,000	4,780,203,000	4,944,048,000	4,944,048,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,182,279,953	7,710,904,000	7,458,617,000	9,982,607,000	9,982,607,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	181,495,422,703	175,129,824,000	175,488,174,000	175,891,849,000	175,891,849,000
1.2	Dana Perimbangan	567,636,707,545	576,667,228,000	582,806,750,000	593,120,543,000	593,120,543,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	30,333,059,082	33,063,552,000	29,517,443,000	26,683,349,000	26,683,349,000
1.2.2	DAU	447,909,575,000	440,041,244,000	440,041,244,000	440,041,244,000	440,041,244,000
1.2.3	DAK	89,394,073,463	103,562,432,000	113,248,063,000	126,395,950,000	126,395,950,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	52,090,070,278	132,893,466,000	82,128,757,000	75,051,575,000	75,051,575,000
1.3.1	Hibah	0	23,985,271,000	16,768,200,000	16,757,600,000	16,757,600,000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	37,179,177,579	51,494,329,000	47,110,557,000	40,043,975,000	40,043,975,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	18,250,000,000	18,250,000,000	18,250,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	14,146,495,000	47,039,466,000	0	0	0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	764,397,699	10,374,400,000	0	0	0
	PENDAPATAN DAERAH	840,042,626,525	927,645,879,000	882,759,301,000	889,674,922,000	889,674,922,000

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Prediksi kemampuan keuangan daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah diperkirakan naik, dengan optimalisasi Penggunaan e-tax (pajak online), Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
2. Pajak Restoran diperkirakan akan naik dengan memperluas tax basis dan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi berupa pengawasan dan monitoring hasil pajak restoran yang memiliki cash register.
3. Pajak Bumi dan Bangunan diperkirakan akan naik dengan adanya 1. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan. 2. Verifikasi piutang PBB yang dapat ditagih.

4. Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan mengalami kenaikan.
5. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan sebesar 85% dari pagu tahun sebelumnya.
6. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya.
7. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan sebesar 85% dari pagu tahun sebelumnya.

3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat auntuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Hingga saat ini, pajak dan retribusi masih menjadi andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Di banyak daerah, kontribusi pajak dan retribusi daerah bisa mencapai lebih dari 50 persen dari PAD. Tidak mengherankan mengapa kemudian pemerintah daerah sangat tertarik pada dua komponen tersebut. sebagai salah satu dampak dari ketertarikan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan. Upaya peningkatan PAD hingga saat ini masih jauh dari optimal dan proporsinya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan struktur pengeluaran.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 60 persen dari total pendapatan APBD, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit

anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau konstribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2016 meningkat dan diharapkan tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Selama kurun waktu 2013-2017 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-7
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Selama Tahun 2013-2017 (dalam rupiah)

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
01.	2013	107,739,838,961.00	431,113,288,290.00	95,906,857,889.00	634,759,985,140.00
02.	2014	164,927,631,230.00	459,785,205,171.00	110,403,278,006.00	735,116,114,407.00
03.	2015	186,677,410,081.00	462,804,716,465.00	131,853,672,963.00	781,335,799,509.00
04.	2016	220,315,848,702.00	567,636,707,545.00	52,090,070,278.00	840,042,626,525.00
05.	2017	218,085,185,000.00	576,667,228,000.00	132,893,466,000.00	927,645,879,000.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013 – 2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Magelang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Magelang.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1, angka 18 dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6, ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1), Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

(i) Pajak Daerah;
(ii) Retribusi Daerah;
(iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
(iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), masuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peranan pajak dan retribusi daerah sangat penting dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, oleh karena itu pemerintah Kota Magelang harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Pengggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada studi potensi yang sudah dibuat, bekerja sama dengan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang.
b. Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
c. Melakukan Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
d. Memperkuat proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
e. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung.

f. Penggunaan e-tax (Pajak Online) dalam pelayanan pajak daerah, untuk mempercepat, mempermudah dan menyederhanakan prosedur melalui srana teknologi informasi berbasis “web service” sehingga Wajib pajak dapat mengakses pembayaran pajak dengan mudah, murah dan cepat.

g. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik/wajib pajak.

h. Meningkatkan pengawasan, dengan melakukan audit wajib pajak sebagai dasar optimalisasi penerimaan pendapatan melalui laporan keuangan.

i. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutanpajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

j. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penggalian potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru harus selalu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaan pajak dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di Kota Magelang. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Magelang.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2013-2017 di Kota Megelang, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-8
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
01.	2013	107,739,838,961.00	634,759,985,140.00	16.97
02.	2014	164,927,631,230.00	735,116,114,407.00	22,44
03.	2015	186,677,410,081.00	781,335,799,509.00	23,89
04.	2016	220,315,848,702.00	840,042,626,525.00	26,22

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
05.	2017	218,085,185,000.00	927,645,879,000.00	23,50

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013 - 2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Gambaran secara rinci obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-9
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Pajak thd PAD (%)
01.	2013	18,829,673,340.00	107,739,838,961.00	17,48
02.	2014	22,107,435,949.00	164,927,631,230.00	13,40
03.	2015	26,185,301,675.00	186,677,410,081.00	14,02
04.	2016	25,974,837,133.00	220,315,848,702.00	11,78
05.	2017	29,821,800,000.00	218,085,185,000.00	13,67

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2017 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-10
Kontribusi Retribusi Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Retribusi thd PAD (%)
01.	2013	7,357,207,773.00	107,739,838,961.00	6,83
02.	2014	6,058,580,948.00	164,927,631,230.00	3 ,67
03.	2015	6,999,474,592.00	186,677,410,081.00	3,74
04.	2016	6,663,308,913.00	220,315,848,702.00	3,02
05.	2017	5,422,657,000.00	218,085,185,000.00	2,48

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-11
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	2013	5,872,500,274.00	107,739,838,961.00	5,45
02.	2014	6,242,609,307.00	164,927,631,230.00	3,79
03.	2015	6,598,774,537.00	186,677,410,081.00	5,53
04.	2016	6,182,279,953.00	220,315,848,702.00	2,80
05.	2017	7,710,904,000.00	218,085,185,000.00	3,53

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-12
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	2013	75,680,457,574.00	107,739,838,961.00	70,24
02.	2014	130,519,005,026.00	164,927,631,230.00	79,14
03.	2015	146,893,859,277.00	186,677,410,081.00	78,68
04.	2016	181,495,422,703.00	220,315,848,702.00	82,37
05.	2017	175,129,824,000.00	218,085,185,000.00	80,30

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Pajak Daerah menduduki posisi yang paling penting peranannya dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, meskipun yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, namun sebagian besar merupakan pendapatan BLUD yang penggunaannya adalah untuk operasional BLUD itu sendiri. Oleh karena itu Peran Pajak Daerah di Kota Magelang terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Magelang sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari realisasi pendapatan Pajak Daerah di Kota Magelang selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun 2013-2017 tingkat kontribusinya mengalami fluktuasi (naik dan turun), pada tahun 2013 kontribusinya mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan, diharapkan tahun-tahun berikutnya akan naik kembali, baik besarannya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.3.2.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajk/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2016) rata-rata berkisar 60 - 70 persen dari total Pendapatan Daerah. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-13
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	431,113,288,290.00	634,759,985,140.00	67,92
02.	2014	459,785,205,171.00	735,116,114,407.00	62,55
03.	2015	462,804,716,465.00	781,335,799,509.00	59,23
04.	2016	567,636,707,545.00	840,042,626,525.00	67,57
05.	2017	576,667,228,000.00	927,645,879,000.00	62,16

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
6. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2017

Gambaran Dana Perimbangan berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-14
Kontribusi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2013	24,609,560,290.00	431,113,288,290.00	5,71
02.	2014	20,207,973,171.00	459,785,205,171.00	4,40
03.	2015	18,772,034,465.00	462,804,716,465.00	4,05
04.	2016	30,333,059,082.00	567,636,707,545.00	5,34
05.	2017	33,063,552,000.00	576,667,228,000.00	5,73

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2017

Tabel 3-15
Kontribusi Dana Alokasi Umum
terhadap Dana Perimbangan Tahun 2013-2017
(dalam rupiah dan persen)

No.	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Dana Alokasi Umum Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2013	385,859,241,000.00	431,113,288,290.00	89,50
02.	2014	417,211,449,000.00	459,785,205,171.00	90,74
03.	2015	418,257,922,000.00	462,804,716,465.00	90,37
04.	2016	447,909,575,000.00	567,636,707,545.00	78,90
05.	2017	440,041,244,000.00	576,667,228,000.00	76,30

Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2012-2016 (dalam rupiah dan %)

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2017

Tabel 3-16
Kontribusi Dana Alokasi Khusus
terhadap Dana Perimbangan Tahun 2013-2017
(dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Dana Alokasi Khusus Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2013	20,644,487,000.00	431,113,288,290.00	4,79
02.	2014	22,365,783,000.00	459,785,205,171.00	4,86
03.	2015	25,774,760,000.00	462,804,716,465.00	5,56
04.	2016	89,394,073,463.00	567,636,707,545.00	15,74
05.	2017	103,562,432,000.00	576,667,228,000.00	17,95

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2017

3.3.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Magelang bersumber dari:

(i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),

(ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;

(iii) Dana Penyesuaian; dan

(iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Magelang masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Magelang. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kota Magelang selama kurun waktu tahun 2013 – 2016 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan APBD yang mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup tajam, hal ini dikarenakan Tunjangan Profesi Guru yang semula pendapatanya masuk dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2016 masuk Dana Alokasi Khusus pada Dana Perimbangan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

:Tabel 3-17

Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah terhadap Pendapatan APBD (%)
01.	2013	95,906,857,889.00	634,759,985,140.00	15.11
02.	2014	110,403,278,006.00	735,116,114,407.00	15.02
03.	2015	131,853,672,963.00	781,335,799,509.00	16,87
04.	2016	52,090,070,278.00	840,042,626,525.00	6,20
05.	2017	132,893,466,000.00	927,645,879,000.00	14,32

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Gambaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-18
Kontribusi Pendapatan Hibah
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Pendapatan Hibah (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Pendapatan Hibah terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2013	0.00	95,906,857,889.00	0,00
02.	2014	0.00	110,403,278,006.00	0,00
03.	2015	0.00	131,853,672,963.00	0,00
04.	2016	0.00	52,090,070,278.00	0,00
05.	2017	23,985,271,000.00	132,893,466,000.00	18,04

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-19
Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2012-2016 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2013	19,546,928,516.00	95,906,857,889.00	20,38
02.	2014	26,421,159,000.00	110,403,278,006.00	23,93
03.	2015	36,869,367,174.00	131,853,672,963.00	27,96
04.	2016	37,179,177,579.00	52,090,070,278.00	71,37
05.	2017	51,494,329,000.00	132,893,466,000.00	38,74

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
3. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-20
Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan yang Daerah Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	63,049,373,000.00	95,906,857,889.00	65,74

No.	Tahun	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan yang Daerah Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
02.	2014	74,974,179,000.00	110,403,278,006.00	67,91
03.	2015	79,988,204,000.00	131,853,672,963.00	60,66
04.	2016	0.00	52,090,070,278.00	0,00
05.	2017	0.00	132,893,466,000.00	0,00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-21
Kontribusi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2013	13,310,556,373.00	95,906,857,889.00	13,88
02.	2014	9,007,940,006.00	110,403,278,006.00	8,16
03.	2015	14,964,620,257.00	131,853,672,963.00	11,34
04.	2016	14,146,495,000.00	52,090,070,278.00	27,15
05.	2017	47,039,466,000.00	132,893,466,000.00	35,39

Tabel 3-22
Kontribusi Pendapatan Lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Pendapatan Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Pendapatan Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	0,00	95,906,857,889.00	0,00
02.	2014	0.00	110,403,278,006.00	0.00
03.	2015	31,481,532.00	131,853,672,963.00	0,02

No.	Tahun	Pendapatan Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Pendapatan Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
04.	2016	764,397,699.00	52,090,070,278.00	1,46
05.	2017	0.00	132,893,466,000.00	0,00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Dari perbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2017-2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-23
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2016 - 2020
(dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017	TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	220,315,848,525	218,085,185,000	217,823,794,000	221,502,804,000	221,502,804,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	25,974,837,133	29,821,800,000	30,096,800,000	30,684,300,000	30,684,300,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,663,308,913	5,422,657,000	4,780,203,000	4,944,048,000	4,944,048,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,182,279,953	7,710,904,000	7,458,617,000	9,982,607,000	9,982,607,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	181,495,422,703	175,129,824,000	175,488,174,000	175,891,849,000	175,891,849,000
1.2	Dana Perimbangan	567,636,707,545	576,667,228,000	582,806,750,000	593,120,543,000	593,120,543,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	30,333,059,082	33,063,552,000	29,517,443,000	26,683,349,000	26,683,349,000
1.2.2	DAU	447,909,575,000	440,041,244,000	440,041,244,000	440,041,244,000	440,041,244,000
1.2.3	DAK	89,394,073,463	103,562,432,000	113,248,063,000	126,395,950,000	126,395,950,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	52,090,070,278	132,893,466,000	82,128,757,000	75,051,575,000	75,051,575,000
1.3.1	Hibah	0	23,985,271,000	16,768,200,000	16,757,600,000	16,757,600,000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	37,179,177,579	51,494,329,000	47,110,557,000	40,043,975,000	40,043,975,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	18,250,000,000	18,250,000,000	18,250,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	14,146,495,000	47,039,466,000	0	0	0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	764,397,699	10,374,400,000	0	0	0
	PENDAPATAN DAERAH	840,042,626,525	927,645,879,000	882,759,301,000	889,674,922,000	889,674,922,000

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2011-2016, maka pendapatan sampai dengan tahun 2020 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Optimalisasi system pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa tapping box (alat perekam transaksi) atau instrument lain yang dapat digunakan untuk merekam trnsaksi dalam rangka meminimalisir penyimpangan

data transaksi oleh wajib pajak daerah.

b. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar kepada wajib pajak.
c. Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
d. Optimalisasai SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitan SDM perpajakan.
e. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
f. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
g. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
h. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
i. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
j. Penerapan konsep “Ear marking” dalam pendapatan daerah dimana setiap pungutan dari masyarakat (Pajak Daerah, Retribusi Daerah) akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan secara menyeluruh di Kota Magelang.

3.3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Pengelolaan Belanja Daerah memiliki ciri; hemat, tepat guna dan tepat sasaran, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat

diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap OPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

3.3.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Magelang tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Magelang tidak menganggarkan belanja subsidi.
d. Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
e. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah

daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. Pemerintah Kota tidak menganggarkan Belanja Bagi Hasil.

g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/ pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Magelang tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

3.3.3.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja ini merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Yang termasuk dalam kategori belanja barang/jasa adalah Belanja Pengadaan barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuik digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

    1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
    2. pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
    3. perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

4. pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap/asset lainnya.

Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kota Magelang Tahun 2013-2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-24
Struktur Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) + (4))
01.	2013	313,072,355,985.00	317,778,361,372.00	630,850,717,357.00
02.	2014	340,526,165,129.00	341,697,705,278.00	682,223,870,407.00
03.	2015	357,657,431,281.00	378,683,006,469.00	736,340,437,750.00
04.	2016	350,201,266,658.00	521,657,863,945.00	871,859,130,603.00
05.	2017	380,992,740,000.00	694,630,381,000.00	1,075,623,121,000.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3-25
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
02.	2013	304,116,683,985.00	630,850,717,357.00	48.21
03.	2014	333,318,007,729.00	682,223,870,407.00	48.86
04.	2015	345,555,340,681.00	736,340,437,750.00	46,92
05.	2016	344,173,396,158.00	871,859,130,603.00	39,47
06.	2017	341,922,387,000.00	1,075,623,121,000.00	31,78

Sumber : 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Penganggaran Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (core competence), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Gambaran Prediksi Belanja di Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-26
Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2016 - 2020
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017	TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	350,201,266,658	380,992,740,000	326,136,404,000	335,196,456,000	335,196,456,000
	Belanja Pegawai	344,173,396,158	341,922,387,000	310,620,578,000	310,375,793,000	310,375,793,000
	Belanja Bunga	0				
	Belanja Subsidi	0				
	Belanja Hibah	1,486,806,000	9,902,833,000	9,181,194,000	14,667,670,000	14,667,670,000
	Belanja Bantuan Sosial	3,192,264,000	5,834,156,000	3,556,255,000	5,092,900,000	5,092,900,000
	Belanja Bantuan Keuangan	641,828,500	560,703,000	560,703,000	560,703,000	560,703,000
	Belanja Tak Terduga	706,972,000	22,772,661,000	7,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000
2.2	BELANJA LANGSUNG	521,657,863,945	694,630,381,000	643,080,477,000	674,478,466,000	674,478,466,000
	BELANJA DAERAH	871,859,130,603	1,075,623,121,000	969,216,881,000	1,009,674,922,000	1,009,674,922,000
	Surplus/Defisit	-31,816,504,078	-147,977,242,000	-86,457,580,000	-120,000,000,000	-120,000,000,000

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang tahun 2018 masih tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) OPD.

4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang secara umum seperti yang disebutkan di atas, pada tahun 2019 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Membiayai Program dan Kegiatan yang Menjadi Prioritas Kota Magelang;
2. Membiayai Program dan Kegiatan yang Mendukung Tercapainya Visi dan Misi Walikota Magelang;
3. Memenuhi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang Harus Dilaksanakan;
4. Memenuhi Pelaksanaan Program yang Berstandar Pelayanan Minimal dan Operasional;
5. Mengedepankan Program-program yang menunjang Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan;
6. Belanja Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Guna menjamin Kelangsungan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat;
7. Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Total Belanja Daerah;
8. Alokasi Belanja Urusan Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja APBD diluar Gaji Mematuhi Ketentuan Penggunaan Transfer ke Daerah Yang Penggunaannya Bersifat Umum untuk Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Minimal 25% dari DAU dan DBH setelah dikurangi 10% Alokasin Dana Desa (ADD). Belanja Infrastruktur Daerah merupakan Belanja yang Langsung terkait dengan Percepatan Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik dan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Kesempatan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Penyediaan Pelayanan Publik antar Daerah yang dihitung dari Total Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan namun tidak termasuk Belanja Modal dan Pemeliharaan untuk Aparatur seperti Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Gedung Pemerintahan yang Fungsi Utamanya untuk Pelayanan Administrasi dan Kendaraan Dinas.

9. Mematuhi Pelaksanaan Penggunaan Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan Penggunaannya sesuai dengan Peraturan dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan seperti DBHCHT, Dana Transfer Khusus dan Dana Otonomi Khusus.
10. Pelaksanaan Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Mengupayakan Percepatan Pelaksanaaan Belanja Daerah agar tidak menumpuk di akhir Tahun Anggaran sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif, mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan Pemerintah Daerah di Bank dalam jumlah tidak wajar.

3.3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan:
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Dana Bergulir; dan
8. Penerimaan Hasil Penarikan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pemberian Dana Bergulir.

Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2016 -2018 dan prediksi 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-27
Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang
Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017	TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	201,248,404,030	165,144,899,000	107,520,354,000	103,728,000,000	103,728,000,000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sblmnya	201,227,094,865	162,344,899,000	103,642,354,000	100,000,000,000	100,000,000,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	21,309,165	150,000,000	150,000,000	0	0
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan		2,650,000,000	3,728,000,000	3,728,000,000	3,728,000,000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,078,000,000	17,167,657,000	21,062,774,000	20,585,000,000	20,585,000,000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		3,000,000,000			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,078,000,000	14,167,657,000	21,062,774,000	20,585,000,000	20,585,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir					
	Pembiayaan netto	194,161.404,030	147,977,242,000	86,457,580,000	83,143,000,000	83,143,000,000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	162,344,899,952	0	0	0	0

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah.

Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2019 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
b. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
c. Optimalisasi Penerimaan Investasi Daerah dari Dana Bergulir.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2019 diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara Bertahap. Penyertaan Modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Selain Penyertaan Modal kepada BUMD, Pemerintah Kota Magelang menempatkan modal disetor ke dalam PT. Bank Jateng guna meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan sharing kepemilikan saham Pemerintah Kota Magelang pada PT. Bank Jateng sehingga deviden yang diterima Pemerintah Kota Magelang tidak mengalami penurunan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

4.1.1 Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

RKPD Kota Magelang Tahun 2019 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun Ketiga, yaitu tahun perencanaan 2018 untuk dilaksanakan pada tahun 2019. Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

"MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS".

Makna yang termuat dalam Visi tersebut adalah:

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4-1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kota Jasa yang Modern dan Cerdas	Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada.Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karateristik:(a) Masyarakat sejahtera dalam financial;(b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum);(c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya). Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) Smart Governance yaitu: pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) Smart infrastructure yaitu:pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) Smart Economy, yaitu: pengembangan city branding, pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) Smart environment yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) Smart people yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.
Sejahtera	Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.
Religius	Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota asyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

4.1.2 Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas, profesionalitas, integritas, produktivitas, responsifitas, dan etos kerja aparatur di jajaran Pemerintah Kota Magelang dengan cara melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan yang mencakup: (a) Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (b) Tatalaksana (Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance); (c) Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendoorng pencapaian kinerja pemerinrintahan); (d) Sumber daya manusia aparatur (SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (e) Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN); (f) Akuntabilitas (Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi); (g) Pelayanan Publik (Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha); dan (h) Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (culture set) (Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan bahasa budaya kerja).

   Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (penggunaan internet) di lingkungan pemerintah dan masyarakat, maka upaya reformasi birokrasi juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana teknologi sebagai alat untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di Kota Magelang. Pengembangan dan aplikasi E-Government melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah (seperti Wide Area Network, Internet, Mobile Computing, dan sebagainya) sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan guna mendukung jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan TI akan memungkinkan pemerintah untuk: (a) mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan dalam suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, tepat, bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi (Good Corporate Governance); (b) memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan; dan (c) mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

   Pada aspek organisasi perlu dilakukan langkah-langkah penguatan yang meliputi: struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi. Selain itu, perlu pula dilakukan pembenahan terhadap sistem, yang terdiri dari: kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Juga diperlukan komitmen bersama (collective commitments) yang mencakup seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama; dan kepemimpinan yang kondusif (condusif leadership), kepemimpinan yang kondusif merupakan kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan luas bagi setiap elemen organisasi yang dapat menyelenggarakan suatu pengembangan kapasitas dan reformasi keputusan.

Dengan dukungan partisipasi masyarakat, pada giliran berikutnya, tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih akan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya, serta memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Dalam perspektif ini, good corporate governance juga akan mengarahkan kepada pengembangan inovasi daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setidaknya terdapat 4 (empat) kategori inovasi, yakni: (1) tata kelola pemerintahan; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing daerah.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perkotaan dan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya secara lebih modern akan dilakukan disertai dengan langkah-langkah inovasi dan kreatifitas dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menjamin adanya kesehatan lingkungan, mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan, dan pelibatan aktif masyarakat sebagai "komunitas hijau", dengan mendasarkan kepada perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Misi ini mengamanatkan adanya pengelolaan isu lingkungan hidup, sosial-budaya, dan ekonomi dapat ditangani dengan seimbang, sehingga pertumbuhan kota dapat terkendali dan tertata dengan baik dengan pelibatan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder. Kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ruang tata hijau dan penerapan gaya hidup ramah lingkungan demi keberlangsungan sebuah kota perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi oleh pemeritah dan komunitas. Masyarakat dan pemerintah harus dapat berjalan beriringan dan memiliki visi yang sama dalam pelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pada misi ini, pemenuhan ketersediaan infrastruktur perkotaan di seluruh wilayah Kota Magelang, baik yang berlokasi di jantung kota, pinggir kota maupun terutama di lokasi-lokasi sekitar perbatasan dengan Kabupaten Magelang merupakan hal sangat urgen demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama, maka dari itu pemerataan pendapatan (redistribusi pendapatan/ distribution of income) menjadi hal yang krusial untuk dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi semerata mungkin diantara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas daerah.

Selain penyediaan infrastruktur, upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilakukan antara lain dengan cara: (a) Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah; (b) kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas; (c) padat karya dan pengembangan usaha atau industri kecil; (d) bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility (CSR), sehingga golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (corner of previlage); dan sebagainya.

Lebih dari itu, pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan untuk: (a) mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (b) memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri; (c) berbasis kerakyatan dan kekeluargaan; (d) koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; (e) menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di mana setiap orang (tanpa diskriminasi) memperoleh apa yang menjadi haknya. Ini lantas berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal, sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Kota Magelang. Semua itu dilakukan secara berkesinambungan (sustainable) dan diupayakan mereduksi dan mengeliminasi adanya dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada upaya pelestarian budaya dan kesenian tradisional daerah secara berkelanjutan, sekaligus juga mencakup langkah-langkah penggalian dan pengembangan budaya kreatif dan kesenian kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman sebagai salah satu potensi kekayaan dan keanekaragaman pariwisata di Kota Magelang. Termasuk dalam kaitan ini adalah industri kreatif dan inovatif yang tengah marak berkembang di Kota Magelang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang telah merasuk ke hampir seluruh relung sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pengembangan dalam rangka pelestarian budaya dan kesenian merupakan gerakan sosial dan moral yang dilakukan oleh segenap pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menumbuhkembangkan kembali budaya daerah dalam rangka mewujudkan identitas dan jatidiri yang bermartabat. Berkembangnya kebudayaan daerah dapat menumbuhkan kearifan lokal dan memperkaya peradaban umat manusia. Terpeliharanya khazanah sejarah dan budaya akan berkontribusi kepada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perjuangan dan tanggung jawab masa depannya. Dalam konteks pembangkitan spiritualitas masyarakat, perlu dibangun cara pandang bahwa pariwisata merupakan jendela mensyukuri nikmat Tuhan, pusat-pusat keagamaan dapat menjadi obyek kunjung yang memiliki daya tarik, dan upacara-upacara keagamaan sebagai atraktif yang dapat mengundang pesona.

Upaya pemberdayaan budaya dan kesenian dapat disarikan antara lain: (a) Meningkatkan pengelolaan kebudayaan daerah meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup; (b) Meningkatkan industri dan karya budaya yang mengacu pada nilai-nilai luhur budaya bangsa; (c) Meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat; (d) Mengikuti event-event regional, nasional, dan internasional dalam rangka memupuk persahabatan dan promosi kebudayaan; (e) Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta pengembangan sistem informasi kebudayaan; dan (f) Mengembangkan SDM bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta sumber daya budaya itu sendiri. Sementara itu, pengembangan industri kreatifitas masyarakat dalam berbagai segi kehidupan diarahkan kepada upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan sanggar-sanggar seni budaya, bermunculannya pusat-pusat kerajinan tangan, berkembangnya dapur-dapur kreatif yang membuat aneka jenis makanan daerah dan tradisional, terciptanya suasana yang kondusif bagi kreatifitas kaum muda yang kreatif, dan terbinanya berbagai keahlian yang menopang langsung terhadap perkembangan pariwisata

Dalam perspektif ini, maka pariwisata (seni budaya daerah) dan industri kreatif bisa dijadikan sebagai unsur utama perekonomian daerah, apalagi bila kita ingin mengembangkan industri pariwisata sebagai alat dukung untuk

meningkatkan harkat dan martabat daerah di tengah pergaulan di tingkat regional, nasional, dan dunia internasional yang memiliki daya saing.

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Secara umum tolerensi umat beragama di Kota Magelang telah berjalan dengan baik. Sikap tenggang rasa yang berarti rukun dan tidak menyimpang dari aturan dimana seseorang harus saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya sudah menjadi salah satu kharakter masyarakat Kota Magelang. Toleransi beragama sangat diperlukan pada kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan yang harmonis, rukun dan sejahtera.Modal sosial kerukunan antara umat beragama itu harus dijaga dan dipelihara, serta ditingkatkan intensitasnya sehingga bisa memberi sumbangan yang lebih nyata bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah di Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada langkah-langkah guna memupuk dan memperkuat jiwa toleransi beragama dan membudidayakan hidup rukun antar umat beragama melalui sikap dan tindakan seperti: (1) Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama; tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan agama; (2) Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda; (3) Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah; (4) Dalam pergaulan sosial, menghindari jauh-jauh sikap egoisme dan fanatisme dalam beragama sehingga menyalahkan pemeluk agama atau penganut kepercayaan yang lain; (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan; dan (6) Peningkatan sarana-prasarana peribadatan. Selebihnya, guna meredam radikalisme yang mengatasnamakan agama (termasuk terorisme), dalam toleransi beragama perlu diadakannya dialog dengan cendikiawan dan para tokoh agama dan merangkul mereka untuk melakukan reinterpretasi atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif sehingga konsep multikulturalisme dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat.

Sikap toleransi dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat dalam suasana kehidupan yang harmonis, rukun dan sejahtera merupakan pijakan untuk mewujudkan masyarakat madani akan mengarahkan kepada sikap dan perilaku yang saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi guna mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   Tujuan:

   1. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas;
   2. Mewujudkanpenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi;

3. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara patisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan;
4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukumdan HAM tanpa diskriminatif;
3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive;
4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik;
5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7) Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan;
8) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional.

2. Misi 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan :

a. Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environtment;

Sasaran :

1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing;
2) Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat;
3) Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah;
4) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern;
5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
6) Meningkatnya ruang terbuka hijau;
7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
8) Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang.

3. Misi 3: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas;

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
c. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan;
d. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat;
e. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran :

1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat;
2) Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
3) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan;
4) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
5) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif;
6) Meningkatnya ketahanan pangan;
7) Meningkatnya lapangan kerja;
8) Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS;
9) Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan;
10) Menurunnya kesenjangan gender.

4. Misi 4: Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Tujuan :

a. Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah;
b. Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata.

Sasaran :

1) Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan;
2) Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.

5. Misi 5: Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Tujuan :

a. Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religious;
b. Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Sasaran :

1) Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan;
2) Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat;
3) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan.

Dalam pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, pencapaian tujuan hingga indikator sasaran saling terhubung secara hirarkis sebagaimana ditunjukkan Tabel 4-2. Sedangkan keterkaitan Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD ditunjukkan pada Tabel 4-3.

Tabel 4-2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Realisasi dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021
pada Perencanaan Tahun Ketiga (RKPD Kota Magelang tahun 2019)

NO	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat														
1	1	Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1	Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%
						2	Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
						3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%	72%
				2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
						2	Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14
						3	Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
						4	Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	30%	45%	55%	65%	75%	85%	85%
						5	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi tehnologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	1	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	1000%	1000%
				2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1	Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
						2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
				3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				2 Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
	3 Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara patisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1 Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
				2 Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	83,60 %	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
	4 Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	1 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
				2 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83	51,72	58,62	65,52	75,86	82,76	89,66	89,66
				3 Persentase perkembangan kerjasama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
		Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	1 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
			2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5	6	6	7	7	8	8	8
				a. Regional	4	4	4	5	5	6	6	6
				b. Nasional	1	2	2	2	2	2	2	2
				c. International	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14	17	17	17	17	17	20	20
				a. Regional	8	10	10	10	10	10	11	11
				b. Nasional	4	5	5	5	5	5	6	6
				c. International	2	2	2	2	2	2	3	3

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2	Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan											
2 1	Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indek Pembangunan Manusia	1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1 Rata-rata lama sekolah	10,32	10,36	10,41	10,46	10,50	10,55	10,59	10,59
				2 Persentase sekolah berstandar nasional								
				a. SD	30,66%	35,66%	40,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
				b. SMP	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
				3 Angka Melek Huruf	97%	97,35%	97,67%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
				4 Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%
				5 Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305
			2 Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	3 bh (23%)	5 bh (15%)	7 bh (54%)	10 bh (77%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)
				2 Angka Harapan Hidup	76,58	76,67	76,71	76,76	76,8	76,85	76,9	76,94
				3 AKI/ 1.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70
				4 AKB/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5
				5 AKABA	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
				6 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
				7 Angka Kesakitan DBD	130,93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
				8 Angka Prevalensi Kasus TB	128,33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101
				9 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%
				10 Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%
			3 Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	1 Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
			4 Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan	1 Persentase sarana prasarana penyedia	NA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)								
				2 Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	0%	10%	20%	30%	40%	50%	50%
				3 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%
	2 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environtment	IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84
				2 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1
				3 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56
				4 Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7
			2 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	3 Persentase Ruang Terbuka Hijau a. Privat	10	10	10	10	10	10	10	10
				b. Publik	18,37	18,37	18,37	18,42	18,44	18,46	18,50	18,50
			3 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
				2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
			4 Pemanfaatan lahanberkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%	33%
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat											
3	1 Meningkatkan pemerataan pembangunan infreastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan	1. Indeks Gini 2. Indeks Williamson	1 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%
			2 Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok	1 Tercapainya 100 - 0 -100								

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	aksesibilitas		pendapatan	a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%	100%
				b. Rasio Luas kawasan kumuh	121.27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
				c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	6%	6%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
				2 Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%
			3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,25
	2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Laju Inflasi	1 Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1 Pertumbuhan investasi								
				a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%
				b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
			2 Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
				2 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
			3 Meningkatnya ketahanan pangan	1 Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.729	12.780	12.831	12.882	12.933	12.985	13.037	13.037
	3 Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	1. TPT 2. Angka Kemiskinan	1 Meningkatnya lapangan kerja	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
			2 Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%
	4 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat	Angka Pertumbuhan Penduduk	1 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2
	5 Meningkatkan kesetaraan gender	1. IPG 2. IDG	1 menurunnya kesenjangan gender	1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%
				2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%
				2 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%

NO	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang														
4	1	Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
						2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25
	2	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1	Jumlah Wisatawan a. Nusantara b. Mancanegara	1.133.373 5.171	1.134.846 5.178	1.136.435 5.185	1.138.140 5.193	1.139.961 5.201	1.141.899 5.210	1.143.954 5.219	1.143.954 5.219
5	Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani														
5	1	Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	1	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
				2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1	Angka kriminalitas	14,14	13,64	13,14	12,64	12,14	11,64	11,14	11,14
						2	Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
						3	Angka kriminalitas yang tertangani	11,08	11,5	11,5	12	12	12.5	12.5	12.5
						4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56	3	3	3	3	3	3	3
						2	Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1	2

Tabel 4-3
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021 pada Perencanaan Tahun Ketiga (RKPD Kota Magelang Tahun 2019)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1 :Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat								
1 Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesiona dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya	v	v	v	v		
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi		2 Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	v	v	v			
		3 Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencananaan dan penganggaran daerah			v	v	v	v
		4 Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat			v	v	v	v
		5 Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat	v	v	v	v	v	v
3 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	2 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi	6 Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi	v	v	v	v	v	
		7 Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi	v	v	v	v	v	
4 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah	3 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	8 Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	v	v	v	v	v	v

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		Tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
		4	Peningkatan kinerja pengelolaan BMD yang didukung oleh aparatur profesional	9	Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset	v	v	v	v	v	v
5	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	5.	Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi	1 0	Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota	v	v	v	v	v	v
6	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan										
7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasiona dan internasional										
Misi 2 :Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan											
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	6	Peningkatan akses sumber ilmu pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan PAUD, Dasar, dan Non Formal	11	Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah		v	v	v	v	v
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7	Peningkatan kualitas layanan kesehatan berkeadilan dan pemasyaraakatan budaya perilaku hidup sehat	12	Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat	v	v	v	v	v	v
				13	Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan	v	v	v	v	v	v
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	8	Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri usaha mikro dan perdagangan dan sektor jasa kota lainnya	14	Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan		v	v	v	v	
4	Terwujudnya sarana prasarana perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern	9	Pengembangan infrastruktur perdagangan, kesehatan, pendidikan yang maju , inklusif dan berwawasan lingkungan								
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10	Pengendalian pemanfaatan ruang dan aktivitas pembangunan untuk pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan dan antisipasi resiko bencana	15	Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk		v	v	v		
6	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau										

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		Tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana				menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan						
8	Pemanfaatan lahan sesuai regulasi tata ruang										
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat											
1	menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	11	Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan	16	Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan	v	v	v	v	v	v
2	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang sesuai rasio kebutuhan masyarakat										
3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik dan ramah lingkungan										
4	Terjaganya kondusifitas kesejahteraan ekonomi masyarakat	12	Peningkatan investasi, daya saing produk/jasa, dan kontribusi sektor sektor-sektor ekonomi bagi perekonomian daerah	17	Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.	v	v	v	v		
5	Meningkatnya ketahanan pangan	13	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penurunan kemiskinan secara berkeadilan	18	Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: ketahanan pangan, peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender	v	v	v	v	v	v
6	Meningkatnya kesejahteraan sosial										
7	Meningkatnya lapangan kerja										
8	Menurunnya angka kemiskinan										
9	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan										

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 Menurunnya kesenjangan gender								
Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang								
1 Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan	14 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kreativitas seni budaya daerah, kearifan lokal, dan inovasi destinasi pariwisata	19 Pengembangan sistem Komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata			v	v	v	v
2 Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata baik alam maupun sejarah yang potensial								
Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani								
1 Terbentuknya karakter religius masyarakat landasan moral dan etika pembangunan	15 Internalisasi kesadaran religius pada Aparatur dan masyarakat untuk bermitra menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama menuju lingkungan masyarakat kota Magelang yang kondusif, tertib, aman, nyaman, dan antisipatif terhadap konflik sosial	20 Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipai resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik		v	v	v	v	v
2 Mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat								
3 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kebebasan beribadah dan pemilikan tempat peribadatan sesuai standar								

Kota Magelang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban mengintegrasikan sasaran pembangunan nasional dan provinsi ke dalam pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, menyatakan bahwa pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pasal 260 menyatakan bahwa rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kesesuaian sasaran pembangunan Kota Magelang yang menjadi dasar RKPD 2019 dengan sasaran pembangunan Nasional dan pembangunan provinsi Jawa Tengah digambarkan dalam matrik berikut.

Tabel 4.4
Matrik Kesesuaian Sasaran Pembangunan

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
1.1.	1.1.1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	6.3	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	3.c.	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
			6.4.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah	3.d	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyaraka
			12.2.	Bidang Aparatur		
	1.1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	6.2	Penegakan hukum	3.b	Meningkatnya perkembangan sis-tem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat yang mandiri
			6.3.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	3.c.	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
					3.d.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat
1.2.	1.2.1.	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	6.3	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah	3.c	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
						mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
			12.2.	Bidang apartur		
			13.3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.d	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
1.2.	1.2.2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	14.10	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	3.g.	Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
			9.1.	Pembangunan Iptek	1.g	Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.
			14.13.	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Tercapainya tingkat TIK literasi nasional		
			14.14.	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Tersedianya layanan e-Pemerintahan dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional dengan memperhatikan prinsip keamanan cyber nasional		
	1.2.3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	13.10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.c.	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
						bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
					3.f	Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
					3.e	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
			8.15	Data dan Informasi Statistik	3.d	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
1.3.	1.3.1	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	8.2.	Keuangan negara	2.e	Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah.
1.4.	1.4.1	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	13.10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.f	Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah
	1.4.2.	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2.	Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3.f	Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah;
					3.a	Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.
					3.b	Meningkatnya perkembangan sis-tem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat yang mandiri
			2.6.	Pembangunan Masyarakat	3.f	Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah;
			7.7.	Kesejahteraan sosial		
	1.4.3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang	7.4.	Pemuda an Olahraga	3.f	Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
		prestasi tingkat regional, nasional dan internasional				aktif dalam pembangunan daerah;
2.1	2.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	2.2.	Pendidikan	1.a	Meningkatnya kualitas SDM, yaitu dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).
					1.b	Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
	2.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	2.3.	Kesehatan	1.c	Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan
	2.1.3	Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	8.9	Perdagangan dalam negri	2.a.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.
			8.7.	Ekonomi Kreatif	2.d	Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industri- alisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
			8.5.	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	2.d	Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industri- alisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
	2.1.4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	13.7.	Kawasan strategis	5.a	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang men- dukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
			14.18	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur : Menjadikan skema KPS sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor.	5.c	Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
	2.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3.5.	Sasaran pembangunan sektor unggulan:	4.c	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
				Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran
			15.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:	4.a	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendu-kung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi.
			15.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian	4.b	Meningkatnya keterpeliharaan ke- kayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
			15.10	Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan	4.d	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
	2.2.2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	15.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:	4.a	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendu-kung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi
			15.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian	4.b	Meningkatnya keterpeliharaan ke-kayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
	2.2.3	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	15.10	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	4.d	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
	2.2.4	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	15.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian	4.b	Meningkatnya keterpeliharaan ke- kayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
3	3.1.1	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	7.7.	Kesejahteraan Sosial	4.c	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.
			3.5.	Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	4.c	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran
	3.1.2	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	4,	Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan	5.a	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang men- dukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
			4.1.	Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi		
			5	Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah	5.c	Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
			5.1.	Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah		
	3.1.3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	14.9	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan : Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN GRK) di sektor transportasi	5.a	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang men- dukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
	3.2.1	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	8.	Sasaran Bidang Ekonomi	2.a	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.
					2.b.	Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
			8.5	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	2.d	Meningkatnya perkembangan per- industrian, perdagangan, pariwi- sata, agrobisnis dan industri- alisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
			8.8	Penguatan Investasi		
	3.2.2	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	8.7.	Ekonomi Kreatif	2.b.	Meningkatnya struktur pereko- nomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
	3.2.3	Meningkatnya ketahanan pangan	15.1.	Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan	2.c.	Meningkatnya ketersediaan kebu- tuhan pokok yang dapat diper- tahankan pada tingkat aman.
			3.1.	Kedaulatan Pangan		
3.3.	3.3.1	Meningkatnya lapangan kerja	4.2.	Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif	2.d.	Meningkatnya ketersediaan kebu- tuhan pokok yang dapat diper- tahankan pada tingkat aman.
	3.3.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	7.7.	Kesejahteraan Sosial	6.b	Menurunnya tingkat pengang- guran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
					6.a	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
			4.2.	Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif		
3.4.	3.4.1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	2.	Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat	6.a	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
			2.1.	Kependudukan dan Keluarga		

Misi/ Tujuan	Kode	Sasaran Pembangunan Kota Magelang	Harmonisasi			
			Kode	Sasaran Nasional	Kode	Sasaran Provinsi Jawa Tengah
				Berencana		
3.5.	3.5.1	menurunnya kesenjangan gender	2.4.	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	6.d	Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender.
4.1.	4.1.1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	7.5	Kebudayaan	6.f	Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Jawa Tengah.
	4.2.1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	8.6.	Pariwisata	2.b.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan arah kebijakan Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata
			3.4.	Pariwisata dan Industri Manufaktur		
5.1.	5.1.1	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	7.6	agama	6.c	Meningkatnya upaya perlindu- ngan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
	5.1.2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	10.1.	Politik Dalam Negeri	6.a	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masya- rakat Jawa Tengah.
			2.6.	Pembangunan masyarakat	6.g	Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah dari segala tindak kejahatan
					6.f	Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Jawa Tengah.
5.2.	5.2.1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	7.6.	Agama	6.c	Meningkatnya upaya perlindu- ngan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

. Dari matrik di atas nampak bahwa seluruh sasaran pembangunan kota Magelang 2016-2021 yang menjadi dasar RKPD 2019 memiliki keterkaitan dengan semua sasaran pembangunan nasiional 2014-2019 yang menjadi dasar RKP 2019, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat.

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2019

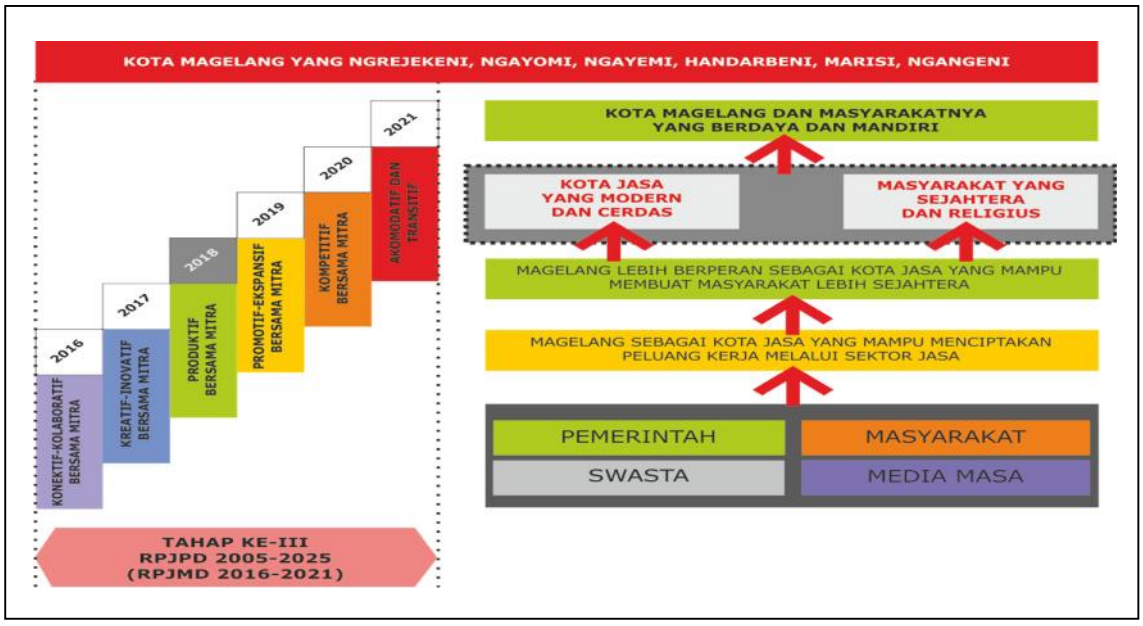
Dalam RKP Tahun 2019, tema pembangunan yang diusung adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan substansi pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Sedangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah, tema pembangunan pada tahun 2019 adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari. Tema dimaksudkan untuk mencapai Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi.

Dengan pendekatan yang sama tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 adalah Produktif Bersama Mitra Tema ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2018 untuk diimplementasikan melalui APBD tahun 2019. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Pada tahun 2017-2018 ini diasumsikan:

(i) Sudah terbentuk tata kelola organisasi pemerintahan dan manajemen kepegawaian sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
(ii) Sudah terbentuk rencana aksi kemitraan.

. Deskripsi komprehensif atas Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2019 nampak pada gambar berikut :



Gambar 4-1

Gambar Tema dan Arah kebijakan Tahun 2019

Selain itu Kota Magelang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dan mendorong serta selaras dengan pencapaian tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional . Gambaran keselarasan antar tema pembangunan nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4-5

Keterkaitan antar tema Pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

Tema RKP Tahun 2019	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2019	Benang Merah keterkaitan
Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	Pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan IPTEK yang makin meningkat	Produktif Bersama Mitra	Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah hasil kreativitas dan inovasi tahun lalu diupayakan untuk naik pada level produktif yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya dengan memberi daya dorong pada perwujudan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun pada RKP Tahun 2019

4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Prioritas pembangunan merupakan pilihan keputusan lokasi dan distribusi sumberdaya yang dimiliki daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan daerah secara terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembanguan daerah. Harmonisasi tersebut diatur dalam amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor : 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tangggal 23 Desember 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Disebutkan bahwa perlu dilakukan integrasi dan penyelarasan prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas secara berjenjang berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara RPJMD-RKPD Kabupaten/Kota dengan RPJMD-RKPD Provinsi dan RPJMN-RKP, serta RPJMD-RKPD Provinsi dengan RPJMN-RKP.

Matrik berikut akan memaparkan peta harmonisasi prioritas pembangunan kota Magelang dengan prioritas nasional dan provinsi. Matrik berikut sebagai ringkasan yang akan dijabarkan pada penjelasan berikutnya.

Tabel 4.6
Harmonisasi Prioritas Pembangunan Kota Magelang tahun 2019 dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Kode	Prioritas Kota Magelang 2019	Harmonisasi			
		Kode	Prioritas nasional	Kode	Prioritas Provinsi
1.	Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan	1	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1	Tata kelola pemerintahan
		4	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	2	Penguatan daya saing ekonomi daerah
				3	Kualitas hidup dan daya saing SDM
				1	Penanggulangan Kemiskinan
2	Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga	2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	7	Tata kelola pemerintahan
		1	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	3	Kualitas hidup dan daya saing SDM
		5	Stabilitas KeamananNasional dan Kesuksesan Pemilu		
3.	Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas	1	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	7	Tata kelola pemerintahan
		5	Stabilitas KeamananNasional dan Kesuksesan Pemilu		
4.	Pelembagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.	3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	6.f	Tata kelola pemerintahan
		5	Stabilitas KeamananNasional dan Kesuksesan Pemilu		Peningkatan daya saing ekonomi daerah

Kode	Prioritas Kota Magelang 2019	Harmonisasi			
		Kode	Prioritas nasional	Kode	Prioritas Provinsi
5	Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa tengah	2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	5.	Penanggulangan kemiskinan
		1	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar		Peningkatan daya saing ekonomi daerah
		5	Stabilitas KeamananNasional dan Kesuksesan Pemilu		Kesenjangan wilayah
6.	Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah	2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	2	Penanggulanagn kemiskinan
		1	Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar		Ketahanan pangan dan energi
		5	Stabilitas KeamananNasional dan Kesuksesan Pemilu		Pengelolaam sumberdaya alam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
		4	Pemantapan ketahan energy, pangan dan sumber daya air		
		3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif		
			Perkembangan iklim investasi dan iklim usaha		
7	Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.	5	Stabilitas KeamananNasional dan Kesuksesan Pemilu		Tata kelola pemerintahan

Sumber: Racangan RKP 2019, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dan SEB Mendagri dan MPPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tangggal 23 Desember 2016

4.2.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014-2019

Memperhatikan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 bahwa di dalam Buku I RPJM Nasional disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi misi nasional tersebut dan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusi dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dang bangkit bersama bangsa bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi kharakter bangsa.
9. Mempertegus kebhinekaan dan mempertkuat restorasi sosial Indonesia.

Kesembilan agenda prioritas tersebut diimplementaiskan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :

a. Dimensi Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharap-kan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berde-dikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

1) Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
2) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
3) Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
4) Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pemerataan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-5,8%;
2. Laju inflasi sebesar 2,5-4,5%;
3. Indeks Gini sebesar 0,38-0,39;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 – 9,5%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8%-5,2%

4.2.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2019

Secara lebih spesifik dalam RKP Tahun 2019, tema yang diusung adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Tema dimaksud untuk menjawab beberapa isu strategis yang harus di solusikan pada tahun 2019 antara lain :

1) Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1 digit
2) Pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui pembangunan konektivitas dan sektor unggulan
3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industry, pariwisata, dan ekonomi kreatif
4) Pemenuhan kebutuhan energy primer, pangan dan sumber daya air
5) Pertahanan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis

Oleh karena itu pada tahun 2019 Pemerintah menempatkan 5 prioritas nasional adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4) Pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya air
5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

4.2.1.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Tahun 2018 yang merupakan tahun kelima RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2019 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk "Pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan IPTEK yang makin meningkat",

Tema tersebut sebagai pendekatan solusi atas 7 (tujuh) isu strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Daya saing ekonomi
3. Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia
4. Kedaulatan pangan dan energy
5. Kesenjangan wilayah
6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
7. Tata Kelola Pemerintahan

Dengan mendasarkan pada pemecahan isu tersebut maka prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan pada:

1. Penanggulan kemiskinan, dengan fokus pada :
   a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan : akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.
   b. Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
   c. Perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.

2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada :
   a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (corporate farming),
   b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan.
   c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
   d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM.
   e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui : perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.
   f. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.

3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, dengan fokus pada :
   a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi.
   b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan).
   c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui : penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada :
   a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui : pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan Minerba dengan reklamsi lahan bekas pertambangan, perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
   b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi penganggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

5. Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada :
    a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui: peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajeman dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu pangan yang berkualitas serta memenuhi standar, sertifikat aman dan layak pasar; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.
    b. Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; Pengembangan Listrik Murah dan Hemat; Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya.

6. Kesenjangan Wilayah, dengan fokus pada :
    a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan yang menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
    b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
    c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam RTRWP dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula PKL menjadi PKWp.
    d. Mengoptimalkan potensi kelautan dengan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

7. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada :
    a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
    b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
    c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja

kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya clean and clear government dan menerapkan "keperantaraan dan enterpreuneur" dalam tata kelola pemerintahan.

d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

4.2.1.3 Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Tema Tahun perencanaan 2018 yang merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Magelang adalah Produktif Bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2017-2018 diasumsikan bahwa :

a. sudah terbentuk sistem basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana aksi daerah dan pengukuran kinerja terintegrasi.
b. sudah terbentuk kesediaan kerjasama kemitraan: dengan dunia usaha, media, forum warga masyarakat.

Tema tersebut mencoba untuk mengatasi berbagai isu strategis pada tahun 2019 sebagai berikut :

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
c. Penguatan reformasi birokrasi;
d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

Jika disandingkan antara isu strategis level nasional, provinsi dan kota Magelang pada tahun 2019 akan nampak koneksitas siu strategis sebagai berikut :

Tabel 4-7

Koneksitas antar isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No	Isu Strategis		
	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
1	Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1 digit	▪ Kemiskinan ▪ Kualitas dan daya	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan

No	Isu Strategis		
	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
		saing Sumber daya manusia	dasar
2	Pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui pembangunan konektivitas dan sektor unggulan	Kesenjangan wilayah	Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industry, pariwisata, dan ekonomi kreatif	▪ Daya saing ekonomi ▪ Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal ▪ Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
4	Pemenuhan kebutuhan energy primer, pangan dan sumber daya air	Kedaulatan pangan dan energy	▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5	Pertahanan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis	Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan reformasi birokrasi Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah

Sedangkan fokus prioritas tahap ini:

1) Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan:

   a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi,

   b. pendidikan,

   c. kesehatan

2) Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga.

3) Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.

4) Pelembagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.

5) Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.

6) Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejarpencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.

7) Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dengan demikian dapat diilustrasikan keterkaitan antar fokus prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

Tabel 4-8
Keterkaitan antara Fokus prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Magelang
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Penanggulan kemiskinan Penguatan daya saing ekonomi daerah	Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga
2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektitivitas dan kemaritiman	Tata kelola pemerintahan	
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian industri dan jasa produktif	Kesenjangan Wilayah Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM	Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha Pelembagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan
4	Pementapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	Ketahanan pangan dan energi	Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

4.2.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya.
2) Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
3) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencananaan dan penganggaran daerah.
4) Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat.
5) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.
6) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi.
7) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi.
8) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
9) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola asset.
10) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota.
11) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah.
12) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
13) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan.
14) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan.
15) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
16) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.
17) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
18) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender.
19) Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.

20) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipai resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.

Perbedaan arah kebijakan perencanaan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah pada tahapan aksi pencapaian kinerja sasaran. Tahun 2019 sudah mulai dilakukan eksekusi program kegiatan yang merupakan implementasi rencana aksi yang dihasilkan pada tahun 2018.

Hubungan antara fokus prioritas dengan arah kebijakan dapat disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4-9
Keterkaitan antara Fokus Prioritas dengan Arah Kebijakan Tahun 2019

FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan: a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, b. pendidikan, c. kesehatan	▪ Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan. ▪ Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ▪ Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola asset ▪ Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah. ▪ Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat. ▪ Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan. ▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan. ▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender. ▪
Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga	▪ Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya ▪ Penataan organisai perangkat daerah (sotk) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur ▪ Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi. ▪ Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi ▪ Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota. ▪ Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.

	▪
Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.	▪ Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi. ▪ Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat
Pelembagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.	▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.	▪ Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.
Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejarpencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.	▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan. ▪ Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman	▪ Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencananaan dan penganggaran daerah. ▪ Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.

Jika dikaitkan dengan isu strategis, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2019 ini akan mampu menjawab isu strategis dengan keterkaitan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-10
Konsistensi Fokus Prioritas dalam Menjawab Isu Strategis

FOKUS PRIORITAS	ISU STRATEGIS TAHUN 2019
Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan: a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, b. pendidikan, c. kesehatan	▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi) ▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri
Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga	▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.	▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi) ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
Pelembagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.	• Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.	▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejarpencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.	▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ▪ Penguatan reformasi birokrasi
Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman	▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal

4.2.1.3.2 Prioritas Urusan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2018 untuk diimplementasikan tahun 2019 adalah:

a. Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
b. Urusan pendidikan;
c. Urusan kesehatan
d. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. Urusan sosial;
g. Urusan penanaman modal;
h. Urusan komunikasi dan informatika;
i. Urusan perdagangan;
j. Urusan perindustrian;
k. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
l. Urusan kebudayaan;
m. Urusan pariwisata;

4.2.1.3.3 Program Unggulan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Sedangkan Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2018 untuk dilaksanakan tahun 2019 adalah:

a. Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
b. Program peningkatan daya saing daerah;
c. Program kota cerdas;
d. Program pemerintahan responsif dan partisipasif;
e. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
f. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
g. Program penguatan pertumbuhan ekonomi;
h. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
i. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2019 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi Walikota Magelang, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

Tabel 4. 11
Koneksitas antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Tengah, Prioritas Tema Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019, dan isu strategis

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
I. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu yang diprioritaskan pada Revolusi Mental, pembangunan kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Permukiman	3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, dengan fokus pada : a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas	A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar dengan fokus pada : 1. Penurunan Angka kemiskinan 2. Pengurangan pengangguran dan pencipataan langan kerja 3. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan 4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan B. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi). 1. Pemuda dan Olah Raga 2. Membangun Kemitraan 3. Penerapan dan perwujudan keadilan gender dan perlindungan anak 4. Pemerataan Pembangunan C. Pengembangan dan pemanfaatan potensi	1. Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga 2. Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan 3. Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah 4. Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi. b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan). c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui : penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); sertifikasi kompetensi berstandar	daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan: 1. Pengelolaan sampah D. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; 1. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah 2. Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi 3. Smart City 4. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Branding Kota Magelang	kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.		
i. Pembangunan Sektor unggulan diprioritaskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kemaritiman dan kelautan, pembangunan kedaulatan energy, pembangunan pariwisata, percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK)	5.Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada : a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui: peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajeman dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan pengembangan diversifikasi pangan,	E. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri 3. Ketahanan Pangan	Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu pangan yang berkualitas serta memenuhi standar, sertifikat aman dan layak pasar; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen. b. Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; Pengembangan Listrik Murah dan Hemat; Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya.		
	2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada : a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: peningkatan keterampilan	F. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri 1. Industri Perdagangan	1. Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (corporate farming), b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan. c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman	2. Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan G. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan; 1. Kebudayaan 2. Pariwisata	masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah 2. Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan 3. Pelembagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu. d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM. e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui : perbaikan prasarana dan sarana, serta		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata. f. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.		
III. Pemerataan dan kewilayahan meliputi pemerataan antar kelompok pendapatan, reformasi agraria, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan	6. Kesenjangan Wilayah, dengan fokus pada : a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan yang menghubungkan pantura –	H. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi). 4.Pemerataan Pembangunan I. Pengembangan dan pemanfaatan potensi	1. Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, pembangunan konktivitas nasional	pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun). b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya. c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam RTRWP dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula PKL menjadi PKWp.	daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan: 1. Pengelolaan sampah	kategori baik di provinsi Jawa Tengah 2. Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga 3. Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	d. Mengoptimalkan potensi kelautan dengan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)		
	1. Penanggulan kemiskinan, dengan fokus pada : a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan : akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan. b. Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. c. Perkuatan basis data, basis spasial, berbasis	J. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar dengan fokus pada : 5. Penurunan Angka kemiskinan 6. Pengurangan pengangguran dan pencipataan langan kerja 7. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan 8. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan K. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri 1. Industri Perdagangan 2. Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan 3. Ketahanan Pangan	Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.		
	4.Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada : a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui : pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan Minerba dengan reklamsi lahan bekas pertambangan, perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran		1. Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau. b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi penganggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.		
IV Pembangunan politik hukum pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, Stabilitas keamanan dan ketertiban, Konsolidasi demokrasi dan Efektifitas Demokrasi, Reformasi Birokrasi	7. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada : a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik; b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan	C. Penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 2. Perngelolaan Aset Daerah 3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 4. Penataan Organisasi 5. Penataan Tatalaksana 6. PenataanSistem Manajemen SDM Aparatur 7. Penguatan Pengawasan 8. Penguatan Akuntabilitas Kinerja L. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah	1. Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN; c. kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya clean and clear government dan menerapkan "keperantaraan dan enterpreuneur" dalam tata kelola pemerintahan. d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.		
1. Pembangunan Ekonomi diprioritaskan pada Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, peningkatan ekspor non migas, Reformasi Fiskal	2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada : a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit,	M. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; c. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah d. Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi	1. Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (corporate farming), b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan. c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan	e. Smart City f. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi g. Branding Kota Magelang	

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu. d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM. e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui : perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata;		

Prioritas Nasional/Cita/Strategi pembangunan nasional	Prioritas Provinsi	Isu Strategis Kota Magelang Tahun 2019	Prioritas Daerah Tahun 2019
	meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata. f. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.		

4.2.1.3.5 Koneksitas Sasaran, Program Prioritas Pembangunan Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Jika dilihat dari Sasaran dan Program Prioritas Kota Magelang terhadap dukungan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2019 dan Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12

KONEKSITAS PRIORITAS SASARAN, PROGRAM KOTA MAGELANG TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang ndemicial dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	Persentase pegawai berkinerja baik	97,5%	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Persentase kehadiran ASN	97,5%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,20%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,08%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase unit kerja yang menerapkan finger print	95%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang dan Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan:				Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											Pemilu	
							- Pendidikan S1	48%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
							- Pendidikan S2	9,5%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
						2	Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakn oleh BKD	100	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
					Program Pendidikan Kedinasan	1	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	96%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	1	Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											Pemilu	
						2	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	90%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				1	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas	1	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	90%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	1	Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	97%	Fungsi Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Capaian SPM Kota Magelang	70%	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	persentase SPM yang mencapai target nasional	70%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Tata Organisasi/ Tapem	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	52%	1	Optimalisasi sistem persandian daerah	1	Ketersediaan SOP persandian	100%	Persandian	PD Urusan Persandian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kesenjangan Wilayah
						2	Tingkat kapasitas SDM persandian	2	Persandian	PD Urusan Persandian	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
						3	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SOP Persandian	28	Persandian	PD Urusan Persandian		
				1	Program peningkatan kualitas pelayanan arsip	1	Cakupan pelayanan acces arsip	78%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Tingkat Komptensi SDM Pengelola Kearsipan	45%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan		
				1	Program Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	1	persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	69%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarpras Kearsipan	1	Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,79	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											Pemilu	
				1	Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	1	Persentase Penyelamatan Arsip	60%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	1	Cakupan ijin penggunaan arsip	90%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	1	Publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Persentase penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	95%	Penunjang pemerintahan	PD Penunjang Pemerintahan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
		Indeks EKPPD	3,1	2	Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan	2	Persentase penyelenggaraan urusan berkinerja sangat tinggi	90%	Penunjang pemerintahan	PD Penunjang Pemerintahan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
		Hasil implementasi SAKIP	CC (56,00)	1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Nilai hasil evalusi LKJip SKPD	BB	Penunjang Pemerintahan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	55%	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Penurunan temuan kasus LKPD	1	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
		Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	87%	Penunjang Keuangan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	2	Tingkat kapasitas pemahaman tentang SAKIP	85%	Penunjang Pemerintahan	PD Penunjang Setda Bagian Tata Organisasi	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	85%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	Prosentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	85%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	rasio laporan APBD, DAK, Bankeu tepat waktu	95%		PD Penunjang Setda Bagian Pembangunan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	BB	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Prosentase jumlah SKPD yang di review LkjIP	55%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	40%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	70%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan	1	Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	96%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
					kebijakan KDH	2	Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	40%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
						3	Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
						4	Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	100%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
				1	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 3	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	70%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
						3	Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	75%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
				1	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	Cakupan pemeriksaaan	70%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Persentase implementasi SPIP	84%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase Temuan Administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP menurun	70%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
						3	Persentase Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIP menurun	40%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan		
				1	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1	Persentase Aparat SPIP aktif	70%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase Zona Integritas yang dibentuk	30%	Penunjang Pengawasan	PD Penunjang Pengawasan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
1.3	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan ndemi yang responsif	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	60,60%	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Nilai survey kepuasan pengguna layanan PD	95	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Organisasi	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3		2	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	75%	Penunjang/ Fungsi Lain	Fungsi lain :PTSP	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Tingkat ketersediaan pokok-pokok pikiran Dewan	100%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				2	Program Pengembangan Data/ Informasi	1	Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	90%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				3	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1	Persentase Penyebaran Informasi	90%	Penunjang	PD Penunjang Setwan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1	Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Umum	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Cakupan penduduk memiliki memili KTP-el	100%	Adminduk dan Capil	PD Urusan Adminduk dan Capil	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
							Cakupan penduduk memiliki memili KIA	100%			Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	
						2	Persentase implementasi SOP dalam pelayanan administrasi kependudukan	60%	Adminduk dan Capil	PD Urusan Adminduk dan Capil	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	
				1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 penduduk	940	Adminduk dan Capil	PD Urusan Adminduk dan Capil	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase kepemilikan KK	100%	Adminduk dan Capil	PD Urusan Adminduk dan Capil	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											Pelayanan Dasar	
				3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase kepemilikan Akta Kematian	60%	Adminduk dan Capil	PD Urusan Adminduk dan Capil	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
1.4	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase PD menerapkan e-Gov	90%	1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Interoperabilitas antar system informasi	4	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Kesenjangan Wilayah
		Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	70%									
				1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	75%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Kesenjangan Wilayah
				1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika	1	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	80%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											penguatan konektivitas dan kemaritiman	
						2	Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	
				2	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1	Peningkatan SDM bidang kominfo	80%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang tehnologi informasi	80%	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Kominfo	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46	Penunjang	PD Penunjang Kepegawaian	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	1	Presentase implementasi e-arsip	69%	Kearsipan	PD Urusan Kearsipan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
1.5	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	93%	1	Program perencanaan Pembangunan Daerah	1	Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase Pokok Pikiran DPRD yang diakomodir	80%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		
		Persentase Publikasi data dan ndemici sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	80%			3	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	80%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				2	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				3	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				4	Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				5	Perencanaan bidanag fisik prasarana	1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik prasarana	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Kesenjangan Wilayah
				6.	Program Penguatan Inovasi Daerah	1	Cakupan Penguatan SIDa	55%	Penelitian dan Pengembangan	PD Urusan Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program pengembangan data/informasi/ndemici daerah	1	Persentase pemenuhan data	95%	Statistik	PD Urusan Statistik	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
1.6	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan ndem daerah	Derajat Otonomi Fiskal	31,96%	1	Peningkatan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah	1	Rasio pajak daerah terhadap PAD	12,33%	Penunjang	PD Penunjang Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											pertanian, industry dan jasa produktif	
						2	Rasio retribusi daerah terhadap PAD	3,33%	Penunjang	PD Penunjang Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	
		Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	67.45%	1	Program Peningkatan kinerja dan pengembangan pengelolaan perusda	1	Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD	2,54%	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Perekonomian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Persentase pertumbuhan PAD	12,83%	Penunjang	PD penunjang Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
											Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	70%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Barang milik daerah yang didayagunakan	100%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
						3	Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
						4	Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%		PD Penunjang Setda Bagian Perlengkapan		
1.7	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	65%	1	Program perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	80%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
		Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	75,86%			2	Persentase Partsisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	45%	Penunjang	PD Penunjang Perencanaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase perkembangan kerjasama daerah	4,76%	1 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat		1 Persentase krenova masyarakat yang berkualitas		17%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
							Presentase krenova OPD yang berkualitas	8%				
				2 Program Penelitian dan Pengkajian		1 Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti		40%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				3 Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK		1 Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK		15%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	
				4 Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan		1 Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan		55%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				5	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	1	Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	15%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	1	Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	7%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	
				7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	1	Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	12%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				8	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	1	Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	70%	Penunjang	PD Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif	
				1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Jumlah KIM per kelurahan	1	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Informasi dan Komunikasi	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
											konektivitas dan kemaritiman	
				1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan untuk interaksi	7	Informasi dan Komunikasi	PD Urusan Informasi dan Komunikasi		
											Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	1	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	Penunjang Pemerintahan umum	PD Penunjang Pemerintah umum	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				2	Program Kerjasama Pembangunan	1	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	4	Penunjang Perencanaan Pembangunan	PD Penunjang Perencanaan Pembangunan	Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Kesenjangan Wilayah
1.8	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan	48%	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	Cakupan LPM berprestasi	52%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	47%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		bersama pemerintah		2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100,00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				4	Program Infrastruktur Pedesaan	1	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				5	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	1	PKK aktif	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	41,12%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				2	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	1	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
1.9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	7	1	Peningkatan peran serta kepemudaan	1	Prosentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95,00%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		a. Regional	5			2	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		b. Nasional	2			3	Prosentase pengangguran pemuda	6,15%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		c. International	0	1	Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda	1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	85%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan	17	2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup bagi pemuda	1	Persentase kelompok wirausaha pemuda	75	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		internasional										
		a. Regional	10	1	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	5	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
		b. Nasional	5			2	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	77%	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
		c. International	2	2	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1	Peningkatan cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						3	Jumlah klub olah raga	183	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
						4	Jumlah organisasi olah raga	35	Kepemudaan dan Olah Raga	PD Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
	Misi 2 : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan											

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	Rata-rata lama sekolah	10,50	1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	APM SD/SDLB/MI/Paket A	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	APK SD/SDLB/MI/Paket A	116%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						3	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	80%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						4	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	90%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						5	Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:136	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						6	Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	1:290	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						7	Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						8	Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,04	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						3	Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9 Tahun	0,001	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						4	Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		Persentase sekolah berstandar nasional				5	Angka Melanjutkan SMP ke SMA	160%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		a. SD	50,66%			6	Persentase sekolah yang menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai ndemici dan pendidikan karakter bagi siswa	70%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		b. SMP	80%			7	Penurunan angka kenakalan pelajar	36 pelajar	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		Angka Melek Huruf	98,31%			8	Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa		Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase kunjungan perpustakaan	72,52%			9	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	90%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
		Jumlah kunjungan perpustakaan	100.113			10	Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	90%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						11	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	40%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD	67%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	54%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1	Program Pendidikan Non Formal	1	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	97,31%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						3	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						4	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						5	Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	20%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35,75%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						1	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,23%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						1	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						1	Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	54,15%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						1	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,20%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						1	Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	67,97%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	92%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	98%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						3	Prosentase sekolah melaksanakan CBT SD/MI	40%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						4	Prosentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs	60%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1	Program Pendidikan Berkelanjutan	1	Persentase pandemic pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	100%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	50%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Persentase peningkatan judul buku	9,28	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Persentase peningkatan jumlah buku	6,26	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
						3	Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	56,87%	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
						4	Presentase perpustakaan aktif	23,70%	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
						5	Cakupan pelayanan melalui e-Library	3%	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
						6	Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	16,67%	Perpustakaan	PD Urusan Perpustakaan		
						7	Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
						8	Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	90%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
2.2	Meningkatnya kualitas sarana, layanan dan derajat kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	13 bh (100%)	1	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	1	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	AA	Kesehatan	RSU Tidar	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	80%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	87,5%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Angka Harapan Hidup	76,8	4	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1	Cakupan Puskesmas Ramah Anak	24%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		AKI/ 1.000 KH	110	5	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1	Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	24%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		AKB/ 1.000 KH	13.5	6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		AKABA	0,145	1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4	95%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31			2	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Angka Kesakitan DBD	<0.50			3	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	92%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Angka Prevalensi Kasus TB	<103			4	Cakupan Pelayanan Nifas	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
		Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,05%	2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1	Cakupan pandemic dengan komplikasi yang ditangani	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	98%			2	Cakupan Kunjungan Bayi	96%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						3	Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	cakupan balita gizi buruk mendapar perawatan	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						3	Prevalensi Gizi Buruk	<0.31	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				4	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1	Penemuan dan penanganan Penderita DBD	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Angka Kesakitan DBD	<50	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1	Angka Prevalensi (Case Notification Rate = CDR) TB	90	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Success Rate = TSR) TB	90%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						3	Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						4	Prevalensi Hiv dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
						3	Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarkes strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	80%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
				7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				8	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	1	Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	88%			Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				9	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1	Cakupan pengawasan obat dan makanan	72%			Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				10	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1	Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%			Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				11	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	98%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				12	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1	Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		
2.3	Meningkatnya kontribusi sektor ndemic usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	16,65%	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	1	prosentase peningkatan kualitas pelaku UKM	5%	Wajib Koperasi UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1	program peningkatan kemampuan teknologi industri	1	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,14%	Pilihan – perindustrian	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1	Prosentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	5%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1	Program penciptaan ilkim usaha kecil menengah yang kondusif	1	Prosentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%	Wajib –	PD Urusan Koperasi UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
									Koperasi UKM			
				1	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	1	Prosentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	4%	Wajib –	PD Urusan Koperasi UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
									Koperasi UKM			
				1	Program pengelolaan pasar	1	persentase pasar tradisional yang dikelola	80%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2	Persentase penurunan kejadian pandemik di lingkungan pasar	23%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
						3	Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						4	Cakupan Pedagang Pasar yang dibina	12%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
				1	Program pembinaan PKL dan asongan	1	Cakupan PKL yang dibina	12%	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2	Jumlah shelter PKL yang dikelola	15	Pilihan – perdagangan	PD Urusan Perdagangan		
2.4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)	40%%	1	Program wajar dik das 9 tahun	1	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	40%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	30%	1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1	Persentase Sarana Prasarana Kesehatan memenuhi universal design	30%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	40%	1	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Persentase Sarana Prasarana Perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang yangmemenuhi universal design	60%	Perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
2.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	75,8	1	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	40%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
				1	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	Persentase Sumber Daya Alam yang terkonservasi	67,7%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
		Indeks Pencemaran Udara	77,7	1	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	1	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 buah	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Indeks Tutupan Vegetasi	49,05	1	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1	Jumlah Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
		Volume sampah yang dibuang ke TPSA	153,7									Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
				1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	5,3	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
				1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	90%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
				1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1	Persentase rumah sehat	84,8%	Kesehatan	PD Urusan Kesehatan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	Luas lahan pertanian organik	1,03	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
						2	Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	58,50%	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
				1	Program peningkatan penerapan teknologi petemakan	1	Jumlah pelaku usaha peternakan ndemic:				Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
							a. Peternak ayam buras/ ayam broiler	3	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
							b. Peternak kelinci	3	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
							c. Peternak kambing/domba	3	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
							d. Rasio peternak terlatih	85%	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
				2	Program pengembangan system penyuluhan perikanan	1	Luas lahan perikanan organik	0,4	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
2.6	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau		1	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1	Luas RTH Kota	18%	Lingkungan Hidup	PD Urusan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		a. Privat	10%									
		b. Publik	18,44%									
2.7	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	12,08%	1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1	Cakupan masyarakat paham mitigasi bencana	75%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	17,64%			2	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	42,5%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
						3	cakupan peningkatan penanggulangan bencana	75%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		
						4	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	17,64%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						1	Cakupan penanganan korban becana	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas		
				1	Program penataan peraturan perundangan	1	Ketersediaan kebijakan terkait penanggulangan bencana	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				2	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran	100%	Perumahan dan Pemukiman (bencana alam)	PD Urusan Perumahan dan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						2	Persentase tingkat waktu tanggap response	100%	Perumahan dan Pemukiman (bencana alam)	PD Urusan Perumahan dan Permukiman		
2.8	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	26%	1	Program Perencanaan Tata Ruang	1	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PD Urusan PU dan Tata Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						2	Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						3	Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						4	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	26%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						5	Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	8%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						6	Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	35%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				2	Program Pemanfaatan Ruang	1	Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	80%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3	Program pengembangan wilayah perbatasan	1	Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	90%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat											
3.1	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	Rasio Infrastruktir Perkotaan dalam Kondisi baik	84%	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	1742 m	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				1	Program rehabilitasi/pemeliharaa n Jalan dan Jembatan	1	Prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	94%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						2	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	92%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	66,65%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	1	Rasio ketercukupan PJU	67%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sektor Unggulan	Kesenjangan Wilayah
				1	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1	prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	86%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						2	jumlah shipon yang dibangun	7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				1	Program pembangunan jalan dan jembatan	1	Prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik	66,65%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				2	Program rehabilitasi/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong		prosentase panjang drainase dalam kondisi baik	86%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				1	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	1	Prosentase perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				2	Program pengaturan jasa konstruksi	2	Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	80%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				3	Program pengawasan jasa konstruksi	1	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	76%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						1	Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3,manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien)	25%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.2	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Persentase penyediaan perumahan bai masyarakat	11%	1	Program Pengembangan Perumahan	1	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan
		Tercapainya 100 – 0 - 100		1	Program Pengembangan Perumahan	1	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	100%									
		b. Rasio Luas kawasan kumuh	0 Ha	1	Program Pengelolaan Area Pemakaman	1	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	22,6%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
		c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	0%	1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1	Prosentase penduduk berakses air minum	100%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		Prosentase RTLH	1,70%									
				1	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1	Rasio Luas kawasan kumuh	0 ha	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	90	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	10	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
3.3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8,75	1	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan umum	8,5	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						2	Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi (ITS)	75%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
				1	Program peningkatan pelayanan angkutan	1	jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	5%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
				2	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	75%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	2	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
						3	Rasio prasarana parker dengan kondisi baik	78%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
						4	Tingkat pelayanan parker di tepi jalan umum	93	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
						5	Rasio prasarana dengan kondisi baik	78%	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
						6	Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	19	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		
				3	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasara dan fasilitas LLAJ	1	Jumlah prasaran dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
				4	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1	Jumlah kendaraan bermotor wajib ujiu yang laik jalan	8036	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah
						2	Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	4	Perhubungan	PD Urusan Perhubungan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.4	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan investasi		1	Program penataan peraturan perundang-undangan	1	Jumlah review PERDA/ PERWAL	1	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
		a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	10%			2	Jumlah RAPERDA/ RAPERWAL baru tentang investasi	0	Penunjang	PD Penunjang Setda Bagian Hukum		
		b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	1	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	4	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
				2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	10%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
						2	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15,00%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
						3	Jumlah investor baru	172	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
				1	Program optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi	1	Implementasi pemanfaatan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik)	80%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	100%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal		
				2	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	Penanaman Modal	PD Urusan Penanaman Modal	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	1	Jumlah wirausaha baru	100 UMKM	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2	Prosentase peningkatan kualitas pelaku usaha KUM	3%	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM		
				1	Program pengembangan ndemic kecil dan menengah	1	Peningkatan daya saing IKM Formal	3,2%	Perindustria n	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				2	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1	Persentase koperasi aktif	93,6%	Perdaganga n	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2	Persentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	30%	Koperasi dan UKM	PD Urusan Koperasi dan UKM		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3	program pengembangan sentra-sentra ndemic potensial	1	Jumlah sentra industri	13	Perindustrian	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1	Jumlah IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI dll)	4,20%	Perindustrian	PD Urusan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1	Jumlah ekspor produk LN	US$1.150.000	Perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1	program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1	Jumlah alat UTTP yang ditera	2.900	Perdagangan	PD Urusan Perdagangan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
				1	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1	Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	23,53%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1	Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	6%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				4	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1	Rasio petani terlatih	90%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1	Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	1,82	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				1	Program pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	1	Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	3,03%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				1	Program pengembangan budidaya perikanan	1	Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	50%	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
						2	Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	50%	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan		
				2	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1	Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP	0	Kelautan dan Perikanan	PD Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
						2	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	4	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	6	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
3.5	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	80%	1	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	1	Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	17%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Presentase krenova OPD yang berkualitas	8%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan		
						3	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti	40%	Penunjang	PD Penunjang Kelitbangan		
		Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	30%	2	Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				3	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah				Penunjang Sekretariat	PD Penunjang Setda Bagian Tapem	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				4	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	Persentase kawasan strategis yang terbangun	4 kawasan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan dan Kewilayahan	Kesenjangan Wilayah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				7	Program pembinaan PKL dan asongan		Cakupan PKL yang dibina	12%			Pembangunan Ekonomi	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
							Jumlah shelter PKL yang dikelola	15				
3.6	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.933	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	1	Jumlah regulasi ketahanan pangan	2	Pangan	PD Urusan Pangan	Pembangunan Sektor Unggulan	Ketahanan Pangan dan Energi
						2	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%	Pangan	PD Urusan Pangan		
							Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,60	Pangan	PD Urusan Pangan		
						3	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%	Pangan	PD Urusan Pangan		
				2	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1	Produksi tanaman pangan:				Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
							a. Padi	3160	Pertanian	PD Urusan Pertanian		
							b. Jagung	11				
							c. Ubi kayu	13,5				

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1	Produksi hasil peternakan:		Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
							a. Daging Ruminansia	1.289.554				
							b. Daging Unggas	5.610.449				
							c. Telur	460.000				
							d. Susu	201.400				
				3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1	Persentase hewan sehat	85%	Pertanian	PD Urusan Pertanian	Pembangunan Ekonomi	Ketahanan Pangan dan Energi
				4	Program pengembangan budidaya perikanan	1	Produksi hasil perikanan:		Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan	Pemerataan dan Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
							a. Ikan	164,2	Kelautan dan Perikanan	PD Urusan Kelautan dan Perikanan		
3.7	Meningkatnya lapangan kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	65%	1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Persentase pencari Kerja ditempatkan	75%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja	Pemerataan dan Kewilayahan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	75%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
						3	Pertumbuhan wirausaha baru	7%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						4	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	75%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
						5	Persentase Tenaga Kerja tersertifikasi BNSP	65%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
				2	Program Perlindungan pengembangan ketenagakerjaan	1	Cakupan tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial	70%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja	Pemerataan dan Kewilayahan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang bisa terselesaikan melalui perjanjian bersama	50%	Urusan Tenaga Kerja	PD Urusan Tenaga Kerja		
				1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	Persentase (%) calon transmigrasi yang tertempatkan	100%	Transmigrasi	PD Urusan Transmigrasi	Pemerataan dan Kewilayahan	Penanggulangan Kemiskinan
				2	Program Transmigrasi Regional	1	Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%	Transmigrasi	PD Urusan Transmigrasi	Pemerataan dan Kewilayahan	Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.8	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	Persentase Penurunan PMKS	17%	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	13%	Sosial	PD Urusan Sosial	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan
				2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1	Persentase penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	30%	Sosial	PD Urusan Sosial	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	35%	Sosial	PD Urusan Sosial	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan
				4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	80%	Sosial	PD Urusan Sosial	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	40%	Sosial	PD Urusan Sosial		
				4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	Sosial	PD Urusan Sosial	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	67%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	1	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Pembangunan Ekonomi	Penanggulangan Kemiskinan
					Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya							
				3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan	5	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							sosial				Pemilu	
				4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan
3.9	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	1	Program Keluarga Berencana	1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan
				2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1	Persentase perempuan di bawah 19 tahun yang menjadi ibu dan atau melahirkan anak pertama	2%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan
				3	Program pelayanan kontrasepsi	1	Cakupan peserta KB aktif	79%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	68%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan
				5	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penanggulangan Kemiskinan
				6	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	77%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
						2	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5%	5%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	77%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						4	Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	88%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							yang ber-KB (87%)					
						5	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						6	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						7	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						8	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							100% setiap tahun					
						9	Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	12%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						10	Prosentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	62%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						11	Prosentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	10%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						12	Prosentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	2%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						13	Prosentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga	90%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							Balita (BKB)					
						14	Prosentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	97%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						15	Prosentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						16	Prosentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						17	Prosentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						18	Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						19	Prosentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dai 35 tahun	1%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						20	Prosentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						21	Prosentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						22	Prosentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
3.10	Menurunnya kesenjangan gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	23%	1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	1	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	23%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	26%			2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	26%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak		
		Rasio KDRT	0,050%			3	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	79%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak		
				2	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1	Rasio KDRT	0,04%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak		
						3	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak		
						4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak		
						6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak		
						7	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						8	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak		
	Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang											
4.1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkandan situs cagar budaya yang dilestarikan	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15%	1	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	227	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penguatan daya saing ekonomi daerah
		Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	15	2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,77%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penguatan daya saing ekonomi daerah
						2	Jumlah festival seni dan budaya.	13	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		Penguatan daya saing ekonomi daerah
				3	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	Jumlah gedung kesenian	1	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penguatan daya saing ekonomi daerah
						2	Sarana penyelenggaraan seni	13	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							dan budaya					
						3	Cakupan kajian seni 50%	77%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						4	Cakupan fasilitas seni 30%	39%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						5	Cakupan gelar seni 75%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						6	Misi kesenian 100%	43%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						7	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	79%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						8	Cakupan tempat 100%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						9	Cakupan organisasi 34%	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
				1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Penguatan daya saing ekonomi daerah
						2	Jumlah pengunjung museum	5350	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
						3	Jumlah koleksi museum	13	Kebudayaan	PD Urusan Kebudayaan		
4.2	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	Jumlah Wisatawan		1	Program pengembangan destinasi pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1139961	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019		PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		a. Nusantara	1.139.961			2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5201	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata		
		b. Mancanegara	5.201			3	Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	5	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata		
				1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Lama Kunjungan Wisatawan	2-4 hari	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
						2	Persentase TIC yang representatif	100%	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata		
				2	Program pengembangan kemitraan	1	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	11	Pilihan – Pariwisata	PD Urusan Pariwisata	Pembangunan Sektor Unggulan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
	Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani											
5.1	Terbentuknya karakter ndemici masyarakat landasan moral dan etika pembangunan	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%	1	Program penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Antar Umat Beragama	1	Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial	4	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas dan PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				2	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama	1	jumlah kegiatan hari besar keagamaan tingkat kota	66,67	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				3 Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa		Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah		Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						a. Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan				
						b. Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1 Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama	1	Jumlah Kebijakan / peraturan tentang pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat	1	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar ndemic Tahun	1	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran	1	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							di semua tingkatan					
						2	Adanya kurikulum muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter bagi siswa	1	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan		
				1	Program Peningkatan Mutu pendidikan dasar Sembilan tahun	1	Prosestase guru yang mengkikuti pelatihan spiritual teaching	50%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Prosentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	70%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program pendidikan Non Formal	1	Persentase Sekolah yang menerapkan kegiatan Bina Suasana yang menumbuhkan nilai religious dan pendidikan karakter bagi siswa	70%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program pendidikan Non Formal	1	Penurunan jumlah pelaku kenakalan dan tindak kriminalitas pelajar	25%	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Jumlah Pelajar berprestasi	48	Pendidikan	PD Urusan Pendidikan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				2	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	2	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	8	Pemuda dan Olahraga	PD Urusan Pemuda dan Olahraga	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1	Prosentase peningkatan jumlah keluarga sejahtera	90%	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	18	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				2	Program Penyiapan pendamping kelompok bina keluarga	1	Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	50%	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PD Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Penguatan Kelembagaan pengarustamaan Gender dan anak	1	Cakupan kelompok Sadar Ketahan Keluarga	50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD UrusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM
				1	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama	1	Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan bina suasana dan kegiatan – kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing – masing di tiap SKPD	50%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
				1	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama	1	Prosentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur	5%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		
5.2	Terwujudnya lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat	Angka kriminalitas	12,14%									
		Prosentase penurunan kasus narkoba	3%									

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019		PROGRAM		INDIKATOR	TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		Angka kriminalitas yang tertangani	12%									
		Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100%									
				1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Keberadaan kebijakan yang mengatur control informasi media massa	0	Kominfo	PD Urusan Kominfo dan PD Urusan Trantibum Linmas (Kesbangpolinmas dan Satpol PP)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				2	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham – paham yang tidak sesuai dengan nilai ndemici dan nilai – nilai luhur Pancasila	0	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1	Perda yang mengatur Kontrol Tempat Hiburan	-	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas dan PD Urusan Pariwisata	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
							Perda yang mengatur Pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi	-				
				1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	Keberadaan Perda yang mengatur pelarangan peredaran narkoba	-	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas dan PD Urusan Perdagangan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa	1	Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	Komunikasi dan Informasi	PD Urusan Komunikasi dan Informasi	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	74,8%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	Jumlah Kampung Bebas Narkoba	2	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						1	Rasio jumlah siskamling aktif	0,91	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	95%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Cakupan ndemi petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	3 kali sehari	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
						3	Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95,5%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
						4	Jumlah Satpol PP	NA	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas (Satpol)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
				1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1	Prosentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1,13%	Trantibum Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
				1	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	1	Prosentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	9%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)		
				1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	42,59%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	1	Prosentase penanganan penyakit masyarakat	92%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas(Kesbangpolinmas, Satpol PP)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum Linmas(Satpol PP)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	77,27	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)		
						2	Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	15	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)		

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						3	Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	17,12%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)		
						4	Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	13,33%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Satpol PP)		
				1	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1	Cakupan anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang terlatih dalam deteksi dini	56,25%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1	Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas dan bagian Kesra)	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan
						2	Tingkat partisipasi politik	79%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)		Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
						2	Frekuensi Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas dan Bagian Kesra)		Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Frekuensi dialog yang dipublikasikan	10	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1	Persentase ormas yang difasilitasi	8,66%	Trantibum dan Linmas	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Kesbangpolinmas)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
5.3	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3	1	Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama)	1	Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	10%	Sosial	PD Urusan Trantibum dan Linmas (Bagian Kesra)		Tata Kelola Pemerintahan
				1	Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama)	1	Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	0	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		Tata Kelola Pemerintahan
		Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat	0	1	Usulan Program baru (Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Tolenrasi Umat Beragama)	1	Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	0	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra		Tata Kelola Pemerintahan

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM		INDIKATOR		TARGET 2019	URUSAN	PD UTAMA	PRIORITAS NASIONAL YANG TERDUKUNG	PRIORITAS PROVINSI YANG TERDUKUNG
		keagamaan (religious centre)		1	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Cakupan ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap PD	20%	Sosial	PD Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan
				1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar ndemic Tahun	1	Prosentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	85%	Sosial	PD Urusan Pendidikan dan PD Urusan Penunjang Setda Bagian Kesra	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan

4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang

4.3.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir Tahun 2015. Setelah tahun 2016 yang merupakan transisi post MDGs menuju Sustainable Development Goals (SDGs), maka Proposal SDGs 2015-2030 melibatkan 17 Goals dan 169 indikator. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatan kehidupan yang layak di segala umur.
4. Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan.
6. Memastikan ketersedian dan manajemen berkelanjutan atas atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil langkah-langkah yang urgen untuk memerangi perubahan iklim dan akibat-akibatnya.
14. Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan, mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

4.3.2 Pendekatan Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai milestones baru menuju SDGs, persiapan implementasi SDGs di Kota Magelang harus dilakukan dengan baik dan melalui pendekatan perencanaan yang tepat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian target MDGs di Kota Magelang sampai dengan tahun 2015. Beberapa pendekatan kebijakan dan strategi SDGs dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun

Tujuan memberantas kemiskinan didekati antara lain melalui : a) Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha, b) peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal, c)pemberian akses permodalan, d) perluasan akses pasar/promosi, e) peningkatan akses pada pelayanan dasar seperti papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan

2. Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.

Dilaksanakan melalui program : a) Peningkatan ketahanan pangan, b) Program peningkatan produksi pertanian melalui pola urban farming, serta c) peningkatan penerapan teknologi pangan, peternakan dan perikanan.

3. Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatan kehidupan yang layak di segala umur.

Dilaksanakan melalui program : a) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, b) Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita, c) peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan, d) Pelayanan kesehatan masyarakat; e) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan; f) penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.

4. Tujuan 4: Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Program yang dilakukan antara lain : a) Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), b) pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, c) peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, d) perbaikan manajemen pendidikan, serta e) Peningkatan minat baca masyarakat

5. Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan

Pendekatan program yang dilakukan melalui pendekatan: a) Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, b) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

6. Tujuan 6: Memastikan ketersedian dan manajemen berkelanjutan atas atas air dan sanitasi untuk semua.

Hal ini dapat dilakukan melalui : a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, b) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), c) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan d) Program Lingkungan Sehat Perumahan.

7. Tujuan 7: Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Upaya upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui: a) perkuatan sistem inovasi daerah, b) fasilitasi riset unggulan daerah terkait energi alternatif dan terbarukan.

8. Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja yang layak untuk semua.

Program peningkatan kesempatan kerja; b) Perlindungan Pengembangan Lembaga Kesempatan Kerja, c) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Peningkatan Promosi dan Investasi, d) Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi, e) Pengembangan Destinasi Wisata, f) Pengembangan Pemasaran Wisata, g) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, h) Peningkatan Efisensi Perdagangan Dalam Negeri.

9. Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.

Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan cara : a) Program pembangunan jalan dan jembatan, b) Program Pengembanagan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, c) program pembangunan infrastruktur pedesaan, d) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

10. Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.

Di level daerah kombinasi pendekatan di tujuan ke delapan dan ke sembilan akan cukup memberikan akselerasi dalam mengurangi ketimpangan. Perkuatan SDM dan perhatian kepada kesamaan pendidikan juga akan mampu mengurangi kesenjangan. Index Gini dan Index Williamson yang berkualitas untuk pertumbuhan dan pemerataan.

11. Tujuan 11: Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan menuju smart city menjadi bagian penting pada perencanaan tahun 2016. Perlu dirancang sebuah masterplan membangun kota yang cerdas ditinjau dari berbagai aspek. Program konvensional yang sudah ada sebelumnya perlu dilakukan intensifikasi misalnya: a) Program Pengembangan Perumahan, b) Program Lingkungan sehat perumahan, c) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum perumahan

12. Tujuan 12: Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk perumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.

13. Tujuan 13: Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk perumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.

14. Tujuan 14: Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk sumber daya kelautan Kota Magelang tidak memiliki keunggulan komparatif. Namun demikian pengembangan perikanan darat masih terus diupayakan melalui : a) program Pengembangan budidaya perikanan, b) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

15. Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.

Dapat dilaksanakan melalui: a) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, b) Program rehabilitasi hutan dan lahan, Program konservasi sumber daya alam.

16. Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.

Pendekatan reformasi birokrasi secara komprehensif, pengembangan e-governance yang menjamin transparansi, serta penciptaan keamanan.

17. Tujuan 17: Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

Dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar daerah antar negara, pemanfaatan kerjasama secara sister city serta peningkatan menjalin networking dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN yang melibatkan ke empat pilar pembangunan terutama pemerintah, swasta, perguruan tinggi.

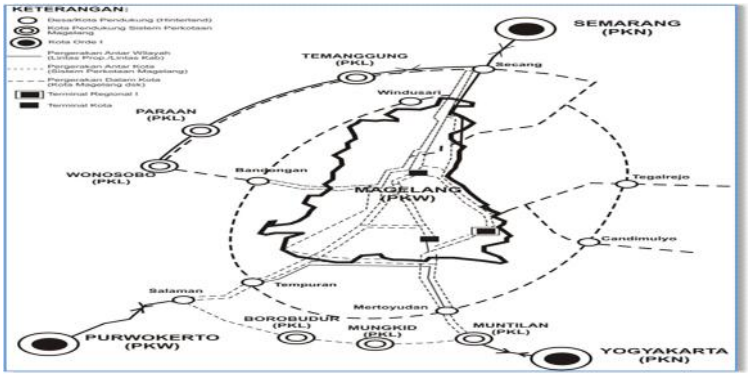
4.4 Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari sudut pandang Pengembangan Wilayah. Berdasar dokumen Pengembanan Wilayah Terpadu Kota Magelang Tahun 2015-2020, pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan Kota Magelang..

4.4.1. Arah Pengembangan Eksternal Wilayah

Mengacu pada UU Penataan Ruang No. 26/ 2007, secara umum telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota-kota, baik yang mempunyai status otonomi maupun tidak, merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Adapun Gambaran mengenai Sistem Perwilayahan Eksternal Kota Magelang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 4-2

Konstelasi Kota Magelang Terhadap Kawasan Sekitarnya

Beberapa daerah yang berada di PKW Kota Magelang antara lain Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG. Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
b. Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
c. Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
d. Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
e. Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
f. Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
g. Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten;

Arah pengembangan Kota Magelang untuk meningkatkan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), diantaranya:

a. pengembangan secara vertikal kawasan komersial 10 lantai;
b. alokasi ruang pada kawasan strategis Daerah (jalur utama pergerakan transportasi Semarang-Yogyakarta), yaitu untuk perdagangan-jasa skala kota dan regional (Purwomangung), meliputi blok peruntukan ruang di Jalan Pemuda, Jalan A.Yani, Jalan Sudirman, sebagian Jalan Urip Sumohardjo, dan sebagian Jalan Sukarno Hatta, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Pahlawan.
c. pengembangan sarana perekonomian daerah, berupa hipermarket, supermarket, perkantoran, perbankan, perhotelan, pasar tradisional, jasa hiburan, rumah makan, dan kawasan mix use (campuran) berupa rumah-toko (ruko) dan rumah kantor.
d. Pengembangan kawasan perdagangan-jasa yang layak dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan estetika lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka publik berupa ruang hijau dan non hijau.
e. pengembangan pariwisata dipusatkan pada BWK III, dan pengembangan potensi wisata pada kawasan lain sebagai pendukung wisata kota.
f. Pengembangan pendidikan menengah dan tinggi,dengan peningkatan kualitas dan keberagamanjurusan/keahlian, dengan tetap mendukung keberadaan Akademi Militer.
g. Pengembangan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan.

4.4.2. Arah Pengembangan Internal Wilayah

Dalam rangka optimalisasi pengembangan, kemudahan pengelolaan, peningkatan fungsi pelayanan, pengurangan kesenjangan, serta penentuan kawasan-kawasan yang akan dilakukan pengembangan, maka di Kota Magelang dilakukan pembagian wilayah kota dalam unit-unit lingkungan atau kedalam kawasan fungsional yang lebih kecil. Unit lingkungan perkotaan yang lebih kecil tersebut dikenal sebagai Bagian Wilayah Kota (BWK). Pertimbangan dalam Penetapan BWK di Kota Magelang berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Adanya kesamaan fungsi (homogenitas) dan dominasi kegiatan tertentu, dimana pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu satuan wilayah akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan sarana

dan prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan segala kegiatan yang terjadi.

b. Batasan kemampuan jangkauan pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial ekonomi skala BWK.

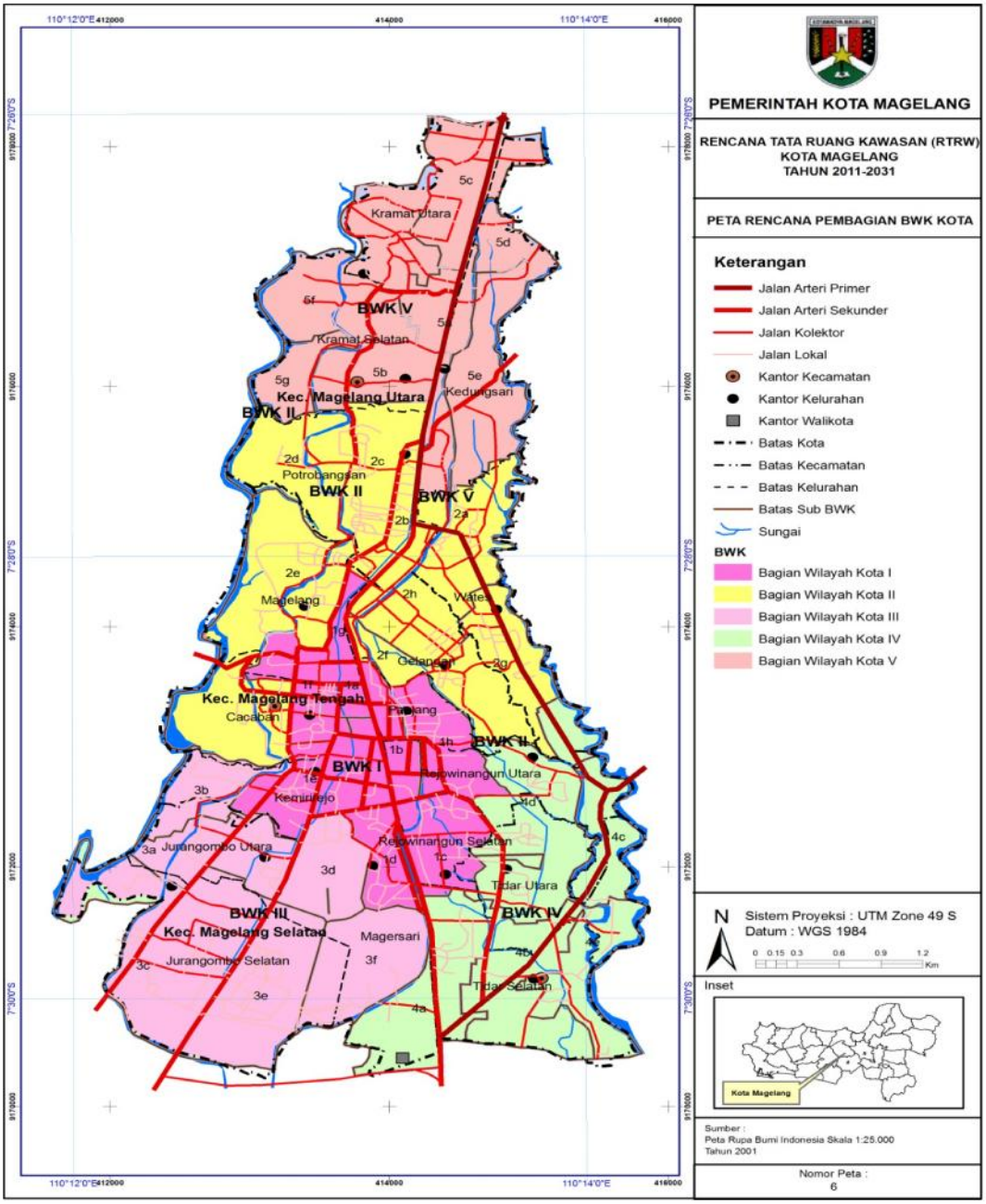
c. Adanya batas fisik yang jelas seperti jalan, sungai dan lain-lain.

d. Kekompakan wilayah terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan, sehingga tercapai efisiensi .

e. Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan integrasi antara kota lama dengan kawasan pengembangan (efisiensi sistem pergerakan).

f. Memantabkan peran BWK dengan meningkatkan sarana-prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya (efisiensi pelayanan sarana umum).

g. Kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan masing-masing wilayah fungsional.



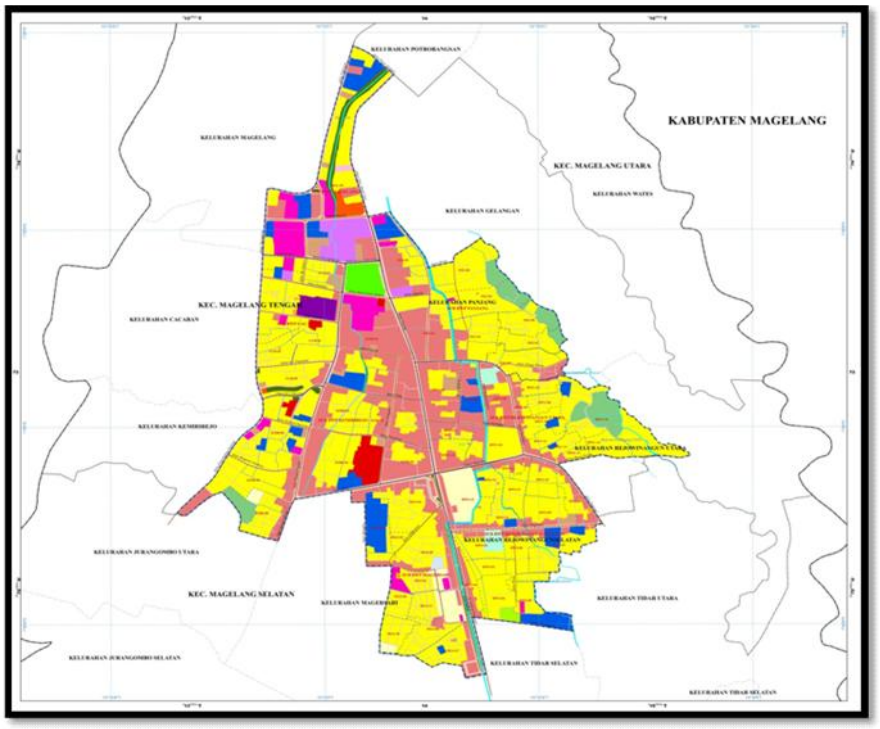
Gambar 4-3
Peta Rencana Pembagian BWK

Pada setiap BWK dialokasikan pusat-pusat kegiatan dengan pengarahan skala layanannya. Adapun pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) dan unit lingkungan yang ada di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

4.4.2.1 Bagian Wilayah Kota I (BWK I)

Dengan luas kurang lebih 255 Ha, BWK I memiliki fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, seluruh Kelurahan Rejowinangun Selatan, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan

Cacaban. Karakteristik BWK Pusat Kota adalah lokasi di tengah wilayah kota dan mempunyai daya jangkau yang relatif merata dari semua sudut kota. Fasilitas pelayanan dasar khususnya fasilitas ekonomi dan sosial kota, tersedia dan tersebar cukup merata di BWK I. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sangat tinggi, sehingga dimasa yang akan datang harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan secara vertikal.



Gambar 4-4

Peta Pola Ruang BWK I

Sedangkan Arahan Pengembangan BWK I adalah sebagai berikut:

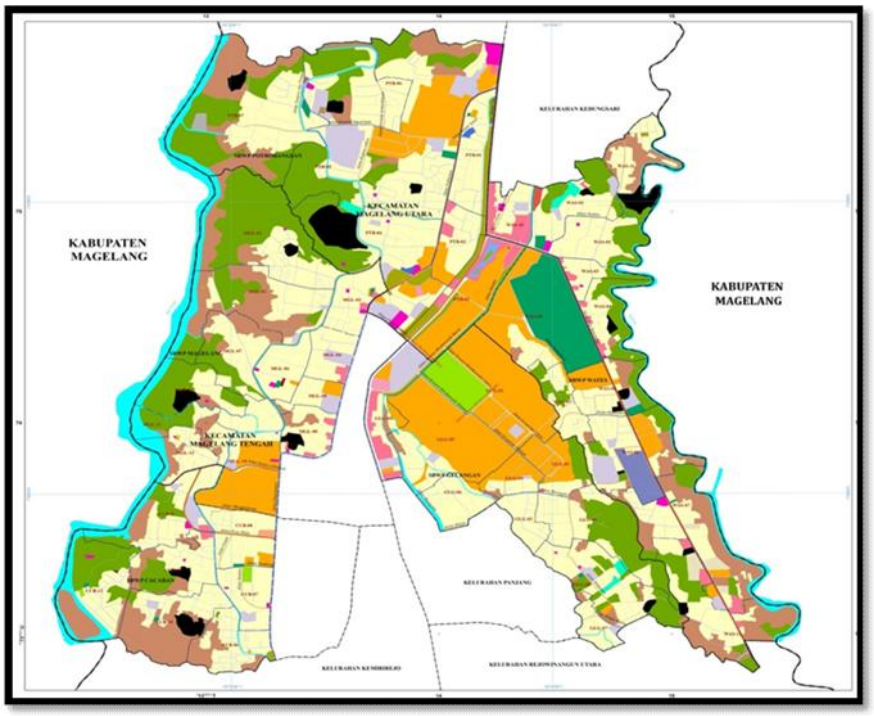
a. mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;
b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
f. mewujudkan RTH taman kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau

Di BWK I ada beberapa Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu:

1. Kawasan Aloon Aloon dan sekitarnya. sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang mewadahi kegiatan rekreasi masyarakat dengan skala pelayanan daerah dan regional. Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:
    a. penataan RTH Taman Kota;
    b. penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima;
    c. penataan jaringan pergerakan di seluruh kawasan dan sekitarnya;
    d. penataan lalu lintas;
    e. penataan papan reklame pada zona perdagangan.
2. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dengan skala pelayanan daerah dan regional. Rencana penanganan yang dilakukan berupa:
    a. pembangunan selter Pedagang Kaki Lima;
    b. pembangunan terminal tipe c;
    c. pengembangan pasar Sidomukti;
    d. Penataan RTH kawasan.

4.4.2.2 Bagian Wilayah Kota II (BWK II)

Dengan luas kurang lebih 370 Ha, BWK II berfungsi konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan tinggi, dan militer. Pada beberapa simpul lokasi di BWK II, terutama kawasan-kawasan yang bersinggungan langsung dengan kawasan pusat kota harus diantisipasi perkembangan fasilias perdagangan dengan skala pelayanan lokal dan regional. Wilayah BWK I meliputi seluruh wilayah Kelurahan Potrobangsan; sebagian wilayah Kelurahan Wates, Gelangan, Cacaban dan Magelang.



Gambar 4-5

Pola Ruang BWK II

Arahan Pengembangan BWK II :

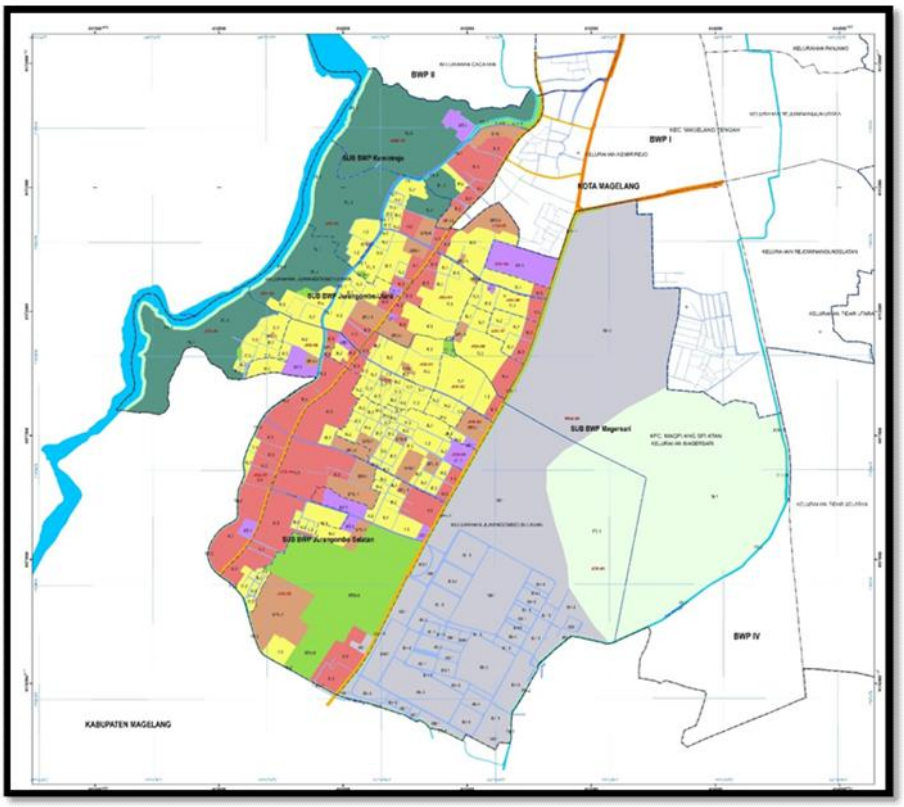
a. mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan tinggi dan sedang, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat;
b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Di BWK II ada Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu: Kawasan Mantiyasih. Yang berfungsi sebagai kawasan sejarah cikal bakal Magelang yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan dengan skala pelayanan daerah dan regional. Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:

a. Penataan kawasan Mantiyasih;
b. Peningkatan aksesibilitas kawasan;
c. Pengembangan destinasi pariwisata.

4.4.2.3 Bagian Wilayah Kota III (BWK III)

BWK III dengan luas kurang lebih 383 Ha, dengan arahan fungsi dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkatan darat, dan permukiman dengan kepadatan rendah, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan, sebagian Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kemirirejo, Kawasan perkotaan pada BWK III harus dipertahankan rasio antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau. Prediksi pemanfaatan lahan dimasa depan tidak begitu banyak bergeser dari alokasi lahan saat ini. Sedangkan pengembangan bidang kepaiwisataan sangat potensial untuk diarahkan di kawasan BWK III tersebut. Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung kota berlokasi di BWK III. Kekuatan pasar akan mendesak penggunaan lahan Gunung Tidar atau sebagian lahan gunung tersebut untuk kegiatan ekonomi dan wisata



Gambar 4-6

Peta Pola Ruang BWK III

Arahan Pengembangan BWK III :

d. mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan rendah dan sedang, rekreasi kota/wisata alam, dan pendidikan angkatan darat
e. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
f. mewujudkan kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hutan kota;
g. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;

h. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
i. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
j. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
k. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

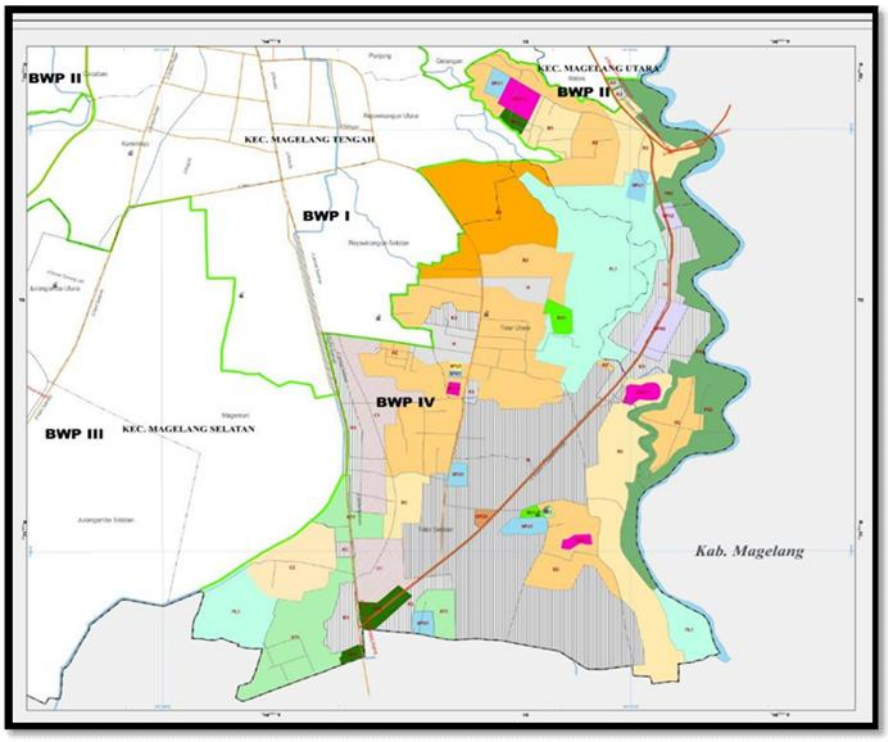
Di BWK III ada Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu: Kawasan Gunung Tidar, Fungsi kawasan adalah sebagai kawasan plasma nutfah Daerah dan pengembangan destinasi pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam.

Rencana penanganan kawasan prioritas kawasan Gunung Tidar dilakukan dengan:

a. penegasan batas kawasan lindung Gunung Tidar dengan kawasan budidaya yang ada di seputar kawasan;
b. revitalisasi kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan plasma nutfah Daerah;
c. reboisasi pohon di Kawasan Gunung Tidar secara bertahap dan berkala;
d. pengembangan kawasan sebagai kawasan pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam masih dimungkinkan selama tidak mengganggu dan mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung; dan
e. pengembangan secara terbatas sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jalan setapak dan harus mempunyai kejelasan fungsi dari pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

4.4.2.4 Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV)

BWK IV dengan luas kurang lebih 437 Ha, dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan permukirnan kepadatan tinggi, dan terdiri dari sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Wates, dan seluruh Kelurahan Tidar Utara dan seluruh Kelurahan Tidar Selatan. Keberadaan Terminal Tidar ikut menjadi faktor pengungkit/pendorong perkembangan di kawasan tersebut. Peningkatan kegiatan perdagangan di BWK IV dimasa yang akan datang akan menjadi dominan, terutama dengan berkembangnya Kawasan Soekarno-Hatta; Kawasan Canguk, serta berkembangnya Kawasan Mertoyudan (kawasan perbatasan) yang berada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan perdagangan dan perkantoran. Pada BWK IV ini terdapat simpul-simpul kawasan yang merupakan gerbang pintu masuk kota dari arah selatan dan timur. Sehingga penataan ruang pada kawasan tersebut memerlukan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas ruang kota.



Gambar 4-7

Peta Pola Ruang BWK IV

Arahan Pengembangan BWK IV :

a. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWK IV Kota Magelang sebagai subpusat pelayanan kota;

b. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.

c. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;

d. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan permukiman;

e. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWK IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWK IV Kota Magelang sebagai sub pusat pelayanan kota;

g. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.

h. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;

i. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan

permukiman;

j. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

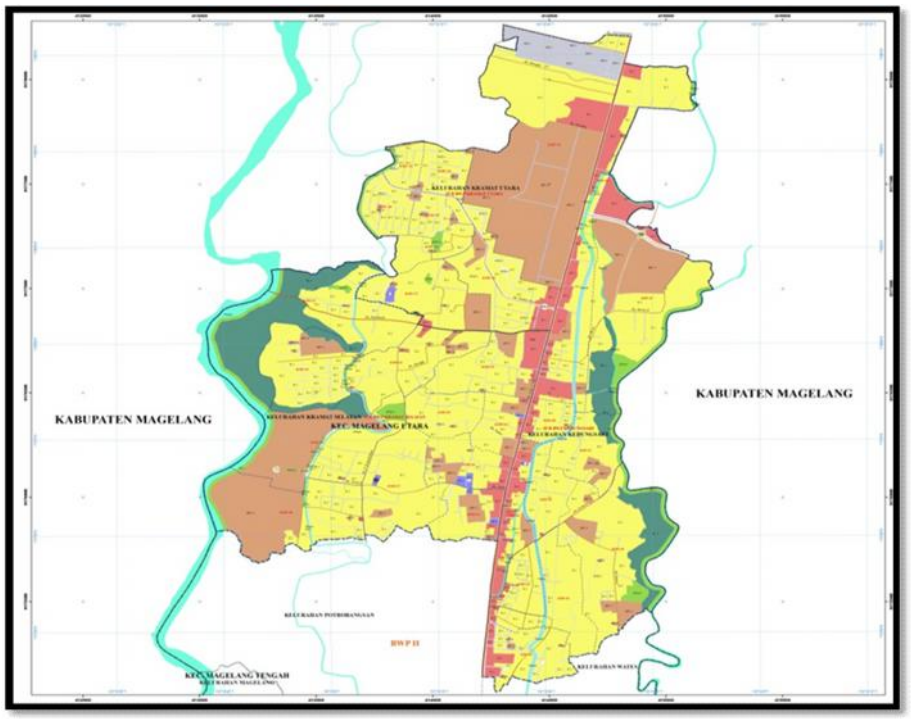
k. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWK IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan.

Di BWK IV ada Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa dan pergudangan dengan skala pelayanan daerah dan regional yaitu: Kawasan Sukarno Hatta . Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:

a. Pengembangan Terminal Bongkar Muat;
b. Pembangunan fasilitas pergudangan;
c. Penataan RTH kawasan;

4.4.2.5 Bagian Wilayah Kota V (BWK V).

BWK V dengan luas kurang lebih 365 Ha, dengan arahan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial-budaya, olahraga, dan rekreas. BWK V terdiri dari seluruh Kelurahan Kramat Utara, seluruh Kelurahan Kramat Selatan, dan seluruh Kelurahan Kedungsari. BWK V mempunyai 2 (dua) kawasan strategis yaitu Kawasan Sidotopo yang diarahkan sebagai salah satu kawasan yang mengampu kegiatan ekonomi skala kota dan regional dan Kawasan GOR Samapta yang mempunyai arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan olah raga dan rekreasi kota, regional, dan nasional.



Gambar 4-8

Peta Pola Ruang BWK V

Arahan Pengembangan BWK V:

a. mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;
b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Dari 2 (dua) kawasan strategis di BWK V, Kawasan startegis Gor Samapta yang akan dilakukan pengembangan di Tahun 2016- 2021, dengan rencanan pengembangan sebagai berikut:

a. penyelesaian pembangunan Stadion Moch. Subroto;
b. revitalisasi Gor Samapta dan sekitarnya;
c. penataan RTH Kawasan.

4.5 Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 juga memasukkan Pokok –pokok Pikiran DPRD Kota Magelang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendekatan politis Penyusunan RKPD. Pokok pokok pikiran DPRD ini setelah melalui penelaahan baik oleh Bappeda Kota Magelang maupun perangkat Daerah terkait, kemudian dimasukkan dalam skenario Rencana Kerja OPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Magelang merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Kota Magelang, melalui kegiatan reses dan Kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 3 daerah pemilihan yang meliputi 3 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Magelang lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2019, KUA PPAS dan APBD tahun 2019.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah daerah, pokok pokok pikiran (POKIR) DPRD Kota Magelang untuk RKPD tahun 2019 dirangkum sebagaimana tabel berikut:

Urusan/OPD	Jumlah
Penataan Ruang dan pekerjaan umum	192
Koperasi dan UMKM	30
Kesehatan	21
Lingkungan Hidup	20
Pendidikan	18
Perumahan rakyat dan pemukiman	11

Urusan/OPD	Jumlah
Pemuda dan olahraga	10
Perhubungan	9
Pertanian	9
Tenaga Kerja	8
Kebudayaan	5
Ketentraman dan ketertiban	5
Perencanaan pembangunan	5
Perdagangan	4
Perumahan rakyat	4
Rutin	3
Kesra	2
Pariwisata	2
Pemberdayaan Masyarakat Desa	2
Pedagangan	1
Perikanan dan kelautan	1
Jumlah	362

4.6 Inovasi Pembangunan

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 juga memasukkan Pokok –pokok Pikiran DPRD Kota Magelang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendekatan politis Penyusunan RKPD. Pokok pokok pikiran DPRD ini setelah melalui penelaahan baik oleh Bappeda Kota Magelang maupun perangkat Daerah terkait, kemudian dimasukkan dalam

Pembangunan daerah yang dimanifestasikan melalui tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus mampu mempercepat tujuan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial dan dalam cakupan yang lebih universal. Dalam era modern dewasa ini, dimana permasalahan dan tuntutan masyarakat semakin kompleks, maka harus diupayakn pendekatan out of the box dan bersifat terobosan tanpa meninggalkan regulasi yang ada. Sebagai organisasi pembelajar (learning organization) dan organisasi yang bertumpu pada pengembangan (improvement driven organization) Pemerintah Kota Magelang melakukan inovasi baik secara proses perencanaan maupun pada tataran program/kebijakan.

4.6.1 Inovasi Proses Perencanaan Pembangunan

Beberapa inovasi pada proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 antara lain nampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.13

Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Inovasi	Later belakang Inovasi	Nilai Tambah/Dampak positif yang diharapkan	Ilustrasi Inovasi
1	Sistem Informasi Perencanan Pembangunan Daerah	Carut Marut penyusunan Renja dan Renstra	Mampu meningkatkan kinerja penyusun dokumen perencanaan dari aspek waktu, ketertelusuran dan kehandalan prosesnya	
2	E-Musrenbang	Dalam upaya meningkatan akuntabilitas dan transparansi data usulan Musrenbang	Meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran (track back) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di mata masyarakat	
3	Optimalisasi E_Aspiration pada website Bappeda	Perlunya meningkatkan akses usulan bagi masyarakat secara online via website	Mampu meningkatkan rentang cakup usulan secara dunia maya,	
4	Sistem Informasi Geografis (Tata Ruang, Perumahan, Jalan dan Jembatan)	Perlunya aksesibilitas terhadap kondisi geospasial dan infrastruktur di Kota Magelang	Memberikan aspek kontrol dan evaluasi atas kondisi secara geospasial	
5	Pemanfaatan Media Sosial (WhatsApps) dalam Koordinasi Penyusunan RKPD		Akselerasi proses penyusunan dan keterbukaan diskusi atas penyusunan RKPD	

6	Peningkatan kapasitas Kasubbag program di OPD terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui workshop dan sosialisasi	Perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap aspek perencanan pembangunan pada level Kasubbag Program di seluruh OPD	Peningkatan skill pada core business perencanaan di setiap OPD	
7	Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Rancangan Renja OPD	Harus ada upaya agar terdapat standar belanja pada anggaran berbasis kinerja secara lebih ilmiah	Peningkatan kualitas pada substansi matriks rancangan Renja OPD	
8	Sarasehan perencanaan pembangunan di setiap kecamatan pada bulan Desember Tahun n-1 perencanaan tentang Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017	Secara lebih dini masyarakat diberikan pemahaman atas arah kebijakan pembangunan Tahun Rencana	Peningkatan kesadaran masyarakat peran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dengan indikator peningkatan partisipasi masyarakat dan akomodasi usulan musrenbang	
9	Formulir Batasan dan Kriteria Usulan Musrenbang	Tidak terkendalinya usulan Musrenbang yang diluar jalur tema pembangunan tahun rencana, sehingga menghasilkan planning scrap pada saat Musrenbang	Filter atas usulan yang semakin berkualitas mengarah pada tema tahun rencana dan makin meningkatnya akomodasi atas usulan Musrenbang	
10	Integrasi Sistem Perencanaan dengan Penganggaran (SIPPD-SIMDA)	Inefisiensi atas implementasi sistem dalam hal waktu input atas fungsi perencanan dan penganggaran	Tidak terjadi duplikasi atas input yang sama dalam penyusunan Renja OPD pada sistem SIPPD (Program, kegiatan, indikator) dan SIMDA	
11	Integrasi dan pemanfaatan Dokumen Pemetaan Potensi, Permasalah dan Isu Strategis Kelurahan dalam Pengusulan Musrenbang (secara lebih lanjut	Masih tumpang tindihnya pengusulan Musrenbang sehingga tidak tepat sasaran	Peningkatan ketepatan sasaran usulan dengan mendasarkan pada dokumen yang disusun secara ilmiah dan melibatkan partisipasi Masyarakat.	

	dikembangkan sebagai dikumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman/RPLP)			
12	Focus Group Discussion	Perlunya penajaman atas isu strategis dan tema pembangunan	Makin efektifnya program kegiatan yang memiliki daya ungkit /leverage atas soulusi isu strategis dan permasalahan pembangunan	
13	Segmentasi Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Umum, Anak sekolah dan Lansia, difabel)	Upaya meningkatkan masukan dan partisipasi masyarat dalam pembangunan menjangkau hingga segmen spesifik	Makin berkualitasnya perencanaan pembangunan dengan akomodasi usulan dan suara masyarakat yang lebih luas	
14	E-scoring	Kesulitas prioritasi usulan kegiatan	Mampu melakukan skoring dan pembobotan usulan secara online	
15	Intregrasi eplanning dan ebudgetting	Double inputting dan kesulitan traceability, pengendalian dan evaluasi usulan pada level perencanaan dan penganggaran	Peningkatan konsistensi, traceability dan monitoring dan evaluai setiap tahap pada perencanaan penganggaran	

4.6.2 Inovasi Program/Kebijakan Pembangunan

Beberapa inovasi pada proses perencanaan pembangunan Kota Magelang Tahun 2019 antara lain nampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.18

Inovas Program/Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

No	Inovasi	Latar Belakang/Dampak positif Inovasi	Nilai Tambah Inovasi
1	Implementasi Blueprint Universal Design	Masih belum maksimalnya kehadiran pemerintah bagi kaum difabel terutama untuk aksesibiltas pada infrastruktur dan fasilitas publik	Peningkatan aksesibilitas terdapat fasilitas Kota termasuk bagi para kaum difabel
2	Implementasi Masterplan Smartcity	Kota Magelang masih dalam posisi scattered untuk kategori capaian indeks smart city dalam Garuda Smart City Model	Akselerasi pencapaian target indeks smart city Kota Magelang
3	Penguatan Implementasi Masterplan Masyarakat Ekonomi ASEAN	Masih perlunya penguatan dalam kiprah kota Magelang dalam kancah MEA	Makin kuatnya kontribusi Kota Magelang dalam strategi ofensif dan difensif menghadapi MEA
4	Penguatan Implementasi Magelang sebagai Kota Layak Anak	Perlunya kesinambungan dalam positioning kota sebagai Kota Layak Anak	Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak
5	Integrasi Jamkesda ke BPJS	Kejelasan status Jamkesda di kaitkan dengan Undang Undang tentang BPJS	Makin ada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat
6	Manajemen Persampahan : Kampung Organik dan Bank Sampah	Umur hidup TPA Banyuurip yang sudah habis; Kapasitas tempat sampah yang semakin kurang tidak sebanding dengan meningkatnya sampah	Pengurangan samapah dari sumbernya serta peningkatan pendapatan masyarakat dari pengolahan sampah
7	Penguatan dan Penataan PKL	Perlunya mempertahankan kondusivitas, ketertiban dan	Ketertiban, keindahan sekaligus kesejahteraan

		keindahan dengan tetap mengakomodir para PKL	masyarakat meningkat
8	Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Perlunya akeselerasi pencapaian indikator MKSB	Percepatan pencapaian indikator MKSB
9	Pendidikan Gratis	Masih perlunya kepedulian pemerintah terhadap pendidikan yang murah dan tetap berkualitas	No one left behind dalam menikmati pendidikan dasar di Kota Magelang

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 memuat program-program prioritas sebagaimana tema yang diusung. Program prioritas merupakan program utama yang diselenggarakan oleh OPD. Program ini secara langsung dalam bentuk outcome mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

5.1 Kategorisasi Rencana Program Prioritas

Dalam implementasinya, mengingat urgensi dan kapasitas keuangan daerah maka program program yang telah dijabarkan dibagi menjadi tiga porsi utama , yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Definisi masing masing prioritas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5-1

Kategorisasi Program Prioritas

No	Prioritas	Terminologi
1	Prioritas I	merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan kepala daerah, Kesepakatan Hasil Musrenbang, Hasil Telaahan Pokok Pikiran Dewan serta Program Inter5ensi yang bersifat Nasional/Provinsi, dan hasil hasil Focuss Group Discussion (FGD)
2	Prioritas II	Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
3	Prioritas III	merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD

5.1.1 Program Prioritas I

5.1.1.1 Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2019

Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Tema dasar perencanaan tahun ketiga adalah Produktif Bersama Mitra.

Program yang sesuai dengan Tema ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5-2

Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2019

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kualitas sumber	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
	daya aparatur pemerintah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	
			Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	
			Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan: - S1 - S2	
		Program Pendidikan kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional dan teknis	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
			Persentase ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	Persentase ASN yang mengikuti diklat prajabatan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2	Peningkatan daya saing daerah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	DPU PR
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kawasan strategis yang terbangun	DPU PR
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program mengintesifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Setda
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pertumbuhan PAD	BPKAD
		Program peningkatan pelayanan kesehatan	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Prosentase sekolah melaksanakan CBT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat regional, nasional, dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan cabang olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Kota cerdas	Program sarana dan prasarana bidang tehnologi informatika	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Persentase PD yang menerapkan e-government	
			Interoperabilitas antar system informasi	
			Cakupan WAN (Wide Area	

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
			Network) Kota	
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	DPU-PR
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan jenis usaha ekonomi kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Pemerintahan responsif dan partisipasif	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah KIM per kelurahan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan interaksi	
		Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Bappeda
5	Pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/SDLB/MI/Paket A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	
			APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	
			APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	Dinas Sosial
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	Dinas SOsial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	Satpol PP
			cakupan peningkatan penanggulangan bencana	
			Cakupan penanganan korban becana	
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	
6	Pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
		Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonser5asi	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
			Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya	Jumlah akses informasi lingkungan hidup dan data sda	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
		alam dan lingkungan hidup	dan lingkungan hidup yang tersedia	
		Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah pemantauan gerakan di lima sektor	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pengelolaan RTH	Luas RTH kota	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat nadani dan media massa dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan			

5.1.1.2 Akomodasi Hasil Musrenbang

Salah satu prioritas yang harus diakomodir adalah Prioritas Hasil Musrenbang. Makna Musrenbang Kota Magelang dari waktu ke waktu semakin dipersepsikan baik oleh masyarakat dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pada setiap level Musrenbang.

Tabel 5.3

Program Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2019

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	Satpol PP
2	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenaga listrikan	Rasio ketercukupan PJU	Dinas lIngkungan Hidup
3	Program Infrastruktur pedesaan	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	DPU PR
4	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
5	Pengembangan kinerja	1. Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
	pengelolaan persampahan	2. Persentase sampah perkotaan yang ditangani	
6	Perlindungan dan konservasi SDA	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonservasi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
9	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
10	Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	Dinas Pertanian dan Pangan
12	Peningkatan kesejahteraan petani/ peternak	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan
13	Pengembangan budidaya perikanan	1. Produksi hasil perikanan: Produksi Ikan 2. Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB 3. Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	1. Padi 2. Jagung 3. Ubi kayu	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Pengembangan budi daya perikanan	1. Produksi hasil perikanan: Produksi Ikan 2. Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB 3. Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Pengelolaan keragaman budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPROV 3. Jumlah klub olah raga 4. Jumlah organisasi olah raga	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
18	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualits pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	Sekretariat Daerah
19	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	Dinas Perindustrian dan perdagangan
20	Program pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	Dinas Perindustrian dan perdagangan
21	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1. Prosentase koperasi aktif 2. Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	Dinas Perindustrian dan perdagangan
22	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	Dinas Perindustrian dan perdagangan
23	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Peningkatan daya saing IKM Formal	Dinas Perindustrian dan perdagangan
24	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	Dinas Perindustrian dan perdagangan
25	Program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	Dinas Perindustrian dan perdagangan
26	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi 2. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetenssi 3. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	Dinas Tenaga Kerja
27	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase wirausaha baru 2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 3. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja
28	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
29	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan/kelurahan	Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
31	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik 2. Jumlah shipon yang dibangun	DPU-PR
32	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	DPU-PR
33	Program lingkungan sehat perumahan	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
34	Program pembangunan turap/talud/bronjong		DPU-PR
35	Program kemitraan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
	peningkatan pelayanan kesehatan		
36	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
37	Program upaya kesehatan masyarakat	1. Persentase alat laboraturium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
38	Program perbaikan gizi masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
39	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
40	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
41	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak		Dinas Kesehatan
42	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
43	Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi 2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) 3. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 6. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun 8. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 9. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri 10. Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out) 11. Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun 12. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 13. Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) 14. Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif 15. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif 16. Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun 17. Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun 18. Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro 19. Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga 20. Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan 21. Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera 22. Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
44	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
45	Program Peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
46	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi Tingkat kota Tingkat provinsi Tingkat nasional 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
47	Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
48	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
49	Program Pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB Mandiri	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
50	Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	Satpol PP

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
51	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	Satpol PP

5.1.1.3 Prioritas Program Hasil FGD

Dalam penyusunan Program, salah satu upaya pendalaman berbagai isu strategis adalah melalui Focus Group Discusion (FGD). FGD dilksanakan dengan melibatkan OPD terkait bersama stakeholders, LSM dan delegasi masyarakat dari kelurahan dan kecamatan.

Dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 beberapa FGD sebagaiman tabel berikut :

Tabel 5-4

Tema FGD dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

No	FGD	Isu yang dibahas
1	Penanggulangan Kemiskinan	Membahasn langkah langkah yang bersifat perencanaan dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan di bawah angka saat ini 9,05 %
2	Magelang sebagai Kota Layak Anak	Memperkuat Kota Magelang sebagai Kota yang nyaman dan layak bagi anak
3	Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan	Meningkatkan implementasi manajemen persamapahan untuk mengatasi permasalahan persampahan kota
4	Penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Memperkuat implementasi atas Masterplan MKSB dari hasil e5aluasi pelaksanaan yang telah dilakukan
5	Implementasi Smart City	Upaya meningkatan eksekusi atas Smary city Model yang dikembangkan di Kota Magelang agar meningkat dari Scattered ke le5el berikutnya
6	Program 100-0-00	Bagaiman upaya agar target 100-0-100 pada tahun 2019 dapat tercapai
7	Memperkuat implementasi Kemitraan	Pola kemitraan dan skenario yang sudah disusun untuk dapat dioptimalkan
8	Percepatan Pencapaian Indikator Makro Daerah	Cukup strategis untuk pengendalian pencapaian indikator makro daerah
9	Sustainable Development Goals.	Mencari format terbaik bagi upaya mendukung pencapaian target indikator SDGs

Program program yang diprioritaskan berdasarkan tema FGD yang akan dilaksanakan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

5.1.1.3.1 Penanggulangan Kemiskinan

Tabel berikut menunjukkan rencana program penanggulangan kemiskinan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan indikasi program :

Tabel 5-5
Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1. Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian 2. Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	Dinas Sosial
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design	
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan obat dan makanan	Dinas Kesehatan
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboraturium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Imunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Pre5alensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS	Dinas Kesehatan
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan
12	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat Persentase kawasan strategis yang terbangun	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
17	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
18	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	Dinas Sosial
19	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif 2. Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial 3. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial
20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase wirausaha baru 2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 3. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja
21	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan
22	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
23	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase (%) calon transmigrasi yang tertempatkan	Dinas Tenaga Kerja
24	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
25	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Luas lahan pertanian organic 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
26	Program penciptaan	1. Persentase peningkatan kualits pelaku UKM	SEKDA

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
	iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	
27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1. Persentase penduduk berakses air minum 2. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 3. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	Dinas Lingkungan Hidup
28	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festi5al seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebiudayaan
29	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah re5iew PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
30	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
32	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
33	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
34	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi Tingkat kota Tingkat pro5insi Tingkat nasional 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1. Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat 2. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	Program peningkatan peran perempuan di	PKK Aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
	perdesaan		Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualits pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	Sekretariat Daerah
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
41	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda

5.1.1.3.2 Program Kota Layak Anak

Kepala Daerah berkomitmen untuk menjadikan Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak, tujuan kota layak anak ini adalah agar dapat membangun anak-anak yang berkualitas dengan berusaha untuk memenuhi hak sesuai dengan kebutuhan serta perlindungan anak.

Kebutuhan anak yang harus dipenuhi tak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga fisik mau pun non fisik. Dari sedikitnya 31 hak anak, ada empat hal utama yang harus menjadi perhatian ekstra, yakni hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi, dan keterlibatkan unsur anak harus dimulai sejak proses perencanaan, untuk itu program prioritas Magelang menuju Kota Layak Anak yang akan dilaksanakan di Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-6

Program Kota Layak Anak

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design	
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase peningkatan judul buku 2. Persentase peningkatan jumlah buku 3. Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten 4. Presentase perpustakaan aktif 5. Cakupan pelayanan melalui e-Library 6. Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	
8	Program Peningkatan Mutu Pendidilkan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboraturium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan
15	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 2. Cakupan Kunjungan Bayi 3. Cakupan Pelayanan Anak Balita 4. Cakupan Puskesmas Ramah Anak	Dinas Kesehatan
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
18	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
19	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	Dinas Sosial
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	Dinas Kesehatan
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Imunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
	Menular	3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Pre5alensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS	
22	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	Dinas Kesehatan
23	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
24	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
25	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1. Persentase penanganan penyakit masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	Satuan Polisi Pamong praja
26	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1. Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana 2. Cakupan tim relawan siaga bencana 3. Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana 4. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 5. Cakupan penanganan korban becana	Satuan Polisi Pamong praja
27	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
30	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1. Persentase kriminalitas yang tertangani 2. Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila 3. Perda pelarangan peredaran narkoba 4. Jumlah Kampung Bebas Narkoba	Badan Kesbangpolinmas

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN 6. Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HI5/AIDS 7. Rasio jumlah siskamling aktif 8. Frekuensi Patroli Satpol PP 9. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	
31	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPRO5 3. Jumlah klub olah raga 4. Jumlah organisasi olah raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
32	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah re5iew PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Persentase lapangan olahraga yang dire5italisasi 2. Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
36	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi 2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) 3. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 6. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun 8. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 9. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri 10. Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out) 11. Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun 12. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 13. Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) 14. Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif 15. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif 16. Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun 17. Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun 18. Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro 19. Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga 20. Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan 21. Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera 22. Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
			dan Keluarga Berencana
41	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda

5.1.1.3.3 Manajemen Persampahan

Sampah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat perkotaan khususnya Kota Magelang. Keterbatasan lahan dan masa hidup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuurip yang secara teknis berakhir mendorong pemerintah dan seluruh elemen mencari ino5asi dari permasalahan tersebut. Dapat dikatakan pada sejak tahun 2019 ini Kota Magelang sudah darurat sampah. FGD Manajemen Persampahan dilaksanakan sebagai salah satu upaya menghimpun usulan dan ino5asi dari berbagai pihak. Selain strategi 3 R (Reduce, reuse dan recycle) yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif masyarakat, terobosan yang tak kalah penting adalah dengan pengembangan kampung-kampung organik. Kampung organik ini dimaksudkan sebagai upaya lebih lanjut atas bagaimana menajemen persamapahan berbasis masyarakat dapat menjangkau aspek ekonomi sosial serta lingkungan hidup. Sejak tahun 2019 hingga ke depan seluruh Kelurahan di Kota Magelang ditargetkan telah semakin intensif mengembangkan secara baik kampung-kampung organik dimaksud. Program-program prioritas mendukung Manajemen Persampahan berbasis masyarakat antara lain sebagai berikut:

Tabel 5-7

Program Manajemen Persampahan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonser5asi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengelolaan Pasar	1. Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar 2. Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional 3. Cakupan pedagang pasar yang dibina 4. Persentase pasar tradisional yang dikelola	Dinas Perindag

5.1.1.3.4 Penguatan Implementasi Magelang Kota Sejuta Bunga

Penetapan branding Kota Magelang dengan "Kota Sejuta Bunga" sejak tahun 2011 berdampak pada perwujudan branding tersebut sampai saat ini. Makna Kota Sejuta Bunga sebagai identitas atau branding Kota Magelang dalam mengemas Kota Magelang sebagai Kota Jasa. Adapun bentuk nyata dari Kota Sejuta Bunga ini adalah terwujudnya Kota Magelang sebagai kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman dengan bunga sebagai ikon utama.

Dengan kota yang lebih menarik maka akan semakin terbuka peluang usaha dan investasi, yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Dan seiiring dengan peningkatan peran dan fungsi sebagai kota jasa, maka akan memberi peningkatan kepada kesejahteraan masyarakat.

Di Tahun 2019, penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga , dengan program-program prioritas yang mendukung adalah:

Tabel 5-8

Program Penguatan Implementasi MKSB

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partsisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	Dinas Perhubungan
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Kota	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1. Prosentase Petani yang melaksanakan GHP 2. Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
8	Program Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonser5asi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah pemantauan gerakan di lima sektor	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
11	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Dinas Pertanian dan Pangan
12	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festi5al seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
15	Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP 2. Rasio petani terlatih	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Lama Kunjungan Wisatawan 2. Persentase TIC yang representati5e 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Destinasi Wisata Unggulan 2. Persentase destiasi wisata yang memenuhi sapta pesona	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
18	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
20	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Jumlah gedung kesenian 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Cakupan kajian seni 50% 4. Cakupan fasilitas seni 30% 5. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% 6. Cakupan tempat 100% 7. Cakupan organisasi 34%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5.1.1.3.5 Penguatan Implementasi Menuju Smart City

Dalam rangka penguatan implementasi atas Masterplan Smart City Kota Magelang , hasil FGD menunjukkan beberapa pendekatan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 5-9

Penguatan Implementasi Smart City

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
2	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Dinas Tenaga Kerja

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan 2. Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	Dinas Perhubungan
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah re5iew PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	Sekretariat Daerah
7	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Persentase LKJIP OPD dengan nilai baik 2. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh OPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 3. Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar 4. Persentase LKJIP OPD dengan nilai baik 5. Penurunan kasus temuan LKPD 6. Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu 7. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh OPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 8. Nilai sur5ey kepuasan penggunan layanan PD 9. Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	Semua Perangkat Daerah
9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: a. Radio	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		b. Media cetak 2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3. Jumlah KIM 4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi	
11	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Lama Kunjungan Wisatawan 2. Persentase TIC yang representati5e 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
12	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
13	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1. Implementasi SIPID (Sistim In5ormasi Potensi In5estasi Daerah) 2. Implementasi pemanfaatan SPIPISE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
14	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1. Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik 2. Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata 3. Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik 4. Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum 5. Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	Dinas Perhubungan
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: a. Radio b. Media cetak 2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3. Jumlah KIM 4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
17	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1. Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku 2. Persentase arsip dan risalah 3. Persentase Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang	Badan Perencanaan Pembangunan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partsisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Daerah

5.1.1.3.6 Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda paska MDGS yang diratifikasi oleh Indonesia adalah Sustainable Development Goals. Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian gloab SDGS telah menetapkan titik berat program yang akan ditempuh sebagai berikut :

Tabel 5-10

Program Prioritas SDGs

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboraturium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	Dinas Kesehatan
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. APK PAUD 2. Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Imunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Pre5alensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS	Dinas Kesehatan
8	Program Pendidikan Non Formal	1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Luas lahan pertanian organic 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1. Jumlah pelaku usaha peternakan organik: Peternak ayam buras/ ayam broiler Peternak kelinci Peternak kambing/domba 2. Rasio peternak terlatih	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas	Dinas Kesehatan
19	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	
21	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
25	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda

Dan program program yang mendukung dan mengarah pada FGD FGD pada tema yang lain, akan tersaji pada Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019.

5.1.1.4 Prioritas Program Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok pokok Pikiran DPRD Kota Magelang disampaikan bersamaan dengan Penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang. Melalui hasil telahaan baik oleh Bappeda maupun oleh perangkat Daerah terkait maka dapat ditampilkan program yang merupakan akomodasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

Tabel 5.11

Hasil Akomodasi Pokok Pikiran DPRD Kota Magelang Tahun 2019

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
1	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang seni budaya	Kebondalem I RT 9/1	Kebudayaan	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama bidang pendidikan	Rp 405.000.000	
2	Pengadaan sarana dan prasarana kesenian rebana	RT 01 RW 07 KRAMAT SELATAN	Kebudayaan			Melalui mekanisme hibah
3	Pembuatan sanggar seni	MATESEH KEL. MAGELANG	Kebudayaan			Melalui mekanisme hibah
4	Pengadaan alat kesenian keroncong	Jl. Veteran No 4 Magelang	kebudayaan			Melalui mekanisme hibah
5	Pengadaan alat kesenian rebana	RW 9 Kwayuhan Kelurahan Gelangan	kebudayaan			Melalui mekanisme hibah
6	Pembuatan jamban	Kliwonan	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
7	Pembuatan kartu Jamkesda	Jl. Merbabu Jambon wot RT 5/6 Cacaban	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Mulai tahun 2018 sudah tidak ada lagi pembuatan kartu jamkesda karena sudah diintegrasikan dengan JKN)	Rp 7.274.819.200	
8	Pembuatan kartu Jamkesda	Gelangan RT 2 RW 8	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Mulai tahun 2018 sudah tidak ada lagi pembuatan kartu jamkesda karena sudah diintegrasikan dengan JKN)	Rp 7.274.819.200	

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
9	Perbaikan sarana prasarana sanitasi rusunawa Protrobangsan	Tulung	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
10	Pembuatan septic tank	Ibu Yuni Rt 06 Rw 04 Kelurahan Kemirirejo	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
11	Fogging DBD	RW 08 KEDUNGSARI	Kesehatan	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Rp 240.570.550	
12	Perbaikan dan pemeliharaan WC Umum	RW 04 POTROBANGSAN	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
13	Pengadaan kursi tunggu pasien di Poli RSUD	RW 04 POTROBANGSAN	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
14	Pembuatan WC Umum	PERUM DEPKES	Kesehatan			Bukan kewenangan Dinas Kesehatan
15	Pengadaan tenaga perawat untuk kegiatan lansia	RT 02 RW 06 CACABAN	Kesehatan			Kegiatan didukung tenaga kesehatan dari Puskesmas
16	Pengadaan PMT lansia dan balita	LURAH CACABAN	Kesehatan	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya (PMT untuk balita gizi buruk dan gizi kurang)	Rp 181.697.350	
17	Pengadaan penimbangan balita posyandu	JAGOAN RT 03 RW 06 JURANGOMBO UTARA	Kesehatan	Penyuluhan kesehatan lansia (Pemberian dalam bentuk multivitamin)	Rp 186.653.450	
18	Pengadaan PMT Balita	KEL. MAGELANG	Kesehatan	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Rp 75.510.250	

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
19	Fogging	Rt 05 Rw 07 Kedungsari	kesehatan	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya (PMT untuk balita gizi buruk dan gizi kurang)	Rp 181.697.350	
20	Pembuatan kartu jamkesda	Rt 02 Rw 06 Kedungsari	kesehatan	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Rp 240.570.550	
21	Fasilitasi bantuan kesehatan dasar	Rt 02 Rw 06 Kedungsari	kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Mulai tahun 2018 sudah tidak ada lagi pembuatan kartu jamkesda karena sudah diintegrasikan dengan JKN	Rp 7.274.819.200	
22	Pembuatan kartu jamkesda		Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat		
23	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses kesehatan dasar dasar		Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Mulai tahun 2018 sudah tidak ada lagi pembuatan kartu jamkesda karena sudah diintegrasikan dengan JKN)	Rp 7.274.819.200	
24	Pengembangan Rumah Sakit Tipe D Pendidikan		Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp 7.274.819.200	
25	Pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Puskesmas Magelang Selatan	Kesehatan	Pengadaan tanah untuk rumah sakit	Rp 20.000.000.000	
26	Pengembangan SPGT/PSC		Kesehatan			- Kekurangan pada lahan '- Akan dibangun RS Tipe C '- Jumlah RS di Kota Magelang cukup banyak dan aksesnya mudah
27	Anggaran Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah		Kesra	Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Rp 579.033.440	

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
28	Anggaran Perayaan Natal Korpri-TNI-Polri – Gereja Kota Magelang		Kesra	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	46,220,000	
29	Pemberantasan Miras	Botton I RT 5 RW V Magelang	Ketentraman dan ketertiban	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	136.733.000	
				Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	230.452.000	
30	Pelatihan kepemudaan	RW 02KEDUNGSARI	Ketentraman dan ketertiban	Diakomodir Disporapar		
31	Bantuan pada korban bencana	RW 04 CACABAN	Ketentraman dan ketertiban	Dipertimbangkan OPD		
32	Pembinaan wawasan kebangsaan pelajar SMK		Ketentraman dan ketertiban	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	33.438.000	
				Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	45.053.000	
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	32.894.000	
33	Operasi Pekat	Seluruh Kota Magelang	Ketentraman dan ketertiban	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat		
34	Bantuan modal bergulir usaha	Jurangombo Utara	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
35	Pelatihan sablon	Ngaglik Jurangombo Utara	Koperasi dan UMKM			Sasaran masyarakat yang diampu Disnaker
36	Bantuan modal bergulir usaha	Ngaglik Jurangombo Selatan	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
37	Pelatihan mengemudi	Kiringan	Koperasi dan UMKM			Sasaran masyarakat yang diampu Disnaker
38	Bantuan Modal bergulir budidaya semut ngrangrang	Jembangan	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
39	Bantuan modal bergulir usaha dagang	Kedungsari RT1/7	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
40	Bantuan modal bergulir usaha	Perum Depkes A2/25	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
41	Pelatihan wirausaha bagi karang taruna	JL. Ahmad Yani 258 Kedungsari	Koperasi dan UMKM			Diaspora / Disnaker
42	bantuan modal bergulir home industri	Pajangan RT 4/5 Kramat Selatan	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
43	Bantuan modal bergulir ternak lele	Kluyon RT 1/7	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
44	Pengadaan sarana dan prasarana usaha menjahit	Perum depkes	Koperasi dan UMKM			Disnaker
45	Bantuan bergulir untuk usaha	Kedungsari RT1/7	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
46	Bantuan modal bergulir usaha	Semplon RT 6 /1 Kemirirejo	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
47	Bantuan modal bergulir usaha	Kp Tulung RT 2/8 Magelang	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
48	Bantuan modal bergulir usaha	Gg Kantil RT 3 RW 8	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
49	Pelatihan kewirausahaan dan life skill bagi remaja	Nambangan RT 4 RW 19 Rejo Utara	Koperasi dan UMKM			Dispera/Disnaker
50	Pelatihan kewirausahaan dan life skill bagi pengangguran	Nambangan RT 1/18 Rejo Utara	Koperasi dan UMKM			Dispera/Disnaker
51	Pelatihan pembuatan kuliner nusantara	Gg Kantil 3 RT 4 RW 8 Kemirirejo	Koperasi dan UMKM	Pelatihan pembuatan roti (dana DBHCHT)		
52	Pelatihan pembuatan kuliner nusantara	Gg Kantil 3 RT 4 RW 8 Kemirirejo	Koperasi dan UMKM	Pelatihan pembuatan roti (dana DBHCHT)		
53	Pelatihan kewirausahaan dan life skill bagi pengangguran	Jl. Telaga Warna Panjang	Koperasi dan UMKM			Disnaker
54	Pelatihan kewirausahaan dan life skill bagi pengangguran	Kwayuhan	Koperasi dan UMKM			Disnaker
55	Pelatihan budidaya burung berkicau	Kemirirejo	Koperasi dan UMKM			Dinas Pertanian
56	Pelatihan pembuatan meubel	Kemirirejo	Koperasi dan UMKM			Disnaker
57	Pelatihan	Yohan Rt 04 Rw 04 Kelurahan Kemirirejo	Koperasi dan UMKM			Tidak jelas
58	Bantuan dana bergulir modal usaha	Bapak Samadi, Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
59	Bantuan dana bergulir modal usaha	KEBONPOLO RW 10 WATES	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
60	Bantuan dana bergulir modal usaha	KEDUNGSARI	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
61	Bantuan dana bergulir modal usaha	KEDUNGSARI	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
62	Bantuan dana bergulir modal usaha	PELAKU UMKM	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
63	Bantuan Modal Pengrajin Tahu di	Kelurahan Tidar Selatan dan Magersari	Koperasi dan UMKM			Sudah tidak menggulirkan lagi karena tidak ada yang mengelola (BLPT BLUD) saat ini hanya menarik dana yang masih beredar di masyarakat
64	Pembuatan lubang bipori	Sanden RT 2/7	Lingkungan Hidup	Diakomodir tahun 2019	Peningkatan Kepedilian masyarakat	
65	Pengadaan tempat sampah	Rw 09 Sanden Kramat	Lingkungan Hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
66	Pengadaan tempat sampah	Warga Sanden	Lingkungan Hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
67	Uji laboratorium kualitas air lingkungan	PERUM DEPKES	Lingkungan Hidup	Diakomodir tahun 2019	kegiatan pemantauan kualitas lingkungan	
68	Pengadaan angkutan sampah	TIDAR DUDAN TIDAR UTARA	Lingkungan Hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
69	Pengadaan angkutan sampah	TRUNAN RW 09 KEL. TIDAR SELATAN	Lingkungan Hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
70	Penambahan lahan hijau produktif	Jl. Sumba 313 Wates	Lingkungan Hidup			
71	Pelatihan bank sampah	Rt 07 Rw 07 Kedungsari	Lingkungan hidup	Diakomodir tahun 2019	diampu dalam kegiatan bintek pengeloaan sampah	
72	Penertubaan pembuanan sampah di sungai	Rt 02 rw 04 Potrobangsan	Lingkungan hidup	Diakomodir tahun 2019	diampu dalam kegiatan bintek pengeloaan sampah	
73	Pembuatan taman bermain anak pada ruang terbuka hijau		lingkungan hidup	Diakomodir tahun 2019	diampu dalam kegiatan penataan alon-alon	
74	Pengadaan fasilitas persampahan dan kebersihan		lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
75	Pengadaan tempat sampah	RT 4 RW 5 Kramat Utara	lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
76	Pembuatan sumur resapan	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			Lokasi harus masuk failitas umum
77	Pengadaaan tempat sampah organik dan non organik	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
78	Pengadaan komputer	RT 06 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
79	Motor Sampah		lingkungan hidup			4 buah tiap kelurahan dan harus masuk ke aset Kecamatan/kelurahan
80	Pembuatan sumur resapan	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			Lokasi harus masuk failitas umum
81	Pengadaan tempat sampah	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
82	Pengadaan komposter	RT 06 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Lingkungan hidup			terbentur aturan hibah ke masyarakat
83	Penerangan lampu jalan	RW.2 Gelangan	lingkungan hidup	Tiap kelurahan 4 titik		
84	Fasilitasi pengembangan desa wosata	Tidar Campur	Pariwisata			Data hasil verifikasi belum masuk
85	Fasilitasi Pengembangan dan pembangkitan kembali budaya lokal	Magelang Selatan dan sekitarnya	Pariwisata			Data hasil verifikasi belum masuk

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
86	Monitoring barang bersubsidi		Pedagangan	Diakomodir tahun 2019	Termasuk keg pemantauan barang Ilegal	
87	Pelatihan tata kelola pemerintahan aparatur kelurahan	LURAH CACABAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa			Bukan kewenangan DP4KB, Masuk ke Tapem
88	Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	LURAH CACABAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Diakomodir tahun 2019		
89	Pengaadaan sarana prasarana olahraga sepakbola	3 RW 7 Tidar Krajan	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
90	Pengaadaan sarana prasarana olahraga sepakbola	Kebondalem I	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
91	Pengaadaan sarana prasarana olahraga voli	Ibu Rini Rt 02 Rw 08 Kelurahan Kemirirejo	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
92	Pengaadaan sarana prasarana olahraga tenis meja	Bapak Samadi, Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
93	Pembuatan lapangan bola voli	Rt 06 Rw 02 Menowo	Pemuda dan Olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
94	Perbaikan lapangan olahraga		Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
95	Pembuatan gedung kesenian	Kota Magelang	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
96	Pengadaan alat-alat olahraga bola voley	RT 3 RW 9 Kelurahan Gelangan	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
97	Rehab Lapangan Bola Volley Gajahmada	Lokasi RT 3 RW 9 Kelurahan Gelangan	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
98	Gedung Kesenian Kota Magelang	Kota Magelang	Pemuda dan olahraga			Data hasil verifikasi belum masuk
99	Pengaspalan jalan lingkungan	Ngaglik Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
100	Pengaspalan jalan lingkungan	Tidar krajan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
101	Pengaspalan jalan lingkungan	Tidar Krajan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
102	Pembuatan saluran air lingkungan	Malangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			lokasi belum ditemukan

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
103	Pembuatan saluran air lingkungan	Ganten	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
104	Pembuatan saluran air lingkungan	Sanggrahan RT4 RW5 Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
105	Pemeliharaan saluran air lingkungan	JL. Ahmad Yani 258 Kedungsari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan kewenangan DPUPR
106	Pembuatan jembatan penyebangan	Kebondalem I	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan kewenangan DPUPR
107	Pengaspalan jalan lingkungan	Kedungsari RT 7/7	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Masuk dalam asset PJKA
108	Pengaspalan jalan lingkungan	Keungsari RT 7/7	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Masuk dalam asset PJKA
109	Pelebaran jembatan penghubung dari tuguran ke potrobangsan	Potrobangsan RT9/5	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
110	Pengaspalan jalan lingkungan	SAnden	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
111	Pembuatan saluran air lingkungan	SAnden	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			kontak person tidak dapat dihubungi
112	Pengaspalan jalan lingkungan	Gg Kantil 3 RT 4 RW 08	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
113	Pembuatan talud lingkungan	Meteseh Utara RT 01 RW 13 Magelang	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
114	Pengaspalan jalan lingkungan	Nambangan RT 01/18 Rejo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Tupoksi DPUPR		
115	Pengaspalan jalan lingkungan	Kwayuhan RT 3 RW 8 Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
116	Pengaspalan jalan lingkungan	Kwayuhan RT 9 RW 8 Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
117	Penataan kebijakan lahab pertanuan tidak dijadikan lahan perumahan	Gelangan RT 2 RW 8	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum masuk
118	Pembuatan saluran air lingkungan	Bogeman RT 08/07	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
119	Pembuatan tampungan air (embung) aliran air hujan	Kwayuhan RT 9 RW 8	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Perlu klarifikasi aset untuk lokasi
120	Pembuatan pengaman jalan lingkungan	Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
121	Pembuatan saluran air lingkungan	cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
122	Pembuatan saluran air lingkungan	Rt 03 Rw 07 Dumpoh Kelurahan Keramat	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
123	Pemeliharaan saluran air lingkungan	Rt 04 Rw 08 Armada Kelurahan Kramat Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
124	Pengaspalan jalan lingkungan	Rw 08 Dalangan Kelurahan Kramat Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
125	Pengaspalan jalan lingkungan	Ibu Rusniwati Rt 01 rw 11 Malanggaten Kelurahan Rejowinangun Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Kewenangan OPD DPUPR
126	Pengaspalan jalan lingkungan	Selamet Pawujo, Jaranan Kelurahan Rejowinangun Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Kewenangan OPD DPUPR
127	Pembuatan PJU	Bapak Samadi, Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Kewenangan OPD DPUPR
128	Pengaspalan jalan lingkungan	Bapak Samadi, Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
129	Pembuatan saluran air lingkungan	KRAMAT SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
130	Pemeliharaan saluran air lingkungan	KRAMAT SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
131	Pemeliharaan saluran air lingkungan	KRAMAT SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
132	Pembuatan PJU	KEBONPOLO RW 10 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum masuk
133	Normalisasi sungai lingkungan	KEBONPOLO RW 10 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum masuk
134	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 07 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Masuk dalam asset PJKA
135	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 07 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Masuk dalam asset PJKA
136	Pembuatan PJU	RW 02KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
137	Pembuatan saluran air lingkungan	RW 04 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah dikerjakan DPUPR di tahun 2017		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
138	Pemeliiharaan pintu air	RW 04 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum masuk
139	Pengaspalan jalan lingkungan	WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
140	Pembuatan saluran air lingkungan	RW 01 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
141	Pembuatan PJU	PERUM DEPKES RW 01 BLOK C,	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
142	Pembuatan talud lingkungan	RW 07 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
143	Pemeliharaan saluran air lingkungan	RW 11 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
144	Pemeliharaan saluran air lingkungan	RW 04 POTROBANGSAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
145	Pembuatan saluran air lingkungan	RW 02 WATES	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2019		
146	Pembuatan PJU	RW 09 KRAMAT SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
147	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 09 KRAMAT SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
148	Pemeliharaan tanggul	RW 03 KEBONDALEM	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Pemeliharaan/rehab jaringan irigasi		
149	Pemeliharaan saluran air lingkungan	RW 03 KEBONDALEM	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi yang tepat berada di RW 1, dan belum bisa diusulkan karena posisi saluran-saluran berada di bawah rumah-rumah sehingga diperlukan penataan ulang
150	Pembuatan penerangan jalan umum (PJU) lingkungan	RW 10 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
151	Pemeliharaan saluran air lingkungan	RT 02 RW 06 CACABAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
152	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 03 KEMIRIREJO	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
153	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 11 CACABAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
154	Pemeliharaan saluran air lingkungan	RT 07 RW 07 KELURAHAN KEMIRIREJO	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
155	Pembuatan saluran air lingkungan	WENDI KURNIAWAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Usulan tidak jelas
156	Pembuatan saluran air lingkungan	RT 01 RW 15 KLIWONAN KEL. REJOWINANGUN SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
157	Pembuatan saluran air lingkungan	RT 03 RW 10 TIDAR SARI KEL. TIDAR SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
158	Pembuatan saluran air lingkungan	MALANGAN RT 04 RW 13 KEL. TIDAR UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
159	Pembuatan PJU	RT 02 RW 02 TIDAR SAWE KEL. TIDAR SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
160	Pengaspalan jalan lingkungan	JAGOAN RT 03 RW 06 JURANGOMBO UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
161	Pemeliharaan saluran air lingkungan	SARYANTO	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
162	Pemeliharaan saluran air lingkungan	KIRINGAN RT 02 RW 03 KEL. TIDAR UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2020		
163	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 3 RW 10 KEL. TIDAR SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
164	Pembuatan talud lingkungan	RT 3 RW 10 KEL. TIDAR SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
165	Pembuatan saluran air lingkungan	RT 01 RW 02 KEL. TIDAR UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
166	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 01 RW 02 KEL. TIDAR UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
167	Pengaspalan jalan lingkungan	RT1 RW 1 KEL. JURANGOMBO SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
168	Pengaspalan jalan lingkungan	RT1 RW 1 KEL. JURANGOMBO SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
169	Pengaspalan jalan lingkungan	RT1 RW 1 KEL. JURANGOMBO SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
170	Pengaspalan jalan lingkungan	RT1 RW 1 KEL. JURANGOMBO SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
171	Pengaspalan jalan lingkungan	RT1 RW 1 KEL. JURANGOMBO SELATAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
172	Pembuatan talud lingkungan	KEL. MAGELANG	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
173	Pembuatan PJU	RW O6 SAMBAN KIDUL KEL. PANJANG	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
174	Pengaspalan jalan lingkungan	RW O6 SAMBAN KIDUL KEL. PANJANG	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
175	Pembuatan saluran air lingkungan	MALANGGATEN RT 01 RW 11 KEL. REJOWINANGUN UTARA	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
176	Pengaspalan jalan lingkungan	RW 07 KEL. GELANGAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
177	Pembangunan jembatan	RW 07 KEL. GELANGAN	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
178	Perbaikan saluran penampungan air bersih	RW 6 KEDUNGSARI	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum tersedia
179	Pembangunan selokan sepanjang ± 300 m	Perbatasan Perum Korpri Ngembik Lor RW I	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Pembangunan saluran drainase jalan menuju kelurahan Kramat Utara		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
180	Normalisasi dan Pembangunan selokan yang mengalir ke arah Sungai Progo	Ngembik Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Tahun 2018 ada pembangunan shipon		
181	Pembuatan Talud lingkungan	Kampung Pongangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Sudah dikerjakan warga
182	Pembuatan gorong-gorong		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
183	Pembuatan sumur artesis		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
184	Perbaikan saluran air		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
185	Pembuatan saluran air		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
186	Pengaspalan jalan lingkungan		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
187	Pembuatan resapan air hujan		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
188	Perbaikan jalan lingkungan		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
189	Pembuatan selokan air		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
190	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 1 RW2 Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
191	Pembuatan tutup selokan	RT 2 RW 4 Tidar Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
192	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 6 RW 1 Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
193	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 1 RW 4 Potrobangsan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Sudah dilaksanakan oleh internal PKS

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
194	Pelebaran jembatan	RT 9 RW 5 Potrobangsa	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
195	Pembuatan tutup selokan	RT 3 RW 2 Kiringan Tidar Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
196	Pembangunan tembok makam	bekas makam Ganten	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum masuk
197	Perbaikan selokan	Jalan Sumba Wates RW 1 Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
198	Pembuatan talud	RT 1 RW4 Gumuk Rejo Potrobangsan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
199	Pembuatan selokan	RT 1 RW4 Gumuk Rejo Potrobangsan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
200	Pembuatan jalan lingkungan	RT 1 RW4 Gumuk Rejo Potrobangsan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
201	Pengaspalan jalan lingkungan	RT 3 RW 7 Tidar Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
202	Perbaikan jalan lingkungan	RT 02 RW 12 Meteseh Kel. Magelang	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
203	Pembuatan saluran air	RT 02 RW 06 Tempelsari Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
204	Pavingisasi halaman SDIT Ihsanul Fikri	SDIT Ihsanul Fikri Sanden	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Status asset
205	Pengadaan cermin cembung	Barat Masjid RSI Kota Magelang	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi Dishub
206	Pembuatan saluran air	RT1 RW02 Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
207	Pembuatan saluran air		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
208	Pembuatan Saluran Tertutup panjang	RT 3 RW 2 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
209	Pavingisasi jalan	Jl. Arum 2 RW 2 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
210	Pembuatan talud	RT 02 RW 01 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
211	Betonisasi jalan	RT 01, 05 RW X Kelurahan Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
212	Rehabilitasi Posyandu Dan Paud	RW 03, Kelurahan Kramat Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan kewewnangan DPUPR
213	Perbaikan jalan	RT 05 RW 03, perbatasan RT 01 RW 04 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
214	Betonisasi jalan	RT 01 RW 04 Kelurahan Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
215	Pembuatan Saluran Tertutup panjang	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
216	Pembuatan penerangan jalan umum	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
217	Pengaspalan jalan	RT 05 s/d RT 06 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
218	Betonisasi jalan	RT 08 RW 10 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
219	Rehap penutupan Saluran Irigasi	RT 7 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
220	Pembangunan selokan air	RT 04 s/d RT 05 RW 8 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
221	Pembangunan selokan air	RT 05 RW 11 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
222	Betonisasi jalan	RT 02 RW 05 Sanggrahan Kelurahan wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah ditangani kelurahan di 2018		
223	Rehab MCK	RT 02 RW 05 Sanggrahan Kelurahan wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah ditangani kelurahan di 2018		
224	Pembangunan selokan air	RT 02, 03 RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
225	Pembangunan selokan air	RT 03, RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
226	Pembangunan selokan air	RT 06, RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
227	Pembangunan selokan air	Progo 1 RT 6 RW 3	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
228	Pembangunan selokan air	Progo 2 RT 6 RW 3	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
229	Pembuatan saluran drainase	RT 4 RW 6 Jambon Tempel Sari Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
230	Pembangunan selokan air	RT 05 RW 06 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
231	Renovasi Jalan Paving	RT 1 RW VI Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
232	Pembuatan tutup selokan	Tidar Warung	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
233	Pembangunan Senderan/ Talud	Panjang 20 meter Tinggi 2,5 meter Lokasi RT 2 RW 2 Kelurahan Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
234	Betonisasi jalan	Lebar 2 meter Panjang 25 meter Lokasi RT 2 RW 9 Kelurahan Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
235	Pavingsasi	Luas 50 meter2 Lokasi Musholla Nur Hidayah RT 3 RW 9 Kelurahan Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Status asset

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
236	Pembuatan Saluran Tertutup	RT 3 RW 2 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
237	Pavingsasi Jalan	Jl. Arum 2 RW 2 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
238	Pembuatan talud	RT 02 RW 01 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
239	Rehabilitasi jalan dan saluran	RT 01, 05 RW X Kelurahan Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
240	Rehabilitasi Posyandu Dan Paud	RW 03, Kelurahan Kramat Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum tersedia
241	Perbaikan jalan	RT 05 RW 03, perbatasan RT 01 RW 04 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
242	Rehabilitasi jalan dan saluran	RT 01 RW 04 Kelurahan Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
243	Pembuatan tutup saluran irigasi	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
244	Pengaspalan jalan	RT 05 s/d RT 06 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
245	Betonisasi jalan	RT 08 RW 10 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
246	Pembuatan selokan air	RT 7 RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
247	Pembuatan selokan air	RT 04 s/d RT 05 RW 8 Kelurahan Jurangombo Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
248	Pembuatan Drainase	RT 05 RW 11 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
249	Betonosasi Jalan	RT 02 RW 05 Sanggrahan Kelurahan wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah ditangani kelurahan di 2018		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
250	Rehabi MCK	RT 02 RW 05 Sanggrahan Kelurahan wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah ditangani kelurahan di 2018		
251	Pembuatan selokan air	RT 02, 03 RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
252	Pembuatan selokan air	RT 03, RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
253	Pembuatan selokan air	RT 06, RW 3 Kramat Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
254	Pembuatan selokan air	Progo 1 RT 6 RW 3	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
255	Pembuatan selokan air	Progo 2 RT 6 RW 3	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
256	Pembuatan Drainase	RT 4 RW 6 Jambon Tempel Sari Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
257	Pembuatan Drainase	RT 05 RW 06 Kelurahan Cacaban	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
258	Pembuatan penerangan jalan umum	Sepanjang Sungai Kali Bening (depan KPU Kota Magelang)	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
259			Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DLH
260	Pelebaran jalan	Sepanjang Jalan Kyai Mojo	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Tupoksi DPUPR
261			Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Tupoksi DPUPR
262	Pembuatan Drainase	Wates RT 7 RW 1 kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Lokasi tidak ditemukan
263	Pembuatan Drainase	Wates RT 7 RW 1 kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
264	Perbaikan dan Peninggian Pagar Lapangan Candi Nambanga	RW 19 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Tupoksi DPUPR
265	Pembuatan Talud	RT 02 RW 15 Kelurahan Rejowinangun Utara	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Tupoksi DPUPR
266	Pembuatan selokan	Wilayah Karang Kidul dan Tidar Campur	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
267	Pembangunan lahan Parkir		Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Bukan Kewenangan OPD DPUPR
268	Pavingisasi Jalan	RT 04,05,06 RW 04 Kel. Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
269	Pavingisasi Jalan	RT 01 RW 06 Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
270	Pengaspalan Jalan	RT 07 RW 06 Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Tupoksi DPUPR
271	Pengaspalan Jalan	RT 03 RW 10 Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Status asset
272	Pengaspalan Jalan	RT 10 RW 06 Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Status asset
273	Pengaspalan Jalan	RW 04 Kel Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
274	Pengaspalan Jalan	RW 04 Kel Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
275	Pengaspalan Jalan	RW 04 Kel Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
276	Pengaspalan Jalan	RW 04 Kel Jurangombo Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
277	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 04 RW 07 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Fasum belum diserahkan
278	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 01 RW 13 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Fasum belum diserahkan
279	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 02 RW 13 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Fasum belum diserahkan
280	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 03 RW 13 Kelurahan Wates	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Fasum belum diserahkan
281	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 10 RW 06 Kel Panjang	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di musrenbang		
282	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 07 RW 06 Kel Gelangan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Kondisi masih layak
283	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 05 RW 07 Kel Rejowinangun Selatan	Penataan Ruang dan pekerjaan umum			Data hasil verifikasi belum tersedia
284	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 03 RW 04 Kel Jr Ombo Sel	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
285	Pembuatan saluran drainase tertutup	RW 4 Kel Jr Ombo Sel	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
286	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 01 RW 04 Kel Jr Ombo Sel	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2020		
287	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 02 RW 04 Kel Jr Ombo Sel	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
288	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 02 RW 07 Kel Jr Ombo Sel	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	diusulkan di tahun 2019		
289	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 01 RW 07 Kel Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
290	Pembuatan saluran drainase tertutup	RT 01 RW 07 Kel Magersari	Penataan Ruang dan pekerjaan umum	Sudah terakomodir di tahun 2018		
291	Pemberian insentif bagi guru sekolah swasta non PNS	Kramat	Pendidikan	Pemberian kesejahteraan pendidik PAUD	Rp 1.023.762.000	
292	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Kedungsari RT 7/7	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
293	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Gg Kantil RT 4 RW 8	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
294	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Kp Tulung RT 2/8 Magelang	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
295	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Nambangan RT 1/18 Rejo Utara	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
296	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Gg Kantil RT 4 RW8 Kemirirejo	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
297	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Gg Kantil RT 5 RW 8	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
298	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Jl. Merbabu Jambon wot RT 5/6 Cacaban	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
299	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Kwayuhan RT 3 RW 8 Gelangan	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
300	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Kwayuhan RT 9 RW 8 Gelangan	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
301	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	Bogeman Wetan Rt 4/8 Panjang	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
302	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	RT 03 RW 08 SANDEN	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
303	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar	KEL. PANJANG	Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
304	Perbaikan PAUD		Pendidikan			
305	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar		Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
306	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar		Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
307	bantuan keuangan (insentif) untuk siswa dari keluarga tidak mampu untuk peningkatan akses pendidikan dasar		Pendidikan	Pemberian beaasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Rp 206.380.000	
308	Sosialisasi bahaya narkoba	Seluruh Kota Magelang	Pendidikan	Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikad dasar (SD dan SMP)	Rp 35.000.000	
309	Pasar murah untuk peningkatan kelancaran distribusi sembako dan ketahanan pangan	Tidar Warung RT 3 RW 6	Perdagangan	Kerjasama dengan BULOG dilaksanakan di pasar-pasar (Operasi Pasar)		
310	Pengadaan/fasilitasi lokasi PKL yang layak	Kebondalem I RT9/1	Perdagangan	Keg Rehab dan pemeliharaan rutin		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
311	Peluasan lahan PKL	Bayeman Mudal Rt 4 RW 7 Kemirirejo	Perdagangan	Keterbatasan lahan mengadakan kerjamasa sewa lahan		
312	Pembuatan showroom UKM	UMKM KEL CACABAN	Perdagangan	Sementara bisa bergabung di UMKM Center di Lantai 2 Pasar Rejowinangun		
313	Validasi data kemiskinan		Perencanaan pembangunan	Dilaksankan melalui MPM Dinas Sosial		
314	Validasi Data kemiskinan	RT 1 RW 6 Kel. J O U	Perencanaan pembangunan	Dilaksankan melalui MPM Dinas Sosial		
315	Validasi data kemiskinan		Perencanaan pembangunan	Dilaksankan melalui MPM Dinas Sosial		
316	Validasi data kemiskinan		Perencanaan pembangunan	Dilaksankan melalui MPM Dinas Sosial		
317	validasi data kemiskinan		Perencanaan pembangunan	Dilaksankan melalui MPM Dinas Sosial		
318	Pembuatan marka jalan jalur sepeda	Sanden RT 2/7	Perhubungan			Perlu adanya kajian terkait lebar jalan, apakah memungkinkan dibuat marka jalan sepeda
319	Penertiban jalur lambat yang tidak sesuai dengan fungsinya.	Sanden RT 2/7	Perhubungan			Perlu adanya kajian terkait jalur lambat
320	Pengadaan cermin cembung	PERUM DEPKES	Perhubungan	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan		
321	Pengadaan cermin cembung	RW 10 KEDUNGSARI	Perhubungan	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
322	Pengadaan cermin cembung	PERUM DEPKES BLOK D1 NO 27	Perhubungan	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan		
323	Pengadaan cermin cembung	RT 4 dengan dalangan Kramat Utara (seputaran makam dalangan)	Perhubungan	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan		
324	Pengadaan cermin cembung		Perhubungan	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan		
325	Pembuatan penerangan jalan umum		Perhubungan			Penerangan jalan bukan kewenangan Dishub
326	Pembuatan penerangan jalan umum	RW 5 Kelurahan Jurangombo Utara	Perhubungan			Penerangan jalan bukan kewenangan Dishub
327	Bantuan Bibit ikan bawal	Rt 02 Rw 07 Kampung Dumpoh	Perikanan dan kelautan			Data hasil verifikasi belum masuk
328	Pelatihan budidaya burung	JL Panjang semplon RT 6 RWI Kemirirejo	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
329	Fasilitasi pemasaran hasil hasil budidaya lidah buaya	Kemirirejo	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
330	Pengadaan polibag pupul budidaya lidah buaya	Warga Sanden	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
331	Pengadaan sarana prasarana pengembangan budidaya lidah buaya	Rw 03 Kelurahan Wates	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
332	Pelatihan budidaya alovera	RT 06 RW 02 KEL. WATES	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
333	Pelatihan budidaya jamur	RT 06 RW 02 KEL. WATES	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
334	Bantuan bibit love bird	Rt 02 rw 10 Sidotopo	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
335	Pembuatan kampung organik	Kelurahan Wates	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
336	Bantuan Bibit Tanaman Kelengkeng Crystal Super	Jurangombo Selatan	Pertanian			Data hasil verifikasi belum masuk
337	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu	Bogeman Wetan Rt 4/8 Panjang	Perumahan rakyat	Sudah terakomodir di musrenbang		
338	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu	RW 10 KEL. CACABAN	Perumahan rakyat			Masuk dalam program RTLH

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
339	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu	RW 9 KELURAHAN MAGERSARI	Perumahan rakyat			Masuk dalam program RTLH
340	Pembuatan tembok makam	Ganten	Perumahan rakyat			Tupoksi DLH
341	pembuatan MCK	Rt 03 Rw 06	Perumahan rakyat dan pemukiman	Sudah dilaksanakan tahun 2017		
342	pembuatan MCK	Rt 02 Rw 06	Perumahan rakyat dan pemukiman	Sudah dilaksanakan tahun 2017		
343	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu		Perumahan rakyat dan pemukiman			Lokasi tidak ditemukan
344	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu		Perumahan rakyat dan pemukiman			Lokasi tidak ditemukan
345	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu		Perumahan rakyat dan pemukiman			Lokasi tidak ditemukan

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
346	Pengadaan Perangkat Pangrukti Layon Krenda Stainless Steel Pengusung Jenazah		Perumahan rakyat dan pemukiman			Data hasil verifikasi belum masuk
347	Pengadaan Meja Tempat Merawat Jenazah dari pipa besi kotak		Perumahan rakyat dan pemukiman			Data hasil verifikasi belum masuk
348	Bantuan Sosial Pembangunan RTLH	An Bp Pawira Wiryadi Kelurahan Magersari	Perumahan rakyat dan pemukiman	Masuk dalam program RTLH		
349	Peningkatan selokan jalan	RT.01/RW.08 Gelangan	Perumahan rakyat dan pemukiman	Sudah terakomodir di musrenbang		
350	Peningkatan selokan jalan	RT.05/RW.02 Gelangan	Perumahan rakyat dan pemukiman	Kondisi masih layak		
351	Peningkatan jalan lingkungan	RT. 01, RT. 2 RW.2 Gelangan	Perumahan rakyat dan pemukiman	diusulkan di tahun 2019		
352	Pengadaan Meubeler	Kel. Wates	Rutin			Data hasil verifikasi belum masuk
353	Pengadaan Meubeler	Potrobanngsan	Rutin			Data hasil verifikasi belum masuk
354	Pengadaan pakaian seragam	Kel. Wates	Rutin			Data hasil verifikasi belum masuk
355	Job Fair	Jl. Merbabu Jambon wot RT 5/6 Cacaban	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
356	Job Fair	Gg Kantil 3 Rt 4 RW 8	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		

No	Kegiatan	Lokasi	Urusan/OPD	HASIL VERIFIKASI /PENELAAHAN OPD		
				Diakomodir melalui kegiatan	Pagu	Tidak diakomodir dengan alasan
357	Job Fair	Rw 09 Sanden Kramat	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
358	Job Fair	Rw 08 Dalangan Kelurahan Kramat Utara	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
359	Job Fair	Bapak Samadi, Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
360	Job Fair	KEDUNGSARI	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
361	Job Fair	RT 02 RW 02 TIDAR SAWE KEL. TIDAR SELATAN	Tenaga Kerja	Diakomodir tahun 2019		
362	Job Fair	Rt 06 Rw 03 Menowo	tenaga kerja	Diakomodir tahun 2019		

5.1.2 Program Prioritas II

Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD serta pencapaian indikator daerah.

5.1.3 Program Prioritas III

Merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/ fungsi tiap OPD.

REKAPITULASI MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA OPD	RKPD 2018	RKPD 2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.936.944.000	51.917.120.000
2	Dinas Kesehatan	41.413.279.000	44.131.370.000
3	BLUD RSU TIDAR	241.402.969.000	240.307.611.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.808.431.000	62.248.294.000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	32.978.718.000	25.438.093.000
6	Satpol PP	7.172.091.000	6.820.498.000
7	Kesbangpolinmas	2.293.452.000	2.548.746.000
8	Dinas Sosial	2.844.647.000	3.177.690.000
9	Dinas Tenaga Kerja	4.286.946.000	6.438.096.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	37.738.348.000	41.350.065.000
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.918.076.000	2.882.922.000
12	DP4KB	5.004.248.000	4.741.814.000
13	Dinas Perhubungan	10.081.310.000	7.810.900.000
14	Diskominsta	9.243.146.000	12.624.562.000
15	DPMPTSP	2.315.140.000	2.633.469.000
16	Disporapar	19.310.198.000	11.582.196.000
17	Disperpusip	6.153.342.000	4.265.933.000
18	Dinas Pertanian dan Pangan	5.993.882.000	6.434.453.000
19	Dinas Perindustrian dan perdagangan	10.736.756.000	20.806.930.000
20	**Sekretariat Daerah**	25.059.695.000	**26.652.954.000**
	Sekretariat Daerah - Bagian Tapem		2.398.596.000
	Sekretariat Daerah -Bagian Organisasi		1.001.116.000
	Sekretariat Daerah -Bagian Hukum		1.988.956.000
	Sekretariat Daerah -Bagian Pembangunan		2.187.114.000
	Sekretariat Daerah -Bagian Perekonomian		1.455.785.000
	Sekretariat Daerah -Bagian Kesra		2.489.126.000
	Sekretariat Daerah -Bagian Humas		3.515.873.000
	Sekretariat Daerah -Bagian PKP		4.469.320.000
	Sekretariat Daerah -Bagian Umum		7.147.068.000
21	Sekretariat Dewan	17.502.855.000	19.388.510.000
22	**KECAMATAN MAGELANG SELATAN**		**6.855.432.000**
	Kecamatan Magelang Selatan	7.104.651.000	1.341.053.000
	Rejowinangun Selatan		942.514.000

NO	NAMA OPD	RKPD 2018	RKPD 2019
	Magersari		986.713.000
	Jurangombo Utara		755.953.000
	Jurangombo Selatan		875.464.000
	Tidar Utara		1.041.982.000
	Tidar Selatan		911.753.000
23	**KECAMATAN MAGELANG UTARA**		**7.251.383.000**
	Kecamatan Magelan Utara	7.805.779.000	1.825.448.000
	Potrobangsan		962.710.000
	Kedungsari		1.253.984.000
	Kramat Utara		943.356.000
	Kramat Selatan		1.133.546.000
	Wates		1.132.339.000
24	**KECAMATAN MAGELANG TENGAH**		**7.857.251.000**
	Kecamatan Magelang Tengah	6.763.608.000	1.990.121.000
	Kemirirejo		1.005.200.000
	Cacaban		920.205.000
	Rejowinangun Utara		1.347.924.000
	Magelang		887.914.000
	Panjang		771.954.000
	Gelangan		933.933.000
25	Inspektorat	2.187.577.000	10.665.741.000
26	Bappeda	6.211.584.000	7.473.972.000
27	BPKAD	15.798.447.000	19.042.767.000
29	BKPP	5.427.298.000	7.924.305.000
30	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.306.199.000	2.605.389.000
	Total	**664.799.616.000**	**673.878.466.000**

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN : Pendidikan; Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2.273.600.000**		**2.244.827.000**		**2.377.500.000**				
1	1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	235.000.000	12	214.080.000	12	255.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
2	1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Operasional berjalan lancar	48	27.500.000	48 unit	24.000.000	48	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
3	1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi keuangan	137	850.000.000	122 orang	849.181.000	137	870.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
4	1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	100	175.000.000	100	193.639.000	100	175.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
5	1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	47	84.000.000	12 bulan	52.741.000	47	92.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
6	1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100	75.000.000	12 bulan	78.000.000	100	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
7	1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	18	10.000.000	18	10.500.000	18	11.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
8	1.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	4	6.500.000	12 bulan	7.000.000	4	8.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
9	1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	500	18.000.000	3 koran harian dan 1 majalah mingguan selama 12 bulan	23.100.000	550	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas	1	2.600.000	12 bulan	1.972.000	1	3.000.000	Dinas Pendidikan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
11	1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100	140.000.000	12 bulan	138.168.000	100	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
12	1.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100	390.000.000	100	289.060.000	100	410.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
13	1.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak tetap	10	240.000.000	24 orang	324.588.000	10	250.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
14	1.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannya sosialisasi manajemen kepegawaian	1	20.000.000	2 kegiatan, 110 orang	38.798.000	1	23.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	1.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**1.375.000.000**		**616.725.000**		**1.572.500.000**				
					169,264,331,000				197,572,660,000				
1	1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarananya gedung kantor.	100	100.000.000	53 item	0	100	120.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
2	1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor		50.000.000	4 alat, 1 paket software	0		100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
3	1.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeluir sekolah	3	150.000.000	140 set	0	3	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Program prioritas RPJM, ExBAU
4	1.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
5	1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100	600.000.000	48 unit	295.935.000	100	640.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	31	70.000.000	31	75.000.000	31	77.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
7	1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yberfungsi dengan baik	100	55.000.000	100	135.790.000	100	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	1.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor/kanopi dan tempat parkir	2	250.000.000	7 paket	0	3	300.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	1.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**118.000.000**		**127.050.000**		**135.500.000**				
1	1.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunya laporan keuangan semesteran	100	13.000.000	1 dokumen	8.509.000	100	16.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
2	1.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran	100	6.000.000	1 dokumen	6.571.000	100	7.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
3	1.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100	19.500.000	1 dokumen	11.345.000	100	22.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
4	1.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunya Rancana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	11.000.000	2 dokumen, 2 sosialisasi	18.206.000	100	13.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
5	1.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersusun	100	52.500.000	2 dokumen, 4 pembinaan	52.648.000	100	57.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
6	1.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	100	16.000.000	1 dokumen, 1 sosialisasi	14.771.000	100	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**4.275.900.000**		**879.127.000**		**4.345.900.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksanannya pelatihan tenaga pendidik KBTK	100	95.000.000	2 pelatihan KB 96, TK 76	126.138.000	100	105.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
2	1.1.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana	100	36.000.000	TK 118, KB 103	54.475.000	100	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
3	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat	100	22.000.000	1 PAUD	39.060.000	100	24.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
4	1.1.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	100	12.500.000	100	16.182.000	100	14.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
5	1.1.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksanannya lomba pembuatan media pembelanjaran	100	108.500.000	2 lomba, 150 peserta	34.345.000	100	115.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
6	1.1.15.65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Masyarakat Kota Magelang memperoleh informasi tentang pentingnya PAUD	100	17.000.000	100	0	100	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
7	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Terlaksananya lomba - lomba semarak anak	100	73.500.000	40 peroran gan KB, 25 beregu KB, 30 TK	90.784.000	100	80.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.1.15.71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	Terlaksanya Lomba bercerita/mendongeng guru TK	1	6.000.000	40 peserta, 2 lomba	20.641.000	1	8.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
9	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) PAUD	100	18.000.000	100	20.670.000	100	19.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
10	1.1.15.83	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksannya gebyar PAUD	1	20.000.000	Anak KB TK, 5 jenis lomba	121.511.000	1	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
11	1.1.15.88	Penyediaan Operasional PAUD	Tersalurnya Dana BAntuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sesuai Juknis	100	3.767.400.000	1 TK Negeri	60.000.000	100	3.767.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Kota Layak Anak
12	1.1.15.89	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda paud	2	25.000.000	6 Bunda PAUD, 9 Gugud Paud	25.321.000	2	32.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
13	1.1.15.95	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)	Terpenuhinya buku koleksi PAUD			100%	40.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Kota Layak Anak
14	1.1.15.87	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksanannya lomba KB TK			10 lomba , 1 sosialisasi	130.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Kota Layak Anak
15	1.1.15.91	Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini	Terlaksananya pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini			100%	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Kota Layak Anak
16	1.1.15.86	Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif	Pembinaan lembaga PAUD (BKB dan SPS), Pembinaan PAUD Holistik Integratif (KB dan TK)			100 persen	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	1.1.15.80	Pelatihan pembuatan AP PAUD	Terlaksananya pelatihan pembuatan Alat Peraga Edukatif PAUD	3	75.000.000	96 x 3 SPS TPQ, KB - 70 x 3 TK, TPA	0	3	95.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
18	1.1.15.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terpenuhinya Sarana Prasarana Sekolah PAUD			100 persen	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	SDGs, Program prioritas RPJM
19	1.1.15.96	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK)	Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD			100%	80.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Kota Layak Anak
20	1.1.15.92	Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif (Bantuan Keuangan Provinsi)	Pengembangan PAUD Holistik Integratif			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	105	Kota Layak Anak
21	1.1.15.93	Bantuan Sosialisasi Penyiapan Akreditasi Lembaga PAUD DIKMAS (Bantuan Keuangan)	Tersosialisasinya Akreditasi bagi Lembaga PAUD di Kota Magelang			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	80	Kota Layak Anak
22	1.1.15.90	Manajemen Pengelolaan BOP PAUD	Terlaksananya Operasional BOP PAUD			100 persen	20.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Kota Layak Anak
23	1.1.15.94	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD	Terpenuhinya Perpustakaan di TK Negeri Pembina			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	80	Kota Layak Anak
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**840.000.000**		**945.010.000**		**895.000.000**				
			Jumlah gedung kesenian	1		1		2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13		14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77		78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39		41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79		80					
			Cakupan tempat 100%	100		100		100					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan organisasi 34%	100		100		100					
			DISPORA		92,000,000				30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terfasilitasinya upacara adat (nyadran) di Kampung	100	280.000.000	17 kelurahan	402.150.000	100	290.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
2	2.16.15.5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terfasilitasinya pementasan seni budaya di Kota Magelang	100	385.000.000	1 kali pementasan	405.000.000	100	420.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.16.15.8	Pembinaan sanggar / workshop seni budaya	Terlaksananya workshop seni tari di Kota Magelang			75 orang peserta	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.16.15.6	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah se Kota Magelang	10	175.000.000	6 kegiatan	137.860.000	10	185.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.16.15.9	Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Terfasilitasi masyarakat penghayat kepercayaan			100	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**98.074.000**		**69.861.000**		**107.486.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Meningkatkan informasi masyarakat	100	16.000.000	100	0	100	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.17.15.14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	Meningkatkan minat baca	100	15.540.000	80 Peserta	0	100	17.133.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
3	2.17.15.24	Pengolahan bahan pustaka desa buku	Buku terawat dengan baik	100	6.300.000	100	6.615.000	100	6.945.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.17.15.25	Grand event desa buku	Masyarakat terfasilitasi untuk membaca	100	31.500.000	100	33.075.000	100	34.729.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.17.15.26	Peningkatan pelayanan desa buku	meningkatkan kinerja	100	28.734.000	100	30.171.000	100	31.679.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			108.899.000		47.500.000		120.448.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.4.15.16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	Aset sekolah terkelola dengan baik	100	63.899.000	100	0	100	70.448.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	4.4.15.73	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	Upgrade aplikasi SIM APBS (E-School Budgeting)	100	45.000.000	100	47.500.000	100	50.000.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	69	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**			**23.377.492.000**		**20.807.724.000**		**23.857.492.000**				
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	99.61%		100.00%		100.00%					
			APK SD/SDLB/MI/Paket A	114%		116%		118%					
			APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	78.00%		80.00%		82.00%					
			APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	88.00%		90.00%		96.00%					
			Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	0,1361		0,13611		0,13611					
			Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	0,2431		0,24306		0,24306					
			Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16		1:16		1:16					
			Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14		1:14		1:14					
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01		0,01		0,01					
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,13		0,04		0,04					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,002		0,001		0,001					
			Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%		150%		150%					
			Angka Melanjutkan SMP ke SMA	157%		160%		163%					
			Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	65%		70%		75%					
			Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar	42 pelajar		36 pelajar		30 pelajar					
			Adanya kebijakan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa										
			Persentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	85%		90%		95%					
			Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	87%		90%		93%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	30%		40%		50%					
1	1.1.16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum	100	47.000.000	2 kali pelatihan, 800 tenaga pendidik	52.388.000	100	49.000.000	KOTA MAGELANG	Dana Alokasi Umum	75	SDGs, Program prioritas RPJM
2	1.1.16.67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD	4	70.000.000	3 PKBM	143.905.000	4	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
3	1.1.16.68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terlaksananya penyelenggaraan Paket B setara SMP	5	210.000.000	80 orang	280.131.000	5	220.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
4	1.1.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terlaksananya penyebarluasan dan sosiallisasi informasi pendidikan dasar	100	52.500.000	125 orang	39.002.000	100	57.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
5	1.1.16.89	Tes pengendali mutu SMP	Terlaksananya tes pengendalli mutu SMP	100	220.000.000	6600 Siswa Kelas VIII dan IX SMP	261.408.000	100	255.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs
6	1.1.16.97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.352.000	100	157.600.000	100	132.352.000	SD Negeri Kedungsari 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
7	1.1.16.98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	86.854.000	100	99.200.000	100	86.854.000	SD Negeri Kedungsari 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
8	1.1.16.99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	135.340.000	100	131.200.000	100	135.340.000	SD Negeri Kedungsari 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.1.16.100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	154.432.000	100	144.632.000	100	154.432.000	SD Negeri Kedungsari 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
10	1.1.16.101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	279.744.000	100	229.712.000	100	279.744.000	SD Negeri Kedungsari 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
11	1.1.16.102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.176.000	100	98.148.000	100	107.176.000	SD Negeri Kramat 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
12	1.1.16.103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	79.836.000	100	88.468.000	100	79.836.000	SD Negeri Kramat 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
13	1.1.16.104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	87.392.000	100	79.992.000	100	87.392.000	SD Negeri Kramat 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
14	1.1.16.105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	114.592.000	100	104.792.000	100	114.592.000	SD Negeri Kramat 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
15	1.1.16.106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.530.000	100	97.730.000	100	107.530.000	SD Negeri Kramat 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
16	1.1.16.107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	70.158.000	100	60.358.000	100	70.158.000	SD Negeri Potrobangsan 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
17	1.1.16.108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	154.558.000	100	144.758.000	100	154.558.000	SD Negeri Potrobangsan 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
18	1.1.16.109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	152.698.000	100	142.898.000	100	152.698.000	SD Negeri Potrobangsan 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	1.1.16.110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	93.934.000	100	84.134.000	100	93.934.000	SD Negeri Potrobangsan 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
20	1.1.16.111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	138.436.000	100	128.636.000	100	138.436.000	SD Negeri Wates 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
21	1.1.16.112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	148.262.000	100	138.882.000	100	148.262.000	SD Negeri Wates 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
22	1.1.16.113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	99.170.000	100	89.370.000	100	99.170.000	SD Negeri Wates 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
23	1.1.16.114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	151.380.000	100	141.580.000	100	151.380.000	SD Negeri Wates 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
24	1.1.16.115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.236.000	100	71.436.000	100	81.236.000	SD Negeri Wates 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
25	1.1.16.119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	164.312.000	100	154.512.000	100	164.312.000	SD Negeri Cacaban 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
26	1.1.16.120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	140.500.000	100	130.700.000	100	140.500.000	SD Negeri Cacaban 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
27	1.1.16.121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	139.818.000	100	145.018.000	100	139.818.000	SD Negeri Cacaban 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
28	1.1.16.122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	134.604.000	100	124.804.000	100	134.604.000	SD Negeri Cacaban 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	1.1.16.123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	149.640.000	100	139.840.000	100	149.640.000	SD Negeri Cacaban 6	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
30	1.1.16.124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	104.456.000	100	94.656.000	100	104.456.000	SD Negeri Gelangan 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
31	1.1.16.125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.734.000	100	71.934.000	100	81.734.000	SD Negeri Gelangan 24	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
32	1.1.16.126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	125.338.000	100	115.538.000	100	125.338.000	SD Negeri Gelangan 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
33	1.1.16.127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	174.964.000	100	165.164.000	100	174.964.000	SD Negeri Gelangan 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
34	1.1.16.129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.034.000	100	71.234.000	100	81.034.000	SD Negeri Gelangan 7	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
35	1.1.16.130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	280.444.000	100	248.844.000	100	280.444.000	SD Negeri Kemirirejo 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
36	1.1.16.131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	303.740.000	100	296.800.000	100	303.740.000	SD Negeri Kemirirejo 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
37	1.1.16.132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	278.402.000	100	248.802.000	100	278.402.000	SD Negeri Magelang 2/7	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
38	1.1.16.133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	143.596.000	100	133.796.000	100	143.596.000	SD Negeri Magelang 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	1.1.16.134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	136.390.000	100	126.590.000	100	136.390.000	SD Negeri Magelang 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
40	1.1.16.135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	105.132.000	100	121.600.000	100	105.132.000	SD Negeri Magelang 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
41	1.1.16.136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	280.610.000	100	249.010.000	100	280.610.000	SD Negeri Magelang 6	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
42	1.1.16.137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	114.808.000	100	104.223.000	100	114.808.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
43	1.1.16.138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	77.050.000	100	82.250.000	100	77.050.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
44	1.1.16.139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	68.242.000	100	58.442.000	100	68.242.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
45	1.1.16.140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	127.254.000	100	117.454.000	100	127.254.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
46	1.1.16.141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	138.086.000	100	128.286.000	100	138.086.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
47	1.1.16.142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	147.064.000	100	137.264.000	100	147.064.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
48	1.1.16.151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	142.174.000	100	132.374.000	100	142.174.000	SD Negeri Jurangombo 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	1.1.16.152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	146.584.000	100	136.784.000	100	146.584.000	SD Negeri Jurangombo 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
50	1.1.16.153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	175.996.000	100	162.400.000	100	175.996.000	SD Negeri Jurangombo 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
51	1.1.16.154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	162.522.000	100	152.722.000	100	162.522.000	SD Negeri Jurangombo 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
52	1.1.16.155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	88.420.000	100	93.620.000	100	88.420.000	SD Negeri Magersari 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
53	1.1.16.156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	143.062.000	100	133.262.000	100	143.062.000	SD Negeri Magersari 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
54	1.1.16.157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	79.482.000	100	84.682.000	100	79.482.000	SD Negeri Magersari 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
55	1.1.16.158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	149.788.000	100	139.385.000	100	149.788.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
56	1.1.16.159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	168.256.000	100	158.456.000	100	168.256.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
57	1.1.16.160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	108.270.000	100	98.470.000	100	108.270.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
58	1.1.16.161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	136.704.000	100	126.904.000	100	136.704.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	1.1.16.162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	156.738.000	100	146.938.000	100	156.738.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
60	1.1.16.163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	131.854.000	100	122.054.000	100	131.854.000	SD Negeri Tidar 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
61	1.1.16.164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	148.240.000	100	138.440.000	100	148.240.000	SD Negeri Tidar 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
62	1.1.16.165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.536.000	100	122.736.000	100	132.536.000	SD Negeri Tidar 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
63	1.1.16.166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	170.670.000	100	161.396.000	100	170.670.000	SD Negeri Tidar 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
64	1.1.16.167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.966.000	100	123.166.000	100	132.966.000	SD Negeri Tidar 6	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
65	1.1.16.168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	116.010.000	100	106.770.000	100	116.010.000	SD Negeri Tidar 7	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
66	1.1.16.172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	776.811.000	100	679.019.000	100	776.811.000	SMP Negeri 1 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
67	1.1.16.173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	833.940.000	100	733.235.000	100	833.940.000	SMP Negeri 2 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
68	1.1.16.174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	783.441.000	100	685.041.000	100	783.441.000	SMP Negeri 3 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	1.1.16.175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	559.936.000	100	486.336.000	100	559.936.000	SMP Negeri 4 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
70	1.1.16.176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	739.198.000	100	645.198.000	100	739.198.000	SMP Negeri 5 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
71	1.1.16.177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	571.130.000	100	489.270.000	100	571.130.000	SMP Negeri 6 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
72	1.1.16.178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	Terselenggaranya pendidikan	1	621.563.000	100	544.763.000	1	621.563.000	SMP Negeri 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
73	1.1.16.179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	735.283.000	100	638.483.000	100	735.283.000	SMP Negeri 8 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
74	1.1.16.180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	677.964.000	100	588.364.000	100	677.964.000	SMP Negeri 9 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
75	1.1.16.181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	699.905.000	100	615.905.000	100	699.905.000	SMP Negeri 10 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
76	1.1.16.182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	611.707.000	100	534.907.000	100	611.707.000	SMP Negeri 11 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
77	1.1.16.183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	570.258.000	100	493.458.000	100	570.258.000	SMP Negeri 12 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
78	1.1.16.184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	782.286.000	100	678.686.000	100	782.286.000	SMP Negeri 13 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	1.1.16.197	Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)			274 siswa pendidikan dasar	25.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Pokok Pikiran DPRD
80	1.1.16.203	Rehabilitasi Tolet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya	Terlaksananya rehabilitasi Toilet Siswa beserta sanitasinya			100%	374.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
81	1.1.16.202	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP beserta perabotnya	Terlaksananya rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya			100%	180.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
82	1.1.16.201	Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP beserta perabotnya			100%	90.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
83	1.1.16.199	Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP (Bantuan Keuangan)	Terpenuhinya Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	80	Kota Layak Anak, SDGs
84	1.1.16.198	Peningkatan Sarana Prasarana SD dan SMP (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya Peningkatan Sarpras SD dan SMP			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	80	SDGs, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
85	1.1.16.193	Pengadaan Komputer Sekolah	Tersedianya komputer sekolah	10	4.250.000.000	48 unit (SMP 4, SMP 10 dan SMP 12)	0	10	4.300.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
86	1.1.16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi rumah penjaga SD dan SMP	7	630.000.000	6 sekolah dasar	0	10	900.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	1.1.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana sanitasi sekolah	2	92.000.000	3	0	4	190.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	
88	1.1.16.91	Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima		0	100	300.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
89	1.1.16.92	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima		0	100	730.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
90	1.1.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya mebeluir SD dan SMP	6	300.000.000	6 Sekolah Dasar	0	6	300.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	80	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
91	1.1.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitas ruang kelas sekolah	2	180.000.000	1 ruang kelas SD Magelang 5	0	2	180.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs, Program prioritas RPJM
92	1.1.16.88	Tes pengendali mutu SD	terlaksananya tes pengendali mutu pendidikan dasar			4800 siswa kelas 5 SD	106.956.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs
93	1.1.16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Terdistribusikannya bantuan pakaian seragam sekolah			2200 SD, 3000 SMP	2.048.126.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	1.1.16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah			1 ruang perpustakaan di SD Gelanagan 6	0		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
95	1.1.16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah			10 Sekolah Dasar	127.868.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs, Program prioritas RPJM
96	1.1.16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah dasar			6 sekolah dasar	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
97	1.1.16.200	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD beserta perabotnya			100%	240.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
98	1.1.16.196	Penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	Tersedianya sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)			3 lokasi	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
99	1.1.16.195	Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa	Terlaksananya bimbingan dan pemantapan mental siswa			700 siswa kelas 6 SD dan kelas IX SMP	57.645.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
100	1.1.16.1	Pembangunan gedung sekolah	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah			3 gedung SMP : SMP 7, SMP 13, SMP 10	0		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	1.1.16.128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	97.784.000		0	SDN Gelangan 6	Dana Alokasi Umum	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**			**667.500.000**		**716.055.000**		**729.500.000**				
			Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100		100		100					
			Jumlah pengunjung museum	5,250		5,350		5,450					
			Jumlah koleksi museum	12		13		14					
1	2.16.16.5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terpeliharanya kondisi museum foto dan dokumen sejarah	12	145.000.000	1 museum	150.000.000	12	155.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.16.6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya promosi seni budaya Kota Magelang di tingkat Provinsi	100	60.000.000	1 kali pementasan	90.950.000	100	70.000.000	Kota Semarang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.16.16.7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Tersusunnya buku profil kebudayaan	50	14.000.000	1 buku	14.000.000	50	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.16.16.8	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal	100	100.000.000	1 film	107.500.000	100	110.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.16.16.11	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terselenggaranya pengiriman peserta Kemah Budaya	1	22.500.000	1 kegiatan	22.625.000	1	27.500.000	Kab/Kota di Jawa Tengah	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.16.16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Terlaksananya pelatihan PERMADANI bagi siswa dikdas	40	36.000.000	40 siswa dikdas	38.000.000	40	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
7	2.16.16.16	Pembuatan Replika Benda - Benda Sejarah Jenderal Sudirman	Replika Benda Peninggal Jenderal Sudirman			25	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.16.16.17	Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya	Terjaganya Bangunan Cagar Budaya di Kota Magelang			2	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.16.16.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Keikutsertaan Kota Magelang dalam pentas seni di TMII	100	140.000.000	1 kegiatan	145.000.000	100	150.000.000	TMII Jakarta	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	2.16.16.13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya rekomendasi cagar budaya	35	150.000.000	10 rekomendasi	92.980.000	35	160.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
11	2.16.16.14	Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah	Pemeliharaan Situs Budaya Mantyasih			100%	55.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	2.16.16.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Terlaksananya Pengadaan Gamelan			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	75	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**352.000.000**		**647.784.000**		**385.000.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya malam resepsi HUT RI	1	115.000.000	1 kegiatan	169.333.000	1	125.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Tema RKPD 2019
2	2.16.17.3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya sarasehan budaya dan pameran museum	2	45.000.000	2 kegiatan	30.951.000	2	50.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
3	2.16.17.4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih	100	70.000.000	9	72.500.000	100	75.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Pengiriman Duta Seni Parade Budaya	1	122.000.000	1 kegiatan	125.000.000	1	135.000.000	Kab/Kota di Jawa Tengah	Dana Alokasi Umum	75	Tema RKPD 2019
5	2.16.17.9	Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval	Terselenggaranya Karnaval Pembangunan			1 Kegiatan	250.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**613.500.000**		**1.794.060.000**		**671.000.000**				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%		97.31%		97.63%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%		100%					
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%		25.00%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Juara FASI	4		-		-					
			Jumlah Juara MTQ	1		2		2					
1	1.1.18.3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya Kursus PKBM	100	54.000.000	325 warga belajar	150.000.000	100	58.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
2	1.1.18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya pelatihan dan ketrampilan warga buta aksara dan KUM	100	95.000.000	90 orang	88.000.000	100	105.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
3	1.1.18.5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya kursus stir mobil dan montir	60	75.000.000	90 orang	81.700.000	60	83.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan, Rencana
4	1.1.18.20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	Terpenuhinya operasional lembaga PKBM	3	26.000.000	12 bulan	33.730.000	3	28.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan, Rencana
5	1.1.18.21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	Jumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra UNPK	170	15.500.000	170 peserta	14.200.000	170	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
6	1.1.18.22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur	290	32.500.000	170 Peserta Paket C dan 155 Peserata Paket B	82.320.000	290	37.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
7	1.1.18.29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	Peserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD	100	24.000.000	175 Peserta	24.904.000	100	26.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
8	1.1.18.31	Pelaksanaan Pra UNPK	Terlaksananya pra UNPK Paket B	120	14.500.000	120 Peserta	14.903.000	120	16.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
9	1.1.18.32	Replikasi Kelurahan Vokasi	Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada Kelurahan Vokasi	2	62.000.000	2	60.745.000	2	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
10	1.1.18.33	Pelatihan Kursus	Peningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing Kursus	90	40.000.000	90 Peserta	37.157.000	90	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.1.18.35	Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)	Terlaksananya Kursus Kewirausahaan Desa		0	250 peserta	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	104	Penanggulangan Kemiskinan
12	1.1.18.38	Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi	Terjalin kemitraan DIKMAS		0	100 Peserta	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Penanggulangan Kemiskinan
13	1.1.18.39	Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi	Terbantunya Taman Bacaan Masyarakat		0	100 persen	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Kota Layak Anak
14	1.1.18.41	Penyelenggaraan Paket C	Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA	4	175.000.000	52 Orang	273.901.000	4	190.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
15	1.1.18.43	Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK)	Terlaksananya pembangunan sarana belajar SKB			100%	932.500.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
16	1.1.18.42	Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) bagi masyarakat miskin (Bantuan Keuangan Provinsi)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Vokasi			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	105	Penanggulangan Kemiskinan
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.18	**Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya**			**185.000.000**		**335.000.000**		**200.000.000**				
					4,279,381,000				5,465,814,000				
			Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	225		227		228					
			Misi kesenian 100%	39%		43%		45%					
1	2.16.18.3	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam Munas Apeksi	1	185.000.000	1	335.000.000	1	200.000.000	Kota se Indonesia (menyesuaikan jadwal Munas APEKS	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.18.7	Event budaya keluar kota dan luar propinsi	Terpromosikannya seni budaya Kota Magelang			5 Kegiatan	0		0	Kab/Kota Seluruh Indonesia	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**81.000.000**		**145.489.000**		**94.000.000**				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		0					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		1		2					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		0		0					
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya perwal pelaksanaan perda pendidikan	1	35.000.000	1	80.000.000	1	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
2	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunya rancangan Peraturan Walikota tentang cagar budaya	1	46.000.000	1 raperwal	65.489.000	1	49.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
3	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Peraturan Walikota tentang BOP PAUD			1 Raperwal	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**			**2.424.500.000**		**1.540.878.000**		**2.722.500.000**				
			DISDIK		2,335,421,550								
			Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36%		36%		36%					
			Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14%		14%		14%					
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%		86%		87%					
			Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	53%		54%		55%					
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95%		95%		95%					
			Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	68%		68%		68%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35.50%		35.75%		36.00%					
			Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14.05%		14.23%		14.40%					
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%		86%		87%					
			Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	53.15%		54.15%		54.65%					
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95.10%		95.20%		95.30%					
			Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	67.67%		67.97%		68.17%					
			Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama	65%		70%		75%					
			Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	65%		70%		75%					
1	1.1.20.1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Pendidik	100	47.500.000	440 orang , 2 kegiatan	43.500.000	100	51.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
2	1.1.20.4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah dasar	100	446.000.000	450 orang	287.500.000	100	489.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
3	1.1.20.14	Pembinaan MGMP SMP	Terlaksananya Pembinaan MGMP SMP	100	328.000.000	400 orang	301.750.000	100	359.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.1.20.17	Pembinaan KKPS	Pembinaan KKPS	100	21.000.000	9 Pengawas	10.585.000	100	23.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
5	1.1.20.36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	Terlaksananya pelatihan dan pemenuhan penerbitan jurnal ilmiah	75	63.000.000	75 orang	59.500.000	75	69.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
6	1.1.20.52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	Teraksananya workshop manajemen perencanaan terpadu	100	155.000.000	200 orang terdiri dari unsur PKBM, KB, Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	165.000.000	100	175.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.1.20.57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Terlaksananya jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal	10	70.000.000	1 kegiatan, 10 cabang lomba, 100 peserta	56.900.000	10	77.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
8	1.1.20.74	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	Terlaksananya pelatihan assessor penilaian kinerja guru			150 guru	47.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
9	1.1.20.75	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	Terlaksananya pembinaan KKKS TK			73 Kepala Sekolah TK	65.750.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.1.20.59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	Terselenggaranya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi	100	113.000.000	160 pendidik dan tenaga kependidikan formal	95.216.000	100	123.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
11	1.1.20.61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	Terlaksananya pendataan dan entry nilai peserta ujian nasional	100	46.000.000	100%	37.200.000	100	51.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
12	1.1.20.70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	Terlaksananya pembinaan KKG TK	100	144.000.000	12 bulan, 300 peserta	179.200.000	100	158.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
13	1.1.20.65	Pemberian Kesejahteraan Pendidik PAUD	Terpenuhinya kesejahteraan pendidikan PAUD	600	720.000.000	600		600	850.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
14	1.1.20.76	Lomba Olimpiade Guru Nasional	Terlaksananya lomba olimpiade guru			6 cabang lomba (1 tematik, 5 mapel)	69.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
15	1.1.20.19	Pembinaan MKKS SMP	Terlaksananya Pembinaan Managerial Kepala SMP	22	56.000.000	22 Kepala SMP	43.000.000	22	62.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
16	1.1.20.18	Pembinaan KKKS SD	Terlaksananya Pembinaan KKKS SD	2	215.000.000	77 Kepala SD	79.777.000	2	235.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
17	1.1.20.77	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan)	Terpenuhinya insentif bagi Pendidik PAUD			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	105	Kota Layak Anak, Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**			**1.777.530.000**		**1.983.994.000**		**1.940.580.000**				
			Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :	46		48		50					
			a. Propinsi	31 pelajar		32 pelajar		33 pelajar					
			b. Nasional	15 pelajar		16 pelajar		17 pelajar					
			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	90%		92%		94%					
			Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	97%		98%		99%					
			Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	45%		60%		75%					
			Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi	35%		50%		65%					
1	1.1.22.7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	100	15.000.000	100	43.000.000	100	18.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	1.1.22.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan mon itoring, evaluasi dan pelaporan	100	11.550.000	100	12.000.000	100	12.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.1.22.11	Penerimaan siswa baru	Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar	100	172.000.000	3 PSB : TK, SD, SMP	141.651.000	100	188.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
4	1.1.22.13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Beasiswa tepat sasaran	100	206.380.000	100	72.035.000	100	206.380.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
5	1.1.22.22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	Terlaksanya fungsi kontroling	100	98.600.000	100	51.800.000	100	98.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	1.1.22.23	Sidak pelajar	Terlaksananya evaluasi sidak siswa	100	48.000.000	4 kegiatan dan 11 sidak	50.000.000	100	52.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Program prioritas RPJM
7	1.1.22.24	Pelaksanakan asistensi APBS	Terlaksananya desk APBS	100	85.000.000	1 kegiatan	101.181.000	100	95.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
8	1.1.22.25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah	84	32.000.000	84 sekolah	30.642.000	84	35.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
9	1.1.22.26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	Tersusunnya buku RKSM	25	33.000.000	73 TK, 77 SD/MI, 23 SMP	22.123.000	25	37.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.1.22.29	Manajemen pengelolaan ICT center	Terlaksananya sosialisasi Informasi Pendidikan secara online	12	40.000.000	1 kegiatan	71.730.000	12	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
11	1.1.22.30	Penyusunan buku selayang pandang	Tersusunnya buku selayang pandang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	27.000.000	50 buku	23.977.000	100	31.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	1.1.22.33	Penilaian kinerja kepala sekolah	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah negeri	100	51.500.000	1 Kepsek TK, 61 Kepala SD, 13 Kepala SMP	48.500.000	100	55.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
13	1.1.22.35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	Terlaksananya PAK pengawas dan tenaga kependidikan	100	94.500.000	1300 guru PNS	81.600.000	100	103.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
14	1.1.22.38	Manajemen pendataan pendidikan	Sistem informasi berbasis masyarakat	100	65.000.000	100		100	70.000.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
15	1.1.22.41	Penyusunan Kalender Pendidikan	Tersedianya kalender pendidikan	100	17.000.000	225 buah	15.196.000	100	19.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
16	1.1.22.42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	Penggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis	100	35.000.000	4 kegiatan	55.350.000	100	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
17	1.1.22.47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Tersusunnya basis data pendidikan	100	60.000.000	3 kegiatan	48.584.000	100	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
18	1.1.22.49	Akreditasi Sekolah	Terlaksananya sosialisasi akreditasi sekolah	20	40.000.000	50 orang	37.382.000	20	44.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	1.1.22.52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	Terverifikasinya data BOS	100	16.000.000	100	15.732.000	100	19.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
20	1.1.22.77	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	100	450.000.000	100	436.174.000	100	490.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Pemberantasan Korupsi
21	1.1.22.58	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			100%	50.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
22	1.1.22.56	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			1 kegiatan	46.702.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
23	1.1.22.59	Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			1 kegiatan	67.360.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
24	1.1.22.2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	180.000.000	2	195.000.000	2	215.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
25	1.1.22.57	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	terlaksananya monev bosda			4 kegiatan	156.275.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
26	1.1.22.54	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	Terlaksananya 2 lomba dan 1 sosialisasi gerakan literasi kitab suci (GELIS SUCI)			2 lomba, 1 sosialisasi	60.000.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	1.1.22.80	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan mahir dasar kepramukaan bagi pembina pramuka SD dan SMP			1 kegiatan, 100 peserta	50.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
28	1.1.22.78	Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			100%	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1.1.23	**Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**			**1.871.500.000**		**2.107.736.000**		**2.135.000.000**				
			Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	45%		50%		55%					
1	1.1.23.1	Lomba cerdas cermat SD	Terlaksananya lomba cerdas cermat	6	32.500.000	1 kegiatan	32.542.000	6	37.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
2	1.1.23.5	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	Terlaksananya olimpiade MIPA SD / Pra US	100	90.000.000	4800 peserta	50.000.000	100	97.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
3	1.1.23.9	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	Terselenggaranya lomba dokter kecil	100	43.000.000	150 siswa	37.500.000	100	48.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
4	1.1.23.11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	Terlaksananya lomba sekolah sehat	100	45.500.000	2 kegiatan	48.267.000	100	52.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
5	1.1.23.17	Pelaksanaan Pra US SD	Terlaksananya pra us sd	100	77.000.000	100	192.225.000	100	81.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
6	1.1.23.18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	Terukurnya kemampuan siswa	100	165.000.000	4800 peserta	290.269.000	100	185.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
7	1.1.23.19	Pelaksanaan Pra UN SMP	Terukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti UN	100	101.000.000	3300 Peserta	138.069.000	100	107.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
8	1.1.23.20	Pelaksanaan US dan UN SMP	Siswa mengikuti US dan UN SMP	3300	142.500.000	6600 Peserta	230.783.000	3300	162.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.1.23.21	Lomba Cerdas Cermat SMP	Terlaksananya lomba cerdas cermat SMP	100	25.000.000	2 kegiatan	41.558.000	100	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
10	1.1.23.27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	Terselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP, Olimpiade MIPA	4	420.000.000	5 kegiatan	516.517.000	4	463.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
11	1.1.23.28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	Meningkatnya disiplin siswa	100	250.000.000	120	146.006.000	125	300.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
12	1.1.23.31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Terlaksananya lomba kader kesehatan remaja	100	60.000.000	2 event	65.000.000	100	70.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
13	1.1.23.32	Lomba PBB siswa SD/SMP	Terlaksananya lomba PBB	2	95.000.000	90 siswa	0	2	125.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
14	1.1.23.33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	Terlaksananya lomba mapel agama Islam pendidikan dasar	100	325.000.000	2 kegiatan, 680 peserta	300.000.000	100	375.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
15	1.1.23.34	Lomba Drum Band	meningkatnya mutu pendidikan dasar			500 orang	0		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
16	1.1.23.25	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	Terlaksananya lomba karya ilmiah remaja SMP			1 kegiatan	19.000.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
17	1.1.23.35	Pembinaan mental siswa dan guru (ESQ)	Terlaksananya pembinaan mental siswa dan Guru (ESQ)			2 kegiatan	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
	1.1.25	**Program Pendidikan Berkelanjutan**			**0**		**150.700.000**		**0**				
			Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	92.74%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatkan nasionalisme dan pendidikan karakter bagi siswa	100%	150.000.000								
1	1.1.25.3	Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	105	Pokok Pikiran DPRD
2	1.1.25.1	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	terlaksananya kemah kebangsaan siswa			1 kegiatan	150.700.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
	1.1.26	**Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**			**0**		**16.757.600.000**		**0**				
1	1.1.26.41	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	101.600.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
2	1.1.26.40	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	68.800.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
3	1.1.26.22	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	144.800.000		0	SD Negeri Cacaban 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	95	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
4	1.1.26.21	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	141.600.000		0	SD Negeri Cacaban 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
5	1.1.26.20	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	Terlasksananya Wajar Dikdas			100%	150.400.000		0	SD Negeri Cacaban 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
6	1.1.26.38	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	124.800.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.1.26.68	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	568.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
8	1.1.26.7	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	73.600.000		0	SD Negeri Kramat 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
9	1.1.26.6	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	144.800.000		0	SD Negeri Kramat 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
10	1.1.26.8	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	80.800.000		0	SD Negeri Kramat 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
11	1.1.26.9	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	108.800.000		0	SD Negeri Kramat 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
12	1.1.26.10	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	122.400.000		0	SD Negeri Kramat 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
13	1.1.26.11	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	75.200.000		0	SD Negeri Potrobangsan 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
14	1.1.26.12	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	184.000.000		0	SD Negeri Potrobangsan 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
15	1.1.26.13	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	153.600.000		0	SD Negeri Potrobangsan 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
16	1.1.26.14	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	94.400.000		0	SD Negeri Potrobangsan 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	1.1.26.15	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	142.400.000		0	SD Negeri Wates 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
18	1.1.26.16	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	124.800.000		0	SD Negeri Wates 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
19	1.1.26.17	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	52.800.000		0	SD Negeri Wates 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
20	1.1.26.18	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	117.600.000		0	SD Negeri Wates 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
21	1.1.26.19	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	58.400.000		0	SD Negeri Wates 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
22	1.1.26.1	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	155.200.000		0	SD Negeri Kedungsari 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
23	1.1.26.2	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	98.400.000		0	SD Negeri Kedungsari 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
24	1.1.26.39	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	75.200.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
25	1.1.26.3	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	132.000.000		0	SD Negeri Kedungsari 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
26	1.1.26.4	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	164.000.000		0	SD Negeri Kedungsari 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	1.1.26.5	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	296.000.000		0	SD Negeri Kedungsari 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
28	1.1.26.37	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	291.200.000		0	SD Negeri Magelang 2/7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
29	1.1.26.33	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	151.200.000		0	SD Negeri Magelang 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
30	1.1.26.34	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	130.400.000		0	SD Negeri Magelang 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
31	1.1.26.35	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	121.600.000		0	SD Negeri Magelang 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
32	1.1.26.36	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	318.400.000		0	SD Negeri Magelang 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
33	1.1.26.25	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	98.400.000		0	SD Negeri Gelangan 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
34	1.1.26.26	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	59.200.000		0	SD Negeri Gelangan 24	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
35	1.1.26.27	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	108.800.000		0	SD Negeri Gelangan 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
36	1.1.26.28	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	164.000.000		0	SD Negeri Gelangan 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	1.1.26.29	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	124.800.000		0	SD Negeri Gelangan 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
38	1.1.26.30	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	60.000.000		0	SD Negeri Gelangan 7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
39	1.1.26.42	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	143.200.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
40	1.1.26.43	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	130.400.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
41	1.1.26.23	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	135.200.000		0	SD Negeri Cacaban 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
42	1.1.26.24	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	158.400.000		0	SD Negeri Cacaban 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
43	1.1.26.44	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	162.400.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
44	1.1.26.45	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	124.800.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
45	1.1.26.46	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	160.800.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
46	1.1.26.47	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	166.400.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	1.1.26.31	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	296.800.000		0	SD Negeri Kemirirejo 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
48	1.1.26.32	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	308.000.000		0	SD Negeri Kemirirejo 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
49	1.1.26.51	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	150.400.000		0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
50	1.1.26.52	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	152.000.000		0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
51	1.1.26.53	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	110.400.000		0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
52	1.1.26.54	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	137.600.000		0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
53	1.1.26.55	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	135.200.000		0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
54	1.1.26.56	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	153.600.000		0	SD Negeri Tidar 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
55	1.1.26.57	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	150.400.000		0	SD Negeri Tidar 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
56	1.1.26.58	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	148.000.000		0	SD Negeri Tidar 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	1.1.26.59	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	160.800.000		0	SD Negeri Tidar 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
58	1.1.26.60	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	115.200.000		0	SD Negeri Tidar 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
59	1.1.26.62	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	711.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
60	1.1.26.61	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	120.000.000		0	SD Negeri Tidar 7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
61	1.1.26.63	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	769.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
62	1.1.26.64	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	725.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
63	1.1.26.65	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	533.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
64	1.1.26.66	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	680.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
65	1.1.26.67	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	549.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
66	1.1.26.69	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	708.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	1.1.26.70	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	622.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
68	1.1.26.71	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	625.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
69	1.1.26.72	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	549.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
70	1.1.26.73	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	546.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
71	1.1.26.74	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	719.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
72	1.1.26.48	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	89.600.000		0	SD Negeri Magersari 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
73	1.1.26.49	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	145.600.000		0	SD Negeri Magersari 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
74	1.1.26.50	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	84.000.000		0	SD Negeri Magersari 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
			TOTAL		**40.439.495.000**		**51.917.120.000**		**42.289.406.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN : Pendidikan; Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2.273.600.000**		**2.244.827.000**		**2.377.500.000**				
1	1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	235.000.000	12	214.080.000	12	255.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
2	1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Operasional berjalan lancar	48	27.500.000	48 unit	24.000.000	48	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
3	1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi keuangan	137	850.000.000	122 orang	849.181.000	137	870.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
4	1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	100	175.000.000	100	193.639.000	100	175.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
5	1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	47	84.000.000	12 bulan	52.741.000	47	92.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
6	1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100	75.000.000	12 bulan	78.000.000	100	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
7	1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	18	10.000.000	18	10.500.000	18	11.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
8	1.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	4	6.500.000	12 bulan	7.000.000	4	8.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
9	1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	500	18.000.000	3 koran harian dan 1 majalah mingguan selama 12 bulan	23.100.000	550	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas	1	2.600.000	12 bulan	1.972.000	1	3.000.000	Dinas Pendidikan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
11	1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100	140.000.000	12 bulan	138.168.000	100	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
12	1.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100	390.000.000	100	289.060.000	100	410.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
13	1.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak tetap	10	240.000.000	24 orang	324.588.000	10	250.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
14	1.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannya sosialisasi manajemen kepegawaian	1	20.000.000	2 kegiatan, 110 orang	38.798.000	1	23.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	1.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**1.375.000.000**		**616.725.000**		**1.572.500.000**				
					169,264,331,000				197,572,660,000				
1	1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarananya gedung kantor.	100	100.000.000	53 item	0	100	120.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
2	1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor		50.000.000	4 alat, 1 paket software	0		100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
3	1.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeluir sekolah	3	150.000.000	140 set	0	3	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Program prioritas RPJM, ExBAU
4	1.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
5	1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100	600.000.000	48 unit	295.935.000	100	640.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	31	70.000.000	31	75.000.000	31	77.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
7	1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yberfungsi dengan baik	100	55.000.000	100	135.790.000	100	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	1.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor/kanopi dan tempat parkir	2	250.000.000	7 paket	0	3	300.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	1.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**118.000.000**		**127.050.000**		**135.500.000**				
1	1.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunya laporan keuangan semesteran	100	13.000.000	1 dokumen	8.509.000	100	16.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
2	1.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran	100	6.000.000	1 dokumen	6.571.000	100	7.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
3	1.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100	19.500.000	1 dokumen	11.345.000	100	22.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
4	1.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunya Rancana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	11.000.000	2 dokumen, 2 sosialisasi	18.206.000	100	13.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
5	1.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersusun	100	52.500.000	2 dokumen, 4 pembinaan	52.648.000	100	57.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
6	1.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	100	16.000.000	1 dokumen, 1 sosialisasi	14.771.000	100	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**4.275.900.000**		**879.127.000**		**4.345.900.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksanannya pelatihan tenaga pendidik KBTK	100	95.000.000	2 pelatihan KB 96, TK 76	126.138.000	100	105.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
2	1.1.15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana	100	36.000.000	TK 118, KB 103	54.475.000	100	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
3	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat	100	22.000.000	1 PAUD	39.060.000	100	24.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
4	1.1.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	100	12.500.000	100	16.182.000	100	14.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
5	1.1.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksanannya lomba pembuatan media pembelanjaran	100	108.500.000	2 lomba, 150 peserta	34.345.000	100	115.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
6	1.1.15.65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Masyarakat Kota Magelang memperoleh informasi tentang pentingnya PAUD	100	17.000.000	100	0	100	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
7	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Terlaksananya lomba - lomba semarak anak	100	73.500.000	40 peroran gan KB, 25 beregu KB, 30 TK	90.784.000	100	80.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.1.15.71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	Terlaksanya Lomba bercerita/mendongeng guru TK	1	6.000.000	40 peserta, 2 lomba	20.641.000	1	8.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
9	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) PAUD	100	18.000.000	100	20.670.000	100	19.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
10	1.1.15.83	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksannya gebyar PAUD	1	20.000.000	Anak KB TK, 5 jenis lomba	121.511.000	1	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
11	1.1.15.88	Penyediaan Operasional PAUD	Tersalurnya Dana BAntuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sesuai Juknis	100	3.767.400.000	1 TK Negeri	60.000.000	100	3.767.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Kota Layak Anak
12	1.1.15.89	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda paud	2	25.000.000	6 Bunda PAUD, 9 Gugud Paud	25.321.000	2	32.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
13	1.1.15.95	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)	Terpenuhinya buku koleksi PAUD			100%	40.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Kota Layak Anak
14	1.1.15.87	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksanannya lomba KB TK			10 lomba , 1 sosialisasi	130.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Kota Layak Anak
15	1.1.15.91	Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini	Terlaksananya pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini			100%	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Kota Layak Anak
16	1.1.15.86	Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif	Pembinaan lembaga PAUD (BKB dan SPS), Pembinaan PAUD Holistik Integratif (KB dan TK)			100 persen	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	1.1.15.80	Pelatihan pembuatan AP PAUD	Terlaksananya pelatihan pembuatan Alat Peraga Edukatif PAUD	3	75.000.000	96 x 3 SPS TPQ, KB - 70 x 3 TK, TPA	0	3	95.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
18	1.1.15.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terpenuhinya Sarana Prasarana Sekolah PAUD			100 persen	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	SDGs, Program prioritas RPJM
19	1.1.15.96	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK)	Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD			100%	80.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Kota Layak Anak
20	1.1.15.92	Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif (Bantuan Keuangan Provinsi)	Pengembangan PAUD Holistik Integratif			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	105	Kota Layak Anak
21	1.1.15.93	Bantuan Sosialisasi Penyiapan Akreditasi Lembaga PAUD DIKMAS (Bantuan Keuangan)	Tersosialisasinya Akreditasi bagi Lembaga PAUD di Kota Magelang			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	80	Kota Layak Anak
22	1.1.15.90	Manajemen Pengelolaan BOP PAUD	Terlaksananya Operasional BOP PAUD			100 persen	20.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Kota Layak Anak
23	1.1.15.94	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD	Terpenuhinya Perpustakaan di TK Negeri Pembina			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	80	Kota Layak Anak
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**840.000.000**		**945.010.000**		**895.000.000**				
			Jumlah gedung kesenian	1		1		2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13		14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77		78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39		41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79		80					
			Cakupan tempat 100%	100		100		100					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan organisasi 34%	100		100		100					
			DISPORA		92,000,000				30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terfasilitasinya upacara adat (nyadran) di Kampung	100	280.000.000	17 kelurahan	402.150.000	100	290.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
2	2.16.15.5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terfasilitasinya pementasan seni budaya di Kota Magelang	100	385.000.000	1 kali pementasan	405.000.000	100	420.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.16.15.8	Pembinaan sanggar / workshop seni budaya	Terlaksananya workshop seni tari di Kota Magelang			75 orang peserta	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.16.15.6	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah se Kota Magelang	10	175.000.000	6 kegiatan	137.860.000	10	185.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.16.15.9	Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Terfasilitasi masyarakat penghayat kepercayaan			100	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**98.074.000**		**69.861.000**		**107.486.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Meningkatkan informasi masyarakat	100	16.000.000	100	0	100	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.17.15.14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	Meningkatkan minat baca	100	15.540.000	80 Peserta	0	100	17.133.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
3	2.17.15.24	Pengolahan bahan pustaka desa buku	Buku terawat dengan baik	100	6.300.000	100	6.615.000	100	6.945.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.17.15.25	Grand event desa buku	Masyarakat terfasilitasi untuk membaca	100	31.500.000	100	33.075.000	100	34.729.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.17.15.26	Peningkatan pelayanan desa buku	meningkatkan kinerja	100	28.734.000	100	30.171.000	100	31.679.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			108.899.000		47.500.000		120.448.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.4.15.16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	Aset sekolah terkelola dengan baik	100	63.899.000	100	0	100	70.448.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	4.4.15.73	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	Upgrade aplikasi SIM APBS (E-School Budgeting)	100	45.000.000	100	47.500.000	100	50.000.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	69	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**			**23.377.492.000**		**20.807.724.000**		**23.857.492.000**				
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	99.61%		100.00%		100.00%					
			APK SD/SDLB/MI/Paket A	114%		116%		118%					
			APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	78.00%		80.00%		82.00%					
			APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	88.00%		90.00%		96.00%					
			Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	0,1361		0,13611		0,13611					
			Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	0,2431		0,24306		0,24306					
			Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16		1:16		1:16					
			Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14		1:14		1:14					
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01		0,01		0,01					
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,13		0,04		0,04					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,002		0,001		0,001					
			Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%		150%		150%					
			Angka Melanjutkan SMP ke SMA	157%		160%		163%					
			Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	65%		70%		75%					
			Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar	42 pelajar		36 pelajar		30 pelajar					
			Adanya kebijakan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa										
			Persentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	85%		90%		95%					
			Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	87%		90%		93%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	30%		40%		50%					
1	1.1.16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum	100	47.000.000	2 kali pelatihan, 800 tenaga pendidik	52.388.000	100	49.000.000	KOTA MAGELANG	Dana Alokasi Umum	75	SDGs, Program prioritas RPJM
2	1.1.16.67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD	4	70.000.000	3 PKBM	143.905.000	4	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
3	1.1.16.68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terlaksananya penyelenggaraan Paket B setara SMP	5	210.000.000	80 orang	280.131.000	5	220.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
4	1.1.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terlaksananya penyebarluasan dan sosiallisasi informasi pendidikan dasar	100	52.500.000	125 orang	39.002.000	100	57.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
5	1.1.16.89	Tes pengendali mutu SMP	Terlaksananya tes pengendalli mutu SMP	100	220.000.000	6600 Siswa Kelas VIII dan IX SMP	261.408.000	100	255.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs
6	1.1.16.97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.352.000	100	157.600.000	100	132.352.000	SD Negeri Kedungsari 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
7	1.1.16.98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	86.854.000	100	99.200.000	100	86.854.000	SD Negeri Kedungsari 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
8	1.1.16.99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	135.340.000	100	131.200.000	100	135.340.000	SD Negeri Kedungsari 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.1.16.100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	154.432.000	100	144.632.000	100	154.432.000	SD Negeri Kedungsari 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
10	1.1.16.101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	279.744.000	100	229.712.000	100	279.744.000	SD Negeri Kedungsari 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
11	1.1.16.102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.176.000	100	98.148.000	100	107.176.000	SD Negeri Kramat 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
12	1.1.16.103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	79.836.000	100	88.468.000	100	79.836.000	SD Negeri Kramat 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
13	1.1.16.104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	87.392.000	100	79.992.000	100	87.392.000	SD Negeri Kramat 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
14	1.1.16.105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	114.592.000	100	104.792.000	100	114.592.000	SD Negeri Kramat 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
15	1.1.16.106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	107.530.000	100	97.730.000	100	107.530.000	SD Negeri Kramat 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
16	1.1.16.107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	70.158.000	100	60.358.000	100	70.158.000	SD Negeri Potrobangsan 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
17	1.1.16.108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	154.558.000	100	144.758.000	100	154.558.000	SD Negeri Potrobangsan 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
18	1.1.16.109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	152.698.000	100	142.898.000	100	152.698.000	SD Negeri Potrobangsan 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	1.1.16.110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	93.934.000	100	84.134.000	100	93.934.000	SD Negeri Potrobangsan 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
20	1.1.16.111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	138.436.000	100	128.636.000	100	138.436.000	SD Negeri Wates 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
21	1.1.16.112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	148.262.000	100	138.882.000	100	148.262.000	SD Negeri Wates 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
22	1.1.16.113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	99.170.000	100	89.370.000	100	99.170.000	SD Negeri Wates 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
23	1.1.16.114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	151.380.000	100	141.580.000	100	151.380.000	SD Negeri Wates 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
24	1.1.16.115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.236.000	100	71.436.000	100	81.236.000	SD Negeri Wates 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
25	1.1.16.119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	164.312.000	100	154.512.000	100	164.312.000	SD Negeri Cacaban 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
26	1.1.16.120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	140.500.000	100	130.700.000	100	140.500.000	SD Negeri Cacaban 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
27	1.1.16.121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	139.818.000	100	145.018.000	100	139.818.000	SD Negeri Cacaban 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
28	1.1.16.122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	134.604.000	100	124.804.000	100	134.604.000	SD Negeri Cacaban 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	1.1.16.123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	149.640.000	100	139.840.000	100	149.640.000	SD Negeri Cacaban 6	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
30	1.1.16.124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	104.456.000	100	94.656.000	100	104.456.000	SD Negeri Gelangan 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
31	1.1.16.125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.734.000	100	71.934.000	100	81.734.000	SD Negeri Gelangan 24	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
32	1.1.16.126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	125.338.000	100	115.538.000	100	125.338.000	SD Negeri Gelangan 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
33	1.1.16.127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	174.964.000	100	165.164.000	100	174.964.000	SD Negeri Gelangan 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
34	1.1.16.129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	81.034.000	100	71.234.000	100	81.034.000	SD Negeri Gelangan 7	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
35	1.1.16.130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	280.444.000	100	248.844.000	100	280.444.000	SD Negeri Kemirirejo 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
36	1.1.16.131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	303.740.000	100	296.800.000	100	303.740.000	SD Negeri Kemirirejo 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
37	1.1.16.132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	278.402.000	100	248.802.000	100	278.402.000	SD Negeri Magelang 2/7	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
38	1.1.16.133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	143.596.000	100	133.796.000	100	143.596.000	SD Negeri Magelang 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	1.1.16.134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	136.390.000	100	126.590.000	100	136.390.000	SD Negeri Magelang 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
40	1.1.16.135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	105.132.000	100	121.600.000	100	105.132.000	SD Negeri Magelang 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
41	1.1.16.136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	280.610.000	100	249.010.000	100	280.610.000	SD Negeri Magelang 6	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
42	1.1.16.137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	114.808.000	100	104.223.000	100	114.808.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
43	1.1.16.138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	77.050.000	100	82.250.000	100	77.050.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
44	1.1.16.139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	68.242.000	100	58.442.000	100	68.242.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
45	1.1.16.140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	127.254.000	100	117.454.000	100	127.254.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
46	1.1.16.141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	138.086.000	100	128.286.000	100	138.086.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
47	1.1.16.142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	147.064.000	100	137.264.000	100	147.064.000	SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
48	1.1.16.151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	142.174.000	100	132.374.000	100	142.174.000	SD Negeri Jurangombo 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	1.1.16.152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	146.584.000	100	136.784.000	100	146.584.000	SD Negeri Jurangombo 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
50	1.1.16.153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	175.996.000	100	162.400.000	100	175.996.000	SD Negeri Jurangombo 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
51	1.1.16.154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	162.522.000	100	152.722.000	100	162.522.000	SD Negeri Jurangombo 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
52	1.1.16.155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	88.420.000	100	93.620.000	100	88.420.000	SD Negeri Magersari 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
53	1.1.16.156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	143.062.000	100	133.262.000	100	143.062.000	SD Negeri Magersari 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
54	1.1.16.157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	79.482.000	100	84.682.000	100	79.482.000	SD Negeri Magersari 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
55	1.1.16.158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	149.788.000	100	139.385.000	100	149.788.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
56	1.1.16.159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100	168.256.000	100	158.456.000	100	168.256.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
57	1.1.16.160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	108.270.000	100	98.470.000	100	108.270.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
58	1.1.16.161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	136.704.000	100	126.904.000	100	136.704.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	1.1.16.162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	156.738.000	100	146.938.000	100	156.738.000	SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
60	1.1.16.163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100	131.854.000	100	122.054.000	100	131.854.000	SD Negeri Tidar 1	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
61	1.1.16.164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100	148.240.000	100	138.440.000	100	148.240.000	SD Negeri Tidar 3	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
62	1.1.16.165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.536.000	100	122.736.000	100	132.536.000	SD Negeri Tidar 4	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
63	1.1.16.166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100	170.670.000	100	161.396.000	100	170.670.000	SD Negeri Tidar 5	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
64	1.1.16.167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100	132.966.000	100	123.166.000	100	132.966.000	SD Negeri Tidar 6	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
65	1.1.16.168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100	116.010.000	100	106.770.000	100	116.010.000	SD Negeri Tidar 7	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
66	1.1.16.172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	776.811.000	100	679.019.000	100	776.811.000	SMP Negeri 1 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
67	1.1.16.173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	833.940.000	100	733.235.000	100	833.940.000	SMP Negeri 2 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
68	1.1.16.174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	783.441.000	100	685.041.000	100	783.441.000	SMP Negeri 3 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	1.1.16.175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	559.936.000	100	486.336.000	100	559.936.000	SMP Negeri 4 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
70	1.1.16.176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	739.198.000	100	645.198.000	100	739.198.000	SMP Negeri 5 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
71	1.1.16.177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	571.130.000	100	489.270.000	100	571.130.000	SMP Negeri 6 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
72	1.1.16.178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	Terselenggaranya pendidikan	1	621.563.000	100	544.763.000	1	621.563.000	SMP Negeri 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
73	1.1.16.179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	735.283.000	100	638.483.000	100	735.283.000	SMP Negeri 8 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
74	1.1.16.180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	677.964.000	100	588.364.000	100	677.964.000	SMP Negeri 9 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
75	1.1.16.181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	699.905.000	100	615.905.000	100	699.905.000	SMP Negeri 10 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
76	1.1.16.182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	611.707.000	100	534.907.000	100	611.707.000	SMP Negeri 11 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
77	1.1.16.183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	570.258.000	100	493.458.000	100	570.258.000	SMP Negeri 12 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
78	1.1.16.184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100	782.286.000	100	678.686.000	100	782.286.000	SMP Negeri 13 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	1.1.16.197	Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)			274 siswa pendidikan dasar	25.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Pokok Pikiran DPRD
80	1.1.16.203	Rehabilitasi Tolet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya	Terlaksananya rehabilitasi Toilet Siswa beserta sanitasinya			100%	374.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
81	1.1.16.202	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP beserta perabotnya	Terlaksananya rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya			100%	180.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
82	1.1.16.201	Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP beserta perabotnya			100%	90.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
83	1.1.16.199	Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP (Bantuan Keuangan)	Terpenuhinya Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	80	Kota Layak Anak, SDGs
84	1.1.16.198	Peningkatan Sarana Prasarana SD dan SMP (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya Peningkatan Sarpras SD dan SMP			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	80	SDGs, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
85	1.1.16.193	Pengadaan Komputer Sekolah	Tersedianya komputer sekolah	10	4.250.000.000	48 unit (SMP 4, SMP 10 dan SMP 12)	0	10	4.300.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
86	1.1.16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi rumah penjaga SD dan SMP	7	630.000.000	6 sekolah dasar	0	10	900.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	1.1.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana sanitasi sekolah	2	92.000.000	3	0	4	190.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	
88	1.1.16.91	Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima		0	100	300.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
89	1.1.16.92	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima		0	100	730.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
90	1.1.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya mebeluir SD dan SMP	6	300.000.000	6 Sekolah Dasar	0	6	300.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	80	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
91	1.1.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitas ruang kelas sekolah	2	180.000.000	1 ruang kelas SD Magelang 5	0	2	180.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs, Program prioritas RPJM
92	1.1.16.88	Tes pengendali mutu SD	terlaksananya tes pengendali mutu pendidikan dasar			4800 siswa kelas 5 SD	106.956.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs
93	1.1.16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Terdistribusikannya bantuan pakaian seragam sekolah			2200 SD, 3000 SMP	2.048.126.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	1.1.16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah			1 ruang perpustakaan di SD Gelanagan 6	0		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
95	1.1.16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah			10 Sekolah Dasar	127.868.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs, Program prioritas RPJM
96	1.1.16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah dasar			6 sekolah dasar	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
97	1.1.16.200	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD beserta perabotnya			100%	240.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
98	1.1.16.196	Penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	Tersedianya sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)			3 lokasi	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
99	1.1.16.195	Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa	Terlaksananya bimbingan dan pemantapan mental siswa			700 siswa kelas 6 SD dan kelas IX SMP	57.645.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
100	1.1.16.1	Pembangunan gedung sekolah	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah			3 gedung SMP : SMP 7, SMP 13, SMP 10	0		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	1.1.16.128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	97.784.000		0	SDN Gelangan 6	Dana Alokasi Umum	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**			**667.500.000**		**716.055.000**		**729.500.000**				
			Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100		100		100					
			Jumlah pengunjung museum	5,250		5,350		5,450					
			Jumlah koleksi museum	12		13		14					
1	2.16.16.5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terpeliharanya kondisi museum foto dan dokumen sejarah	12	145.000.000	1 museum	150.000.000	12	155.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.16.6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya promosi seni budaya Kota Magelang di tingkat Provinsi	100	60.000.000	1 kali pementasan	90.950.000	100	70.000.000	Kota Semarang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.16.16.7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Tersusunnya buku profil kebudayaan	50	14.000.000	1 buku	14.000.000	50	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.16.16.8	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal	100	100.000.000	1 film	107.500.000	100	110.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.16.16.11	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terselenggaranya pengiriman peserta Kemah Budaya	1	22.500.000	1 kegiatan	22.625.000	1	27.500.000	Kab/Kota di Jawa Tengah	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2.16.16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Terlaksananya pelatihan PERMADANI bagi siswa dikdas	40	36.000.000	40 siswa dikdas	38.000.000	40	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
7	2.16.16.16	Pembuatan Replika Benda - Benda Sejarah Jenderal Sudirman	Replika Benda Peninggal Jenderal Sudirman			25	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.16.16.17	Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya	Terjaganya Bangunan Cagar Budaya di Kota Magelang			2	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.16.16.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Keikutsertaan Kota Magelang dalam pentas seni di TMII	100	140.000.000	1 kegiatan	145.000.000	100	150.000.000	TMII Jakarta	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	2.16.16.13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya rekomendasi cagar budaya	35	150.000.000	10 rekomendasi	92.980.000	35	160.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
11	2.16.16.14	Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah	Pemeliharaan Situs Budaya Mantyasih			100%	55.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	2.16.16.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Terlaksananya Pengadaan Gamelan			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	75	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**352.000.000**		**647.784.000**		**385.000.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya malam resepsi HUT RI	1	115.000.000	1 kegiatan	169.333.000	1	125.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Tema RKPD 2019
2	2.16.17.3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya sarasehan budaya dan pameran museum	2	45.000.000	2 kegiatan	30.951.000	2	50.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
3	2.16.17.4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih	100	70.000.000	9	72.500.000	100	75.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Pengiriman Duta Seni Parade Budaya	1	122.000.000	1 kegiatan	125.000.000	1	135.000.000	Kab/Kota di Jawa Tengah	Dana Alokasi Umum	75	Tema RKPD 2019
5	2.16.17.9	Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval	Terselenggaranya Karnaval Pembangunan			1 Kegiatan	250.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**613.500.000**		**1.794.060.000**		**671.000.000**				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%		97.31%		97.63%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%		100%					
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%		25.00%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Juara FASI	4		-		-					
			Jumlah Juara MTQ	1		2		2					
1	1.1.18.3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya Kursus PKBM	100	54.000.000	325 warga belajar	150.000.000	100	58.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
2	1.1.18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya pelatihan dan ketrampilan warga buta aksara dan KUM	100	95.000.000	90 orang	88.000.000	100	105.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
3	1.1.18.5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya kursus stir mobil dan montir	60	75.000.000	90 orang	81.700.000	60	83.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan, Rencana
4	1.1.18.20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	Terpenuhinya operasional lembaga PKBM	3	26.000.000	12 bulan	33.730.000	3	28.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan, Rencana
5	1.1.18.21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	Jumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra UNPK	170	15.500.000	170 peserta	14.200.000	170	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
6	1.1.18.22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur	290	32.500.000	170 Peserta Paket C dan 155 Peserata Paket B	82.320.000	290	37.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
7	1.1.18.29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	Peserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD	100	24.000.000	175 Peserta	24.904.000	100	26.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
8	1.1.18.31	Pelaksanaan Pra UNPK	Terlaksananya pra UNPK Paket B	120	14.500.000	120 Peserta	14.903.000	120	16.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
9	1.1.18.32	Replikasi Kelurahan Vokasi	Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada Kelurahan Vokasi	2	62.000.000	2	60.745.000	2	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan
10	1.1.18.33	Pelatihan Kursus	Peningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing Kursus	90	40.000.000	90 Peserta	37.157.000	90	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.1.18.35	Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)	Terlaksananya Kursus Kewirausahaan Desa		0	250 peserta	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	104	Penanggulangan Kemiskinan
12	1.1.18.38	Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi	Terjalin kemitraan DIKMAS		0	100 Peserta	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Penanggulangan Kemiskinan
13	1.1.18.39	Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi	Terbantunya Taman Bacaan Masyarakat		0	100 persen	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Kota Layak Anak
14	1.1.18.41	Penyelenggaraan Paket C	Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA	4	175.000.000	52 Orang	273.901.000	4	190.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
15	1.1.18.43	Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK)	Terlaksananya pembangunan sarana belajar SKB			100%	932.500.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
16	1.1.18.42	Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) bagi masyarakat miskin (Bantuan Keuangan Provinsi)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Vokasi			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	105	Penanggulangan Kemiskinan
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.18	**Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya**			**185.000.000**		**335.000.000**		**200.000.000**				
					4,279,381,000				5,465,814,000				
			Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	225		227		228					
			Misi kesenian 100%	39%		43%		45%					
1	2.16.18.3	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam Munas Apeksi	1	185.000.000	1	335.000.000	1	200.000.000	Kota se Indonesia (menyesuaikan jadwal Munas APEKS	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.18.7	Event budaya keluar kota dan luar propinsi	Terpromosikannya seni budaya Kota Magelang			5 Kegiatan	0		0	Kab/Kota Seluruh Indonesia	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**81.000.000**		**145.489.000**		**94.000.000**				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		0					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		1		2					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		0		0					
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya perwal pelaksanaan perda pendidikan	1	35.000.000	1	80.000.000	1	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
2	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunya rancangan Peraturan Walikota tentang cagar budaya	1	46.000.000	1 raperwal	65.489.000	1	49.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
3	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Peraturan Walikota tentang BOP PAUD			1 Raperwal	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**			**2.424.500.000**		**1.540.878.000**		**2.722.500.000**				
			DISDIK		2,335,421,550								
			Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36%		36%		36%					
			Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14%		14%		14%					
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%		86%		87%					
			Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	53%		54%		55%					
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95%		95%		95%					
			Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	68%		68%		68%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35.50%		35.75%		36.00%					
			Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14.05%		14.23%		14.40%					
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%		86%		87%					
			Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	53.15%		54.15%		54.65%					
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95.10%		95.20%		95.30%					
			Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	67.67%		67.97%		68.17%					
			Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama	65%		70%		75%					
			Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	65%		70%		75%					
1	1.1.20.1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Pendidik	100	47.500.000	440 orang , 2 kegiatan	43.500.000	100	51.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
2	1.1.20.4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah dasar	100	446.000.000	450 orang	287.500.000	100	489.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
3	1.1.20.14	Pembinaan MGMP SMP	Terlaksananya Pembinaan MGMP SMP	100	328.000.000	400 orang	301.750.000	100	359.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.1.20.17	Pembinaan KKPS	Pembinaan KKPS	100	21.000.000	9 Pengawas	10.585.000	100	23.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
5	1.1.20.36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	Terlaksananya pelatihan dan pemenuhan penerbitan jurnal ilmiah	75	63.000.000	75 orang	59.500.000	75	69.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
6	1.1.20.52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	Teraksananya workshop manajemen perencanaan terpadu	100	155.000.000	200 orang terdiri dari unsur PKBM, KB, Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	165.000.000	100	175.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.1.20.57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Terlaksananya jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal	10	70.000.000	1 kegiatan, 10 cabang lomba, 100 peserta	56.900.000	10	77.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
8	1.1.20.74	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	Terlaksananya pelatihan assessor penilaian kinerja guru			150 guru	47.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
9	1.1.20.75	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	Terlaksananya pembinaan KKKS TK			73 Kepala Sekolah TK	65.750.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.1.20.59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	Terselenggaranya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi	100	113.000.000	160 pendidik dan tenaga kependidikan formal	95.216.000	100	123.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
11	1.1.20.61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	Terlaksananya pendataan dan entry nilai peserta ujian nasional	100	46.000.000	100%	37.200.000	100	51.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
12	1.1.20.70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	Terlaksananya pembinaan KKG TK	100	144.000.000	12 bulan, 300 peserta	179.200.000	100	158.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
13	1.1.20.65	Pemberian Kesejahteraan Pendidik PAUD	Terpenuhinya kesejahteraan pendidikan PAUD	600	720.000.000	600		600	850.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
14	1.1.20.76	Lomba Olimpiade Guru Nasional	Terlaksananya lomba olimpiade guru			6 cabang lomba (1 tematik, 5 mapel)	69.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
15	1.1.20.19	Pembinaan MKKS SMP	Terlaksananya Pembinaan Managerial Kepala SMP	22	56.000.000	22 Kepala SMP	43.000.000	22	62.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
16	1.1.20.18	Pembinaan KKKS SD	Terlaksananya Pembinaan KKKS SD	2	215.000.000	77 Kepala SD	79.777.000	2	235.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
17	1.1.20.77	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan)	Terpenuhinya insentif bagi Pendidik PAUD			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	105	Kota Layak Anak, Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**			**1.777.530.000**		**1.983.994.000**		**1.940.580.000**				
			Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :	46		48		50					
			a. Propinsi	31 pelajar		32 pelajar		33 pelajar					
			b. Nasional	15 pelajar		16 pelajar		17 pelajar					
			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	90%		92%		94%					
			Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	97%		98%		99%					
			Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	45%		60%		75%					
			Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi	35%		50%		65%					
1	1.1.22.7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	100	15.000.000	100	43.000.000	100	18.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	1.1.22.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan mon itoring, evaluasi dan pelaporan	100	11.550.000	100	12.000.000	100	12.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.1.22.11	Penerimaan siswa baru	Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar	100	172.000.000	3 PSB : TK, SD, SMP	141.651.000	100	188.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
4	1.1.22.13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Beasiswa tepat sasaran	100	206.380.000	100	72.035.000	100	206.380.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Penanggulangan Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
5	1.1.22.22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	Terlaksanya fungsi kontroling	100	98.600.000	100	51.800.000	100	98.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	1.1.22.23	Sidak pelajar	Terlaksananya evaluasi sidak siswa	100	48.000.000	4 kegiatan dan 11 sidak	50.000.000	100	52.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Program prioritas RPJM
7	1.1.22.24	Pelaksanakan asistensi APBS	Terlaksananya desk APBS	100	85.000.000	1 kegiatan	101.181.000	100	95.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
8	1.1.22.25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah	84	32.000.000	84 sekolah	30.642.000	84	35.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
9	1.1.22.26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	Tersusunnya buku RKSM	25	33.000.000	73 TK, 77 SD/MI, 23 SMP	22.123.000	25	37.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1.1.22.29	Manajemen pengelolaan ICT center	Terlaksananya sosialisasi Informasi Pendidikan secara online	12	40.000.000	1 kegiatan	71.730.000	12	45.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
11	1.1.22.30	Penyusunan buku selayang pandang	Tersusunnya buku selayang pandang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	27.000.000	50 buku	23.977.000	100	31.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	1.1.22.33	Penilaian kinerja kepala sekolah	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah negeri	100	51.500.000	1 Kepsek TK, 61 Kepala SD, 13 Kepala SMP	48.500.000	100	55.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
13	1.1.22.35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	Terlaksananya PAK pengawas dan tenaga kependidikan	100	94.500.000	1300 guru PNS	81.600.000	100	103.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
14	1.1.22.38	Manajemen pendataan pendidikan	Sistem informasi berbasis masyarakat	100	65.000.000	100		100	70.000.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
15	1.1.22.41	Penyusunan Kalender Pendidikan	Tersedianya kalender pendidikan	100	17.000.000	225 buah	15.196.000	100	19.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
16	1.1.22.42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	Penggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis	100	35.000.000	4 kegiatan	55.350.000	100	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
17	1.1.22.47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Tersusunnya basis data pendidikan	100	60.000.000	3 kegiatan	48.584.000	100	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
18	1.1.22.49	Akreditasi Sekolah	Terlaksananya sosialisasi akreditasi sekolah	20	40.000.000	50 orang	37.382.000	20	44.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	1.1.22.52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	Terverifikasinya data BOS	100	16.000.000	100	15.732.000	100	19.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
20	1.1.22.77	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	100	450.000.000	100	436.174.000	100	490.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Pemberantasan Korupsi
21	1.1.22.58	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			100%	50.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
22	1.1.22.56	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			1 kegiatan	46.702.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
23	1.1.22.59	Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			1 kegiatan	67.360.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
24	1.1.22.2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	180.000.000	2	195.000.000	2	215.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
25	1.1.22.57	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	terlaksananya monev bosda			4 kegiatan	156.275.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
26	1.1.22.54	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	Terlaksananya 2 lomba dan 1 sosialisasi gerakan literasi kitab suci (GELIS SUCI)			2 lomba, 1 sosialisasi	60.000.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	1.1.22.80	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan mahir dasar kepramukaan bagi pembina pramuka SD dan SMP			1 kegiatan, 100 peserta	50.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
28	1.1.22.78	Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik			100%	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1.1.23	**Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**			**1.871.500.000**		**2.107.736.000**		**2.135.000.000**				
			Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	45%		50%		55%					
1	1.1.23.1	Lomba cerdas cermat SD	Terlaksananya lomba cerdas cermat	6	32.500.000	1 kegiatan	32.542.000	6	37.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
2	1.1.23.5	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	Terlaksananya olimpiade MIPA SD / Pra US	100	90.000.000	4800 peserta	50.000.000	100	97.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
3	1.1.23.9	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	Terselenggaranya lomba dokter kecil	100	43.000.000	150 siswa	37.500.000	100	48.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
4	1.1.23.11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	Terlaksananya lomba sekolah sehat	100	45.500.000	2 kegiatan	48.267.000	100	52.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
5	1.1.23.17	Pelaksanaan Pra US SD	Terlaksananya pra us sd	100	77.000.000	100	192.225.000	100	81.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
6	1.1.23.18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	Terukurnya kemampuan siswa	100	165.000.000	4800 peserta	290.269.000	100	185.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
7	1.1.23.19	Pelaksanaan Pra UN SMP	Terukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti UN	100	101.000.000	3300 Peserta	138.069.000	100	107.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
8	1.1.23.20	Pelaksanaan US dan UN SMP	Siswa mengikuti US dan UN SMP	3300	142.500.000	6600 Peserta	230.783.000	3300	162.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1.1.23.21	Lomba Cerdas Cermat SMP	Terlaksananya lomba cerdas cermat SMP	100	25.000.000	2 kegiatan	41.558.000	100	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
10	1.1.23.27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	Terselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP, Olimpiade MIPA	4	420.000.000	5 kegiatan	516.517.000	4	463.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
11	1.1.23.28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	Meningkatnya disiplin siswa	100	250.000.000	120	146.006.000	125	300.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
12	1.1.23.31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Terlaksananya lomba kader kesehatan remaja	100	60.000.000	2 event	65.000.000	100	70.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
13	1.1.23.32	Lomba PBB siswa SD/SMP	Terlaksananya lomba PBB	2	95.000.000	90 siswa	0	2	125.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
14	1.1.23.33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	Terlaksananya lomba mapel agama Islam pendidikan dasar	100	325.000.000	2 kegiatan, 680 peserta	300.000.000	100	375.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
15	1.1.23.34	Lomba Drum Band	meningkatnya mutu pendidikan dasar			500 orang	0		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
16	1.1.23.25	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	Terlaksananya lomba karya ilmiah remaja SMP			1 kegiatan	19.000.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
17	1.1.23.35	Pembinaan mental siswa dan guru (ESQ)	Terlaksananya pembinaan mental siswa dan Guru (ESQ)			2 kegiatan	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
	1.1.25	**Program Pendidikan Berkelanjutan**			**0**		**150.700.000**		**0**				
			Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	92.74%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatkan nasionalisme dan pendidikan karakter bagi siswa	100%	150.000.000								
1	1.1.25.3	Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa			100%			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	105	Pokok Pikiran DPRD
2	1.1.25.1	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	terlaksananya kemah kebangsaan siswa			1 kegiatan	150.700.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
	1.1.26	**Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**			**0**		**16.757.600.000**		**0**				
1	1.1.26.41	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	101.600.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
2	1.1.26.40	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	68.800.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
3	1.1.26.22	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	144.800.000		0	SD Negeri Cacaban 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	95	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
4	1.1.26.21	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	141.600.000		0	SD Negeri Cacaban 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
5	1.1.26.20	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	Terlasksananya Wajar Dikdas			100%	150.400.000		0	SD Negeri Cacaban 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
6	1.1.26.38	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	124.800.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.1.26.68	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	568.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
8	1.1.26.7	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	73.600.000		0	SD Negeri Kramat 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
9	1.1.26.6	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	144.800.000		0	SD Negeri Kramat 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
10	1.1.26.8	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	80.800.000		0	SD Negeri Kramat 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
11	1.1.26.9	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	108.800.000		0	SD Negeri Kramat 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
12	1.1.26.10	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	122.400.000		0	SD Negeri Kramat 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
13	1.1.26.11	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	75.200.000		0	SD Negeri Potrobangsan 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
14	1.1.26.12	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	184.000.000		0	SD Negeri Potrobangsan 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
15	1.1.26.13	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	153.600.000		0	SD Negeri Potrobangsan 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
16	1.1.26.14	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	94.400.000		0	SD Negeri Potrobangsan 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	1.1.26.15	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	142.400.000		0	SD Negeri Wates 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
18	1.1.26.16	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	124.800.000		0	SD Negeri Wates 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
19	1.1.26.17	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	52.800.000		0	SD Negeri Wates 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
20	1.1.26.18	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	117.600.000		0	SD Negeri Wates 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
21	1.1.26.19	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	58.400.000		0	SD Negeri Wates 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
22	1.1.26.1	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	155.200.000		0	SD Negeri Kedungsari 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
23	1.1.26.2	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	98.400.000		0	SD Negeri Kedungsari 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
24	1.1.26.39	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	75.200.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
25	1.1.26.3	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	132.000.000		0	SD Negeri Kedungsari 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
26	1.1.26.4	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	164.000.000		0	SD Negeri Kedungsari 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	1.1.26.5	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	296.000.000		0	SD Negeri Kedungsari 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
28	1.1.26.37	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	291.200.000		0	SD Negeri Magelang 2/7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
29	1.1.26.33	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	151.200.000		0	SD Negeri Magelang 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
30	1.1.26.34	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	130.400.000		0	SD Negeri Magelang 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
31	1.1.26.35	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	121.600.000		0	SD Negeri Magelang 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
32	1.1.26.36	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	318.400.000		0	SD Negeri Magelang 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
33	1.1.26.25	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	98.400.000		0	SD Negeri Gelangan 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
34	1.1.26.26	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	59.200.000		0	SD Negeri Gelangan 24	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
35	1.1.26.27	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	108.800.000		0	SD Negeri Gelangan 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
36	1.1.26.28	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	164.000.000		0	SD Negeri Gelangan 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	1.1.26.29	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	124.800.000		0	SD Negeri Gelangan 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
38	1.1.26.30	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	Terlaksananya Wajar Dikdas			100%	60.000.000		0	SD Negeri Gelangan 7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
39	1.1.26.42	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	143.200.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
40	1.1.26.43	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	130.400.000		0	SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
41	1.1.26.23	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	135.200.000		0	SD Negeri Cacaban 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
42	1.1.26.24	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	158.400.000		0	SD Negeri Cacaban 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
43	1.1.26.44	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	162.400.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
44	1.1.26.45	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	124.800.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
45	1.1.26.46	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	160.800.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
46	1.1.26.47	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	166.400.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	1.1.26.31	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	296.800.000		0	SD Negeri Kemirirejo 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
48	1.1.26.32	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	308.000.000		0	SD Negeri Kemirirejo 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
49	1.1.26.51	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	150.400.000		0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
50	1.1.26.52	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	152.000.000		0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
51	1.1.26.53	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	110.400.000		0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
52	1.1.26.54	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	137.600.000		0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
53	1.1.26.55	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	135.200.000		0	SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
54	1.1.26.56	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	153.600.000		0	SD Negeri Tidar 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
55	1.1.26.57	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	150.400.000		0	SD Negeri Tidar 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
56	1.1.26.58	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	148.000.000		0	SD Negeri Tidar 4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	1.1.26.59	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	160.800.000		0	SD Negeri Tidar 5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
58	1.1.26.60	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	115.200.000		0	SD Negeri Tidar 6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
59	1.1.26.62	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	711.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
60	1.1.26.61	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	120.000.000		0	SD Negeri Tidar 7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
61	1.1.26.63	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	769.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
62	1.1.26.64	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	725.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
63	1.1.26.65	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	533.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
64	1.1.26.66	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	680.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
65	1.1.26.67	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	549.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
66	1.1.26.69	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	708.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	1.1.26.70	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	622.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
68	1.1.26.71	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	625.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
69	1.1.26.72	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	549.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
70	1.1.26.73	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	546.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
71	1.1.26.74	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS			100%	719.000.000		0	Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	SDGs
72	1.1.26.48	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	89.600.000		0	SD Negeri Magersari 1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
73	1.1.26.49	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	145.600.000		0	SD Negeri Magersari 2	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
74	1.1.26.50	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas			100 %	84.000.000		0	SD Negeri Magersari 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
			TOTAL		**40.439.495.000**		**51.917.120.000**		**42.289.406.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Kesehatan
URUSAN : Kesehatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2.121.096.000**		**1.909.884.000**		**2.566.511.000**				
1	1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item surat yang terkelola	5	3.498.000	5 item	3.315.000	5	4.231.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	274.560.000	12 bulan	200.000.000	12	332.217.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
3	1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berizin	105	64.735.000	53 unit	26.118.000	109	78.328.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
4	1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	38	461.244.000	38 orang	361.336.000	38	558.104.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
5	1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan bahan/peralatan kebersihan dan jasa kebersihan	25	239.625.000	12 bulan	61.000.000	25	289.945.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	1.2.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah item peralatan kerja yang diperbaiki	6	27.269.000	6 item	13.290.000	6	32.994.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
7	1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia	60	44.721.000	60 item	27.316.000	60	54.112.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	17	14.954.000	17 item	15.355.000	17	18.093.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
9	1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan yang tersedia	10	11.011.000	10 item	10.000.000	10	13.323.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
10	1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	9.886.000	12 bulan	11.400.000	12	11.961.000	DKK dan UPTD	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
11	1.2.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	12	11.721.000	12 bulan	13.464.000	12	14.182.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	50	ExBAU
12	1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah item makanan dan minuman yang tersedia	16	119.656.000	16 item	62.800.000	16	144.783.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
13	1.2.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	210	282.477.000	160 kali	151.150.000	215	341.796.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
14	1.2.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga kontrak dan honorer yang ada	33	531.313.000	44 orang	923.340.000	33	642.888.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
15	1.2.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian	12	24.426.000	12 bulan	30.000.000	12	29.554.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	1.2.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**6.706.712.000**		**598.185.000**		**216.714.000**				
			Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7	32.223.000	34 unit	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
2	1.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	4	47.836.000	5 gedung	58.000.000	4	57.880.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
3	1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	30	30.761.000	59 unit	35.000.000	30	37.220.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
4	1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	80	84.392.000	70 unit	52.732.000	80	102.114.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
5	1.2.2.33	Pengadaan Papan Informasi	Kelancaran tugas kantor			1 unit	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
6	1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1	11.500.000	36 unit	0	3	19.500.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
7	1.2.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah m2 gedung kantor yang direhab	1	6.500.000.000	1 unit	0	0	0	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan berkala kendaraan dinas			53 unit	452.453.000		0	DKK	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
9	1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Kelancaran tugas kantor			68 unit	0		0	DKK	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	1.2.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**47.575.000**		**74.448.000**		**57.564.000**				
1	1.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek cara pembuatan DUPAK	50	8.250.000	50 orang	9.071.000	50	9.982.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya	450	30.800.000	300 oran	23.827.000	450	37.268.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
3	1.2.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Jumlah surat izin praktek yang diterbitkan	150	8.525.000	400 doku	11.550.000	150	10.314.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
4	1.2.5.9	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang teruji kompetensi			25 orang	30.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
	1.2.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**69.465.000**		**70.783.000**		**84.051.000**				
1	1.2.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat	4	24.714.000	4 dokume	9.367.000	4	29.904.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
2	1.2.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	2	9.922.000	2 dokume	5.357.000	2	12.005.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	105	Rencana
3	1.2.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	2	28.282.000	2 dokume	28.751.000	2	34.221.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	105	Rencana
4	1.2.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP SKPD yang disusun	1	6.547.000	1 dokume	12.308.000	1	7.921.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	105	Rencana
5	1.2.6.28	Penyusunan database bidang kesehatan	Tersusunnya buku profil kesehatan dan SPM bidang kesehatan			2 dokumen			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	106	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1.2.15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**			**2.509.133.000**		**4.199.397.000**		**3.036.048.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.15.1	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dibeli	5	2.310.000.000	5 paket	3.663.040.000	5	2.795.100.000	Dinas Kesehatan	DAK dengan Pendamping DAU	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
2	1.2.15.4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah peserta sosialisasi untuk tenaga farmasi di RS, Apotek dan Klinik	50	8.800.000	50 orang	8.700.000	50	10.648.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.2.15.5	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah petugas pengelola obat di puskesmas, pustu, RB dan BP yang dibina	100	26.752.000	100 oran	10.040.000	100	32.369.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.2.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev farmasi	12	1.760.000	4 laporan	12.197.000	12	2.129.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
5	1.2.15.7	Pengadaan bahan kimia	Tersedianya bahan klimia	1	135.927.000	1 paket	422.807.000	1	164.471.000	Dinas Kesehatan	DBHCHT	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	1.2.15.8	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan yang dikelola	340	25.894.000	12 bulan	27.613.000	340	31.331.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.2.15.9	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	Presentase Instalasi Farmasi Kabupaten Kota yang menerapkan aplikasi logistik			12 bulan	55.000.000		0	Instalasi farmasi	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**15.201.986.000**		**23.904.289.000**		**14.899.733.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Tertanggulanginyqa masalah Kegiatan Pada Ke4adaan Darurat	94	14.082.000	80 orang	33.000.000	94	17.039.000	Kota magelang	DBHCHT	105	Program prioritas RPJM
2	1.2.16.4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Terpeliharanya Kesehatan Masyarakat Kota Magelang	52	20.350.000	56 orang	8.730.000	52	24.623.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
3	1.2.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah guru peserta sosialisasi program UKS dan siswa peserta pelatihan dokter kecil	380	60.419.000	400 oran	607.317.000	380	73.106.000	Kota Magelang	DBHCHT	75	SDGs
5	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah kegiatan P3K yang dilaksanakan	180	66.102.000	180 kali	100.000.000	180	79.983.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.2.16.13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah pengambilan sample lingkungan dan reagensi untuk pemeriksaan air bersih, air minum, air kolam renang, alat medis dan udara	2000	313.500.000	2000 sam	296.028.000	2000	379.335.000	Kota Magelang	DBHCHT	70	Program prioritas RPJM
7	1.2.16.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	3	26.400.000	3 kegiata	28.612.000	3	31.944.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
8	1.2.16.18	Pengadaan alat laboratorium	Jumlah alat laboratorium yang terpenuhi	5	1.920.000.000	15 unit	0	5	1.380.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	1.2.16.21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	Jumlah posko kesehatan yang dilaksanakan	1	25.543.000	2 Posko	33.483.000	1	30.907.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
10	1.2.16.22	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	Terpeliharanya Kesehatan Masyarakat Kota Magelang	100	13.061.000	100 oran	15.400.000	100	15.804.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	95	Mempertegas Skenario Kemitraan
11	1.2.16.23	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	Jumlah nakes remaja dan siswa SBH yang dibina	285	38.500.000	383 oran	51.124.000	285	46.585.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
12	1.2.16.24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	Jumlah pelayanan kesehatan swasta yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	7	2.970.000	1 laporan	2.068.000	7	3.593.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
13	1.2.16.25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	5	2.662.000	1 laporan	2.758.000	5	3.221.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	1.2.16.28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	Terlaksanannya sosialisasi	100	16.500.000	1 kegiata	9.200.000	100	19.965.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	101	Program 100-0-100
15	1.2.16.36	Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi	85	49.500.000	29 unit	69.143.000	85	59.895.000	Kota Magelang	DBHCHT	75	Program prioritas RPJM
16	1.2.16.38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa	400	76.840.000	2500 sam	228.259.000	400	92.977.000	Kota Magelang	DBHCHT	70	Program prioritas RPJM
17	1.2.16.42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terpeliharanya kesehatan masyarakat Magelang	24000	11.138.797.000	25000	7.395.000.000	16000	11.138.767.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
18	1.2.16.44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Terlaksananya pelayanan penanganan kasus emergency dan jambore PSC (Public Safety Center)	12	146.164.000	2 kegiata	604.683.000	12	176.858.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
19	1.2.16.45	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	terlaksanannya raker pemb kesda	1	15.163.000	2 kegiata	15.252.000	1	18.347.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
20	1.2.16.48	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah puskesmas pelaksana kegiatan BOK	5	965.000.000	5 Puskesr	2.489.816.000	5	965.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	SDGs
21	1.2.16.52	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	Meningkatkan Keselamatan Ibu Dan bayi	12	162.896.000	12 bulan	162.896.000	12	187.465.000	Rumah Bersalin Paten	Dana Alokasi Umum	70	SDGs
22	1.2.16.53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya Sosialisasi PTM	190	101.935.000	692 oran	131.776.000	190	123.341.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	99	Program prioritas RPJM
23	1.2.16.54	Pelayanan kesehatan Jiwa	Terlaksananya sosialisasi kesehatan jiwa	60	12.650.000	150 Oran	41.232.000	60	15.306.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
24	1.2.16.56	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	Pelaksanan kegiatan UKM di Kota Magelang			12 bulan	697.182.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	1.2.16.57	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya askep Paska Keguguran dan review kompetensi perawat			88 Orang	13.747.000		0	Kota Magelang	DBHCHT	64	Rencana
26	1.2.16.50	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya prasarana dan alkes klinik Kesehatan Kota Magelang			1 paket	3.500.000.000		0	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	101	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
27	1.2.16.20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	Pengadaan Ambulance, Genset, Alat Kesehatan			3 paket	7.280.533.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	105	SDGs
28	1.2.16.59	Pengadaan Alat Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Kanker (DAK)	Alat deteksi dini da tindak lanjut kanker yang terbeli			1 paket	87.050.000		0	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	105	SDGs
	1.2.17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**			**105.875.000**		**177.992.000**		**128.108.000**				
			Cakupan pengawasan obat dan makanan	70%		72%		74%					
1	1.2.17.1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sampel jajanan anak sekolah, makanan dan minuman menjelang hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2020 yang diuji	500	28.600.000	550 samp	26.800.000	500	34.606.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
2	1.2.17.2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa	100	55.000.000	550 samp	137.479.000	100	66.550.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.2.17.7	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	Jumlah apotek dan industri rumah tangga yang dibina	60	22.275.000	50 apotik	13.713.000	60	26.952.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
	1.2.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			**779.265.000**		**615.490.000**		**942.905.000**				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		98%		98%					
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan promosi kesehatan melalui media	2160	182.600.000	1820 ora	187.669.000	2160	220.946.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
2	1.2.19.10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	12	60.478.000	12 bulan	66.940.000	12	73.177.000	Dinas Kesehatan	Dana Alokasi Umum	99	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	1.2.19.11	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan PHBS	34000	131.835.000	35000 Ru	91.000.000	34000	159.519.000	Kelurahan	DBH Pajak Rokok	105	SDGs, Program prioritas RPJM
4	1.2.19.14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya Pembinaan da Pelatihan kader posyandu dan penyehat tradisional (Hatra)	150	167.681.000	2 kegiata	74.010.000	150	202.893.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
5	1.2.19.18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang dibina	40	167.681.000	17 FKD, 1	124.745.000	40	202.893.000	Kota Magelang	DBHCHT	80	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.2.19.19	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi informasi jaminanan kesehatan masyarakat	510	68.990.000	595 oran	71.126.000	510	83.477.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
	1.2.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**202.175.000**		**530.846.000**		**244.628.000**				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100		100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100		100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31		<0.31					
1	1.2.20.3	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Terlaksananya Penanggulangan gizi buruk, anemia, antropometri, pelacakan dan penanganan kasus balita gizi buruk	542	160.143.000	850 Balita	195.000.000	542	193.772.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	75	Program prioritas RPJM
2	1.2.20.4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya Pembinaan Kader Masyarakat Sadar Gizi	70	18.033.000	70 orang	14.773.000	70	21.819.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	75	Program prioritas RPJM
3	1.2.20.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah puskesmas dan posyandu yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	5	23.999.000	198 Kade	21.668.000	5	29.037.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.2.20.8	Penyediaan Obat Gizi (DAK)	Banyaknya obat gizi yang dibeli			6 paket	299.405.000		0	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	105	SDGs
	1.2.21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**			**117.127.000**		**161.291.000**		**141.721.000**				
			Persentase rumah sehat	84,3%		84,8%		85%					
1	1.2.21.5	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	Jumlah pengambilan sample air	166	39.998.000	158 titik	37.781.000	166	48.396.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	75	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
2	1.2.21.6	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	Terlaksanannya Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	850	77.129.000	170 oran	123.510.000	850	93.325.000	Dinas Kesehatan Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	90	Program 100-0-100
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**1.114.170.000**		**1.366.869.000**		**1.348.137.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya penyemprotan / fogging sarang nyamuk	100	219.518.000	100 lokus	240.570.000	100	265.615.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	105	Program prioritas RPJM
2	1.2.22.6	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pemantau jentik di 17 kelurahan dan 5 sosialisasi	4	132.591.000	2720 rum	145.425.000	4	160.435.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	105	Program prioritas RPJM
3	1.2.22.8	Peningkatan Imunisasi	Jumlah anak yang diimunisasi, jumlah petugas yang dilatih	1880	143.545.000	1880 ana	83.702.000	1880	173.688.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
4	1.2.22.9	Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	Jumlah penyelidikan epidemiologi penyakit menular	200	20.787.000	200 kasus	12.200.000	200	25.151.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
5	1.2.22.12	Pengamanan kesehatan Haji	jumlah pemeriksaan kesehatan haji yang dilaksanakan	2	6.499.000	300 oran	44.000.000	2	7.862.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.2.22.13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Anak sekolah kelas 1-3 SD/MI/sederajat mendapatkan imunisasi DT dan TT	10500	76.562.000	10500 an	69.977.000	10500	92.639.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	100	Program prioritas RPJM
7	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan IMS yang dilaksanakan	12	423.362.000	12 bulan	450.000.000	12	512.267.000	Kota Magelang	DBHCHT	105	Program prioritas RPJM
8	1.2.22.18	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan surveilans PD3I	50	91.306.000	110 oran	58.571.000	50	110.480.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	105	Program prioritas RPJM
9	1.2.22.5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Tersedianya data TB yang valid dan akurat			4 dokum	33.290.000		0	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	105	Program prioritas RPJM
10	1.2.22.19	Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin (DAK)	Alat penyimpanan vaksin yang dibeli			21 unit	201.580.000		0	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	105	SDGs
11	1.2.22.20	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK)	Banykanya bahan habis pakai pemeriksaan HIV yang terbeli			1 paket	27.554.000		0	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	105	SDGs
	1.2.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**			**861.311.000**		**1.950.048.000**		**1.342.185.000**				
			Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	82.50%		87,5%		91,25%					
			Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	60%		80%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	80		80		80					
			Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	100		100		100					
			Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	80%		100%		100%					
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	75		80		85					
1	1.2.23.3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya desk sarana pelayanan kesehatan yang di data	60	8.800.000	1 dokum	10.727.000	60	10.648.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
2	1.2.23.8	Pembinaan Sarana Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan	12	39.050.000	4 Laporar	36.523.000	12	47.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
3	1.2.23.9	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan	15	30.250.000	15 Tenag	30.022.000	15	36.602.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
4	1.2.23.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	Terlaksananya monev dana kapitasi	5	70.760.000	4 Laporar	31.337.000	5	85.620.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.2.23.13	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Terakreditasi Laboraturium Kesehatan	0	0	1 Unit	1.153.904.000	1	300.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
6	1.2.23.14	Pembinaan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan BLUD	5	201.940.000	5 Puskesr	184.510.000	5	244.347.000	Kota Magelang	DBHCHT	64	Program prioritas RPJM
7	1.2.23.15	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pendampingan akreditasi puskesmas	1	23.100.000	5 Puskesr	24.038.000	1	27.951.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
8	1.2.23.16	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	Jumlah pengadaan barang jasa	12	487.411.000	Kegiatan	478.987.000	12	589.767.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	1.2.24	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**			**11.385.000**		**12.348.000**		**13.775.000**				
			Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%		100%		100%					
			Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%		100%		100%					
			Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%		15%		15%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.24.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesda)	55	11.385.000	4 laporan	12.348.000	55	13.775.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Penanggulangan Kemiskinan
	1.2.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**			**72.325.000**		**48.550.000**		**87.513.000**				
			Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	58,82%		64,71%		70,59%					
1	1.2.28.2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terlaksananya sosialisasi dan monev penyakit menular	720	72.325.000	680 orang	48.550.000	720	87.513.000	Kota Magelang	DBH Pajak Rokok	100	Akomodasi Musrenbang
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**101.447.000**		**126.500.000**		**122.749.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.4	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah tenaga kesehatan dilatih MTBS dan SDIDTK dan 1 lomba balita sehat	160	22.126.000	160 orang	40.000.000	160	26.771.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.29.9	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan anak balita yang terpenuhi	3	79.321.000	3 paket	86.500.000	3	95.978.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**32.430.000**		**138.425.000**		**39.238.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan lansia	5	2.769.000	5 Laporan	3.056.000	5	3.349.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	SDGs
2	1.2.30.8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Terlaksananya Penyuluhan Lansia	125	29.661.000	500 lansia	135.369.000	125	35.889.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
	1.2.31	**Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan**			**51.095.000**		**54.234.000**		**61.823.000**				
			Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	87%		88%		89%					
1	1.2.31.2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah sampel air industri rumah tangga pangan yang diperiksa	70	17.270.000	80 orang	19.911.000	70	20.896.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.31.3	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Terlaksananya Pengawasan Makanan Di Rumah Makan dan Restoran	30	7.150.000	30 restau	6.549.000	30	8.651.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
3	1.2.31.5	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	70	26.675.000	80 IRTP	27.774.000	70	32.276.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**907.381.000**		**1.329.333.000**		**1.097.930.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Jumlah kader yang dilatih tentang risiko tinggi kehamilan	180	108.720.000	380 oran	92.717.000	180	131.552.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
2	1.2.32.5	Pembinaan dukun bayi	Terlaksananya Pembinaan dukun bayi	15	6.661.000	12 orang	6.656.000	15	8.059.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
3	1.2.32.6	Audit Maternal Perinatal	Jumlah pertemuan AMP yang dilaksanakan	4	79.480.000	4 kali	62.553.000	4	96.170.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Terlaksananya penyuluhan kelurahan peserta penyuluhan	17	250.496.000	3 kali	34.500.000	17	303.100.000	Kecamatan di wilayah Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
5	1.2.32.8	Jaminan Persalinan	Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir bagi penduduk miskin	300	462.024.000	450 oran	1.132.907.000	300	559.049.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	90	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
	1.2.33	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD**			**6.341.617.000**		**6.862.458.000**		**7.673.345.000**				
			Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA		AA		AA					
1	1.2.33.5	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Selatan	12	1.545.500.000	12 bulan	1.463.400.000	12	1.870.055.000	Puskesmas Magelang Selatan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	Program prioritas RPJM
2	1.2.33.6	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Jurangombo	12	1.238.270.000	12 bulan	1.191.000.000	12	1.498.306.000	Puskesmas Jurangombo	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	Program prioritas RPJM
3	1.2.33.7	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Tengah	12	1.322.322.000	12 bulan	1.653.000.000	12	1.600.000.000	Puskesmas Magelang Tengah	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	Program prioritas RPJM
4	1.2.33.8	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Kerkopan	12	517.563.000	12 bulan	958.019.000	12	626.250.000	Puskesmas Kerkopan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	Program prioritas RPJM
5	1.2.33.9	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Utara	12	1.717.962.000	12 bulan	1.597.039.000	12	2.078.734.000	Puskesmas Magelang Utara	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	105	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			0		0		0				
			Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	20%		30%		40%					
1	1.2.26.33	Pengadaan Tanah untuk Rumah Sakit	Tersedianya tanah untuk pembangunan RSU			10000 m2	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	106	Program prioritas RPJM
			TOTAL		**37.353.570.000**		**44.131.370.000**		**34.104.678.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang
URUSAN : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			50.000.000.000		80.307.611.000		60.000.000.000				
			Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	20%		30%		40%					
1	1.2.26.32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)		2	50.000.000.000	Rumah sakit Sehat dengan Nilai A	35.307.611.000	2	60.000.000.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.2.26.1	Pembangunan rumah sakit				Rumah sakit Sehat dengan nilai A	45.000.000.000		0	RSUD Tidar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			150.000.000.000		160.000.000.000		160.000.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA		AA		AA					
1	1.2.33.3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar		1	150.000.000.000	Rumah sakit Sehat dengan Nilai A	160.000.000.000	1	160.000.000.000	RSUD Tidar Kota Magelang	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
			TOTAL		**200.000.000.000**		**240.307.611.000**		**220.000.000.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.246.150.000**		**1.352.734.000**		**1.494.172.000**				
1	1.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya administrasi surat menyurat	12	200.000	12 Bulan	275.000	12	242.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	171.800.000	12 Bulan	174.000.000	12	207.636.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.3.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	1	28.677.000	1 Kegiata	39.011.000	1	34.699.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12	53.250.000	12 Bulan	74.580.000	12	64.432.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya jasa pengelola keuangan	12	294.100.000	12 bulan	315.011.000	12	350.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12	142.644.000	12 Bulan	128.433.000	12	172.599.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	1.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	60.000.000	12 Bulan	25.861.000	12	72.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	41.801.000	12 Bulan	18.397.000	12	50.579.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	1.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12	14.000.000	12 Bulan	8.398.000	12	16.940.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	1.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	12	3.960.000	12 Bulan	3.000.000	12	4.791.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	1.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas	12	2.800.000	12 Bulan	1.968.000	12	3.388.000	DPU Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	1.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12	51.123.000	12 Bulan	44.034.000	12	61.858.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	1.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	12	299.035.000	12 Bulan	213.360.000	12	361.832.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	1.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga honorer daerah	12	45.792.000	12 bulan	295.480.000	12	55.408.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	1.3.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya administrasi kepegawaian	12	36.968.000	12 Bulan	10.926.000	12	36.968.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.3.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**4.681.473.000**		**9.805.440.000**		**1.229.619.000**				
1	1.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	300.000.000	12 Bulan	185.440.000	12	363.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	517.147.000	12 Bulan	275.000.000	12	625.747.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	12.193.000	12 Bulan	5.000.000	12	14.753.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	12	15.430.000	12 Bulan	15.000.000	12	18.670.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.3.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	terpeliharanya alat berat	12	138.388.000	12	100.000.000	12	167.449.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.3.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Gedung Wanita	1	3.688.315.000	1 paket	9.225.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	1.3.2.32	Pengadaan Alat-alat pertukangan	terpenuhinya alat-alat pertukangan	12	10.000.000	12	0	12	10.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	1.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor		0	10	0	4	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1.3.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**138.194.000**		**102.290.000**		**140.494.000**				
1	1.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	4	44.035.000	4 dokum	16.654.000	4	44.035.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	1.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis	1	7.500.000	1 dokum	9.139.000	1	8.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	1.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	1	8.500.000	1 dokum	10.636.000	1	8.921.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	1.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	2	26.559.000	2 dokum	19.014.000	2	26.559.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	1.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA dan DPA	2	44.321.000	24 dokun	24.037.000	2	45.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	1.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersediany LKj IP	1	7.279.000	8 buku	7.810.000	1	7.279.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1.3.15	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**			**0**		**2.120.000.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					24,073,300,001				53,633,892,110				
			Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	1342 m		1742 m		2242 m					
			Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	66.34%		66.65%		68.59%					
1	1.3.15.25	Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan	Panjang jalan baru yang dibangun			700 m'	2.120.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	1.3.15.26	Pembangunan Jl. Penghubung Jl. Lamtoro - Jl. Sudirman	Panjang jalan yang dibangun			500 m'	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.3.15.27	Pembangunan Jl. Penghubung Jl. Barito dan Jl. Sidotopo	terbangunnya jalan penghubung antara jalan Barito dengan Jalan Sidotopo			700 mete	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.3.16	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**			**474.808.000**		**492.000.000**		**500.000.000**				
			Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	86%		86%		88%					
			Jumlah shipon yang dibangun	7		7		9					
1	1.3.16.13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	terpeliharanya sarpras drainase kota	3	474.808.000	3 kecama	492.000.000	3	500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.18.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**			**6.900.000**		**25.000.000**		**6.900.000**				
			PERPUS		18,500,000				25,000,000				
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,5		0,79		0,83					
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terkelola dan tersimpannya arsip	12	6.900.000	12 Bulan	25.000.000	12	6.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan**			**16.900.000.000**		**19.149.729.000**		**16.930.000.000**				
			Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	91%		94%		95%					
			Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88,5%		92%		93,5%					
			Rasio ketercukupan PJU	65%		67%		69%					
			Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%		100%		100%					
			Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	80%		80%		100%					
1	1.3.18.94	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III	meningkatnya kenyamanan pengguna jalan			1 paket	444.000.000		0	Jl. kalibening III Kot	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.3.18.95	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes	meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan penghuni			1 paket	632.000.000		0	jalan perum depkes	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	1.3.18.3	Pemeliharaan Jalan	terpeliharanya jalan, kansteen dan trotoar di Kota Magelang	30428	900.000.000	12 bulan	882.000.000	32340	930.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.3.18.23	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	meningkatnya kualitas jalan di Kota Magelang	6	16.000.000.000	4 ruas jal	16.113.185.000	6	16.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Program prioritas RPJM
5	1.3.18.73	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang	terpeliharanya jalan - jalan kota dalam kondisi baik			5 ruas	1.078.544.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.18.89	Pembangunan trotoar kawasan Jl. Suprapto	Panjang trotoar yang terbangun			600 m'	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	1.3.18.90	Pembangunan Trotoar Jl Beringin VII	Terbangunnya trotoar dengan baik			1 paket	0		0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Program prioritas RPJM
	1.3.24	**Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**			**81.507.000**		**82.000.000**		**100.000.000**				
			Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	84%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.3.24.10	Pemeliharaan jaringan irigasi	terpeliharanya jaringan irigasi	3	81.507.000	12 bulan	82.000.000	3	100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.3.26	**Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**			**0**		**1.125.000.000**		**0**				
			Prosentase sungai dan suber daya air dalam keadaan baik	100%		100%		100%					
1	1.3.26.11	Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai	terwujudnya talud pengaman sungai dalam kondisi baik			1 paket	1.125.000.000		0	Kel Magelang Kota	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
	1.3.29	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**			**0**		**20.397.138.000**		**0**				
			Persentase kawasan strategis yang terbangun?	4 kawasan		4 kawasan		4 kawasan					
1	1.3.29.73	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana OLahraga			12 bulan	950.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.3.29.74	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terwujudnya joging track dan lapangan tenis indoor tahap 2 kawasan sport centre			2 paket	4.197.138.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
3	1.3.29.67	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	Terwujudnya monumen Satu Nusa Satu Tanah Air			1 monum	1.250.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	1.3.29.69	Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar	Terpenuhinya Tempat Parkir di Kawasan Gunung Tidar			8000 m2	3.500.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
5	1.3.29.70	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6)	Terbangunnya Kolam Renang Yang Representatif			100%	10.500.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.3.29.75	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar (Bankeu)	terbangunnya gardu pandang Gunung Tidar			1 paket			0	Gunung Tidar Kota	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Memperkuat Implementasi MKSB, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1.3.31	**Program Pengaturan Jasa Konstruksi**			**180.000.000**		**138.559.000**		**199.000.000**				
			Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	74%		76%		78%					
1	1.3.31.4	Pembinaan jasa konstruksi	Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang dibina	110	80.000.000	80 orang	45.799.000	110	90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.31.5	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	Tersedianya buku analisa harga standar bangunan konstruksi	30	16.000.000	50	25.000.000	30	18.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.31.6	Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi	tersedianya buku profil penyedia jasa konstruksi	100	55.000.000	100	0	100	60.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.31.2	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	rekomendasi teknis	12	29.000.000	12	40.000.000	12	31.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	1.3.31.1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Tersampaikannya peraturan perundangan terbaru tentang jasa konstruksi			80 orang	27.760.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.33	**Program pengawasan jasa konstruksi**			**471.000.000**		**487.869.000**		**523.000.000**				
			Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%		25%		25%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.3.33.6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	Terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstuksi	12	450.000.000	12 Bulan	431.869.000	12	500.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Pemberantasan Korupsi
2	1.3.33.3	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Update Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi			1	30.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.33.7	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah	Terpenuhinya Nilai Taksiran Barang Milik Daerah			12 bulan	26.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	1.3.33.1	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Jumlah proyek konstruksi yang sesuai standar undang-undang	4	21.000.000	4 proyek	0	4	23.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.51	**Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong**			**0**		**5.642.825.000**		**0**				
1	1.3.51.31	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara	Terpeliharanya saluran drainase yang dapat menampung air hujan			1 paket	2.500.000.000		0	Kelurahan Kramat U	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.51.59	Peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Sumbing	Meningkatnya saluran drainase yang baik			200 m'	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.51.60	Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong	Meningkatnya saluran drainase yang baik			200 m'	1.619.825.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.3.51.1	Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Bonang	meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan			1 paket	0		0	Jl. Sunan Bonang Ko	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	1.3.51.62	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Merbabu	meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan			1 paket	388.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	1.3.51.63	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan	meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan			1 paket	1.135.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
7	1.3.51.64	Kegiatan Peningkatan / Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (Bankeu)	meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan			1 paket			0	Saluran Drainase Ko	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.52	**Program Perencanaan Tata Ruang**			**600.734.000**		**875.049.000**		**560.000.000**				
			Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%		100%		100%					
			Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%		100%		100%					
			Pendampingan fisik dan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	100%		100%		100%					
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	0		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	0		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	0		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh										
			Rasio luas kawasan kumuh	0		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	0		0		0					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	2,5 ha		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	2,5 ha		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	2 ha		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	1,5 ha		0		0					
			Rasio luas kawasan kumuh	1 ha		0		0					
1	1.3.52.25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Tersusunnya laporan TKPRD ke Walikota dan Pusat	12	200.734.000	6 laporar	162.830.000	12	200.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.52.18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	Jumlah Raperda RDTR	5	400.000.000	2 raperda	325.441.000	4	360.000.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.52.7	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang			2 dokum	386.778.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1.3.53	**Program Pemanfaatan Ruang**			**95.000.000**		**231.142.000**		**99.200.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	25%		26%		27%					
			Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	6%		8%		10%					
1	1.3.53.1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Rekomendasi Teknis IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)	200	50.000.000	200 Reko	175.268.000	200	50.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.53.5	Survey dan pemetaan	jumlah bangunan yang terpetakan	5	20.000.000	5	24.750.000	5	24.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.53.7	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang	1	25.000.000	3	31.124.000	1	25.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.54	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**			**130.000.000**		**207.141.000**		**130.000.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	TAHUN 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	33%		35%		38%					
1	1.3.54.5	Pengawasan pemanfaatan ruang	tersedianya laporan pengawasan ruang	24	100.000.000	12	158.137.000	24	100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.54.9	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	Tersedianya Kajian Teknis Andal Teknis	12	30.000.000	12 Bulan	49.004.000	12	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	1.3.54.10	Fasilitasi Peran Tim Ahli Bangunan	Terbentuknya TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)			1 Tim	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.3.22	**Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan**			**0**		**14.378.000**		**0**				
1	1.3.22.5	Penyusunan data dan profil OPD	tersusunnya data capaian kinerja OPD dalam dokumen			2 dokum	14.378.000		0	DPUPR Kota Magela	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL		**25.005.766.000**		**62.248.294.000**		**21.912.385.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
URUSAN : Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
	1,4	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**												
	1.4.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.245.950.000**		**759.666.000**		**726.307.000**	**1.493.972.000**				
1	1.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat	12	200.000	12 Bulan	150.000	12	150.000	242.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	1.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa listrik, air, telepon dan internet	12	171.600.000	12 bulan	76.300.000	12	76.300.000	207.636.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	1.4.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1	28.677.000	1 kegiata	0	1	-	34.699.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	1.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan KIR kendaraan bermotor	12	53.250.000	48 unit	9.400.000	12	9.400.000	64.432.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	1.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa pengelolaan keuangan	12	294.100.000	12 bulan	188.761.000	12	188.761.000	350.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	1.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12	142.644.000	12 bulan	29.853.000	12	29.853.000	172.599.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	1.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	12	60.000.000	12 bulan	16.335.000	12	16.335.000	72.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	1.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12	41.801.000	12 bulan	11.314.000	12	11.314.000	50.579.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	1.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	14.000.000	12 bulan	4.940.000	12	4.940.000	16.940.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	1.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan 3 jenis koran	12	3.960.000	12 Bulan	3.400.000	12	3.400.000	4.791.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	1.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	refil tabung gas	12	2.800.000	12 bulan	2.000.000	12	2.000.000	3.388.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
12	1.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum pegawai	12	51.123.000	12 bulan	25.802.000	12	25.802.000	61.858.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	1.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah	12	299.035.000	12 bulan	208.492.000	12	175.133.000	361.832.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	1.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga honorer daerah	2	45.792.000	12 bulan	169.240.000	2	169.240.000	55.408.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	1.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	administrasi kepegawaian(KGB,kenaikan pangkat, SKP, pensiun, cuti, PUPNS, sekolah)	12	36.968.000	12 bulan	13.679.000	12	13.679.000	36.968.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	1.4.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			993.158.000		386.989.000		386.989.000	1239619000				
1	1.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12	300.000.000	12 bulan	199.024.000	12	199.024.000	363.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	1.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	517.147.000	12 bulan	170.965.000	12	170.965.000	625.747.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	1.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	12.193.000	12 bulan	4.000.000	12	4.000.000	14.753.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	1.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	15.430.000	12 bulan	8.000.000	12	8.000.000	18.670.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	1.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			0	10	0	4	-	30.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
6	1.4.2.10	Pengadaan mebeleur			0	1	0	4	-	10.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
7	1.4.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat		12	138.388.000	12	0	12	-	167.449.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	1.4.2.32	Pengadaan Alat-alat pertukangan		5	10.000.000	5	0	5	-	10.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
9	1.4.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi			0	1	0		-	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
10	1.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur			5 jenis	5.000.000		5.000.000	0	Disperkim	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
	1.4.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**111.635.000**		**108.010.000**		**124.510.000**	**113.935.000**				
1	1.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja	4	44.035.000	4 laporar	18.234.000	4	18.234.000	44.035.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	1.4.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis	1	7.500.000	1 laporar	7.019.000	1	7.019.000	8.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	1.4.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun	1	8.500.000	1 laporar	10.023.000	1	10.023.000	8.921.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	1.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020			2 dokum	33.000.000		33.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
5	1.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan DPA	2	44.321.000	2 dokum	35.276.000	2	35.276.000	45.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	1.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	LKJIP	1	7.279.000	1 laporar	4.458.000	1	4.458.000	7.279.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	1.4.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial				2 dokum	0		-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dana Alokasi Umum	65	Program 100-0-100
8		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	16.500.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1.4.15	**Program Pengembangan Perumahan**			**1.450.000.000**		**4.911.712.000**		**3.980.711.000**	**2.450.000.000**				
			Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	98		100		100	-					
			Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	3		4		5	-					
1	1.4.15.29	Sosialisasi perumahan	Tersosialisasinya kegiatan perumahan di kota magelang			197 pese	22.247.000		22.247.000	0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	70	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
2	1.4.15.14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Terkelolanya bangunan rusunawa	2	1.300.000.000	3 Rusuna	1.100.000.000	2	1.100.000.000	1.400.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
3	1.4.15.17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Fasilitas bantuan Hukum			12 bulan	436.440.000		436.440.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
4	1.4.15.25	Pembangunan Jalan Menuju rusunawa	Tersedianya jalan akses menuju Rusunawa Tidar Utara			150 m	550.000.000		550.000.000	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	86	Program prioritas RPJM
5	1.4.15.30	Publikasi perumahan dan kawasan permukiman	terlaksananya publikasi perumahan dan kawasan permukiman			6 kali	7.544.000		7.544.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
6	1.4.15.3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi stakeholder perumahan untuk updating data perumahan	1	50.000.000	17 Kelura	30.869.000	1	30.869.000	50.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
7	1.4.15.11	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya	Pendampingan teknis, monev dan fasilitasi kegiatan Rehab Rumah Swadaya	200	100.000.000	250 RTLH	210.708.000		210.708.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
8	1.4.15.10	Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)	Terlaksananya pembangunan pagar, jalan halaman, bangunan gedung, penataan lingkungan, cctv, taman, mainan outdoor, jaringan listrik		0	3 Rusuna	2.097.375.000	5	1.166.374.000	1.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
9	1.4.15.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			0	29000 ru	0		-	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Program 100-0-100
10	1.4.15.20	Operasional Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman				12 bulan	0		-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dana Alokasi Umum	45	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
11	1.4.15.27	Pengelolaan Rumah Khusus	Terkelolanya bangunan rumah khusus			12 bulan	75.000.000		75.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
12	1.4.15.12	Penyusunan Database Perumahan	Terciptanya tertib data perumahan MBR			1 Kecama	323.253.000		323.253.000	0	Kec. Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	71	Penanggulangan Kemiskinan
13	1.4.15.5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Terselenggaranya koordinasi dengan pengembang dan perbankan dalam rangka penyediaan perumahan			17 Kelura	58.276.000		58.276.000	0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	76	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	1.4.15.21	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya				100 RTLH	0		-	0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	90	Penanggulangan Kemiskinan
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**												
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**0**			**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%	-					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%	-					
1	4.3.15.33	Penyusunan database bidang keciptakaryaan dan perumahan			0	1			-	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	
	1,4	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**												
	1.4.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**			**839.000.000**		**2.193.522.000**		**2.123.522.000**	**839.000.000**				
					4,068,071,000				-	7,537,771,000				
			Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat						-					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
1	1.4.16.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan pembinaan KPP sanitas	4	39.000.000	24 KPP 20	39.155.000	4	39.155.000	39.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program 100-0-100, Program prioritas RPJM
2	1.4.16.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	Terbangunnya MCK Umum dan IPAL untuk SR masyarakat sekitar	4	800.000.000	6 unit	541.500.000	4	541.500.000	800.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Akomodasi Musrenbang
3	1.4.16.29	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Tengah	Tersedianya IPALdi Kelurahan Magelang, Panjang dan Gelangan			6 unit	357.000.000		357.000.000	0	Kelurahan Magelang, Panjang dan Gelangan	Dana Alokasi Umum	86	Program 100-0-100
4	1.4.16.30	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Utara	Tersedianya IPAL di Kelurahan Kedungsari			2 unit	120.000.000		120.000.000	0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	86	Program 100-0-100
5	1.4.16.28	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Selatan	Tersedianyar IPAL di Kelurahan Tidar Utara			2 unit	120.000.000		120.000.000	0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	91	Program 100-0-100
6	1.4.16.8	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Pendampingan seleksi lokasi SLBM perencanaan dan pengawasan			11 lokasi	29.165.000		29.165.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program 100-0-100
7	1.4.16.22	Pembangunan sistem sanitasi setempat	Terbangunnya IPAL Setempat			44 unit	667.000.000		667.000.000	0	kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
8	1.4.16.24	Lomba Sanitasi	Terlaksananya lomba sanitasi			24 KPP	37.378.000		37.378.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program 100-0-100
9	1.4.16.16	Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Pendampingan pembangunan sarpras sanitasi			2 unit	212.324.000		212.324.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
10	1.4.16.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi				2 unit			-	0	Kota Magelang	Banprov & DAU	60	Program 100-0-100
	2,4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan**												
	2.4.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**			**3.258.850.000**		**14.804.299.000**		**5.125.029.000**	**20.105.000.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
			Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	45%		60%		80%	-					
1	2.4.16.11	Penilaian Harga Tanah		1	55.000.000	1	0	1	-	55.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.4.16.12	Sosialisasi Pengadaan Tanah		1	50.000.000	100 KK	0	1	-	50.000.000	Kampung Nambangan Kel. Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	96	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.4.16.5	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Terlaksananya pengadaan lahan pengembangan Sport Center dan Kawasan Canguk	4000	3.153.850.000	2 lokasi	8.107.000.000	1	1.500.000.000	20.000.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	2.4.16.8	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Terwujudnya legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah milik Pemda			2 sertifika	25.788.000		25.788.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.4.16.14	Pematangan Lahan/Tanah	Tersedianya lahan yang memenuhi syarat untuk lokasi pembangunan Rusunawa dan Rumah Khusus			2 Lahan	6.644.542.000		3.572.272.000	0	Kel. Gelangan dan Kel. Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM
6	2.4.16.16	Relokasi warga yang terdampak program pemerintah	Terlaksananya relokasi warga terdampak program pembangunan			100 KK	26.969.000		26.969.000	0	Kel Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	86	Program prioritas RPJM
	1,4	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**												

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
	1.4.17	**Program Pemberdayaan komunitas Perumahan**			**40.625.000**		**51.814.000**		**51.814.000**	**40.625.000**				
1	1.4.17.8	Sosialisasi Keciptakaryaan	Terlaksananya sosialisasi permukiman dan perumahan dan keikutsertaan publikasi di karnaval	200	40.625.000	300 pese	51.814.000	200	51.814.000	40.625.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program 100-0-100
2	1.4.17.2	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat				2 kegiata	0		-	0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	90	Penanggulangan Kemiskinan
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**												
	2.18.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**			**6.900.000**		**6.900.000**		**6.900.000**	**6.900.000**				
			PERPUS		18,500,000					25,000,000				
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,5		0,79		0,83	0					
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	100	6.900.000	12 bulan	6.900.000	100	6.900.000	6.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**												
	1.3.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**260.980.000**		**982.948.000**		**782.948.000**	**260.980.000**				
1	1.3.30.5	Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan	Terpeliharanya jalan dan saluran air lingkungan	1	260.980.000	12 bulan	411.150.000		411.150.000	260.980.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
2	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya MCK se Kota Magelang			5 kelurah	494.798.000		294.798.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
3	1.3.30.22	Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang	Terlaksanaya fasilitasi Satker PIP dan LKM Kota Magelang			12 bulan	77.000.000		77.000.000	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dana Alokasi Umum	80	Program 100-0-100
	1.3.35	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari**			**1.093.508.000**		**1.415.600.000**		**1.286.600.000**	**157.153.000**				
1	1.3.35.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 1,3,	1.093.508.000	1 paket	113.700.000	RW 11,	113.700.000	157.153.000	RW. 5, 7	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
2	1.3.35.78	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terlaksananya Rehab Saluran Drainase			1 paket	114.000.000		114.000.000	0	RW. 12	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.35.77	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Saluran Drainase			1 paket	114.000.000		114.000.000	0	RW. 11	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.35.73	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Saluran Drainase			1 paket	114.000.000		114.000.000	0	RW. 7	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.35.70	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terlaksananya Rehab Saluran drainase			1 paket	168.000.000		168.000.000	0	RW. 4	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
6	1.3.35.57	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV				1 paket	57.500.000		-	0	RW. 4	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
7	1.3.35.56	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Jalan Lingkungan			1 paket	103.000.000		103.000.000	0	RW. 3	Dana Alokasi Umum	96	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
8	1.3.35.69	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terehabnya Saluran drainase			1 paket	453.500.000		453.500.000	0	RW. 3	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
9	1.3.35.63	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terehabnya jalan			1 paket	106.400.000		106.400.000	0	RW X	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
10	1.3.35.76	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X				1 paket	71.500.000		-	0	RW X	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.36	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara**			**0**		**850.050.000**		**850.050.000**	**0**				
1	1.3.36.14	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Saluran Drainase			1 paket	100.500.000		100.500.000	0	RW. 6	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.36.46	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	terehabnya Saluran Drainase			1 paket	285.000.000		285.000.000	0	RW. 5	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.36.39	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Lingkungan			1 paket	154.000.000		154.000.000	0	RW. 6	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.36.38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	terehabnya jalan lingkungan			1 paket	187.000.000		187.000.000	0	RW. V	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.36.49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	terehabnya Saluran Drainase			1 Paket	123.550.000		123.550.000	0	RW. VIII	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.37	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan**			**390.645.000**		**1.780.200.000**		**1.780.200.000**	**578.874.000**				
1	1.3.37.56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Saluran drainase	RW 3,9	390.645.000	1 paket	513.000.000	RW 4,5	513.000.000	578.874.000	RW. 8, 9	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.37.53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terehabnya Saluran Drainase			1 Paket	198.000.000		198.000.000	0	RW. VII	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.37.41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	terehabnya Jalan Lingkungan			1 paket	516.000.000		516.000.000	0	RW. IV	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.37.50	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terehabnya Saluran Drainase			1 Paket	553.200.000		553.200.000	0	RW. IV	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
	1.3.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara**			**0**		**820.350.000**		**763.150.000**	**0**				
1	1.3.38.60	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan			1 paket	289.700.000		289.700.000	0	RW. 7	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.38.59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Lingkungan			1 paket	191.500.000		191.500.000	0	RW. 6	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.38.69	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Saluran Drainase			1 paket	86.250.000		86.250.000	0	RW. 2	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.38.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II				1 Paket	57.200.000		-	0	RW. II	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
5	1.3.38.68	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terehabnya Saluran Drainase			1 Paket	138.200.000		138.200.000	0	RW. II	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
6	1.3.38.79	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	terehabnya Saluran Drainase			1 Paket	57.500.000		57.500.000	0	RW. XIII	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.40	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates**			**107.824.000**		**749.650.000**		**666.750.000**	**0**				
1	1.3.40.63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terehabnya Saluran drainase			1 paket	77.000.000		77.000.000	0	RW. 2	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
2	1.3.40.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 6,7	107.824.000	1 Paket	404.500.000		404.500.000	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
3	1.3.40.50	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	terehabnya Jalan Lingkungan			1 Paket	128.000.000		128.000.000	0	RW. I	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.40.56	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan			1 paket	57.250.000		57.250.000	0	RW. 07	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.40.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	-			1 paket	82.900.000		-	0	RW. 6	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan**			**230.165.000**		**536.850.000**		**490.850.000**	**0**				
1	1.3.41.44	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 4,6	230.165.000	1 paket	168.500.000		168.500.000	0	RW. 1 dan 3	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.41.33	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV				1 paket	46.000.000		-	0	RW. 04	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.41.40	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terehabnya Saluran drainase			1 paket	184.600.000		184.600.000	0	RW. 4	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.41.32	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Jalan Aspal			1 Kegiata	137.750.000		137.750.000	0	RW. III	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
	1.3.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari**			**578.432.000**		**493.300.000**		**493.300.000**	**492.799.000**				
1	1.3.42.62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 2	578.432.000	1 paket	115.400.000	RW 3,4	115.400.000	492.799.000	RW. 1, 7	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
2	1.3.42.52	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Saluran Drainase			1 paket	78.000.000		78.000.000	0	RW. 1	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.42.56	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran drainase			1 paket	86.600.000		86.600.000	0	RW. 5	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.42.46	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Jalan Paving			1 paket	35.100.000		35.100.000	0	RW. 5	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.42.54	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	terehabnya Saluran drainase			1 paket	178.200.000		178.200.000	0	RW. 3	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara**			**220.847.000**		**448.900.000**		**368.900.000**	**230.000.000**				
1	1.3.43.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 8	220.847.000	1 paket	168.500.000		168.500.000	230.000.000	RW. 3, 5	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.43.49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran drainase			1 paket	57.700.000		57.700.000	0	RW. 8	Dana Alokasi Umum	70	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.43.40	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan			1 paket	142.700.000		142.700.000	0	RW. 7	Dana Alokasi Umum	60	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
4	1.3.43.48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	-			1 paket	80.000.000		-	0	RW. 07	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan**			**186.090.000**		**1.995.125.000**		**1.995.125.000**	**0**				
1	1.3.44.68	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehab jalan lingkungan	RW 1,5	186.090.000	1 paket	563.500.000		563.500.000	0	RW. 3 dan 5	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.44.61	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran Drainase			1 paket	150.000.000		150.000.000	0	RW. 5	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.44.47	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Jalan Aspal dan Paving			1 paket	249.125.000		249.125.000	0	RW. 2	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.44.58	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Saluran Drainase			1 paket	187.900.000		187.900.000	0	RW. 2	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
5	1.3.44.59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Saluran drainase			1 paket	844.600.000		844.600.000	0	RW. 3	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
	1.3.45	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo**			**0**		**504.840.000**		**416.190.000**	**0**				
1	1.3.45.53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terehabnya Saluran Drainase			1 Paket	416.190.000		416.190.000	0	RW. VII	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
2	1.3.45.45	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII				1 Paket	88.650.000		-	0	Rw. VIII	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.46	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban**			**480.220.000**		**742.260.000**		**641.260.000**	**271.046.000**				
1	1.3.46.74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	RW 10	480.220.000	1 paket	287.090.000	RW 2,4	287.090.000	271.046.000	RW. 5, 10	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.46.60	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Jalan Lingkungan			1 paket	112.000.000		112.000.000	0	RW. 11	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.46.67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI				1 paket	101.000.000		-	0	RW. 7	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.46.55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	terehabnya Jalan Lingkungan			1 Paket	242.170.000		242.170.000	0	RW. VI	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.47	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara**			**0**		**481.750.000**		**386.250.000**	**0**				
1	1.3.47.105	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX	jalan lingkungan			1 paket	55.400.000		55.400.000	0	RW. 18	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.47.117	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Saluran Drainase			1 paket	183.450.000		183.450.000	0	RW XI	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.47.53	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	terpeliharanya jalan dan jembatan			1 paket	147.400.000		147.400.000	0	RW XI	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.47.60	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XVIII				1 paket	95.500.000		-	0	RW XVIII	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang			0		75.550.000		-	0				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
1	1.3.48.65	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII				1 paket	75.550.000		-	0	RW. 12	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.49	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang**			**300.543.000**		**575.050.000**		**575.050.000**	**220.000.000**				
1	1.3.49.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	RW 3,5	300.543.000	1 paket	171.000.000		171.000.000	220.000.000	RW. 1, 3, 8	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.49.39	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Lingkungan			1 paket	121.300.000		121.300.000	0	RW. 6	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
3	1.3.49.47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	saluran lingkungan			1 paket	169.000.000		169.000.000	0	RW.7	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
4	1.3.49.48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terehabnya Saluran drainase			1 paket	113.750.000		113.750.000	0	RW 7	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	1.3.50	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan**			**0**		**628.500.000**		**628.500.000**	**0**				
1	1.3.50.49	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Jalan Lingkungan			1 paket	162.500.000		162.500.000	0	RW. 8	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.50.59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran drainase lingkungan			1 paket	105.500.000		105.500.000	0	RW. 8	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
3	1.3.50.48	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	terehabnya Jalan Lingkungan			1 paket	169.000.000		169.000.000	0	RW VII	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
4	1.3.50.43	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terehabnya Jalan Lingkungan			1 paket	191.500.000		191.500.000	0	RW II	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan												
	2.18.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**			**6.900.000**		**6.900.000**		**6.900.000**	**6.900.000**				
			PERPUS		18,500,000					25,000,000				
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,5		0,79		0,83						
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	100	6.900.000	100	6.900.000	100	6.900.000	6.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**												
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			177.000.000		0		-	214.000.000				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari						
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%						
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95						
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15						

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%						
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27						
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%						
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18						
1	1.5.15.5	Pengendalian Keamanan Lingkungan		10	177.000.000	10	0	10		214.000.000	Disperkim	Dana Alokasi Umum	39	
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**												
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			7.544.000		0		-	7.544.000				
				-	5,139,479,000	-		-		4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln		37,000,000				
			DISHUB		240,000,000					320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%						

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :											
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan keper		60 kali siar/ 5 agama dan keper		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan						
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercaya		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan						
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3						
			Jumlah KIM	17		17		17						
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7						
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-						
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website		1	7.544.000	1	0	1		7.544.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
	2,4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan**												
	2.4.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			0		0		-	0				
			Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	45%		60%		80%						
1	2.4.18.1	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal			0		0			0	Disperkim	Dana Alokasi Umum	40	
	1,4	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**												

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
	1.4.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**31.150.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	**31.150.000**				
			Meningkatkan Disiplin Aparatur	3 jenis										
1	1.4.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan		22	31.150.000	10 THL	10.000.000	22	10.000.000	31.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	2,4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan**												
	2.4.15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah			0		0		-	0				
1	2.4.15.1	Penyusunan sistem pendaftaran tanah			0		0			0	Disperkim	Dana Alokasi Umum	40	
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**												
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah			26.559.000		0		-	26.559.000				
1	4.3.21.54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD			0		0			0	Disperkim	Dana Alokasi Umum	35	
2	4.3.21.55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD		2	26.559.000	2	0	2		26.559.000	Disperkim	Dana Alokasi Umum	35	
	1,4	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**												
	1.4.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			29.572.000		40.000.000		40.000.000	29.572.000				
1	1.4.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		200	29.572.000		0	200		29.572.000		Dana Alokasi Umum	50	
2	1.4.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 kegiata	40.000.000		40.000.000	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	2,4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan**												
	2.4.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			0		0		-	0				
			Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	45%		60%		80%						
1	2.4.18.1	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal			0		0			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**												
	1.3.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			1.075.000.000		269.588.000		169.588.000	75.000.000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	RASIONALISASI FINAL	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	14
			Persentase penduduk berakses air minum	97		100		100						
			Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	89		90		90						
			Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan	9		10		10						
1	1.3.27.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	Terlaksananya pendampingan akses air minum	4	1.000.000.000	200 MBR	200.000.000		100.000.000	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	84	Program prioritas RPJM
2	1.3.27.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monev pengelolaan SPAM	1	75.000.000	41 SPAM	69.588.000	1	69.588.000	75.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	1.3.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan**			**0**		**560.700.000**		**560.700.000**	**0**				
1	1.3.34.78	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	jalan lingkungan			1 paket	342.200.000		342.200.000	0	RW. 2	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100, Akomodasi Musrenbang
2	1.3.34.83	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terehabnya Saluran Drainase			1 paket	112.000.000		112.000.000	0	RW VII	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
3	1.3.34.91	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	terehabnya Saluran Drainase dan talud			1 paket	106.500.000		106.500.000	0	RW XV	Dana Alokasi Umum	95	Pokok Pikiran DPRD
			TOTAL		**13.149.097.000**		**37.206.023.000**		**25.438.093.000**	**28.890.628.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja
URUSAN : Trantibbumlinmas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**674.162.600**		**571.606.000**		**807.566.000**				
1	1.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rek listrik, air, telp dan internet	12	59.300.000	12	45.000.000	12	71.648.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	1.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/ops	35	23.420.000	30 unit	23.635.000	40	28.338.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	1.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunya laporan laporan keuangan dan SPJ	12	72.000.000	11 orang	75.726.000	12	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	1.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 Jenis	43.303.000	20 Jenis	44.354.000	20 Jenis	52.396.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	1.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	34	17.120.000	34 jenis	15.000.000	34	20.295.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	1.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat listrik kantor	25	5.539.600	20 jenis	5.000.000	25	6.702.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
7	1.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan media Cetak	2	2.376.000	2 jenis 12	2.580.000	2	2.874.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	1.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	24	3.828.000	24 kali	3.000.000	24	4.631.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
9	1.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan pembuatan minuman dan sncak rapat	129	45.596.000	6 jenis	36.735.000	129	54.751.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
10	1.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	50	192.434.000	50 orang	126.000.000	50	232.844.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
11	1.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksanannya pembayaran upah tenaga kontrak dan penjaga kantor	6	199.246.000	6 orang	183.293.000	6	241.087.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
12	1.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	200000	5.000.000	200000 le	5.497.000	200000	6.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
13	1.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya penataan arsip pegawai	125	5.000.000	2 giat	5.786.000	125	6.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	1.5.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**4.736.873.000**		**366.947.000**		**445.662.000**				
					7,245,909,000				8,543,812,000				
1	1.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12	62.326.000	12	30.000.000	12	68.714.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	1.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35	296.358.000	30 unit	326.447.000	40	358.593.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
3	1.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	15	4.427.000	10 unit	3.500.000	15	5.355.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
4	1.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21	10.752.000	12	7.000.000	21	13.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.5.2.3	Pembangunan gedung kantor		2	4.363.010.000	2 unit	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	1.5.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**123.750.000**		**74.139.000**		**149.737.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	1.5.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersediannya PDL I bagi Karyawan Satpol PP	106	123.750.000	70 stel	74.139.000	106	149.737.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
	1.5.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**26.800.000**		**24.411.000**		**31.500.000**				
1	1.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunya RFK, Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja	12	7.500.000	4 dokum	6.500.000	12	8.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	1.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunya laporan keuangan semesteran dan prognosis semesteran	4	2.600.000	2 dokum	1.574.000	4	3.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	1.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	3	2.500.000	2 dokum	2.750.000	3	3.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	1.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunya Renja dan Renja Perubahan	9	4.500.000	2 dokum	5.000.000	9	5.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	1.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPPA	12	7.250.000	2 dokum	6.500.000	12	8.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	1.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP,LKPJ dan LPPD	6	2.450.000	1 dokum	2.087.000	6	3.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**3.635.175.000**		**3.783.862.000**		**3.914.407.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga Banpol,Linmas dan petugas pengamanan obyek vital		1.608.000.000	12 bulan	2.061.356.000		1.490.120.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta Linmas yang mengikuti pelatihan	50	31.147.000	40 orang	39.127.000	50	37.680.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	1.5.15.4	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksanannya PAM Satpol PP, Linmas dan Damkar/ VVIP	4	63.800.000	4	0	4	77.140.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
4	1.5.15.5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksanannya kegiatan kesamaptaan, pelatihan defile/gelar pasukan dan jambore trantib		1.696.800.000	150 giat	1.243.763.000		2.024.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Kota Layak Anak, Memperkuat Implementasi MKSB, Mempertegas Skenario Kemitraan
5	1.5.15.11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya sidak / penertiban pedagang rokok	24	123.398.000	46 giat	165.572.000		149.311.000	Kota Magelag	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
6	1.5.15.13	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal		10	112.030.000	12 giat	105.704.000	10	135.556.000	Kota Magelang	DBHCHT	70	Rencana, Implementasi RAD MEA
7	1.5.15.15	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Terlaksananya rekruitmen anggota Linmas baru			50 orang	107.745.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Program prioritas RPJM
8	1.5.15.14	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	Terlaksananya pengiriman data pelanggaran secara online berbasisi SIG			12 giat	18.732.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
9	1.5.15.12	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya sidang tipiring			2 giat	41.863.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
	1,4	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**											
	1.4.19	**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**			**1.026.500.000**		**1.154.392.000**		**1.202.135.000**				
			Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran	100%		100%		100%					
			Persentase tingkat waktu tanggap response	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	1.4.19.9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksannya isi ulang APAR	150	117.500.000	150	91.986.000	150	142.175.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
2	1.4.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Pembayaran petugas penanggulangan kebakaran	12	876.000.000	12 bulan	985.515.000	12	1.059.960.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
3	1.4.19.1	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Tersusunnya pedoman upaya pencegahan dini bahaya kebakaran			1 dokum	26.133.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	83	Program prioritas RPJM
4	1.4.19.5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Peserta Diklat penanggulangan kebakaran	30	33.000.000	20 orang	38.849.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
5	1.4.19.8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			0	1 unit mo	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Akomodasi Musrenbang
6	1.4.19.7	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya penyuluhan bahaya kebakaran			100 pers	11.909.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**315.382.000**		**296.107.000**		**342.462.000**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.2	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi			117.790.000	50 orang	0		142.525.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
2	1.5.20.9	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	Terlaksanannya kegiatan penyuluhan & operasional penegakan perda	6	107.592.000	36 giat	165.578.000	3	99.937.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
3	1.5.20.10	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Terlaksannya kegiatan operasi pemberantasan Penyakit masyarakat	12	90.000.000	30 giat	130.529.000	12	100.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
	1.5.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**			**137.233.000**		**211.267.000**		**166.053.000**				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	0		42.50%		0					
			Cakupan tim relawan siaga bencana	5,88		8,82		11,76					
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	50%		75%		100%					
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	50%		75%		100%					
			Cakupan penanganan korban becana	100%		100%		100%					
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%		17,64%		23,53%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			#NAME?	2		3		4					
			#NAME?	0		0		0					
			#NAME?	0		0		0					
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada		ada		ada					
1	1.5.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		2500	10.021.000	3000 lem	0	2500	12.125.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
2	1.5.22.5	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur Satpol PP dan solusi penanggulangan bencana	300	65.298.000	70 orang	14.074.000	300	79.011.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
3	1.5.22.6	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah peserta simulasi penanggulangan bencana	500	61.914.000	150 oran	28.683.000	500	74.917.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
4	1.5.22.11	Kontijensi Mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen kontinjensi mitigasi bencana banjir			1 dokum	26.819.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
5	1.5.22.9	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana				2 kelurah	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
6	1.5.22.3	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam				6 jenis	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
7	1.5.22.10	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tanguh Bencana	Terbentuknya rintisan kelurahan tangguh bencana			2 Kelurah	141.691.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**60.973.000**		**130.840.000**		**73.777.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai - nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya koordinasi kantrantibmas dan pengiriman KST pada gelar pasukan			6	84.706.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan, Pokok Pikiran DPRD
2	1.5.16.1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi kegiatan PPNS	6	60.973.000	6 giat	46.134.000	6	73.777.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
	1.5.23	**Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum**			**259.071.000**		**206.927.000**		**259.071.000**				
1	1.5.23.3	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum	Terlaksanya pelatihan pengamanan Pileg dan Pilpres bagi anggota linmas			300 oran	30.505.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
2	1.5.23.5	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	Jumlah peserta Gelar pasukan PAM Pemilu	1	22.500.000	650 oran	26.459.000	1	22.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
3	1.5.23.6	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	Jumlah anggota Linmas Pam pemilu	645	236.571.000	100 oran	149.963.000	645	236.571.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
			TOTAL		**10.995.919.600**		**6.820.498.000**		**7.392.370.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
URUSAN : Trantibbumlinmas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**542.339.000**		**457.899.000**		**656.231.000**				
1	1.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko	200	968.000	200 lembar	800.000	200	1.171.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	1.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	4 jenis/ 12	52.998.000	4 jenis/ 12 bulan	49.800.000	4 jenis/ 12	64.127.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	1.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	16	11.132.000	14 unit	6.982.000	16	13.470.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	1.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan dan barang daerah serta laporan keuangan dan barang OPD	10 orang / bulan serta 12	92.157.000	10 orang / bulan serta 12 laporan	76.562.000	10 orang / bulan serta 12	111.510.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan serta jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	2 orang / bulan serta 37	50.304.000	2 orang / bulan serta 37 item	50.142.000	2 orang / bulan serta 37	60.868.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
6	1.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	46	28.706.000	49 item	12.834.000	46	34.734.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
7	1.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	8 jenis dan 40000	28.731.000	6 jenis dan 40000 lembar	11.899.000	8 jenis dan 40000	34.765.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
8	1.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat/komponen listrik	13	6.340.000	11 item	1.976.000	13	7.672.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
9	1.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3	4.428.000	3 jenis/ 12 bulan	4.920.000	3	5.359.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
10	1.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas 12 kg dan BBM genset	6	1.089.000	6 tabung	4.884.000	6	1.317.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
11	1.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan-minum untuk rapat dan tamu serta minum harian pegawai	57 kegiatan dan 12	56.515.000	44 kegiatan dan 12 bulan	39.134.000	57 kegiatan dan 12	68.383.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
12	1.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	87	189.500.000	45 kegiatan	141.086.000	87	229.295.000	Diluar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
13	1.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penjaga malam kantor dan driver	1 orang/ 12	19.471.000	3 orang/ 12 bulan	56.880.000	1 orang/ 12	23.560.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	1.5.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**320.230.000**		**213.798.000**		**437.107.000**				
					7,245,909,000				**8,543,812,000**				
1	1.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung dan pemeliharaan gedung kantor	1481 m2 dan 1	10.793.000	1 paket	27.022.000	1481 m2 dan 1	13.059.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	1.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	16	207.298.000	14 unit	154.796.000	16	250.831.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	1.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	9	5.899.000	6 jenis	12.919.000	9	7.137.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	1.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	6	19.965.000	6 jenis	17.061.000	6	24.158.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	1	2.250.000	1 paket	2.000.000	1	2.722.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
6	1.5.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	1	20.600.000	1 unit	0	3	74.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	1.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	3	53.425.000	2 item	0	3	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
8	1.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	-		0	3 item	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	1.5.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**50.925.000**		**58.339.000**		**61.620.000**				
1	1.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	LKPJ-LPPD, LKJ, Lap Realisasi fisik dan keuangan OPD	34	14.159.000	34 laporan	10.949.000	34	17.133.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	1.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	3	5.247.000	3 buku	4.404.000	3	6.349.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	1.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2	7.623.000	2 dokumen	6.410.000	2	9.224.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	1.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA, DPPA	30	18.570.000	30 buku	14.835.000	30	22.469.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunya Ranstra OPD	1	5.326.000	1 dokumen	6.741.000	1	6.445.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
6		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	LKj IP OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**695.883.000**		**1.138.107.000**		**795.394.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Laporan kegiatan Komunitas Intelijen Daerah	12	130.920.000	12 buku	179.846.000	12	158.414.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
2	1.5.16.4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Lomba siskamling tingkat Kota Magelang	17	14.511.000	17 kelurahan	40.971.000	17	17.558.000	Kelurahan se-Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
3	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rencana Aksi Daerah penanganan konflik sosial	30	128.519.000	30 buku	185.780.000	30	136.346.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
4	1.5.16.7	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	Buku laporan eks G 30 S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survey/riset	6	8.527.000	6 buku	10.146.000	6	9.046.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
5	1.5.16.8	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Rakor pengawasan orang asing dan sosialisasi pemantauan orang asing kepada masyarakat	12 kali dan 24	49.721.000	12 kali dan 200 orang	104.109.000	12 kali dan 24	49.721.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
6	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan keamanan wilayah	365	57.750.000	365 laporan	120.146.000	365	69.877.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Program prioritas RPJM
7	1.5.16.10	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jumlah operasi P4GN	12	99.678.000	12 kali	74.033.000	12	120.611.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
8	1.5.16.11	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Peserta penyuluhan P4GN	450 orang dan 100	73.804.000	1700 orang	230.452.000	450 orang dan 100	89.303.000	Kelurahan se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
9	1.5.16.12	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah peserta penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS dan test urine	150	57.453.000	500 orang dan 100 orang	52.998.000	150	69.518.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
10	1.5.16.13	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	-	500	75.000.000	500 orang	0	500	75.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
11	1.5.16.15	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba			1 raperda	86.763.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
12	1.5.16.14	Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	Jumlah kampung bebas narkoba			4 kampung	52.863.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Kota Layak Anak
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**28.587.000**		**13.081.000**		**34.590.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan penyelamatan arsip OPD	2000 arsip dan 10 arsip inaktif	28.587.000	2000 arsip dan 10 dos arsip inaktif	13.081.000	2000 arsip dan 10 arsip inaktif	34.590.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**176.100.000**		**195.536.000**		**213.100.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peserta dialog peningkatan kerukunan antar umat beragama	200	30.400.000	200 orang	29.586.000	200	36.800.000	Gedung Wanita Jl. Veteran No.4 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	1.5.17.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Peserta sosialisasi	200	30.100.000	200 orang	28.819.000	200	36.300.000	Gedung Wanita Jl. Veteran No.4 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
3	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta dialog tentang wasbang	180	29.980.000	200 orang	32.894.000	180	33.053.000	SMA/SMK Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Kota Layak Anak
4	1.5.17.5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif pengembangan nilai-nilai Pancasila dan peringatan hari lahir Pancasila	100	21.400.000	100 orang dan 1 kegiatan	43.943.000	100	25.900.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
5	1.5.17.8	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	Verifikasi Ormas dan Data profil ormas	12 bulan dan 60	64.220.000	12 bulan dan 40 buku	35.356.000	12 bulan dan 60	81.047.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
6	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya upacara Hari Bela Negara			1 kegiatan	24.938.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
	1.5.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**			**158.100.000**		**267.435.000**		**191.200.000**				
			Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10		10		10					
			Terpublikasikannya dialog antar agama	6		8		9					
			Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	2		4		4					
			Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%		100%		100%					
			Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	1.5.18.1	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	Peserta sosialisasi kerukunan kehidupan beragama di masyarakat	200	30.100.000	200 orang	29.874.000	200	36.300.000	Gedung Wanita Jl. Veteran No.4 Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
2	1.5.18.2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta diskusi wawasan kebangsaan	100	27.900.000	150 orang	33.438.000	100	33.700.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
3	1.5.18.7	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	Rakor FKUB	4	49.400.000	4 kegiatan	82.396.000	4	59.800.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
4	1.5.18.8	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	Rakor FPBI	4	50.700.000	4 kegiatan	76.980.000	4	61.400.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
5	1.5.18.10	Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme	Peserta dialog tentang antisipasi paham radikalisme			240 orang	44.747.000		0	Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**141.946.000**		**57.780.000**		**153.346.000**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.2	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Pengiriman anggota organisasi kemasyarakatan	90	53.700.000	240 orang	41.034.000	90	65.100.000	Kab/Kota se-Jateng	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM
2	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Fasilitasi kegiatan FKDM Tingkat Kota Magelang	4 kali dan 12	88.246.000	12 bulan	16.746.000	4 kali dan 12	88.246.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM
	1.5.21	**Program pendidikan politik masyarakat**			**87.000.000**		**146.771.000**		**105.700.000**				
			Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1		1		1					
			Tingkat partisipasi politik	67		79		76					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	1.5.21.1	Penyuluhan kepada masyarakat	Peserta dialog interaktif masyarakat dengan forpimda	180	32.200.000	180 orang	39.944.000	180	39.100.000	Bakorwil II Kedu-Surakarta	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
2	1.5.21.3	koordinasi forum-forum diskusi politik	Peserta Forum Diskusi Politik	36	15.800.000	36 orang	42.732.000	36	19.200.000	Hotel Safira	Dana Alokasi Umum	49	Program prioritas RPJM
3	1.5.21.6	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Diseminasi, Berita acara kelengkapan persyaratan bantuan keuangan parpol dan penyerahan bantuan keuangan parpol	9	9.100.000	3 kegiatan	27.665.000	9	11.200.000	Badan KesbangPol dan Linmas	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
4	1.5.21.7	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	Peserta sosialisasi pemilu	200	29.900.000	200 orang	36.430.000	200	36.200.000	Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu	Dana Alokasi Umum	49	Program prioritas RPJM
			TOTAL		**2.201.110.000**		**2.548.746.000**		**2.648.288.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Sosial
URUSAN : Sosial

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	1,6	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial**											
	1.6.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**528.511.720**		**471.012.000**		**736.689.317**				
1	1.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat		400	1.000.000	160 surat	3.500.000	425	1.200.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	1.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	82.057.000	12 bulan	47.400.000	12	118.162.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	1.6.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12	5.575.000	11 kenda	5.998.000	14	8.028.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	1.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan		10	117.270.000	9 orang	125.706.000	10	168.868.800	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	1.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor		12	108.569.315	12 bulan	27.471.000	12	141.924.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	1.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor		12	16.812.000	12 bulan	11.461.000	12	23.212.000	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	1.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	9.643.000	12 bulan	8.030.000	12	13.308.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	1.6.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	8.413.000	12 bulan	2.212.000	12	11.610.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	1.6.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		3	806.400	4 buah	7.368.000	5	1.049.760	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	1.6.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12	2.116.000	12 bulan	4.800.000	12	2.870.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	1.6.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor		12	1.666.000	12 bulan	1.920.000	12	2.920.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	1.6.1.17	Penyediaan makanan dan minuman		12	28.941.000	12 bulan	54.400.000	12	41.675.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	1.6.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12	99.140.500	12 bulan	95.760.000	12	136.813.500	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
14	1.6.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap		12	31.922.505	12 bulan	59.346.000	12	44.053.057	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	1.6.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian		12	14.580.000	12 bulan	15.640.000	12	20.995.200	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	1.6.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**282.035.369**		**183.129.000**		**494.218.319**				
					3,583,517,000				4,923,693,500				
1	1.6.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		3	57.500.000	0 jenis	0	5	76.043.500	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	1.6.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12	33.168.300	17 m2	20.000.000	12	161.337.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	1.6.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		11	123.494.000	11 unit	142.680.000	11	161.337.081	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	1.6.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		12	6.314.000	8 jenis	7.909.000	12	14.089.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	1.6.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		5	11.304.069	6 jenis	12.540.000	7	14.949.500	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	1.6.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		2	50.255.000	0 jenis	0	2	66.462.238	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	1.6.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**75.458.295**		**136.790.000**		**99.793.923**				
1	1.6.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		4	9.291.885	4 dokume	13.323.000	4	12.288.518	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	1.6.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		8	5.136.590	1 dokume	12.000.000	8	6.793.140	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	1.6.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD		2	9.564.320	2 dokume	8.584.000	2	12.648.813	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	1.6.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD		2	16.928.000	2 dokume	17.638.000	2	22.387.280	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	1.6.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial		12	34.537.500	8 bulan	60.692.000	12	45.676.172	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	34	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
6	1.6.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD				1 dokume	12.553.000		0	Dinas sosial	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
7	1.6.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				1 dokum	12.000.000		0	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
8		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1.6.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**			**360.000.000**		**107.271.000**		**383.100.000**				
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%		100%		100%					
			Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	11.00%		13.00%		14.00%					
1	1.6.15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin		1571	250.000.000	12 bulan	82.542.000	1571	250.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
2	1.6.15.2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin		200	110.000.000	68 orang	24.729.000	200	133.100.000	Dinas Sosial	DBHCHT	60	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	1.6.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**			**531.314.000**		**1.196.506.000**		**682.594.940**				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%		100%		100%					
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30.00%		35%		40.00%					
1	1.6.16.36	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi				20 orang	28.989.000		0	Dinas Sosial	DBHCHT	40	Penanggulangan Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang
2	1.6.16.2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak		40	12.000.000	180	36.433.000	55	21.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	50	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
3	1.6.16.10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa		105	55.814.000	50 orang	50.969.000	105	67.534.940	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
4	1.6.16.12	Penanganan orang terlantar		190	22.500.000	150 oran	18.635.000	200	23.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Penanggulangan Kemiskinan
5	1.6.16.14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya		95	40.000.000	153 lansi	40.325.000	85	50.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	40	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
6	1.6.16.15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya		95	55.000.000	30 orang	17.930.000	85	65.000.000	Dinas Sosial	DBHCHT	40	Rencana
7	1.6.16.16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS		21	192.500.000	4 dokum	70.302.000	21	232.925.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
8	1.6.16.17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna		185	60.000.000	85 orang	110.740.000	195	75.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
9	1.6.16.25	Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial		-	0	2 kegiata	31.749.000	2	35.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM
10	1.6.16.44	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial				2 dokum	50.684.000		0	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	80	Penanggulangan Kemiskinan
11	1.6.16.18	Pembinaan keluarga muda mandiri		102	93.500.000	36 orang	41.928.000	102	113.135.000	Dinas Sosial	DBHCHT	40	Penanggulangan Kemiskinan
12	1.6.16.30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai				12 kegiat	131.559.000		0	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	90	Penanggulangan Kemiskinan
13	1.6.16.45	Operasional Tim Reaksi Cepat				17 kelura	78.500.000		0	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	45	Penanggulangan Kemiskinan
14	1.6.16.49	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				115 anak	87.442.000		0	Dinas Sosial	DBHCHT	40	Kota Layak Anak
15	1.6.16.47	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana				20 kegiat	21.926.000		0	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	40	Penanggulangan Kemiskinan
16	1.6.16.46	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong				5 e-Waro	18.794.000		0	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	85	Penanggulangan Kemiskinan
17	1.6.16.48	Mekanisme Pemutakhiran Mandiri				2 kegiata	359.601.000		0	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	80	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
	1.6.18	**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**			**103.750.000**		**145.538.000**		**161.462.500**				
			Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	20%		30%		40%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	1.6.18.3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma		15	35.000.000	40 orang	50.168.000	15	45.000.000	Dinas Sosial	DBHCHT	84	SDGs, Akomodasi Musrenbang
2	1.6.18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma		25	68.750.000	35 orang	95.370.000	35	116.462.500	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
	1.6.19	**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**			**30.000.000**		**20.000.000**		**40.000.000**				
			Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	58%		67%		75%					
1	1.6.19.8	Pembinaan yayasan / panti asuhan		12	30.000.000	13 lemba	20.000.000	12	40.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	1.6.20	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**			**199.300.000**		**142.541.000**		**253.055.500**				
			Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaa n NAPZA	75%		80%		85%					
1	1.6.20.1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial		30	93.500.000	45 orang	12.541.000	30	113.135.000	Dinas Sosial	DBHCHT	84	Rencana, Program prioritas RPJM
2	1.6.20.6	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK		110	105.800.000	110 oran	130.000.000	110	139.920.500	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
	1.6.21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**			**430.653.000**		**746.735.000**		**488.653.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%		100%		100%					
			Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	4		5		6					
			Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	30%		40%		50%					
1	1.6.21.1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha		2	10.000.000	100 peru	124.242.000	2	13.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	50	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
2	1.6.21.3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat		68	185.000.000	170 oran	206.664.000	68	195.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	50	Penanggulangan Kemiskinan
3	1.6.21.4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial		3	20.653.000	15 anggo	13.258.000	3	30.653.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM
4	1.6.21.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan		5500	215.000.000	5500 m2	301.971.000	5500	250.000.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
5	1.6.21.8	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial				1 kegiata	70.600.000		0	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM
6	1.6.21.9	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)				5 WKSBM	30.000.000		0	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	Penanggulangan Kemiskinan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**55.000.000**		**28.168.000**		**66.550.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		55	55.000.000	1 kegiata	28.168.000	55	66.550.000	Dinas Sosial	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
			TOTAL		**2.611.022.384**		**3.177.690.000**		**3.406.117.499**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

SKPD : Dinas Tenaga Kerja
URUSAN : Tenaga Kerja

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja											
	2.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**564.935.250**		**586.767.000**		**597.634.250**				
1	2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	480	1.800.000	490 surat	1.500.000	490	2.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan SDA	12	80.400.000	48 langga	85.000.000	12	87.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	2.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	17	6.850.000	18 unit	7.000.000	18	7.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	92.084.000	12 orang	96.830.000	12	93.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
5	2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	12	100.719.000	2 jenis	112.778.000	12	115.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	50.308.000	30 item	14.000.000	12	52.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	20.040.000	2 jenis	9.698.000	12	21.040.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	63	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
8	2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	12.657.000	12 item	9.318.000	12	13.657.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	2.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	2	1.344.000	8 kegiata	2.196.000	2	2.344.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	3.960.000	12 bulan	3.960.000	12	4.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	2.700.000	12 bulan	4.998.000	12	3.520.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	12.387.250	12 bulan	33.615.000	12	13.387.250	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	2.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	72	101.642.000	72 kegiat	95.958.000	72	102.642.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	2.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	69.744.000	5 orang	97.980.000	12	70.744.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	2.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	8.300.000	26 Pegaw	11.936.000	12	9.100.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**181.584.000**		**172.875.000**		**187.550.000**				
1	2.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	800	39.250.000	800 m2	30.000.000	400	22.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional / dinas	17	122.404.000	18 unit	117.000.000	18	137.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	2.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2	6.875.000	10 unit	10.875.000	2	7.750.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	6	13.055.000	20 unit	15.000.000	6	19.800.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	2.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**31.258.000**		**46.728.000**		**36.100.000**				
1	2.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan	12	6.444.000	12 Bulan	6.309.000	12	7.750.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.1.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1	4.898.000	1 laporar	2.498.000	1	6.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya dokumen rencana kerja OPD	2	6.838.000	2 Dokum	5.645.000	2	7.750.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya rencana kerja dan anggaran OPD	2	8.137.000	2 Dokum	12.026.000	2	8.600.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya laporan kinerja OPD	1	4.941.000	1 Dokum	5.250.000	1	5.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2.1.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**			**792.338.000**		**1.505.440.000**		**1.295.600.000**				
			Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	5%		5%		7,5%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetenssi	65%		65%		65%					
			Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	5%		5%		7,5%					
1	2.1.15.7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	terpeliharanya sarana dan prasarana BLK	500	20.000.000	600 m2	150.000.000	600	24.000.000	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	DBHCHT	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.1.15.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring lulusan pelatihan tahun 2018 di Kota Magelang	122	4.910.000	230 pese	7.244.000	125	5.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.1.15.11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan menjahit	20	62.371.000	40 Orang	166.320.000	40	120.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	94	Akomodasi Musrenbang
4	2.1.15.13	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	Terbinanya LPK di Kota Magelang	13	11.750.000	11 LPK	7.094.000	13	11.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.1.15.16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan montir sepeda motor	20	155.444.000	20 orang	147.708.000	40	300.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	84	Akomodasi Musrenbang
6	2.1.15.17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata boga	20	67.196.000	20 orang	75.696.000	40	130.000.000	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	DBHCHT	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.1.15.18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata rias	20	80.636.000	20 orang	81.094.000	40	160.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
8	2.1.15.19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan komputer	11	55.199.000	11 Orang	52.041.000	20	88.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	84	Akomodasi Musrenbang
9	2.1.15.20	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan teknisi HP	11	51.246.000	11 orang	51.472.000	30	84.500.000	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	DBHCHT	84	Akomodasi Musrenbang
10	2.1.15.24	Pelatihan Bahasa Asing	Pencaker yang dilatih pelatihan bahasa asing	50	174.272.000	45 Orang	186.536.000	50	182.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
11	2.1.15.26	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan perkayuan	30	109.314.000	20 Orang	135.235.000	40	190.000.000	Balai Latihan Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	2.1.15.1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersedianya data base dan rencana tenaga kerja daerah			1 Dokum	250.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
13	2.1.15.8	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	Terehabnya sarana dan prasarana ruang tata boga BLK			64 m2	0		0	Kota Magelang	DBHCHT	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	2.1.15.3	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Tersediaya peralatan tata boga			1 Unit	195.000.000		0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	DBHCHT	74	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3,8	Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi											
	3.8.15	**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**			**188.734.000**		**169.953.000**		**269.000.000**				
			Persentase (%) calon transmigrasi yang tertempatkan	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	3.8.15.2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya program pemerintah di bidang transmigrasi	2	72.277.000	2 Lokasi	64.549.000	2	80.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Penanggulangan Kemiskinan
2	3.8.15.5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Calon Transmigrasi yang terkirim	5	66.703.000	5 KK 1 lol	68.459.000	10	135.000.000	Daerah penempatan	Dana Alokasi Umum	70	Penanggulangan Kemiskinan
3	3.8.15.6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	Termonitornya transmigran	2	49.754.000	2 lokasi	36.945.000	2	54.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Penanggulangan Kemiskinan
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja											
	2.1.16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**			**4.023.764.000**		**3.690.458.000**		**4.185.500.000**				
			Persentase wirausaha baru	6%		7%		8%					
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan	70%		75%		80%					
			Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan										
1	2.1.16.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Laporan IPK	12	143.650.000	12 Lapor	187.775.000	12	157.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.1.16.3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Pembinaan dan monitoring evaluasi	2	35.220.000	2 Kegiata	24.121.000	2	40.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	2.1.16.5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Peserta Pelatihan	10	118.905.000	50 Orang	241.000.000	20	200.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	94	Penanggulangan Kemiskinan
4	2.1.16.8	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	Lokasi survey perencanaan padat karya	17	15.265.000	17 lokasi	15.845.000	17	16.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Penanggulangan Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang
5	2.1.16.11	Perluasan kerja sistem padat karya	Lokasi padat karya infrastruktur	17	1.621.693.000	17 lokasi	1.456.196.000	17	1.640.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Penanggulangan Kemiskinan
6	2.1.16.14	Job Fair	Pencari kerja terfasilitasi	750	285.245.000	50 Perusa	286.665.000	800	290.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	96	Mempertegas Skenario Kemitraan
7	2.1.16.15	Padat Karya Non Bahan	Terlaksananya padat karya non bahan	17	1.694.636.000	17 lokasi	1.386.856.000	17	1.725.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	101	Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
8	2.1.16.17	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	Terlaksananya sistem manajemen ISO 9001 : 2015	1	109.150.000	1 Sertifik	92.000.000	1	117.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2.1.17	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**			**205.965.000**		**232.793.000**		**223.550.000**				
			Coverage asuransi tenaga kerja	70%		70%		75%					
			Persentase Perselisihan Hub Industrial terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	50%		50%		50%					
1	2.1.17.2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian kasus perselisihan HI	10	15.000.000	10 kasus	17.188.000	10	16.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	2.1.17.4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi ketenagakerjaa n	240	25.000.000	100 oran	15.622.000	260	29.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
3	2.1.17.9	Sidang Dewan Pengupahan	Terlaksananya sidang dewan pengupahan	10	32.600.000	4 kali	44.900.000	10	36.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Mempertegas Skenario Kemitraan
4	2.1.17.10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya sidang LKS Tripartit	4	26.050.000	4 kali	34.900.000	4	27.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Mempertegas Skenario Kemitraan
5	2.1.17.14	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	Terlaksananya pemantauan pemberian THR	2	8.200.000	150 peru	20.589.000	2	8.300.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Mempertegas Skenario Kemitraan
6	2.1.17.15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	Terlaksananya sosialisasi	2	22.500.000	120 peru	20.000.000	2	25.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.1.17.27	Fasilitasi hari buruh internasional	Terfasiltasinya peringatan Hari Buruh Internasional			1 kegiata	25.106.000		0	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.1.17.25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Peserta Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja	30	21.480.000	120 oran	22.761.000	30	21.750.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.1.17.26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	Terlaksananya pemantauan upah minimum	30	15.035.000	80 Perus	15.227.000	50	18.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	2.1.17.21	Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan	Perusahaan yang terdaftar,terbin a dan termonitor	200	40.100.000	120 oran	16.500.000	240	41.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3,8	Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	3.8.17	**Program Transmigrasi Regional**			**40.171.000**		**33.082.000**		**42.000.000**				
					277,926,000				342,402,000				
			Persentase (%) masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%		100%		100%					
1	3.8.17.1	Penyuluhan transmigrasi regional	masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	300	40.171.000	300 Oran	33.082.000	300	42.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Penanggulangan Kemiskinan
			TOTAL		**6.028.749.250**		**6.438.096.000**		**6.836.934.250**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN : Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**0**		**105.000.000**		**0**				
1	2.5.5.8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bertambahanya wawasan PNS di DLH			106 orang	105.000.000		0	DLH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.5.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**			**0**		**418.160.000**		**0**				
			Indeks Kualitas Air,	76%		76%		77%					
			Indeks Kualitas Udara	78%		78%		78%					
			Indeks Tutupan Hutan	49%		49%		50%					
			Jumlah SDA yang terkonservasi	57,7		67,7		77,84					
			Jenis flora	10 Jenis		12 Jenis		15 jenis					
			Jenis fauna	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis					
1	2.5.17.45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya Lomba K3			68 peserta	163.704.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	2.5.17.44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan			8 kegiatan	57.034.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
3	2.5.17.39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kapasitas Anggota Saka Kalpataru			80 orang	26.719.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	2.5.17.43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	Terwujudnya Sekolah Adiwiyata			6 Sekolah	98.710.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	2.5.17.42	Pengadaan Sumur Resapan	Jumlah sumber daya alam yang terkonservasi			8 unit sumur resapan	49.433.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	2.5.17.5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbentuknya kampung iklim			1 kampung iklim	22.560.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2.5.20	**Program Peningkatan Pengendalian Polusi**			**0**		**28.594.000**		**0**				
			Persentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100%		100%		100%					
1	2.5.20.18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	terpantaunya gas rumah kaca 5 sektor			1 dokumen	15.936.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.5.20.19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	Tersedianya data penghasil Bahan Perusak Ozon (BPO) dan Limbah B3			8 usaha/kegiatan	12.658.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	1,4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
	1.4.20	**Program pengelolaan areal pemakaman**			**0**		**911.281.000**		**0**				
			DISNAKERTRANSOS		215,000,000				250,000,000				
			DKPT		623,650,000				308,350,000				
			Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	26,6%		0		19,4%					
1	1.4.20.16	Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo	Terbinanya tanaga lapangan			75 orang	10.290.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
2	1.4.20.14	Verifikasi Data Pemakaman	Terlaksanya trtib administrasi TPU Giriloyo			180 lembar	15.883.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	1.4.20.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev pengendalian pengelolaan TPU Giriloyo			12 laporan	82.385.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	1.4.20.7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan sarana/prasarana pemakaman			6 unit	500.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	1.4.20.6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Terwujudnya gapura, saluran dan jalan paving pemakaman			1 unit	225.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
6	1.4.20.5	Pemberian perijinan pemakaman	Terwujudnya ijn pemakaman baru, pemesanan petak makam, perpanjangan petak makam, dan perpanjangan makam			1300 ijin	77.723.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	3,5	Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral											
	3.5.17	**Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan**			**0**		**7.705.571.000**		**0**				
1	3.5.17.8	Penyediaan Jasa Listrik PJU	Terbayarnya rekening listrik pju			12 bulan	6.500.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	3.5.17.3	Pemeliharaan lampu PJU	Terlaksananya perbaikan dan penggatian suku cadang listrik pju			5150 titik	673.395.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	3.5.17.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	Terlaksannya pengecekan Alat Pengatur Pembatas (APP)			12 buku	24.827.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	3.5.17.2	Pemasangan instalasi jaringan PJU	Tercukupinya Penerangan Jalan Umum di kota Magelang			44 titik	449.065.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
5	3.5.17.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan PJU Kota			2 bh, Tang Hidrolik Penjepit Kabel Jaringan 2 bh, Tang Tracker NGK (penarik kabel FO udara) 1 bh, Sepatu safety 14 bh, baju safety 16 bh, jas hujan 16 bh, helm safety 16 bh, Las Listrik 1	58.284.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**0**		**1.659.611.000**		**0**				
1	2.5.1.25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	PBB tanah TPA			1 tahun	2.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	2.5.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga malam			13 orang	482.760.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun			20 jenis	15.482.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			55 jenis	28.744.000		0	DLH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Arsip data pegawai			100 bendel	23.851.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah			350 kegiatan	247.598.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai			5 jenis	407.563.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah selama 12 bulan			12 bulan	5.700.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.5.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas			24 kali	2.064.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	2.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan keberihan dan bahan pembersih selama setahun			35 jenis	69.812.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	2.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman surat			60 lembar	250.000		0	Kota Megelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
12	2.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon			12 bulan	120.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	2.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional			75 unit	70.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	2.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan tertib administrasi			106 pns	179.404.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	2.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik penerangan kantor selama setahun			20 jenis	4.383.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**0**		**19.873.772.000**		**0**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.67	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan	Pelatihan			50 orang	27.182.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	2.5.15.68	Peningkatan kualitas jalan masuk menuju TPSA Banyuurip dan pembangunan tembok pembatas TPSA (Banprov)	Terbangunnya jalan masuk dan tembok pembatas			2 paket			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	2.5.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Lomba pengelolaan sampah (kampung organik dan bank sampah)			3 lomba	103.658.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
4	2.5.15.6	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah sosialisasi, Jumlah pembinaan TPST			10 kali, 3 kali	74.211.000		0	Kelurahan, SD Kemirirejo 3 dan TPST di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
5	2.5.15.66	Pematangan Lahan TPST Bojong	Tertatanya lahan TPST Bojong			1 lokasi	3.000.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
6	2.5.15.54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya fasilitasi penilaian Adipura			2 ekspose, 3 koordinasi, 1 dokumen	400.324.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	terpeliharanya transfer depo, sarana pengelolaan persampahan			6 transfer depo, 80 gerobag /bin beroda/ kontainer	294.151.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
8	2.5.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan pengelolaan persampahan transfer depo			12 buku	27.510.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
9	2.5.15.52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	pengelolaan TPS 3R Magersari			12 Bulan	31.750.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
10	2.5.15.18	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	Tersedianya sarpras persampahan			55 kompost er komunal , 25 bin pemilah	75.764.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
11	2.5.15.24	Penanganan sampah kota	terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah			45.000 m3	3.932.881.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
12	2.5.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	gerobak sampah, bin beroda, tempat sampah pemilah, armroll, motor roda 3 pengangkut sampah			68 buah, 30 buah, 60 buah, 2 unit, 17 unit	2.094.814.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
13	2.5.15.58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	Buku volume sampah harian			1 dokume n	35.071.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
14	2.5.15.48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	Terlaksananya pelatihan fasilitator lingkungan			50 orang	30.584.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
15	2.5.15.50	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	Operasional TPST			5 TPST	672.350.000		0	TPST Jurangombo Utara, TSPT Tidar Campur, TPST Rusunawa, TPST Dumpoh, TPST Sukorini	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
16	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM			17 Kelurahan	20.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
17	2.5.15.42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	Jumlah peserta pelatihan daur ulang			60 orang	23.393.000		0	Kota Magelang	DBHCHT		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
18	2.5.15.55	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Penyusunan Laporan pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai dasar Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah			1 dokumen	13.294.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
19	2.5.15.49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pendampingan pengelolaan persampahan untuk Fasilitator Lingkungan			12 bulan	404.348.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
20	2.5.15.1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Terwujudnya sistem manajemen dan pelaporan sampah secara online			1 software sistem	41.797.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
21	2.5.15.7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	terlaksananya pembinaan tenaga kebersihan dan karyawan DLH			2 keg	65.589.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
22	2.5.15.25	Pengelolaan sampah TPA	Terlaksananya penataan sampah di TPSA			73000 m3	1.834.535.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
23	2.5.15.51	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik			3 bulan	10.000.000		0	DLH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
24	2.5.15.64	Penyiapan lahan jalan menuju TPST	Tertatanya akses jalan menuju TPST			1 lokasi	6.660.566.000		0	Bojong	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2.5.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**0**		**1.687.446.000**		**0**				
1	2.5.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan roda 2			4 unit	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
2	2.5.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor DLH			100 %	0		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor			50 unit	26.780.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan AC dan sound system/wireless			6 unit	9.372.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
5	2.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor			20 unit	3.500.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan dan pengecatan gedung kantor			4 unit	94.883.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional			54 unit	1.552.911.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	GPS Tablet Navigator			2 unit	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**0**		**990.438.000**		**0**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.50	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya ssosialisasi kebijakan bidang lingkungan hidup			25 usaha/kegiatan	7.237.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.5.16.24	Pemantauan Kualitas Udara	Terlaksananya pemantauan kualitas udara, NO, CO, SO, Kebisingan			20 sampel	77.211.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	2.5.16.37	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengawasan kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya			15 usaha/dokumen lingkungan	19.472.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.5.16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas air			34 sampel	44.729.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kerja bakti			2.400 orang, 6 kegiatan	41.771.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
6	2.5.16.35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kirab Adipura dan Tasyakuran Adipura			2 keg, kirab dan tasyakuran	254.906.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
7	2.5.16.41	Pelayanan Penyedotan Kakus	Jumlah kakus masyarakat yang disedot			70 lubang	76.525.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	2.5.16.38	Pengelolaan Gas Methan	Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip			12 bulan	50.345.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	2.5.16.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Laporan pmonev engelolaan sampah TPSA Banyuurip			12 bulan	37.343.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	2.5.16.26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	Tertanganinya Pengaduan Kasus Lingkungan			4 pengaduan kasus lingkungan	10.722.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
11	2.5.16.29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	Terpantaunya Kualitas Air Limbah yang dibuang ke badan air oleh pemraksarsa kegiatan/usaha			54 sampel	47.556.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
12	2.5.16.33	Pemantauan Kualitas Mata Air	Terpeliharanya kualitas mata air di Kota Magelang dan sumur sekitar TPA			20 lokasi / 40 sampel	47.880.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	2.5.16.42	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Tercapainya pelayanan dalam penerbitan SPPL			120 dokumen	35.640.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
14	2.5.16.43	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Terlaksananya Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL UPL			8 dokumen	70.278.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
15	2.5.16.44	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terverifikasinya izin PPLH			10 dokumen rekomendasi perijinan	56.602.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
16	2.5.16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pengelolaan air lindi			1 unit	35.890.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
17	2.5.16.47	Pembentukan Komisi Amdal	Terbentuknya Komisi Amdal			100 persen	27.445.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
18	2.5.16.48	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Lingkungan	Tersedianya panduan operasional laboratorium lingkungan			1 dokumen	48.886.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**0**		**4.575.751.000**		**0**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	Terlaksananya pengecatan pooh turus jalan			1300 pohon	68.143.000		0	Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
2	2.5.24.36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	Terwujunya lahan pembibitan yang mendukung display taman kota			8 jenis tanaman 10 jenis sarana dan prasarana taman	76.072.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
3	2.5.24.18	Penataan Taman Aloon-aloon	Terwujudnya taman bermain dan olahraga outdoor di kawasan aloon aloon			1 area olahraga outdoor dan 1 area germain anak	400.000.000		0	aloon aloon	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB, Pokok Pikiran DPRD
4	2.5.24.45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	Tercapainya penghijauan tepi jalan			100 tabebuya, 100 jacaranda, 1300 bugenfile, 1300 anggrek	323.147.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
5	2.5.24.10	Monitoring dan evaluasi	Tersedianya Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			12 buku	24.321.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
6	2.5.24.9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Terlaksananya lomba taman			1 lomba taman	94.605.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
7	2.5.24.24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	Tersedinya Sarana dan Prasarana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota			623 buah umbul umbul banner back drop 6 mesin potong rumput 8 chainsaw kecil, 3 chainsaw ukuran sedang, 2 pompa air	369.303.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
8	2.5.24.26	Perawatan Pohon Peneduh	Terpeliharanya pohon peneduh kota			200 Pohon Peneduh Kota	47.766.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
9	2.5.24.85	Penanganan Pohon Tumbang	Terlindunginya masyarakat kota magelang dari bencana pohon tumbang			10 kegiatan	50.060.000		0	Kota	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
10	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga			53 taman	2.794.397.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
11	2.5.24.30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga			11 buah	89.679.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
12	2.5.24.29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	Terpeliharanya pagar, tiang bendera, dan pipa medium			212 buah	40.258.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
13	2.5.24.88	Penataan Taman Jalan Sriwijaya	Peningkatan Keindahan Ruang Terbuka Hijau dan Mendukung Path/jalur dalam Tema MKSB			1 lokasi	198.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi MKSB
	2.5.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**0**		**115.295.000**		**0**				
			Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	100									
1	2.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja 2019 dan Renja Perubahan 2018			2 dokumen	7.256.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.5.6.17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Monitoring 165 kegiatan di DLH			165 kegiatan	12.500.000		0	Dinas Lingkungan Hidup	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	2.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun anggaran 2018			1 laporan	5.055.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kineja fisik dan keuangan			12 laporan	12.500.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.5.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran			2 dokumen	5.689.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/DPA 2019 dan RKA/DPA perubahan 2018			4 dokumen	30.202.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP DLH Tahun 2018			1 dokumen	8.300.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran			1 dokumen	4.719.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.5.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Tersinkronnya laporan aset dan keuanganDLH			2 Dokumen	14.074.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2.5.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**0**		**351.321.000**		**0**				
1	2.5.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Peningkatan kinerja aparatur			477 orang	351.321.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.5.19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**			**0**		**927.825.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 buah		6 buah		6 buah					
1	2.5.19.21	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia			1 dokumen	48.425.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
2	2.5.19.22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	terinfomasinya indeks kualitas lingkungan hidup kota magelang			1 dokumen	6.238.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.5.19.25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan hukum untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan			12 laporan	436.208.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	2.5.19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	tersedianya akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup			1 dokumen	40.875.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
5	2.5.19.24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	Terpublikasinya Pelayanan kepada masyarakat			143 tayang	126.070.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.5.19.19	Pemeriksaan Sampel Tanah	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia			1 dokumen	14.295.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
7	2.5.19.1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan			2 pameran, 1 lomba foto, 1 sosialisasi	100.756.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
8	2.5.19.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	Terpantaunya kualitas air			1 dokumen	40.905.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.5.19.27	Inventarisasi lingkungan hidup	tersedianya data inventarisasi lingkungan hidup			1 dokumen	57.447.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
10	2.5.19.28	Penyusunan Data dan Profil DLH	Tersedia data dan Profil DLH			1 Dokumen	56.606.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Tema RKPD 2019
	204.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**					**2.000.000.000**						
	3	Pengadan tanah	Terbayarnya tanah Sidotopo			600 m2	2.000.000.000						
			TOTAL		**0**		**41.350.065.000**		**0**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN : Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**684.244.000**		**591.182.000**		**747.877.000**				
1	2.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat		388	1.750.000	396 surat	1.750.000	388	1.750.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	218.600.000	5 jenis	160.200.000	12	230.067.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.6.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		13	5.260.000	13 Kendaraan	6.336.000	13	5.750.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12	82.416.000	12 laporan	78.101.000	12	95.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor		966,32	40.000.000	967 m2	44.459.000	966,32	40.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor		66	26.000.000	66 jenis	15.168.000	66	26.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		9	13.000.000	2 Jenis	10.498.000	9	13.500.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.6.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		11	5.500.000	11Jenis	3.664.000	11	5.500.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
9	2.6.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga		1	750.000	3 Jenis	805.000	1	750.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.6.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2	3.600.000	2 Jenis	2.640.000	2	3.800.000	Jl.Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.6.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor		1	3.000.000	4 Jenis	8.293.000	1	3.300.000	Jl.Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.6.1.17	Penyediaan makanan dan minuman		310	20.000.000	511 Orang	32.567.000	310	22.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	2.6.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		87	200.000.000	40 kegiatan	167.706.000	87	220.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	2.6.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap		3	64.368.000	3 Orang	58.995.000	3	80.460.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.6.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**1.325.350.000**		**363.276.000**		**1.014.915.000**				
					1,193,488,000				1,893,922,000				
1	2.6.2.3	Pembangunan gedung kantor				1 unit bangunan	0		0	Jl. veteran No. 7	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
2	2.6.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		2	200.000.000	2 Jenis	0	2	180.000.000	JL. Veteran no 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.6.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		2464	120.750.000	3 gedung	101.233.000	2464	105.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.6.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		13	106.000.000	13 unit	150.053.000	13	110.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	2.6.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		30	15.000.000	24 Jenis	16.581.000	30	15.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.6.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		76	133.600.000	45 unit	95.409.000	76	154.915.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.6.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		13	750.000.000	15 jenis	0	6	450.000.000	Jl. Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2.6.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan**			**62.175.000**		**66.555.000**		**63.175.000**				
1	2.6.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		4	11.700.000	4 laporan	15.419.000	4	11.700.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		1	6.549.000	1 dokumen	2.954.000	1	6.549.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.6.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		1	9.926.000	1 dokumen	6.510.000	1	9.926.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.6.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD		2	11.000.000	2 dokumen	9.105.000	2	11.000.000	Jl. Veteran no. 7 magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.6.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD		2	17.000.000	2 dokumen	13.093.000	2	18.000.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.6.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD		1	6.000.000	1 dokumen	4.474.000	1	6.000.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**1.750.454.000**		**1.847.219.000**		**2.142.826.840**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase masyarakat yang puas	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan	40%		60%		80%					
1	2.6.15.41	Penyusunan Buku Profil Kependudukan				30 buku	57.223.000		0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	84	Program prioritas RPJM
2	2.6.15.3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan		150	140.580.000	1 kelancaran	103.734.000	150	185.917.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
3	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		6	63.977.000	1200 surat	26.848.000	6	84.609.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
4	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		18000	318.000.000	24000 pemohon	291.293.000	18000	351.000.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
5	2.6.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan			21.960.000	120 orang peserta	15.232.000		24.156.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Tema RKPD 2019
6	2.6.15.13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan		2720	150.888.000	1700 orang	242.298.000	2720	158.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
7	2.6.15.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		4	46.471.000	4 laporan	15.303.000	4	61.458.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
8	2.6.15.17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan		40	32.500.000	40 orang	22.076.000	40	35.700.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	88	Tema RKPD 2019
9	2.6.15.43	Penyusunan Buku Data Penduduk				30 buku	16.498.000		0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	84	Program prioritas RPJM
10	2.6.15.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran		2459	162.108.000	3500	191.414.000	2459	185.124.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	70	Tema RKPD 2019

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
11	2.6.15.28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling		21	13.294.000	21 tempat	10.755.000	21	16.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	64	Tema RKPD 2019
12	2.6.15.29	Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik		12	217.111.000	12000 KTP el	177.293.000	12	287.130.000	Jl. Veteran no 7 Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	95	Program prioritas RPJM
13	2.6.15.30	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan		1150	20.397.000	6 kali (3 kecamatan)	18.197.000		0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Masterplan
14	2.6.15.32	Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan		6	123.836.000	17 keluraha n	0	6	178.323.840	Jl.VeteranNo. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
15	2.6.15.33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan		4	15.750.000	6 kali	21.052.000	4	19.057.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
16	2.6.15.36	Pemutakhiran Database dan Dokumen Kependudukan		9000	172.500.000	3000 dokume n		9000	228.131.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
17	2.6.15.38	Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak		6	230.000.000	5000 keping KIA	187.263.000	6	304.175.000	Jl. Veteran No 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
18	2.6.15.5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan		4	16.800.000	4	19.140.000	4	18.500.000	Jl. Veteran No.7 Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
19	2.6.15.7	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat		1	4.282.000	3 jenis	250.944.000	1	4.946.000	Kota Magelang	DAK dengan Pendamping DAU	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja
20	2.6.15.40	Digitalisasi Dokumen Catatan Sipil				1000	56.050.000		0	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
21	2.6.15.42	Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain				1 instansi lintas	124.606.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	95	Memperkuat Implementasi Masterplan
22	2.6.15.57	Pengelolaan e-Service Administrasi Kependudukan				12 Laporan	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**119.919.000**		**14.690.000**		**158.592.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD		1	119.919.000	1 tahun	14.690.000	1	158.592.000	Jl. Veteran No. 7 Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Tema RKPD 2019
			TOTAL		3.942.142.000		2.882.922.000		4.127.385.840				
					3.942.142.000		**2.882.922.000**		**4.127.385.840**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**550.277.000**		**605.250.000**		**567.511.000**				
1	2.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1	1.500.000	12 bulan	1.600.000	1	1.700.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya langganan listrik, air, dan telpon kantor	12	86.515.000	12 bulan	95.165.000	12	104.665.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan kir kendaraan dinas	41	15.233.000	43 unit	16.756.000	41	18.431.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai aturan	12	98.245.000	12 bulan	108.069.000	12	20.693.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12	28.701.000	12 bulan	31.571.000	12	34.728.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	19.360.000	12 bulan	21.296.000	12	23.425.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	16.082.000	12 bulan	17.690.000	12	19.459.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	2.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik untuk kantor	14	12.100.000	14 jenis	13.310.000	14	14.641.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	2.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	12	4.356.000	12 bulan	4.791.000	12	5.270.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
10	2.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya langganan tabung gas	20	4.114.000	20 tabung	4.525.000	20	4.977.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	2.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya snack dan makan bagi tamu dan rapat	12	32.507.000	12 bulan	35.757.000	12	39.332.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	2.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	12	164.681.000	12 bulan	181.149.000	12	199.263.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	2.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedia tenaga kontrak penjaga malam dan pengemudi	12	58.413.000	12 bulan	64.254.000	12	70.679.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	2.7.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannaya tertib administrasi kepegawaian	12	8.470.000	12 bulan	9.317.000	12	10.248.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.7.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**415.215.000**		**438.369.000**		**479.589.000**				
	2.7.2.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor									Dana Alokasi Umum		
	2.7.2.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor									Dana Alokasi Umum		
	2.7.2.10	Pengadaan Mebeleur									Dana Alokasi Umum		
1	2.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1	122.000.000	1 unit	144.000.000	1	184.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	41	232.800.000	43 unit	232.800.000	41	232.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	69	54.305.000	69 unit	54.848.000	69	55.396.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
4	2.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	79	6.110.000	79 unit	6.721.000	79	7.393.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.7.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**5.550.000**		**6.110.000**		**6.721.000**				
1	2.7.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi penyuluh KB	15	5.550.000	15 orang	6.110.000	15	6.721.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	2.7.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**40.293.000**		**44.319.000**		**48.752.000**				
1	2.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja triwulanan DP4KB			4 laporan			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	2.7.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya laporan prognosis realisasi anggaran	1	5.348.000	1 laporan	5.882.000	1	6.470.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	2.7.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	10.216.000	1 laporan	11.236.000	1	12.362.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	2.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja OPD	2	8.412.000	2 dokume	9.253.000	2	10.178.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	2.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya dokumen RKA	2	10.304.000	2 dokume	11.334.000	2	12.467.000	DP4KB	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	2.7.6.24	Penyusunan Laporan Sinkrionisasi Aset dan Keuangan OPD									Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	2.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan LKJIP	1	6.013.000	1 laporan	6.614.000	1	7.275.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**224.954.000**		**241.548.000**		**259.702.000**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya kegiatan lomba administrasi LPMK dan pembinaan LPMK se Kota Magelang	2115	86.394.000	2 kegiatan	95.033.000	2115	104.536.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	2.7.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	Tersedianya buku profil Kelurahan dan Buku profil kelurahan tingkat kota	34	78.560.000	21 buku	86.515.000	34	95.166.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.7.15.6	Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat	50	60.000.000	50 orang	60.000.000	50	60.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	2.7.15.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi kader pembangunan masyarakat			1 keg			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
5	2.7.15.8	Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan pembinaan kader UP2K, lomba UP2K PKK Tingkat Kota dan evaluasi tingkat provinsi			3 Kegiatan			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.15	**Program Keluarga Berencana**			**50.939.000**		**56.033.000**		**57.851.000**				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2		2					
1	2.8.15.2	Pelayanan KIE	Tersampaikannya informasi tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada masyarakat	3	19.228.000	3 Kegatan	21.150.000	3	22.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.8.15.3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya pemeriksaan pupsmear	75	21.063.000	100 orang	23.170.000	75	23.401.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
3	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan untuk pelayanan KB	150	10.648.000	87 orang	11.713.000	150	11.950.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	2.8.15.17	Pembinaan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya pembinaan pengendalian kependudukan di Kota Magelang			226 orang			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2.8.15.13	Pengadaan sarana dan prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana									Dana Alokasi Khusus (D A K)		

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
5	2.8.15.16	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	Terpenuhinya dukungan operasional Balai Penyuluhan KB, Distribusi Alokon dan Kampung KB			12 bulan			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Rencana
6	2.8.15.19	Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah	Terlaksananya fasilitasi pendidikan kependudukan bagi pelajar di sekolh			150 pelajar			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	2.8.15.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB	Tersedianya prasarana penunjang Balai Penyuluhan KB			2 balai			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,6	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial**											
	1.6.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**			**86.800.000**		**95.350.000**		**104.500.000**				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%		100%		100%					
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30.00%		35%		40.00%					
1	1.6.16.14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang	100	48.300.000	500 orang	53.000.000	100	58.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
2	1.6.16.23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang	100	38.500.000	150 orang	42.350.000	100	46.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**631.606.000**		**631.606.000**		**631.606.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A	13	272.788.000	30	272.788.000	13	272.788.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
2	2.2.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, RW ramah anak	20	158.000.000	17 Kelurah	158.000.000	20	158.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
3	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak, forum anak se kota magelang	50	134.000.000	400 anak	134.000.000	50	134.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
4	2.2.16.7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi PUG tingkat kelurahan,kecamatan,kota dan nasional	1	66.818.000	250 orang	66.818.000	1	66.818.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.2.16.8	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Terlaksananya evaluasi KLA tigkat kecamatan dan tersusunnya buku evaluasi KLA			300 orang dan 10 buku			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	2.2.16.21	Penyusunan Profil Anak dan Perempuan	Tersusunnya buku profil anak dan perempuan			2 buku			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Rencana
7	2.2.16.11	Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak	Terlaksananya sosialisasi Perda perlindungan anak			300 orang			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	2.7.16	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan**			**34.686.000**		**38.148.000**		**41.963.000**				
1	2.7.16.2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan	Terlaksananya pembinaan administrasi LKK per triwulan, pendampingan administrasi LKK ke proses berbadan hukum dan lomba LKK tingkat kota	17	34.686.000	3 Kegiatan	38.148.000	17	41.963.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
2	2.7.16.9	Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penjaringan TTG Kota Magelang			4 unit			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**			**13.320.000**		**14.665.000**		**16.132.000**				
			Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%		2%		1%					
1	2.8.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja	80	13.320.000	80	14.665.000	80	16.132.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	2.2.17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**			**60.500.000**		**66.550.000**		**73.205.000**				
			Rasio KDRT	0.05%		0.04%		0.04%					
			Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	20		18		17					
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu	100%		100%		100%					
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		100%		100%					
			Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%		100%		100%					
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%		100%		100%					
			Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	4%		5%		6%					
1	2.2.17.1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Tersedianya data perempuan yang bekerja di pemerintah dan parleman	2	36.300.000	150 orang	39.930.000	2	43.923.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.2.17.10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Terlaksananya perlindungan perempuan, anak dan ABH di Kota Magelang	2	24.200.000	250 orang	26.620.000	2	29.282.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Akomodasi Musrenbang
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
	2.7.17	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**			**65.370.000**		**69.357.000**		**73.743.000**				
1	2.7.17.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan rakor pembinaan kelompok masyarakat dan temu kader DP4KB		0	2 kegiatan	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.7.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan, lomba kelurahan tingkat kota, klarifikasi dan validasi tingkat provinsi, lomba tingkat provinsi dan regional	3	39.870.000	5 kegiatan	43.857.000	3	48.243.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.7.17.6	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan dan KB	17	25.500.000	60 orang	25.500.000	17	25.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	2.7.17.13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan TMMD di 3 kelurahan		0	6 Kegiatan	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Akomodasi Musrenbang
5	2.7.17.14	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terselenggaranya kegiatran TMMD			3 Kelurahan			0	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi		Akomodasi Musrenbang
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.17	**Program pelayanan kontrasepsi**			**101.478.000**		**108.160.000**		**125.479.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Cakupan peserta KB aktif	78.00%		79.00%		80.00%					
1	2.8.17.1	Pelayanan konseling KB	Tersampaikannya informasi yang benar tentang KB kepada masyarakat	1	22.325.000	213 konse	24.558.000	1	27.014.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.8.17.2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat	450	45.878.000	125 orang	47.000.000	450	48.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.8.17.4	Pelayanan KB medis operasi	Terlayaninya masyarakat menjadi peserta KB MOP	17	33.275.000	20 orang	36.602.000	17	50.465.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**95.524.000**		**105.076.000**		**115.583.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya Pencanangan BBGRM di Kelurahan, Lomba tingkat Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	17	95.524.000	17 Kelurah	105.076.000	17	115.583.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana, Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**450.150.000**		**453.650.000**		**454.150.000**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya lomba Posyandu, PHBS, LBS, HKG PKK	4	84.000.000	4 kegiatan	84.000.000	4	84.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.2.18.7	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	meningkatnya penganggaran responsif gender setiap OPD	50	38.000.000	50	41.500.000	50	42.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.2.18.8	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	Terselenggaranya perlindungan anak dalam kegiatan Hari anak Nasional	12	328.150.000	500 anak	328.150.000	12	328.150.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**			**146.500.000**		**161.150.000**		**177.265.000**				
			Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	66%		68%		70%					
1	2.8.18.1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terpenuhinya operasional kader PPKBD, sub PPKBD dan petugas lain	209	90.598.000	215	99.658.000	209	109.624.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
2	2.8.18.2	Koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	61	31.460.000	446 orang	34.606.000	61	38.066.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	2.8.18.4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	terlaksananya pendataan keluarga	35500	24.442.000	639	26.886.000	36500	29.575.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			**16.500.000**		**18.200.000**		**20.000.000**				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		98%		98%					
1	1.2.19.14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan masyarakat	100	16.500.000	150 orang	18.200.000	100	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**511.575.000**		**511.575.000**		**511.575.000**				
					1,730,060,000		1,824,389,000		1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,52941		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143			143	143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%			100%	100%					
1	2.7.19.1	Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi perempuan	50	20.000.000	175 orang	20.000.000	50	20.000.000	Kota Magelang	DBHCHT		Penanggulangan Kemiskinan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
2	2.7.19.2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita	2	150.000.000	2 kegiatan	150.000.000	2	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
3	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK)	1	341.575.000	1 organisa	341.575.000	1	341.575.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**287.200.000**		**316.000.000**		**347.000.000**				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100		100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100		100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31		<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	meningkatnya gizi anak sekolah	100	287.200.000	900 anak	316.000.000	100	347.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Penanggulangan Kemiskinan
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.20	**Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**			**16.698.000**		**18.368.000**		**20.204.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	3%		3%		3%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
1	2.8.20.1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Terlaksananya kegiatan PIK Remaja/ Mahasiswa	3	8.349.000	60 orang	9.184.000	3	10.102.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.8.20.2	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	terlaksananya kegiatan PIK Remaja	3	8.349.000	40 orang	9.184.000	3	10.102.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2.8.23	**Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga**			**11.696.000**		**11.696.000**		**11.696.000**				
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi	4%		4%		4%					
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	78%		79%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	88%		88%		88%					
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%		100%		100%					
			Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%		100%		100%					
			Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%		30%		30%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%		100%		100%					
			Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	11%		12%		13%					
			Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	60%		62%		65%					
			Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	12%		10%		9%					
			Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%		2%		2%					
			Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	90%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	95%		97%		97%					
			Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%		100%		100%					
			Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%		100%		100%					
			Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	3%		3%		2%					
			Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%		1%		1%					
			Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%		100%		100%					
			Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
			Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%		100%		100%					
			Persentase peningkatan jumlah keluarga sejahtera	89%		90%		91%					
			Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	35%		50%		65%					
1	2.8.23.2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kelompok tribina	17	11.696.000	75 orang	11.696.000	17	11.696.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**0**		**0**		**0**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	14
1	2.2.15.5	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	Terfasilitasinya Operasional Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Magelang			12 bulan			0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
			TOTAL		**3.816.831.000**		**4.026.180.000**		**4.144.227.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Perhubungan
URUSAN : Perhubungan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2,9	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan**											
	2.9.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**898.000.000**		**982.503.000**		**1.100.000.000**				
1	2.9.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100	2.000.000	2 jenis	1.750.000	100	2.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	2.9.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	96.000.000	1	168.396.000	1	115.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
3	2.9.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	13.000.000	27 unit	14.500.000	1	14.500.000	Dihub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.9.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	175.000.000	1	171.907.000	1	190.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
5	2.9.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	125.000.000	1	121.437.000	1	155.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.9.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	27.000.000	1	24.500.000	1	35.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.9.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	17.500.000	1	15.810.000	1	2.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	2.9.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.	1	17.500.000	1	20.651.000	1	25.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	2.9.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.	1	10.000.000	1	10.926.000	1	16.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
10	2.9.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	7.500.000	1	9.180.000	1	12.500.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.9.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	2.500.000	1	1.640.000	1	3.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.9.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	55.000.000	1	58.250.000	1	65.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	2.9.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	215.000.000	1	184.800.000	1	275.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	2.9.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	125.000.000	1	168.480.000	1	175.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	2.9.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1	10.000.000	1	10.276.000	1	15.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.9.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**3.725.000.000**		**803.989.000**		**2.010.000.000**				
1	2.9.2.3	Pembangunan gedung kantor		1	0	1 unit	0		0	Jl. Jend Sudirman no 84	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
2	2.9.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		1	2.000.000.000	4	0	1	400.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
3	2.9.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		6	80.000.000	6	0	6	80.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.9.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		8	250.000.000	8	0	8	300.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.9.2.10	Pengadaan mebeleur		2	25.000.000	2	0	2	60.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.9.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi			0	9	0	9	60.000.000	Dishubkominfo	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.9.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	375.000.000	1	130.000.000	1	120.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	2.9.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	26	300.000.000	26	235.358.000	26	340.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
9	2.9.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	15.000.000	1	14.450.000	1	25.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
10	2.9.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9	290.000.000	9	74.181.000	9	325.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.9.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat		8	90.000.000	8	0	8	125.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.9.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya Taman Lalu Lintas	9	300.000.000	1 paket	350.000.000	9	175.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	56	ExBAU
	2.9.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**62.000.000**		**32.208.000**		**88.000.000**				
1	2.9.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai	60	62.000.000	60	32.208.000	60	88.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.9.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**77.093.000**		**89.801.000**		**107.975.000**				
1	2.9.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	12	29.978.000	12	24.981.000	12	43.169.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	2.9.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	2	16.000.000	2	17.143.000	2	20.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
3	2.9.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	2	21.695.000	2	31.893.000	2	31.241.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
4	2.9.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	1	9.420.000	1	8.572.000	1	13.565.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
5	2.9.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan semesteran			2 dokum	7.212.000		0	Dishub	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
6		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2.9.15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**			**454.090.000**		**699.145.000**		**579.694.000**				
			DISHUB		65,000,000				85,000,000				
			Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	50%		75%		90%					
			Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata	2		2?		2					
			Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	66%		78%		88%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	90		93		96					
			Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	18		19		20?					
1	2.9.15.2	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	dokumen penentuan lokasi terminal tipe c, amdalalin, ukl/upl terminal tipe c	10	83.022.000	5 dokum	293.650.000	10	119.553.000	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	91	Rencana
2	2.9.15.7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terlasaksanya pengelolaan prasarana dan fasilitas perhubungan	3	71.146.000	1 termina	89.517.000	3	102.452.000	Terminal Type C	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
3	2.9.15.11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	terfasilitasinya koordinasi eksternal bidang perhubungan	1	30.000.000	5 kali koo	45.490.000	1	35.000.000	eks karesidenan kedu	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
4	2.9.15.12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	terfasilitasinya proses penilaian WTN	1	59.220.000	1 penilaia	46.960.000	1	85.277.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
5	2.9.15.13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya forum lalu lintas	4	35.982.000	4 kali koo	36.295.000	4	51.815.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
6	2.9.15.14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Terlaksananya survey dan analisis simpang	1	24.720.000	5 simpan	13.100.000	1	35.597.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
7	2.9.15.15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	Terlaksananya amdal	2	150.000.000	30 rekom	95.809.000	2	150.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
8	2.9.15.16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	Terlaksananya publikasi		0	2 kegiata	43.170.000		0	Dishub	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
9	2.9.15.18	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	Pengelolaan data base di bidang Perhubungan			4 kegiata	12.530.000		0	Dishub	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
10	2.9.15.17	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan	Terkelolanya TI di bidang Perhubungan			4 media	22.624.000		0	Dishub	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2.9.16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**			**315.300.000**		**417.800.000**		**417.360.000**				
			Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7		7		7					
1	2.9.16.5	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan terminal dan prasarana fasilitas perhubungan	1	160.300.000	10 jenis	152.800.000	1	192.360.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	50	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	2.9.16.4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	terpeliharanya sarana dan prasarana dan faislitas LLAJ yang terpelihara	1	50.000.000	1 unit	150.000.000	1	90.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
3	2.9.16.2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	terpeliharanya sarana dan prasarana dan faislitas LLAJ yang terpelihara	8	105.000.000	9 jenis	115.000.000	8	135.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2.9.17	**Program peningkatan pelayanan angkutan**			**697.138.000**		**730.169.000**		**1.031.005.000**				
			Jumlah arus penumpang angkutan umum	2,900,000		2,900,000		2,900,000					
			Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	5%		5%		5%					
1	2.9.17.3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Peningkatan pelayanan angkutan	1	2.000.000	270 pese	37.244.000	1	30.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	2.9.17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	161.940.000	15 lokasi	123.320.000	1	233.194.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
3	2.9.17.6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	92.973.000	3 kegiata	124.244.000	1	133.882.000	Terminal	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.9.17.9	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal				1 tahun	0		0	Terminal	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
5	2.9.17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya survey load faktor	1	50.451.000	2 lokasi (	11.775.000	1	72.651.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
6	2.9.17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terfasilitasinya mudik gratis lebaran, dan paskribra pada HUT RI	1	148.440.000	2 layana	158.400.000	1	213.754.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.9.17.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Jumlah ijin trayek yang dilayani	1	113.535.000	65 surat	27.362.000	1	163.491.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
8	2.9.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan	Lomba pemilihan awak angkutan umum teladan	1	25.496.000	60 orang	21.119.000	1	36.716.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	2.9.17.18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terbinanya remaja pelopor keselamatan lalu lintas	1	102.303.000	360 oran	226.705.000	1	147.317.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	2.9.18	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**			**789.143.000**		**702.495.000**		**971.516.000**				
			DISHUB		3,954,113,000				4,445,126,000				
			Jumlah pelayanan umum	1		1		1					
1	2.9.18.8	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal	dokumen DED terminal tipe c			1 dokum	50.000.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM
2	2.9.18.1	Pembangunan gedung terminal			0	1	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
3	2.9.18.2	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal		1	45.000.000	1	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
4	2.9.18.4	Pengadaan Papan Nama Jalan		1	37.302.000	1 paket	0	1	53.716.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
5	2.9.18.6	Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran		1	195.956.000	1 kegiata	0	1	282.178.000	Perencanaan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
6	2.9.18.7	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di bidang perparkiran	1	75.855.000	400 pese	68.103.000	1	109.232.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
7	2.9.18.9	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	Terlaksananya pendampingan	12	435.030.000	12 kegiat	384.392.000	12	526.390.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
8	2.9.18.12	Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ	Jumlah gedung yang terbangun			1 unit	200.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2.9.19	**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**			**5.166.952.000**		**3.116.497.000**		**7.724.217.000**				
			DISHUB		6,026,762,000				8,954,148,000				
			Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	8?		8,5?		9?					
			Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	60%?		75%?		?90%					
1	2.9.19.16	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	terlaksananya pengamanan jalur lalu lintas			10 lokasi	528.200.000		0	kota magelang	Dana Alokasi Umum	91	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	2.9.19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalin	1	49.290.000	50 rambu	41.075.000	1	70.978.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
3	2.9.19.2	Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan	1	218.098.000	5000 m'	193.830.000	1	314.062.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
4	2.9.19.4	Pengadaan lampu flashing/kedip	Tersedianya lampu flashing	1	218.318.000	2 unit	31.500.000	1	314.379.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
5	2.9.19.5	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya trafific light ATCS	1	235.000.000	5 lokasi	1.827.400.000	1	460.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	2.9.19.7	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	Tersedianya pita kejut, cermin cembung, water barier dan traffic count	1	233.322.000	50 traffic	200.500.000	1	335.985.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
7	2.9.19.8	Pembangunan ATCS		1	4.120.000.000	1	0	1	6.095.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
8	2.9.19.10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	Terwujudnya operasional dan pengawasan kawasan tertib lalin	1	73.626.000	5 lokasi	57.980.000	1	106.023.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Rencana
9	2.9.19.11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	Terlaksananya survey ruas jalan	1	19.298.000	5 jalan	10.182.000	1	27.790.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
10	2.9.19.14	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar	Jumlah pembinaan kepada pelajar/PAUD			600 siswa	40.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Kota Layak Anak
11	2.9.19.13	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota	Jumlah laporan inspeksi/ audit jalan kota			2 dokum	45.000.000		0	Kota Magaelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
12	2.9.19.15	Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota	Jumlah kegiatan car free day dan car free night			20 kegiat	140.830.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	2.9.20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**			**392.000.000**		**236.293.000**		**1.402.000.000**				
					6,933,635,000				15,855,865,422				
			DISHUB		392,000,000				1,402,000,000				
			Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	7,986		8,036		8,086					
			Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian	4		4		4					
1	2.9.20.4	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	1	380.000.000	4300 KBV	220.500.000	1	1.385.000.000	Dishub	Dana Alokasi Umum	60	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	2.9.20.5	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	Terlaksananya pembinaan pengujian kendaraan bermotor	5	12.000.000	5 kegiata	15.793.000	5	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
			TOTAL		12.576.716.000		7.810.900.000		15.431.767.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
URUSAN : Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2.060.400.000**		**3.818.408.000**		**2.293.900.000**				
1	2.10.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat pada Diskominsta	100	2.000.000	2 jenis	530.000	100	2.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.10.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran Aktifitas Kerja	12	1.030.000.000	4 langgar	3.390.334.000	12	1.090.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	81	ExBAU
3	2.10.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja	27	13.000.000	15 unit	5.550.000	27	14.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.10.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	12	175.000.000	12 lapora	129.012.000	12	190.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.10.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor	15	325.000.000	12 bulan	30.811.000	15	350.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.10.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD	1	35.000.000	42 jenis	15.168.000	1	37.500.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.10.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya ketersediaan komponen/alat listrik untuk penerangan kantor	1	26.400.000	17 jenis	10.511.000	1	26.400.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	2.10.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	3	14.000.000	3 jenis	9.500.000	3	16.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	2.10.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi	9	10.000.000	5 jenis	8.472.000	9	15.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.10.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kelancaran aktivitas kerja	1	2.500.000	36 tabun	2.280.000	1	3.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.10.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran aktivitas kerja	1	60.000.000	32 orang	20.337.000	1	65.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.10.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	1	215.000.000	70 kegiat	126.252.000	1	275.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	2.10.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Keamanan, kenyamanan lingkungan dan Mobilitas Kepala Dinas	6	125.000.000	3 orang	39.262.000	6	175.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	2.10.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi Kepegawaian	100	10.000.000	2 dokume	19.883.000	100	15.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
15	2.10.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1	17.500.000	2 jenis	10.506.000	1	20.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.10.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**637.000.000**		**389.911.000**		**840.000.000**				
1	2.10.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		6	80.000.000	3 jenis	0	6	80.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	2.10.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	26	300.000.000	15 unit	112.996.000	26	340.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.10.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	3	7.000.000	3 jenis	4.800.000	3	120.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.10.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	1	0	14 jenis	272.115.000	1	0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.10.2.3	Pembangunan gedung kantor		100	0	1 paket	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
6	2.10.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		8	250.000.000	30 jenis	0	8	300.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
7	2.10.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi				1 paket			0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	2.10.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**61.093.000**		**65.062.000**		**88.066.000**				
1	2.10.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Pencapaian target kinerja	12	29.978.000	12 lapora	11.638.000	12	43.169.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.10.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun		0	2 dokume	8.571.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.10.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyediaan anggaran kegiatan	2	21.695.000	2 dokume	10.422.000	2	31.241.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.10.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Capaian Kinerja	1	9.420.000	1 dokume	11.716.000	1	13.656.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.10.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terealisasinya laporan akhir tahun			2 Dokum	7.715.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**983.000.000**		**1.469.868.000**		**1.125.000.000**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Magelang	17	160.000.000	17 kelom	97.855.000	17	190.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Rencana, Program prioritas RPJM
2	2.10.15.6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Pembinaan untuk pengelola PPID	12	58.000.000	6 kegiata	141.710.000	12	65.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.10.15.8	Siaran Radio	Terpenuhinya kebutuhan Informasi melalui media Radio bagi Masyarakat	12	390.000.000	12 Bulan	476.823.000	12	425.000.000	Jl. Pahlawan Kota	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
4	2.10.15.10	Penerbitan majalah	Penerbitan Majalah Dinamika	4	115.000.000	4 edisi	125.040.000	4	125.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
5	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Terkelolanya website secara berkala	12	42.500.000	30 web	165.865.000	12	45.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
6	2.10.15.22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	Terpublikasikannya Informasi Pembangunan Daerah	1	40.000.000	12 bulan	81.370.000	1	42.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM
7	2.10.15.23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Terlaksananya pemantauan Isi siaran sesuai P3SPS	10	82.500.000	7 Lembag	47.189.000	10	87.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
8	2.10.15.24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Terlaksananya dialog Interaktif oleh Pimpinan Daerah	12	95.000.000	12 Kegiat	180.766.000	12	145.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Tema RKPD 2019
9	2.10.15.26	Gebyar Offair Radio	Terlaksananya Lomba dalam rangka hari jadi magelang FM			8 orang p	100.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
10	2.10.15.36	Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat	Terlaksananya literasi media massa kepada masyarakat			6 kegiata	53.250.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
11	2.10.15.37	Peningkatan Layanan Informasi				12 bulan	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,14	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik**											
	2.14.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**			**270.000.000**		**342.033.000**		**210.000.000**				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,9%					
			Persentase pemenuhan data statistik	95%		95%		95%					
1	2.14.15.14	Penyusunan buku data strategis kota Magelang (DSKM)		210	160.000.000	100 buku	0	230	210.000.000	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	69	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
2	2.14.15.13	Manajemen Data Daerah	Terkelolanya data daerah dalam data go	25	110.000.000	2 modul	259.114.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
3	2.14.15.22	Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang	Tersedianya data hasil survey Sosial Ekonomi			30 buku	58.709.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
4	2.14.15.10	Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah	Terlaksananya Sosialisasi Manajemen Data			1 kegiata	11.919.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	34	Program prioritas RPJM
5	2.14.15.28	Bimbingan Teknis Pengelola DataGo	Terlaksananya Bimbingan teknis pengelola data go			1 kegiata	12.291.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	58	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,15	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2.15.15	**Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi**			**0**		**139.999.000**		**0**				
					125,000,000				140,000,000				
			Ketersediaan SOP persandian	100%		100%		100%					
			Tingkat kapasitas SDM persandian	100%		100%		100%					
			Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	90%		100%		100%					
1	2.15.15.8	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi	Terlaksananya survey kepuasan			1 kegiata	9.999.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	49	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.15.15.3	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Komunikasi berjalan dengan lancar			12 bulan	130.000.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	39	Rencana, ExBAU
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			86.000.000		381.365.000		92.000.000				
			Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1		1		1					
			Interoperabilitas antar system informasi	2		4		4					
			Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)	50%		75%		100%					
			Cakupan data yang terpusat dan terkendali	70%		80%		100%					
			Persentase PD yang menerapkan e-government	100%		100%		100%					
1	2.10.16.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terselanggaranya kajian dan penelitian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Magelang	12	86.000.000	6 kegiata	45.845.000	12	92.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program prioritas RPJM
2	2.10.16.2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan		0	12 lapora	335.520.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	59	Pemberantasan Korupsi

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2.10.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa**			**240.000.000**		**306.140.000**		**280.000.000**				
1	2.10.18.6	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	Terpublikasinya kegiatan Pembangunan melalui Media Tradisional	6	240.000.000	7 kegiata	280.680.000	6	280.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.10.18.8	Publikasi Kegiatan Bela Negara	Pelasanaan upacara bela negara		0	1 kegiata	25.460.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2.10.19	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika**			**2.850.000.000**		**5.382.945.000**		**0**				
1	2.10.19.2	Pembangunan WAN Kota	Tersedianya jaringan WAN Kota tahap 6	1	2.850.000.000	30 titik te	1.956.229.000	1	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
2	2.10.19.3	Pengelolaan WAN	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala		0	12 bulan	164.453.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.10.19.9	Pembangunan Command Center	Terbangunnya command center			1 paket	2.883.823.000		0	Setda Kota Mage	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
4	2.10.19.7	Pengembangan Aplikasi	Terlaksananya pengembangan sistem informasi			12 bulan	114.410.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	81	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
5	2.10.19.4	Pengelolaan Aplikasi M City	Terupdatenya data MCity Magelang Cerdas			12 bulan	154.024.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
6	2.10.19.10	Pengelolaan Command Center	Terkelolanya Command Center			5 bulan	110.006.000		0	Diskominsta	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2.10.20	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**			**225.000.000**		**245.518.000**		**240.000.000**				
1	2.10.20.9	Pelayanan operasional LPSE	Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronik	1	225.000.000	12 bulan	245.518.000	1	240.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Tersusunnya Draf Perubahan Perda No.11 Tahun 2013**		**0**		**83.313.000**		**0**				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		0					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		1		2					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		0		0					
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah				1 Raperd	83.313.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Rencana
			TOTAL		7.412.493.000		12.624.562.000		5.168.966.000				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN : Penanaman Modal

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2,12	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal**											
	2.12.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**729.237.000**		**629.893.000**		**785.036.000**				
1	2.12.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim	55	560.000	90 surat	1.575.000	62	620.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.12.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik dan internet	12	74.000.000	5 jenis	116.400.000	12	75.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.12.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	23	9.480.000	23 unit	8.356.000	23	7.200.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.12.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	TersedianyaLaporanPengelola Keuangan Daerah	14	115.997.000	12 lapora	101.744.000	14	115.997.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.12.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12	49.500.000	484 m2	55.397.000	12	50.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.12.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Adanya ATK	12	26.800.000	60 jenis	12.800.000	12	27.200.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.12.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	35.000.000	7 jenis	11.900.000	12	35.500.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	2.12.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	7.000.000	5 jenis	1.875.000	12	7.250.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	2.12.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	12	8.000.000	3 jenis	6.600.000	12	8.450.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.12.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	12	7.650.000	4 jenis	8.820.000	12	7.950.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.12.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan harian pegawai	12	38.000.000	3 keg/bln	29.250.000	12	38.750.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
12	2.12.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	140	257.750.000	18 kegiat	160.440.000	145	302.879.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	2.12.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa tenaga kontrak dan Petugas keamanan	12	99.500.000	5 org/bln	106.222.000	12	108.240.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	2.12.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		0	9 jenis	8.514.000		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.12.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**338.120.000**		**371.879.000**		**321.700.000**				
1	2.12.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		24	21.620.000	5 unit	0	7	33.500.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.12.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	25.000.000	2 keg	44.410.000	1	21.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.12.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	23	210.000.000	22 unit	193.789.000	23	215.000.000	DPMPTSP Modal Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.12.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	30	13.250.000	6 jenis	12.830.000	30	15.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.12.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1	35.000.000	5 jenis	23.200.000	1	35.350.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.12.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana mebeleur	1	1.650.000	4 buah	1.400.000	1	1.850.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.12.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi kamar mandi layak difabel			25 m2	96.250.000		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Kota Layak Anak, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.12.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		8	31.600.000	10 unit	0	0	0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2.12.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**11.405.000**		**10.080.000**		**13.700.000**				
1	2.12.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam pakaian dinas	33	11.405.000	28 pegaw	10.080.000	34	13.700.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2.12.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**49.945.000**		**49.812.000**		**57.519.000**				
1	2.12.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja OPD	12	12.537.000	12 lapora	11.176.000	12	15.169.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.12.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran OPD	1	3.908.000	1 dokume	4.167.000	1	4.300.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.12.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis OPD	1	2.300.000	1 dokume	2.042.000	1	2.750.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.12.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun OPD	1	4.200.000	1 dokume	3.849.000	1	4.700.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.12.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Perubahan OPD	2	8.300.000	2 dokume	11.725.000	2	9.000.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.12.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA DPPA OPD	2	13.400.000	4 dokume	12.601.000	2	15.200.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.12.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP OPD	1	5.300.000	1 dokume	4.252.000	1	6.400.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2.12.15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**			**147.836.100**		**845.653.000**		**164.981.681**				
					687,414,000				758,016,000				
			Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	3		4		4					
1	2.12.15.1	Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama strategis	1	25.839.000	15 LOI	22.000.000	1	31.265.190	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.12.15.6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Tersedianya koordinasi dan kerjasama PM	1	17.293.100	1 kegiata	22.000.000	1	20.924.651	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	2.12.15.12	Penyusunan profil pameran investasi	Tersusunnya Profil Pameran Investasi	7	90.000.000	7 jenis	66.785.000	7	95.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	2.12.15.4	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Terselesaikannya permasalahan PM lintas sektor melalui Tim Task force	100	14.704.000	1 kegiata	6.908.000	50100	17.791.840	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.12.15.15	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Tersedianya dokumen kajian potensi sumber daya investasi, Buku Potensi dan Peluang Investasi			1 dokume	117.250.000		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	Program prioritas RPJM
6	2.12.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terealisasinya LOI			15	4.310.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	2.12.15.19	Fasilitasi Pameran Investasi	Terfasilitasinya pameran investasi			6 kali	560.300.000		0	Luar Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	74	Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	2.12.15.18	Penyelenggaraan Forum Investasi	terselenggaranya bisnis meeting dan pameran investasi			5 LOI	46.100.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**13.800.000**		**14.000.000**		**15.144.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip	12	13.800.000	12 bulan	14.000.000	12	15.144.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**			**509.052.000**		**469.475.000**		**613.373.050**				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%		100%					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%		72%					
1	4.1.17.6	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Terlaksananya kegiatan 2 sosialisasi, Karnaval, CFD	4	58.768.000	4 kegiata	67.747.000	4	71.110.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
2	4.1.17.7	Survey Pelayanan Perijinan	Terselenggaranya verifikasi data perijinan	144	354.205.000	144 surve	318.000.000	144	428.588.050	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.1.17.8	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan dengan baik	100	39.389.000	10 penga	35.000.000	100	47.661.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
4	4.1.17.10	Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan		4	48.204.000	4 kegiata	0	4	55.746.000	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
5	4.1.17.19	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan	Terlaksananya audit internal dan eksternal ISO			5 kegiata	48.728.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
6	4.1.17.3	Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur		1	8.486.000	3 kegiata	0	1	10.268.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**0**		**105.600.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		0					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		1		2					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		0		0					
1	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunnya perwal RUPM(Rencana Umum Penanaman Modal)			1 dokume	105.600.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
2	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah			0	1	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,12	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal**											
	2.12.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**			**0**		**137.077.000**		**0**				
			Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%		10%		10%					
			Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15.00%		15.00%		15.00%					
			Jumlah investor baru	168		172		190					
1	2.12.16.13	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan SPIPISE			2 kegiata	6.049.000		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Program prioritas RPJM
2	2.12.16.18	Pengelolaan Sub SIstem Pendukung PTSP Elektronik	Terkelolanya sub sistem pendukung PTSP-el dan penerbitan artikel website			5 kegiata	34.261.000		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	2.12.16.15	Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal	Kegiatan sosialisasi Penanaman Modal, Kegiatan Bintek LKPM kepada pengusaha			120 oran	32.902.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
4	2.12.16.17	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kegiatan Penanaman Modal			4 laporan	37.500.000		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Rencana
5	2.12.16.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pmdn			16 buku	8.465.000		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
6	2.12.16.14	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan penanaman modal			120 peru	17.900.000		0	DPMPTSP Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Implementasi RAD MEA
7	2.12.16.12	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik				1	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	66	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
			TOTAL		**1.799.395.100**		**2.633.469.000**		**1.971.453.731**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
URUSAN : Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**828.387.000**		**810.521.000**		**1.070.509.000**				
1	2.13.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko dan biaya pengiriman surat	12	1.200.000	12	1.100.000	12	1.389.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.13.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya jasa telephone, air, listrik, dan internet	12	59.591.000	12	60.000.000	12	77.486.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	2.13.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Biaya pembayaran pajak kendaraan dinas	21	12.000.000	18	10.879.000	21	13.384.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
4	2.13.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelola keuangan dan Aset	12	140.937.000	12	153.704.000	12	186.389.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	2.13.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor tenaga kebersihan dan tersedianya peralatan kebersihan	12	85.000.000	12	92.433.000	12	91.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.13.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	36.750.000	12	36.341.000	12	48.602.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.13.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotokopi	12	14.018.000	12	19.711.000	12	18.539.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	2.13.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan instalasi listrik yang diperlukan	12	9.000.000	12	12.295.000	12	11.100.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	2.13.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12	4.500.000	12	4.500.000	12	6.000.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.13.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas elpiji untuk minuman Pegawai	12	2.400.000	12	1.968.000	12	3.055.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.13.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12	35.091.000	12	40.280.000	12	46.408.000	disporapar	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	2.13.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	262.500.000	12	139.230.000	12	347.157.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	2.13.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	12	165.400.000	12	238.080.000	12	220.000.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.13.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**814.900.000**		**366.933.000**		**462.554.000**				
1	2.13.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	100.000.000	12	114.780.000	12	129.143.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.13.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12	201.000.000	12	208.367.000	12	288.973.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	2.13.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	6.000.000	12	19.531.000	12	4.861.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.13.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	1.900.000	12	19.255.000	12	27.773.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.13.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	12	6.000.000	12	5.000.000	12	11.804.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.13.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				1 Paket C	0		0	Disporapar Kota	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	2.13.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		2	500.000.000	2 unit Mc	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	2.13.2.3	Pembangunan gedung kantor				1 Paket P	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
9	2.13.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				3 Unit lap	0		0	Disporapar	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	2.13.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**80.419.000**		**95.400.000**		**127.062.000**				
1	2.13.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersususunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12	13.845.000	12	14.922.000	12	18.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	2.13.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusun laporan prognosis realisasi anggaran	1	3.364.000	1	4.576.000	1	4.448.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	2.13.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan realisasi APBD	10	4.909.000	10	6.362.000	10	6.492.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.13.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Terencanakannya program dan kegiatan Disporapar	1	14.284.000	1	15.493.000	1	22.808.000	Disporapar Kota	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	2.13.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan perubahan 2019 dan penetapan 2020	2	23.850.000	2	26.756.000	2	37.428.000	Disporapar Kota	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	2.13.6.9	Penyusunan LAKIP OPD	Diketahui dan evaluasinya hasil kenerja 2018	1	5.518.000	1	5.697.000	1	11.107.000	Disporapar Kota	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	2.13.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Tersedianya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos	4	4.649.000	1	6.594.000	4	14.379.000	Disporapar Kota	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
8	2.13.6.19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan OPD	Tersusunnya Renstra OPD	4	10.000.000	4	0	4	12.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2.13.15	**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**			**40.586.000**		**34.451.000**		**64.890.000**				
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	**82%**		**85%**		**88%**					
			Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional										
			a.???? Propinsi	**7 pemuda**		**7 pemuda**		**7 pemuda**					
			b.???? Nasional	**0 pemuda**		**1 pemuda**		**1 pemuda**					
1	2.13.15.2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Terdatanya jumlah organisasi pemuda	1	14.742.000	50 buku	13.659.000	1	30.535.000	Disporabudpar	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	2.13.15.5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terselenggaranya pertemuan peningkatan iman dan taqwa generasi muda		25.844.000	200 oran	20.792.000		34.355.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	50	Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,2	**Urusan Pilihan Bidang Pariwisata**											
	3.2.15	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**			**1.409.054.000**		**3.359.950.000**		**3.057.410.000**				
			Lama Kunjungan Wisatawan	**4-Feb**		**4-Feb**		**4-Feb**					
			Persentase TIC yang representatif	**100%**		**100%**		**100%**					
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	**1,138,140**		**1,139,961**		**1,141,899**					
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	**5,193**		**5,201**		**5,210**					
1	3.2.15.11	Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC)	Terbangunnya TIC			1	1.040.000.000		0	kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)	55	Kota Sejuta Bunga, Program prioritas RPJM
2	3.2.15.3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata keluar daerah dan luar negeri	1	85.140.000	2 kegiata	51.650.000	1	105.400.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
3	3.2.15.5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya pameran untuk promosi pariwisata kota Magelang	4	271.014.000	4 kegiata	455.250.000	4	416.588.000	Se indonesia	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
4	3.2.15.7	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Tersedianya database Pariwisata	500	60.000.000	150 buku	34.192.000	500	42.000.000	Lokasi Kota Mag	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
5	3.2.15.9	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Terlaksananya seleksi Duta wisata	14	252.250.000	14 orang	303.106.000	14	357.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
6	3.2.15.12	Pekan Seni Pariwisata	Terlaksananya Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	3	498.147.000	2 KEGIATAN	976.514.000	3	1.448.975.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
7	3.2.15.15	Gelar Wisata Magelang		1	222.503.000	1 kegiata	0	1	80.656.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
8	3.2.15.14	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Terlaksananya pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	1	20.000.000	1 kegiata	499.238.000	1	606.791.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**1.364.564.000**		**1.047.424.000**		**1.459.675.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	**95.00%**		**96.00%**		**97.00%**					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	**1**		**1**		**1**					
			Persentase pengangguran pemuda	**6,40%**		**6,15%**		**5,90%**					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terfasilitasinya organisasi pemuda	28	248.397.000	28 kelom	222.316.000	28	327.892.000	Disporapar Kota	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
2	2.13.16.3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Meningkatnya kepedulian pemuda pada lingkungan	300	23.390.000	300	16.339.000	300	27.761.000	Disporabudpar	Dana Alokasi Umum	44	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	2.13.16.4	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terfasilitasinya upacara sumpah pemuda dan pengiriman	1	66.527.000	1	31.962.000	1	82.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Mempertegas Skenario Kemitraan
4	2.13.16.5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba pada generasi muda tentang bahaya narkoba	200	36.095.000	200	24.326.000	200	29.421.000	Disporabudpar	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM
5	2.13.16.7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	1	11.268.000	50 orang	8.383.000	1	18.178.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Mempertegas Skenario Kemitraan
6	2.13.16.10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Terlaksananya pelatihan pramuka penggalang SMP	400	15.500.000	180 oran	12.449.000	400	19.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
7	2.13.16.11	Pelatihan PMR SMP	Terlaksananya pelatihan PMR SMP	50	15.400.000	50 orang	12.788.000	50	19.980.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
8	2.13.16.14	Pelatihan pramuka penegak SMA	Terselenggarapelatihan pramuka penegak	300	18.257.000	80 orang	15.220.000	300	21.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
9	2.13.16.18	Lomba tata upacara dan PBB (SMP)		3	61.526.000	3 keg	0	3	88.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
10	2.13.16.20	Lomba pramuka penggalang SMP		1	28.396.000	1 keg	0	1	37.800.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
11	2.13.16.21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Terlaksananya lomba paskibraka SMA/SMK	40	391.794.000	40 orang	364.931.000	40	298.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
12	2.13.16.22	Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK		1	90.326.000	1 Kegiata	0	1	111.960.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
13	2.13.16.23	Lomba pramuka penegak SMA/ SMK		1	22.283.000	1 kegiata	0	1	29.681.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
14	2.13.16.25	Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Terlaksananya Trainning of trainner TUB dan BB	50	45.562.000	75 Orang	34.884.000	50	60.471.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
15	2.13.16.26	Lomba Paskibraka SMP	Terlaksananya lomba paskibraka SMP	1	222.744.000	1 kegiata	80.038.000	1	200.168.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
16	2.13.16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	40	22.480.000	100 pem	14.407.000	40	33.063.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Mempertegas Skenario Kemitraan
17	2.13.16.6	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah	2	44.619.000	2 kegiata	50.304.000	2	52.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
18	2.13.16.27	Lomba Pramuka	terselenggaranya lomba pramuka tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs			2 kegiata	38.970.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Rencana
19	2.13.16.28	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	Terselenggaranya Lomba TUB-BB Tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA			2 kegiata	120.107.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	3,2	**Urusan Pilihan Bidang Pariwisata**											
	3.2.16	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**			**224.868.000**		**1.667.038.000**		**272.600.000**				
			Destinasi Wisata Unggulan	**4**		**5**		**6**					
			Persentase destiasi wisata yang memenuhi sapta pesona	**55,56%**		**66,67%**		**77,78%**					
1	3.2.16.2	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	2	100.000.000	1 lokasi	110.000.000	1	121.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
2	3.2.16.3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Terlaksananya one day tour dan Road show	1	53.665.000	2 kegiata	85.463.000	1	90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
3	3.2.16.6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata	1	51.203.000	3 kegiata	55.715.000	1	61.600.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
4	3.2.16.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata	Tersedianya dokumen perencanaan desa wisata	1	20.000.000	1 Dokum	37.880.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
5	3.2.16.9	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	Terlaksananya penyuluhan ,perencanaan dan studi banding			3 kegiata	77.980.000		0	kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
6	3.2.16.10	Pembangunan Menara Pandang (View Desk)				1	1.300.000.000		0	kota Magelang	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Program prioritas RPJM
	3.2.17	**Program Pengembangan Kemitraan**			**81.418.000**		**145.464.000**		**114.818.000**				
					1,004,742,000				**1,317,228,000**				
			Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	**10**		**11**		**12**					
1	3.2.17.7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Tersedianya pelaku UJP yang profesional	2	18.819.000	2 kegiata	34.388.000	2	24.189.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	3.2.17.8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terwujudnya pelaku UJP yang sadar wisata	2	42.599.000	2 kegiata	75.115.000	2	56.337.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	44	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	3.2.17.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev	1	20.000.000	4 laporan	35.961.000	1	34.292.000	Disporapar	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**187.401.000**		**87.270.000**		**0**				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	**1**		**1**		**0**					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	**0**		**1**		**2**					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	**1**		**0**		**0**					
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Raperda Kepemudaan		187.401.000	1 Raperd	87.270.000		0	DISPORABUDPAI	Dana Alokasi Umum	49	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**3.595.000.000**		**3.967.745.000**		**4.308.034.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	**6**		**6**		**7**					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	**6**		**5**		**4**					
			#NAME?	**15**		**13**		**11**					
			#NAME?	**20**		**19**		**17**					
			#NAME?	**NA**		**2**		**NA**					
			#NAME?	**20**		**NA**		**NA**					
			Jumlah klub olah raga	**183**		**183**		**183**					
			Jumlah organisasi olah raga	**35**		**35**		**36**					
1	2.13.20.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terpilihnya dan terbinanya bibit atlit sepakbola,atletik,renang,pan ahan taekwondo dan tenis lapangan	100	420.000.000	110	525.762.000	120	522.050.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
2	2.13.20.4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	225	140.000.000	235	113.686.000	245	140.800.000	Disporabudar ko	Dana Alokasi Umum	54	Akomodasi Musrenbang
3	2.13.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kompetisi tenes lapangan	33	275.000.000	32 team	755.357.000	35	333.000.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
4	2.13.20.7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terlaksananya olahraga massal	3000	65.000.000	3000	175.038.000	3000	71.879.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	2.13.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya gerak jalan cepat dan lintas alam	1335	260.000.000	1345	312.595.000	1355	318.505.000	Disporabudpar k	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
6	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	3	250.000.000	4	85.078.000	5	300.000.000	Disporabudpar k	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
7	2.13.20.18	POPDA SD	Terselenggaranya popda dan pengiriman kontingen tingkat karisidenan dan propinsi	560	270.000.000	570	313.861.000	580	310.000.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
8	2.13.20.21	Liga bola basket SMP	Terlaksananya Liga bola basket SMP/MTs	220	45.000.000	230	59.727.000	240	55.000.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
9	2.13.20.22	Liga sepak bola SMP	Terlaksananya Liga sepak bola SMP/MTs	24	160.000.000	25	47.453.000	25	193.000.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
10	2.13.20.25	POPDA SMP	Terlaksananya POPDA SMPdan pengiriman kontingen ke karesidenan dan propinsi	610	325.000.000	620	359.689.000	630	393.000.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
11	2.13.20.26	POPDA SMA/SMK	Terselenggaranya popda tingkat SMA/SMK dan pengiriman kontingen ke tingkat karisidenan dan propinsi	610	325.000.000	620	311.286.000	630	393.000.000	Disporabudpar k	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
12	2.13.20.28	Liga sepak bola SMA	Terselenggaranya liga sepak bola SMA/SMK	410	160.000.000	420	43.406.000	430	193.000.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
13	2.13.20.29	Liga bola basket SMA/ SMK	Terselenggaranya bola basket SMA/SMK	370	45.000.000	380	52.243.000	390	55.000.000	Disporabudpar k	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
14	2.13.20.35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	25	370.000.000	25	341.279.000	25	447.000.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
15	2.13.20.36	Seleksi Beladiri Pelajar	Terselenggaranya seleksi beladiri pelajar	750	270.000.000	750	291.553.000	750	327.000.000	Disporabudpar K	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
16	2.13.20.40	Penyelenggaraan Walikota Cup				1 kegiata	0		0	kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
17	2.13.20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Terselenggaranya kegiatan jalan sehat hari jadi dan HUT RI kegiatan			18 kegiat	103.815.000		0	kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
18	2.13.20.13	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga		50	60.000.000	50	0	50	71.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	61	Program prioritas RPJM
19	2.13.20.1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga		1	30.000.000	1	0	1	36.300.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
20	2.13.20.32	Pospeda	Terlaksananya Pospeda	1	50.000.000	1	46.267.000	1	60.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
21	2.13.20.8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlit yang berprestasi	50	75.000.000	55	29.650.000	60	88.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	2.13.17	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**			**49.773.000**		**0**		**59.500.000**				
			Persentase kelompok wirausaha pemuda	**75**		**75**		**75**					
1	2.13.17.1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda		1	49.773.000	1 keg	0	1	59.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
			TOTAL		**8.676.370.000**		**11.582.196.000**		**10.997.052.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN : Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**662.568.000**		**1.104.082.000**		**800.259.000**				
1	2.17.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran		2.650.000	2 jenis	1.953.000		2.850.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.17.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa langganan telpon listrik dan air	1	214.000.000	12 bulan	399.000.000	1	258.940.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.17.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya js perpanjang STNK	1	7.656.000	12 kenda	8.475.000	1	9.160.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.17.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan	1	77.987.000	12 bulan	139.757.000	1	94.365.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.17.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan	1	97.909.000	31 jenis	174.800.000	1	118.469.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	2.17.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	1	15.000.000	41 jenis	11.668.000	1	17.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.17.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	1	8.500.000	14 jenis	12.453.000	1	10.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	2.17.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan lainya	1	45.210.000	12 jenis	19.665.000	1	54.704.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	2.17.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik	1	1.200.000	2 jenis	6.074.000	1	1.400.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	2.17.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan dan minum	1	41.211.000	6 jenis	44.883.000	1	49.865.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	2.17.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1	115.843.000	35 kegiat	116.874.000	1	140.170.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
12	2.17.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa penjaga malam dan pembuat minum	1	35.402.000	8 orang	168.480.000	1	42.836.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	2.17.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**2.989.732.000**		**535.738.000**		**1.417.103.000**				
1	2.17.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	luas gedung yang terpelihara	1	89.000.000	2634 m2	272.355.000	1	105.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	2.17.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	1	164.219.000	12 kenda	165.000.000	1	198.704.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.17.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1	63.140.000	9 jenis	40.836.000	1	76.399.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	2.17.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1	77.000.000	10 jenis	57.547.000	1	92.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	2.17.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				8 unit	0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
6	2.17.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi				1 paket	0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	2.17.2.10	Pengadaan mebeleur		25	437.536.000	34 buah	0	3	6.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
8	2.17.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		30	1.388.800.000	22 buah	0	25	939.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
9	2.17.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		50	770.037.000	18 jenis	0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	2.17.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**43.631.000**		**47.681.000**		**52.793.000**				
1	2.17.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	dokumen laporan keuangan	1	10.060.000	4 laporar	10.994.000	1	12.173.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	2.17.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	dokumen renja	1	11.600.000	2 dokum	13.418.000	1	14.036.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	2.17.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	dokumen RKA	1	11.911.000	2 dokum	18.471.000	1	14.412.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
4	2.17.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	dokumen LKjIP	1	10.060.000	1 dokum	4.798.000	1	12.172.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Ranstra OPD	100	0	1 dok		100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**8.000.000**		**0**		**9.680.000**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan ke		60 kali siar/ 5 agama dan ke		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperc		12 kali/ 5 agama dan keperc		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website		1	8.000.000	1 tahun	0	1	9.680.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**1.175.691.000**		**1.445.967.000**		**1.401.242.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.54	Penyusunan buku kearifan lokal	Tersedianya buku tentang kearifan lokal			90 buku	31.519.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
2	2.17.15.2	Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah peserta	300	72.744.000	300 oran	72.497.000	300	88.019.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
3	2.17.15.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	buku perpustakaan yang sesuai klasifikasi	300	134.450.000	1500 eks	200.060.000	4000	162.684.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
4	2.17.15.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pelayanan perpustakaan sekolah dan kelurahan	20	17.000.000	20 perpu	30.000.000	25	21.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
5	2.17.15.17	Pameran dan bursa buku		10000	250.000.000	10000 or	0	10000	290.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
6	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	jumlah buku terolah	3500	37.973.000	3000 eks	35.700.000	4500	45.947.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
7	2.17.15.30	Orientasi perpustakaan	terselenggaranya orientasi perpustakaan bagi pengelola perpustakaan se Kota Magelang	120	56.500.000	120 oran	72.323.000	120	67.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
8	2.17.15.31	Lomba perpustakaan	jumlah peserta	143	53.000.000	4 kegiata	137.552.000	143	63.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
9	2.17.15.32	Layanan perpustakaan keliling	laporan pelaksanaan kegiatan keliling	25000	45.526.000	4 laporan	71.008.000	35000	55.086.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
10	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	60000	226.010.000	4 laporan	214.000.000	62000	273.472.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
11	2.17.15.37	Promosi minat baca	jumlah media promosi	5000	70.689.000	4 kegiata	108.000.000	7000	85.534.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
12	2.17.15.39	Lomba bercerita	meningkatnya kemampuan siswa bercerita	80	44.000.000	80 siswa	58.279.000	80	53.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak
13	2.17.15.42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi pelajar dan masyarakat	150	31.649.000	14 kegiat	62.731.000	150	37.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
14	2.17.15.44	Lomba literasi	jumlah peserta	60	28.500.000	60 siswa	30.000.000	60	33.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
15	2.17.15.47	Penyusunan Buletin	penyebarluasan informasi	2	7.650.000	2 buletin	33.259.000	2	11.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
16	2.17.15.21	Lomba sinopsis	terselenggaranya lomba sinopsis bagi pelajar smp se Kota Magelang	80	35.000.000	80 siswa	36.234.000	80	42.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
17	2.17.15.46	Workshop Bercerita		90	30.500.000	90 orang	0	95	32.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
18	2.17.15.35	Seminar Lingkar Pena	Terselenggaranya seminar lingkar pena bagi pelajar , mahasiswa dan umum	150	32.500.000	150 oran	30.404.000	150	39.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
19	2.17.15.12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	peningkatan kualitas layanan	1	2.000.000	20 jenis	161.809.000	1	2.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
20	2.17.15.23	Pemilihan duta baca	terpilihnya duta baca		0	1 kegiata	28.887.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
21	2.17.15.51	Penyelenggaraan Workshop Penulisan Artikel				65 orang	0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
22	2.17.15.57	Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik	Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan			50 orang	31.705.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	Kota Layak Anak
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**451.510.000**		**720.225.000**		**846.146.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	tertatanya arsip depo sesuai aturan yang berlaku	150	202.109.000	150 dos	176.549.000	150	244.552.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
2	2.18.16.5	Akuisisi Arsip	jumlah arsip yang tertata	150	213.331.000	150 dos	189.836.000	150	258.136.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
3	2.18.16.8	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi	78	20.500.000	29 OPD	39.913.000	78	22.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
4	2.18.16.3	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	tersedianya salinan arsip sebagai penambahan kasanah arsip statis	750	15.570.000	1000 CD	70.769.000	750	188.408.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
5	2.18.16.7	Pemusnahan Arsip	terjaminya kemanan fisik dan informasi arsip		0	20 dos	10.419.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
6	2.18.16.11	Preservasi Arsip	terwujudnya tertib administrasi kearsipan			500 muka	86.041.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
7	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	terwujudnya tertib administrasi kearsipan		0	10 OPD	72.900.000	1	132.550.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
8	2.18.16.12	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi kearsipan			3 Jadwal	32.948.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
9	2.18.16.14	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi kearsipan			1 Perwal	22.300.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
10	2.18.16.17	Pengelolaan Arsip Statis	terkelolanya arsip statis			150 dos	18.550.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
	2.18.18	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**			**191.250.000**		**203.897.000**		**231.415.000**				
			PERPUS		231,000,000				229,500,000				
			Cakupan pelayanan acces arsip	67%		78%		80%					
			Tingkat Komptensi SDM Pengelola Kearsipan	39%		45%		23%					
1	2.18.18.8	Pendokumentasian Kota Magelang	terwujudnya dokumentasi Kota Magelang	100	141.500.000	1 judul fi	77.937.000	100	171.215.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	2.18.18.6	Orientasi Otomasi Kearsipan	meningkatnya kemampuan SDM pengelola kearsipan di bidang arsip	74	49.750.000	74 unit p	34.942.000	76	60.200.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
3	2.18.18.2	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	meningkatnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap arsip			9 set dio	91.018.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	Program prioritas RPJM
	2.18.15	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**			**50.000.000**		**99.199.000**		**50.000.000**				
			DKPT		5,000,000				5,000,000				
			PERPUS		50,000,000				50,000,000				
			Presentase implementasi e-arsip	52%		69%		86%					
			Persentase ketersediaan sarpras arsip	30%		40%		50%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	2.18.15.8	Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)	tersedianya data base informasi kearsipan	1	50.000.000	1 kegiata	44.906.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.18.15.7	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	terpeliharanya peralatan jaringan informasi		0	1 kegiata	54.293.000	500	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	2.18.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**			**114.154.000**		**109.144.000**		**141.188.000**				
			PERPUS		18,500,000				25,000,000				
			Persentase sarpras arsip yang terpelihara	0,5		0,79		0,83					
1	2.18.17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	16	6.400.000	10 unit	5.609.000	27	10.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	2.18.17.2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	750	26.230.000	750 dos	33.050.000	750	31.740.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
3	2.18.17.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	terpantau dan tertatanya arsip di SKPD	78	81.524.000	74 unit p	70.485.000	78	98.648.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
			TOTAL		**5.686.536.000**		**4.265.933.000**		**4.949.826.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Pertanian dan Pangan
URUSAN : Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	3,3	**Urusan Pilihan Bidang Pertanian**											
	3.3.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**922.121.000**		**827.627.000**		**1.117.204.000**				
1	3.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko	865	3.146.000	865	2.500.000	870	3.808.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
2	3.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, telpon dan internet	12	171.000.000	12	171.000.000	12	219.615.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
3	3.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional	47	13.520.000	47	16.086.000	49	19.796.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
4	3.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12	120.000.000	12	124.950.000	12	158.198.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
5	3.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	24	54.182.000	24	58.573.000	25	67.998.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
6	3.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	39	35.000.000	39	33.098.000	39	42.350.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
7	3.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13	20.000.000	13	17.877.000	15	26.213.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
8	3.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8	12.500.000	8	12.499.000	8	15.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
9	3.3.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4	3.585.000	4	3.153.000	4	4.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
10	3.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan majalah	12	4.620.000	12	4.620.000	12	6.589.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
11	3.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM RPH dan tabung gas kantor	1460	21.728.000	1460	22.106.000	1460	44.678.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
12	3.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan Dinas	12	37.460.000	12	43.657.000	12	48.959.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
13	3.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	84	294.050.000	84	173.006.000	84	325.000.000	Dinas Pertanian Peternkan dan Perikanan Kota Magel	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
14	3.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/honorer	12	131.330.000	12	144.502.000	12	135.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
	3.3.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**564.953.000**		**373.631.000**		**662.469.000**				
1	3.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala gedung kantor	2	43.108.000	2	31.145.000	2	55.000.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
2	3.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47	314.182.000	47	313.991.000	49	350.000.000	Dinas pertanian peternakan dan perikanan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
3	3.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33	15.000.000	33	20.995.000	33	18.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
4	3.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12	4.800.000	12	5.600.000	12	5.200.000	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
5	3.3.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terpasangnya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	1	10.500.000	1	1.900.000	1	10.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	3.3.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		0	0	1	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	3.3.2.10	Pengadaan mebeleur		0	11.400.000	6	0	6	15.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
8	3.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		16	92.600.000	16	0	16	120.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
9	3.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1	73.363.000	1	0	1	88.769.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	96	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	3.3.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**12.506.000**		**5.738.000**		**12.506.000**				
1	3.3.5.4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8	12.506.000	8	5.738.000	8	12.506.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	3.3.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**90.905.000**		**82.335.000**		**105.416.000**				
1	3.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	9.820.000	12	9.820.000	12	9.820.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	3.3.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2	6.381.000	2	4.580.000	2	6.381.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	3.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4	5.627.000	4	6.394.000	4	5.627.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	3.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	2	9.438.000	2	7.204.000	2	11.421.000	Dinas pertanian dan pangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	3.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya renja	2	8.426.000	2	8.928.000	2	10.196.000	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	3.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA	30	46.101.000	30	41.702.000	30	55.784.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	3.3.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD			0		0		0	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	
8	3.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)	10	5.112.000	10	3.707.000	10	6.187.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
9		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2,3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan**					0						
	2.3.15	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan**			**277.598.000**		**289.698.000**		**324.000.000**				
			Jumlah regulasi ketahanan pangan	2		2	0	2					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%		95%	0	95%					
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,3		87,6	0	88,9					
			Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%		80%	0	80%					
1	2.3.15.1	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya pembinaan, pemetaan,kerawanan pangan	1	24.126.000	20 balita	17.045.000	1	28.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Kota Layak Anak, SDGs
2	2.3.15.3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya data konsumsi pangan masyarakat	340	26.749.000	340 petu	33.538.000	340	31.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
3	2.3.15.4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Tersedianya data neraca bahan makanan	1	8.228.000	1 Unit	7.888.000	1	11.000.000	kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	SDGs
4	2.3.15.9	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan pekarangan	20	17.402.000	50 orang	21.991.000	20	21.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	94	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
5	2.3.15.16	Pengembangan diverisifikasi tanaman	Terlaksananya pembinaan budidaya aneka ragam sayuran/tanaman pangan alternatif (lokal)	1	32.382.000	2 gabung	34.639.000	1	38.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	SDGs
6	2.3.15.21	Pengembangan sistem informasi pasar	Pemantauan pasokan dan harga pangan strategis	3 pasar	16.661.000	3 pasar 1	31.093.000	3 pasar 1	20.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	SDGs
7	2.3.15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan uji laboratorium mutu dan keamanan pangan	2	38.453.000	100 anak	40.520.000	2	46.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
8	2.3.15.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya pengolahan pangan lokal dan festival pangan lokal, lomba cipta menu	4	102.883.000	40 orang	79.900.000	4	115.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
9	2.3.15.13	Pengembangan cadangan pangan daerah				1	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
10	2.3.15.24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Tersedianya laporan DKP tingkat pusat dan kota			2 laporan	23.084.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
11	2.3.15.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1	10.714.000	8 TTI	0	1	14.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
	3,3	**Urusan Pilihan Bidang Pertanian**											
	3.3.15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**			**204.099.000**		**481.028.000**		**379.416.000**				
			Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	5		6	0	7					
1	3.3.15.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		90	204.099.000	90 peserl	130.229.000	90	246.969.000	Kota Magelang	DBHCHT	101	Memperkuat Implementasi MKSB, Akomodasi Musrenbang
2	3.3.15.6	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Terlaksananya pelatihan tanaman hias dan anggrek	0	0	6 kelomp	20.025.000	8	132.447.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
3	3.3.15.8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	Terlaksananya pendampingan kelompok budidaya tanaman hortikultura			8000 bibi	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	104	Memperkuat Implementasi MKSB
4	3.3.15.7	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura				8000 bibi	330.774.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	104	Program prioritas RPJM
	3,4	**Urusan Pilihan Bidang Kehutanan**					0						
	3.4.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Luas RTH (kebon bibit) yang dipelihara		0		0		0				
1	3.4.15.6	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan			0		0		0	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	90	
	4,3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan					0						
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**39.574.000**		**0**		**47.886.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%	0	95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%	0	100%					
1	4.3.15.20	Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan		1	39.574.000	1	0	1	47.886.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**					0						
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**34.611.000**		**32.310.000**		**46.053.000**				
					839,992,000		0		917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln	0	12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000		0		157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000		0		34,590,000				
			BKD		15,000,000		0		15,000,000				
			DPP		25,830,200		0		31,254,542				
			LITBANG		50,000,000		0		70,000,000				
			PERPUS		247,075,000		0		270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%	0	86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%	0	82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%	0	67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pengelolaan arsip aktif dan non aktif	2	34.611.000	2	32.310.000	2	46.053.000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	3,3	**Urusan Pilihan Bidang Pertanian**					0						
	3.3.16	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**			**601.330.000**		**379.391.000**		**856.290.000**				
			Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	3%		6%	0	9%					
			Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	11		13	0						
1	3.3.16.2	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Jumlah pelaksanaan pameran agriflori expo	6	105.330.000	1 pamera	203.379.000	12	131.330.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	3.3.16.7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	jumlah keikut sertaan pameran tingkat regional dan nasional	3	496.000.000	3	133.885.000	3	724.960.000	Disperpa	Dana Alokasi Umum	99	Program prioritas RPJM
3	3.3.16.14	Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	terlaksananya pelatihan pemasaran produksi			90 petan	42.127.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Memperkuat Implementasi MKSB
	3,4	**Urusan Pilihan Bidang Kehutanan**					0						
	3.4.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan			0		0		0				
1	3.4.16.4	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata			0		0		0	Kawasan Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	85	
2	3.4.16.5	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan			0		0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	
	3,3	**Urusan Pilihan Bidang Pertanian**					0						
	3.3.17	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**			**161.585.000**		**171.752.000**		**180.942.000**				
			DISPETERIKAN	1	188,500,000	1	0	1	228,250,000				
			Luas lahan pertanian organik	0,98		1,03	0	1,08					
			Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	51.70%		58.50%	0	65.30%					
1	3.3.17.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah pelatihan penerapan teknologi tepat guna	7	62.815.000	12 kali	24.990.000	7	65.815.000	Kota Magelang	DBHCHT	99	Program prioritas RPJM
2	3.3.17.6	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Luas tanam sawah organik	1,5	45.117.000	1 hektar	16.997.000	2,5	50.117.000	Kota Magelang	DBHCHT	94	Program prioritas RPJM
3	3.3.17.8	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	Jumlah bibit tanaman siap aklimatisasi (bibit)			10000 an	87.843.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi MKSB
4	3.3.17.9	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah pelaku yang dilatih pasca panen lidah buaya dan jamur			120 masy	22.939.000		0	Kota Magelang	DBHCHT	94	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
5	3.3.17.5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah masyarakat terlatih kultur jaringan	40	53.653.000	40 masya	18.983.000	40	65.010.000	Kota Magelang	DBHCHT	94	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
	3.3.18	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**			**462.101.000**		**745.143.000**		**345.901.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Padi	3180		3160	0	3140					
			Jagung	11		11	0	11					
			Ubi kayu	13,5		13,5	0	13,5					
1	3.3.18.26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	data verifikasi pupuk subsidi			12 data v	19.636.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
2	3.3.18.1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta pelatihan menuju organik	25	48.214.000	25	42.372.000	25	26.214.000	Kota Magelang	DBHCHT	99	Program prioritas RPJM
3	3.3.18.23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura		7000	297.279.000	8000	0	9000	202.279.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	
4	3.3.18.25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah pemeliharaan JITUT	1	116.608.000	100 m2	232.679.000	1	117.408.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Akomodasi Musrenbang
5	3.3.18.27	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	luas lahan yang diintensifkan			4 Ha	37.163.000		0	Kota Magelang	DBHCHT	99	Rencana
6	3.3.18.29	Pengembangan Urban Farming	Peserta terlatih yang mengembangkan urban farming			50 peser	361.448.000		0	Kota Magelang	DBHCHT	99	Akomodasi Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD
7	3.3.18.28	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	Kelompok tani dan kios pupuk			18 kelom	22.261.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
8	3.3.18.30	Peningkatan kemampuan lembaga petani	meningkatnya kemampuan lembaga petani			17 kelom	29.584.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	3.3.19	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**			**16.500.000**		**85.970.000**		**144.965.000**				
			Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	11,76%		23,53%	0	35,29%					
			Rasio petani terlatih	85%		90%	0	90%					
1	3.3.19.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh pertanian swadaya terlatih	30	16.500.000	40 petan	16.050.000	30	19.965.000	Kota Magelang	DBHCHT	94	Rencana
2	3.3.19.3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan	0	0	5	69.920.000	7	125.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
	3,1	**Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan**					0						
	3.1.20	**Program pengembangan budidaya perikanan**			**181.559.000**		**392.336.000**		**230.318.000**				
			Produksi hasil perikanan:				0						

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Produksi Ikan	162,41		164,2	0	166,01					
			Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	50%		50%	0	100%					
			Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	40%		50%	0	60%					
1	3.1.20.1	Pengembangan bibit ikan unggul	Terlatihnya petani ikan	162,41	17.558.000	25 orang	25.733.000	166,01	22.261.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Akomodasi Musrenbang
2	3.1.20.2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Peserta pelatihan pembudidaya ikan yg terlatih	40	18.458.000	25 orang	70.355.000	60	23.415.000	Kota Magelang	DBHCHT	95	Program prioritas RPJM
3	3.1.20.3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya lomba kelompok pelaku utama perikanan	40	23.838.000	125 pelal	46.794.000	60	30.232.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
4	3.1.20.25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Terfasilitasinya operasional balai benih ikan	50	94.576.000	2 BBI	176.843.000	100	120.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Program prioritas RPJM
5	3.1.20.26	Pelatihan Ikan Hias	Terlatihnya petani pembudidaya ikan hias pemula	30	27.129.000	15 peserl	31.511.000	50	34.410.000	Kota Magelang	DBHCHT	99	Akomodasi Musrenbang, Program prioritas RPJM
6	3.1.20.29	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	Terlatihnya petani perikanan organik			50 peserl	41.100.000		0	Kota Magelang	DBHCHT	94	Program prioritas RPJM
	3,3	**Urusan Pilihan Bidang Pertanian**					0						
	3.3.20	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**			**316.704.800**		**357.782.000**		**440.232.800**				
			Persentase hewan sehat	83		85	0	85					
1	3.3.20.1	Pendataan masalah peternakan	Data peternakan dan penyakit hewan serta ternak	1	16.139.000	1 dokum	16.506.000	1	25.639.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
2	3.3.20.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan yang ditangani	1400	56.710.000	1450 terr	72.767.000	1475	66.215.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Program prioritas RPJM
3	3.3.20.4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah lalu lintas hewan yang terperiksa	360	44.979.000	380	60.000.000	400	54.645.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Program prioritas RPJM
4	3.3.20.6	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong	4350	34.132.000	4355 terr	38.509.000	4360	43.483.800	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
5	3.3.20.7	Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan		2	23.994.800	6 jenis	0	2	90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
6	3.3.20.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)		2	20.000.000	2 jenis ba	0	2	30.000.000	Jl.Pahlawan No 8 Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
7	3.3.20.10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	jumlah hewan terperiksa	300	120.750.000	600 hewa	170.000.000	325	130.250.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
	3.3.21	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**			**51.200.000**		**11.483.000**		**65.000.000**				
			Daging Ruminansia	1.233.486		1.289.554	0	1.345.622					
			Daging Unggas	5.366.516		5.610.449	0	5.635.382					
			Telur	440,000		460,000	0	480,000					
			Susu	197,600		201,400	0	205,200					
1	3.3.21.2	Pembibitan dan perawatan ternak		14	13.000.000	11 burun	0	20	17.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
2	3.3.21.8	Pengembangan agribisnis pertenakan		3	26.400.000	15 orang	0	3	33.000.000	Kota Magelang	DBHCHT	89	Program prioritas RPJM
3	3.3.21.20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Jumlah ternak yang diinseminasi	60	11.800.000	65 ternak	11.483.000	70	15.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Rencana
	3.3.22	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**			**155.616.000**		**261.345.000**		**171.599.000**				
			Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	2,42		3,03	0	3,63					
1	3.3.22.7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Pameran/bursa peternakan	3	50.000.000	4 event	169.996.000	3	53.195.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	74	Rencana
2	3.3.22.8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Jumlah usaha peternakan	4	23.000.000	200 oran	29.984.000	4	26.199.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
3	3.3.22.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah laporan informasi pasar	16	33.325.000	16 dokun	35.884.000	16	36.524.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
4	3.3.22.11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat		3	24.291.000	3	0	3	27.486.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
5	3.3.22.12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	Pembinaan pelaku usaha pasca panen peternakan	3	10.000.000	3 pelaku	10.481.000	3	13.000.000	kota magelang	DBHCHT	94	Program prioritas RPJM
6	3.3.22.14	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	jumlah pelaku usaha bersertifikat NKV	2,42	15.000.000	2 pelaku	15.000.000	3,63	15.195.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
	3,1	**Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan**					0						
	3.1.23	**Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**			**1.114.797.000**		**252.848.000**		**1.382.125.000**				
					1,798,411,000		0		2,252,443,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP	0		0	0	100%					
			Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3		4	0	5					
1	3.1.23.12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3	481.848.000	40 orang	14.500.000	5	608.502.000	Kota Magelang	DBHCHT	89	Rencana
2	3.1.23.13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Terselenggaranya operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	1	76.000.000	1 Unit	45.572.000	1	90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
3	3.1.23.14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3	433.851.000	100 peda	50.346.000	5	547.881.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
4	3.1.23.15	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	Terselenggaranya kegiatan gemar makan ikan	19,46	123.098.000	4 event	142.430.000	20	135.742.000	kota magelang	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
	3,3	**Urusan Pilihan Bidang Pertanian**					0						
	3.3.23	**Program peningkatan penerapan teknologi peternakan**			**112.601.000**		**68.709.000**		**126.826.000**				
			DISPETERIKAN		64,350,000		0		77,863,000				
			DISPETERIKAN		112,259,000		0		126,826,000				
			Jumlah pelaku usaha peternakan organik:				0						
			Peternak ayam buras/ ayam broiler	2		3	0	4					
			Peternak kelinci	2		3	0	4					
			Peternak kambing/domba	2		3	0	4					
			Rasio peternak terlatih	85%		85%	0	85%					
1	3.3.23.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna		1	45.375.000	1	0	1	53.426.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
2	3.3.23.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Terlatihnya pelaku usaha paska panen peternakan	3	46.776.000	40 pelak	26.500.000	3	50.294.000	Kota Magelang	DBHCHT	89	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	3.3.23.5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kegiatan pelatihan	3	20.450.000	3	26.348.000	3	23.106.000	Kota Magelang	DBHCHT	99	Program prioritas RPJM
4	3.3.23.9	Pengembangan agribisnis peternakan	Terlatihnya pelaku agribisnis peternakan			15 pelaku	15.861.000		0	Kota Magelang	DBHCHT	45	Rencana
	3.3.24	**Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner**			**6.382.478.000**		**608.947.000**		**562.735.000**				
					7,596,450,000		0		6,983,000,000				
			Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	2,42%		3,03%	0	3,63%					
1	3.3.24.1	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	Jumlah pengujian laboratorium kesmavet	12	32.319.000	12 bulan	35.550.000	12	39.105.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Rencana
2	3.3.24.2	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	Sosialisasi pangan asuh	1	29.302.000	50 orang	23.300.000	1	33.302.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
3	3.3.24.3	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	Jumlah operasi penertiban penjualan daging dan hasil ternak dari luar daerah	4	45.945.000	4 kali	50.066.000	4	55.593.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Program prioritas RPJM
4	3.3.24.5	Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong untuk menghasilkan daging yang asuh	4350	239.451.000	4355 ter	263.396.000	4360	289.735.000	Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
5	3.3.24.7	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	Pembinaan pelaku usaha di RPH	4	35.461.000	40 orang	36.635.000	4	45.000.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
6	3.3.24.4	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)	Tersusunnya DED RPH	1	3.000.000.000	1 dokum	200.000.000	0	0	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Program prioritas RPJM
7	3.3.24.6	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)		1	3.000.000.000	4 jenis	0	1	100.000.000	RPH Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	99	Program prioritas RPJM
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**					0						
	2.5.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**			**820.000.000**		**1.006.380.000**		**1.000.000.000**				
			Indeks Kualitas Air,	76%		76%	0	77%					
			Indeks Kualitas Udara	78%		78%	0	78%					
			Indeks Tutupan Hutan	49%		49%	0	50%					
			Jumlah SDA yang terkonservasi	57,7		67,7	0	77,84					
			Jenis flora	10 Jenis		12 Jenis	0	15 jenis					
			Jenis fauna	3 Jenis		3 Jenis	0	3 Jenis					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	2.5.17.4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Jenis flora dan fauna yang terkonservasi, tersedianya sarpras pendukung wisata, dan operasional konservasi	13	440.000.000	15 jenis f	718.072.000	18	530.000.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	96	Program prioritas RPJM
2	2.5.17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Operasional UPTD Gunung Tidar	90000	130.000.000	12 bulan	256.849.000	110000	155.000.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	49	Program prioritas RPJM
3	2.5.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah orang yang dibina dalam pelestarian gunung tidar dan sadar wisata	250	30.000.000	250 oran	31.459.000	300	40.000.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
4	2.5.17.7	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air		200	220.000.000	400 m	0	600	275.000.000	Gunung Tidar	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
			TOTAL		**12.522.838.800**		**6.434.453.000**		**8.201.883.800**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN : Perindustrian, Koperasi dan UMK,Perdagangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	3,7	**Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**											
	3.7.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.751.270.000**		**1.737.440.000**		**2.051.396.000**				
1	3.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12	5.282.000	12	4.800.000	12	6.391.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	3.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening komunikasi, air, listrik dan layanan	4	453.500.000	4	557.580.000	4	534.540.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	3.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan	70	46.890.000	73	36.770.000	73	55.832.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	3.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12	239.536.000	12	247.851.000	12	281.539.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	3.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	68.313.000	12	91.000.000	12	82.209.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	3.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	37	46.625.000	37	32.847.000	37	55.722.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	3.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blanko cetakan, penggandaan dan penjilidan	11	73.889.000	11	24.328.000	11	86.187.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	3.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	24.795.000	11	23.180.000	11	29.288.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
9	3.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan bahan bacaan	12	14.624.000	12	13.800.000	12	17.118.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	3.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan tabung gas dan tabung pemadam kebakaran	12	15.932.000	12	16.835.000	12	19.228.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	3.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan jasa pembuat minum	12	99.130.000	12	89.858.000	12	117.870.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	3.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya lintas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	300.466.000	12	188.753.000	12	363.365.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
13	3.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penyediaan tenaga honorer/tidak tetap dan jasa penjaga malam	12	126.658.000	12	190.638.000	12	151.607.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		ExBAU
14	3.7.1.20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	PBB Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	2	210.630.000	2	200.600.000	2	220.000.000	Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum		ExBAU
15	3.7.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	12	25.000.000	12	18.600.000	12	30.500.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	3.7.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**1.398.736.000**		**678.823.000**		**1.498.987.000**				
1	3.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan bahan bangunan dan jasa pemeliharaan gedung	12	151.626.000	12	101.000.000	12	183.068.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	3.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	621.065.000	12	538.000.000	12	744.590.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	3.7.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10 jenis perlengkapan yang dipelihara	12	18.793.000	12	10.872.000	12	22.470.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	3.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24 peralatan yang terawat	12	27.702.000	12	25.451.000	12	33.250.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	3.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	30 buah mebelair yang terpelihara	12	4.700.000	12	3.500.000	12	5.759.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	3.7.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Jaringan instalasi listrik	0	0	2	0	1	15.000.000	Disperindag dan UPT	Dana Alokasi Umum		SDGs
7	3.7.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair	5	100.000.000	3	0	3	50.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	3.7.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3	80.000.000	3	0	3	50.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	3.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	3	55.000.000	3	0	3	55.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	3.7.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	2	289.850.000	2	0	2	289.850.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	3.7.2.33	Pengadaan Papan Informasi	Jumlah papan informasi	50	50.000.000	4	0	50	50.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	3.7.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**151.363.000**		**185.033.000**		**187.611.000**				
1	3.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan triwulanan, RF, LKPJ, LPPD	18	22.000.000	18	18.883.000	18	26.400.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		SDGs
2	3.7.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan dan prognosis	2	17.000.000	2	18.500.000	2	20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	3.7.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan dan prognosis	2	11.500.000	2	18.500.000	2	20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		SDGs

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
4	3.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah rencana kerja SKPD	2	18.502.000	2	5.358.000	2	22.279.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		SDGs
5	3.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2	43.269.000	2	24.000.000	2	52.169.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		SDGs
6	3.7.6.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Jumlah rekomendasi dan laporan monev	4	30.592.000	4	75.000.000	4	36.263.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs
7	3.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	1	8.500.000	1	9.792.000	1	10.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		SDGs
8		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2,11	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**											
	2.11.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**			**448.128.000**		**219.222.000**		**494.311.000**				
			DISKOPERINDAG		301,739,600				365,105,186				
			Persentase peningkatan kualits pelaku UKM	4%		5%		6%					
			Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%		10%		10%					
1	2.11.15.8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah sertfikat halal	2	80.000.000	30 sertifikat	109.734.000	2	90.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	2.11.15.18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	Jumlah KUM yang dibina	155	278.128.000	150 KUM	65.000.000	155	283.311.000	Kota Magelang	DBHCHT		Rencana
3	2.11.15.23	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	Jumlah KUM yang dibina	300	50.000.000	300	44.488.000	300	67.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	2.11.15.21	Sarasehan Forum UMKM	Jumlah peserta sarasehan	300	40.000.000	100	0	300	54.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3,6	**Urusan Pilihan Bidang Perdagangan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	3.6.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**			**325.068.000**		**2.232.173.000**		**355.533.000**				
				-	5,170,500,000	-		-	5,528,680,000				
			Jumlah alat UTTP yang ditera	2,800		2,900		3,000					
			Data & informasi cukai palsu/ilegal	NA		NA		NA					
1	3.6.15.4	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terlaksananya tera ulang,pengawasan	1	284.334.000	2800 alat UTTP	258.229.000	1	305.033.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	3.6.15.14	Pembinaan dan Monitoring Barang Legal	Jumlah laporan			6 laporan	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	3.6.15.15	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	Pendampingan			1 pendampingan	347.242.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	3.6.15.22	Pembinaan pedagang informal	Pedagang informal yang dibina			250 pedagang	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
5	3.6.15.17	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	Jumlah informasi harga kebutuhan pokok masyarakat			17 komoditas kebutuhan pokok masyarakat	40.423.000		0	Pasar-pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
6	3.6.15.16	Operasi harga pasar	Jumlah operasi pasar tradisional			4 kali operasi pasar	0		0	Pasar-pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	3.6.15.6	Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras	Jumlah pembinaan pedagang/penjual miras	12	40.734.000	12 kali	0	12	50.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	3.6.15.19	Monitoring dan eavaluasi kemetrologian	Jumlah Laporan Monev			3 laporan	13.009.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	3.6.15.20	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	Jumlah UTTP di tempat pakai			2700 buah	47.285.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	3.6.15.21	Pendataan alat UTTP	update data UTTP			4 kali pendataan	13.881.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	3.6.15.11	Sosialisasi Kemetrologian	Peserta tersosialisasi			80 peserta	8.312.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
12	3.6.15.3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terawasinya peredaran barang dan jasa			60 lokasi	53.792.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		SDGs, Implementasi RAD MEA
13	3.6.15.30	Pengadaan Kendaraan Kemetrologian	Jumlah kendaraan R4 dan kendaraan R2			1 unit kendaraan R4, 2 unit kendaraan R2	700.000.000		0	Disperindag	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
14	3.6.15.29	Pengadaan Peralatan Standar Kemetrologian	Timbangan elektronik			3 unit	750.000.000		0	Disperindag	Dana Alokasi Khusus (D A K)		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	3,7	**Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**											
	3.7.15	**Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**			**72.717.000**		**40.420.000**		**83.919.000**				
			Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	4,15%		4,20%		4,25%					
1	3.7.15.4	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah peserta sosialisasi bahan tambahan makanan	50	8.610.000	75	11.919.000	50	9.492.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
2	3.7.15.5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	industri kecil yang menerapkan sistem manajemen mutu	20	29.307.000	20 industri kecil	28.501.000	20	32.319.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	3.7.15.8	Bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual	IKM yang terfasilitasi pendaftaran merk	20	34.800.000	20 pelaku usaha industri	0	20	42.108.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,11	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2.11.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**			**494.428.000**		**131.797.000**		**504.127.000**				
			Jumlah wirausaha baru	100 UMKM		100 UMKM		100 UMKM					
1	2.11.16.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	3	14.510.000	3 lap	15.804.000	3	16.057.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.11.16.18	Penilaian Koperasi Berprestasi	Koperasi yang dinilai	50	10.704.000	50 koperasi	31.511.000	50	12.065.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	2.11.16.22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	Jumlah peserta	80	69.214.000	80 peserta	44.740.000	80	76.005.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	2.11.16.3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	terjalinnya kerjasama dengan toko modern (MoU)	2	400.000.000	30 kerjasama	39.742.000	2	400.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,7	**Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**											
	3.7.16	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**			**329.222.000**		**782.312.000**		**363.035.000**				
				-	799,126,000				973,054,000				
			Peningkatan daya saing IKM Formal	3,15%?		3.20%		3.25%					
1	3.7.16.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah operasionalisasi Magelang Craft Center	1	42.522.000	1	65.085.000	1	46.725.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	3.7.16.8	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	IKM yang dibina	85	94.400.000	70	76.691.000	85	104.800.000	Kota Magelang	DBHCHT		Akomodasi Musrenbang
3	3.7.16.12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	Jumlah promosi dan sarasehan	7	175.000.000	3 pameran	400.000.000	7	192.360.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
4	3.7.16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah industri yang dibina	20	17.300.000	20	73.470.000	20	19.150.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
5	3.7.16.4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah IKM Formal			20	10.862.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Akomodasi Musrenbang
6	3.7.16.6	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Meningkatnya kerjasama/kemitraan pelaku usaha			60	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
7	3.7.16.14	Pendataan industri kecil dan menengah	buku direktori IKM			25 buku	96.999.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	3.7.16.15	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	terpantaunya dampak hasil pelatihan teknis usaha industri			4 laporan monev	34.482.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	3.7.16.19	Pembinaan Industri Rokok	Jumlah peserta pelatihan Good Manufacture Practices (GMP)			30 orang	24.723.000		0	Kota Magelang	DBHCHT		Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,11	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**											
	2.11.17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**			**234.210.000**		**541.197.000**		**256.266.000**				
			Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	3%		4%		5%					
1	2.11.17.12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	Jumlah rekomendasi	300	184.210.000	300	480.600.000	300	196.266.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.11.17.13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan hasil pendataan	1	50.000.000	1 dokumen	60.597.000	1	60.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	3,6	**Urusan Pilihan Bidang Perdagangan**											
	3.6.17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**			**5.249.000**		**8.122.000**		**5.788.000**				
			Jumlah ekspor produk ke LN	US$ 1.100.000		US$ 1.150.000		US$ 1200000					
1	3.6.17.8	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah peserta	20	5.249.000	20 pelaku usaha	8.122.000	20	5.788.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,7	**Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**											
	3.7.17	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**			**11.969.000**		**9.864.000**		**13.199.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi tehnologi tepat guna	5,09%		5,14%		5,19%					
1	3.7.17.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah peserta pembinaan	20	11.969.000	20 IKM	9.864.000	20	13.199.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,11	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**											
	2.11.18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**			**125.382.000**		**137.370.000**		**138.259.000**				
					705,727,000				853,933,000				
			Prosentase koperasi aktif	93,40%		93,6%		93,90%					
			Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	27%		30%		35%					
			Jumlah koperasi	228		230		233					
			Jumlah koperasi syariah	18		20		22					
1	2.11.18.10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	Jumlah pengurus koperasi yang terbina	120	40.123.000	120	43.388.000	120	43.816.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	2.11.18.11	Pembentukan Koperasi baru	Jumlah koperasi baru	4	28.012.000	5 koperasi	28.632.000	4	30.112.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	2.11.18.14	Penyusunan Profil Koperasi	Jumlah buku profil koperasi	10	6.504.000	10 buku	7.026.000	10	8.004.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	2.11.18.15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah rekomendasi pengawasan pada koperasi	15	5.987.000	15 koperasi	6.259.000	15	7.567.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	2.11.18.16	Sarasehan Gerakan Koperasi	Jumlah koperasi	150	38.215.000	150 koperasi	14.561.000	150	40.215.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
6	2.11.18.19	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta	50	6.541.000	50 orang	7.565.000	50	8.545.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	2.11.18.20	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah KSP/USP			60 koperasi	29.939.000		0	Disperindag Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,6	**Urusan Pilihan Bidang Perdagangan**											
	3.6.18	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**			**782.852.000**		**1.000.000.000**		**947.251.000**				
			Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	4%		5%		6%					
1	3.6.18.3	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah pameran	4	767.852.000	7 pameran (3 nasional, 2 lokal, CFD, musren bangwil, paragon, PRPP,	1.000.000.000	4	929.751.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Akomodasi Musrenbang
2	3.6.18.10	Penyusunan profil perusahaan	Jumlah buku profil perusahaan	1	15.000.000	1 dokumen	0	1	17.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	3.6.18.6	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Sistem Informasi Perdagangan			12 bulan	0		0	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	3.6.19	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**			**896.000.000**		**712.320.000**		**1.038.500.000**				
			Cakupan PKL yang dibina	10%		12%		14%					
			Jumlah shelter PKL yang dikelola	14		15		16					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	3.6.19.33	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	buku laporan monev PKL dan Asongan			4 laporan	17.974.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
2	3.6.19.31	Penempatan PKL	Jumlah PKL yang ditempatkan di shelter			70 orang	30.000.000		0	Shelter PKL	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
3	3.6.19.1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah organisasi PKL dan asongan yang terbina	400	58.000.000	20 paguyuban PKL dan 8 oran9 pembina	34.000.000	425	69.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
4	3.6.19.3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	100	28.000.000	80 orang	0	100	33.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Tema RKPD 2019
5	3.6.19.9	Pendataan pedagang kaki lima	Buku Data PKL dan TDU	1	15.000.000	400 TDU dan 30 buku data PKL	49.108.000	1	18.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	3.6.19.17	Pembangunan Shelter PKL Jl. Alibasah Sentot	Shelter Jl. Alibasah sentot	0	0	1 paket	0	0	0	Jl. Alibasah Sentot	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
7	3.6.19.19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	Patroli rutin pengendalian ketertiban pedagang kaki lima dan asongan	12	84.000.000	90 hari	126.240.000	12	99.000.000	Jalan jalan protokol di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	3.6.19.20	Pemeliharaan shelter PKL	Jumlah shelter PKL yang dipelihara	17	70.000.000	18 shelter	32.000.000	18	82.500.000	Shelter PKL di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	3.6.19.24	Rehabilitasi sedang/berat shelter PKL	Shelter yang direhabilitasi	2	475.000.000	2 shelter	0	3	550.000.000	Shelter PKL	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	3.6.19.26	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	tersedianya jasa keamanan shelter PKL	20	166.000.000	20 orang	404.798.000	20	187.000.000	Shelter PKL di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
11	3.6.19.5	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah mutu dagangan PKL dan asongan yang diawasi			18 sample (2 jenis x 9 shelter)	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
12	3.6.19.32	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	Jumlah Security shelter yang dilatih			20 orang	18.200.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	3.6.19.4	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang memperoleh fasilitasi modal usaha			100 orang	0		0	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Penanggulangan Kemiskinan
14	3.6.19.21	Pembinaan Managemen Pedagang Kaki Lima	jumlah PKL dan Asongan yang dibina			500 orang	0		0	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	3.6.19.36	Pembangunan shelter PKL	Jumlah shelter			1 paket	0		0	Jl. Singosari	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	3,7	**Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**											
	3.7.19	**Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial**			**20.700.000**		**4.725.071.000**		**22.826.000**				
			Jumlah sentra industri	12		13		14					
1	3.7.19.5	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	Laporan diagnosis sentra	4	7.846.000	2 sentra	44.571.000	4	9.330.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Akomodasi Musrenbang
2	**3.7.19.6**	**Revitalisasi Sentra IKM**	**Pembangunan IPAL tahu skala kawasan Tidar Campur Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan**			**1 paket**	**4.680.500.000**		**0**	**Tidar Selatan**	**Dana Alokasi Khusus (D A K)**		**Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Program 100-0-100**
3	3.7.19.4	Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG	Jumlah IKM mainan	20	12.854.000	0	0	20	13.496.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		SDGs
	3,6	**Urusan Pilihan Bidang Perdagangan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	3.6.20	**Program Pengelolaan Pasar**			**3.096.600.000**		**7.643.534.000**		**3.657.000.000**				
			Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	23%		23%		30%					
			Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%		10%		10%					
			Cakupan pedagang pasar yang dibina	10%		12%		16%					
			Persentase pasar tradisional yang dikelola	80%		80%		80%					
1	3.6.20.2	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	Terkelolanya sampah di Pasar Cacaban	12	12.000.000	12 bulan	14.112.000	12	14.800.000	UPT Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	3.6.20.3	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	terkelolanya sampah di Pasar Rejowinangun	12	40.000.000	12 bulan	50.000.000	12	48.400.000	UPT Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	3.6.20.5	Operasi Penertiban Pasar	Jumlah operasi penertiban pasar	8	35.000.000	8 keg	64.332.000	8	41.000.000	Pasar pasar di Kota magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
4	3.6.20.6	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	Peralatan dan bahan pembersih	12	23.500.000	12	29.690.000	12	27.500.000	UPT Pasar Kebonpolo	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
5	3.6.20.7	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	Peralatan dan bahan pembersih	12	26.500.000	12	36.200.000	12	31.000.000	UPT Pasar Gotong Royong	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
6	3.6.20.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa kebersihan lingkungan pasar	53	849.600.000	58 petugas kebersihan	1.139.013.000	55	900.000.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
7	3.6.20.13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	15.000.000	12 bulan	28.894.000	12	18.000.000	UPT Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum		Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
8	3.6.20.14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	10.000.000	12	12.619.000	12	12.100.000	UPT Pasar Kebonpolo	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	3.6.20.15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	12.500.000	12bulan	12.781.000	12	15.000.000	UPT Pasar Gotong Royong	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	3.6.20.16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	8.500.000	12 bulan	8.276.000	12	10.100.000	UPT Pasar Cacaban	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	3.6.20.17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa keamanan lingkungan pasar	48	800.000.000	40 petugas	863.738.000	48	960.000.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	3.6.20.18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	12.000.000	12 bulan	13.999.000	12	15.000.000	UPT Pasar Sidomukti	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	3.6.20.19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	Peralatan dan bahan pembersih	12	17.000.000	12 bulan	18.697.000	12	20.000.000	UPT Pasar Sidomukti	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
14	3.6.20.20	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	Jumlah pasar yang dilombakan	1	65.000.000	4 pasar	33.037.000	1	78.000.000	Pasar pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
15	3.6.20.36	Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan	jumlah peserta pelatihan			280 peserta	37.088.000		0	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	3.6.20.22	Pendataan Pedagang Pasar	Jumlah buku data pedagang pasar	15	19.500.000	15	0	15	22.500.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
17	3.6.20.23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5	24.000.000	6	88.326.000	6	28.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
18	3.6.20.24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5	47.000.000	5	63.216.000	6	55.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
19	3.6.20.25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	Jumlah laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan pasar	12	95.000.000	12	97.569.000	12	110.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
20	3.6.20.27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah laporan administrasi pemungutan retribusi pasar	10	42.500.000	10	34.806.000	10	49.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
21	3.6.20.28	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	Jumlah pasar yang direhabilitasi	0	0	4 paket	0	0	0	pasar sidomukti, kebonpolo dan rejowinangun dan BSF di gotongroyong	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
22	3.6.20.29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	12	192.000.000	5 pasar	279.007.000	12	228.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
23	3.6.20.30	Promosi Pasar Tradisional	Jumlah pentas kesenian tradisonal dan grebeg pasar	10	400.000.000	10	122.268.000	10	550.000.000	Pasar Rejowinangun	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
24	3.6.20.32	Verifikasi Permohonan SITU	Surat Izin Tempat Usaha			350 lembar	25.890.000		0	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
25	3.6.20.8	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	Jumlah organisasi pedagang pasar yang efektif	4	150.000.000	4	34.387.000	4	181.000.000	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Mempertegas Skenario Kemitraan
26	3.6.20.21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar	40	200.000.000	16 unit (15 tong sampah beroda, 1 unit mesin pencacah)	22.323.000	50	242.000.000	Pasar-pasar di kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
27	3.6.20.37	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)	laporan monev			4	21.619.000		0	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
28	3.6.20.34	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	peserta pelatihan			280	30.202.000		0	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
29	3.6.20.35	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	laporan monev			4	21.989.000		0	pasar se Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
30	3.6.20.33	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pasar			55 unit	0		0	pasar-pasar di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
31	3.6.20.38	Pengadaan Lahan Pasar Induk	Tersedianya lahan pasar induk			1 lahan	3.939.456.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program prioritas RPJM
32	3.6.20.39	Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang	Dokumen AMDAL			1 dokum	500.000.000	0	Disperindag	Dana Alokasi Umum		SDGs, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program 100-0-100	
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.29	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**			**475.900.000**		**0**		**0**				
			Persentase kawasan strategis yang terbangun?	4 kawasan		4 kawasan		4 kawasan					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	1.3.29.31	Pembangunan Infrastruktur Prasarana Perdagangan	Infrastruktur prasarana perdagangan yang terbangun	1	475.900.000	1 paket	0	0	0	Kawasan Soekarno Hatta	Dana Alokasi Umum		Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**0**		**22.232.000**		**0**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
			Kemudahan pencarian dokumen yang diarsip	100	23.384.000								
1	2.18.16.6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Jumlah pengelolaan arsip			12 bulan	22.232.000		0	Disperindag	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, ExBAU
			TOTAL		**10.619.794.000**		**20.806.930.000**		**11.618.008.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**214.958.700**		**130.321.000**		**260.100.027**				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor	14	12.387.100	14 item	8.109.000	14	14.988.391	setda kota mage	Dana Alokasi U	39	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	8	12.113.200	8 item	6.037.000	8	14.656.972	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	39	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan selama satu tahun	3	2.926.000	3 jenis	2.640.000	3	3.540.460	SETDA KOTA MA	Dana Alokasi U	54	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman	12	32.773.400	12 bulan	12.996.000	12	39.655.814	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	39	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya sarana rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47	154.759.000	47 kegiat	100.539.000	47	187.258.390	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	60	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**5.896.000**		**10.462.000**		**7.134.160**				
1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai			2 Jenis	7.230.000		0	Bagian Tata Pem	Dana Alokasi U	35	Rencana
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai	4	5.896.000	4 jenis	3.232.000	4	7.134.160	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	54	ExBAU
	4.1.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**46.244.000**		**35.713.000**		**55.955.240**				
1	4.1.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Tersedianya laporan hasil pembinaan Pemerintahan Kecamatan	2	46.244.000	2 dokum	35.713.000	2	55.955.240	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	39	ExBAU
	4,2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan**											
	4.2.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**			**342.151.700**		**333.547.000**		**414.004.557**				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%		40%		45%					
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		85%		85%					
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%		30%		40%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB		BB		B					
			Persentase SKPD yang direview LKJiP	45%		55%		65%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	95%		96%		95%					
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%		40%		30%					
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%		100%		100%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%		100%		100%					
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	70%		75%		80%					
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%		75%		80%					
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD	75	200.546.500	75 buku	201.935.000	75	242.662.265	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	70	Rencana
2	4.2.15.15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pertanggung jawaban Walikota kepada Pemerintah	55	127.524.100	55 buku	120.300.000	55	154.304.161	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	85	Rencana
3	4.2.15.16	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengukuran Kinerja Mandiri	10	14.081.100	10 buku	11.312.000	10	17.038.131	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	70	Rencana
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**			**915.175.900**		**1.030.780.000**		**1.107.362.839**				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%		100%		100%					
1	4.1.16.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terfasilitasinya Tamu Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	24	81.123.900	24 kunke	68.160.000	24	98.159.919	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	40	Rencana
2	4.1.16.7	Koordinasi stabilitas daerah	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Stabilitas Daerah dan Tersedianya Laporan	12	834.052.000	12 lapora	887.954.000	12	1.009.202.920	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	65	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	4.1.16.4	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terfasilitasinya koordinasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan Walikota dan Wakil Walikota Magelang			12kali	74.666.000		0	Bagian Tata Pem	Dana Alokasi U	35	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**154.887.700**		**141.737.000**		**187.414.117**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	1	154.887.700	1 rangkai	141.737.000	1	187.414.117	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	40	Rencana
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.18	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**			**330.050.600**		**382.595.000**		**399.361.226**				
			Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%		100%		100%					
1	4.1.18.6	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	Fasilitasi kerjasama daerah	3	51.905.700	4 MOU	54.425.000	3	62.805.897	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	55	Rencana
2	4.1.18.8	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Terlaksananya kegiatan APEKSI	2	242.799.700	3 kegiata	294.990.000	2	293.787.637	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	40	Rencana
3	4.1.18.9	Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Terbinanya Kerjasama Daerah	1	35.345.200	1 kegiata	33.180.000	1	42.767.692	Sekretariat Daer	Dana Alokasi U	40	Rencana
	4.1.20	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**			**33.689.700**		**120.131.000**		**40.764.537**				
			cakupan kebijakan penataan daerah	40%		60%		80%					
1	4.1.20.18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	Terpenuhinya penerapan SPM dalam penyelenggaraan Pemerintahan	2	33.689.700	2 laporan	18.223.000	2	40.764.537	Bagian Tata Pem	Dana Alokasi U	85	Rencana
2	4.1.20.8	Penegasan dan Penetapan Batas Daerah				20 pilar batas			0	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	35	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	4.1.20.12	Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi	Tersedianya dokumen pembakuan nama rupabumi unsur buatan			1 dokum	101.908.000		0	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	60	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.23	**Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum**			**0**		**213.310.000**		**0**				
1	1.5.23.2	Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	Laporan desk pemilihan umum Tahun 2019			9 laporan	213.310.000		0	Setda Kota Mage	Dana Alokasi U	100	Rencana
			TOTAL		**2.043.054.300**		**2.398.596.000**		**2.472.096.703**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
URUSAN : Administras I Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**45.149.000**		**102.508.000**		**54.630.000**				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sediaan alat tulis kantor	12	13.851.000	12 bulan	12.596.000	12	16.760.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12	13.692.000	12 bulan	12.693.000	12	16.567.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sediaan bahan bacaan	12	2.376.000	12 bulan	2.400.000	12	2.875.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu	12	15.230.000	12 bulan	14.104.000	12	18.428.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi ke dalam dan keluar daerah		0	12 bulan	60.715.000		0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**30.135.000**		**6.218.000**		**36.464.000**				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		12	29.398.000	12 bulan	0	12	35.572.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kerja yang terpelihara	12	737.000	12 bulan	1.000.000	12	892.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja yang terpelihara		0	12 bulan	5.218.000		0	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan**											
	4.2.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**			**198.000.000**		**328.970.000**		**202.000.000**				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%		40%		45%					
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		85%		85%					
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%		30%		40%					
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB		BB		B					
			Persentase SKPD yang direview LKJiP	45%		55%		65%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	95%		96%		95%					
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%		40%		30%					
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%		100%		100%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%		100%		100%					
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	70%		75%		80%					
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%		75%		80%					
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	Kegiatan Asistensi Penerapan SAKIP	2	75.000.000	2 kegiata	82.394.000	2	75.000.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	4.2.15.28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	4	61.000.000	4 dokum	47.476.000	4	63.000.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Program prioritas RPJM
3	4.2.15.30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018	1	62.000.000	1 dokum	93.653.000	1	64.000.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	84	Program prioritas RPJM
4	4.2.15.9	Monitoring dan Implementasi E-SAKIP	Dokumen Monitoring Implementasi SAKIP			1 dokum	55.697.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
5	4.2.15.41	Pengembangan Aplikasi E-SAKIP	Tersedianya aplikasi e-sakip			1 aplikas	49.750.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	74	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4.2.17	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**			**26.000.000**		**84.160.000**		**27.000.000**				
			Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	65%		70%		75%					
			Persentase Aparat SPIP aktif	65%?		70%?		75%?					
			Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	80%		85%		90%					
1	4.2.17.3	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	Buku Bagan Jabatan Kota Magelang	2	26.000.000	2 jenis bu	27.348.000	2	27.000.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	4.2.17.13	Internalisasi Reformasi Birokrasi	Dokumen Internalisasi Reformasi Birokrasi			1 dokum	56.812.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.20	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**			**51.000.000**		**208.150.000**		**27.000.000**				
			cakupan kebijakan penataan daerah	40%		60%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	4.1.20.13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	Organisasi Perangkat Daerah yang dibina	12	26.000.000	10 OPD	33.183.000	12	27.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
2	4.1.20.15	Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD	dokumen evaluasi tupoksi dan uraian tugas	1	25.000.000	1 laporar	174.967.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	4.1.21	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**			**91.742.000**		**255.889.000**		**177.000.000**				
1	4.1.21.8	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Dokumen			1 dokum	51.230.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	100	Program prioritas RPJM
2	4.1.21.3	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat ke Unit Pelayanan Publik (UPP)		0	40 Unit P	78.376.000	40	84.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
3	4.1.21.4	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	82.742.000	1 Lapora	57.383.000	1	83.000.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
4	4.1.21.2	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1	9.000.000	1 Inovasi	68.900.000	1	10.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**8.500.000**		**15.221.000**		**9.500.000**				
1	4.3.21.40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kota Magelang	1	8.500.000	1 dokum	15.221.000	1	9.500.000	Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
			TOTAL		**450.526.000**		**1.001.116.000**		**533.594.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG 2019

SKOPD : Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**141.174.000**		**89.613.000**		**172.746.000**				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan meterai dan pengiriman paket	1250	4.860.000	2 jenis	1.205.000	1350	5.900.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18	15.800.000	17 jenis	13.750.000	18	20.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	8	8.183.000	7 jenis	7.439.000	8	10.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan wawasan	24	9.790.000	2 jenis	8.900.000	24	11.846.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi pegawai, konsumsi untuk rapat dan konsumsi tamu	18	12.275.000	3 jenis ke	9.000.000	18	15.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	18	90.266.000	18 kegiat	49.319.000	18	110.000.000	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**65.345.000**		**13.495.000**		**78.800.000**				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		3	50.000.000	4 jenis	0	3	60.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung	1	2.640.000	4 jenis	2.400.000	1	3.200.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	8	12.705.000	6 jenis	11.095.000	8	15.600.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**1.550.306.000**		**1.885.848.000**		**1.882.950.000**				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		0					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		1		2					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		0		0					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	4.1.19.5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Publikasi produk-produk hukum dalam bentuk softcopy dan hardcopy	3	54.931.000	5 kegiata	50.937.000	3	67.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	4.1.19.9	Sosialisasi Peraturan Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah	6	238.600.000	600 pese	193.818.000	6	288.650.000	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
3	4.1.19.10	Pengelolaan JDI Hukum	Petugas JDIH di semua OPD	53	67.883.000	53 petug	65.000.000	53	83.000.000	Kantor Walikota Magelang dan Perangkat Daerah Kota	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
4	4.1.19.14	Rakor aparat penegak hukum	Laporan Rakor dalam penanganan penegakan hukum	12	96.000.000	12 kegiat	86.911.000	12	116.800.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
5	4.1.19.18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi raperda	8	68.442.000	10 kegiat	57.780.000	8	82.820.000	Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Walikota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
6	4.1.19.28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	Penilaian peduli HAM	3	40.042.000	2 kegiata	26.764.000	3	48.450.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
7	4.1.19.42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	Dokumen Naskah Usulan Prolegda/Propemperda	1	13.233.000	1 Dokum	11.875.000	1	16.020.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
8	4.1.19.43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	Jumlah raperda yang dikirim ke DPRD untuk dibahas	8	245.559.000	10 raperd	377.135.000	8	298.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
9	4.1.19.44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	Harmonisasi dan sinkronisasi Raperwal, SK dan Mou	500	110.123.000	625 prod	323.311.000	500	133.250.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
10	4.1.19.46	Asistensi Pembahasan Raperda	Pembahasan dan persiapan raperda	12	162.610.000	12 lapora	102.025.000	12	196.760.000	Bagian Hukum Setda dan DPRD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
11	4.1.19.47	Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap hukum dan tugas penegak hukum	1	30.466.000	1 kegiata	24.116.000	1	36.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
12	4.1.19.48	Pemberian Bantuan Hukum	Penanganan perkara Pemerintah Kota Magelang yang mendapatkan bantuan hukum	4	168.360.000	4 kegiata	155.666.000	4	203.720.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
13	4.1.19.56	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi terhadap produk hukum	4	43.448.000	6 Rekom	45.511.000	4	52.580.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
14	4.1.19.57	Pemberian Layanan Hukum	Pemberian layanan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	12	210.609.000	12 keg	222.362.000	12	259.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
15	4.1.19.62	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	Penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan			625 prod	32.213.000		0	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
16	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Terwujudnya peningkatan penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan			1 raperda	110.424.000		0	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		**1.756.825.000**		**1.988.956.000**		**2.134.496.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG 2019

SKOPD : Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**141.174.000**		**89.613.000**		**172.746.000**				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan meterai dan pengiriman paket	1250	4.860.000	2 jenis	1.205.000	1350	5.900.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18	15.800.000	17 jenis	13.750.000	18	20.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	8	8.183.000	7 jenis	7.439.000	8	10.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan wawasan	24	9.790.000	2 jenis	8.900.000	24	11.846.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi pegawai, konsumsi untuk rapat dan konsumsi tamu	18	12.275.000	3 jenis ke	9.000.000	18	15.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	18	90.266.000	18 kegiat	49.319.000	18	110.000.000	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**65.345.000**		**13.495.000**		**78.800.000**				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		3	50.000.000	4 jenis	0	3	60.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung	1	2.640.000	4 jenis	2.400.000	1	3.200.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	8	12.705.000	6 jenis	11.095.000	8	15.600.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**1.550.306.000**		**1.885.848.000**		**1.882.950.000**				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		0					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		1		2					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		0		0					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	4.1.19.5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Publikasi produk-produk hukum dalam bentuk softcopy dan hardcopy	3	54.931.000	5 kegiata	50.937.000	3	67.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	4.1.19.9	Sosialisasi Peraturan Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah	6	238.600.000	600 pese	193.818.000	6	288.650.000	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
3	4.1.19.10	Pengelolaan JDI Hukum	Petugas JDIH di semua OPD	53	67.883.000	53 petug	65.000.000	53	83.000.000	Kantor Walikota Magelang dan Perangkat Daerah Kota	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
4	4.1.19.14	Rakor aparat penegak hukum	Laporan Rakor dalam penanganan penegakan hukum	12	96.000.000	12 kegiat	86.911.000	12	116.800.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
5	4.1.19.18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi raperda	8	68.442.000	10 kegiat	57.780.000	8	82.820.000	Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Walikota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
6	4.1.19.28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	Penilaian peduli HAM	3	40.042.000	2 kegiata	26.764.000	3	48.450.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
7	4.1.19.42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	Dokumen Naskah Usulan Prolegda/Propemperda	1	13.233.000	1 Dokum	11.875.000	1	16.020.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
8	4.1.19.43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	Jumlah raperda yang dikirim ke DPRD untuk dibahas	8	245.559.000	10 raperd	377.135.000	8	298.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
9	4.1.19.44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	Harmonisasi dan sinkronisasi Raperwal, SK dan Mou	500	110.123.000	625 prod	323.311.000	500	133.250.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
10	4.1.19.46	Asistensi Pembahasan Raperda	Pembahasan dan persiapan raperda	12	162.610.000	12 lapora	102.025.000	12	196.760.000	Bagian Hukum Setda dan DPRD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
11	4.1.19.47	Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap hukum dan tugas penegak hukum	1	30.466.000	1 kegiata	24.116.000	1	36.900.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
12	4.1.19.48	Pemberian Bantuan Hukum	Penanganan perkara Pemerintah Kota Magelang yang mendapatkan bantuan hukum	4	168.360.000	4 kegiata	155.666.000	4	203.720.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
13	4.1.19.56	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi terhadap produk hukum	4	43.448.000	6 Rekom	45.511.000	4	52.580.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
14	4.1.19.57	Pemberian Layanan Hukum	Pemberian layanan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	12	210.609.000	12 keg	222.362.000	12	259.000.000	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
15	4.1.19.62	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	Penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan			625 prod	32.213.000		0	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
16	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Terwujudnya peningkatan penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan			1 raperda	110.424.000		0	Bagian Hukum Setda	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		**1.756.825.000**		**1.988.956.000**		**2.134.496.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**126.046.000**		**114.502.000**		**131.426.000**				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	35	16.520.000	12 bulan	14.346.000	35	20.000.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	23375	9.800.000	12 bulan	9.271.000	23375	11.700.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan surat kabar	2	2.160.000	12 bulan	3.000.000	2	2.160.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan konsumsi harian pegawai rapat dan tamu, terpenuhinya konsumsi pegawai, terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	12	28.166.000	12 bulan	30.421.000	12	28.166.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11	69.400.000	12 bulan*	57.464.000	11	69.400.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**83.000.000**		**35.649.000**		**83.000.000**				
1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor yang terpelihara			1 jenis	2.211.000		0	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	29	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		2	33.000.000	3 jenis	0	2	33.000.000	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kerja yang dipelihara, software SIMPOK yang terpelihara	9	50.000.000	4 jenis, 1 paket	33.438.000	9	50.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan**											
	4.2.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**			**25.200.000**		**24.155.000**		**25.200.000**				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%		40%		45%					
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		85%		85%					
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%		30%		40%					
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB		BB		B					
			Persentase SKPD yang direview LKJiP	45%		55%		65%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	95%		96%		95%					
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%		40%		30%					
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%		100%		100%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%		100%		100%					
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	70%		75%		80%					
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%		75%		80%					
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan capaian kinerja kota Magelang Tahun 2017	1	25.200.000	1 laporan	24.155.000	1	25.200.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.16	**Program Kerjasama Pembangunan**			**590.000.000**		**494.258.000**		**590.000.000**				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3		4		4					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	4.3.16.3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	kajian teknis dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kota Magelang	12	590.000.000	8 paket	494.258.000	12	590.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.20	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**			**645.236.000**		**610.781.000**		**655.000.000**				
1	2.10.20.10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	terlaksananya operasional ULP	12	600.000.000	12 bulan	563.785.000	12	600.000.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Pemberantasan Korupsi
2	2.10.20.12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	Dokumen RUP	2	45.236.000	2 dokumen	46.996.000	2	55.000.000	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	64	Pemberantasan Korupsi
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**653.343.000**		**748.115.000**		**666.543.000**				
1	4.3.21.68	Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA	Laporan TEPRA			12 laporan bulanan	63.340.000		0	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	peresmian hasil pembangunan daerah TA 2018, keikutsertaan pada Pameran Pembangunan TA 2019	2	310.000.000	1 kegiatan, 1 pameran	364.877.000	2	310.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.3.21.22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	laporan pendokumentasian kegiatan pembangunan daerah	3	23.000.000	3 laporan (kondisi 0%, 50%, 100%)	21.807.000	3	23.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.3.21.32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah ysng bersumber dari dana pemerintah pusat	12	72.000.000	12 laporan bulanan	62.638.000	12	72.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	85	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.3.21.33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	laporan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dananya bersumber dari bantuan keuangan provinsi	12	58.000.000	12 laporan bulanan	50.651.000	12	58.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
6	4.3.21.53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	laporan hasil rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan	4	61.000.000	4 laporan triwulanan	62.171.000	4	61.000.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	4.3.21.65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	12	66.500.000	12 laporan bulanan	63.334.000	12	66.500.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	4.3.21.67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	laporan progres fisik kegiatan pembangunan	12	62.843.000	12 laporan bulanan, 8 kunjungan	59.297.000	12	76.043.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**0**		**41.957.000**		**0**				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		0					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		1		2					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		0		0					
1	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	raperwal pengadaan langsung		0	1 raperwal	41.957.000		0	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	40	Pemberantasan Korupsi
	4,6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan**											
	4.6.16	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**0**		**117.697.000**		**0**				
1	4.6.16.9	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	jumlah organisasi pengadaan dari OPD dan penyedia barang-jasa yang dibina			29 OPD dan 50 Penyedia Barang/Jasa	117.697.000		0	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		**2.122.825.000**		**2.187.114.000**		**2.151.169.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**126.046.000**		**114.502.000**		**131.426.000**				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	35	16.520.000	12 bulan	14.346.000	35	20.000.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	23375	9.800.000	12 bulan	9.271.000	23375	11.700.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan surat kabar	2	2.160.000	12 bulan	3.000.000	2	2.160.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan konsumsi harian pegawai rapat dan tamu, terpenuhinya konsumsi pegawai, terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	12	28.166.000	12 bulan	30.421.000	12	28.166.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11	69.400.000	12 bulan*	57.464.000	11	69.400.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**83.000.000**		**35.649.000**		**83.000.000**				
1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor yang terpelihara			1 jenis	2.211.000		0	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	29	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		2	33.000.000	3 jenis	0	2	33.000.000	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kerja yang dipelihara, software SIMPOK yang terpelihara	9	50.000.000	4 jenis, 1 paket	33.438.000	9	50.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan**											
	4.2.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**			**25.200.000**		**24.155.000**		**25.200.000**				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%		40%		45%					
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		85%		85%					
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%		30%		40%					
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB		BB		B					
			Persentase SKPD yang direview LKJiP	45%		55%		65%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	95%		96%		95%					
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%		40%		30%					
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%		100%		100%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%		100%		100%					
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	70%		75%		80%					
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%		75%		80%					
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan capaian kinerja kota Magelang Tahun 2017	1	25.200.000	1 laporan	24.155.000	1	25.200.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.16	**Program Kerjasama Pembangunan**			**590.000.000**		**494.258.000**		**590.000.000**				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3		4		4					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	4.3.16.3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	kajian teknis dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kota Magelang	12	590.000.000	8 paket	494.258.000	12	590.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.20	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**			**645.236.000**		**610.781.000**		**655.000.000**				
1	2.10.20.10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	terlaksananya operasional ULP	12	600.000.000	12 bulan	563.785.000	12	600.000.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Pemberantasan Korupsi
2	2.10.20.12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	Dokumen RUP	2	45.236.000	2 dokumen	46.996.000	2	55.000.000	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	64	Pemberantasan Korupsi
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**653.343.000**		**748.115.000**		**666.543.000**				
1	4.3.21.68	Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA	Laporan TEPRA			12 laporan bulanan	63.340.000		0	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	peresmian hasil pembangunan daerah TA 2018, keikutsertaan pada Pameran Pembangunan TA 2019	2	310.000.000	1 kegiatan, 1 pameran	364.877.000	2	310.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.3.21.22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	laporan pendokumentasian kegiatan pembangunan daerah	3	23.000.000	3 laporan (kondisi 0%, 50%, 100%)	21.807.000	3	23.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.3.21.32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah ysng bersumber dari dana pemerintah pusat	12	72.000.000	12 laporan bulanan	62.638.000	12	72.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	85	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
5	4.3.21.33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	laporan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dananya bersumber dari bantuan keuangan provinsi	12	58.000.000	12 laporan bulanan	50.651.000	12	58.000.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.3.21.53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	laporan hasil rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan	4	61.000.000	4 laporan triwulan an	62.171.000	4	61.000.000	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	4.3.21.65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	12	66.500.000	12 laporan bulanan	63.334.000	12	66.500.000	Bagian Pembangunan	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	4.3.21.67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	laporan progres fisik kegiatan pembangunan	12	62.843.000	12 laporan bulanan, 8 kunjung an	59.297.000	12	76.043.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**0**		**41.957.000**		**0**				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		0					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		1		2					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		0		0					
1	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	raperwal pengadaan langsung		0	1 raperwa l	41.957.000		0	bagian pembangunan	Dana Alokasi Umum	40	Pemberantasan Korupsi
	4,6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan**											
	4.6.16	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**0**		**117.697.000**		**0**				
1	4.6.16.9	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	jumlah organisasi pengadaan dari OPD dan penyedia barang-jasa yang dibina			29 OPD dan 50 Penyedi a Barang/J asa	117.697.000		0	Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		**2.122.825.000**		**2.187.114.000**		**2.151.169.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
URUSAN Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**196.500.000**		**142.414.000**		**237.720.000**				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko dan paket pengiriman	4	600.000	12 bulan	260.000	4	720.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	14.700.000	12 bulan	9.833.000	12	17.800.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	8.600.000	12 bulan	7.138.000	12	10.400.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar	2	2.300.000	12 bulan	3.000.000	2	2.800.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan minum harian pegawai, konsumsi rapat dan konsumsi tamu	18	20.300.000	12 bulan	10.600.000	18	24.500.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	150.000.000	50 kegiat	111.583.000	12	181.500.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**50.800.000**		**15.930.000**		**53.700.000**				
1	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor untuk kelancaran kegiatan dan tugas kantor			1 jenis	2.100.000		0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	29	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		3	35.000.000	3 jenis	0	3	35.000.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor untuk kelancaran kegiatan dan tugas kantor	5	15.800.000	4 jenis	13.830.000	5	18.700.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	2,11	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2.11.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**			**198.325.000**		**133.600.000**		**240.020.000**				
			DISKOPERINDAG		301,739,600				365,105,186				
			Persentase peningkatan kualits pelaku UKM	4%		5%		6%					
			Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%		10%		10%					
1	2.11.15.20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan lembaga Keuangan Mikro	6	51.975.000	4 kegiata	48.100.000	6	62.920.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	90	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
2	2.11.15.22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KUR	12	146.350.000	6 laporan	85.500.000	12	177.100.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	90	Penanggulangan Kemiskinan
	2,14	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik**											
	2.14.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**			**106.000.000**		**86.882.000**		**127.000.000**				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,9%					
			Persentase pemenuhan data statistik	95%		95%		95%					
1	2.14.15.11	Pengendalian Inflasi Daerah	Koordinasi Pengendalian Laju Inflasi di Kota Magelang	6	106.000.000	6 kegiata	86.882.000	6	127.000.000	Bag. Perekonomian	Dana Alokasi Umum	90	Mempertegas Skenario Kemitraan
	3,6	**Urusan Pilihan Bidang Perdagangan**											
	3.6.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**			**34.955.000**		**140.794.000**		**42.240.000**				
				-	5,170,500,000	-		-	5,528,680,000				
			Jumlah alat UTTP yang ditera	2,800		2,900		3,000					
			Data & informasi cukai palsu/ilegal	NA		NA		NA					
1	3.6.15.12	Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	Sosialisasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan DBHCHT	1	34.955.000	1 kegiata	140.794.000	1	42.240.000	Bagian Perekonomian	DBHCHT	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,6	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial**											
	1.6.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**			**118.400.000**		**138.800.000**		**143.300.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%		100%		100%					
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30.00%		35%		40.00%					
1	1.6.16.27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai	12	118.400.000	6 laporan	64.700.000	12	143.300.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	100	Penanggulangan Kemiskinan
2	1.6.16.33	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	Koordinasi upaya percepatan akses keuangan di Kota Magelang			4 kegiata	74.100.000		0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	85	Penanggulangan Kemiskinan
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**79.550.000**		**139.217.000**		**96.256.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	6	79.550.000	4 laporan	70.617.000	6	96.256.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	SDGs
2	2.5.16.49	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Terlaksananya Pengelolaan Sampah berdasarkan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga			4 Laporan	68.600.000		0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	80	SDGs
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**			**59.620.000**		**0**		**72.000.000**				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	4.1.16.15	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru		2	59.620.000	2 kegiata	0	2	72.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**			**321.354.000**		**163.000.000**		**388.840.000**				
			Indeks Kualitas Air,	76%		76%		77%					
			Indeks Kualitas Udara	78%		78%		78%					
			Indeks Tutupan Hutan	49%		49%		50%					
			Jumlah SDA yang terkonservasi	57,7		67,7		77,84					
			Jenis flora	10 Jenis		12 Jenis		15 jenis					
			Jenis fauna	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis					
1	2.5.17.9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Data dan laporan hemat energi, LPG dan BBM	36	150.900.000	36 lapora	127.000.000	36	182.590.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	90	SDGs
2	2.5.17.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA		12	135.454.000	12 lapora	0	12	163.900.000	Bagian Perekonomian	DBHCHT	85	SDGs
3	2.5.17.47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan	Sosialisasi penghematan energi dan air serta pemanfaatan energi terbarukan pada OPD, BUMD serta unsur dari masyarakat	2	35.000.000	2 kegiata	36.000.000	2	42.350.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	SDGs
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**0**		**153.800.000**		**0**				
			Jumlah review PERDA/PERWAL	1		1		0					
			Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	0		1		2					
			Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1		0		0					
1	4.1.19.7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan peraturan daerah		0	2 Raperd	121.600.000		0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
2	4.1.19.59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Rancangan Peraturan Walikota			1 Raperw	32.200.000		0	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	3,7	**Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	3.7.20	**Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah**			**351.427.000**		**291.000.000**		**424.000.000**				
1	3.7.20.1	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	12	134.960.000	12 lapora	125.000.000	12	162.800.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	3.7.20.2	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	RKAP dan Perubahan RKAP Perusahaan Daerah	10	47.775.000	10 lapora	35.000.000	10	57.200.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	3.7.20.4	Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah		20	33.832.000	1 laporan	0	20	40.900.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	3.7.20.6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	Laporan Evaluasi RKAP Perusahaan Daerah	12	94.860.000	12 lapora	91.000.000	12	114.700.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	3.7.20.8	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	Pengesahan Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah	5	40.000.000	5 dokum	40.000.000	5	48.400.000	Bagian Perekonomian	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.21	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**			**0**		**50.348.000**		**0**				
1	4.1.21.9	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan	Koordinasi dan kunjungan lapangan terkait persiapan menghadapi hari raya			2 kegiata	50.348.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
			TOTAL		**1.516.931.000**		**1.455.785.000**		**1.825.076.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**170.868.000**		**136.689.000**		**206.891.000**				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	23	20.697.000	22 jenis	18.815.000	23	25.050.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan	30000	6.600.000	36300 lembar	6.600.000	30000	7.986.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar	2	2.442.000	2 media cetak	2.220.000	2	2.955.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum harian pegawai dan rapat	12	12.330.000	10 pegawai	11.207.000	12	15.000.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25	128.799.000	25 kali	97.847.000	25	155.900.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**65.318.000**		**15.092.000**		**88.540.000**				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		4	50.000.000	5 jenis	0	4	70.000.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	18	15.318.000	6 jenis	15.092.000	18	18.540.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**93.912.000**		**85.374.000**		**113.640.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.9	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	Dialog/audiensi dalam kegiatan tarawih keliling Walikota dan Pimpinan Daerah	4	93.912.000	4 kegiatan (20 kali pelaksa naan tarling)	85.374.000	4	113.640.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	1,6	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial**											
	1.6.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**			**70.408.000**		**64.007.000**		**85.200.000**				
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%		100%		100%					
			Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	11.00%		13.00%		14.00%					
1	1.6.15.6	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	Pengadministrasian permohonan bantuan santunan kematian sesuai ketentuan	12	70.408.000	12 bulan	64.007.000	12	85.200.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Penanggulangan Kemiskinan
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**25.120.000**		**25.120.000**		**33.440.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.51	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Terselenggaranya koordinasi tim pembina usaha kesehatan sekolah tingkat Kota Magelang	150	25.120.000	150 orang	25.120.000	150	33.440.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	1,6	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial**											
	1.6.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**			**267.970.000**		**254.290.000**		**325.000.000**				
			Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%		100%		100%					
			Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30.00%		35%		40.00%					
1	1.6.16.22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Terverifikasinya permohonan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku	12	267.970.000	12 bulan	254.290.000	12	325.000.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**65.135.000**		**61.083.000**		**78.900.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	Laporan Indeks Pembangunan Gender	4	65.135.000	4 laporan	61.083.000	4	78.900.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**321.311.000**		**354.886.000**		**389.720.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Terselenggaranya kegiatan Malam Tasyakuran Hari Jadi Magelang	1	59.273.000	1 kegiatan	60.544.000	1	71.720.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya kegiatan HUT RI, Hari Ibu, dan Hari AIDS Tingkat Kota Magelang	3	262.038.000	3 kegiatan	294.342.000	3	318.000.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**471.684.000**		**462.792.000**		**570.910.000**				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%		97.31%		97.63%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%		100%					
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%		25.00%					
			Jumlah Juara FASI	4		-		-					
			Jumlah Juara MTQ	1		2		2					
1	1.1.18.14	Festival Anak Soleh Indonesia	Terlaksananya Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kota Magelang	2	215.386.000	2 kegiatan	212.792.000	2	260.700.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
2	1.1.18.16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kota Magelang	2	197.028.000	2 kegiatan	185.000.000	2	238.500.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
3	1.1.18.17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	Terkirimnya peserta MTQ Pelajar dan MTQ Umum ke Tingkat Provinsi Jateng	2	59.270.000	2 kegiatan	65.000.000	2	71.710.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,6	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial**											
	1.6.19	**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**			**38.924.000**		**36.907.000**		**47.100.000**				
			Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	58%		67%		75%					
1	1.6.19.7	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	Terselenggaranya pengajian dan buka bersama Walikota dengan Anak Yatim, Santri, dan Alim Ulama	1	38.924.000	1 kegiatan	36.907.000	1	47.100.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	91	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**173.415.000**		**200.022.000**		**210.000.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga (senam, volley ball, tenis, sepak bola)	40	173.415.000	4 kegiatan	200.022.000	40	210.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**			**72.532.000**		**65.938.000**		**87.800.000**				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	0		42.50%		0					
			Cakupan tim relawan siaga bencana	5,88		8,82		11,76					
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	50%		75%		100%					
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	50%		75%		100%					
			Cakupan penanganan korban becana	100%		100%		100%					
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%		17,64%		23,53%					
			#NAME?	2		3		4					
			#NAME?	0		0		0					
			#NAME?	0		0		0					
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada		ada		ada					
1	1.5.22.9	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Laporan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana	4	72.532.000	4 laporan	65.938.000	4	87.800.000	Bagian Kesra Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**0**		**0**		**0**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.6	Perumusan kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah				100 orang	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.24	**Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama**			**0**		**726.926.000**		**0**				
			Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	35%		50%		65%					
			Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur	5%		5%		5%					
			Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	60		66,67		66,67					
			Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	6		5		5					
			Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	7%		10%		15%					
			Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	-		-		-					
			Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	15%									
			Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat	-		1		-					
			Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	100%		100%		100%					
1	1.5.24.4	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	Terlaksananya Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Tingkat Kota Magelang			1 kegiatan	25.926.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana, Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	1.5.24.6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kehidupan beragama dan Toleransi Umat beragama	Terselenggaranya Pengajian Akbar Peringatan Tahun Baru Islam			2 laporan	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	86	Rencana
3	1.5.24.1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terselenggaranya kegiatan pengiriman TPHD dan P3H			1 kegiatan	200.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
4	1.5.24.2	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	Terselenggaranya kegiatan 3 Peringatan Hari Besar Islam, Natal, dan Nyepi			3 kegiatan	210.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
5	1.5.24.3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama				5 kegiatan	291.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	81	Rencana, Pokok Pikiran DPRD
			TOTAL		**1.836.597.000**		**2.489.126.000**		**2.237.141.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**314.270.000**		**242.075.000**		**384.540.000**				
1	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46	20.273.000	12 bulan	18.900.000	46	24.540.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6	29.722.000	12 bulan	25.602.000	6	36.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan harian surat kabar dan majalah untuk memenuhi kebutuhan informasi, pengetahuan, dan wawasan	10	68.880.000	12 bulan	69.240.000	10	84.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan kebutuhan logistik bagi pegawai, serta konsumsi bagi tamu dan peserta rapat	12	32.380.000	12 bulan	21.721.000	12	40.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	163.015.000	12 bulan	106.612.000	12	200.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**253.174.000**		**45.997.000**		**264.403.000**				
1	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		9	200.000.000	9 jenis	0	9	200.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin	3	25.630.000	3 jenis	24.185.000	3	31.013.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan yang mendukung kinerja kehumasan dan keprotokolan	11	27.544.000	9 jenis	21.812.000	11	33.390.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**1.769.946.000**		**2.583.186.000**		**2.053.499.000**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan keperc ayaan		60 kali siar/ 5 agama dan keperca yaan		60 kali siar/ 5 agama dan keperca yaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperc ayaan		12 kali/ 5 agama dan keperca yaan		12 kali/ 5 agama dan keperca yaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Pelaksanaan kegiatan Bakohumas Kota Magelang, dan terkumpulnya berita/informasi kegiatan di OPD/Instansi terkait	12	425.540.000	4 kegiatan	51.053.000	12	482.500.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.10.15.9	Siaran keliling	Terpublikasikannya kegiatan Pemerintah Kota Magelang secara lebih cepat	84	17.094.000	12 bulan	11.400.000	84	20.690.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	60	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	2.10.15.11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	Publikasi kegiatan dan kebijakan Pemkot Magelang melalui media cetak dan elektronik, serta terdokumentasinya informasi kegiatan dan kebijakan Pemkot Magelang	35	380.000.000	12 bulan	1.501.018.000	35	407.300.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
4	2.10.15.19	Pengelolaan Website		12	30.000.000	12 bulan	0	12	33.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
5	2.10.15.20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	Kerjasama dengan wartawan media cetak dan elektronik	1	518.958.000	5 kegiatan	461.620.000	1	628.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	91	Mempertegas Skenario Kemitraan
6	2.10.15.25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Dokumentasi dan buletin kegiatan acara resmi Pemerintah Kota Magelang, serta naskah sambutan Walikota dan Wakil Walikota Magelang	12	398.354.000	12 bulan	558.095.000	12	482.009.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**			**227.000.000**		**223.328.000**		**275.000.000**				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%		100%		100%					
1	4.1.16.16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		96	227.000.000	12 bulan	0	96	275.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
2	4.1.16.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Pelaksanaan acara resmi Pemerintah Kota Magelang dengan lancar			12 bulan	223.328.000		0	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**160.000.000**		**122.213.000**		**200.000.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Pelaksanaan upacara hari jadi Kota Magelang, upacara HUT RI, dan upacara tanggal 17 di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam rangka meningkatkan nilai-nilai patriotisme	10	160.000.000	4 kegiatan	122.213.000	10	200.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**			**122.515.000**		**100.607.000**		**112.000.000**				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%		100%					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%		72%					
1	4.1.17.15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan laporan pengaduan masyarakat Kota Magelang	120	122.515.000	12 bulan	100.607.000	120	112.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	96	Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.16	**Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi**			**221.470.000**		**198.467.000**		**268.000.000**				
			Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1		1		1					
			Interoperabilitas antar system informasi	2		4		4					
			Cakupan WAN (Wide Area Network) kota (Dishubkominfo)	50%		75%		100%					
			Cakupan data yang terpusat dan terkendali	70%		80%		100%					
			Persentase PD yang menerapkan e-government	100%		100%		100%					
1	2.10.16.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Tersedianya analisis media Kota Magelang	12	221.470.000	12 bulan	198.467.000	12	268.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
			TOTAL		**3.068.375.000**		**3.515.873.000**		**3.557.442.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Sekretariat Daerah - Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
URUSAN : Adminitrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2.016.384.000**		**1.829.921.000**		**2.430.840.000**				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meterai	1250	5.000.000	1375 buah	6.000.000	1500	6.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengujian kendaraan bermotor/KIR, Pengurusan Pajak Kendaraan dan Perpanjangan STNK	99	80.000.000	99 unit kendaraan dinas	75.117.000	99	90.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan administrasi barang	14	847.000.000	12 Bulan	724.008.000	14	1.024.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat dan bahan kebersihan, tenaga kebersihan, pakaian tenaga kebersihan	31	668.000.000	31 orang, 7 item alat kebersihan	692.871.000	31	809.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	14	43.500.000	15 jenis	40.000.000	14	52.600.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	6	18.650.000	5 jenis barang cetak	15.000.000	6	22.600.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan	10	50.650.000	10 jenis	60.000.000	10	61.900.000	Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan Bahan bacaan	5	3.476.000	2 jenis	2.160.000	5	4.200.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	BBM dan Tabung gas	2	86.427.000	2 jenis	19.854.000	2	104.580.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum pegawai dan konsumsi rapat	12	21.329.000	2 jenis	19.390.000	12	25.810.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	132.352.000	12 bulan	107.721.000	12	160.150.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kebutuhan operasional pimpinan dan perlengkapan kegiatan Setda	12	60.000.000	12 bulan	67.800.000	12	70.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**2.460.955.000**		**2.444.749.000**		**2.977.630.000**				
1	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				2 Jenis	0		0	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
2	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		5	220.000.000	2 jenis	0	5	266.200.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
3	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur		4	233.950.000	2 jenis	0	4	283.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
4	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan taman lingkungan	4	541.640.000	4 lokasi	492.000.000	4	655.380.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan KDH & WKDH	2	198.110.000	2 unit	214.600.000	2	239.710.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda 2, Kendaraan roda 4 dan Bus	92	1.219.053.000	99 unit	999.390.000	92	1.475.000.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	7	13.563.000	7 jenis	19.505.000	7	16.420.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kerja dan kantor	10	23.353.000	8 jenis	16.610.000	10	28.260.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	5	11.286.000	5 jenis	7.604.000	5	13.660.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pagar Depan Kantor Walikota Magelang dan Ruang Command Center Kota Magelang			2 paket	695.040.000		0	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
11	4.1.2.11	Pengadaan Alat Komunikasi				6 unit	0		0	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	4.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**227.954.000**		**194.650.000**		**275.898.500**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan/anggaran	16	67.030.000	12 laporan	44.965.000	16	81.190.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Setda	1	11.286.000	1 laporan	8.232.000	1	13.650.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
3	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun realisasi APBD dan Neraca Setda	1	12.876.000	1 laporan	8.706.000	1	15.580.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
4	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja Penetapan dan Renja Perubahan Setda	2	13.702.000	2 jenis	12.567.000	2	16.580.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
5	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Setda	2	46.300.000	2 kegiatan	32.500.000	2	56.020.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
6	4.1.6.24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Laporan sinkronisasi data aset barang dan keuangan	12	66.693.000	12 laporan	61.450.000	12	80.698.500	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
7	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1	10.067.000	1 laporan	11.230.000	1	12.180.000	Bagian PKP Setda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
8		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
			TOTAL		**4.705.293.000**		**4.469.320.000**		**5.684.368.500**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Adminitrasi Pemerintahan
URUSAN : Sekretariat Daerah - Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**5.392.329.800**		**4.913.574.000**		**6.524.719.058**				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko, paket pengiriman dan jasa kotak pos	12	7.480.000	3 jenis	6.500.000	12	9.050.800	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan fasilitas telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	12	2.097.480.000	5 jenis	1.812.000.000	12	2.537.950.800	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, tenaga kebersihan dan seragam tenaga kebersihan	12	182.767.200	12 bulan	139.308.000	12	221.148.312	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12	44.000.000	10 jenis	45.000.000	12	53.240.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12	129.118.000	3 keg	115.000.000	12	156.232.780	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	10	20.252.100	11 jenis	19.050.000	10	24.505.041	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan karangan bunga, tempat cinderamata dan cinderamata	12	289.300.000	3 jenis	283.000.000	12	350.053.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
8	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	12	33.825.000	20 jenis	30.750.000	12	40.928.250	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan	12	3.476.000	2 jenis	2.160.000	12	4.205.960	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan kebutuhan bahan bakar genset dan pengisian tabung gas rumah tangga	12	73.701.100	2 jenis	20.000.000	12	89.178.331	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan kebutuhan konsumsi harian pegawai,konsumsi rapat dan konsumsi tamu Setda Kota Magelang dan Rumah Jabatan	12	1.175.350.000	3 kegiatan	1.192.265.000	12	1.422.173.500	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	986.865.000	12 bulan	876.153.000	12	1.194.106.650	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pegawai honorer/tenaga kontrak	12	92.596.900	3 orang	84.200.000	12	112.042.249	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	4.1.1.23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	Medical Check Up KDH & WKDH	8	22.000.000	5 orang	15.000.000	8	26.620.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	4.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	dokumen administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kota Magelang	9	27.896.000	dokumen kepegawaian dari 9 bagian	52.221.000	9	33.754.160	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
16	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan dan pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	12	206.222.500	12 bulan	220.967.000	12	249.529.225	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**475.953.500**		**328.975.000**		**575.903.735**				
1	4.1.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan KDH & WKDH	2	147.400.000	2 rumah jabatan	208.150.000	2	178.354.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas Sekda yang terpelihara dan terawat dengan baik	1	56.969.000	1 rumah	30.000.000	1	68.932.490	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	12	17.952.000	9 jenis	14.820.000	12	21.721.920	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	12	40.700.000	8 jenis	8.000.000	12	49.247.000	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	12	27.967.500	4 jenis	18.005.000	12	33.840.675	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala			17 jenis	50.000.000		0	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		9	184.965.000	9 jenis	0	9	223.807.650	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**31.200.400**		**90.900.000**		**37.752.484**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Bagian yang diampu dan dikelola dalam arsip kepegawaian di lingkungan setda kota magelang	12	31.200.400	168 arsip	29.550.000	12	37.752.484	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	2.18.16.13	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	Pendokumentasian naskah dinas daerah			arsip yang dikelola di 9 bagian Setda	61.350.000		0	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	59	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**			**2.105.562.800**		**1.813.619.000**		**2.547.730.988**				
			Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%		100%	,	100%					
1	4.1.16.1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos	12	199.914.000	24 dialog/audiensi	181.780.000	12	241.895.940	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
2	4.1.16.5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kunjungan kerja/inspeksi KDH&WKDH ke SKPD dan institusi lainnya	12	512.243.600	1 kali kunjungan kerja, 12 inspeksi ke SKPD dan institusi lainnya	322.000.000	12	619.814.756	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
3	4.1.16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12	526.218.000	36 kali koordinasi	676.924.000	12	636.723.780	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
4	4.1.16.16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan tamu pemerintah kota magelang	12	867.187.200	12 bulan	632.915.000	12	1.049.296.512	Bagian Umum	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
			TOTAL		**8.005.046.500**		**7.147.068.000**		**9.686.106.265**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

SKPD : Sekretariat DPRD
URUSAN : Penunjang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**8.204.365.750**		**6.339.367.000**		**9.065.961.385**				
1	4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan paket	12	357.000	2000 sura	39.970.000	12	400.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi,air,listrik, internet dan TV kabel untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12	212.700.000	12 bulan	240.300.000	12	233.970.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk tertibnya administrasi dan kenyamanan pengguna kendaraan	49	37.600.000	32 kenda	19.864.000	49	37.600.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12	248.329.000	12 bulan	210.159.000	12	259.543.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor yang bersih dan rapi sehingga nyaman untuk bekerja	12	161.599.000	12	174.383.000	12	177.758.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Fasilitasi saran dan prasarana	12	26.076.000	45 item	20.002.000	12	28.700.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12	55.427.000	12 bulan	25.693.000	12	60.969.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Fasilitasi sarana dan prasarana komponen instalasi listrik /penerangan untuk mendukung kinerja	12	14.308.000	12	20.002.000	12	15.738.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	5	59.350.000	5 item	79.571.000	5	65.285.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	12	12.800.000	1 koran l	14.000.000	12	14.900.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
11	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor dan Rumah dinas untuk mendukung kinerja	12	9.076.000	12	15.889.000	12	12.069.860	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	12	74.460.750	12 bulan	275.679.000	12	81.906.825	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	12	6.947.200.000	12 bulan	4.803.204.000	12	7.641.920.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tenaga mekanikal,Administrasi,Tersedianya penjaga malam, driver	jaga ma	214.632.000	Mekanika	307.960.000	jaga mala	244.872.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
15	4.1.1.24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Terdeteksinya kesehatan anggota DPRD sedini mungkin	25 angg	101.299.000	25 anggo	62.500.000	25 anggo	158.262.500	Setwan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
16	4.1.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	12	29.152.000	12 bulan	30.191.000	12	32.067.200	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**1.996.823.000**		**551.459.000**		**942.389.700**				
1	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	12	102.241.000	12 bulan	42.590.000	12	114.500.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	190.368.000	1 unit ge	126.607.000	1	213.034.800	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap nyaman untuk sarana mobilitas	32	548.658.000	31 (18 ke	334.788.000	32	548.658.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	13	41.750.000	12 item	31.188.000	13	43.450.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor nyaman untuk mendukung pelaksanaan kinerja	5	20.679.000	4 item	16.286.000	5	22.746.900	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		2	1.093.127.000	5 item	0	0	0	Setwan	Dana Alokasi Umum	39	SDGs
7	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor			0	5	0		0	Setwan	Dana Alokasi Umum	39	SDGs
8	4.1.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			0	9	0		0	Setwan	Dana Alokasi Umum	39	SDGs
	4.1.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**178.171.000**		**315.877.000**		**185.988.100**				
1	4.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	125	178.171.000	175 paka	315.877.000	125	185.988.100	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4.1.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**872.000.000**		**790.800.000**		**950.000.000**				
1	4.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	6	872.000.000	6 kegiata	790.800.000	6	950.000.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	4.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**42.287.000**		**51.747.000**		**48.527.900**				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	4	8.872.000	4 triwula	12.031.000	4	9.615.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1	2.780.000	1 laporan	2.500.000	1	3.763.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
3	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	0	0	1 kegiata	2.652.000	0	0	setwan	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
4	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2	8.971.000	2	7.468.000	2	9.100.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
5	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya RKA dan RKPA	2	14.235.000	2	18.000.000	2	18.193.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
6	4.1.6.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD			0	1 kegiata	0		0	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
7	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKjiP	1	7.429.000	1 kegiata	9.096.000		7.856.900	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
8		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	4.1.15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**			**11.004.115.000**		**10.982.253.000**		**11.724.839.600**				
			SETWAN		3,559,383,000				3,624,366,000				
			Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	100%		100%		100%					
1	4.1.15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Raperda yang ditetapkan	20	531.802.000	20 raperd	2.199.187.000	20	536.651.600	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	4.1.15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	12	280.097.000	7 alat kel	5.261.562.000	12	281.184.500	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	SDGs
3	4.1.15.4	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna DPRD	1	204.754.000	35 rapat	347.969.000	1	254.575.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
4	4.1.15.5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses	3	987.735.000	3 kali res	926.835.000	3	1.086.508.500	Dapil 1, 2 , dan 3	Dana Alokasi Umum	40	Pokok Pikiran DPRD
5	4.1.15.6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD		12	6.098.200.000	12 bulan	0	12	6.398.000.000	Seretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
6	4.1.15.8	Sosialisasi perturan perundang-undangan	Tersosialisasikannya Peraturan Perundang-undangan	2	53.022.000	2 kegiata	107.042.000	2	81.100.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
7	4.1.15.9	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	Risalah rapat	12	35.730.000	120 risala	30.730.000	12	36.700.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
8	4.1.15.11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bintek/workshop	8	2.373.450.000	6 kegiata	1.817.100.000	8	2.610.795.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
9	4.1.15.13	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama pelaksanaan kegiatan Setwan dan DPRD		12	439.325.000	1 fasilitas	0	12	439.325.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
10	4.1.15.10	Penyusunan Memori Bhakti DPRD	Tersusunnya memori bakti		0	249 buku	56.948.000		0	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
11	4.1.15.15	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersusunnya Raperwal terkait Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota DPRD			8 Raperw	234.880.000		0	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**40.436.000**		**40.436.000**		**41.236.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.23	Penyusunan Profile DPRD	Tersusunnya profile DPRD	200	40.436.000	200 buku	40.436.000	200	41.236.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**57.298.000**		**35.111.000**		**59.750.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip	12	57.298.000	Arsip 3 b	35.111.000	12	59.750.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa**			**158.500.000**		**165.504.000**		**159.600.000**				
1	2.10.18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersebarluasnya informasi	12	158.500.000	4 item m	165.504.000	12	159.600.000	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**0**		**0**		**0**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH		0	0	1 kegiata	0	0	0	Sekretariat DPRD	Dana Alokasi Umum	39	Kota Sejuta Bunga
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**115.956.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.27	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Tersedianya publikasi kegiatan wakil rakyat			600 bulet	115.956.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
			TOTAL		**22.553.995.750**		**19.388.510.000**		**23.178.292.685**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Selatan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**758.204.000**		**676.419.000**		**917.436.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	36.960.000	12 bulan	37.800.000	12	44.722.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah sarana informasi masyarakat melalui media cetak	15	3.168.000	12 buah	2.140.000	15	3.834.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	11	3.135.000	1 unit roc	2.325.000	11	3.794.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah petugas pengelola administrasi keuangan dan petugas pengelola administrasi barang milik daerah	54	390.230.000	54 orang	354.573.000	54	472.179.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
5	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	12	84.832.000	12 bulan	81.529.000	12	102.648.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	31.481.000	12 bulan	16.228.000	12	38.094.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12.290.000	12 bulan	5.410.000	12	14.871.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	7.823.000	12 bulan	4.674.000	12	9.466.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12	2.838.000	12 bulan	3.000.000	12	3.434.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya isi ulang tabung gas dan BBM Genset	12	4.362.000	12 bulan	4.440.000	12	5.278.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12	20.714.000	12 bulan	26.171.000	12	25.064.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7	74.459.000	8 kegiata	33810000	7	90.096.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya jumlah penjaga malam kantor	1	17.702.000	2 orang	39.192.000	1	21.421.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	terlaksananya pelayanan Terpadu Kecamatan	12	68.210.000	12 bulan	65.127.000	12	82.535.000	Kantor Kecamatan	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**149.172.000**		**198.721.000**		**180.501.000**				
1	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya pengelolaan sampah di masyarakat			1 unit	40.950.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi MKSB
2	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas bangunan yang dipelihara	100	5.709.000	150 M2	5.192.000	100	6.908.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	625	54.917.000	700 M2	47.419.000	625	66.450.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11	74.415.000	11 unit	64.260.000	11	90.043.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	26	7.014.000	25 unit (u	5.478.000	26	8.488.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	14	7.117.000	5 jenis	5.472.000	14	8.612.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.1.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terlaksananya pengelolaan sampah organik di masyarakat			1 unit	29.950.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi MKSB
	4.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**119.660.000**		**75.069.000**		**144.794.000**				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12	26.176.000	12 lapora	14.872.000	12	31.674.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tesedianya rencana kerja OPD	2	22.437.000	2 dokume	20.285.000	2	27.149.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen RKA-OPD	2	32.885.000	2 dokume	23.249.000	2	39.790.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKj-IP OPD	1	13.836.000	1 dokume	5.949.000	1	16.742.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	1	11.723.000	1 dokume	4.307.000	1	14.185.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1	12.603.000	1 dokume	6.407.000	1	15.254.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**8.384.000**		**8.733.000**		**10.144.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	120	8.384.000	120 pese	8.733.000	120	10.144.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	76	Kota Layak Anak
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**15.563.000**		**15.144.000**		**18.832.000**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	76	15.563.000	76 orang	15.144.000	76	18.832.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.135.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kecamatan			1 kegiata	10.135.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	2,14	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik**											
	2.14.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**			**6.446.000**		**4.281.000**		**7.801.000**				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,9%					
			Persentase pemenuhan data statistik	95%		95%		95%					
1	2.14.15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya dokumen Kecamatan Dalam Angka tahun 2018	1	6.446.000	1 jenis do	4.281.000	1	7.801.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**93.170.000**		**89.524.000**		**112.736.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12	93.170.000	12 bulan	89.524.000	12	112.736.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**50.361.000**		**42.873.000**		**60.938.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	2	50.361.000	2 kegiata	42.873.000	2	60.938.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**			**9.984.000**		**7.272.000**		**12.082.000**				
			Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%		2%		1%					
1	2.8.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan	60	9.984.000	70 orang	7.272.000	60	12.082.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	SDGs
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**10.860.000**		**12.146.000**		**13.141.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan toleransi antar umat beragama	1	10.860.000	1 kegiata	12.146.000	1	13.141.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**24.101.000**		**25.810.000**		**29.164.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1	24.101.000	1 kegiata	25.810.000	1	29.164.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**30.536.000**		**31.765.000**		**36.949.000**				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%		97.31%		97.63%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%		100%					
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%		25.00%					
			Jumlah Juara FASI	4		-		-					
			Jumlah Juara MTQ	1		2		2					
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta lomba	275	30.536.000	275 oran	31.765.000	275	36.949.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	66	Kota Layak Anak
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.18	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan**			**5.906.000**		**10.131.000**		**7.147.000**				
1	2.7.18.3	Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan	Jumlah aparatur kelurahan yang dibina	90	5.906.000	90 orang	10.131.000	90	7.147.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	44	Tema RKPD 2019
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**28.490.000**		**20.750.000**		**34.475.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,52941		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	30	13.164.000	60 orang	6.240.000	30	15.930.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	81	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
2	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK	12	15.326.000	12 Bulan	14.510.000	12	18.545.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	76	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**10.569.000**		**9.355.000**		**12.789.000**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan miras dan narkoba	60	10.569.000	90 orang	9.355.000	60	12.789.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**4.765.000**		**8.387.000**		**5.767.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan senam	4	4.765.000	4 kegiata	8.387.000	4	5.767.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**33.288.000**		**27.405.000**		**40.281.000**				
1	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Masyarakat dan pemangku kepentingan	125	14.187.000	125 oran	12.346.000	125	17.167.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Masyarakat dan pemangku kepentingan sejumlah 150 peserta	1	19.101.000	1 jenis do	15.059.000	1	23.114.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**			**10.582.000**		**9.206.000**		**12.806.000**				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	0		42.50%		0					
			Cakupan tim relawan siaga bencana	5,88		8,82		11,76					
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	50%		75%		100%					
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	50%		75%		100%					
			Cakupan penanganan korban becana	100%		100%		100%					
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%		17,64%		23,53%					
			#NAME?	2		3		4					
			#NAME?	0		0		0					
			#NAME?	0		0		0					
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada		ada		ada					
1	1.5.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta penyuluhan	60	10.582.000	90 orang	9.206.000	60	12.806.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	SDGs
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**13.790.000**		**12.754.000**		**16.686.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah peserta penyuluhan	90	13.790.000	90 orang	12.754.000	90	16.686.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak, SDGs
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**9.072.000**		**9.359.000**		**10.977.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah peserta penyuluhan	75	9.072.000	75 orang	9.359.000	75	10.977.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak, SDGs
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.17	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**			**0**		**10.027.000**		**0**				
			Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dalam mendukung kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	1 kelurahan									
1	2.7.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan			2 dokume	10.027.000		0	Kecamata Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**16.428.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya FKDM Kecamatan			4 kegiata	16.428.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	74	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**9.359.000**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Warga masyarakat Kec. Magelang Selatan			1 kegiata	9.359.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	SDGs
			TOTAL		**1.392.903.000**		**1.341.053.000**		**1.685.446.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Selatan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**758.204.000**		**676.419.000**		**917.436.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	36.960.000	12 bulan	37.800.000	12	44.722.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah sarana informasi masyarakat melalui media cetak	15	3.168.000	12 buah	2.140.000	15	3.834.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	11	3.135.000	1 unit roc	2.325.000	11	3.794.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah petugas pengelola administrasi keuangan dan petugas pengelola administrasi barang milik daerah	54	390.230.000	54 orang	354.573.000	54	472.179.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
5	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	12	84.832.000	12 bulan	81.529.000	12	102.648.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	31.481.000	12 bulan	16.228.000	12	38.094.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12.290.000	12 bulan	5.410.000	12	14.871.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	7.823.000	12 bulan	4.674.000	12	9.466.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12	2.838.000	12 bulan	3.000.000	12	3.434.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya isi ulang tabung gas dan BBM Genset	12	4.362.000	12 bulan	4.440.000	12	5.278.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12	20.714.000	12 bulan	26.171.000	12	25.064.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7	74.459.000	8 kegiata	33810000	7	90.096.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya jumlah penjaga malam kantor	1	17.702.000	2 orang	39.192.000	1	21.421.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	terlaksananya pelayanan Terpadu Kecamatan	12	68.210.000	12 bulan	65.127.000	12	82.535.000	Kantor Kecamatan	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**149.172.000**		**198.721.000**		**180.501.000**				
1	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya pengelolaan sampah di masyarakat			1 unit	40.950.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi MKSB
2	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas bangunan yang dipelihara	100	5.709.000	150 M2	5.192.000	100	6.908.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	625	54.917.000	700 M2	47.419.000	625	66.450.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11	74.415.000	11 unit	64.260.000	11	90.043.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	26	7.014.000	25 unit (u	5.478.000	26	8.488.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	14	7.117.000	5 jenis	5.472.000	14	8.612.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.1.2.31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terlaksananya pengelolaan sampah organik di masyarakat			1 unit	29.950.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi MKSB
	4.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**119.660.000**		**75.069.000**		**144.794.000**				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12	26.176.000	12 lapora	14.872.000	12	31.674.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tesedianya rencana kerja OPD	2	22.437.000	2 dokume	20.285.000	2	27.149.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen RKA-OPD	2	32.885.000	2 dokume	23.249.000	2	39.790.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKj-IP OPD	1	13.836.000	1 dokume	5.949.000	1	16.742.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	1	11.723.000	1 dokume	4.307.000	1	14.185.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1	12.603.000	1 dokume	6.407.000	1	15.254.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**8.384.000**		**8.733.000**		**10.144.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	120	8.384.000	120 pese	8.733.000	120	10.144.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	76	Kota Layak Anak
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**15.563.000**		**15.144.000**		**18.832.000**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	76	15.563.000	76 orang	15.144.000	76	18.832.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.135.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kecamatan			1 kegiata	10.135.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	2,14	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik**											
	2.14.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**			**6.446.000**		**4.281.000**		**7.801.000**				
			Meningkatnya ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,9%					
			Persentase pemenuhan data statistik	95%		95%		95%					
1	2.14.15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya dokumen Kecamatan Dalam Angka tahun 2018	1	6.446.000	1 jenis do	4.281.000	1	7.801.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**93.170.000**		**89.524.000**		**112.736.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12	93.170.000	12 bulan	89.524.000	12	112.736.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**50.361.000**		**42.873.000**		**60.938.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	2	50.361.000	2 kegiata	42.873.000	2	60.938.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**			**9.984.000**		**7.272.000**		**12.082.000**				
			Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%		2%		1%					
1	2.8.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan	60	9.984.000	70 orang	7.272.000	60	12.082.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	SDGs
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**10.860.000**		**12.146.000**		**13.141.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan toleransi antar umat beragama	1	10.860.000	1 kegiata	12.146.000	1	13.141.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**24.101.000**		**25.810.000**		**29.164.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1	24.101.000	1 kegiata	25.810.000	1	29.164.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**30.536.000**		**31.765.000**		**36.949.000**				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%		97.31%		97.63%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%		100%					
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%		25.00%					
			Jumlah Juara FASI	4		-		-					
			Jumlah Juara MTQ	1		2		2					
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta lomba	275	30.536.000	275 oran	31.765.000	275	36.949.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	66	Kota Layak Anak
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.18	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan**			**5.906.000**		**10.131.000**		**7.147.000**				
1	2.7.18.3	Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan	Jumlah aparatur kelurahan yang dibina	90	5.906.000	90 orang	10.131.000	90	7.147.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	44	Tema RKPD 2019
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**28.490.000**		**20.750.000**		**34.475.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,52941		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	30	13.164.000	60 orang	6.240.000	30	15.930.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	81	Penanggulangan Kemiskinan, Program prioritas RPJM
2	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK	12	15.326.000	12 Bulan	14.510.000	12	18.545.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	76	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**10.569.000**		**9.355.000**		**12.789.000**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan miras dan narkoba	60	10.569.000	90 orang	9.355.000	60	12.789.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**4.765.000**		**8.387.000**		**5.767.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan senam	4	4.765.000	4 kegiata	8.387.000	4	5.767.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**33.288.000**		**27.405.000**		**40.281.000**				
1	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Masyarakat dan pemangku kepentingan	125	14.187.000	125 oran	12.346.000	125	17.167.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
2	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Masyarakat dan pemangku kepentingan sejumlah 150 peserta	1	19.101.000	1 jenis do	15.059.000	1	23.114.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**			**10.582.000**		**9.206.000**		**12.806.000**				
			Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	0		42.50%		0					
			Cakupan tim relawan siaga bencana	5,88		8,82		11,76					
			Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	50%		75%		100%					
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	50%		75%		100%					
			Cakupan penanganan korban becana	100%		100%		100%					
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%		17,64%		23,53%					
			#NAME?	2		3		4					
			#NAME?	0		0		0					
			#NAME?	0		0		0					
			Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada		ada		ada					
1	1.5.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta penyuluhan	60	10.582.000	90 orang	9.206.000	60	12.806.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	49	SDGs
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**13.790.000**		**12.754.000**		**16.686.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah peserta penyuluhan	90	13.790.000	90 orang	12.754.000	90	16.686.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak, SDGs
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**9.072.000**		**9.359.000**		**10.977.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah peserta penyuluhan	75	9.072.000	75 orang	9.359.000	75	10.977.000	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak, SDGs
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.17	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**			**0**		**10.027.000**		**0**				
			Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dalam mendukung kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	1 kelurahan									
1	2.7.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan			2 dokume	10.027.000		0	Kecamata Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**16.428.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya FKDM Kecamatan			4 kegiata	16.428.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	74	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**9.359.000**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Warga masyarakat Kec. Magelang Selatan			1 kegiata	9.359.000		0	Kecamatan Magelang Selatan	Dana Alokasi Umum	40	SDGs
			TOTAL		**1.392.903.000**		**1.341.053.000**		**1.685.446.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG tahun 2019

OPD : Kec Magelang Selatan Lokus Kelurahan Rejowinangun Selatan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**125.476.000**		**147.764.000**		**114.800.000**				
1	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya honor penjaga malam			12 bulan	19.631.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan speedy	12	20.160.000	12	24.000.000	12	22.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran pajak motor/kendaraan dinas	9 motor	2.500.000	9 motor	2.502.000	9 motor	3.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan	12	19.000.000	12 bulan	24.345.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	12	16.816.000	12	10.141.000	12	18.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	105	ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan & cetak	12	8.542.000	12	9.452.000	12	9.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan listrik kantor	12	1.500.000	12	2.500.000	12	2.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12	4.500.000	12	3.600.000	12	5.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan isi ulang tabung gas	12	713.000	12	1.364.000	12	800.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12	21.745.000	12	22.929.000	12	25.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1	30.000.000	1	27.300.000	1	30.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**113.706.000**		**28.566.000**		**71.000.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	1	10.165.000	1	7.984.000	1	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12	13.785.000	12	15.000.000	12	15.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12	10.090.000	12	5.582.000	12	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
4	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			0		0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	
5	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur		5	39.860.000	1	0	1	30.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1	39.806.000	1	0	1	2.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**18.337.000**		**10.309.000**		**19.500.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik PAUD & PMT bagi anak didik PAUD	1	18.337.000	1	10.309.000	1	19.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**6.907.000**		**5.821.000**		**7.200.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan Linmas	45	6.907.000	45	5.821.000	45	7.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**6.980.000**		**6.037.000**		**7.200.000**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi	50	6.980.000	50	6.037.000	50	7.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**41.501.000**		**54.434.000**		**43.021.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kebersihan terwujud	12	31.021.000	12	44.034.000	12	31.021.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembangan kampung organik	1	10.480.000	1	10.400.000	1	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**31.471.000**		**35.013.000**		**33.000.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		12	4.390.000	12	0	12	5.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlayani masyarakat dalam bidang kependudukan	12	27.081.000	12	35.013.000	12	28.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**10.834.000**		**20.447.000**		**12.000.000**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan bagi RTRW	82	10.834.000	82	11.254.000	82	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlantiknya RTRW			82 orang	9.193.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**30.884.000**		**32.872.000**		**31.000.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terbayarnya honor petugas perpustakaan & kebutuhan Perpustakaan	12	30.884.000	12	32.872.000	12	31.000.000	Perpustakaan PKK Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**9.340.000**		**9.109.000**		**9.500.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile Kelurahan	1	9.340.000	1	9.109.000	1	9.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**125.310.000**		**186.874.000**		**130.000.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terbayarnya honor RTRW	12	125.310.000	12	186.874.000	12	130.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**5.667.000**		**6.909.000**		**6.000.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya lomba K3	1	5.667.000	1	6.909.000	1	6.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**5.560.000**		**6.176.000**		**6.000.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan karang taruna	1	5.560.000	1	6.176.000	1	6.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**23.165.000**		**23.165.000**		**24.500.000**				
					839,992,000				917,944,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya arsip / dokumen kantor	12	23.165.000	12	23.165.000	12	24.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.16	**Program Kerjasama Pembangunan**			**13.210.000**		**12.353.000**		**14.000.000**				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3		4		4					
1	4.3.16.4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terlaksananya rapat RT,RW,LPM dan Perangkat Kelurahan	4	13.210.000	4	12.353.000	4	14.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**15.646.000**		**30.906.000**		**16.000.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Hari Jadi Kota Magelang	1	15.646.000	1	12.053.000	1	16.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Sosialisasi			2 kegiata	9.528.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	64	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya toleransi			1 kegiata	9.325.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**11.329.000**		**12.000.000**		**12.000.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval	1	11.329.000	1	12.000.000	1	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**7.254.000**		**8.743.000**		**7.500.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kerja bhakti se RW Kelurahan Rejowinangun Selatan	15	7.254.000	15	8.743.000	15	7.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			**6.243.000**		**5.522.000**		**6.500.000**				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		98%		98%					
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan	1	6.243.000	1	5.522.000	1	6.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**7.049.000**		**7.629.000**		**7.200.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan	1	7.049.000	1	7.629.000	1	7.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**20.273.000**		**22.000.000**		**22.000.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Ikut berpartisipasi dalam PORKEL antar Kelurahan	1	20.273.000	1	22.000.000	1	22.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**15.376.000**		**20.340.000**		**18.200.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya MUSRENBANG	120	11.368.000	120	15.428.000	120	14.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey	1	4.008.000	1	4.912.000	1	4.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**9.630.000**		**13.103.000**		**9.800.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya penyuluhan	45	9.630.000	45	13.103.000	45	9.800.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.2.22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				4 ok			0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**5.061.000**		**5.300.000**		**5.300.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya taman kantor	1	5.061.000	1	5.300.000	1	5.300.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**			**6.875.000**		**6.800.000**		**7.000.000**				
			Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	58,82%		64,71%		70,59%					
1	1.2.28.12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	Terlaksananya lomba administrasi DAWIS	1	6.875.000	1	6.800.000	1	7.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**22.003.000**		**13.970.000**		**22.500.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemberian PMT untuk balita	15	22.003.000	15	13.970.000	15	22.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**14.215.000**		**6.525.000**		**14.500.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.6	Pelayanan kesehatan	Pemberian PMT untuk lansia	10	14.215.000	10	6.525.000	10	14.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Penanggulangan Kemiskinan
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**5.270.000**		**5.200.000**		**5.500.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya penyuluhan	35	5.270.000	35	5.200.000	35	5.500.000	Masyarakat sehat	Dana Alokasi Umum	100	Penanggulangan Kemiskinan
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan**			**0**		**111.675.000**		**0**				
1	1.3.34.31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I			0	1 kegiata	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.3.34.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Jalan RW. 4		0	1 kegiata	40.050.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
3	1.3.34.35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V			0	1 kegiata	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
4	1.3.34.39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX			0		0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	95	
5	1.3.34.49	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV			0		0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	95	
6	1.3.34.53	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII			0	1 kegiata	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi MKSB
7	1.3.34.55	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terpeliharanya saluran drainase rw. 10		0		19.125.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	95	
8	1.3.34.92	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan				1 kegiata	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
9	1.3.34.44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	Terpeliharanya jalan RW. 14		0	1 kegiata	11.250.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi MKSB
10	1.3.34.50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V				1 kegiatan			0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.3.34.51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya infrstruktur			P.25 MD.	14.875.000		0	RT. 4 RW. VI	Dana Alokasi Umum	99	Akomodasi Musrenbang
12	1.3.34.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya infrstruktur jalan			P 70M2	15.750.000		0	RT. 2, 4, 5, 6	Dana Alokasi Umum	70	Akomodasi Musrenbang
13	1.3.34.52	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya infrstruktur			P.25 MD.	10.625.000		0	RT.04	Dana Alokasi Umum	99	Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**0**		**18.450.000**		**0**				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100		100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100		100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31		<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Tersedianya tambahan makanan untuk balita dan lansia			8280 PM	18.450.000		0	Posyandu balita dan lansia Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperc		12 kali/ 5 agama dan keperc		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan			12 bulan	10.000.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**10.000.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Forum anak			1 kegiata	10.000.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	84	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**14.803.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Pertemuan FKDM			1 kegiata	14.803.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	85	Akomodasi Musrenbang
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**33.699.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,52941		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)			12 bulan	33.699.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	74	Memperkuat Implementasi MKSB
			TOTAL		**714.572.000**		**942.514.000**		**682.721.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kec Magelang Selatan Lokus Kelurahan Rejowinangun Selatan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**125.476.000**		**147.764.000**		**114.800.000**				
1	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya honor penjaga malam			12 bulan	19.631.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan speedy	12	20.160.000	12	24.000.000	12	22.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran pajak motor/kendaraan dinas	9 motor	2.500.000	9 motor	2.502.000	9 motor	3.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan	12	19.000.000	12 bulan	24.345.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	12	16.816.000	12	10.141.000	12	18.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	105	ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan & cetak	12	8.542.000	12	9.452.000	12	9.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan listrik kantor	12	1.500.000	12	2.500.000	12	2.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12	4.500.000	12	3.600.000	12	5.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan isi ulang tabung gas	12	713.000	12	1.364.000	12	800.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12	21.745.000	12	22.929.000	12	25.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1	30.000.000	1	27.300.000	1	30.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**113.706.000**		**28.566.000**		**71.000.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	1	10.165.000	1	7.984.000	1	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12	13.785.000	12	15.000.000	12	15.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12	10.090.000	12	5.582.000	12	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
4	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			0		0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	
5	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur		5	39.860.000	1	0	1	30.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1	39.806.000	1	0	1	2.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**18.337.000**		**10.309.000**		**19.500.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik PAUD & PMT bagi anak didik PAUD	1	18.337.000	1	10.309.000	1	19.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**6.907.000**		**5.821.000**		**7.200.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan Linmas	45	6.907.000	45	5.821.000	45	7.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**6.980.000**		**6.037.000**		**7.200.000**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi	50	6.980.000	50	6.037.000	50	7.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	101	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**41.501.000**		**54.434.000**		**43.021.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kebersihan terwujud	12	31.021.000	12	44.034.000	12	31.021.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembangan kampung organik	1	10.480.000	1	10.400.000	1	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**31.471.000**		**35.013.000**		**33.000.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		12	4.390.000	12	0	12	5.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlayani masyarakat dalam bidang kependudukan	12	27.081.000	12	35.013.000	12	28.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**10.834.000**		**20.447.000**		**12.000.000**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan bagi RTRW	82	10.834.000	82	11.254.000	82	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlantiknya RTRW			82 orang	9.193.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**30.884.000**		**32.872.000**		**31.000.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terbayarnya honor petugas perpustakaan & kebutuhan Perpustakaan	12	30.884.000	12	32.872.000	12	31.000.000	Perpustakaan PKK Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**9.340.000**		**9.109.000**		**9.500.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile Kelurahan	1	9.340.000	1	9.109.000	1	9.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**125.310.000**		**186.874.000**		**130.000.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terbayarnya honor RTRW	12	125.310.000	12	186.874.000	12	130.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**5.667.000**		**6.909.000**		**6.000.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya lomba K3	1	5.667.000	1	6.909.000	1	6.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**5.560.000**		**6.176.000**		**6.000.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan karang taruna	1	5.560.000	1	6.176.000	1	6.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**23.165.000**		**23.165.000**		**24.500.000**				
					839,992,000				917,944,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya arsip / dokumen kantor	12	23.165.000	12	23.165.000	12	24.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.16	**Program Kerjasama Pembangunan**			**13.210.000**		**12.353.000**		**14.000.000**				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3		4		4					
1	4.3.16.4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terlaksananya rapat RT,RW,LPM dan Perangkat Kelurahan	4	13.210.000	4	12.353.000	4	14.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**15.646.000**		**30.906.000**		**16.000.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Hari Jadi Kota Magelang	1	15.646.000	1	12.053.000	1	16.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.5.17.6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Sosialisasi			2 kegiata	9.528.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	64	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya toleransi			1 kegiata	9.325.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**11.329.000**		**12.000.000**		**12.000.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval	1	11.329.000	1	12.000.000	1	12.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**7.254.000**		**8.743.000**		**7.500.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kerja bhakti se RW Kelurahan Rejowinangun Selatan	15	7.254.000	15	8.743.000	15	7.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			**6.243.000**		**5.522.000**		**6.500.000**				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		98%		98%					
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan	1	6.243.000	1	5.522.000	1	6.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**7.049.000**		**7.629.000**		**7.200.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan	1	7.049.000	1	7.629.000	1	7.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**20.273.000**		**22.000.000**		**22.000.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Ikut berpartisipasi dalam PORKEL antar Kelurahan	1	20.273.000	1	22.000.000	1	22.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**15.376.000**		**20.340.000**		**18.200.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya MUSRENBANG	120	11.368.000	120	15.428.000	120	14.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey	1	4.008.000	1	4.912.000	1	4.200.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**9.630.000**		**13.103.000**		**9.800.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya penyuluhan	45	9.630.000	45	13.103.000	45	9.800.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.2.22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				4 ok			0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**5.061.000**		**5.300.000**		**5.300.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya taman kantor	1	5.061.000	1	5.300.000	1	5.300.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**			**6.875.000**		**6.800.000**		**7.000.000**				
			Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	58,82%		64,71%		70,59%					
1	1.2.28.12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	Terlaksananya lomba administrasi DAWIS	1	6.875.000	1	6.800.000	1	7.000.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**22.003.000**		**13.970.000**		**22.500.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemberian PMT untuk balita	15	22.003.000	15	13.970.000	15	22.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**14.215.000**		**6.525.000**		**14.500.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.6	Pelayanan kesehatan	Pemberian PMT untuk lansia	10	14.215.000	10	6.525.000	10	14.500.000	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Penanggulangan Kemiskinan
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**5.270.000**		**5.200.000**		**5.500.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya penyuluhan	35	5.270.000	35	5.200.000	35	5.500.000	Masyarakat sehat	Dana Alokasi Umum	100	Penanggulangan Kemiskinan
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan**			**0**		**111.675.000**		**0**				
1	1.3.34.31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I			0	1 kegiata	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.3.34.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Jalan RW. 4		0	1 kegiata	40.050.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
3	1.3.34.35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V			0	1 kegiata	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
4	1.3.34.39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX			0		0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	95	
5	1.3.34.49	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV			0		0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	95	
6	1.3.34.53	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII			0	1 kegiata	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi MKSB
7	1.3.34.55	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terpeliharanya saluran drainase rw. 10		0		19.125.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	95	
8	1.3.34.92	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan				1 kegiata	0		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi MKSB
9	1.3.34.44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	Terpeliharanya jalan RW. 14		0	1 kegiata	11.250.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi MKSB
10	1.3.34.50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V				1 kegiatan			0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	75	Memperkuat Implementasi MKSB

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.3.34.51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya infrstruktur			P.25 MD.	14.875.000		0	RT. 4 RW. VI	Dana Alokasi Umum	99	Akomodasi Musrenbang
12	1.3.34.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya infrstruktur jalan			P 70M2	15.750.000		0	RT. 2, 4, 5, 6	Dana Alokasi Umum	70	Akomodasi Musrenbang
13	1.3.34.52	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya infrstruktur			P.25 MD.	10.625.000		0	RT.04	Dana Alokasi Umum	99	Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**0**		**18.450.000**		**0**				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100		100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100		100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31		<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Tersedianya tambahan makanan untuk balita dan lansia			8280 PM	18.450.000		0	Posyandu balita dan lansia Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperc		12 kali/ 5 agama dan keperc		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan			12 bulan	10.000.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**10.000.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Forum anak			1 kegiata	10.000.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	84	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**14.803.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Pertemuan FKDM			1 kegiata	14.803.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	85	Akomodasi Musrenbang
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**33.699.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,52941		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)			12 bulan	33.699.000		0	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Dana Alokasi Umum	74	Memperkuat Implementasi MKSB
			TOTAL		**714.572.000**		**942.514.000**		**682.721.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kecamatan Magelang selatan -Kelurahan Magersari
URUSAN : Adminitrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**149.239.000**		**185.753.000**		**149.239.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terfasilitasinya ketersediaan jasa komunikasi , sumber daya listrik dan air	12	27.240.000	12 bulan	27.240.000	12	27.240.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya ketersediaan perizinan kendaraan dinas / operasional	1	3.150.000	1 mobil s	3.136.000	12	3.150.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kebersihan kantor	12	39.678.000	12 bulan	40.420.000	12	39.678.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	88	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12	12.000.000	12 bulan	10.141.000	12	12.000.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	5.756.000	12	5.411.000	12	5.756.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	83	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor		1.159.000	12 bulan	1.159.000		1.159.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	83	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya ketersediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	12	3.780.000	12	4.248.000	12	3.780.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	99	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terfasilitasi ketersediaan barang logistik kanton (BBM Potong Rumput ,Tabung Pemadam Kebakaran & Isi Ulang Gas Elpiji)	12	2.336.000	12	2.782.000	12	2.336.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	99	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat dan tamu	12	24.140.000	12	24.738.000	12	24.140.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	79	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5	30.000.000	5	27.216.000	5	30.000.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	84	Pokok Pikiran DPRD
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak / Honorer / Tidak Tetap			2 Orang P	39.262.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	100	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**80.705.000**		**29.455.000**		**26.505.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Magersari dan Gedung Riyadi	1060	60.000.000	1060	5.446.000	1060	5.800.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	99	SDGs
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 7 unit (roda dua)	12	19.755.000	12	21.297.000	12	19.755.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	99	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
3	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Telepon , Sound System , TV , LCD)	5	950.000	5	812.000	5	950.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor (Pemeliharaan komputer,printer dan laptop)			6 unit	1.900.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**4.728.000**		**5.051.000**		**4.728.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya pendidikan anak usia dini	1	4.728.000	1	5.051.000	1	4.728.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	79	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**36.232.000**		**6.380.000**		**21.796.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya pengetahuan linmas	12	36.232.000	12	6.380.000	12	21.796.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	99	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**108.246.000**		**103.559.000**		**83.646.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terselanggaranya pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	12	96.016.000	12	90.376.000	12	71.416.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Tersedianya Pengelolaan Persampahan & Berkembangnya Kampung Organik di RW-RW	1	12.230.000	1	13.183.000	1	12.230.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**17.905.000**		**48.080.000**		**17.905.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik administrasi	12	17.905.000	12	48.080.000	12	17.905.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**7.671.000**		**13.330.000**		**7.671.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dan mendukung tertib adminstrasi kependudukan bagi masyarakat	88	7.671.000	88	7.880.000	88	7.671.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya Pelantikan Rt / Rw			75 ketua	5.450.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	44	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**18.000.000**		**22.462.000**		**18.000.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya Pelayanan Perpustakaan Masyarakat	12	18.000.000	2 orang	22.462.000	12	18.000.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	45	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**1.962.000**		**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya Data / Informasi Profile Kelurahan Magersari		0	1 buku	1.962.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	99	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**4.358.000**		**5.660.000**		**4.358.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan kader kesehatan tentang WPA	40	4.358.000	30	5.660.000	40	4.358.000	kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**159.136.000**		**225.137.000**		**159.136.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya koordinasi Stabilitas Kantrantibmas	12	159.136.000	12	225.137.000	12	159.136.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**7.479.000**		**6.731.000**		**7.479.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui lomba k3	1	7.479.000	1	6.731.000	1	7.479.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**10.444.000**		**10.244.000**		**10.444.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan organisasi pemuda	30	10.444.000	30	10.244.000	30	10.444.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	45	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**13.271.000**		**16.194.000**		**13.271.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan dan penataan arsip daerah di Kelurahan Magersari	12	13.271.000	12	16.194.000	12	13.271.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	39	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**18.378.000**		**26.202.000**		**18.378.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya malam tirakatan dan HUT Kota Magelang	2	18.378.000	2	19.712.000	2	18.378.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatan toleransi dan kerukunan beragama			1 Kegiata	6.490.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**11.270.000**		**31.430.000**		**11.270.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	terbinanya grup kesenian			6 kesenia	16.890.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	100	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya	1	11.270.000	1	14.540.000	1	11.270.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**15.010.000**		**19.760.000**		**15.010.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya upaya untuk mendukung palaksanaan BBGRM	2	15.010.000	2	19.760.000	2	15.010.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			**18.950.000**		**18.817.000**		**18.950.000**				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		98%		98%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.19.6	Kader piket bersama dawis	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pola hidup sehat di masyarakat	13	18.950.000	12 bulan	18.817.000	13	18.950.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	70	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**14.935.000**		**16.036.000**		**14.935.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya dan terlakasananya pengiriman Atlet Porkel Kelurahan Magersari sehingga terwujudnya kesehatan jasmani masyarakat	4	14.935.000	4	16.036.000	4	14.935.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	39	Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**16.972.000**		**16.176.000**		**16.972.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan Magersari	130	11.422.000	130	11.442.000	130	11.422.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	95	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perencanaan pembangunan (Jumlah Lokasi Survey di 13 RW Kelurahan Magersari)	13	5.550.000	13 RW	4.734.000	13	5.550.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	95	Akomodasi Musrenbang
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**15.400.000**		**26.660.000**		**15.400.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau & Taman Lingkungan	3	15.400.000	3	26.660.000	3	15.400.000	Halaman kantor Kelurahan Magersari dan lereng gunung	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**5.060.000**		**4.973.000**		**5.060.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya Penyuluhan Kesehatan anak Balita	40	5.060.000	40	4.973.000	40	5.060.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	50	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**4.710.000**		**4.874.000**		**4.710.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya Status kesehatan Lansia	40	4.710.000	40	4.874.000	40	4.710.000	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	45	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.35	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari**			**0**		**68.900.000**		**0**				
1	1.3.35.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	terpeliharanya Saluran drainase dan gorong-gorong			30 m2	34.500.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	100	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.35.25	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terpeliharanya saluran drainase dan gorong-gorong RW XII			60 m2	34.400.000		0	RW XII Tidar Baru	Dana Alokasi Umum	100	SDGs
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**6.220.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperc		12 kali/ 5 agama dan keperc		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi			12 Kegiat	6.220.000		0	Kelurahn Magersari	Dana Alokasi Umum	85	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**12.560.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terbentuknya Forum Anak Kelurahan Magersari			25 anak	3.290.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	59	Kota Layak Anak
2	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya KIM di Kelurahan Magersari			25 orang	9.270.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	101	Kota Layak Anak
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**			**0**		**29.957.000**		**0**				
					2,558,688,000				6,135,402,000				
			Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4		5		5					
			Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	71%		77%		83%					
1	2.13.21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya Lapangan volly di Kelurahan Magersari			1 unit lap	29.957.000		0	Halaman Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	59	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**5.530.000**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	30 kader			1 Kegiata	5.530.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	59	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**8.054.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terciptanya Keamanan Lingkungan			Masyara	8.054.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**10.566.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,52941		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasi Pelayanan Masyarakat melalui kegiatan untk mendukung peningkatan peran perempuan di kelurahan			12 Kegiat	10.566.000		0	Kelurahan Magersari	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
			TOTAL		**738.099.000**		**986.713.000**		**644.863.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kercamatan Magelang Selatan-Kelurahan Jurangombo Utara
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**120.874.600**		**127.867.000**		**146.257.546**				
1	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianyan jasa keamanan kantor kelurahan			1 orang	19.631.000		0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas	12	23.232.000	12 bulan	18.000.000	12	28.110.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	9	1.925.000	9 Kendaraa	2.463.000	9	2.329.250	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12	20.279.600	12 bulan	22.517.000	12	24.538.316	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	8.800.000	12 bulan	8.500.000	12	10.648.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12	6.600.000	12 bulan	5.400.000	12	7.986.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan kantor	12	1.650.000	12 bulan	1.845.000	12	1.996.500	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	12	4.422.000	12 bulan	4.140.000	12	5.350.620	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman karyawan dan tamu	12	20.966.000	12 bulan	18.685.000	12	25.368.860	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	33.000.000	3 kegiatan	25.200.000	1	39.930.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
11	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, tabung pemadam kebakaran dan BBM Genset			12 bulan	1.486.000		0	kelurahan jurangombo utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**192.736.500**		**49.218.000**		**233.211.350**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor Kelurahan Jurangombo Utara			12 bulan	17.000.000		0	Kantor Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	83	ExBAU
2	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur		8	37.345.000	8	0	8	45.187.450	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	44	
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	7	21.301.500	7 unit	24.360.000	7	25.775.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12	3.520.000	3 Jenis	5.384.000	12	4.259.200	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.2.33	Pengadaan Papan Informasi		11	6.270.000	11	0	11	7.586.700	Pos Paud Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	40	
6	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			2 Jenis	2.474.000		0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1	38.500.000	1	0	1	46.585.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	74	
8	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		1	8.800.000	1	0	1	10.648.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	44	
9	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		1	22.000.000	1	0	1	26.620.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	
10	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1	55.000.000	1	0	1	66.550.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**4.248.200**		**4.411.000**		**5.140.322**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3	4.248.200	3 Pos PAUD	4.411.000	3	5.140.322	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**24.622.400**		**6.475.000**		**29.793.104**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	2	24.622.400	20 orang	6.475.000	2	29.793.104	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**62.612.000**		**81.240.000**		**75.760.520**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengangkutan sampah rutin	12	62.612.000	1 tahun	81.240.000	12	75.760.520	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**25.042.600**		**46.128.000**		**30.301.546**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12	25.042.600	12 bulan	46.128.000	12	30.301.546	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**7.595.500**		**13.668.000**		**9.190.555**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	1	7.595.500	45 orang	6.834.000	1	9.190.555	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	88	Rencana
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Pelantikan Ketua RT / RW se Kelurahan Jurangombo Utara			1 Kegiatan	6.834.000		0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	40	SDGs, Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**10.450.000**		**20.293.000**		**12.644.500**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12	10.450.000	12 bulan	20.293.000	12	12.644.500	Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	99	Kota Layak Anak
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**2.750.000**		**3.761.000**		**3.327.500**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen yang disusun	1	2.750.000	1 dokumen	3.761.000	1	3.327.500	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	84	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**76.934.000**		**115.026.000**		**93.091.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2	76.934.000	2 kegiatan	115.026.000	2	93.091.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**6.171.000**		**5.626.000**		**7.470.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	1	6.171.000	1 kegiatan	5.626.000	1	7.470.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	81	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Akomodasi Musrenbang
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**4.059.000**		**4.143.000**		**4.911.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang terbina	30	4.059.000	35 Orang	4.143.000	30	4.911.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**25.300.000**		**18.301.000**		**30.615.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12	25.300.000	12 bulan	18.301.000	12	30.615.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**10.428.000**		**19.011.000**		**12.620.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-luhur budaya bangsa	2	10.428.000	2 Kegiatan	13.158.000	2	12.620.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			1 Kegiatan	5.853.000		0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**11.434.500**		**11.250.000**		**13.835.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1	11.434.500	1 Kegiatan	11.250.000	1	13.835.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**9.504.000**		**9.114.000**		**11.500.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	9.504.000	1 kegiatan	9.114.000	1	11.500.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	89	SDGs, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**12.716.000**		**10.300.000**		**15.386.000**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan Kader PKK	2	12.716.000	2 kegiatan	10.300.000	2	15.386.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**13.277.000**		**13.100.000**		**16.065.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1	13.277.000	1 kegiatan	13.100.000	1	16.065.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.13.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**			**21.208.000**		**30.663.000**		**25.662.000**				
					2,558,688,000				6,135,402,000				
			Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	4		5		5					
			Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	71%		77%		83%					
1	2.13.21.7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga yang memadai	12	21.208.000	12 bulan	30.663.000	12	25.662.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**13.037.000**		**12.978.000**		**15.775.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan tahunan	1	9.526.000	1 jenis doku	8.910.000	1	11.526.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvey	4	3.511.000	8 lokasi	4.068.000	4	4.249.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**4.026.000**		**7.475.000**		**4.872.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah posyandu balita	6	4.026.000	6 posyandu	7.475.000	6	4.872.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	88	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**5.148.000**		**10.525.000**		**6.230.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah posyandu lansia	4	5.148.000	4 posyandu	10.525.000	4	6.230.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	101	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.3.36	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara**			**158.321.900**		**97.831.000**		**191.570.500**				
1	1.3.36.13	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Tersedianya saluran yang memadai			51,5 m2	35.730.000		0	RW. V Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.36.26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II		1	24.891.900	1	0	1	30.120.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	69	
3	1.3.36.27	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III		1	39.050.000	1	0	1	47.250.500	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.36.33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan		12	38.500.000	1 tahun	0	12	46.585.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	74	Rencana
5	1.3.36.36	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III		1	22.000.000	1	0	1	26.620.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	69	
6	1.3.36.41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII		1	17.380.000	1	0	1	21.030.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	69	
7	1.3.36.49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII		1	16.500.000	1	0	1	19.965.000	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	69	
8	1.3.36.38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Tersedianya jalan yang memadai			58,2 m2	15.518.000		0	RW. V Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	1.3.36.20	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Tersedianya saluran yang memadai			50 m2	34.850.000		0	RW. I Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	1.3.36.22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Tersedianya jalan yang memadai			44,2 m2	11.733.000		0	RW. VI Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan			2 kegiatan	10.000.000		0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	101	Akomodasi Musrenbang
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**0**		**3.510.000**		**0**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH			12 bulan	3.510.000		0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi MKSB
2	2.5.24.5	Penataan RTH				1	0		0	Lapangan depan SMPN 7 Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Kota Sejuta Bunga
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**5.714.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Fasilitasi forum WPA			1 Kegiatan	5.714.000		0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	94	Penanggulangan Kemiskinan
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**8.025.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya Forum Anak Kelurahan			30 anak	8.025.000		0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak, SDGs
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**10.300.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK			2 kegiatan	10.300.000		0	Kelurahan Jurangombo Utara	Dana Alokasi Umum	84	SDGs
			TOTAL		**822.496.200**		**755.953.000**		**995.229.443**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Selatan-Kelurahan Jurangombo Selatan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**173.191.000**		**158.164.000**		**209.567.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	40.920.000	12 bulan	28.920.000	12	49.514.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi perijinan kendaraan operasional dinas	10	2.636.000	9 unit	2.543.000	10	3.190.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12	39.815.000	12 bulan	40.978.000	12	48.177.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	17.626.000	12 bulan	10.142.000	12	21.328.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12	6.050.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12	1.339.000	12 bulan	1.980.000	12	1.621.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	4.686.000	12 bulan	4.140.000	12	5.671.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, tabung pemadam dan bbm genset	12	719.000	12 bulan	2.132.000	12	871.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12	27.450.000	12 bulan	19.504.000	12	33.215.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	33.000.000	3 kegiatan	24.393.000	1	39.930.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Penjaga Malam			12 bulan	18.432.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatam	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**238.900.000**		**53.550.000**		**161.838.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	200	53.345.000	1.000 m2	23.531.000	200	24.216.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	7	20.580.000	7 unit	20.412.000	7	24.902.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	15	9.975.000	6 unit	5.483.000	15	12.070.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
4	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		200	150.000.000	100 m2	0	200	94.600.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100	5.000.000	4 unit	4.124.000	100	6.050.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.406.000**		**6.508.000**		**6.545.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3	5.406.000	3 PAUD	6.508.000	3	6.545.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**9.174.000**		**8.116.000**		**11.102.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	45	9.174.000	45 orang	8.116.000	45	11.102.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**72.600.000**		**93.844.000**		**87.846.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengangkutan sampah rutin	12	72.600.000	1 tahun	81.131.000	12	87.846.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja kampung organik			2 Kampung	12.713.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	84	SDGs, Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Penanggulangan Kemiskinan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**30.906.000**		**49.143.000**		**37.397.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12	30.906.000	12 bulan	49.143.000	12	37.397.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**54.313.000**		**23.338.000**		**65.720.000**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan		1	11.836.000	1	0	1	14.322.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	57	42.477.000	57 orang	17.473.000	57	51.398.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	88	Rencana
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Ketua RT dan RW yang dilantik			57 orang	5.865.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	101	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**23.320.000**		**23.214.000**		**28.218.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12	23.320.000	12 bulan	23.214.000	12	28.218.000	Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	99	Kota Layak Anak
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**3.150.000**		**2.784.000**		**3.812.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen yang disusun	1	3.150.000	1 dokumen	2.784.000	1	3.812.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	84	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**94.352.000**		**135.876.000**		**114.667.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12	94.352.000	12 bulan	135.876.000	12	114.667.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**6.083.000**		**5.047.000**		**7.362.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang terbina	90	6.083.000	45 orang	5.047.000	90	7.362.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Kota Layak Anak
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**24.293.000**		**17.649.000**		**29.396.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12	24.293.000	12 bulan	17.649.000	12	29.396.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**17.908.000**		**29.050.000**		**21.670.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-luhur budaya bangsa	3	17.908.000	3 kegiatan	20.710.000	3	21.670.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			1 kegiatan	8.340.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**10.000.000**		**12.410.000**		**12.100.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1	10.000.000	1 kegiatan	12.410.000	1	12.100.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**18.662.000**		**18.862.000**		**22.582.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	9	18.662.000	3 kegiatan	18.862.000	9	22.582.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	89	SDGs, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**12.657.000**		**31.863.000**		**15.316.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1	12.657.000	5 cabang ol	31.863.000	1	15.316.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**16.979.000**		**17.480.000**		**20.545.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan	165	12.491.000	1 jenis doku	12.883.000	165	15.114.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvey	9	4.488.000	9 lokasi	4.597.000	9	5.431.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**5.500.000**		**4.922.000**		**6.655.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Fasilitasi forum WPA	2	5.500.000	1 kegiatan	4.922.000	2	6.655.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	94	Penanggulangan Kemiskinan
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**25.000.000**		**10.780.000**		**30.250.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	25.000.000	12 bulan	10.780.000	1	30.250.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	91	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**7.350.000**		**0**		**8.894.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita		12	7.350.000	12	0	12	8.894.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	88	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**5.566.000**		**0**		**6.736.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan		2	5.566.000	4	0	2	6.736.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	99	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.37	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan**			**36.750.000**		**110.200.000**		**79.468.000**				
1	1.3.37.37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan		9	36.750.000	1 kegiatan	0	9	44.468.000	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	95	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.37.33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Panjang saluran drainase yang dipeliharan		0	100 m	75.050.000	50	35.000.000	RW VI Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	85	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.37.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Panjang Jalan yang dipelihara			100 m	35.150.000		0	RW VI Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	100	Akomodasi Musrenbang
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**6.286.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya Forum Anak Kelurahan			20 Anak	6.286.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	91	Kota Layak Anak, SDGs
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**8.030.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya Pertemuan Kelompom KIM Tingkat Kelurahan			2 kegiatan	8.030.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	101	Akomodasi Musrenbang
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**5.520.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Anggota FKDM Kelurahan			20 orang	5.520.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	93	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**15.657.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kesejahteraan masyarakat			12 bulan	15.657.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	74	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**0**		**5.746.000**		**0**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah pembinaan organisasi SKD			12 bulan	5.746.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	50	SDGs
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**0**		**6.245.000**		**0**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lomba K3 Tingkat Kelurahan			1 kegiatan	6.245.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	81	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**0**		**15.180.000**		**0**				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100		100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100		100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31		<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah			390 balita d	15.180.000		0	Kelurahan Jurangombo Selatan	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak, SDGs
			TOTAL		**892.060.000**		**875.464.000**		**987.686.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016-2021

OPD : Kecamatan Magelang Selatan-Kelurahan Tidar Utara
URUSAN : Admiistrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**138.748.000**		**159.155.000**		**152.961.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	16.695.000	12 bulan	23.400.000	12	18.400.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas/ operasional	10	3.108.000	10 unit	2.717.000	10	3.426.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12	38.354.000	12 bulan	22.010.000	12	42.285.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	13.650.000	12 bulan	10.132.000	12	15.050.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	6.432.000	12 bulan	5.411.000	12	7.091.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	12	3.360.000	12 bulan	3.256.000	12	3.704.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12	3.780.000	12 bulan	4.140.000	12	4.167.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, BBM genset dan tabung pemadam kebakaran	12	1.575.000	12 bulan	1.884.000	12	1.736.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan, jamuan rapat kantor	12	20.294.000	12 bulan	19.149.000	12	22.374.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah	1	31.500.000	12 bulan	25.788.000	1	34.728.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya penjaga malam kantor			12 bulan	39.288.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana informasi masyarakat melalui media cetak			6 buah	1.980.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**66.939.000**		**51.350.000**		**73.800.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung kantor yang terpelihara	620	29.136.000	620 m2	13.543.000	620	32.122.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10	27.529.000	9 unit	29.706.000	10	30.351.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor yang dipelihara	18	10.274.000	8 unit	5.539.000	18	11.327.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			4 unit	2.562.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**7.717.000**		**7.583.000**		**8.508.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3	7.717.000	3 PAUD	7.583.000	3	8.508.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**0**		**6.365.000**		**0**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang mengikuti penyuluhan			65 orang	6.365.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**20.477.000**		**38.252.000**		**22.576.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja bank sampah dan kampung organik			2 kampung	13.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	84	SDGs, Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Penanggulangan Kemiskinan
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya fasilitas pengangkut sampah	12	20.477.000	1 tahun	25.252.000	12	22.576.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**14.910.000**		**49.421.000**		**16.438.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12	14.910.000	12 bulan	49.421.000	12	16.438.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	88	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**10.077.000**		**17.609.000**		**11.110.000**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	200	10.077.000	198 orang	9.622.000	200	11.110.000	Kel Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Ketua RT dan Ketua RW yang dilantik			68 orang	7.987.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	101	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**9.660.000**		**10.753.000**		**10.650.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan untuk masyarakat	12	9.660.000	12 bulan	10.753.000	12	10.650.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**19.456.000**		**20.058.000**		**21.450.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya dokumen profil kelurahan	1	19.456.000	1 dokumen	20.058.000	1	21.450.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	85	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**106.392.000**		**162.020.000**		**117.297.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai - nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya kegiatan koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12	106.392.000	12 bulan	162.020.000	12	117.297.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**4.924.000**		**5.350.000**		**5.429.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina	47	4.924.000	47 orang	5.350.000	47	5.429.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**18.060.000**		**24.780.000**		**19.910.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama	125	9.975.000	1 kegiatan	9.340.000	125	10.997.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	120	8.085.000	2 kegiatan	15.440.000	120	8.913.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**15.923.000**		**10.380.000**		**17.555.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah karnaval	2	15.923.000	1 kegiatan	10.380.000	2	17.555.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	76	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**12.327.000**		**11.069.000**		**13.590.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah peserta bulan bhakti gotong royong	13	12.327.000	13 RW	11.069.000	13	13.590.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	SDGs, Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**44.194.000**		**44.070.000**		**48.724.000**				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100		100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100		100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31		<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah lansia dan balita yang menerima makanan tambahan	1210	44.194.000	720 balita d	44.070.000	1210	48.724.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak, SDGs
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**14.893.000**		**27.604.000**		**16.419.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terselenggaranya PORKEL dan senam lansia	1	14.893.000	5 cabang ol	27.604.000	1	16.419.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**17.976.000**		**16.639.000**		**19.817.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang Kelurahan	140	11.235.000	1 jenis doku	12.339.000	140	12.386.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang di survey	13	6.741.000	13 lokasi	4.300.000	13	7.431.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**4.443.000**		**4.680.000**		**4.899.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan IMS	45	4.443.000	1 kegiatan	4.680.000	45	4.899.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**3.675.000**		**4.184.000**		**4.051.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	3.675.000	1 kegiatan	4.184.000	1	4.051.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara**			**310.000.000**		**308.000.000**		**25.000.000**				
1	1.3.38.31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Panjang jalan yang terpelihara			92 meter	20.500.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.38.36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Panjang jalan yang terpelihara		0	24 meter	6.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.38.50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	panjang saluran yang terpelihara	200	80.000.000	148 meter	32.600.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.38.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Panjang jalan yang terpelihara		0	72 meter	10.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.38.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	panjang saluran yang terpelihara	250	90.000.000	200 meter	90.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.3.38.42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	panjang saluran yang terpelihara	75	50.000.000	40 meter	16.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.38.44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V		120	90.000.000	0	0		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.38.53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan				13 RW	0		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	86	Akomodasi Musrenbang
9	1.3.38.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Panjang jalan yang terpelihara		0	320 meter	46.900.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
10	1.3.38.39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII	Panjang jalan yang terpelihara		0	250 meter	56.000.000	30	25.000.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
11	1.3.38.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	panjang saluran yang terpelihara		0	150 meter	30.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**22.320.000**		**17.898.000**		**24.608.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdatanya dan tertatanya dokumen arsip	12	22.320.000	12 bulan	17.898.000	12	24.608.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**7.550.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum anak kelurahan			2 kegiatan	7.550.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	94	Kota Layak Anak, SDGs
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**7.880.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan			2 kegiatan	7.880.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**0**		**0**		**0**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak				35 orang	0		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**6.348.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya sosialisasi			2 kegiatan	6.348.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	69	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			**0**		**0**		**0**				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		98%		98%					
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat				40 orang	0		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**17.160.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK dan masyarakat			12 bulan	17.160.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	50	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**0**		**5.824.000**		**0**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Lomba K3 tk. Kelurahan			1 kegiatan	5.824.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	81	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
			TOTAL		**863.111.000**		**1.041.982.000**		**634.792.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Selatan-Kelurahan Tidar Utara
URUSAN : Admiistrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**138.748.000**		**159.155.000**		**152.961.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	16.695.000	12 bulan	23.400.000	12	18.400.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas/ operasional	10	3.108.000	10 unit	2.717.000	10	3.426.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12	38.354.000	12 bulan	22.010.000	12	42.285.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	13.650.000	12 bulan	10.132.000	12	15.050.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	6.432.000	12 bulan	5.411.000	12	7.091.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	12	3.360.000	12 bulan	3.256.000	12	3.704.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12	3.780.000	12 bulan	4.140.000	12	4.167.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, BBM genset dan tabung pemadam kebakaran	12	1.575.000	12 bulan	1.884.000	12	1.736.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan, jamuan rapat kantor	12	20.294.000	12 bulan	19.149.000	12	22.374.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah	1	31.500.000	12 bulan	25.788.000	1	34.728.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya penjaga malam kantor			12 bulan	39.288.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
12	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana informasi masyarakat melalui media cetak			6 buah	1.980.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**66.939.000**		**51.350.000**		**73.800.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung kantor yang terpelihara	620	29.136.000	620 m2	13.543.000	620	32.122.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10	27.529.000	9 unit	29.706.000	10	30.351.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor yang dipelihara	18	10.274.000	8 unit	5.539.000	18	11.327.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			4 unit	2.562.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**7.717.000**		**7.583.000**		**8.508.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3	7.717.000	3 PAUD	7.583.000	3	8.508.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**0**		**6.365.000**		**0**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang mengikuti penyuluhan			65 orang	6.365.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**20.477.000**		**38.252.000**		**22.576.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja bank sampah dan kampung organik			2 kampung	13.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	84	SDGs, Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Penanggulangan Kemiskinan
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya fasilitas pengangkut sampah	12	20.477.000	1 tahun	25.252.000	12	22.576.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**14.910.000**		**49.421.000**		**16.438.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12	14.910.000	12 bulan	49.421.000	12	16.438.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	88	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**10.077.000**		**17.609.000**		**11.110.000**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	200	10.077.000	198 orang	9.622.000	200	11.110.000	Kel Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Ketua RT dan Ketua RW yang dilantik			68 orang	7.987.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	101	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**9.660.000**		**10.753.000**		**10.650.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan untuk masyarakat	12	9.660.000	12 bulan	10.753.000	12	10.650.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	75	Kota Layak Anak
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**19.456.000**		**20.058.000**		**21.450.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya dokumen profil kelurahan	1	19.456.000	1 dokumen	20.058.000	1	21.450.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	85	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**106.392.000**		**162.020.000**		**117.297.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai - nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya kegiatan koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12	106.392.000	12 bulan	162.020.000	12	117.297.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**4.924.000**		**5.350.000**		**5.429.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina	47	4.924.000	47 orang	5.350.000	47	5.429.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	100	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**18.060.000**		**24.780.000**		**19.910.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama	125	9.975.000	1 kegiatan	9.340.000	125	10.997.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	120	8.085.000	2 kegiatan	15.440.000	120	8.913.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**15.923.000**		**10.380.000**		**17.555.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah karnaval	2	15.923.000	1 kegiatan	10.380.000	2	17.555.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	76	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**12.327.000**		**11.069.000**		**13.590.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah peserta bulan bhakti gotong royong	13	12.327.000	13 RW	11.069.000	13	13.590.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	SDGs, Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.2.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**44.194.000**		**44.070.000**		**48.724.000**				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100		100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100		100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31		<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah lansia dan balita yang menerima makanan tambahan	1210	44.194.000	720 balita d	44.070.000	1210	48.724.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak, SDGs
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**14.893.000**		**27.604.000**		**16.419.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terselenggaranya PORKEL dan senam lansia	1	14.893.000	5 cabang ol	27.604.000	1	16.419.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**17.976.000**		**16.639.000**		**19.817.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang Kelurahan	140	11.235.000	1 jenis doku	12.339.000	140	12.386.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang di survey	13	6.741.000	13 lokasi	4.300.000	13	7.431.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**4.443.000**		**4.680.000**		**4.899.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan IMS	45	4.443.000	1 kegiatan	4.680.000	45	4.899.000	Kel. Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**3.675.000**		**4.184.000**		**4.051.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	3.675.000	1 kegiatan	4.184.000	1	4.051.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi MKSB
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara**			**310.000.000**		**308.000.000**		**25.000.000**				
1	1.3.38.31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Panjang jalan yang terpelihara			92 meter	20.500.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.38.36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Panjang jalan yang terpelihara		0	24 meter	6.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.38.50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	panjang saluran yang terpelihara	200	80.000.000	148 meter	32.600.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.38.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Panjang jalan yang terpelihara		0	72 meter	10.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.38.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	panjang saluran yang terpelihara	250	90.000.000	200 meter	90.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.38.42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	panjang saluran yang terpelihara	75	50.000.000	40 meter	16.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	90	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.38.44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V		120	90.000.000	0	0		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1.3.38.53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan				13 RW	0		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	86	Akomodasi Musrenbang
9	1.3.38.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Panjang jalan yang terpelihara		0	320 meter	46.900.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
10	1.3.38.39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII	Panjang jalan yang terpelihara		0	250 meter	56.000.000	30	25.000.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
11	1.3.38.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	panjang saluran yang terpelihara		0	150 meter	30.000.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**22.320.000**		**17.898.000**		**24.608.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdatanya dan tertatanya dokumen arsip	12	22.320.000	12 bulan	17.898.000	12	24.608.000	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**7.550.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum anak kelurahan			2 kegiatan	7.550.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	94	Kota Layak Anak, SDGs
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**7.880.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan			2 kegiatan	7.880.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**0**		**0**		**0**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak				35 orang	0		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**6.348.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya sosialisasi			2 kegiatan	6.348.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	69	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			**0**		**0**		**0**				
			Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%		98%		98%					
1	1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat				40 orang	0		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**17.160.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK dan masyarakat			12 bulan	17.160.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	50	SDGs, Penanggulangan Kemiskinan
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**0**		**5.824.000**		**0**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Lomba K3 tk. Kelurahan			1 kegiatan	5.824.000		0	Kelurahan Tidar Utara	Dana Alokasi Umum	81	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
			TOTAL		**863.111.000**		**1.041.982.000**		**634.792.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Selatan-Kelurahan Tidar Selatan
URUSAN : Kelurahan Tidar Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**169.358.000**		**148.650.000**		**183.322.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	25.000.000	12	21.480.000	12	26.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas operasional	8	2.500.000	7 kendaraan	2.321.000	10	3.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya petugas kebersihan kantor	12	24.036.000	12 bulan	21.440.000	12	26.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12	15.000.000	12 bulan	10.142.000	12	17.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	5.000.000	12	5.411.000	12	6.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	2.000.000	12 bulan	2.500.000	12	2.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	4.200.000	12	4.140.000	12	4.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya tabung gas selama 1 tahun	12	750.000	12	1.436.000	12	850.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	21.000.000	12 bulan	34.940.000	12	23.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	35.000.000	2	25.200.000	12	39.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak	2	34.872.000	12 bulan	19.640.000	2	34.872.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**131.200.000**		**30.452.000**		**25.600.000**				
1	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	8	17.500.000	7 kendaraan	14.202.000	10	18.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4	1.200.000	4	3.000.000	4	1.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4	5.000.000	4	4.000.000	4	6.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
4	4.1.2.3	Pembangunan gedung kantor				1	0		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1	100.000.000	2	9.250.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
6	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		13	7.500.000	1	0		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**6.500.000**		**4.128.000**		**7.500.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini	2	6.500.000	2	4.128.000	2	7.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**7.000.000**		**5.445.000**		**7.600.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	75	7.000.000	70	5.445.000	75	7.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**37.312.000**		**57.091.000**		**39.000.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	12	29.000.000	12 bulan	43.271.000	12	30.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	1	8.312.000	1	13.820.000	1	9.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**15.000.000**		**75.982.000**		**16.000.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat	12	15.000.000	12	75.982.000	12	16.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**11.900.000**		**12.624.000**		**12.900.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terwujudnya budaya baca masyarakat	12	11.900.000	12	12.624.000	12	12.900.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**4.000.000**		**2.813.000**		**4.600.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terwujudnya data/informasi sebagai dokumen perencanaan yang aktual	1	4.000.000	1	2.813.000	1	4.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**90.000.000**		**140.085.000**		**90.000.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12	90.000.000	12	140.085.000	12	90.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**6.700.000**		**11.607.000**		**7.200.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan	40	6.700.000	40	11.607.000	40	7.200.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**21.258.000**		**22.360.000**		**21.258.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi dokumen	12	21.258.000	12	22.360.000	12	21.258.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**24.400.000**		**32.928.000**		**25.800.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	1	8.840.000	1	9.120.000	1	9.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	2	15.560.000	2	23.808.000	2	16.300.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**13.500.000**		**17.955.000**		**14.500.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya daerah	2	13.500.000	2	17.955.000	2	14.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**10.000.000**		**10.620.000**		**11.000.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong	12	10.000.000	12	10.620.000	12	11.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**25.000.000**		**0**		**26.000.000**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		12	25.000.000	12	0	12	26.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**12.840.000**		**19.800.000**		**13.300.000**				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100		100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100		100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31		<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Meningkatnya kesehatan masyarakat	24	12.840.000	24	19.800.000	24	13.300.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**13.500.000**		**18.014.000**		**14.500.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pemasyarakatan olahraga	1	13.500.000	1	18.014.000	1	14.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**12.880.000**		**16.730.000**		**14.500.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terwujdunya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	100	10.500.000	100	11.640.000	100	11.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terwujdunya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	12	2.380.000	12 RW	5.090.000	12	3.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**5.933.000**		**6.040.000**		**6.700.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terciptanya ruang terbuka hijau	1	5.933.000	1	6.040.000	1	6.700.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.39	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan**			**176.090.000**		**123.250.000**		**40.000.000**				
1	1.3.39.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan		12	35.000.000	12 bulan	0	12	40.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	83	Rencana
2	1.3.39.8	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpenuhinya pemeliharaan jalan			50 m	27.250.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	91	Rencana
3	1.3.39.16	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terwujudnya infrastruktur perdesaan	187	141.090.000	179 m	31.000.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
4	1.3.39.7	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpenuhinya pemeliharaan saluranjalan			55,5 m	30.000.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	91	Rencana
5	1.3.39.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpenuhinya pemeliharaan saluran			18 m	35.000.000		0	RW. II Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**7.000.000**		**10.490.000**		**8.000.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terwujudnya kesehatan masyarakat	1	7.000.000	1	10.490.000	1	8.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**164.995.000**		**76.294.000**		**0**				
1	1.3.30.19	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	Terbangunnya pagar makam RW. III dan RW. VI	42 dan 60	164.995.000	100,8 m	76.294.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**0**		**13.184.000**		**0**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terpenuhinya Pembinaan Administrasi RT/RW			62	5.539.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	81	Rencana
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya Pelantikan RT dan RW			1 kegiatan	7.645.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**8.974.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya KIM di Kelurahan Tidar Selatan			2 kegiatan	8.974.000		0	Kelurahan Tidar selatan	Dana Alokasi Umum	69	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**28.634.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya PKK Rutin			60 orang	28.634.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**9.166.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya Sosialisasi Forum Anak di Kelurahan Tidar Selatan			30 anak	9.166.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Kota Layak Anak
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**0**		**0**		**0**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				12 RW	0		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**8.437.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketertiban dan keamanan			1 kegiatan	8.437.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
			TOTAL		**966.366.000**		**911.753.000**		**589.280.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Selatan-Kelurahan Tidar Selatan
URUSAN : Kelurahan Tidar Selatan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**169.358.000**		**148.650.000**		**183.322.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	25.000.000	12	21.480.000	12	26.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas operasional	8	2.500.000	7 kendaraan	2.321.000	10	3.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya petugas kebersihan kantor	12	24.036.000	12 bulan	21.440.000	12	26.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12	15.000.000	12 bulan	10.142.000	12	17.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	5.000.000	12	5.411.000	12	6.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	2.000.000	12 bulan	2.500.000	12	2.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	4.200.000	12	4.140.000	12	4.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya tabung gas selama 1 tahun	12	750.000	12	1.436.000	12	850.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	21.000.000	12 bulan	34.940.000	12	23.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	35.000.000	2	25.200.000	12	39.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak	2	34.872.000	12 bulan	19.640.000	2	34.872.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**131.200.000**		**30.452.000**		**25.600.000**				
1	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	8	17.500.000	7 kendaraan	14.202.000	10	18.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	54	Rencana
2	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4	1.200.000	4	3.000.000	4	1.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4	5.000.000	4	4.000.000	4	6.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
4	4.1.2.3	Pembangunan gedung kantor				1	0		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1	100.000.000	2	9.250.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
6	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		13	7.500.000	1	0		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**6.500.000**		**4.128.000**		**7.500.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini	2	6.500.000	2	4.128.000	2	7.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**7.000.000**		**5.445.000**		**7.600.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	75	7.000.000	70	5.445.000	75	7.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**37.312.000**		**57.091.000**		**39.000.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	12	29.000.000	12 bulan	43.271.000	12	30.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	1	8.312.000	1	13.820.000	1	9.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**15.000.000**		**75.982.000**		**16.000.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat	12	15.000.000	12	75.982.000	12	16.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**11.900.000**		**12.624.000**		**12.900.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terwujudnya budaya baca masyarakat	12	11.900.000	12	12.624.000	12	12.900.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**4.000.000**		**2.813.000**		**4.600.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terwujudnya data/informasi sebagai dokumen perencanaan yang aktual	1	4.000.000	1	2.813.000	1	4.600.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**90.000.000**		**140.085.000**		**90.000.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12	90.000.000	12	140.085.000	12	90.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**6.700.000**		**11.607.000**		**7.200.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan	40	6.700.000	40	11.607.000	40	7.200.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**21.258.000**		**22.360.000**		**21.258.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi dokumen	12	21.258.000	12	22.360.000	12	21.258.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**24.400.000**		**32.928.000**		**25.800.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	1	8.840.000	1	9.120.000	1	9.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	2	15.560.000	2	23.808.000	2	16.300.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**13.500.000**		**17.955.000**		**14.500.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya daerah	2	13.500.000	2	17.955.000	2	14.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**10.000.000**		**10.620.000**		**11.000.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong	12	10.000.000	12	10.620.000	12	11.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**25.000.000**		**0**		**26.000.000**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		12	25.000.000	12	0	12	26.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**12.840.000**		**19.800.000**		**13.300.000**				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		100		100					
			cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		100		100					
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0.31		<0.31		<0.31					
1	1.2.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Meningkatnya kesehatan masyarakat	24	12.840.000	24	19.800.000	24	13.300.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**13.500.000**		**18.014.000**		**14.500.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pemasyarakatan olahraga	1	13.500.000	1	18.014.000	1	14.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**12.880.000**		**16.730.000**		**14.500.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terwujdunya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	100	10.500.000	100	11.640.000	100	11.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terwujdunya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	12	2.380.000	12 RW	5.090.000	12	3.500.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**5.933.000**		**6.040.000**		**6.700.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terciptanya ruang terbuka hijau	1	5.933.000	1	6.040.000	1	6.700.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	96	Rencana
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.39	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan**			**176.090.000**		**123.250.000**		**40.000.000**				
1	1.3.39.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan		12	35.000.000	12 bulan	0	12	40.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	83	Rencana
2	1.3.39.8	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpenuhinya pemeliharaan jalan			50 m	27.250.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	91	Rencana
3	1.3.39.16	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terwujudnya infrastruktur perdesaan	187	141.090.000	179 m	31.000.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
4	1.3.39.7	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpenuhinya pemeliharaan saluranjalan			55,5 m	30.000.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	91	Rencana
5	1.3.39.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpenuhinya pemeliharaan saluran			18 m	35.000.000		0	RW. II Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**7.000.000**		**10.490.000**		**8.000.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terwujudnya kesehatan masyarakat	1	7.000.000	1	10.490.000	1	8.000.000	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**164.995.000**		**76.294.000**		**0**				
1	1.3.30.19	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	Terbangunnya pagar makam RW. III dan RW. VI	42 dan 60	164.995.000	100,8 m	76.294.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	89	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**0**		**13.184.000**		**0**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terpenuhinya Pembinaan Administrasi RT/RW			62	5.539.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	81	Rencana
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya Pelantikan RT dan RW			1 kegiatan	7.645.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**8.974.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya KIM di Kelurahan Tidar Selatan			2 kegiatan	8.974.000		0	Kelurahan Tidar selatan	Dana Alokasi Umum	69	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**28.634.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya PKK Rutin			60 orang	28.634.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**9.166.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya Sosialisasi Forum Anak di Kelurahan Tidar Selatan			30 anak	9.166.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	69	Kota Layak Anak
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**0**		**0**		**0**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				12 RW	0		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**8.437.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketertiban dan keamanan			1 kegiatan	8.437.000		0	Kelurahan Tidar Selatan	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
			TOTAL		**966.366.000**		**911.753.000**		**589.280.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Utara
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**820.738.000**		**935.237.000**		**961.490.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	45.000.000	4 item	45.000.000	12	54.450.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	10	6.500.000	9 unit	9.084.000	10	7.870.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan	12	350.671.000	12 bulan	385.490.000	12	424.320.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	60.500.000	453 m2	167.428.000	12	73.210.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	65	28.861.000	64 item	16.228.000	65	34.930.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	9.000.000	5 jenis	8.468.000	2	10.890.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	5.288.000	14 jenis	4.388.000	11	6.410.000	Kecamatan Magelang utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	28	26.200.000	4 item	4.076.000		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	2.220.000	2 jenis	4.200.000	2	2.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2	2.004.000	2 jenis	2.709.000	2	2.440.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	3	27.870.000	35 orang	20.320.000	3	33.730.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	1	82.346.000	8 kegiata	70.056.000	1	99.650.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	17.436.000	1 orang	19.956.000	1	21.100.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan	12	156.842.000	12 bulan	177.834.000	12	189.790.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**534.474.000**		**94.555.000**		**166.340.000**				
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		7	96.572.000	4 item	0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		5	42.689.000	5 item	0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur		12	44.904.000	4 item	0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala	90	12.000.000	90 m2	15.120.000	90	14.520.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	453	30.707.000	453 m2	12.231.000	453	37.160.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	10	50.402.000	10 unit	52.376.000	10	61.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	5	3.570.000	8 jenis	4.240.000	5	4.330.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	8	11.830.000	8 jenis	10.588.000	8	14.330.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1	181.000.000	2 paket	0	1	35.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		3	60.800.000	3 unit	0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**85.625.000**		**128.548.000**		**103.650.000**				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1	26.691.000	1 dokum	56.242.000	1	32.310.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD	2	18.739.000	2 dokum	18.756.000	2	22.690.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran OPD	2	29.526.000	2 dokum	45.406.000	2	35.730.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	1	10.669.000	1 dokum	8.144.000	1	12.920.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**22.733.000**		**26.712.000**		**27.530.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik	20	5.919.000	20 orang	8.579.000	20	7.180.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
2	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketrampilan anak PAUD	9	16.814.000	9 orang	18.133.000	9	20.350.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**6.687.000**		**7.337.000**		**8.100.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampaikannya informasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	50	6.687.000	50 orang	7.337.000	50	8.100.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**3.035.000**		**123.678.000**		**3.680.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	8	3.035.000	8 jenis	123.678.000	8	3.680.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**24.927.000**		**5.000.000**		**30.170.000**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1	24.927.000	35 orang	5.000.000	1	30.170.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**2.219.000**		**2.355.000**		**2.700.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselelnggaranya pelayanan perpustakaan	12	2.219.000	1 lokasi	2.355.000	12	2.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**103.474.000**		**121.899.000**		**125.220.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kecamatan	12	103.474.000	12 lapora	121.899.000	12	125.220.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**37.547.000**		**52.121.000**		**45.450.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kecamatan	2	37.547.000	2 perlom	52.121.000	2	45.450.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB, Kota Sejuta Bunga
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**9.462.000**		**6.212.000**		**11.460.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kecamatan	12	9.462.000	12 bulan	6.212.000	12	11.460.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**15.079.000**		**17.642.000**		**18.250.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	1	15.079.000	175 oran	17.642.000	1	18.250.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**12.505.000**		**16.739.000**		**15.140.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1	12.505.000	1 macam	16.739.000	1	15.140.000	Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**28.922.000**		**32.037.000**		**35.010.000**				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%		97.31%		97.63%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%		100%					
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%		25.00%					
			Jumlah Juara FASI	4		-		-					
			Jumlah Juara MTQ	1		2		2					
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24	28.922.000	24 orang	32.037.000	24	35.010.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.18	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan**			**2.454.000**		**3.942.000**		**2.970.000**				
1	2.7.18.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev kapasitas aparatur pemerintah kelurahan	1	2.454.000	4 laporan	3.942.000	1	2.970.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Tema RKPD 2019
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**12.389.000**		**16.227.000**		**15.000.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,52941		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kecamatan/kelurahan	40	12.389.000	40 orang	16.227.000	40	15.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**7.187.000**		**11.879.000**		**8.710.000**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	30	7.187.000	50 orang	11.879.000	30	8.710.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**13.090.000**		**17.332.000**		**15.840.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	40	13.090.000	40 orang	17.332.000	40	15.840.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**24.251.000**		**22.092.000**		**29.350.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	2	24.251.000	2 dokum	22.092.000	2	29.350.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program prioritas RPJM
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**6.636.000**		**6.876.000**		**8.030.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersampaikannya edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	50	6.636.000	50 orang	6.876.000	50	8.030.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**11.122.000**		**12.734.000**		**13.490.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	50	6.094.000	50 orang	7.012.000	50	7.390.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev kegiatan pelayanan anak balita	4	5.028.000	4 laporan	5.722.000	4	6.100.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Kota Layak Anak
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**59.433.000**		**59.993.000**		**71.920.000**				
1	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1	59.433.000	1 paket	59.993.000	1	71.920.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**16.570.000**		**20.939.000**		**20.060.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	16.570.000	4 laporan	20.939.000	1	20.060.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**4.712.000**		**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kecamatan			1 dokum	4.712.000		0	OPD Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**0**		**70.900.000**		**0**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan			1 unit ke	70.900.000		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	66	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**7.750.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan perempuan dan anak			25 anak	7.750.000		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
			TOTAL		**1.860.559.000**		**1.825.448.000**		**1.739.560.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Kecamatan Magelang Utara
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**820.738.000**		**935.237.000**		**961.490.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	45.000.000	4 item	45.000.000	12	54.450.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	10	6.500.000	9 unit	9.084.000	10	7.870.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan	12	350.671.000	12 bulan	385.490.000	12	424.320.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	60.500.000	453 m2	167.428.000	12	73.210.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	65	28.861.000	64 item	16.228.000	65	34.930.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	9.000.000	5 jenis	8.468.000	2	10.890.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	5.288.000	14 jenis	4.388.000	11	6.410.000	Kecamatan Magelang utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	28	26.200.000	4 item	4.076.000		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	2.220.000	2 jenis	4.200.000	2	2.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2	2.004.000	2 jenis	2.709.000	2	2.440.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	3	27.870.000	35 orang	20.320.000	3	33.730.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	1	82.346.000	8 kegiata	70.056.000	1	99.650.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	17.436.000	1 orang	19.956.000	1	21.100.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan	12	156.842.000	12 bulan	177.834.000	12	189.790.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**534.474.000**		**94.555.000**		**166.340.000**				
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		7	96.572.000	4 item	0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		5	42.689.000	5 item	0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur		12	44.904.000	4 item	0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala	90	12.000.000	90 m2	15.120.000	90	14.520.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	453	30.707.000	453 m2	12.231.000	453	37.160.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	10	50.402.000	10 unit	52.376.000	10	61.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	5	3.570.000	8 jenis	4.240.000	5	4.330.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	8	11.830.000	8 jenis	10.588.000	8	14.330.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1	181.000.000	2 paket	0	1	35.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		3	60.800.000	3 unit	0		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**85.625.000**		**128.548.000**		**103.650.000**				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1	26.691.000	1 dokum	56.242.000	1	32.310.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD	2	18.739.000	2 dokum	18.756.000	2	22.690.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran OPD	2	29.526.000	2 dokum	45.406.000	2	35.730.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	1	10.669.000	1 dokum	8.144.000	1	12.920.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**22.733.000**		**26.712.000**		**27.530.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik	20	5.919.000	20 orang	8.579.000	20	7.180.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
2	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketrampilan anak PAUD	9	16.814.000	9 orang	18.133.000	9	20.350.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**6.687.000**		**7.337.000**		**8.100.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampaikannya informasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	50	6.687.000	50 orang	7.337.000	50	8.100.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**3.035.000**		**123.678.000**		**3.680.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	8	3.035.000	8 jenis	123.678.000	8	3.680.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**24.927.000**		**5.000.000**		**30.170.000**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1	24.927.000	35 orang	5.000.000	1	30.170.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**2.219.000**		**2.355.000**		**2.700.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselelnggaranya pelayanan perpustakaan	12	2.219.000	1 lokasi	2.355.000	12	2.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**103.474.000**		**121.899.000**		**125.220.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kecamatan	12	103.474.000	12 lapora	121.899.000	12	125.220.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**37.547.000**		**52.121.000**		**45.450.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kecamatan	2	37.547.000	2 perlom	52.121.000	2	45.450.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB, Kota Sejuta Bunga
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**9.462.000**		**6.212.000**		**11.460.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kecamatan	12	9.462.000	12 bulan	6.212.000	12	11.460.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Program prioritas RPJM
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**15.079.000**		**17.642.000**		**18.250.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	1	15.079.000	175 oran	17.642.000	1	18.250.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**12.505.000**		**16.739.000**		**15.140.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1	12.505.000	1 macam	16.739.000	1	15.140.000	Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**28.922.000**		**32.037.000**		**35.010.000**				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%		97.31%		97.63%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%		100%					
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%		25.00%					
			Jumlah Juara FASI	4		-		-					
			Jumlah Juara MTQ	1		2		2					
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24	28.922.000	24 orang	32.037.000	24	35.010.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.18	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan**			**2.454.000**		**3.942.000**		**2.970.000**				
1	2.7.18.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev kapasitas aparatur pemerintah kelurahan	1	2.454.000	4 laporan	3.942.000	1	2.970.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Tema RKPD 2019
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**12.389.000**		**16.227.000**		**15.000.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,52941		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kecamatan/kelurahan	40	12.389.000	40 orang	16.227.000	40	15.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**7.187.000**		**11.879.000**		**8.710.000**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	30	7.187.000	50 orang	11.879.000	30	8.710.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak, Program prioritas RPJM
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**13.090.000**		**17.332.000**		**15.840.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	40	13.090.000	40 orang	17.332.000	40	15.840.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**24.251.000**		**22.092.000**		**29.350.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	2	24.251.000	2 dokum	22.092.000	2	29.350.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Program prioritas RPJM
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**6.636.000**		**6.876.000**		**8.030.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersampaikannya edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	50	6.636.000	50 orang	6.876.000	50	8.030.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**11.122.000**		**12.734.000**		**13.490.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	50	6.094.000	50 orang	7.012.000	50	7.390.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev kegiatan pelayanan anak balita	4	5.028.000	4 laporan	5.722.000	4	6.100.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Kota Layak Anak
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**59.433.000**		**59.993.000**		**71.920.000**				
1	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1	59.433.000	1 paket	59.993.000	1	71.920.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**16.570.000**		**20.939.000**		**20.060.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	16.570.000	4 laporan	20.939.000	1	20.060.000	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**4.712.000**		**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kecamatan			1 dokum	4.712.000		0	OPD Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**0**		**70.900.000**		**0**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan			1 unit ke	70.900.000		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	66	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**7.750.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan perempuan dan anak			25 anak	7.750.000		0	Kecamatan Magelang Utara	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
			TOTAL		**1.860.559.000**		**1.825.448.000**		**1.739.560.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : KMU-Kelurahan Potrobangsan
URUSAN : Administrasi Pemeirntahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi			35 orang	10.000.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**142.070.000**		**141.946.000**		**171.830.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	15.840.000	4 item	17.880.000	12	19.160.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	9	3.200.000	6 unit	3.362.000	9	3.870.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	21.110.000	650 m2	22.167.000	12	25.540.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	14.300.000	64 item	10.121.000	67	17.300.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	4.400.000	2 item	5.400.000	2	5.320.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10	1.760.000	5 item	2.470.000	10	2.120.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	4.020.000	1 jenis	4.320.000	2	4.860.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	3	3.080.000	2 macam	3.960.000	3	3.710.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	22.190.000	60 orang	24.480.000	3	26.840.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	33.000.000	1 jenis kegia	25.200.000	1	39.930.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	19.170.000	1 orang	18.960.000	1	23.180.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
12	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				1 paket	0		0	kelurahan potrobangsan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
13	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			4 jenis	3.626.000		0	kelurahan potrobangsan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD				1 orang	0		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**123.880.000**		**38.620.000**		**115.960.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	600	6.410.000	650 m2	10.500.000	600	7.750.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	6	20.870.000	5 unit	19.550.000	6	25.240.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	2	1.320.000	6 macam	2.450.000	2	1.590.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	5	5.280.000	6 macam	6.120.000	5	6.380.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		2	40.000.000	8 unit	0	2	20.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		2	15.000.000	1 unit	0	2	20.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
7	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1	35.000.000	1 unit	0	1	35.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.070.000**		**4.610.000**		**6.120.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30	5.070.000	30 orang	4.610.000	30	6.120.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**13.750.000**		**13.290.000**		**16.620.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	100	7.850.000	280 orang	7.664.000	100	9.490.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	30	5.900.000	50 orang	5.626.000	30	7.130.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**82.270.000**		**109.251.000**		**99.510.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	7	70.180.000	7 RW	101.080.000	7	84.900.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	1	12.090.000	40 orang	8.171.000	1	14.610.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	66	Rencana
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**7.820.000**		**7.985.000**		**9.460.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	1	7.820.000	3 macam	7.985.000	1	9.460.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**28.030.000**		**32.579.000**		**33.910.000**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25	14.200.000	25 orang	11.778.000	25	17.180.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	71	13.830.000	71 RT RW	10.551.000	71	16.730.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terselenggaranya pelantikan Ketua RT dan Ketua RW			71 orang	10.250.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**7.700.000**		**11.760.000**		**9.310.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	7.700.000	1 lokasi	11.760.000	12	9.310.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**8.000.000**		**7.324.000**		**9.680.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan maslaah kesehatan	30	8.000.000	30 orang	7.324.000	30	9.680.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**121.850.000**		**155.615.000**		**147.430.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	121.850.000	12 laporan	155.615.000	12	147.430.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**7.160.000**		**5.736.000**		**8.650.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	30	7.160.000	20 orang	5.736.000	30	8.650.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**10.500.000**		**10.407.000**		**12.700.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	2	10.500.000	1 perlomba	10.407.000	2	12.700.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**7.820.000**		**7.390.000**		**9.460.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30	7.820.000	50 orang	7.390.000	30	9.460.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**8.600.000**		**8.541.000**		**10.400.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	8.600.000	12 bulan	8.541.000	12	10.400.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**21.400.000**		**30.240.000**		**25.890.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	3	21.400.000	2 jenis acara	21.270.000	3	25.890.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama			100 orang	8.970.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**12.010.000**		**12.005.000**		**14.530.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1	12.010.000	1 jenis acara	12.005.000	1	14.530.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**17.810.000**		**15.120.000**		**21.540.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1	17.810.000	1 kelurahan	15.120.000	1	21.540.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**13.610.000**		**13.528.000**		**16.460.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	13.610.000	70 orang	13.528.000	30	16.460.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**31.150.000**		**30.890.000**		**37.680.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	75	31.150.000	100 orang	30.890.000	75	37.680.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**20.420.000**		**20.640.000**		**24.700.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	16.420.000	2 dokumen	16.358.000	2	19.860.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	4.000.000	1 dokumen	4.282.000	1	4.840.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**6.640.000**		**5.773.000**		**8.030.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampaikannya informasi penanganan peyakit AIDS	20	6.640.000	30 orang	5.773.000	20	8.030.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**4.900.000**		**10.505.000**		**5.920.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	4.900.000	1 lokasi	10.505.000	1	5.920.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**5.460.000**		**4.665.000**		**6.600.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	7	5.460.000	35 orang	4.665.000	7	6.600.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	64	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**5.950.000**		**5.316.000**		**7.190.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	7	5.950.000	30 orang	5.316.000	7	7.190.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan**			**76.200.000**		**207.133.000**		**135.000.000**				
1	1.3.41.22	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	0	0	50 m'	30.411.000	1	50.000.000	Kelurahan Potrobagsan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.41.24	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	67	41.200.000	170 m'	104.211.000	0	0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.41.28	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII		0	0	178 m'	0	1	50.000.000	Kelurahan Potrobagsan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.41.29	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	7	35.000.000	1 paket	50.000.000	7	35.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.41.15	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	0	0	24 m'	22.511.000	0	0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**5.100.000**		**12.405.000**		**6.170.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI untuk ibu hamil	25	5.100.000	30 orang	12.405.000	25	6.170.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**			**4.000.000**		**6.786.000**		**4.840.000**				
			Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	66%		68%		70%					
1	2.8.18.4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Terlaksananya pembinaan kader SKD	20	4.000.000	25 orang	6.786.000	20	4.840.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**7.034.000**		**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya informasi mengenai profil kelurahan			1 dokumen	7.034.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**0**		**4.661.000**		**0**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terbinanya keluarga sejahtera			1 kelompok	4.661.000		0	Ke	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.16	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan**			**0**		**4.131.000**		**0**				
1	2.7.16.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terkoordinirnya lembaga ekonomi dimasyarakat			4 laporan	4.131.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**0**		**6.824.000**		**0**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosilaisasi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			30 orang	6.824.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
			TOTAL		**799.170.000**		**962.710.000**		**975.590.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : KMU-Kelurahan Potrobangsan
URUSAN : Administrasi Pemeirntahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi			35 orang	10.000.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**142.070.000**		**141.946.000**		**171.830.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	15.840.000	4 item	17.880.000	12	19.160.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	9	3.200.000	6 unit	3.362.000	9	3.870.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	21.110.000	650 m2	22.167.000	12	25.540.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	14.300.000	64 item	10.121.000	67	17.300.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	4.400.000	2 item	5.400.000	2	5.320.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10	1.760.000	5 item	2.470.000	10	2.120.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	4.020.000	1 jenis	4.320.000	2	4.860.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	3	3.080.000	2 macam	3.960.000	3	3.710.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	22.190.000	60 orang	24.480.000	3	26.840.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	33.000.000	1 jenis kegia	25.200.000	1	39.930.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	19.170.000	1 orang	18.960.000	1	23.180.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
12	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				1 paket	0		0	kelurahan potrobangsan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
13	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			4 jenis	3.626.000		0	kelurahan potrobangsan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
14	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD				1 orang	0		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**123.880.000**		**38.620.000**		**115.960.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	600	6.410.000	650 m2	10.500.000	600	7.750.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	6	20.870.000	5 unit	19.550.000	6	25.240.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	2	1.320.000	6 macam	2.450.000	2	1.590.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	5	5.280.000	6 macam	6.120.000	5	6.380.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		2	40.000.000	8 unit	0	2	20.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		2	15.000.000	1 unit	0	2	20.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
7	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1	35.000.000	1 unit	0	1	35.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.070.000**		**4.610.000**		**6.120.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30	5.070.000	30 orang	4.610.000	30	6.120.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**13.750.000**		**13.290.000**		**16.620.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	100	7.850.000	280 orang	7.664.000	100	9.490.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	30	5.900.000	50 orang	5.626.000	30	7.130.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**82.270.000**		**109.251.000**		**99.510.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	7	70.180.000	7 RW	101.080.000	7	84.900.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	1	12.090.000	40 orang	8.171.000	1	14.610.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	66	Rencana
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**7.820.000**		**7.985.000**		**9.460.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	1	7.820.000	3 macam	7.985.000	1	9.460.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**28.030.000**		**32.579.000**		**33.910.000**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25	14.200.000	25 orang	11.778.000	25	17.180.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	71	13.830.000	71 RT RW	10.551.000	71	16.730.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terselenggaranya pelantikan Ketua RT dan Ketua RW			71 orang	10.250.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**7.700.000**		**11.760.000**		**9.310.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	7.700.000	1 lokasi	11.760.000	12	9.310.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**8.000.000**		**7.324.000**		**9.680.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan maslaah kesehatan	30	8.000.000	30 orang	7.324.000	30	9.680.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**121.850.000**		**155.615.000**		**147.430.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	121.850.000	12 laporan	155.615.000	12	147.430.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**7.160.000**		**5.736.000**		**8.650.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	30	7.160.000	20 orang	5.736.000	30	8.650.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**10.500.000**		**10.407.000**		**12.700.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	2	10.500.000	1 perlomba	10.407.000	2	12.700.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**7.820.000**		**7.390.000**		**9.460.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30	7.820.000	50 orang	7.390.000	30	9.460.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**8.600.000**		**8.541.000**		**10.400.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	8.600.000	12 bulan	8.541.000	12	10.400.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**21.400.000**		**30.240.000**		**25.890.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	3	21.400.000	2 jenis acara	21.270.000	3	25.890.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama			100 orang	8.970.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**12.010.000**		**12.005.000**		**14.530.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1	12.010.000	1 jenis acara	12.005.000	1	14.530.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**17.810.000**		**15.120.000**		**21.540.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1	17.810.000	1 kelurahan	15.120.000	1	21.540.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**13.610.000**		**13.528.000**		**16.460.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	13.610.000	70 orang	13.528.000	30	16.460.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**31.150.000**		**30.890.000**		**37.680.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	75	31.150.000	100 orang	30.890.000	75	37.680.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**20.420.000**		**20.640.000**		**24.700.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	16.420.000	2 dokumen	16.358.000	2	19.860.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	4.000.000	1 dokumen	4.282.000	1	4.840.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**6.640.000**		**5.773.000**		**8.030.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampaikannya informasi penanganan peyakit AIDS	20	6.640.000	30 orang	5.773.000	20	8.030.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**4.900.000**		**10.505.000**		**5.920.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	4.900.000	1 lokasi	10.505.000	1	5.920.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**5.460.000**		**4.665.000**		**6.600.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	7	5.460.000	35 orang	4.665.000	7	6.600.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	64	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**5.950.000**		**5.316.000**		**7.190.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	7	5.950.000	30 orang	5.316.000	7	7.190.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan**			**76.200.000**		**207.133.000**		**135.000.000**				
1	1.3.41.22	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	0	0	50 m'	30.411.000	1	50.000.000	Kelurahan Potrobagsan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.41.24	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	67	41.200.000	170 m'	104.211.000	0	0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.41.28	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII		0	0	178 m'	0	1	50.000.000	Kelurahan Potrobagsan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.41.29	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	7	35.000.000	1 paket	50.000.000	7	35.000.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.41.15	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	0	0	24 m'	22.511.000	0	0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**5.100.000**		**12.405.000**		**6.170.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI untuk ibu hamil	25	5.100.000	30 orang	12.405.000	25	6.170.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**			**4.000.000**		**6.786.000**		**4.840.000**				
			Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	66%		68%		70%					
1	2.8.18.4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Terlaksananya pembinaan kader SKD	20	4.000.000	25 orang	6.786.000	20	4.840.000	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**7.034.000**		**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya informasi mengenai profil kelurahan			1 dokumen	7.034.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**0**		**4.661.000**		**0**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terbinanya keluarga sejahtera			1 kelompok	4.661.000		0	Ke	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.16	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan**			**0**		**4.131.000**		**0**				
1	2.7.16.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terkoordinirnya lembaga ekonomi dimasyarakat			4 laporan	4.131.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**0**		**6.824.000**		**0**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosilaisasi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			30 orang	6.824.000		0	Kelurahan Potrobangsan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
			TOTAL		**799.170.000**		**962.710.000**		**975.590.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

SKPD : KMU-Kelurahan Kedungsari

URUSAN : Administrasi pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**162.760.000**		**147.899.000**		**191.860.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	14.540.000	12 bulan	15.840.000	12	15.540.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	6	1.680.000	7 unit	2.123.000	6	1.780.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	19.617.000	12 bulan	22.749.000	12	20.617.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	13.500.000	64 jenis	8.277.000	67	14.500.000	Kantor Kelurahan Kantor	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	5.000.000	2 jenis	3.411.000	2	6.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	2.500.000	5 jenis	1.708.000	1	3.500.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	4.147.000	4 unit	3.966.000	3	5.147.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6	4.000.000	1 jenis	4.320.000	6	5.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	2.000.000	1 jenis	2.658.000	1	3.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	20.904.000	60 orang	19.825.000	3	21.904.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	35.000.000	1 kegiatan	21.000.000	1	45.000.000	pemerintah daerah / instansi lain	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	2	39.872.000	2 orang	39.912.000	2	49.872.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
13	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga			3 jenis	2.110.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**59.295.000**		**38.904.000**		**73.796.500**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	285	32.145.000	285 m2	7.275.000	285	42.145.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7	13.000.000	7 unit	21.204.000	8	15.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	4	7.000.000	10 unit	7.233.000	4	8.000.000	Kantor Kelurahan Kedungasari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpelihara perlengkapan gedung kantor	4	7.150.000	7 unit	3.192.000	4	8.651.500	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.000.000**		**5.015.000**		**6.000.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	35	5.000.000	30 orang	5.015.000	35	6.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak, Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**10.000.000**		**11.869.000**		**11.000.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	56	10.000.000	25 orang	11.869.000	56	11.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**27.000.000**		**72.693.000**		**29.000.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	10	14.000.000	10 RW	25.832.000	10	15.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	1	13.000.000	30 orang	10.817.000	1	14.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana, Kota Sejuta Bunga
3	2.5.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terkelola nya persampahan			Terkelola ny	36.044.000		0	Kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	79	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**3.500.000**		**3.472.000**		**4.500.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	1	3.500.000	7 jenis	3.472.000	1	4.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**27.000.000**		**32.372.000**		**29.000.000**				
1	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	terlaksananya pelantikan Ketua RT dan RW			68 orang	6.661.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	30	14.000.000	25 orang	12.112.000	30	15.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
3	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	68	13.000.000	68 orang	13.599.000	68	14.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**6.500.000**		**8.092.000**		**7.500.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	6.500.000	12 bulan	8.092.000	12	7.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**35.000.000**		**5.278.000**		**45.000.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terfasilitasinya FKD dan Posbindu	2	35.000.000	30 orang	5.278.000	2	45.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**115.000.000**		**173.838.000**		**125.000.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	115.000.000	12 bulan	173.838.000	12	125.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**7.500.000**		**6.471.000**		**8.500.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	35	7.500.000	20 orang	6.471.000	35	8.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**7.500.000**		**7.599.000**		**8.500.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	7.500.000	1 kegiatan	7.599.000	1	8.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**4.000.000**		**4.652.000**		**5.000.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	35	4.000.000	30 orang	4.652.000	35	5.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**8.000.000**		**3.417.000**		**9.000.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	8.000.000	12 bulan	3.417.000	12	9.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**11.500.000**		**30.833.000**		**12.500.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2	11.500.000	2 kegiatan	21.828.000	2	12.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	76	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			100 orang	9.005.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**35.000.000**		**19.335.000**		**45.000.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	2	35.000.000	1 kegiatan	19.335.000	2	45.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**20.000.000**		**18.400.000**		**21.000.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1	20.000.000	1 kegiatan	18.400.000	1	21.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**8.000.000**		**5.886.000**		**9.000.000**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga melalui wadah BKR	2	8.000.000	2 kelompok	5.886.000	2	9.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**14.000.000**		**8.919.000**		**15.000.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	25	14.000.000	25 orang	8.919.000	25	15.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**25.000.000**		**31.229.000**		**26.000.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	60	25.000.000	70 orang	31.229.000	60	26.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**24.000.000**		**24.457.000**		**26.000.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	18.000.000	2 kegiatan	18.996.000	2	19.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana, Pemberantasan Korupsi
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	6.000.000	1 kegiatan	5.461.000	1	7.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana, Pemberantasan Korupsi
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**12.500.000**		**196.941.000**		**14.500.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.5	Penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH dan revitalisasi lapangan olahraga	1	8.000.000	4 lokasi	192.521.000	1	9.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	2	4.500.000	1 lokasi	4.420.000	2	5.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**9.500.000**		**8.302.000**		**10.500.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	10	9.500.000	50 orang	8.302.000	10	10.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**17.000.000**		**15.360.000**		**18.000.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	10	17.000.000	40 orang	15.360.000	10	18.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**7.000.000**		**8.007.000**		**8.000.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya kegiatan senam hamil untuk ibu hamil	30	7.000.000	20 orang	8.007.000	30	8.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak, Rencana
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.3.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari**			**129.000.000**		**329.840.000**		**35.000.000**				
1	1.3.42.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	0	0	9,1 m/sisi	18.940.000	0	0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.42.25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW		0	175 m2	43.400.000		0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.42.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW		0	200 m2	42.500.000		0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.42.33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70	34.000.000	120 m2	27.100.000		0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.42.39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW		0	33 m	36.500.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.42.41	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	10	35.000.000	10 RW	50.000.000	10	35.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.42.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW		0	12,5 m/sisi	26.900.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.42.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	126	60.000.000	98 m	84.500.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi			35 orang	10.000.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**0**		**4.460.000**		**0**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	terselenggaranya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindngan anak			30 orang	4.460.000		0	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**4.986.000**		**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	terselenggaranya penyusunan profile kecamatan / kelurahan			1 laporan	4.986.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**6.557.000**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	terfasilitasinya sosialisasi penanganan penyakit AIDS			30 orang	6.557.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.15	**Program Keluarga Berencana**			**0**		**8.901.000**		**0**				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2		2					
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	terfasilitasinya pengelolaan program keluarga berencana			25 orang	8.901.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Penanggulangan Kemiskinan, Rencana
			TOTAL		**790.555.000**		**1.253.984.000**		**794.156.500**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

SKPD : KMU-Kelurahan Kedungsari

URUSAN : Administrasi pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**162.760.000**		**147.899.000**		**191.860.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	14.540.000	12 bulan	15.840.000	12	15.540.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	6	1.680.000	7 unit	2.123.000	6	1.780.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	19.617.000	12 bulan	22.749.000	12	20.617.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	13.500.000	64 jenis	8.277.000	67	14.500.000	Kantor Kelurahan Kantor	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	5.000.000	2 jenis	3.411.000	2	6.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	2.500.000	5 jenis	1.708.000	1	3.500.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	4.147.000	4 unit	3.966.000	3	5.147.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6	4.000.000	1 jenis	4.320.000	6	5.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	2.000.000	1 jenis	2.658.000	1	3.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	20.904.000	60 orang	19.825.000	3	21.904.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	35.000.000	1 kegiatan	21.000.000	1	45.000.000	pemerintah daerah / instansi lain	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	2	39.872.000	2 orang	39.912.000	2	49.872.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
13	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga			3 jenis	2.110.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**59.295.000**		**38.904.000**		**73.796.500**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	285	32.145.000	285 m2	7.275.000	285	42.145.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7	13.000.000	7 unit	21.204.000	8	15.000.000	Kantor Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	4	7.000.000	10 unit	7.233.000	4	8.000.000	Kantor Kelurahan Kedungasari	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpelihara perlengkapan gedung kantor	4	7.150.000	7 unit	3.192.000	4	8.651.500	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.000.000**		**5.015.000**		**6.000.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	35	5.000.000	30 orang	5.015.000	35	6.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak, Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**10.000.000**		**11.869.000**		**11.000.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	56	10.000.000	25 orang	11.869.000	56	11.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**27.000.000**		**72.693.000**		**29.000.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	10	14.000.000	10 RW	25.832.000	10	15.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	1	13.000.000	30 orang	10.817.000	1	14.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana, Kota Sejuta Bunga
3	2.5.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terkelola nya persampahan			Terkelola ny	36.044.000		0	Kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	79	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**3.500.000**		**3.472.000**		**4.500.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	1	3.500.000	7 jenis	3.472.000	1	4.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**27.000.000**		**32.372.000**		**29.000.000**				
1	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	terlaksananya pelantikan Ketua RT dan RW			68 orang	6.661.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	30	14.000.000	25 orang	12.112.000	30	15.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
3	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	68	13.000.000	68 orang	13.599.000	68	14.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**6.500.000**		**8.092.000**		**7.500.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	6.500.000	12 bulan	8.092.000	12	7.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**35.000.000**		**5.278.000**		**45.000.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terfasilitasinya FKD dan Posbindu	2	35.000.000	30 orang	5.278.000	2	45.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**115.000.000**		**173.838.000**		**125.000.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	115.000.000	12 bulan	173.838.000	12	125.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**7.500.000**		**6.471.000**		**8.500.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	35	7.500.000	20 orang	6.471.000	35	8.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**7.500.000**		**7.599.000**		**8.500.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	7.500.000	1 kegiatan	7.599.000	1	8.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**4.000.000**		**4.652.000**		**5.000.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	35	4.000.000	30 orang	4.652.000	35	5.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**8.000.000**		**3.417.000**		**9.000.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	8.000.000	12 bulan	3.417.000	12	9.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**11.500.000**		**30.833.000**		**12.500.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2	11.500.000	2 kegiatan	21.828.000	2	12.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	76	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			100 orang	9.005.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**35.000.000**		**19.335.000**		**45.000.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	2	35.000.000	1 kegiatan	19.335.000	2	45.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**20.000.000**		**18.400.000**		**21.000.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1	20.000.000	1 kegiatan	18.400.000	1	21.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**8.000.000**		**5.886.000**		**9.000.000**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga melalui wadah BKR	2	8.000.000	2 kelompok	5.886.000	2	9.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**14.000.000**		**8.919.000**		**15.000.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	25	14.000.000	25 orang	8.919.000	25	15.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**25.000.000**		**31.229.000**		**26.000.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	60	25.000.000	70 orang	31.229.000	60	26.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**24.000.000**		**24.457.000**		**26.000.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	18.000.000	2 kegiatan	18.996.000	2	19.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana, Pemberantasan Korupsi
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	6.000.000	1 kegiatan	5.461.000	1	7.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	70	Rencana, Pemberantasan Korupsi
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**12.500.000**		**196.941.000**		**14.500.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.24.5	Penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH dan revitalisasi lapangan olahraga	1	8.000.000	4 lokasi	192.521.000	1	9.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
2	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	2	4.500.000	1 lokasi	4.420.000	2	5.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Rencana, Kota Sejuta Bunga
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**9.500.000**		**8.302.000**		**10.500.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	10	9.500.000	50 orang	8.302.000	10	10.500.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**17.000.000**		**15.360.000**		**18.000.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	10	17.000.000	40 orang	15.360.000	10	18.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**7.000.000**		**8.007.000**		**8.000.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya kegiatan senam hamil untuk ibu hamil	30	7.000.000	20 orang	8.007.000	30	8.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak, Rencana
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari**			**129.000.000**		**329.840.000**		**35.000.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.3.42.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	0	0	9,1 m/sisi	18.940.000	0	0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.42.25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW		0	175 m2	43.400.000		0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.42.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW		0	200 m2	42.500.000		0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.42.33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70	34.000.000	120 m2	27.100.000		0	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.42.39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW		0	33 m	36.500.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.42.41	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	10	35.000.000	10 RW	50.000.000	10	35.000.000	Kelurahan Kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.42.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW		0	12,5 m/sisi	26.900.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	65	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.42.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	126	60.000.000	98 m	84.500.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi			35 orang	10.000.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**0**		**4.460.000**		**0**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	terselenggaranya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindngan anak			30 orang	4.460.000		0	kantor kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**4.986.000**		**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	terselenggaranya penyusunan profile kecamatan / kelurahan			1 laporan	4.986.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**6.557.000**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	terfasilitasinya sosialisasi penanganan penyakit AIDS			30 orang	6.557.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.15	**Program Keluarga Berencana**			**0**		**8.901.000**		**0**				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2		2					
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	terfasilitasinya pengelolaan program keluarga berencana			25 orang	8.901.000		0	kelurahan kedungsari	Dana Alokasi Umum	60	Kota Layak Anak, Penanggulangan Kemiskinan, Rencana
			TOTAL		**790.555.000**		**1.253.984.000**		**794.156.500**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : KMU-Kelurahan Kramat Utara
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**131.860.000**		**144.918.000**		**159.530.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	12.940.000	4 item	14.220.000	12	15.660.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8	2.500.000	8 unit kenda	2.365.000	10	3.000.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	23.410.000	605 m2	23.304.000	12	28.320.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	14.300.000	64 Item	10.142.000	67	17.310.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	4.950.000	2 jenis	5.411.000	2	5.990.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	2.200.000	13 Item	2.299.000	4	2.670.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	4.020.000	4 Item	4.420.000	3	4.860.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	4.430.000	1 Jenis	4.800.000	1	5.360.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	2.210.000	2 Macam	2.404.000	1	2.670.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	8.720.000	60 Orang Pe	22.672.000	3	10.550.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	33.000.000	5 Kegiatan	30.576.000	1	39.930.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	19.180.000	1 Orang	19.956.000	1	23.210.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terlaksananya pelayanan kedinasan / paten perijinan dan non perijinan / kependudukan			12 Bulan	2.349.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**298.730.000**		**81.397.000**		**336.997.000**				
1	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1	95.250.000	1 Paket	0	1	115.250.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		6	37.240.000	7 Unit	0	6	45.060.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	8	15.380.000	7 unit kend	23.904.000	10	18.190.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	6	7.150.000	4 Jenis	9.368.000	6	11.807.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	605	52.320.000	605 m2	41.800.000	605	63.310.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		4	37.820.000	12 Unit	0	4	45.760.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		1	22.000.000	1 Unit kend	0	1	26.620.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur		11	31.570.000	11 Unit	0	3	11.000.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin / berkala			4 Item	6.325.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**3.840.000**		**4.918.000**		**4.650.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	20	3.840.000	30 orang	4.918.000	20	4.650.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**5.100.000**		**11.833.000**		**6.170.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	30	5.100.000	32 Orang	7.751.000	30	6.170.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanannya kesiapan tenaga kerja pengendali keaamanan/ linmas kelurahan			50 Orang	4.082.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**48.910.000**		**151.580.000**		**59.180.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	8	48.910.000	8 RW	141.580.000	8	59.180.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kampung Organik Kelurahan Kramat Utara			40 KK	10.000.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**3.650.000**		**4.845.000**		**4.410.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	2	3.650.000	3 Jenis	4.845.000	2	4.410.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**13.800.000**		**18.838.000**		**16.700.000**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25	4.180.000	25 Orang	3.770.000	25	5.060.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	47	9.620.000	100 Orang	9.101.000	47	11.640.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya pelatikan RT dan RW di lingkungan Kelurahan Kramat Utara			47 Orang (3	5.967.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.15	**Program Keluarga Berencana**			**4.180.000**		**3.775.000**		**5.060.000**				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2		2					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25	4.180.000	25 Kader KB	3.775.000	25	5.060.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**14.800.000**		**7.746.000**		**17.910.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	8.800.000	12 Bulan	6.246.000	12	10.650.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Rencana
2	2.17.15.12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	Tersedianya mesin barcode	1	6.000.000	1 Unit	1.500.000	1	7.260.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**4.200.000**		**5.000.000**		**5.090.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan masalah kesehatan	25	4.200.000	30 Orang	5.000.000	25	5.090.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**88.140.000**		**107.604.000**		**106.640.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	88.140.000	12 Laporan	107.604.000	12	106.640.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**7.160.000**		**6.997.000**		**8.660.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	7.160.000	3 juara	6.997.000	1	8.660.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**3.280.000**		**3.965.000**		**3.970.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	20	3.280.000	30 Orang	3.965.000	20	3.970.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**20.540.000**		**3.261.000**		**24.850.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	8.540.000	12 Bulan	3.261.000	12	10.330.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
2	2.18.16.1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip		2	12.000.000	3 Unit	0	2	14.520.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**7.110.000**		**33.281.000**		**8.600.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama			100 Orang	14.073.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1	7.110.000	1 Kegiatan	19.208.000	1	8.600.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**15.540.000**		**37.000.000**		**18.800.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah dan acara haul Kelurahan Kramat Utara	1	15.540.000	2 Kegiatan	37.000.000	1	18.800.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**19.650.000**		**22.370.000**		**23.780.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	4	19.650.000	4 Kegiatan	22.370.000	4	23.780.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Tema RKPD 2019
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**14.720.000**		**12.538.000**		**17.810.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	14.720.000	30 Orang	12.538.000	30	17.810.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	SDGs
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**25.280.000**		**23.780.000**		**30.590.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	60	25.280.000	60 Orang	23.780.000	60	30.590.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Tema RKPD 2019
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**20.290.000**		**20.754.000**		**24.540.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	16.440.000	2 Dokumen	17.047.000	2	19.890.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019, Rencana, Implementasi RAD MEA
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	3.850.000	1 Dokumen	3.707.000	1	4.650.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019, Rencana, Program prioritas RPJM
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**4.130.000**		**5.720.000**		**5.000.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya pengelolaan WPA	25	4.130.000	30 Orang	5.720.000	25	5.000.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	45	Tema RKPD 2019
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**11.650.000**		**12.072.000**		**14.090.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	2	11.650.000	12 Bulan	12.072.000	2	14.090.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**8.050.000**		**4.289.000**		**9.730.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	8	8.050.000	40 Orang	4.289.000	8	9.730.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**4.900.000**		**13.724.000**		**5.930.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	8	4.900.000	150 Orang	13.724.000	8	5.930.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	60	Penanggulangan Kemiskinan, Tema RKPD 2019
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara**			**63.500.000**		**130.443.000**		**46.590.000**				
1	1.3.43.31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW		0	70 m	33.849.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.43.32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW		0	50 m	24.844.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.43.33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	8	38.500.000	1 paket	50.000.000	8	46.590.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.43.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100	25.000.000	80 m2	21.750.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.3.19	**Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong**			**80.000.000**		**34.669.000**		**50.000.000**				
1	1.3.19.5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	80	80.000.000	30 m3	34.669.000	100	50.000.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**0**		**4.951.000**		**0**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselengaranya pemantapan GSI			100 Orang	4.951.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**0**		**4.314.000**		**0**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselengaranya penyuluhan ibu rumah tangga dan remaja melalui BKR			25 Orang	4.314.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	SDGs
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**7.549.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselengaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak			20 Orang	7.549.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	64	Kota Layak Anak, SDGs
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**4.034.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan/kecamatan			1 dokumen	4.034.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	35	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**0**		**5.191.000**		**0**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampaikannya informasi kesetaraan gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat			40 Orang	5.191.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak, SDGs
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikaasi dan informasi			35 Orang	10.000.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Tema RKPD 2019
			TOTAL		**923.010.000**		**943.356.000**		**1.015.277.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : KMU-Kelurahan Kramat Utara
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**131.860.000**		**144.918.000**		**159.530.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	12.940.000	4 item	14.220.000	12	15.660.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8	2.500.000	8 unit kenda	2.365.000	10	3.000.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	23.410.000	605 m2	23.304.000	12	28.320.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	14.300.000	64 Item	10.142.000	67	17.310.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	4.950.000	2 jenis	5.411.000	2	5.990.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	2.200.000	13 Item	2.299.000	4	2.670.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	4.020.000	4 Item	4.420.000	3	4.860.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	4.430.000	1 Jenis	4.800.000	1	5.360.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	2.210.000	2 Macam	2.404.000	1	2.670.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	8.720.000	60 Orang Pe	22.672.000	3	10.550.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	33.000.000	5 Kegiatan	30.576.000	1	39.930.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	19.180.000	1 Orang	19.956.000	1	23.210.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terlaksananya pelayanan kedinasan / paten perijinan dan non perijinan / kependudukan			12 Bulan	2.349.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**298.730.000**		**81.397.000**		**336.997.000**				
1	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1	95.250.000	1 Paket	0	1	115.250.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		6	37.240.000	7 Unit	0	6	45.060.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	8	15.380.000	7 unit kend	23.904.000	10	18.190.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	6	7.150.000	4 Jenis	9.368.000	6	11.807.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	605	52.320.000	605 m2	41.800.000	605	63.310.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		4	37.820.000	12 Unit	0	4	45.760.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		1	22.000.000	1 Unit kend	0	1	26.620.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.2.10	Pengadaan mebeleur		11	31.570.000	11 Unit	0	3	11.000.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin / berkala			4 Item	6.325.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**3.840.000**		**4.918.000**		**4.650.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	20	3.840.000	30 orang	4.918.000	20	4.650.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**5.100.000**		**11.833.000**		**6.170.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	30	5.100.000	32 Orang	7.751.000	30	6.170.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanannya kesiapan tenaga kerja pengendali keaamanan/ linmas kelurahan			50 Orang	4.082.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**48.910.000**		**151.580.000**		**59.180.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	8	48.910.000	8 RW	141.580.000	8	59.180.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	55	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kampung Organik Kelurahan Kramat Utara			40 KK	10.000.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	86	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Kota Sejuta Bunga
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**3.650.000**		**4.845.000**		**4.410.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	2	3.650.000	3 Jenis	4.845.000	2	4.410.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**13.800.000**		**18.838.000**		**16.700.000**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25	4.180.000	25 Orang	3.770.000	25	5.060.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	47	9.620.000	100 Orang	9.101.000	47	11.640.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya pelatikan RT dan RW di lingkungan Kelurahan Kramat Utara			47 Orang (3	5.967.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.15	**Program Keluarga Berencana**			**4.180.000**		**3.775.000**		**5.060.000**				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2		2					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25	4.180.000	25 Kader KB	3.775.000	25	5.060.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**14.800.000**		**7.746.000**		**17.910.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	8.800.000	12 Bulan	6.246.000	12	10.650.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Rencana
2	2.17.15.12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	Tersedianya mesin barcode	1	6.000.000	1 Unit	1.500.000	1	7.260.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	35	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**4.200.000**		**5.000.000**		**5.090.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan masalah kesehatan	25	4.200.000	30 Orang	5.000.000	25	5.090.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**88.140.000**		**107.604.000**		**106.640.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	88.140.000	12 Laporan	107.604.000	12	106.640.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**7.160.000**		**6.997.000**		**8.660.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	7.160.000	3 juara	6.997.000	1	8.660.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**3.280.000**		**3.965.000**		**3.970.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	20	3.280.000	30 Orang	3.965.000	20	3.970.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**20.540.000**		**3.261.000**		**24.850.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	8.540.000	12 Bulan	3.261.000	12	10.330.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
2	2.18.16.1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip		2	12.000.000	3 Unit	0	2	14.520.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**7.110.000**		**33.281.000**		**8.600.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama			100 Orang	14.073.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Program prioritas RPJM
2	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1	7.110.000	1 Kegiatan	19.208.000	1	8.600.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**15.540.000**		**37.000.000**		**18.800.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah dan acara haul Kelurahan Kramat Utara	1	15.540.000	2 Kegiatan	37.000.000	1	18.800.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**19.650.000**		**22.370.000**		**23.780.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	4	19.650.000	4 Kegiatan	22.370.000	4	23.780.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Tema RKPD 2019
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**14.720.000**		**12.538.000**		**17.810.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	14.720.000	30 Orang	12.538.000	30	17.810.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	SDGs
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**25.280.000**		**23.780.000**		**30.590.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	60	25.280.000	60 Orang	23.780.000	60	30.590.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Tema RKPD 2019
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**20.290.000**		**20.754.000**		**24.540.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	16.440.000	2 Dokumen	17.047.000	2	19.890.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019, Rencana, Implementasi RAD MEA
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	3.850.000	1 Dokumen	3.707.000	1	4.650.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi MKSB, Tema RKPD 2019, Rencana, Program prioritas RPJM
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**4.130.000**		**5.720.000**		**5.000.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya pengelolaan WPA	25	4.130.000	30 Orang	5.720.000	25	5.000.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	45	Tema RKPD 2019
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**11.650.000**		**12.072.000**		**14.090.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	2	11.650.000	12 Bulan	12.072.000	2	14.090.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**8.050.000**		**4.289.000**		**9.730.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	8	8.050.000	40 Orang	4.289.000	8	9.730.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**4.900.000**		**13.724.000**		**5.930.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	8	4.900.000	150 Orang	13.724.000	8	5.930.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	60	Penanggulangan Kemiskinan, Tema RKPD 2019
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara**			**63.500.000**		**130.443.000**		**46.590.000**				
1	1.3.43.31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW		0	70 m	33.849.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.43.32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW		0	50 m	24.844.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.43.33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	8	38.500.000	1 paket	50.000.000	8	46.590.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.43.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100	25.000.000	80 m2	21.750.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.3.19	**Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong**			**80.000.000**		**34.669.000**		**50.000.000**				
1	1.3.19.5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	80	80.000.000	30 m3	34.669.000	100	50.000.000	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**0**		**4.951.000**		**0**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselengaranya pemantapan GSI			100 Orang	4.951.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**0**		**4.314.000**		**0**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselengaranya penyuluhan ibu rumah tangga dan remaja melalui BKR			25 Orang	4.314.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	SDGs
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**7.549.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselengaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak			20 Orang	7.549.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	64	Kota Layak Anak, SDGs
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**4.034.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan/kecamatan			1 dokumen	4.034.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	35	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**0**		**5.191.000**		**0**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampaikannya informasi kesetaraan gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat			40 Orang	5.191.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak, SDGs
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikaasi dan informasi			35 Orang	10.000.000		0	Kelurahan Kr	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Tema RKPD 2019
			TOTAL		**923.010.000**		**943.356.000**		**1.015.277.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : KMU-Kelurahan Kramat Selatan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**167.108.000**		**162.294.000**		**202.210.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	9.300.000	12 tagihan	11.100.000	12	11.250.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	7	3.400.000	8 unit	3.050.000	7	4.110.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	19.653.000	1 orang	21.000.000	12	23.780.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	13.000.000	19 jenis	10.000.000	67	15.730.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	4.500.000	2 jenis	5.400.000	2	5.450.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	9.500.000	9 jenis	3.500.000	5	11.500.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	3.647.000	2 jenis	3.000.000	3	4.420.000	Kelurahan kramat selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	4.200.000	2 jenis	4.080.000	1	5.080.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	2.100.000	14 tabung	2.806.000	1	2.540.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	15.500.000	3 jenis	20.000.000	3	18.760.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	30.000.000	3 orang	18.562.000	1	36.300.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	2	52.308.000	3 orang	55.296.000	2	63.290.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga			8 jenis	4.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**32.940.000**		**48.072.000**		**39.860.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	100	5.000.000	1500 m2	18.000.000	100	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	8	21.440.000	8 unit	23.772.000	8	25.940.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	3	6.500.000	17 unit	6.300.000	3	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.000.000**		**5.000.000**		**6.050.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30	5.000.000	30 orang	5.000.000	30	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**91.908.000**		**153.500.000**		**111.210.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			40 orang	45.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	11	91.908.000	11 RW	108.000.000	11	111.210.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**4.000.000**		**8.500.000**		**4.840.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	1	4.000.000	3 jenis	8.500.000	1	4.840.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**31.600.000**		**29.000.000**		**38.240.000**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	45	16.600.000	25 orang	16.000.000	45	20.090.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	68	15.000.000	68 RT/RW	13.000.000	68	18.150.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.15	**Program Keluarga Berencana**			**6.500.000**		**11.000.000**		**7.870.000**				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2		2					
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25	6.500.000	25 kader	11.000.000	25	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**8.750.000**		**11.000.000**		**10.590.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	8.750.000	1 orang	11.000.000	12	10.590.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**2.500.000**		**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program penyusunan profil kecamatan/kelurahan			1 Dokumen	2.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**2.200.000**		**8.500.000**		**2.660.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan maslaah kesehatan	25	2.200.000	30 kader	8.500.000	25	2.660.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**114.000.000**		**161.980.000**		**137.940.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	114.000.000	12 Laporan	161.980.000	12	137.940.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**6.500.000**		**7.500.000**		**7.870.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	6.500.000	1 lomba	7.500.000	1	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**4.600.000**		**4.500.000**		**5.570.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30	4.600.000	30 pemuda	4.500.000	30	5.570.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**9.000.000**		**9.000.000**		**10.890.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	9.000.000	12 dokume	9.000.000	12	10.890.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**17.000.000**		**31.000.000**		**20.570.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2	17.000.000	2 acara	22.500.000	2	20.570.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan wawasan kebangsaan			100 orang	8.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**15.000.000**		**14.000.000**		**18.150.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1	15.000.000	1 kontinger	14.000.000	1	18.150.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**19.000.000**		**24.000.000**		**22.990.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	2	19.000.000	2 kegiatan	24.000.000	2	22.990.000	kelurahan kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.19	**Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong**			**18.000.000**		**26.500.000**		**21.780.000**				
1	1.3.19.5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	40	18.000.000	20 m	26.500.000	40	21.780.000	RW X Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**16.500.000**		**16.500.000**		**19.970.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	16.500.000	30 orang	16.500.000	30	19.970.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**19.000.000**		**25.000.000**		**22.990.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	70	19.000.000	5 cabang Ol	25.000.000	70	22.990.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**20.000.000**		**26.000.000**		**24.200.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	15.000.000	2 kegiatan	20.500.000	2	18.150.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	5.000.000	11 RW	5.500.000	1	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**7.000.000**		**6.000.000**		**8.470.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampaikannya informasi penanganan peyakit AIDS	50	7.000.000	30 orang	6.000.000	50	8.470.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**12.100.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12	10.000.000	1 Lokasi	10.000.000	12	12.100.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**13.000.000**		**14.000.000**		**15.730.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	11	13.000.000	22 kader	14.000.000	11	15.730.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**5.000.000**		**8.000.000**		**6.050.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	11	5.000.000	30 kader	8.000.000	11	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**6.500.000**		**10.000.000**		**7.870.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI untuk ibu hamil	10	6.500.000	20 bumil	10.000.000	10	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan**			**146.000.000**		**257.700.000**		**175.910.000**				
1	1.3.44.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan di tingkat RW			126 m2	16.600.000		0	RW VI Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.44.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan di tingkat RW			200 m2	26.400.000		0	RW I Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.44.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW		0	46,5 m2	6.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.44.35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	80	18.000.000	50 m2	12.000.000	80	21.780.000	RW II Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.44.36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	75	18.000.000	30 m2	20.000.000	75	21.780.000	RW III Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.44.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50	15.000.000	29,4 m2	19.400.000	50	17.600.000	RW VIII Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.44.42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	300	20.000.000	30 m2	19.800.000	300	24.000.000	RW IX Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.44.45	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	11	35.000.000	1 paket	50.000.000	11	42.350.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
9	1.3.44.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	60	16.000.000	68 m2	45.000.000	60	19.360.000	RW V Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
10	1.3.44.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	170	24.000.000	50 m2	42.000.000	170	29.040.000	RW VII Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**5.000.000**		**7.500.000**		**6.050.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	30	5.000.000	20 m	7.500.000	30	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa			35	10.000.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**0**		**25.000.000**		**0**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya upaya untuk mendukung penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan			50	9.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			280	15.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
			TOTAL		**801.106.000**		**1.133.546.000**		**968.630.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : KMU-Kelurahan Kramat Selatan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**167.108.000**		**162.294.000**		**202.210.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	9.300.000	12 tagihan	11.100.000	12	11.250.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	7	3.400.000	8 unit	3.050.000	7	4.110.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	19.653.000	1 orang	21.000.000	12	23.780.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	13.000.000	19 jenis	10.000.000	67	15.730.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	4.500.000	2 jenis	5.400.000	2	5.450.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	9.500.000	9 jenis	3.500.000	5	11.500.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
7	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	3.647.000	2 jenis	3.000.000	3	4.420.000	Kelurahan kramat selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	4.200.000	2 jenis	4.080.000	1	5.080.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	2.100.000	14 tabung	2.806.000	1	2.540.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	15.500.000	3 jenis	20.000.000	3	18.760.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	30.000.000	3 orang	18.562.000	1	36.300.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	2	52.308.000	3 orang	55.296.000	2	63.290.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga			8 jenis	4.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**32.940.000**		**48.072.000**		**39.860.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	100	5.000.000	1500 m2	18.000.000	100	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	8	21.440.000	8 unit	23.772.000	8	25.940.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	3	6.500.000	17 unit	6.300.000	3	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.000.000**		**5.000.000**		**6.050.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30	5.000.000	30 orang	5.000.000	30	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**91.908.000**		**153.500.000**		**111.210.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			40 orang	45.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	11	91.908.000	11 RW	108.000.000	11	111.210.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**4.000.000**		**8.500.000**		**4.840.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	1	4.000.000	3 jenis	8.500.000	1	4.840.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**31.600.000**		**29.000.000**		**38.240.000**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	45	16.600.000	25 orang	16.000.000	45	20.090.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	68	15.000.000	68 RT/RW	13.000.000	68	18.150.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.15	**Program Keluarga Berencana**			**6.500.000**		**11.000.000**		**7.870.000**				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2		2					
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25	6.500.000	25 kader	11.000.000	25	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**8.750.000**		**11.000.000**		**10.590.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	8.750.000	1 orang	11.000.000	12	10.590.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**2.500.000**		**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program penyusunan profil kecamatan/kelurahan			1 Dokumen	2.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**2.200.000**		**8.500.000**		**2.660.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan maslaah kesehatan	25	2.200.000	30 kader	8.500.000	25	2.660.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**114.000.000**		**161.980.000**		**137.940.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	114.000.000	12 Laporan	161.980.000	12	137.940.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**6.500.000**		**7.500.000**		**7.870.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	6.500.000	1 lomba	7.500.000	1	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**4.600.000**		**4.500.000**		**5.570.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30	4.600.000	30 pemuda	4.500.000	30	5.570.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**9.000.000**		**9.000.000**		**10.890.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	9.000.000	12 dokume	9.000.000	12	10.890.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**17.000.000**		**31.000.000**		**20.570.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2	17.000.000	2 acara	22.500.000	2	20.570.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan wawasan kebangsaan			100 orang	8.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**15.000.000**		**14.000.000**		**18.150.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1	15.000.000	1 kontinger	14.000.000	1	18.150.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**19.000.000**		**24.000.000**		**22.990.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	2	19.000.000	2 kegiatan	24.000.000	2	22.990.000	kelurahan kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.19	**Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong**			**18.000.000**		**26.500.000**		**21.780.000**				
1	1.3.19.5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	40	18.000.000	20 m	26.500.000	40	21.780.000	RW X Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**16.500.000**		**16.500.000**		**19.970.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	16.500.000	30 orang	16.500.000	30	19.970.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**19.000.000**		**25.000.000**		**22.990.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	70	19.000.000	5 cabang Ol	25.000.000	70	22.990.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**20.000.000**		**26.000.000**		**24.200.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	15.000.000	2 kegiatan	20.500.000	2	18.150.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	5.000.000	11 RW	5.500.000	1	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**7.000.000**		**6.000.000**		**8.470.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampaikannya informasi penanganan peyakit AIDS	50	7.000.000	30 orang	6.000.000	50	8.470.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**10.000.000**		**10.000.000**		**12.100.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12	10.000.000	1 Lokasi	10.000.000	12	12.100.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**13.000.000**		**14.000.000**		**15.730.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	11	13.000.000	22 kader	14.000.000	11	15.730.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**5.000.000**		**8.000.000**		**6.050.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	11	5.000.000	30 kader	8.000.000	11	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**6.500.000**		**10.000.000**		**7.870.000**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI untuk ibu hamil	10	6.500.000	20 bumil	10.000.000	10	7.870.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan**			**146.000.000**		**257.700.000**		**175.910.000**				
1	1.3.44.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan di tingkat RW			126 m2	16.600.000		0	RW VI Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.44.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan di tingkat RW			200 m2	26.400.000		0	RW I Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.44.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW		0	46,5 m2	6.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.44.35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	80	18.000.000	50 m2	12.000.000	80	21.780.000	RW II Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.44.36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	75	18.000.000	30 m2	20.000.000	75	21.780.000	RW III Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.44.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50	15.000.000	29,4 m2	19.400.000	50	17.600.000	RW VIII Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.44.42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	300	20.000.000	30 m2	19.800.000	300	24.000.000	RW IX Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.44.45	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	11	35.000.000	1 paket	50.000.000	11	42.350.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
9	1.3.44.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	60	16.000.000	68 m2	45.000.000	60	19.360.000	RW V Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
10	1.3.44.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	170	24.000.000	50 m2	42.000.000	170	29.040.000	RW VII Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**5.000.000**		**7.500.000**		**6.050.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	30	5.000.000	20 m	7.500.000	30	6.050.000	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa			35	10.000.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**0**		**25.000.000**		**0**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya upaya untuk mendukung penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan			50	9.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			280	15.500.000		0	Kelurahan Kramat Selatan	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
			TOTAL		**801.106.000**		**1.133.546.000**		**968.630.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : KMU-Kelurahan Wates
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**116.570.000**		**122.890.000**		**140.980.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	12.300.000	4 item	17.400.000	12	14.890.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8	2.100.000	8 kendaraar	1.606.000	8	2.550.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan			0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12	18.840.000	296 m2	21.500.000	12	22.800.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67	13.000.000	64 item	10.136.000	67	15.730.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	35	Rencana, ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	2.890.000	2 macam	4.041.000	2	3.500.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	2.000.000	5 macam	2.200.000	4	2.420.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
8	4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	3.650.000	4 item	3.647.000	3	4.420.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
9	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	3.800.000	1macam	4.800.000	1	4.500.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
10	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	780.000	2 macam	850.000	1	950.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
11	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3	9.770.000	60 orang	10.750.000	3	11.820.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
12	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	30.000.000	5 kegiatan	25.200.000	1	36.300.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	64	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	17.440.000	1orang	20.760.000	1	21.100.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**260.140.000**		**48.870.000**		**53.420.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	296	22.900.000	296m2	20.000.000	296	27.710.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	55	Rencana, ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7	15.740.000	7 kendaraar	17.320.000	7	19.050.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	3	5.500.000	3 macam	6.050.000	3	6.660.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
4	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		20	108.000.000	8 macam	0	0	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
5	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		10	108.000.000	3 macam	0		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	34	Rencana
6	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			8macam	5.500.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**0**		**3.303.000**		**0**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	terlaksananya pelatihan tenaga pendidik PAUD			24 orang	3.303.000		0	Kelurahan wates	Dana Alokasi Umum	66	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**5.150.000**		**12.170.000**		**6.240.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	30	5.150.000	280 orang	5.670.000	30	6.240.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan			50 orang	6.500.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	79	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**34.700.000**		**70.000.000**		**41.990.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	12	24.000.000	13 rw	59.000.000	12	29.040.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	64	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	1	10.700.000	40org	11.000.000	1	12.950.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**4.750.000**		**9.000.000**		**5.750.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	2	4.750.000	3 macam	9.000.000	2	5.750.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**27.040.000**		**43.815.000**		**32.720.000**				
1	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlantiknya ketua RT/RW			97 rt/rw	8.615.000		0	Kelurahan wates	Dana Alokasi Umum	84	Mempertegas Skenario Kemitraan, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25	6.240.000	25 orang	20.800.000	25	7.550.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
3	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	25	20.800.000	97 rt/rw	14.400.000	25	25.170.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**											
	2.8.15	**Program Keluarga Berencana**			**4.120.000**		**4.540.000**		**4.990.000**				
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2		2		2					
1	2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	30	4.120.000	25 kader KB	4.540.000	30	4.990.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak, Rencana
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**3.000.000**		**6.000.000**		**3.630.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselelnggaranya pelayanan perpustakaan	12	3.000.000	1 lokasi	6.000.000	12	3.630.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**5.520.000**		**4.396.000**		**6.680.000**				
			Persentase alat laboraturium terkalibrasi	100%		100%		100%					
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%		<20%					
			Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%		<45%					
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%		<15,4%					
1	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan maslaah kesehatan	30	5.520.000	150 orang	4.396.000	30	6.680.000	Kel. Wates	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**139.990.000**		**217.226.000**		**169.390.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12	139.990.000	13 rw	217.226.000	12	169.390.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**3.840.000**		**6.078.000**		**4.650.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1	3.840.000	1 pertemua	6.078.000	1	4.650.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**6.680.000**		**6.600.000**		**8.090.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	25	6.680.000	50 anggota	6.600.000	25	8.090.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**2.690.000**		**2.690.000**		**3.260.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12	2.690.000	12 bulan	2.690.000	12	3.260.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**34.030.000**		**31.553.000**		**41.170.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	4	34.030.000	2 kegiatan	24.351.000	4	41.170.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama			100 orang	7.202.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**30.160.000**		**75.000.000**		**36.500.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	3	30.160.000	3 kegiatan	75.000.000	3	36.500.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	45	Mempertegas Skenario Kemitraan, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Rencana
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**20.890.000**		**35.000.000**		**25.270.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	2	20.890.000	1 kegiatan	35.000.000	2	25.270.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**15.180.000**		**14.415.000**		**18.370.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30	15.180.000	70 kader	14.415.000	30	18.370.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	45	Mempertegas Skenario Kemitraan, Rencana
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**15.400.000**		**25.000.000**		**18.640.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	50	15.400.000	100 peserta	25.000.000	50	18.640.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**14.820.000**		**18.336.000**		**17.930.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2	10.390.000	2 kegiatan	13.466.000	2	12.570.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1	4.430.000	1 kegiatan	4.870.000	1	5.360.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	45	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**8.500.000**		**10.290.000**		**10.290.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	8.500.000	1 lokasi	10.290.000	1	10.290.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi MKSB, Rencana, Kota Sejuta Bunga

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.40	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates**			**35.000.000**		**307.800.000**		**109.000.000**				
1	1.3.40.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	0	0	143m, 86m	175.000.000	104	74.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.40.47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI		0	0	55 m	0	0	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.40.48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII		0	0	47 m	0	0	0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.40.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	13	35.000.000	1 paket	50.000.000	13	35.000.000	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
5	1.3.40.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong RW II			30 m	22.600.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.40.44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong RW VII			30 m	22.600.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.40.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terpeliharanya jalan dan jembatan Kelurahan			75m2, 80 m	37.600.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**0**		**6.262.000**		**0**				
			Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		Ada		Ada					
1	2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender			50 orang	6.262.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	86	Kota Layak Anak
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**7.000.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak			20 orang	7.000.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	86	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**0**		**5.915.000**		**0**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera			1 kelompok	5.915.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**6.000.000**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Terlaksananya sosialisasi penanganan penyakit AIDS			30 orang	6.000.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	69	Rencana
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**0**		**5.000.000**		**0**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita			30 kader	5.000.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	66	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**0**		**5.000.000**		**0**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terpeliharanya kesehatan lansia			30 orang	5.000.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	66	Rencana
	1.2.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**0**		**5.000.000**		**0**				
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%		95%					
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%		100%					
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		92%		95%					
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%		100%					
1	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terlaksananya program GSI			30 orang	5.000.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	66	Rencana
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	terfasilitasinya pertemuan rutin kelompok KIM			4 pertemua	10.000.000		0	Kelurahan wates	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**0**		**7.190.000**		**0**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile kecamatan/kelurahan			1 dokumen	7.190.000		0	Kelurahan Wates	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
			TOTAL		**788.170.000**		**1.132.339.000**		**758.960.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

SKPD : Kecamatan Magelang Tengah
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**575.436.150**		**652.952.000**		**619.169.640**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, Air, dan Internet	12	23.058.000	12 bulan	62.400.000	12	28.393.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayar	10	2.425.500	10 kenda	3.000.000	10	2.934.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12	358.461.000	12	362.589.000	12	358.461.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
4	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan dan Alat Pembersih	2	38.320.800	12 bulan	66.764.000	2	46.468.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli	61	35.830.200	10 jenis	16.226.000	61	40.934.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
6	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	2	8.326.500	2	5.572.000	2	10.075.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik	9	2.901.150	9	5.000.000	9	3.510.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	49	ExBAU
8	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Surat Kabar Yang Dibeli Tiap Bulan	2	3.465.000	2 jenis	3.465.000	2	4.192.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
9	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi Tabung Gas	1	2.709.000	1	2.689.000	1	3.277.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
10	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	6	37.485.000	30 pegaw	48.294.000	6	45.356.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Yang Dilakukan	1	62.454.000	1	57.321.000	1	75.569.640	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
12	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kerja Penjaga Malam			12	19.632.000		0	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**231.671.600**		**359.825.000**		**273.300.000**				
1	4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas Rumah Dinas yang Dipelihara	250	8.946.000	pemeliha	10.000.000	250	11.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara	800	43.319.850	gedung k	45.124.000	800	48.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
3	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10	80.577.000	10 kenda	93.376.000	10	90.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	100	210.000	2 jenis	1.000.000	100	300.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang Dipelihara	9	15.225.000	6 jenis	14.553.000	9	19.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibeli			1	39.740.000		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	64	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
7	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	9	63.393.750	9	156.032.000	9	75.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
8	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor			20.000.000	5	0		30.000.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
	4.1.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**9.979.200**		**10.951.000**		**12.074.000**				
1	4.1.5.5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Program Pembinaan dan Evaluasi Yang Dilaksanakan	1	9.979.200	1 kegiata	10.951.000	1	12.074.000	Kelurahan se-Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	49	Rencana
	4.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**83.500.000**		**87.622.000**		**101.035.000**				
1	4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan RFK Yang Tersusun	4	25.000.000	4	26.625.000	4	30.250.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
2	4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	2	20.000.000	2 dokum	20.597.000	2	24.200.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
3	4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	2	28.500.000	2	31.937.000	2	34.485.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP yang Tersusun	5	10.000.000	1 laporan	8.463.000	5	12.100.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
5		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	0	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**17.726.100**		**22.831.000**		**21.448.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Jumlah Lomba Yang Dilaksanakan	4	17.726.100	3 macam	22.831.000	4	21.448.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**40.000.000**		**37.664.000**		**48.400.000**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	pembinaan dan pemantauan kegiatan linmas	4	40.000.000	triwulana	37.664.000	4	48.400.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**8.973.300**		**0**		**10.857.000**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan ke		60 kali siar/ 5 agama dan ke		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperc		12 kali/ 5 agama dan keperc		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website		70	8.973.300	70	0	70	10.857.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**111.398.700**		**123.972.000**		**134.792.000**				
			Jumlah gedung kesenian	1		1		2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13		14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77		78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39		41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79		80					
			Cakupan tempat 100%	100		100		100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100		100					
			DISPORA		92,000,000				30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1	111.398.700	1 pagelar	123.972.000	1	134.792.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**111.462.750**		**115.594.000**		**134.869.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	4	20.792.100	4	24.650.000	4	25.158.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	54	Memperkuat Implementasi MKSB
2	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Stabilitas Keamanan	12	90.670.650	12 kali ke	72.999.000	12	109.711.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
3	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	terlaksananya lomba Poskamling			1 lomba	17.945.000		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	59	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**5.250.000**		**14.797.000**		**6.352.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	forum anak yang terfasilitasi	6	5.250.000	6 kegiata	14.797.000	6	6.352.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**46.509.750**		**49.937.000**		**56.276.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Lomba K3	2	46.509.750	2 kegiata	49.937.000	2	56.276.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Program prioritas RPJM
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**14.209.650**		**13.248.000**		**17.193.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	1	14.209.650	1 kali keg	13.248.000	1	17.193.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**10.610.250**		**14.082.000**		**12.838.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Kegiatan Karnaval pembangunan	1	10.610.250	1 kali kar	14.082.000	1	12.838.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	45	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**30.159.150**		**51.257.000**		**36.584.000**				
			Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	96.99%		97.31%		97.63%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%		100%		100%					
			Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%		100%		100%					
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	15.00%		20.00%		25.00%					
			Jumlah Juara FASI	4		-		-					
			Jumlah Juara MTQ	1		2		2					
1	1.1.18.28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba MTQ	170	30.159.150	170 pese	51.257.000	170	36.584.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**0**		**23.160.000**		**0**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			4 pokja	23.160.000		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	35	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**31.425.450**		**29.929.000**		**38.024.000**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,52941		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah TP PKK Yang Terbina	7	31.425.450	7 TP PKK	29.929.000	7	38.024.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	45	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**12.178.950**		**8.984.000**		**14.736.000**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Peserta Penyuluhan	60	12.178.950	60 peser	8.984.000	60	14.736.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**25.000.000**		**32.786.000**		**30.000.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Olah Raga Yang Dilaksanakan	2	25.000.000	3 lomba	32.786.000	2	30.000.000	Kantor Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**27.686.400**		**30.796.000**		**33.500.000**				
1	4.3.21.1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Laporan Pra Musrenbang	5	11.945.850	laporan p	13.027.000	5	14.454.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	160	15.740.550	160 pese	17.769.000	160	19.046.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**139.965.000**		**60.000.000**		**169.357.000**				
1	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Paket Pekerjaan		139.965.000	keluraha	60.000.000		169.357.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	50	Rencana, Akomodasi Musrenbang
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**			**0**		**97.027.000**		**0**				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%		100%					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%		72%					
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah Kegiatan PATEN yang dilaksanakan			12	97.027.000		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	45	Memperkuat Implementasi MKSB
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**0**		**12.784.000**		**0**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah kegiatan Kearsipan			4 jenis do	12.784.000		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**0**		**15.602.000**		**0**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah Kegiatan Monitoring yang dilaksanakan			4 monev	15.602.000		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**9.675.000**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan			60 peser	9.675.000		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**57.000.000**		**64.218.000**		**68.970.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	100	57.000.000	3 orang t	64.218.000	100	68.970.000	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**0**		**28.608.000**		**0**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah tenaga kerja pendukung pelayanan publik			6 orang t	13.950.000		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan informasi kependudukan			12 lapora	14.658.000		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**21.820.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	terlaksananya kegiatan FKDM			4 kegiata	21.820.000		0	Kecamatan Magelang Tengah	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
			TOTAL		**1.590.142.400**		**1.990.121.000**		**1.839.774.640**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

SKPD : KMT-Kelurahan Kemirirejo
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**101.113.950**		**157.684.000**		**122.347.880**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	13.356.000	12 bulan	13.920.000	100	16.160.760	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pembayaran STNK	10	1.680.000	10 Kendaraan	1.900.000	10	2.032.800	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	100	18.900.000	12 bulan	41.100.000	100	22.869.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya pembelian ATK	100	8.482.950	100	8.557.000	100	10.264.370	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya barang cetakan dan penggandaan	100	3.675.000	12 bulan	6.780.000	100	4.446.750	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor	100	1.260.000	12 bulan	1.154.000	100	1.524.600	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	100	1.260.000	12 bulan	3.744.000	100	1.524.600	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercapainya logistik kantor/pembelian gas elpiji	100	2.100.000	12 bulan	1.812.000	100	2.541.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum tamu	100	18.900.000	100	14.229.000	100	22.869.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya rapat rapat koordinasi keluar daerah	100	31.500.000	4 kegiatan	25.200.000	100	38.115.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga kontrak/honorer	100	0	12 bulan	39.288.000	100	0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	60	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**46.515.000**		**51.958.000**		**56.283.150**				

1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	100	17.115.000	1 kegiatan	12.778.000	100	20.709.150	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas	100	22.050.000	10 Kendaraan	22.800.000	100	26.680.500	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	85	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	100	7.350.000	10 Unit	6.700.000	100	8.893.500	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	50	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			4 jenis	9.680.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
5	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				2 Jenis	0		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
6	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				5 Jenis	0		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.617.500**		**5.547.000**		**6.797.175**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Tercapainya pendidikan anak usia dini	100	5.617.500	100	5.547.000	100	6.797.175	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	96	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**8.937.600**		**13.643.000**		**10.814.496**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan	14.26%		17.12%		20.55%					

			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya keamanan lingkungan	100	8.937.600	100	13.643.000	100	10.814.496	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**91.355.250**		**124.138.000**		**110.539.853**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tercapainya kebersihan lingkungan kelurahan	100	76.077.750	100	106.744.000	100	92.054.078	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Manajemen
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya pengembangan kampung organi	100	15.277.500	100	9.961.000	100	18.485.775	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	76	Memperkuat Implementasi Manajemen
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Tercapainya monitoring dan evaluasi pelaporan			12	7.433.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	50	Memperkuat Implementasi Manajemen
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**8.085.000**		**23.208.000**		**9.782.850**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					

1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tercapainya peningkatan pelayanan	100	8.085.000	100	6.215.000	100	9.782.850	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	100	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya pembuatan laporan kependudukan			12 Laporan	16.993.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**26.424.300**		**27.063.000**		**31.973.403**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Tercapainya pemilihan dan pelantika Ketua LPM Kelurahan Kemirirejo	100	16.800.000	1	4.249.000	100	20.328.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	84	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Tercapainya pembinaan RT/RW	100	9.624.300	12	11.825.000	100	11.645.403	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	91	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Tercapainya Pelantikan RT dan RW			1	10.989.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	55	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**2.656.500**		**9.420.000**		**3.214.365**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah:										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan		60 kali siar/ 5 agama dan		60 kali siar/ 5 agama dan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercaya		12 kali/ 5 agama dan kepercaya		12 kali/ 5 agama dan kepercaya					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					

1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Tercapainya pengembangan sumber daya komunikasi dan	100	2.656.500	100	9.420.000	100	3.214.365	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Memperkuat Implementasi Masterplan
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**10.080.000**		**10.884.000**		**12.196.800**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)		100	3.150.000	50 buku	0	100	3.811.500	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Masterplan
2	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Tercapainya pengelolaan buku perpustakaan	100	6.930.000	12	10.884.000	100	8.385.300	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	94	Memperkuat Implementasi Masterplan
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**4.237.800**		**3.986.000**		**5.127.738**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tercapainya prmbuatan profil kelurahan	100	4.237.800	100	3.986.000	100	5.127.738	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	94	Memperkuat Implementasi Masterplan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**123.669.000**		**165.782.000**		**149.639.490**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				

			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	100	123.669.000	100	156.827.000	100	149.639.490	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	70	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tercapainya kegiatan lomba siskamling			1	8.955.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Khusus	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**10.500.000**		**8.608.000**		**12.705.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Tercapainya peningkatan lembagaan perempuan dan anak	100	10.500.000	100	8.608.000	100	12.705.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**5.512.500**		**6.256.000**		**6.670.125**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya K3	100	5.512.500	100	6.256.000	100	6.670.125	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Manajemen
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**6.652.800**		**5.254.000**		**8.049.888**				

			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Tercapainya pembinaan karangtaruna	100	6.652.800	100	5.254.000	100	8.049.888	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	70	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**26.613.300**		**18.439.000**		**32.202.093**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tercapainya penataan arsip/dokumen	100	26.613.300	100	18.439.000	100	32.202.093	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											

	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**0**		**6.553.000**		**0**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya kerukunan dalam beragama			1 kegiatan	6.553.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	50	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**22.878.450**		**33.815.000**		**27.682.925**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tercapainya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100	5.250.000	100	19.105.000	100	6.352.500	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya	100	17.628.450	2	14.710.000	100	21.330.425	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**13.765.500**		**16.798.000**		**16.656.255**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselengaranya BBGRM	100	13.765.500	100	16.798.000	100	16.656.255	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**15.750.000**		**11.463.000**		**19.057.500**				

			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Tercapainya pembinaan PKK	100	15.750.000	100	11.463.000	100	19.057.500	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	75	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**14.553.000**		**19.920.000**		**17.609.130**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional,	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Tercapainya kegiatan porseni kelurahan dan senam PKK	100	14.553.000	100	19.920.000	100	17.609.130	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**14.875.350**		**16.333.000**		**17.999.174**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang	100	11.519.550	1 kegiatan	12.283.000	100	13.938.656	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	70	Rencana

2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang	100	3.355.800	2 kegiatan	4.050.000	100	4.060.518	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Rencana
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**10.500.000**		**9.743.000**		**12.705.000**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terpeliharaan kesehatan masyarakat	100	10.500.000	1 kegiatan	9.743.000	100	12.705.000	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**12.285.000**		**8.131.000**		**14.864.850**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Tercapainya pemeliharaan RTH	100	12.285.000	100	8.131.000	100	14.864.850	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Program 100-0-100
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**24.595.200**		**32.274.000**		**29.760.192**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					

			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Tercapainya peningkatan kesehatan anak balita	100	24.595.200	12	32.274.000	100	29.760.192	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**14.629.650**		**42.148.000**		**17.701.877**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Tercapainya pemeliharaan kesehatan	100	14.629.650	2 jenis	42.148.000	100	17.701.877	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	65	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**0**		**0**		**0**				
1	1.3.30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk Kelurahan				8 tiang	0		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang
	1.3.45	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo**			**36.750.000**		**131.980.000**		**44.467.500**				
1	1.3.45.10	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I				1 kegiatan	0		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.45.37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Tercapainya pemeliharaan infrastruktur	100	36.750.000	100	50.000.000	100	44.467.500	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.45.19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I				30 Meter	0		0	RW I Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	79	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.45.11	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II				1 kegiatan	0		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.45.13	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Tercapainya pembangunan saluran drainase RW IV			1 kegiatan	15.480.000		0	Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.45.21	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III				1 kegiatan	0		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.45.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Tercapainya pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan RW VIII			1 kegiatan	18.500.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang
8	1.3.45.18	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Tercapainya pembangunan saluran drainase RW IX			1 kegiatan	48.000.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**			**0**		**19.644.000**		**0**				

			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%		100%					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%		72%					
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tercapainya pelayanan kedinasan OPD			12	19.644.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	70	Tema RKPD 2019
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**0**		**3.671.000**		**0**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Tercapainya penyuluhan pencegahan narkoba dan miras			1 kegiatan	3.671.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	50	Kota Layak Anak
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**9.732.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										

			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Tercapainya kegiatan rakor PKK			12 bulan	9.732.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**4.013.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksanannya kegiatan FKDM			2	4.013.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**0**		**7.112.000**		**0**				
			Jumlah gedung kesenian	1		1		2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13		14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77		78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39		41					

			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79		80					
			Cakupan tempat 100%	100		100		100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100		100					
			DISPORA		92,000,000				30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			1 kegiatan	7.112.000		0	Kelurahan Kemirirejo	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
			TOTAL		658.552.650		1.005.200.000		796.848.709				
					658.552.650		**1.005.200.000**		**796.848.709**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : KMT-Kelurahan Cacaban
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**165.110.000**		**174.845.000**		**199.783.100**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran rekening listrik, PDAM, telepon, internet	12	22.000.000	4 Jenis	24.200.000	12	26.620.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas	9	1.100.000	10 Unit	1.210.000	11	1.331.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pengadaan bahan pembersih dan upah petugas kebersihan kantor	12	19.800.000	9 Jenis	21.780.000	12	23.958.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan alat tulis kantor	12	11.550.000	12 Jenis	12.705.000	12	13.975.500	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak buku register administrasi, banner/spanduk dan photo copi.	12	6.600.000	2 jenis	7.260.000	12	7.986.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belanja koponen listrik	5	2.200.000	5 Jenis	2.420.000	5	2.662.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	pengadaan koran/uahbahan bacaan	14	1.650.000	48 eksempl	1.815.000	14	1.996.500	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	pengadaan LPG/BBM	12	1.210.000	3 Jenis	1.331.000	12	1.464.100	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyedian makanan dan minuman parat dan karyawan	12	20.900.000	8 Jenis	22.990.000	12	25.289.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	4	38.500.000	4 Kegiatan	35.574.000	4	46.585.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	pnyediaan tenaga kontrak	12	39.600.000	2 orang	43.560.000	12	47.916.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**239.800.000**		**263.780.000**		**290.158.000**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1	209.000.000	1 Gedung	229.900.000	1	252.890.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	9	19.800.000	9 Unit	21.780.000	9	23.958.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	15	2.200.000	7 Unit	2.420.000	15	2.662.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan kantor	8	8.800.000	7 Unit	9.680.000	8	10.648.000	Kantor Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**7.700.000**		**8.470.000**		**9.317.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	8470000	6	7.700.000	7 Pos PAUD	8.470.000	6	9.317.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**45.100.000**		**49.610.000**		**54.571.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Upah petugas dan biaya operasional	12	33.000.000	14 Orang	36.300.000	12	39.930.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	84	ExBAU
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembanan kampung organik	1	12.100.000	1 Lokasi	13.310.000	1	14.641.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik				1 Lokasi			0	Kelurahan cacaban	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**7.700.000**		**8.470.000**		**9.317.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Pembinaan administrasi kependudukan	12	7.700.000	120 Orang	8.470.000	12	9.317.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan				12 Laporan			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**9.350.000**		**34.485.000**		**11.313.500**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Pembinaan administrasi RT/RW	86	9.350.000	120 Orang	10.285.000	86	11.313.500	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
2	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Pelantikan Ketua RT / RW Masa Bakti 2019-2022		0	120 Orang	24.200.000		0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
3	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan				100 Orang			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**7.150.000**		**7.865.000**		**8.651.500**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	1	7.150.000	1 Orang	7.865.000	1	8.651.500	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**3.300.000**		**3.630.000**		**3.993.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Penyusunan buku profil kelurahan	5	3.300.000	5 Buku	3.630.000	5	3.993.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**132.000.000**		**145.200.000**		**159.720.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	koordinasi keamanan dan ketertiban	86	132.000.000	120 Orang	145.200.000	86	159.720.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	74	ExBAU
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan				12 Peserta			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**5.500.000**		**6.050.000**		**6.655.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Pemberdayaan perempuan dan anak	12	5.500.000	50 Anak	6.050.000	12	6.655.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**5.500.000**		**6.050.000**		**6.655.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	pembinaan kepemudaan (karang taruna)	12	5.500.000	50 Pemuda	6.050.000	12	6.655.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**17.600.000**		**19.360.000**		**21.296.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	penataan dan pengamanan arsip	12	17.600.000	12 Bulan	19.360.000	12	21.296.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	35	ExBAU
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**0**		**0**		**0**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama				125 Orang			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**30.800.000**		**33.880.000**		**37.268.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Penyelenggaraan Grebeg Gethuk dan Grebeg Besar	2	19.800.000	2 Kegiatan	21.780.000	2	23.958.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	81	Akomodasi Musrenbang
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval 17 agustus	1	11.000.000	1 Kegiatan	12.100.000	1	13.310.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	81	ExBAU
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**19.800.000**		**21.780.000**		**23.958.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	peren serta masyarakat dalam pembangunan	12	19.800.000	4 Lomba	21.780.000	12	23.958.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**14.300.000**		**15.730.000**		**17.303.000**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Penyelenggaraan keg PKK	12	14.300.000	40 Orang	15.730.000	12	17.303.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	74	ExBAU
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**16.500.000**		**18.150.000**		**19.965.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	kegiatan Pekan Olahraga antar Kelurahan	5	16.500.000	5 CabOr	18.150.000	5	19.965.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**17.600.000**		**19.360.000**		**21.296.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Kegiatan musyawarah rencanapembangunan tahunan	12	14.300.000	150 Orang	15.730.000	12	17.303.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	kegiatan survey hasil musrenbang	12	3.300.000	28 Orang	3.630.000	12	3.993.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**6.600.000**		**7.260.000**		**7.986.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	pemeliharaan taman-taman lingkungan	4	6.600.000	5 RTH	7.260.000	4	7.986.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	69	ExBAU
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**14.300.000**		**15.730.000**		**17.303.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	penyelenggaraan Posyandu balita	13	14.300.000	13 Posyand	15.730.000	13	17.303.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	74	ExBAU
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**16.500.000**		**18.150.000**		**19.965.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Penyelenggaran Posyandu Lansia	12	16.500.000	12 Posyand	18.150.000	12	19.965.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	74	ExBAU
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.46	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban**			**38.500.000**		**42.350.000**		**46.585.000**				
1	1.3.46.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I				150 m2			0	RW. I	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.46.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V				30 m2			0	RW. V	Dana Alokasi Umum	84	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.46.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Pemeliharaan infrastur kelurahan	12	38.500.000	12 Lokasi	42.350.000	12	46.585.000	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	44	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.46.39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III				50 m2			0	RW. III	Dana Alokasi Umum	59	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.46.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV				10 m2			0	RW.4	Dana Alokasi Umum	60	Akomodasi Musrenbang
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**0**		**0**		**0**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				12 Peserta			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	79	Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**0**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)				50 Orang			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**0**		**0**		**0**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba				50 Orang			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**0**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan				30 Orang			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	69	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**0**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat				50 Orang			0	kelurahan cacaban	Dana Alokasi Umum	64	Akomodasi Musrenbang
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**0**		**0**		**0**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan				40 Anggota			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	55	Akomodasi Musrenbang
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**0**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi				50 Orang			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	79	Akomodasi Musrenbang
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**0**		**0**		**0**				
			Jumlah gedung kesenian	1		1		2					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13		14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77		78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39		41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79		80					
			Cakupan tempat 100%	100		100		100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100		100					
			DISPORA		92,000,000				30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah				150 Orang			0	Kelurahan Cacaban	Dana Alokasi Umum	86	ExBAU
			TOTAL		**820.710.000**		**920.205.000**		**993.059.100**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

SKPD : KMT- Kelurahan Rejowinangun Utara
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**210.705.400**		**250.386.000**		**234.176.830**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa layanan telepon, air, listrik dan internet	12	15.600.000	4 item	25.200.000	12	17.199.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan kendaraan dinas	10	4.000.000	8motor, 1 p	2.200.000	10	4.410.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	12	54.893.000	11 item	61.185.000	12	60.519.533	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	10.488.400	38 item	13.000.000	12	11.563.461	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	40	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	9.510.000	2 item	13.585.000	12	10.484.775	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan	12	1.768.000	4 item	2.772.000	12	1.949.220	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	12	5.340.000	2 item	5.352.000	12	5.887.350	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	1.730.000	12 bulan	2.160.000	12	1.907.325	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12	25.068.000	12 bulan	25.068.000	12	27.637.470	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	30.000.000	5 kali kegiat	21.336.000	100	33.075.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	12	34.872.000	3 orang	58.896.000	12	38.446.380	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan SKPD	12	17.436.000	1 orang	19.632.000	12	21.097.316	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**225.790.000**		**69.855.000**		**208.416.601**				
1	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1	130.280.000	0	0	1	143.633.700	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	10	32.145.000	10 kendara	30.995.000	10	35.439.863	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1	9.925.000	15 item	10.680.000	1	10.942.313	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1	2.470.000	3 unit	8.180.000	1	2.723.175	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	14.220.000	1 gedung ka	20.000.000	1	15.677.550	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
6	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		2	36.750.000	0	0		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**41.858.000**		**40.664.000**		**46.148.445**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga kerja pengendali keamanan	12	41.858.000	12 laporan	40.664.000	12	46.148.445	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**37.000.000**		**41.767.000**		**40.792.500**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	1	25.000.000	7 orang	23.990.000	1	27.562.500	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terselenggaranya pengembangan kampung organik	1	12.000.000	1 kegiatan	10.000.000	1	13.230.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	84	Kota Sejuta Bunga
3	2.5.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring kampung organik			12 bulan	7.777.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**19.156.000**		**36.260.000**		**21.119.490**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya data kependudukan yang akurat	12	19.156.000	12 laporan	25.760.000	12	21.119.490	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	55	ExBAU
2	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya cetak surat pengantar			2 item	10.500.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**15.660.000**		**31.860.000**		**17.265.151**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya peran LPM dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	1	4.255.000	1 kegiatan	6.584.000	1	4.691.138	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	99	ExBAU
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terbinanya administrasi RT/RW	1	11.405.000	1 kegiatan	15.737.000	1	12.574.013	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terwujudnya Pelantikan Ketua RT dan RW			1 kegiatan	9.539.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	70	ExBAU
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**18.000.000**		**20.196.000**		**19.845.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terkelolanya Buku Perpustakaan	1	18.000.000	1 orang	20.196.000	1	19.845.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**5.890.000**		**6.376.000**		**6.493.725**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile kelurahan	1	5.890.000	3 buku	6.376.000	1	6.493.725	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**151.855.000**		**249.459.000**		**167.420.138**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan keamanan lingkungan	1	151.855.000	12 bulan	249.459.000	1	167.420.138	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan				1 kegiatan	0		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	94	Program prioritas RPJM
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**24.367.000**		**22.650.000**		**26.864.618**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip daerah	12	24.367.000	3 jenis	22.650.000	12	26.864.618	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**21.465.000**		**16.337.000**		**23.665.163**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		1	9.635.000	1 kegiatan	0	1	10.622.588	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	94	Tema RKPD 2019
2	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	1	11.830.000	1 kegiatan	16.337.000	1	13.042.575	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	91	ExBAU
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**37.020.000**		**59.942.000**		**40.814.550**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terfasilitasinya budaya daerah		0	1 kegiatan	16.312.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya	1	16.670.000	1 kegiatan	20.280.000	1	18.378.675	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
3	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Peningkatan kualitas budaya daerah	1	20.350.000	1 kegiatan	23.350.000	1	22.435.875	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	91	ExBAU
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**26.360.000**		**42.573.000**		**29.061.900**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat	1	26.360.000	3 kgt ; lomb	42.573.000	1	29.061.900	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	65	ExBAU
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**37.360.000**		**28.013.000**		**41.189.400**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Peningkatan pemberdayaan PKK	1	37.360.000	12 bulan	28.013.000	1	41.189.400	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**40.000.000**		**46.552.000**		**44.100.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1	40.000.000	4 cabang ol	46.552.000	1	44.100.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**25.000.000**		**21.233.000**		**27.562.500**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang kelurahan	1	20.000.000	1 kegiatan	16.078.000	1	22.050.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	95	ExBAU
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Tersusunnya data dan informasi pembangunan yang akurat	1	5.000.000	1 kegiatan	5.155.000	1	5.512.500	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	90	ExBAU
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**6.000.000**		**7.000.000**		**6.615.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1	6.000.000	1 kegiatan	7.000.000	1	6.615.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	Kota Sejuta Bunga
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**36.000.000**		**37.260.000**		**39.690.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Peningkatan kesehatan balita	1	36.000.000	18 posyand	37.260.000	1	39.690.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**14.000.000**		**11.180.000**		**15.435.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Peningkatan kesehatan lansia	1	14.000.000	8 posyandu	11.180.000	1	15.435.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.47	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara**			**80.062.000**		**217.017.000**		**30.000.000**				
1	1.3.47.78	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	Terpeliharanya Gorong - gorong	248	61.512.000	1	28.768.000	1	10.000.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.47.79	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI	Terpeliharanya gorong-gorong RW XVI		0	1	25.221.000	1	10.000.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.47.77	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	Terpeliharanya gorong-gorong RW XIV	15	18.550.000	1	26.000.000	1	10.000.000	RW 14	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	1.3.47.85	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya Infrastruktur Pedesaan		0	100	50.000.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	ExBAU
5	1.3.47.75	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terlaksananya pemeliharaan gorong-gorong			100	27.021.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	94	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.47.45	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terlaksananya pemeliharaan Jalan Cor Rabat Beton RW III			100	33.795.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	94	Akomodasi Musrenbang
7	1.3.47.43	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terlaksananya pemeliharaan Jalan Cor Rabat Beton RW I			100	26.212.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	94	Akomodasi Musrenbang
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**5.765.000**		**6.225.000**		**6.355.913**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Peningkatan peran serta pemuda	1	5.765.000	1 kegiatan	6.225.000	1	6.355.913	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	90	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**8.000.000**		**8.697.000**		**8.820.000**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak	1	8.000.000	1 kegiatan	8.697.000	1	8.820.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	84	Kota Layak Anak
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**8.000.000**		**6.550.000**		**8.820.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	1	8.000.000	3 kegiatan	6.550.000	1	8.820.000	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	89	Kota Layak Anak
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**7.323.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kep		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbentuknya KIM			1 kegiatan	7.323.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**10.686.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya FKDM Kel Rejo Utara			1 kegiatan	10.686.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	75	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**11.520.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terwujudnya Rapat Pleno Tim PKK			1 kegiatan	11.520.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	94	ExBAU
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**0**		**6.507.000**		**0**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan Miras			1 kegiatan	6.507.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	99	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**8.196.000**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya Pembinaan HIV AIDS			1 kegiatan	8.196.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	99	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**0**		**14.500.000**		**0**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksanya Lomba K3			1 kegiatan	14.500.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	99	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**0**		**11.140.000**		**0**				
			Jumlah gedung kesenian	1		1		2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13		14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77		78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39		41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79		80					
			Cakupan tempat 100%	100		100		100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100		100					
			DISPORA		92,000,000				30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya malam tasyakuran Hari Jadi Kota Magelang			1 kegiatan	11.140.000		0	Kelurahan Rejowinangun Utara	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		**1.095.313.400**		**1.347.924.000**		**1.110.671.924**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : KMT-Kelurahan Magelang
URUSAN : Administrasi pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**0**		**24.834.000**		**0**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan Monografi yang tersusun			12 Laporan	16.569.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
2	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi			80 Orang	8.265.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**0**		**2.250.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Anggota Linmas Yang Dikirim			75 orang	2.250.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**0**		**8.384.000**		**0**				
			Jumlah gedung kesenian	1		1		2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13		14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77		78					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39		41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79		80					
			Cakupan tempat 100%	100		100		100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100		100					
			DISPORA		92,000,000				30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terdukungnya pelaksanaan pentas seni budaya daerah			1 Kegiatan	8.384.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**5.764.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti FKDM			30 Orang	5.764.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**134.645.700**		**166.075.000**		**150.609.637**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik, Air, Telephon dan Internet	12	17.640.000	12 Bulan	16.200.000	12	19.448.100	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor yang dibayar pajaknya	6	2.310.000	7 Unit	2.123.000	6	2.546.775	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang Terbeli; Jumlah petugas kebersihan kantor Kel. Magelang	34	20.009.850	29 jenis ; 1	21.135.000	34	22.060.860	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	44	11.500.000	35 jenis	9.491.000	44	14.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	14.633.850	4 jenis	4.421.000	3	16.133.820	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik yang dibeli	4	1.575.000	5 jenis	1.894.000	4	1.736.438	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12	5.000.000	2 jenis	6.000.000	12	6.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	10	2.400.000	3 jenis	3.371.000	10	3.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah karyawan Kelurahan Magelang	12	18.215.400	15 Orang	17.236.000	12	20.082.479	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibiayai	5	24.465.000	4 kegiatan	25.200.000	5	26.972.663	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penjaga malam dan petugas front office yang tersedia di Kelurahan Magelang	12	16.896.600	3 Orang	59.004.000	12	18.628.502	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**202.488.000**		**38.956.000**		**130.485.520**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang terpelihara	1	75.000.000	1 Unit	15.000.000	1	50.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6	19.488.000	6 Unit	17.925.000	6	21.485.520	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	13	8.000.000	3 jenis	2.238.000	15	9.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				62 m2	0		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
5	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		3	75.000.000	3 Unit	0	1	25.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
6	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		2	25.000.000	3 jenis	0	2	25.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Rencana
7	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			4 Jenis	3.793.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				1 Unit	0		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**7.930.650**		**7.455.000**		**8.743.542**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terselenggara	4	7.930.650	48 Kegiatan	7.455.000	4	8.743.542	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Kota Layak Anak
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**64.174.750**		**124.307.000**		**71.227.662**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah petugas kebersihan sampah dan kebersihan sungai di Kelurahan Magelang	57	54.174.750	5 Orang	111.000.000	57	59.727.662	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung Organik yang terpelihara	6	10.000.000	5 kampung	8.000.000	10	11.500.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Kampung Organik Yang Dimonitor dan Dievaluasi			5 kampung	5.307.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**9.500.000**		**27.877.000**		**10.500.000**				
1	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi			150 orang	10.398.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta pembinaan RT/RW	65	9.500.000	160 orang	9.375.000	65	10.500.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Peserta Pelantikan			100 orang	8.104.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**0**		**21.026.000**		**0**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terkelolanya buku perpustakaan			12 Bulan	21.026.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**2.394.000**		**2.805.000**		**2.639.385**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah buku profil yang tersedia	1	2.394.000	5 buku	2.805.000	1	2.639.385	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Akomodasi Musrenbang
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**103.572.000**		**154.212.000**		**114.188.130**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12	103.572.000	12 Laporan	151.186.000	12	114.188.130	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terbinanya Anggota Poskamling			25 Orang	3.026.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**8.000.000**		**14.930.000**		**9.000.000**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lomba K3 Yang Terselenggara	12	8.000.000	2 Kegiatan	14.930.000	12	9.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**12.000.000**		**12.271.000**		**16.000.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya Dokumen / Arsip di Kelurahan Magelang	12	12.000.000	12 Bulan	12.271.000	12	16.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Akomodasi Musrenbang
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**7.000.000**		**10.509.000**		**8.000.000**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	50	7.000.000	200 Orang	10.509.000	50	8.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**18.500.000**		**25.143.000**		**22.000.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya Karnaval Budaya	1	12.500.000	1 Kegiatan	14.660.000	1	15.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Festival Grebeg gethuk	1	6.000.000	1 Kegiatan	10.483.000	1	7.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**12.000.000**		**7.071.000**		**17.500.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan BBGRM	13	12.000.000	200 Orang	7.071.000	13	17.500.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**13.000.000**		**5.394.000**		**14.332.500**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	12	13.000.000	1 Kegiatan	5.394.000	12	14.332.500	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**15.023.400**		**21.562.000**		**16.563.299**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	5	15.023.400	5 Cabang	21.562.000	5	16.563.299	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**13.500.000**		**13.092.000**		**16.025.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang	140	9.500.000	150 Orang	8.725.000	140	11.025.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah Lokasi yang tersurvey	12	4.000.000	12 RW	4.367.000	12	5.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**9.072.000**		**12.750.000**		**10.001.880**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Balita yang menerima PMT	360	9.072.000	450 Balita	12.750.000	360	10.001.880	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	SDGs
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**7.927.500**		**13.860.000**		**9.500.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Lansia yang menerima PMT	385	7.927.500	485 Orang	13.860.000	385	9.500.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	SDGs
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.48	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang**			**115.000.000**		**107.668.000**		**110.000.000**				
1	1.3.48.32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI				300 m2	0		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.48.47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII		80	50.000.000	60 m	0	0	0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.48.51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Saluran Drainase yang terpelihara	0	0	30 m	22.212.000	20	30.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.48.80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Infrastruktur Perdesaan Yang Terpelihara	13	40.000.000	13 RW	50.000.000	13	50.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang
5	1.3.48.37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI		70	25.000.000	60 m	0	70	30.000.000	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	94	Akomodasi Musrenbang
6	1.3.48.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Jalan Yang Terpelihara			200 m	35.456.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1.3.48.38	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII				60 m	0		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Akomodasi Musrenbang
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**9.161.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah Anggota TP. PKK yang dibina			35 Orang	9.161.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**8.185.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi			80 Orang	8.185.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	65	SDGs
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**0**		**8.267.000**		**0**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi			80 orang	8.267.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**4.300.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Anggota KIM yang dibina			40 Orang	4.300.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**0**		**12.114.000**		**0**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Anggota Karang Taruna Yang Terbina			52 Orang	12.114.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Akomodasi Musrenbang
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**10.325.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Anggota Forum Anak Yang Terbina			60 Orang	10.325.000		0	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	66	Kota Layak Anak
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**5.492.550**		**7.367.000**		**6.055.536**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Luas Taman Yang Terpelihara	1	5.492.550	100 m2	7.367.000	1	6.055.536	Kelurahan Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Kota Sejuta Bunga
			TOTAL		**761.220.550**		**887.914.000**		**743.372.091**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

oPD : KMT- Kelurahan Panjang
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**4.872.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya pertemuan rutin PKK kelurahan			12 kali	4.872.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	50	Mempertegas Skenario Kemitraan
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**3.844.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan FKDM			30 peserta	3.844.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	79	Mempertegas Skenario Kemitraan, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**0**		**1.500.000**		**0**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota linmas yang dibina dan dikirim			30 anggota	1.500.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**0**		**5.385.000**		**0**				
			Jumlah gedung kesenian	1		1		2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13		14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77		78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39		41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79		80					
			Cakupan tempat 100%	100		100		100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100		100					
			DISPORA		92,000,000				30,417,500				
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kegiatan tirakatan yang dilaksanakan			70 orang	5.385.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**141.568.000**		**174.647.000**		**151.592.000**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran air, listrik, telepon dan internet	12	15.000.000	12 bulan	18.360.000	12	16.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan yang diurus	6	1.800.000	7 kendaraar	1.903.000	6	1.800.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2	35.000.000	2 tenaga ke	40.998.000	2	39.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	37	5.376.000	40 jenis	9.812.000	37	6.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan	10	7.646.000	12000 lemb	2.400.000	10	7.646.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	5	1.474.000	6 item	1.523.000	5	1.474.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	12	1.600.000	2 media cet	4.380.000	12	1.700.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah isi ulang bahan bakar/pelumas yang dibeli	8	1.400.000	3 jenis	2.312.000	8	1.700.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah persediaan makan dan minum	12	8.272.000	16 pegawai	12.607.000	12	8.272.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah	6	30.000.000	4 perjalanan	21.420.000	6	30.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	45	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1	17.000.000	2 pegawai	58.932.000	1	19.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD		1	17.000.000	1 orang	0	1	19.000.000	Kel Panjang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**38.500.000**		**23.560.000**		**31.000.000**				
1	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/motor yang dipelihara	5	11.500.000	6 kendaraan	19.110.000	5	12.500.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
2	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	10	3.000.000	4 jenis	4.450.000	12	4.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		2	16.000.000	2 unit	0	1	8.500.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		2	8.000.000	3 unit	0	1	6.000.000	Kel Panjang	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				1 gedung ka	0		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
6	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				3 jenis	0		0	Kantor Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**6.480.000**		**6.480.000**		**8.640.000**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Pos PAUD yang mendapat bantuan transport	6	6.480.000	6 PAUD	6.480.000	6	8.640.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	94	Kota Layak Anak
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**91.634.000**		**128.584.000**		**94.634.000**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					
1	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya monev kampung organik			3 kampung	5.569.000		0	Kelurahan Panjang	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Program prioritas RPJM
2	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah petugas pengambilan sampah	12	76.634.000	11 orang	112.998.000	12	76.634.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	89	Kota Sejuta Bunga
3	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik dipelihara	3	15.000.000	3 kampung	10.017.000	3	18.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	66	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**5.000.000**		**23.807.000**		**6.000.000**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah RT dan RW yang diberi pengarahan	70	5.000.000	68 orang	10.992.000	70	6.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	84	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan monografi tersusun			12 laporan	12.815.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	44	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**6.000.000**		**14.322.000**		**7.000.000**				
1	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah RT/RW yang dilantik			68 orang	6.427.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	71	Program prioritas RPJM
2	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	68	6.000.000	68 orang	5.420.000	68	7.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	71	Program prioritas RPJM
3	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah kegiatan pelantikan LPM			1 kegiatan	2.475.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	76	Program prioritas RPJM
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**4.000.000**		**6.431.000**		**7.500.000**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan	12	4.000.000	1 orang	6.431.000	12	7.500.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	71	Program prioritas RPJM
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**2.870.000**		**2.439.000**		**3.500.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen data Kelurahan yang tersusun	1	2.870.000	2 dokumen	2.439.000	1	3.500.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**3.500.000**		**3.852.000**		**4.000.000**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	30	3.500.000	1 organisasi	3.852.000	30	4.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	69	Program prioritas RPJM
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**22.972.000**		**16.123.000**		**22.972.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip yang dikelola	12	22.972.000	3 jenis	16.123.000	12	22.972.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**0**		**7.835.000**		**0**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan syawalan terselenggara			1 kegiatan	7.835.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**22.500.000**		**24.660.000**		**23.000.000**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah gunungan Grebek Gethuk dan pengiring yang dikirim	1	12.000.000	1 kelompok	12.800.000	1	12.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
2	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah mobil hias dan pengiring yang dikirim	1	10.500.000	1 kelompok	11.860.000	1	11.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	64	Program prioritas RPJM
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**8.000.000**		**6.646.000**		**11.000.000**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah jenis lomba BBGRM yang dilaksanakan	2	8.000.000	2 jenis lomb	6.646.000	3	11.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	71	Program prioritas RPJM
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**11.600.000**		**5.328.000**		**13.000.000**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pelatihan untuk ibu2 dan TP PKK	12	11.600.000	1 kegiatan	5.328.000	12	13.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	69	Program prioritas RPJM
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**0**		**3.851.000**		**0**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang menerima penyuluhan	0	0	30 orang	3.851.000	0	0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	74	Program prioritas RPJM
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**8.785.000**		**15.095.000**		**10.000.000**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jenis/cabang olahraga yang dilombakan di Porkel	60	8.785.000	4 cabang ol	15.095.000	60	10.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	69	Program prioritas RPJM
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**10.226.000**		**14.311.000**		**10.226.000**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya Musrenbangkel	1	7.226.000	90 orang	9.848.000	1	7.226.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	70	Tema RKPD 2019
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvey	1	3.000.000	8 RW	4.463.000	1	3.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	70	Tema RKPD 2019
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**5.514.000**		**4.042.000**		**6.000.000**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Jumlah pemeliharaan RTH	1	5.514.000	12 bulan	4.042.000	1	6.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	78	Kota Sejuta Bunga
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**7.500.000**		**21.600.000**		**10.300.000**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Posyandu Balita yang diberi PMT	9	7.500.000	9 Posyandu	21.600.000	9	10.300.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	74	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**6.480.000**		**22.680.000**		**8.640.000**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Posyandu Lansia yang dibina dan diberi PMT	6	6.480.000	6 Posyandu	22.680.000	6	8.640.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	74	Tema RKPD 2019
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.49	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang**			**51.000.000**		**55.681.000**		**51.000.000**				
1	1.3.49.22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI		700	10.000.000	197 m2	0	700	10.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.3.49.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Panjang jalan terpelihara/paving	700	10.000.000	52 m2	11.660.000	700	10.000.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	1.3.49.24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Panjang jalan terpelihara/paving	700	10.000.000	80 m2	17.660.000	700	10.000.000	Kel Panjang	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	1.3.49.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Panjang jalan kampung terpelihara	120	21.000.000	200 m2	26.361.000	120	21.000.000	Kel Panjang	Dana Alokasi Umum	84	Program prioritas RPJM
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**100.662.000**		**157.858.000**		**100.662.000**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan lomba Siskamling			1 kegiatan	3.972.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	45	Program prioritas RPJM
2	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah laporan stabilitas keamanan yang disusun	12	100.662.000	12 laporan	153.886.000	12	100.662.000	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	69	Program prioritas RPJM
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**3.851.000**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah peserta kegiatan sosialisi			30 orang	3.851.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	74	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**0**		**4.098.000**		**0**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3			1 kegiatan	4.098.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	69	Kota Sejuta Bunga
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**4.847.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah forum anak yang dibina			1 kelompok	4.847.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	59	Kota Layak Anak
	2,1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**3.725.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi				1 kelompok	3.725.000		0	Kel. Panjang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		**554.791.000**		**771.954.000**		**580.666.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : KMT-Kelurahan Gelangan
URUSAN : Administrasi Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**											
	4.1.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**			**0**		**0**		**0**				
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%		100%		100%					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%		66%		72%					
1	4.1.17.17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD				1 Orang	0		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	69	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**134.738.340**		**177.990.000**		**163.033.392**				
1	4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya belanja jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12	14.781.360	12 bulan	15.000.000	12	17.885.446	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK	100	2.087.250	8 kendaraa	2.301.000	100	2.525.573	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	100	20.923.320	23 alat / ba	21.755.000	100	25.317.217	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100	13.310.000	23 jenis	10.142.000	100	16.105.100	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
5	4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	100	13.248.290	2 jenis	5.410.000	100	16.030.431	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
6	4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	100	2.420.000	3 kompone	1.656.000	100	2.928.200	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan surat kabar	100	1.306.800	2 jenis	4.380.000	100	1.581.228	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor		0	2 jenis	2.650.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
9	4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat dan harian kantor	100	10.890.000	10 pegawai	14.748.000	100	13.176.900	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
10	4.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100	36.300.000	4 kegiatan	21.420.000	100	43.923.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
11	4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga keuangan, administrasi dan keamanan kantor	100	19.471.320	4 orang	78.528.000	100	23.560.297	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4.1.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**46.107.050**		**51.050.000**		**55.789.531**				
1	4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	13.987.600	482 m2	15.000.000	100	16.924.996	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas operasional	100	22.288.200	7 kendaraa	23.250.000	100	26.968.722	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
3	4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100	9.831.250	20 unit	11.900.000	100	11.895.813	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
4	4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Genset, Mesin potong rumput, Pemadam Kebakaran			3 Unit	900.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	63	ExBAU
	2,5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
	2.5.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**82.180.780**		**73.730.000**		**99.438.744**				
					37,792,592,000				35,459,082,000				
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3		5,3		6,3					
			Persentase sampah perkotaan yang ditangani	89%		90%		92%					
			Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya	4,3%		5,3%		6,3%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.5.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga sampah dan pemeliharaan mobil sampah		66.729.080	3 orang dar	56.730.000		80.742.187	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	70	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
2	2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya pengembangan kampung organik		15.451.700	1 RW	10.000.000		18.696.557	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
3	2.5.15.45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya monev evaluasi pengelolaan kampung organik			5 kampung	7.000.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	84	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan
	2,6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**											
	2.6.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**13.833.380**		**27.479.000**		**17.252.390**				
			Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%		100%		100%					
			Cakupan penduduk memiliki KIA	100%		100%		100%					
			Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%		100%		100%					
			Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	935		940		945					
			Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%		100%		100%					
			Persentase kepemilikan akte kematian	50%		60%		70%					
			Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	40%		60%		80%					
1	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan		6.600.000	10 RW dan	10.294.000		8.500.000	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.6.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Terlaksananya penyusunan laporan informasi kependudukan yang akurat	100	7.233.380	12 Bulan	17.185.000	100	8.752.390	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.7.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**11.746.680**		**26.545.000**		**14.213.483**				
1	2.7.15.4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan RT/RW	1	6.725.180	10 RW dan	6.475.000	1	8.137.468	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.7.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pelantikan dan Pertemuan Rutin Pengurus LPM/Tokoh Masyarakat	30	5.021.500	35 orang	9.705.000	30	6.076.015	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	2.7.15.5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya pelantikan Ketua RT dan Ketua RW		0	10 RW dan	10.365.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,17	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**											
	2.17.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**6.171.000**		**10.091.000**		**7.466.910**				
					3,138,426,000				3,364,500,000				
			Persentase peningkatan judul buku	5,6		9,28		12,31					
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		6,26		8,08					
			Prosentase SDM pengelola perustakaan yang berkompeten	52,13		56,87		61,61					
			Presentase perpustakaan aktif	21,33		23,7		26,07					
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	2%		3%		4%					
			Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	12.50%		16.67%		20.83%					
1	2.17.15.19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terlaksananya jasa petugas pengelolaan buku perpustakan	264	6.171.000	2 orang	10.091.000	264	7.466.910	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**3.025.000**		**2.582.000**		**3.660.250**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan	100	3.025.000	4 buku	2.582.000	100	3.660.250	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**123.988.700**		**161.889.000**		**150.026.327**				
			SATPOL PP		2,884,343,000				3,490,055,000				
			KESBANGPOL		273,950,000				312,318,000				
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%		80%					
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0		0					
			Perda pelarangan peredaran narkoba	1		0		0					
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	3		4		5					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1.47%		1.81%		2.15%					
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	6%		9%		12%					
			Rasio jumlah siskamling aktif	0,84		0,91		0,97					
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA		NA					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA		NA					
1	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya laporan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat		123.988.700	12 bulan	161.889.000		150.026.327	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	1.5.16.9	Pengendalian Keamanan Lingkungan				10 RW	0		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**5.106.200**		**5.200.000**		**6.178.502**				
			Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	95.00%		96.00%		97.00%					
			Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1		1		1					
			Persentase pengangguran pemuda	6,40%		6,15%		5,90%					
1	2.13.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan/karang taruna		5.106.200	40 orang	5.200.000		6.178.502	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	40	Kota Layak Anak
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**29.060.570**		**19.684.000**		**35.163.290**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	16	29.060.570	12 bulan	19.684.000	16	35.163.290	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	59	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**0**		**7.023.000**		**0**				
			DISNAKERTRANSOS		55,000,000				66,550,000				
			KESBANGPOL		124,600,000				150,700,000				
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	72,2%		74,8%		77,4%					
			Database ormas yang akurat	71.00%		73.00%		75.00%					
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	35,19%		42,59%		49,90%					
1	1.5.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			90 orang	7.023.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	50	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**13.733.500**		**29.942.000**		**16.617.535**				
			DISPORA		2,200,359,320				2,871,282,828				
			Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32		15,77		16,22					
			Jumlah festival seni dan budaya.	12		13		14					
			Cakupan gelar seni 75%	100%		100%		100%					
1	2.16.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya partisipai karnaval hari kemerdekaan RI	70	13.733.500	1 kegiatan	16.132.000	70	16.617.535	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	2.16.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya grebek gethuk dalam rangka hari jadi Kota Magelang			1 kegiatan	13.810.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	91	Kota Sejuta Bunga
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.4.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**10.890.000**		**16.096.000**		**13.176.900**				
			Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100		100		100					
1	4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong	100	10.890.000	3 kegiatan	16.096.000	100	13.176.900	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**20.055.750**		**8.430.000**		**24.267.458**				
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%		23%		26%					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23%		26%		30%					
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	78,50%		79,00%		79,50%					
1	2.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan		20.055.750	70 orang	8.430.000		24.267.458	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**											
	2.13.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**22.022.000**		**22.043.000**		**26.646.620**				
			Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	6		6		7					
			Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional										
			#NAME?	6		5		4					
			#NAME?	15		13		11					
			#NAME?	20		19		17					
			#NAME?	NA		2		NA					
			#NAME?	20		NA		NA					
			Jumlah klub olah raga	183		183		183					
			Jumlah organisasi olah raga	35		35		36					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.13.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Porkel	1	22.022.000	5 Cabor	22.043.000	1	26.646.620	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**13.896.850**		**18.155.000**		**16.815.189**				
1	4.3.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersusunnya daftar rencana kegiatan pembangunan	100	10.151.900	1 kegiatan	13.328.000	100	12.283.799	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.3.21.18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	100	3.744.950	1 kegiatan	4.827.000	100	4.531.390	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	94	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**6.046.370**		**5.635.000**		**7.316.108**				
			Luas RTH Kota	18%		18%		18%					
1	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau	100	6.046.370	3 taman	5.635.000	100	7.316.108	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	91	Kota Sejuta Bunga
	1,3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
	1.3.50	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan**			**0**		**181.067.000**		**0**				
1	1.3.50.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terlaksanannya pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			32 m'	20.152.000		0	RW. VII Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
2	1.3.50.30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan			100	2.279.000		0	RW. X Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
3	1.3.50.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			104 m'	45.675.000		0	RW. VIII Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang
4	1.3.50.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan			230 m²	62.961.000		0	RW. VIII Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Akomodasi Musrenbang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.3.50.62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terwujudnya pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan			10 RW	50.000.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
	2.2.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**0**		**4.060.000**		**0**				
			Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	47.37%		50.00%		52.63%					
1	2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya pembentukan forum anak		0	40 Orang	4.060.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	69	Kota Layak Anak
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**0**		**1.800.000**		**0**				
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari		3 kali/hari					
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	92%		95%		98%					
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,46		6,41		7,95					
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	11,67		13,33		15					
			Persentase penyelsaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3)	95%		96%		97%					
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	74,25		77,27		77,27					
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	14.26%		17.12%		20.55%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	12		15		18					
1	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya pengganti transport bagi anggota linmas		0	60 orang	1.800.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**0**		**10.000.000**		**0**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan keperca		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi			2 Kegiatan	10.000.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	64	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.5.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**0**		**6.599.000**		**0**				
			Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	37.50%		56.25%		75.00%					
			Persentase ormas yang difasilitasi	8.27%		8.66%		9.45%					
1	1.5.19.3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya pelatihan anggota FKDM dalam deteksi dini			80 Orang	6.599.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	2.7.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**0**		**6.738.000**		**0**				
					1,730,060,000				1,931,155,000				
			Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	35%		41,12%		45%					
			Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	4		4		4					
			Persentase PL KB yang mendapat pembinaan										
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	11		13		15					
			LPM berprestasi										
			Tingkat kota	47%		0,5294118		59%					
			Tingkat provinsi	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Tingkat nasional	peringkat 1		peringkat 1		peringkat 1					
			Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	35%		47%		59%					
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143				143					
			Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100.00%		100.00%		100.00%					
			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	61%		68%		75%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PKK Aktif	100%				100%					
1	2.7.19.3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya penyediaan kebutuhan rutin tim penggerak PKK Kelurahan			35 orang	6.738.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	65	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1,5	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
	1.5.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**0**		**4.570.000**		**0**				
			Persentase penanganan penyakit masyarakat	92%		92%		94%					
			Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	1		0		0					
			Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	1		0		0					
			Jumlah kampung bebas narkoba	NA		NA		NA					
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	NA		NA		NA					
1	1.5.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya sosialisasi pencegahan peredaran miras dan narkoba			40 Orang	4.570.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	84	Kota Layak Anak
	1,2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**											
	1.2.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**0**		**18.540.000**		**0**				
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%		85%					
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%		96%					
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%		90%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	18%		24%		29%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terlaksananya pemberian makanan dan gizi kepada Kelompok Posyandu Balita dan PAUD			14 posyand	18.540.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak
	1.2.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**0**		**9.667.000**		**0**				
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	75%		80%		80%					
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	18%		24%		29%					
1	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terbinannya posyandu Lansia			10 posyand	9.667.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	1.2.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**0**		**4.456.000**		**0**				
			Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	100		100		100					
			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100		100		100					
			Angka Kesakitan DBD	<50		<50		<50					
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<104		<103		<102					
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90		90		90					
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%		<0.5%		<0.5%					
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%		100%		100%					
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.2.22.17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksannya sosialisasi mengenai HIV/AIDS			30 orang	4.456.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	2,5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup**											
	2.5.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**0**		**9.214.000**		**0**				
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%		40%		80%					
1	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Lingkungan Yang Sehat dan Rapi			1 kegiatan	9.214.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	89	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	1,1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**											
	1.1.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**0**		**8.218.000**		**0**				
			APK PAUD	66%		67%		68%					
			Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi	53%		54%		55%					
1	1.1.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pendidikan anak usia dini			80 orang	8.218.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	70	Kota Layak Anak
	2,16	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan**											
	2.16.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**0**		**5.440.000**		**0**				
			Jumlah gedung kesenian	1		1		2					
			Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12		13		14					
			Cakupan kajian seni 50%	76		77		78					
			Cakupan fasilitas seni 30%	37		39		41					
			Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	78		79		80					
			Cakupan tempat 100%	100		100		100					
			Cakupan organisasi 34%	100		100		100					
			DISPORA		92,000,000				30,417,500				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.16.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksanakannya Kegiatan Grebek Gethuk			1 Kegiatan	5.440.000		0	Kelurahan Gelangan	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		**542.602.170**		**933.933.000**		**657.062.629**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Inspektorat
URUSAN : Penunjang_Pengawasan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan**											
	4.2.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**331.400.000**		**264.392.000**		**0**				
1	4.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	1000	3.250.000	1000 surat	3.000.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	ExBAU
2	4.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Langganan Telepon dan Internet	12	13.000.000	12 kali	12.498.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	21	10.000.000	22 unit	9.204.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Belanja Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dan Pengelola Barang Daerah	12	60.000.000	12 kali	64.245.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyedaiaan Sarana dan Prasarana Kantor	15	2.750.000	15jenis	3.068.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
6	4.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyedaian Alat Tulis kantor	14	11.000.000	14 jenis	12.240.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
7	4.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	6.500.000	3 jenis	5.660.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
8	4.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Belanja Langganan Surat Kabar dan Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	50	20.000.000	4 Jenis	5.600.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
9	4.2.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas LPG	6	900.000	6 Kali	900.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
10	4.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Pegawai dan Tamu Kantor	22	44.000.000	22 Kegiatan	41.650.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
11	4.2.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15	160.000.000	15 Keg	106.327.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
	4.2.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**210.000.000**		**7.663.923.000**		**0**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengadaan/pemeliharaan tanaman hias ruangan kantor dan perlengkapannya	5	15.000.000	5 Jenis	4.779.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
2	4.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	21	165.000.000	22 unit	144.713.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
3	4.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (Komputer, laptop, printer, mesin ketik dan AC)	63	30.000.000	63 buah	15.450.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	ExBAU
4	4.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor			88 buah	3.600.000		0	inspektorat	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
5	4.2.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya perawatan mebeler			50 buah	3.000.000		0	inspektorat	Dana Alokasi Umum	30	Rencana
6		Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor Inspektorat			I unit	7.492.381.000						
	4.2.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**40.700.000**		**48.421.000**		**0**				
			Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	BB		BB		B					
			Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	65%		70%		75%					
			Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar	70%?		80%?		90%?					
			Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	50%		60%		70%					
			Penurunan kasus temuan LKPD	1		1		0					
			Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu	90%		95%		100%					
			Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	65%		70%		80%					
			Nilai survey kepuasan penggunan layanan PD	95		95		95					
			Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP										

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP	75%		70%		65%					
			Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIP	50%		40%		30%					
			Persentase implementasi SPIP	78%		84%		90%					
1	4.2.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capain kinerja	4	12.500.000	4 laporan	10.303.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.2.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	2	2.200.000	2 laporan	2.133.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.2.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1	3.300.000	1 laporan	3.177.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
4	4.2.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Laporan Renja SKPD	2	4.400.000	2 dokumen	4.063.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	34	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.2.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah RKA dan RKPA SKPD	2	15.000.000	2 dokumen	10.606.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.2.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah Buku LKj IP SKPD	1	3.300.000	1 dokumen	3.139.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	4.2.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**			**1.295.489.000**		**2.148.152.000**		**0**				
			Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	35%		40%		45%					
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	80%		85%		85%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase zona integritas yang terbentuk	20%		30%		40%					
			Nilai hasil LKJip SKPD	BB		BB		B					
			Persentase SKPD yang direview LKJiP	45%		55%		65%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksanaan BPK	95%		96%		95%					
			Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	50%		40%		30%					
			Penyelesaian TLHP BPK meningkat	95%		100%		100%					
			Prosentasi tindak lajut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	95%		100%		100%					
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	70%		75%		80%					
			persentase SPM yang mencapai target nasional	70%		75%		80%					
			Tingkat pemahaman tentang SAKIP										
1	4.2.15.37	Evaluasi LKJiP	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja OPD			2 Kegiatan	40.391.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.2.15.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik)	80	400.166.000	80 obyek pe	526.693.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.2.15.2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Audit kasus, Audit Kinerja, Audit Tematik, Probity Audit, pengawasan SPIP	12	101.000.000	8 obyek per	64.652.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
4	4.2.15.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Penyusunan Data Pendukung Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat Kota, Inspektorat Prov, dan pending BPK	1000	240.162.000	1000 Rekon	221.087.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.2.15.8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Evaluasi hasil pelaksanaan pemeriksaan	1	42.833.000	1 keg	35.000.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
6	4.2.15.10	Review Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Reviu LKD OPD dan Reviu BUD	2	53.456.000	2 kegiatan	45.556.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.2.15.23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	laporan dan verifikasi aksi PPK	2	117.578.000	4 Laporan	55.000.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Pemberantasan Korupsi
8	4.2.15.24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Laporan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	2	46.531.000	...jumlah AS	22.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
9	4.2.15.25	Penyelesaian Kerugian Negara	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	6	240.000.000	4 laporan	153.661.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
10	4.2.15.33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya REVIU RKPD, RENJA, KUAPPAS, RKA	2	53.763.000	4 laporan	43.619.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
11	4.2.15.34	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	Terevaluasinya pelaksanaan PBJ dan Penyerapan Anggaran			3 kegiatan	25.056.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
12	4.2.15.35	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Pencegahan, penindakan dan pemberantasan pungli di lingkungan aparatur negara			12 laporan	251.896.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Pemberantasan Korupsi
13	4.2.15.40	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Penyajian data hasil pengwasan sebagai bahan pertimbangan keputusan kepada pimpinan			2 laporan	23.098.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Pemberantasan Korupsi
14		Fasilitasi Kerjama APIP - APH					630.044.000						
15		Sosialisasi Perjanjian Kerjasama APIP-APH					10.399.000						
	4.2.16	**Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**			**198.443.000**		**189.543.000**		**0**				
			Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 2		Level 3	'	Level 3					
			Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	65%		70%		75%					
			Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	70%		75%		80%					
1	4.2.16.3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor, P2UPD dan audiwan	18	36.426.000	34 laporan	30.000.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
2	4.2.16.6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tercapainya Kapabilitas APIP yang lebih baik	25	162.017.000	Leveling Ka	101.219.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.2.16.8	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	Terlayaninya OPD dalam penyelesaian masalah			12 laporan	58.324.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Rencana
	4.2.17	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**			**21.000.000**		**104.066.000**		**0**				
			Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	65%		70%		75%					
			Persentase Aparat SPIP aktif	65%?		70%?		75%?					
			Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	80%		85%		90%					
1	4.2.17.2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengawasan	3	21.000.000	3 dokumen	17.970.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
2	4.2.17.10	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi			2 laporan	52.111.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
3	4.2.17.11	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	Pencegahan gratifikasi			4 laporan	33.985.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Pemberantasan Korupsi
	4.2.18	**Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal**			**0**		**247.244.000**		**0**				
			prosentase implementasi SPIP										
1	4.2.18.1	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja OPD			6 kegiatan	61.900.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Rencana
2	4.2.18.2	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	evaluasi dan hasil pembinaan pengawasan			4 kegiatan	132.100.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Rencana
3	4.2.18.3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	sosialisasi diagnostic assesment SPIP			2 laporan	53.244.000		0	Inspektorat Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
			TOTAL		**2.097.032.000**		**10.665.741.000**		**0**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
URUSAN : Penunjang _perencanaan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**793.161.000**		**653.546.000**		**861.227.000**				
1	4.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12	719.000	12 bulan	755.000	12	793.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	101.430.000	12 bulan	72.000.000	12	111.826.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	27	9.019.000	26 kendara	8.283.000	27	9.944.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang	129.500.000	11 orang, 2	142.152.000	11 orang,	130.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	4.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	26	62.208.000	29 item per	69.151.000	26	68.584.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	17.081.000	30 item	17.437.000	12	18.832.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	36.586.000	3 item	16.219.000	12	40.336.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12	5.250.000	14 kompon	5.094.000	12	5.788.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	12	7.056.000	5 jenis	7.080.000	12	7.779.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12	1.523.000	18 kali peng	14.538.000	12	1.679.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12	30.734.000	47 pegawai	32.005.000	12	33.885.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	328.582.000	45 perjalan	172.972.000	12	362.263.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	4.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	12	63.473.000	1 orang ten	95.860.000	12	69.518.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.3.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**335.937.000**		**250.856.000**		**367.931.000**				
1	4.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	12	31.500.000	12 bulan	35.537.000	12	34.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	27	206.325.000	26 kendara	170.400.000	27	225.975.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11	18.034.000	11 item	13.319.000	11	19.752.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14	74.828.000	14 item	26.600.000	14	81.954.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	12	5.250.000	12 bulan	5.000.000	12	5.750.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4.3.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**66.200.000**		**85.349.000**		**67.200.000**				
1	4.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12	14.500.000	12 laporan	16.490.000	12	14.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
2	4.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6	8.500.000	6 buku	8.508.000	6	9.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
3	4.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	9.000.000	5 buku	8.509.000	5	9.500.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
4	4.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2	10.200.000	2 kegiatan	13.656.000	2	10.200.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
5	4.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2	18.000.000	2	18.356.000	2	18.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
6	4.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP Bappeda	1	6.000.000	1	4.830.000	1	6.000.000	Bappeda kota magelang	Dana Alokasi Umum	54	ExBAU
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	4.3.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**88.000.000**		**105.000.000**		**106.000.000**				
			Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%		90%		95%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	80%		90%		100%					
1	4.3.15.5	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	40	88.000.000	40 buku	105.000.000	40	106.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Rencana
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**14.868.000**		**4.545.000**		**16.284.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	1	14.868.000	100 %	4.545.000	1	16.284.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
	4,3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**											
	4.3.16	**Program Kerjasama Pembangunan**			**150.000.000**		**212.934.000**		**170.000.000**				
			Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3		4		4					
1	4.3.16.7	Fasilitasi FEDEP	tersedianya kegiatan pendukung fedep	1	150.000.000	1 kegiatan	212.934.000	1	170.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	80	Mempertegas Skenario Kemitraan
	4.3.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**1.486.000.000**		**2.465.468.000**		**1.594.000.000**				
1	4.3.21.47	Pelaksanaan verifikasi Renstra OPD	Terlaksananya verifikasi Renstra OPD			29 OPD	123.700.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Program prioritas RPJM
2	4.3.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	150	296.000.000	2 dokumen	302.506.000	150	298.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
3	4.3.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang	200	125.000.000	200 peserta	144.121.000	200	130.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
4	4.3.21.10	Penetapan RKPD	JUmlah dokumen Perwal RKPD	150	36.000.000	1 perwal	32.645.000	150	38.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
5	4.3.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan dokumen monev	100	17.000.000	4 laporan	19.000.000	100	19.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.3.21.14	Forum OPD dan FGD	Jumlah forum OPD	1	118.000.000	1 forum 10	199.823.000	1	122.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
7	4.3.21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah media publikasi	20	34.000.000	20 poster	57.800.000	20	35.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
8	4.3.21.31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Jumlah Renja OPD yang diverifikasi	46	73.000.000	29 OPD	121.032.000	46	75.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
9	4.3.21.35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	150	124.000.000	2 dokumen	137.700.000	150	128.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
10	4.3.21.36	Penetapan Perubahan RKPD	Dokumen perubahan RKPD	100	32.000.000	1 dokumen	27.043.000	100	36.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
11	4.3.21.37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Jumlah perubahan renja OPD yang diverifikasi	48	296.000.000	29 OPD	121.074.000	48	298.000.000	Bappeda	Dana Alokasi Umum	105	Program prioritas RPJM
12	4.3.21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4	46.000.000	4 laporan	51.000.000	4	56.000.000	Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah.	Dana Alokasi Umum	101	Rencana
13	4.3.21.64	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standarisasi Harga	300	170.000.000	200 buku St	157.000.000	300	215.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
14	4.3.21.66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	50	119.000.000	4 Laporan	93.000.000	50	144.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	96	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
15	4.3.21.25	Evaluasi RPJMD	Hasil Evaluasi RPJMD	0	0	1 Laporan	0	0	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	101	Program prioritas RPJM
16	4.3.21.49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis			29 OPD	180.950.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	85	Program prioritas RPJM
17	4.3.21.6	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terselenggaranya musrenbang RPJMD			29 OPD	85.360.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Program prioritas RPJM
18	4.3.21.44	Konsultasi Publik RPJMD	Terlaksananya konsultasi publik RPJMD			29 OPD	55.050.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
19	4.3.21.46	Forum OPD dan FGD RPJMD	Terlaksananya Forum OPD dan FGD RPJMD			29 OPD	138.150.000		0	Kota magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	4.3.21.70	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana kreativitas dan inovasi perencanaan pembangunan			1 dokumen	86.404.000		0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
21	4.3.21.75	Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersusunnya perubahan RPJMD			29 OPD	332.110.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
	4.3.22	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**			**130.000.000**		**1.114.152.000**		**150.000.000**				
1	4.3.22.65	Penyusunan Dokumen Pengembangan Agribisnis Hortikultura	tersediannya dokumen pengembangan agribisnis holtikultura			1 dokumen	180.570.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Mempertegas Skenario Kemitraan
2	4.3.22.66	Penyusunan Masterplan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Magelang	tersedianya dokumen perencanaan pengembangan BUMD Kota Magelang			1 dokumen	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	61	Mempertegas Skenario Kemitraan
3	4.3.22.67	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	tersedianya dokumen tindak lanjut MKSB			1 dokumen	116.102.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	66	Memperkuat Implementasi MKSB
4	4.3.22.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	12	130.000.000	1 dokumen	145.500.000	12	150.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
5	4.3.22.68	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan	tersedianya dokumen hasil monev ketahanan pangan (pangan dan gizi masyarakat)			1 dokumen	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	SDGs
6	4.3.22.64	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal	tersedianya dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM			1 dokumen	196.980.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	64	Mempertegas Skenario Kemitraan
7	4.3.22.52	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	Tersusunnya dokumen rencana induk Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar			1 dokumen	475.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	71	Memperkuat Implementasi MKSB, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
	4.3.23	**Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya**			**296.500.000**		**952.388.000**		**324.500.000**				
					5,025,879,000				5,767,456,000				
			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%		100%		100%					
1	4.3.23.33	Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDG's	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah SDGs			100 %	138.893.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	SDGs
2	4.3.23.51	Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Pemuda	Adanya pedoman kebijakan pemberdayaan pemuda di Kota Magelang			25 buku	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.3.23.52	Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi			4 Laporan	171.880.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	89	Program prioritas RPJM
4	4.3.23.9	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah Laporan LP2KD	36	130.000.000	1 dokumen	165.877.000	36	140.000.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Penanggulangan Kemiskinan
5	4.3.23.19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah Dokumen Laporan Monev	40	54.000.000	2 laporan	0	40	56.000.000	Kota Magelang	Bantuan Keuangan dari Provinsi	95	SDGs
6	4.3.23.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan pembinaan Penanganan GAKY	4	77.500.000	2 laporan, 4	116.914.000	4	82.500.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	SDGs
7	4.3.23.38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev	20	35.000.000	4 laporan	27.919.000	20	46.000.000	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
8	4.3.23.49	Monitoring dan Evaluasi SDG's	Evaluasi capaian SDGs di Kota Magelang			4 laporan	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	SDGs
9	4.3.23.50	Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	Adanya pedoman pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang			25 buku	167.507.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Program prioritas RPJM
10	4.3.23.54	Masterplan Pengembangan Wisata Sudirman	Tersusunnya Masterplan Pengembangan Wisata Sudirman			1 Dokumen	163.398.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	79	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
	4.3.26	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana**			**0**		**1.508.882.000**		**0**				
			cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%		100%		100%					
1	4.3.26.44	Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang	tersedianya dokumen			1 dokumen	363.472.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	61	Kota Sejuta Bunga

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.3.26.40	Monitoring dan Evaluasi Strategi Sanitasi Kota (SSK)	tersedianya dokumen monev program dan kegiatan OPD mendukung Percepatan Pembangunan Sanitasi Daerah			1 dokumen	96.825.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Memperkuat Implementasi Manajemen Persampahan, Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.3.26.4	Penyusunan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	tersedianya pembaharuan data dasar pada sistem informasi jalan dan jembatan			1 dokumen	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
4	4.3.26.24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	tersedianya dokumen capaian kawasan strategis			1 dokumen	68.694.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	61	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
5	4.3.26.23	Moitoring dan Evaluasi Akses Universal 100-0-100	tersedianya dokumen capaian terhadap program 100-0-100			1 dokumen	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	95	Program 100-0-100
6	4.3.26.39	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta	tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Daerah berupa rencana induk			1 dokumen	317.593.000		0	Delineasi Kawasan GOR SAMAPTA	Dana Alokasi Umum	91	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
7	4.3.26.41	Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta	tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Daerah berupa rencana induk			1 dokumen	146.770.000		0	Kawasan Sukarno Hatta Canguk (delineasi kawasan Pasar Induk)	Dana Alokasi Umum	91	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
8	4.3.26.42	Penyusunan Perencanaan Kawasan Prioritas dan Strategis Kota Magelang	tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Daerah berupa rencana induk			1 dokumen	0		0	Kawasan Sidotopo	Dana Alokasi Umum	91	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	4.3.26.43	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	tersedianya dokumen review rencana induk sistem penyediaan air minum			1 dokumen	294.953.000		0	Kota Magelang, Kawasan Perbatasan dengan Kab Magelang , dan Sumber Mata Air Daerah	Dana Alokasi Umum	85	Program 100-0-100, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
10	4.3.26.15	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	tersedianya arahan visual pengembangan kawasan prioritas yang segera untuk ditangani : koridor jalan, taman, landmark, lapangan olah raga, PKL dsb			1 dokumen	99.000.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	61	Memperkuat Implementasi MKSB, Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas
11	4.3.26.45	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	tersedianya dokumen capaian terhadap pemenuhan kebutuhan rumah di lingkungan yang aman dan sehat serta akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat			1 Laporan	121.575.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	90	Program prioritas RPJM
	4.3.20	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**			**0**		**120.852.000**		**0**				
			cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%		100%		100%					
1	4.3.20.15	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda			37 Pegawai	81.842.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	ExBAU
2	4.3.20.16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasikannya indikator kinerja pembangunan daerah			100 peserta	39.010.000		0	Bappeda Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	105	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
			TOTAL		**3.360.666.000**		**7.473.972.000**		**3.657.142.000**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
URUSAN : Penunjang-Keuangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.15	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**308.009.680**		**578.358.000**		**398.169.939**				
1	4.4.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	100	134.350.000	12 laporan	104.314.000	100	148.100.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
2	4.4.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	3	173.659.680	1 perwal	105.000.000	3	250.069.939	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
3	4.4.15.18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan			12 laporan	43.486.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
4	4.4.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD			4 laporan	29.726.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
5	4.4.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi			29 OPD	219.568.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
6	4.4.15.134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK			7 Laporan	76.264.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
	4.4.15	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**9.701.491.760**		**2.301.011.000**		**3.674.021.881**				
1	4.4.15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	4	450.000.000	1 raperda	443.834.000	4	544.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
2	4.4.15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	3	351.216.000	3 dokumen	243.813.000	3	465.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.4.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	4	3.898.700.000	1 raperda	372.118.000	4	475.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
4	4.4.15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentangpenjabaran perubahan APBD	4	3.853.200.000	2 raperwal	344.011.000	4	466.239.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
5	4.4.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2	248.200.000	2 dokumen	216.373.000	2	300.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
6	4.4.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2	137.659.000	2 dokumen	93.755.000	2	198.200.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
7	4.4.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2	280.785.600	2 dokumen	186.717.000	2	404.331.264	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
8	4.4.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2	130.014.720	2 dokumen	97.115.000	2	187.221.197	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
9	4.4.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	48	41.554.000	29 OPD	43.359.000	48	98.927.309	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	4.4.15.25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	48	48.158.000	29 OPD	50.700.000	48	96.391.296	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
11	4.4.15.44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	100	79.719.000	29 OPD	74.783.000	100	93.975.552	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
12	4.4.15.49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2	30.827.520	2 laporan	37.890.000	2	44.391.629	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
13	4.4.15.52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	48	44.667.000	29 OPD	46.627.000	48	102.452.429	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
14	4.4.15.53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	48	51.649.000	29 OPD	49.916.000	48	117.987.840	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
15	4.4.15.56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	arsip dokumen anggaran dalam bentuk elektronik (perda APBD, perwal APBD, perda perubahan APBD, perwal perubahan APBD, RKA, DPA, anggaran kas, RKPA, DPPA, anggaran kas perubahan)	12	55.141.920	10 jenis dok	0	12	79.404.365	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
	4.4.15	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**671.581.000**		**401.731.000**		**726.111.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.4.15.16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	file dokumen pencairan dana belanja langsung	12	178.961.000	4 dokumen	0	12	204.894.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
2	4.4.15.65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	3	405.753.000	74 sekolah	225.631.000	3	464.547.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
3	4.4.15.66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	6	49.497.000	73 pegawai	80.517.000	6	56.670.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	54	Program prioritas RPJM
4	4.4.15.59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	100	37.370.000	12 laporan	95.583.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
	4.4.15	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**1.059.964.000**		**876.826.000**		**1.236.800.000**				
1	4.4.15.27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	370	175.829.000	6 laporan	128.959.000	370	238.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.4.15.30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregristrasi)	100	172.601.000	3000 SP2D	158.713.000	100	271.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
3	4.4.15.32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	100	82.303.000	10 jenis	56.488.000	100	119.900.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
4	4.4.15.43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	100	24.386.000	700 SPM	34.465.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
5	4.4.15.51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	100	18.553.000	10 kegiatan	29.805.000	100	27.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
6	4.4.15.57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	100	203.814.000	800 berkas	146.514.000	100	258.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
7	4.4.15.77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1350	75.706.000	1100 SP2D	41.699.000	1350	121.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
8	4.4.15.91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	100	134.973.000	1500 berka	111.920.000	100	161.700.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM
9	4.4.15.95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	100	26.925.000	4 jenis doku	27.442.000	100	39.200.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	4.4.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	1400	144.874.000	470 daftar g	140.821.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
	4.4.15	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**1.596.430.500**		**1.533.474.000**		**1.391.132.000**				
1	4.4.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	3	295.064.000	1 aplikasi	232.322.000	3	391.779.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
2	4.4.15.36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	612	214.755.000	12 dokume	207.514.000	612	249.161.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
3	4.4.15.42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	552	129.766.500	348 laporar	115.835.000	552	96.300.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Rencana
4	4.4.15.48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	84	92.260.000	12 laporan	108.527.000	84	140.685.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
5	4.4.15.61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	100	58.023.000	12 laporan	61.118.000	100	70.525.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Rencana
6	4.4.15.72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	100	257.634.000	120 orang	249.975.000	100	361.427.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
7	4.4.15.81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	88	59.170.000	1 dokumen	42.546.000	88	81.255.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
8	4.4.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12	452.253.000	12 laporan	480.853.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
9	4.4.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	1	37.505.000	2 kegiatan	34.784.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	Rencana
	4.4.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**239.892.100**		**223.968.000**		**389.614.368**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12	60.355.000	12 dokume	45.218.000	12	135.831.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
2	4.4.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	3	14.116.000	2 jenis lapo	13.613.000	3	17.128.506	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
3	4.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	renja penetapan dan renja perubahan	2	23.541.100	2 jenis doku	7.968.000	2	28.484.731	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
4	4.4.6.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	12	81.292.000	1500 berka	108.755.000	12	118.657.985	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
5	4.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1	12.851.000	1 dokumen	6.166.000	1	21.274.837	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	Program prioritas RPJM
6	4.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2	47.737.000	2 dokumen	27.248.000	2	68.237.309	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Program prioritas RPJM
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	4.4.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**108.927.000**		**366.120.000**		**120.092.017**				
1	4.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12	1.102.500	12 bulan	1.000.000	12	1.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12	107.824.500	12 bulan	365.120.000	12	365.120.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
	4.4.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2.130.572.000**		**1.641.494.000**		**2.226.638.484**				
1	4.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	12	887.406.000	12 bulan	806.229.000	12	897.256.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
2	4.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	64	30.530.000	65 kendara	24.190.000	64	22.754.277	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	12	97.576.000	22 jenis/ite	60.564.000	12	63.262.238	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	41.000.000	48 jenis	34.500.000	12	49.835.756	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	44	ExBAU
5	4.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	32.751.000	15 jenis	25.971.000	12	38.774.649	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	12	44.422.800	17 jenis	5.926.000	12	33.304.871	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
7	4.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	2	20.000.000	3 jenis	5.400.000	2	46.675.440	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
8	4.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	24	12.672.000	3 jenis	10.127.000	24	4.375.823	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
9	4.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12	107.004.000	12 bulan	105.862.000	12	118.234.724	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
10	4.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12	285.545.000	12 bulan	281.190.000	12	262.949.252	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
11	4.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	23	446.665.200	3 orang jag	169.479.000	23	594.405.966	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
12	4.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82	125.000.000	82 file	112.056.000	82	94.809.488	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4.4.15	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**189.995.670**		**56.356.000**		**144.800.000**				
1	4.4.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1	56.356.000	1 dokumen	56.356.000	1	83.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
2	4.4.15.111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	dokumen pedoman penganggaran daerah	2	133.639.670	1 dokumen	0	1	61.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.4.15	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**407.954.000**		**396.521.000**		**624.391.000**				
1	4.4.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	520	206.558.000	1 perda	200.028.000	520	312.785.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
2	4.4.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	120	201.396.000	1 perwal	196.493.000	120	311.606.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
	4.4.18	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**2.467.008.000**		**3.307.089.000**		**3.236.630.093**				
1	4.4.18.22	Penataan Dokumen Pajak Daerah Elektronik	arsip dokumen pajak daerah dalam bentuk elektronik			12 dokume	0		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
2	4.4.18.26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT			36200 SPPT	145.187.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
3	4.4.18.29	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan			1 peta obye	219.676.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
4	4.4.18.30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak			100 laporar	93.643.000		0	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
5	4.4.18.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4	239.782.000	4 laporan, 1	317.051.000	4	350.491.227	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Program prioritas RPJM
6	4.4.18.2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	2	38.463.000	4 laporan	50.759.000	2	48.747.210	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4.4.18.24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayaninya wajib pajak BPHTB			12 laporan,	134.202.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	Rencana
8	4.4.18.4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12	126.500.000	12 laporan	139.672.000	12	220.786.280	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
9	4.4.18.5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120	188.053.000	120 data wa	162.879.000	120	172.087.386	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	70	Rencana
10	4.4.18.6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	4	281.448.000	3 kegiatan,	317.964.000	4	436.006.052	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
11	4.4.18.9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12	406.219.000	12 bulan	418.906.000	12	567.439.773	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Rencana
12	4.4.18.11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	6	195.613.000	12 bulan	166.329.000	6	413.480.873	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
13	4.4.18.12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12	135.250.000	12 bulan	107.654.000	12	140.421.360	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
14	4.4.18.13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	20	51.357.000	6 LHP atas	56.028.000	20	70.506.664	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
15	4.4.18.15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	100	281.946.000	17 keluraha	281.093.000	100	390.982.049	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	4.4.18.17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50	119.916.000	50 SK	103.683.000	50	92.993.776	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
17	4.4.18.7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28	207.360.000	28 laporan	199.667.000	28	332.687.443	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
18	4.4.18.14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16	140.049.000	16 laporan	140.237.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
19	4.4.18.16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta		55.052.000	540 wajib p	54.674.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
20	4.4.18.19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Perijinan Tertentu			1 Raperda	0		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
21	4.4.18.20	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	perwal PBB			1 perwal	0		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
22	4.4.18.27	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah			12 laporan	53.162.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	4.4.18.31	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT			800 SKPD P	144.623.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
	4.4.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**1.297.689.563**		**697.303.000**		**973.073.528**				
1	4.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1	80.415.000	1 unit	84.157.000	1	88.306.529	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
2	4.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	64	784.767.000	52 unit	359.912.000	64	554.878.603	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
3	4.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	33	24.282.563	39 unit	36.984.000	33	26.771.525	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
4	4.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	7	238.675.000	6 jenis	207.000.000	7	294.365.226	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
5	4.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	20	7.200.000	37 buah	9.250.000	20	8.751.645	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	ExBAU
6	4.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	komputer, laptop, printer, scanner		0	10 buah	0		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
7	4.4.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	ruang rapat	127,4	162.350.000	1 unit	0		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
8	4.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, mic, wireless, stand mic, proyektor			12 buah	0		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**139.610.000**		**150.858.000**		**165.500.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	6	139.610.000	40000 doku	150.858.000	6	165.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	59	ExBAU
	4,4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**											
	4.4.19	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**			**0**		**6.511.658.000**		**0**				
1	4.4.19.28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda			223 bidang	66.900.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
2	4.4.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara			18 unit	433.984.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
3	4.4.19.32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang			4 laporan	58.476.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
4	4.4.19.27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor			20 SPPT	40.000.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	50	Rencana
5	4.4.19.34	Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD			13 orang	489.250.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.4.19.24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot			1 laporan	87.439.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
7	4.4.19.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD			4 kategori (	120.925.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
8	4.4.19.22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga			3 kegiatan p	39.693.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
9	4.4.19.14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah			8 jenis lapo	184.765.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
10	4.4.19.18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD			185 pejabat	92.220.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
11	4.4.19.20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah			10 dokume	124.516.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
12	4.4.19.16	Penyelamatan asset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah			12 laporan	215.080.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	60	Program prioritas RPJM
13	4.4.19.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun			2 lapangan	78.678.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
14	4.4.19.12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak			4 paket	52.521.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	45	Rencana
15	4.4.19.29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir			12 kegiatan	142.444.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
16	4.4.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun			7 rumah dir	628.612.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
17	4.4.19.13	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	pengelolaan BMD			13 orang	0		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	4.4.19.17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah			4 kegiatan	72.941.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
19	4.4.19.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan			4 kegiatan	25.617.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
20	4.4.19.15	Penjualan asset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual			3 paket	92.230.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
21	4.4.19.21	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	pemanfaatan dan panatagunaan tanah Pemkot			3 kecamata	0		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
22	4.4.19.23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah			12 bidang	328.807.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	55	Program prioritas RPJM
23	4.4.19.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus			18 unit	40.400.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
24	4.4.19.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD			3 kegiatan	55.027.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
25	4.4.19.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD			11 kegiatan	115.696.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
26	4.4.19.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun			3 gedung ka	354.195.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	40	Rencana
27	4.4.19.25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur			2 bidang	18.070.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	65	Program prioritas RPJM
28	4.4.19.35	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pemanfaatan dan penatagunaan tanah Pemkot			3 Kecamata	54.636.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	4.4.19.33	Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	Peraturan Walikota tentang Kodefikasi barang			1 Perwal	0		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
30	4.4.19.36	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pengelolaan Barang Milik Daerah			3 gedung	0		0	Komplek Kantor Walikota Sisi Barat	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
31	**4.4.19.37**	**Program Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**	**Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah**			**2 Bus**	**0**		**0**	**BPKAD Kota Magelang**	**Dana Alokasi Umum**	**35**	**Rencana**
32	4.4.19.38	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	Peraturan Walikota tentang kodefikasi barang			1 Perwal	47.575.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	39	Rencana
33	4.4.19.39	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah			2 Bus	2.450.961.000		0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	35	Rencana
			TOTAL		**20.319.125.273**		**19.042.767.000**		**15.306.974.310**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
URUSAN : Penunjang-Kepegawaian

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,5	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian**											
	4.5.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**350.408.000**		**317.872.000**		**350.408.000**				
1	4.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	300	780.000	300 buah	600.000	300	780.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan speedy dan faksimili	12	29.400.000	12 bulan	33.600.000	12	29.400.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	12	6.000.000	16 unit	6.780.000	12	6.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang mendapat honorarium	96	100.310.000	108 ob	108.857.000	96	100.310.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan	12	7.300.000	20 jenis	7.300.000	12	7.300.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	53	25.518.000	53 jenis	14.001.000	53	25.518.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	13	21.195.000	13 jenis	12.985.000	13	21.195.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6	2.000.000	6 jenis	1.062.000	6	2.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	4.5.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar, majalah dan buku perpustakaan	12	4.990.000	12 bulan	3.000.000	12	4.990.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.5.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman dan Jumlah Peserta Rapat	12	25.208.000	390 orang d	25.256.000	12	25.208.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.5.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12	117.450.000	12 bulan	97.196.000	12	117.450.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.5.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	41	10.257.000	41 dokume	7.235.000	41	10.257.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.5.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**193.000.000**		**179.420.000**		**285.889.000**				
			Persentase SKPD yang menerapkan finger print	79%		95%		100%					
1	4.5.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	15	124.035.000	16 unit	134.620.000	15	172.424.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.5.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9	5.965.000	11 unit	7.315.000	9	5.965.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.5.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perbaikan peralatan kantor	9	40.000.000	41 unit	33.485.000	9	45.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.5.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebel kantor yang diservis	35	5.000.000	20 buah	4.000.000	35	5.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
5	4.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	3	18.000.000	71 unit	0	2	57.500.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.5.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**188.500.000**		**135.410.000**		**105.000.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase kehadiran ASN	97%		97.50%		97.90%					
			Persentase pelanggaran disiplin ASN	0.21%		0.20%		0.18%					
			Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	95%		96%		97%					
			Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%		100%		100%					
			Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%		100%		100%					
			Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	85%		90%		90%					
			Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	96%		97%		97%					
1	4.5.3.6	Penegakan disiplin PNS	Jumlah laporan kehadiran dan penegakan disiplin PNS	1050	188.500.000	1800 lapora	135.410.000	1070	105.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4.5.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**64.831.494**		**75.763.000**		**64.831.494**				
1	4.5.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12	13.602.750	12 buku	12.404.000	12	13.602.750	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.5.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1	6.390.321	1 laporan	5.206.000	1	6.390.321	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.5.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan untuk satu tahun anggaran	1	10.442.523	1 laporan	9.854.000	1	10.442.523	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.5.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen rencana kerja	2	7.717.500	2 dokumen	9.079.000	2	7.717.500	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	4.5.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA	2	19.792.500	2 dokumen	20.178.000	2	19.792.500	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	4.5.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP	1	6.885.900	1 dokumen	4.042.000	1	6.885.900	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum	75	ExBAU
	2,1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika**											
	2.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**12.750.000**		**0**		**14.250.000**				
				-	5,139,479,000	-		-	4,974,286,000				
			SETWAN	12 bln	36,500,000	12 bln		12 bln	37,000,000				
			DISHUB		240,000,000				320,000,000				
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	80%		90%		90%					
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :										
			a.???????? Radio	60 kali siar/ 5 agama dan kepe		60 kali siar/ 5 agama dan keperc		60 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan					
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercay		12 kali/ 5 agama dan kepercayaa		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3		3					
			Jumlah KIM	17		17		17					
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7		7					
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	1		-		-					
1	2.10.15.19	Pengelolaan Website	Jumlah layanan on line	12	12.750.000	12 bulan	0	12	14.250.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4,5	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian**											
	4.5.15	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**			**3.774.283.000**		**3.902.924.000**		**3.944.361.000**				
					6,926,097,000				6,651,321,400				
			Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:										
			Pendidikan S1	47%		48%		49%					
			Pendidikan S2	9%		9,5%		10%					
			Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100		100		100					
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46		0,46		0,46					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%		100%		100%					
			Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%		5%		5%					
			Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0.08%		0.08%		0.08%					
			Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	41%		41%		46%					
1	4.5.15.70	Manajemen Kinerja Aparatur	Jumlah pedoman penilaian kinerja pegawai			1 dokumen	140.973.000		0	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.5.15.1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah bahan pertimbangan penetapn kebijakan kepegawaian	12	125.116.000	12 bulan	229.354.000	12	145.116.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.5.15.2	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah peserta seleksi CPNS	5000	542.567.000	3000 orang	592.510.000	5000	624.589.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
4	4.5.15.3	Penempatan PNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan Mengikuti sumpah/janji	150	39.888.000	150 orang	37.664.000	150	39.888.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	4.5.15.5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS terupdate, kartu ID card, DUK, buku jabatan, Struktur jabatan	4000	187.365.000	3100 orang	138.349.000	3800	150.500.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4.5.15.8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah Tanda Jasa Satya Lancana yang diusulkan dan kepesertaan BPJS Kesehatan/Bapertarum	100	35.000.000	150 orang	25.971.000	100	44.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	4.5.15.9	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah kasus yang ditangani dan layanan psikologi pegawai	12	156.650.000	5 kasus & 6	92.914.000	12	179.300.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	4.5.15.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan Bintek	320	700.000.000	240 orang	438.744.000	320	800.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	4.5.15.14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	2	50.000.000	1 dokumen	38.133.000	2	50.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	4.5.15.22	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	Jumlah SK ijin belajar dan SK ijin penggunaan gelar	180	14.000.000	150 SK	9.242.000	180	15.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	4.5.15.23	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas	30	25.477.000	25 orang	29.900.000	30	25.477.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
12	4.5.15.24	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah pegawai yang mendapat kenaikan gaji berkala	300	17.150.000	400 SK	17.150.000	300	17.150.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
13	4.5.15.26	Administrasi pemberkasan CPNSD	Jumlah Nota persetujuan NIP dan SK CPNS	150	102.670.000	150 buah	104.345.000	150	102.670.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
14	4.5.15.28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	Jumlah SK perpanjangan/pemberhentian tenaga honorer dan perjanjian kontrak	64	20.000.000	66 buah	23.773.000	59	18.500.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	4.5.15.30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Jumlah layanan dan update data pegawai (mutasi, gelar, KP, dan pensiun)	800	63.000.000	1200 PNS	65.095.000	800	76.250.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
16	4.5.15.31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	Jumlah surat keputusan Jabatan Fungsional yang diterbitkan	150	56.852.000	150 buah	78.229.000	150	60.800.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
17	4.5.15.33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mendapat pembekalan	189	330.750.000	176 orang	427.411.000	207	362.250.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
18	4.5.15.34	Pelantikan Pejabat	Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	5	101.788.000	3 kali	99.075.000	5	122.618.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
19	4.5.15.35	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	Jumlah dokumen elektronik dan jumlah buku formasi	1	73.686.000	1 dokumen	79.983.000	1	77.560.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
20	4.5.15.40	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat	450	88.875.000	450 buah	90.550.000	450	88.875.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
21	4.5.15.41	Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP dan dokumen penilaian prestasi kerja PNS	6000	40.500.000	6106 dokur	38.111.000	6000	48.500.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
22	4.5.15.42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	Jumlah dokumen kepegawaian digital	25000	56.000.000	20000 doku	48.586.000	20000	62.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
23	4.5.15.44	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	Jumlah SK Pensiun dan piagam penghargaan penghargaan purna tugas	182	72.649.000	370 buah	99.949.000	181	70.318.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	4.5.15.55	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah penyelenggaran Mutasi dan seleksi JPT			3 kegiatan	299.255.000		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
25	4.5.15.60	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	250	622.400.000	206 orang	111.372.000	250	550.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
26	4.5.15.61	Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan JKK	6	45.000.000	6 orang	47.799.000	6	45.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
27	4.5.15.63	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar	10	20.000.000	18 orang	11.000.000	10	20.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
28	4.5.15.67	Penyusunan peraturan manajemen SDM aparatur	Jumlah rancangan peraturan/pedoman manajemen SDM aparatur			4 dokumen	86.214.000		0	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
29	4.5.15.38	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Uji kompetensi	410	186.900.000	100 orang	203.682.000	150	148.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
30	4.5.15.27	Penataan dan Penyelesaian Adminsitrasi KARIS/KARSU/KARPEG/KPE	Jumlah KARIS/KARSU/KPE /KARPEG/TASPEN yang diterbitkan			300 buah	86.093.000		0	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
31	4.5.15.65	verifikasi dan Monitoring STK SKP	Jumlah dokumen PSTK SKP			29 dokume	16.548.000		0	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
32	4.5.15.68	Pengukuran index profesionalitas ASN	Indek profesionalitas ASN			1 dokumen	47.907.000		0	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
33	4.5.15.54	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian			28 kegiatan	0		0	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
34	4.5.15.71	Pengukuran IKM Layanan Kepegawaian	Jumlah Laporan IKM			1 laporan	0		0	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	4.5.15.72	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah SK mutasi PNS			150 SK	47.043.000		0	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4,6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan**											
	4.6.15	**Program Pendidikan Kedinasan**			**1.454.317.000**		**1.498.678.000**		**1.400.000.000**				
1	4.6.15.1	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	175	350.000.000	92 orang	200.000.000	200	400.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.6.15.2	Pendidikan penjenjangan struktural	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan perjenjangan struktural	35	1.104.317.000	32 orang	1.298.678.000	35	1.000.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**15.000.000**		**6.571.000**		**15.000.000**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan arsip	1	15.000.000	12 bulan	6.571.000	1	15.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4,6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan**											
	4.6.16	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**800.000.000**		**1.807.667.000**		**850.000.000**				
1	4.6.16.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi			450 orang	46.767.000		0	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.6.16.1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	150	500.000.000	150 orang	1.560.900.000	150	600.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.6.16.4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	35	300.000.000	27 orang	200.000.000	30	250.000.000	BKPP	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
			TOTAL		**6.853.089.494**		**7.924.305.000**		**7.029.739.494**				

MATRIKS
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan
URUSAN : Penunjang _Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,7	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan**											
	4.7.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**512.300.000**		**430.141.000**		**591.600.000**				
1	4.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Layanan Telepon, Internet, Air, dan Listrik	4	37.000.000	12 bulan	32.004.000	4	39.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	54	ExBAU
2	4.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Perpanjang STNK dan PKB Kendaraan Dinas	13	6.300.000	9 Kendaraa	6.000.000	15	7.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	54	ExBAU
3	4.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen Keuangan dan Barang	12	85.000.000	12 bulan	84.000.000	12	102.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	69	ExBAU
4	4.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kerja	20	52.000.000	33 jenis ; 2	55.898.000	20	54.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
5	4.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	40	19.000.000	46 jenis	19.000.000	40	23.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	44	ExBAU
6	4.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Foto Copy Dokumen Kantor	15	20.000.000	9 jenis	17.000.000	15	24.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
7	4.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen /Alat Listrik dan Jasa Tukang Listrik	10	11.000.000	9 jenis	7.000.000	10	15.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
8	4.7.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Rumah Tangga	10	10.000.000	8 jenis	3.320.000	12	15.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
9	4.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar	5	10.000.000	12 bulan : 3	4.500.000	5	13.500.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
10	4.7.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jasa Isi Ulang Tabung Gas	8	4.000.000	12 tabung	1.749.000	8	5.500.000	Badan Peneli	Dana Alok	54	ExBAU
11	4.7.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan, snack dan Minum	500	20.000.000	600 orang	20.000.000	600	25.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
12	4.7.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	35	175.000.000	100 kegiata	130.603.000	35	200.000.000	Jakarta, Tang	Dana Alok	59	ExBAU
13	4.7.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kontrak	3	54.000.000	2 orang ; 2 j	45.320.000	3	57.600.000	Badan Peneli	Dana Alok	69	ExBAU
14	4.7.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Simbol, Lambang negara dan pakaian pengatur Keamanan Kantor	8	9.000.000	2 jenis	2.747.000	8	11.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
15	4.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat/dokumen dinas			100 perangl	1.000.000		0	Kota Magela	Dana Alok	39	ExBAU
	4.7.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**499.000.000**		**173.964.000**		**601.000.000**				
1	4.7.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		0	0	4 jenis	0	3	75.000.000	Balitbang Ko	Dana Alok	60	ExBAU
2	4.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung , halaman Kantor Terpelihara	1000	66.000.000	1900 m2	31.064.000	1000	85.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	54	ExBAU

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4.7.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	12	210.000.000	9 kendaraan	116.000.000	12	250.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
4	4.7.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara	10	25.000.000	12 jenis	8.900.000	10	33.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
5	4.7.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan jaringan	5	40.000.000	2 jenis	15.000.000	5	48.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
6	4.7.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebeleur kantor terpelihara	22	8.000.000	7 unit	3.000.000	22	10.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
7	4.7.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		0	0	2 unit	0	2	50.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
8	4.7.2.10	Pengadaan mebeleur		0	0	6 unit meja	0	2	50.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
9	4.7.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		2	100.000.000	2 Paket	0	0	0	Badan Peneli	Dana Alok	84	ExBAU
10	4.7.2.33	Pengadaan Papan Informasi			0	1 Unit	0		0	badan Peneli	Dana Alok	54	ExBAU
11	4.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor		2	50.000.000	2 Jenis	0		0	badan Peneli	Dana Alok	69	ExBAU
	4.7.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**81.500.000**		**90.237.000**		**103.000.000**				
1	4.7.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja, RFK, Laporan Keuangan dan Prognosis	14	12.000.000	4 jenis	25.260.000	14	14.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
2	4.7.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja SKPD dan Renja perubahan SKPD	10	12.000.000	2 dokumen	13.297.000	10	14.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
3	4.7.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKAP		25.000.000	4 dokumen	13.494.000		33.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
4	4.7.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP SKPD		10.000.000	5 buku	6.804.000		12.000.000	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
5	4.7.6.26	Evaluasi Rencana Strategis OPD		1	10.000.000	1 dokumen	0	1	12.500.000	Badan Peneli	Dana Alok	83	ExBAU
6	4.7.6.17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Tersusunnya laporan pengendalian kegiatan operasional dan Focus Discusion Group (FGD)	4	12.500.000	4 laporan	16.382.000	4	17.500.000	Badan Peneli	Dana Alok	54	Mempertegas Skenario Kemitraan, ExBAU
7		Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	100	0	1 dok	15.000.000	100	0	Kota Magela	Dana Alok	75	ExBAU
	4.7.15	**Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi**			**338.376.000**		**644.510.000**		**516.307.000**				
1	4.7.15.6	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya kegiatan pameran dan promosi produk teknologi dan inovasi			3 kegiatan	146.273.000		0	Jawa Tengah	Dana Alok	96	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4.7.15.1	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	Jumlah Krenova Terjaring	17	120.000.000	17 produk b	139.430.000	17	175.000.000	Kota Magela	Dana Alok	96	Tema RKPD 2019, Program prioritas RPJM
3	4.7.15.4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan SIDa sebagai manifestasi daya saing daerah (Sosialisasi & implementasi roadmap SIDa)	2	42.500.000	2 kegiatan	42.385.000	2	66.500.000	Kota Magela	Dana Alok	65	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity, Program prioritas RPJM
4	4.7.15.2	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	Terselenggaranya kompetisi penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya	4	175.876.000	3 Kegiatan	244.885.000	4	274.807.000	Pemerintah K	Dana Alok	96	Kota Layak Anak, Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
5	4.7.15.5	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	Terjaringnya Inovasi OPD-BUMD sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan OPD-BUMD			5 Pemenang	71.537.000		0	Kota Magela	Dana Alok	99	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, Program prioritas RPJM
	2,18	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**											
	2.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**0**		**12.000.000**		**0**				
					839,992,000				917,944,000				
			SETWAN	12 bln	26,000,000	12 bln		12 bln	29,500,000				
			DPPKD		143,000,000				157,600,000				
			KESBANGPOL		28,587,000				34,590,000				
			BKD		15,000,000				15,000,000				
			DPP		25,830,200				31,254,542				
			LITBANG		50,000,000				70,000,000				
			PERPUS		247,075,000				270,500,000				
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	52%		69%		86%					
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%		82%					
			Persentase Penyelamatan Arsip	53%		60%		67%					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip OPD	0	0	12 bulan	12.000.000	0	0	Badan Peneli	Dana Alok	59	ExBAU
	4,7	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan**											
	4.7.16	**Program Penelitian dan Pengkajian**			**215.000.000**		**627.665.000**		**260.000.000**				

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.7.16.37	Fasilitasi Penelitian Mandiri	Terfasilitasinya penelitian mandiri			2 Penelitian	30.000.000		0	Kota Magela	Dana Alok	94	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	4.7.16.2	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	Tersajinya data dan analisis potensi PAD Kota Magelang sebagai rekomendasi kebijakan	1	120.000.000	1 dokumen	125.522.000	1	150.000.000	Kota Magela	Dana Alok	89	Program prioritas RPJM
3	4.7.16.3	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	Tersusunnya Kajian Strategis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan	45	95.000.000	50 buku	108.805.000	45	110.000.000	Kota Magela	Dana Alok	65	Program prioritas RPJM
4	4.7.16.38	Fasilitasi Penyusunan Buku Ilmiah/Bunga Rampai				2 Buku Ilmia	0		0	Kota Magela	Dana Alok	95	Program prioritas RPJM
5	4.7.16.9	Riset Unggulan Daerah	Tersusunnya Dokumen Riset Unggulan Daerah Kota Magelang			2 Dokumen	105.566.000		0	Kota Magela	Dana Alok	68	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
6	4.7.16.8	Pengelolaan Open Journal System	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan pengambilan kebijakan			2 nomor jur	101.613.000		0	Kota Magela	Dana Alok	55	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
7	4.7.16.36	Analisis Budaya Lokal Kota Magelang	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan pengambilan kebijakan.			1 dokumen	105.289.000		0	Kota Magela	Dana Alok	84	Program prioritas RPJM
8	4.7.16.39	Jajak Pendapat Masyarakat	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan pengambilan kebijakan.			1 dokumen	50.870.000		0	Kota Magela	Dana Alok	55	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
	4.7.17	**Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan**			**22.000.000**		**27.599.000**		**27.000.000**				
			Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	12%		15%		17%					
			Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	60%		70%		75%					
			Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	5%		7%		10%					
			Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	10%		12%		14%					
			Cakupan Penguatan SIDa	45%		55%		65%					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	45%		55%		65%					
1	4.7.17.2	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	Terkelolanya pelaksanaan riset dan kebijakan dengan baik	2	22.000.000	1 dokumen	27.599.000	2	27.000.000	Kota Magela	Dana Alok	59	Mempertegas Skenario Kemitraan
	4.7.18	**Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi**			**80.380.000**		**50.211.000**		**125.593.000**				
1	4.7.18.1	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah KI Terdaftar selain Merk	10	80.380.000	10 produk y	50.211.000	10	125.593.000	Kota Magela	Dana Alok	94	Program prioritas RPJM
	4.7.19	**Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan**			**270.020.000**		**549.062.000**		**421.993.000**				
					5,240,000,000				5,814,000,000				
			Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	14%		17%		20%					
			Presentase krenova OPD yang berkualitas	6%		8%		10%					
			Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti	35%		40%		45%					
			Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	12%		15%		17%					
1	4.7.19.5	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi berbasis Peningkatan Kapasitas SDM			4 Produk	228.355.000		0	Kota Magela	Dana Alok	96	Program prioritas RPJM
2	4.7.19.14	Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang	Terfasilitasinya inkubasi bisnis teknologi dan inovasi			2 tenant	59.549.000		0	Kota Magela	Dana Alok	89	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
3	4.7.19.1	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatnya kapasitas SDM, kelembagaan, dan jejaring penelitian dan pengembangan	3	139.195.000	1 seminar &	69.759.000	3	217.493.000	Kota Magela	Dana Alok	65	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM
4	4.7.19.3	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	Tersusunnya rekomendasi kebijakan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan	4	130.825.000	4 dokumen	76.679.000	4	204.500.000	Kota Magela	Dana Alok	83	Mempertegas Skenario Kemitraan, Program prioritas RPJM

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI-TAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TAR3	Tahun2018	TAR4	Tahun 2019	TAR5	Tahun2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.7.19.16	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	Terfasilitasinya Jejaring Penelitian dan Pengembangan			4 seminar	41.800.000		0	Indonesia	Dana Alok	95	Program prioritas RPJM
6	4.7.19.9	Fasilitasi kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	Terfasilitasinya Keikutsertaan dalam Anugerah IPTEK			3 Penghargа	72.920.000		0	Kota Magela	Dana Alok	39	Program prioritas RPJM
			TOTAL		**2.018.576.000**		**2.605.389.000**		**2.646.493.000**				

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimulai sejak penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Penetapan Indikator Kinerja Daerah dipertegas dalam bab tersendiri. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pembeda dari regulasi sebelumnya.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Kota Magelang 2005-2025.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah Indikator Kinerja Utama Kota Magelang dalam rangka pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Magelang sebagaimana tertuang pada Tabel 6-1 dan 6-2 sebagai berikut :

Tabel VI.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	PertumbuhanEkonomi	5,07%	5,18% ± 0,25%	5,04% ± 0,25%	5,05% ± 0,25%	5,11% ± 0,25%	5,21% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%
2	PDRB per Kapita (tahundasar 2010, Rp/kapita/tahun)	53.543.836,59*	58.309.122,98	63.394.588,17	68.656.817,64	74.314.414,01	80.296.686,81	86.475.098,49	86.475.098,49
3	LajuInflasi	2,7%	3,57% - 5,15%	3,36% - 4,94%	3,15% - 4,73%	2,93% - 4,51%	2,72% - 4,30%	2,51% - 4,09%	2,51% - 4,09%
4	IndeksGini	0,3438 - 0,3762	0,3435-0,3637	0,343-0,3569	0,3421-0,3523	0,341-0,3489	0,3397-0,3461	0,338-0,3438	0,338-0,3438
5	Indeks Williamson	0,0806	0,0892	0,0804	0,0725	0,0653	0,0588	0,0530	0,0530
2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	Tingkat Kemiskinan/ AngkaKemiskinan	9,05%	8,36% – 8,89%	7,41% – 8,09%	6,98% – 7,38%	6,65% - 6,90%	6,42% - 6,61%	6,12% - 6,40%	6,12% - 6,40%
2	Indeks Pembangunan Manusia	76,39	76,61	76,9	77,26	77,61	78	78,37	78,37
	a. Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,36 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
	b. Harapan Lama Sekolah	13,08Tahun	13,27Tahun	13,45Tahun	13,63Tahun	13,82Tahun	14Tahun	14,19Tahun	14,19Tahun
	c. AngkaHarapanHidup	76,58 Tahun	76,67 Tahun	76,71 Tahun	76,76 Tahun	76,8 Tahun	76,85 Tahun	76,9 Tahun	76,9 Tahun
	d. Pengeluaran per Kapita (Rp.)	10.793.000	10.886.000	11.083.570	11.281.140	11.478.710	11.676.290	11.873.860	11.873.860
3	Indeks Pembangunan Gender	95,66	95,79	95,9	95,99	96,08	96,16	96,23	96,23
4	IndeksPemberdayaan Gender	78,83	78,96	79,2	79,35	86,3	86,95	87,15	87,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6,43% - 6%	6% -5%	5,8% - 5%	5,5% - 5%	5,2% - 5%	5% – 4,5%	5% – 4,5%
6	AngkaPertumbuhanPenduduk	0,337%	0,353%	0,244%	0,384%	0,199%	0,137%	0,133%	0,133%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	FokusUrusanPemerintahanWajibPelayananDasar								
a	Pendidikan								
	1 Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,36 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
	2 Persentase sekolah berstandar nasional								
	- SD	30,66%	35,66%	40,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
	- SMP	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	3 APM SD	96,51%	96,91%	97,31%	97,71%	98,11%	98,51%	98,91%	98,91%
	4 APK SD	108,15%	110%	112%	114%	116%	118%	120%	120%
	5 APM SMP	74,62%	75%	76%	78%	80%	82%	84%	84%
	6 APK SMP	81,92%	82%	85%	88%	90%	96%	100%	100%
	7 Angka Melek Huruf	97%	97,35%	97,67%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
	8 Persentase sarana prasarana penyedia layananpendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
b	Kesehatan								
	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	0	3 buah(23%)	5 buah(15%)	7 buah(54%)	10 buah (77%)	13 buah(100%)	13 buah(100%)	13 buah(100%)
	2 Angka KematianIbu/ 100.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70
	3 Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5
	4 Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
	5 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	7 Angka Kesakitan DBD	130.93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
	8 Angka Prevalensi TB	128.33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101
	9 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
	10 Persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%
	11 Persentase sarana prasarana penyedia layanankesehatan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	0%	10%	20%	30%	40%	50%	50%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau								
	- Privat	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	- Publik	18,37%	18,37%	18,37%	18,42%	18,44%	18,46%	18,50%	18,50%
	2. Rasi obangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%	33%
d	Perumahan Rakyat danKawasanPermukiman								
	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%
	2 Persentasejumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%	100%
	3 Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	4 Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	6%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
	5 Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%
e	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%
	2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%
	3 Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	4 Angka kriminalitas	14,14%	13,64%	13,14%	12,64%	12,14%	11,64%	11,14%	11,14%
	5 Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	11,50%	12%	12%	12,50%	12,50%	12,50%
	6 Prosentase penurunan kasus narkoba	-13.04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
f	Sosial								
	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%
	2 Rasiotempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	3 Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1	2
2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar								
a	Tenaga Kerja								

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
b	PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak								
	1 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%
	2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%
	3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%
c	Pangan								
	1 Ketersediaan pangan utama beras	12.729 Ton	12.780 Ton	12.831 Ton	12.882 Ton	12.933 Ton	12.985 Ton	13.037 Ton	13.037 Ton
d	LingkunganHidup								
	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,12	58	62	65	67,51	68	68,5	68,5
	2 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84
	3 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1
	4 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56
	5 Volume sampah yang dibuangke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7
e	PemberdayaanMasyarakatdanDesa								
	1 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	51,72%	58,62%	65,52%	75,86%	82,76%	89,66%	89,66%
	2 Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
f	Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana								
	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak
g	Perhubungan								
	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,25

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
h	Komunikasi dan Informatika								
	1 Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase pelayanan berbasis teknolog iinformasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
i	Penanaman Modal								
	1 Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%
	2 Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
j	Kepemudaan dan Olahraga								
	1 Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5buah	6buah	6buah	7buah	7buah	8buah	8buah	8buah
	- Regional	4buah	4buah	4buah	5buah	5buah	6buah	6buah	6buah
	- Nasional	1buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah
	- international	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14buah	17buah	17buah	17buah	17buah	17buah	20buah	20buah
	- Regional	8buah	10buah	10buah	10buah	10buah	10buah	11buah	11buah
	- Nasional	4buah	5buah	5buah	5buah	5buah	5buah	6buah	6buah
	- international	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	3buah	3buah
k	Statistik								
	1 PersentasePublikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
l	Kebudayaan								
	1 Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
	2 Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
	3 Perlindungan situs a tau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
m	Perpustakaan								
	1 Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%
	2 Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305
n	Kearsipan								
	1 Persentasepengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%	72%
3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan								
a	Pariwisata								
	1 Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	3,20%	3,40%	3,60%	3,80%	4,00%	4,20%	4,40%	4,40%
	2 Jumlah Wisatawan								
	- Nusantara (orang)	1.133.373	1.134.846	1.136.435	1.138.140	1.139.961	1.141.899	1.143.954	1.143.954
	- Mancanegara (orang)	5.171	5.178	5.185	5.193	5.201	5.210	5.219	5.219
b	Perdagangan								
	1 Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%
	2 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar Inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%
	3 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a	Perencanaan								
	1 Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
	2 Persentaseusulanmasyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
b	Keuangan								
	1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,40%	19,73%	26,34%	30,33%	32,55%	34,21%	36,35%	36,35%
	2 Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
	3 Rasioke tergantungan Keuangan Daerah terhadap dana pusat	83,60%	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
	4 NilaiOpini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
c	Kepegawaian, PendidikandanPelatihan								
	1 Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%
d	PenelitiandanPengembangan								
	1 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
e	Fungsi Lain								
	1 Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
	2 Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14
	3 Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
	4 Persentasepelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	30%	45%	55%	65%	75%	85%	85%
	5 Persentase perkembangan kerja sama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
	6 Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	100%	100%
	7 Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
C	APEK DAYA SAING DAERAH								
	1 Indeks Reformasi Birorasi	50,26	56,21	57,00	57,51	58,00	58,51	59,00	59,00
	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71 (B)	74,80 (B)	75 (B)	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	80 (B)
	3 Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	79%	79%	82%	83%	84%	85%	86%	86%
	4 Tingkat Kematangan Kota Cerdas	Scattered (48,89)	Scattered (48,90 – 51,5)	Scattered (51,6 – 54,5)	Scattered (54,6 – 57,5)	Scattered (57,6 – 59,9)	Integrative (60 – 62,5)	Integrative (62,6 – 65)	Integrative (62,6 – 65)
	5 Tingkat Kerukunanhidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 6-2

Indikator Kinerja Utama

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan menuju cerdas dan berdaya saing.	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	Banyaknya murid (SD/MI) dibagi banyaknya penduduk usia (7-12 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid (SD/MI) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 7-12 th
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	Banyaknya murid usia (7-12 th) dibagi banyaknya penduduk usia (7-12 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid usia (7-12 th) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 7-12 th
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	Banyaknya murid (SMP/MTs) dibagi banyaknya penduduk usia (12-15 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid (SMP/MTs) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 12-15 th
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	Banyaknya murid usia (12-15 th) dibagi banyaknya penduduk usia (12-15 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid usia (12-15) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 12-15 th
	5. Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data IPM
	6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data IPM
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur)	- Dinas Kesehatan	- Data IPM

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. AKI/ 1.000 KH	Angka	Jumlah kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dibagi Jumlah kelahiran hidup x 100.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	3. AKB/ 1.000 KH	Angka	Jumlah kematian bayi dibagi Jumlah kelahiran hidup x 1.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	4. AKABA	Angka	Jumlah kematian balita dibagi Jumlah kelahiran hidup x 1.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	5. Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	Jumlah balita penderita gizi buruk berdasarkan pengukuran Berat Badan Menurut Umur serta Berat Badan Menurut Tingi Badan berada di bawah garis merah Grafik Pertumbuhan Balita pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Balita yang ditimbang x 100%	- Dinas Kesehatan	- Data F3 Gizi
	6. Angka Kesakitan DBD	Angka	Jumlah penderita DBD dalam satu tahun dibagi Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama x 10.000	- Dinas Kesehatan	- Laporan Kewaspadaan Dini RS
	7. Angka Prevalensi Kasus TB	Angka	Jumlah pasien TB yang ditemukan dan diobati selama setahun dibagi Jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan kurun waktu yang sama x 100.000	- Dinas Kesehatan	- Laporan Sistim Informasi TB Terpadu
	8. Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	%	Jumlah penderita HIV usia 15-49 tahun yang ditemukan selama setahun dibagi Jumlah estimasi populasi kunci dalam wilayah dan kurun waktu yang sama x 100%	- Dinas Kesehatan	- Laporan Sistem Informasi HIV-AIDS
Meningkatnya kontribusi sektor, perdagangan bagi perekonomian daerah	1. Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	%	PDRB sektor perdagangan/Total PDRB	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Data PDRB
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks kualitas lingkungan hidup diukur dengan 3 Indeks yaitu: Indek pencemaran air, Indeks	- Dinas Lingkungan Hidup	- Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pencemaran udara dan Indeks tutupan vegetasi; Indeks Pencemaran Air sbb: Pi = √ (Ci/Li)max2 +(Ci/Li)rataan Indeks Pencemaran Udara sbb: IP NO2+IP SO2 Indeks Tutuan Vegetasi sbb: LHP + LHS		
Meningkatnya kualitas insfrastruktur Kota Magelang	1. Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik	%	Panjang jalan, panjang seluruh jembatan, panjang trotoar dan panjang drainase dalam kondisi baik	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Data Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Trotoar
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Kota Magelang	1. Luas Kawasan Kumuh	ha	Rasio Luas kawasan kumuh (Luas Kawasan Kumuh dalam Ha)	- Dinas Perumahan dan Permukiman	- Data Kondisi Kawasan Kumuh per Kelurahan
	2. Prosentase Rumah Tidak Layak Huni	%	Jumlah RTLH dibagi Jumlah total rumah x 100%	- Dinas Perumahan dan Permukiman	- Data Kondisi Perumahan per Kelurahan
Meningkatnya keamanan, dan keselamatan transportasi di Kota Magelang	1. Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Angka	Tingkat keselamatan lalu lintas tiap km per 100.000 penduduk per 100.000	- Dinas Perhubungan	- Data Keselamatan Lalu Lintas
Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1. Jumlah Investor	Investor	Jumlah investor	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investor
	2. Pertumbuhan nilai investasi PMA	%	{(nilai investasi PMA th n - nilai investasi PMA th n- 1) dibagi nilai investasi th n -1 } X 100 %	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investasi
	3. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	%	{(nilai investasi PMDN th n - nilai investasi PMDN th n- 1) dibagi nilai investasi th n -1 } X 100 %	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investasi
Meningkatnya ketahanan pangan	1. Ketersediaan pangan utama beras (ton)	ton	Jumlah Stok Beras (Ton)	- Dinas Pertanian dan Pangan	- Data Ketersediaan Pangan
Meningkatnya daya saing tenaga kerja Kota Magelang	1. Persentase penyerapan tenaga kerja	%	(Jumlah pengangguran terbuka / Jumlah angkatan kerja) x 100%	- Dinas Tenaga Kerja	- Data Ketenagakerjaan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Persentase Penurunan PMKS	%	(Jumlah PMKS tahun n-1 - jmlh PMKS tahun n / jumlah PMKS tahun n-1) x 100%	- Dinas Sosial	- Data Kesejahteraan Sosial
	2. Pendapatan Perkapita	Rupiah	Pendapatan yang diterima oleh masing-masing perkepala penduduk. Pendapatan perkapita	- OPD Lintas Sektor	- Data PDRB

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			tersebut dihasilkan dengan membagi pendapatan regional bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun		
	3. Angka Kemiskinan	%		- OPD Lintas Sektor	- Data Kemiskinan
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1. Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	Angka	Jumlah anak dibandingkan dengan jumlah keluarga	- DP4KB	- Data pertumbuhan penduduk
Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	1. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	- DP4KB	- Data IPG
	2. Rasio KDRT	%	Jumlah KDRT dibagi Jumlah Rumah Tangga x 100%	- DP4KB	- Data KDRT
Meningkatnya pelestarian budaya Kota Magelang	1. Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan	%	Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan dibandingkan jumlah kelompok seni budaya di Kota Magelang dikalikan 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Sarana Prasarana Kebudayaan - Data Pelaku Budaya - Data Jenis Adat Budaya
	2. Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	situs/bcb	Dihitung berdasarkan jumlah situs dan bangunan cagar budaya yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Situs dan Bangunan Cagar Budaya
Meningkatnya daya tarik wisata Kota Magelang	1. Jumlah Wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	a. Nusantara	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	b. Mancanegara	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	2. Lama Tinggal Wisatawan	hari	Lama Tinggal Wisatawan di Kota Magelang	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Lama Tinggal Wisatawan
Meningkatnya toleransi antar umat beragama	1. Prosentase penurunan penyakit masyarakat	%	((Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1)- (Jumlah penyakit masyarakat tahun n)/(Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1))	- Badan Kesbangpolinmas - Satpol PP - Dinas Sosial	- Data Penyakit Masyarakat

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			dikalikan100%		
	2. Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	%	Komponen dari indikator adalah kerukunan hidup antar suku, adat, ras dan agama. Masing - masing komponen bernilai 25%. Rumus 100% - (% komponen konflik)	- Badan Kesbangpolinmas	- Data Konflik Masyarakat
Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1. Angka kriminalitas	Angka	(Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun/jumlah penduduk) dikalikan 10.000	- Badan Kesbangpolinmas - Satpol PP	- Data Kriminalitas
	2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	(Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan) dikalikan 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran Perda
	3. Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	Jumlah penyelesaianan pelanggaran K3 dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 dikalikan 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran K3

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 merupakan perencanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota Magelang merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 memerlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) melalui Forum OPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita–cita masyarakat Kota Magelang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kota Magelang Tahun 2019, tidak hanya memuat kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program–program RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2019, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Starategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra–OPD).
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan di Kota Magelang.
7. alam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Badan Perencanaan Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2019 ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja–OPD) dan Kebijakan Umum APBD 2019 serta Prioritas dan Pagu Indikatif OPD 2019.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO